jdih.salatiga.go.id

SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa perencanaan pembangunan Kota Salatiga merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya bertujuan untuk meningkatkan hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera;
b. bahwa masa jabatan Wali Kota Salatiga berakhir pada tahun 2022, maka untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah dalam masa transisi, perlu disusun rencana pembangunan daerah yang terarah sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 14);
6. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 127 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memipin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005–2025, yang selanjutnya disebut RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030.
9. Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026, yang selanjutnya disebut RPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
13. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah bentuk instrumen Kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah.
16. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
17. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.

BAB II
RPD

Pasal 2

(1) RPD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
(2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW.
(3) Penyusunan RPD Tahun 2023-2026 dilakukan bersamaan dengan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 3

RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:
a. penyelaras target indikator makro dan Program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
b. membuat kesesuaian sasaran pokok dan arah Kebijakan RPJPD sampai dengan tahun 2025;
c. pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai periode RPD;
d. pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPD;
e. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPD; dan
f. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPD.

Pasal 4

(1) RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. BAB I Pendahuluan
    b. BAB II Gambaran Umum
    c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah
    d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis
    e. BAB V Tujuan dan Sasaran
    f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas
    g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
    h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
    i. BAB IX Penutup
(2) Dokumen RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pengendalian terhadap perumusan Kebijakan RPD;
    b. pelaksanaan RPD; dan
    c. evaluasi terhadap hasil RPD.
(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RPD

Pasal 6

(1) Perubahan RPD dapat dilakukan apabila:
    a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dan kondisi eksisting;
    b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan
    c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Perubahan RPD Tahun 2023-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi Kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(3) Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RKPD dan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Penyusunan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada RPD dan RPJPD tahapan kelima yaitu tahun 2020-2025, serta mengacu pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah pada periode berkenaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 21 Maret 2022

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 21 Maret 2022

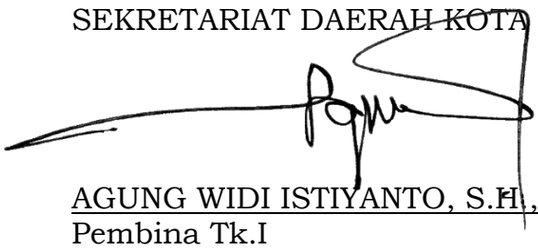
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2022 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19640402 198603 1 022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR viii

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen I-4
1.4. Maksud dan Tujuan I-6
1.5. Sistematika Penulisan I-7

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1. Aspek Geografi II-1
2.1.2. Kondisi Demografi II-26
2.2. Aspek Standar Pelayanan Minimal (SPM) II-37
2.2.1. Evaluasi terhadap Pencapaian SPM Bidang Pendidikan II-37
2.2.2. Evaluasi terhadap Pencapaian SPM Bidang Kesehatan II-37
2.2.3. Evaluasi terhadap Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum II-39
2.2.4. Evaluasi terhadap Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat II-39
2.2.5. Evaluasi terhadap Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II-40
2.2.6. Evaluasi terhadap Pencapaian SPM Bidang Sosial II-40
2.3. Aspek Kesejahteraan Rakyat II-40
2.3.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-40
2.3.2. Fokus Kesejahteraan Sosial II-67
2.4. Aspek Pelayanan Umum II-74
2.4.1. Fokus Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar II-74
2.4.2. Fokus Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar II-89
2.4.3. Fokus Pelayanan Urusan Pemerintahan Pilihan II-119
2.4.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan II-130
2.4.5. Fungsi Penunjang Lainnya II-136

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1. Kinerja Keuangan Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021 ..... III-1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD III-2
1. Pendapatan Daerah III-5

2. Belanja Daerah III-11
3. Pembiayaan Daerah III-15
4. Evaluasi atas Kebijakan Periode Sebelumnya III-18
3.1.2. Neraca Daerah III-20
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-27
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran III-27
3.2.2. Analisis Pembiayaan III-29
3.3. Kerangka Pendanaan III-31
3.3.1. Proyeksi berdasarkan Masa Lalu III-31
3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan III-40

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan IV-1
4.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar IV-1
4.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar IV-8
4.1.3. Urusan Pilihan IV-19
4.1.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan IV-23
4.1.5. Fungsi Penunjang Lainnya IV-25
4.2. Isu Strategis IV-26

BAB V TUJUAN DAN SASARAN V-1

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-1
6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 ..... VI-1
6.2. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023..... VI-3
A. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Wilayah Jawa Tengah VI-10
B. Arah pembangunan Kewilayahan Kota Salatiga VI-12
6.3. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Salatiga Tahun 2005-2025 ..... VI-17
6.4. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Salatiga Tahun 2021-2030 ..... VI-20
6.5. Strategi Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 ..... VI-30
6.6. Arah Kebijakan Jangka Menengah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 ..... VI-46

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-1

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ... VIII-1

BAB IX PENUTUP IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Data Jumlah RT/RW dan Luas Wilayah Kota Salatiga Berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan	II-1
Tabel 2.2.	Kelerengan Lahan Kecamatan di Kota Salatiga	II-6
Tabel 2.3.	Suhu Udara di Kota Salatiga	II-6
Tabel 2.4.	Curah Hujan Tahunan di Kota Salatiga	II-8
Tabel 2.5.	Ordo Tanah di Kota Salatiga	II-12
Tabel 2.6.	Penggunaan Lahan Kota Salatiga	II-12
Tabel 2.7.	Penduduk Kota Salatiga berdasarkan Kecamatan, Jenis Kelamin dan Sex Ratio, 2021	II-26
Tabel 2.8.	Data Persebaran Penduduk per Kecamatan di Kota Salatiga Tahun 2017-2021	II-27
Tabel 2.9.	Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021	II-31
Tabel 2.10.	Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2021	II-32
Tabel 2.11.	Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga Tahun 2017-2020	II-43
Tabel 2.12.	PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (Milliar Rupiah)	II-43
Tabel 2.13.	PDRB ADHK Tahun Dasar menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (Milliar Rupiah)	II-44
Tabel 2.14.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Salatiga Tahun 2017-2020	II-63
Tabel 2.15.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2021.....	II-64
Tabel 2.16.	Indeks Pemberdayaan Gender 2020-2021	II-66
Tabel 2.17.	Perkembangan APK PAUD, SD/MI, SMP/MTs di Kota Salatiga Tahun 2017-2021	II-69
Tabel 2.18.	Perkembangan APM SD/MI dan SMP/MTs di Kota Salatiga Tahun 2017-2021	II-70
Tabel 2.19.	Perkembangan Angka Melek Huruf dan Angka Putus Sekolah di Kota Salatiga Tahun 2017-2021	II-71
Tabel 2.20.	Kinerja Pendidikan Usia Dini Kota Salatiga Tahun 2017-2021.....	II-75
Tabel 2.21.	Kinerja Pencapaian Pendidikan Dasar Kota Salatiga Tahun 2017-2021.....	II-76

Tabel 2.22. Kinerja Pendidikan Non Formal Kota Salatiga Tahun 2017-2021 ..... II-77
Tabel 2.23. Kinerja Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kota Salatiga Tahun 2017 – 2021..... II-78
Tabel 2.24. Kinerja Upaya Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2017-2021..... II-80
Tabel 2.25. Kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun 2017-2021 ..... II-83
Tabel 2.26. Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga Tahun 2017-2021 ..... II-85
Tabel 2.27. Kinerja Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2017–2021 ..... II-87
Tabel 2.28. Kinerja Sosial Tahun 2017 – 2021..... II-88
Tabel 2.29. Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2017-2021..... II-91
Tabel 2.30. Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2021..... II-92
Tabel 2.31. Kinerja Urusan Pangan Kota Salatiga Tahun 2017-2021 ..... II-93
Tabel 2.32. Indikator Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan di Kota Salatiga Tahun 2017-2021 ..... II-95
Tabel 2.33. Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2017-2021 ..... II-96
Tabel 2.34. Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017-2021..... II-99
Tabel 2.35. Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017-2021 ..... II-100
Tabel 2.36. Kinerja Urusan Perhubungan Kota Salatiga Tahun 2017-2021 ..... II-104
Tabel 2.37. Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2017-2021 ..... II-107
Tabel 2.38. Kinerja Koperasi dan UKM Kota Salatiga Tahun 2017-2021..... II-108
Tabel 2.39. Kinerja Urusan Penanaman Modal Kota Salatiga Tahun 2017-2021..... II-110
Tabel 2.40. Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga Tahun 2017-2021..... II-112
Tabel 2.41. Kinerja Urusan Statistik Kota Salatiga Tahun 2017-2021 ..... II-114
Tabel 2.42. Capaian Kinerja Persandian Kota Salatiga Tahun 2017-2021 ..... II-114

Tabel 2.43. Kinerja Pembangunan Urusan Kebudayaan Kota Salatiga Tahun 2017-2021 ..... II-115
Tabel 2.44. Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2017-2021 ..... II-116
Tabel 2.45. Jumlah Pengunjung, Anggota dan Jumlah Koleksi Perpustakaan Umum Kota Salatiga, 2015-2021 ..... II-117
Tabel 2.46. Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2017-2021 ..... II-118
Tabel 2.47. Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Salatiga Tahun 2017-2021 ..... II-119
Tabel 2.48. Luas, produksi, dan jumlah petani ikan di Kota Salatiga Tahun 2021 ..... II-120
Tabel 2.49. Kinerja Pariwisata di Kota Salatiga Tahun 2017-2021..... II-121
Tabel 2.50. Kinerja Pertanian Kota Salatiga Tahun 2017–2021 ..... II-122
Tabel 2.51. Luas dan Produksi Beberapa Komoditas Hortikultura dan Perkebunan di tiap Kecamatan Kota Salatiga Tahun 2020 ..... II-122
Tabel 2.52. Produksi Ternak Utama Kota Salatiga Tahun 2018-2020 ..... II-124
Tabel 2.53. Lahan Pertanian di Kota Salatiga II-124
Tabel 2.54. Kinerja Urusan Perdagangan Kota Salatiga Tahun 2017-2021 ..... II-126
Tabel 2.55. Kinerja Urusan Perindustrian Kota Salatiga Tahun 2017-2021 ..... II-128
Tabel 2.56. Kinerja Urusan Transmigrasi Kota Salatiga Tahun 2017-2021 ..... II-129
Tabel 2.57. Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2017-2021 ..... II-130
Tabel 2.58. Kinerja Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan Kota Salatiga tahun 2017–2021 ..... II-131
Tabel 2.59. Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan Kota Salatiga Tahun 2017-2021 ..... II-133
Tabel 2.60. Kinerja Urusan Penunjang Kepegawaian Kota Salatiga Tahun 2017-2021 ..... II-134
Tabel 2.61. Kinerja Urusan Penunjang Pengawasan Kota Salatiga Tahun 2017-2021 ..... II-136
Tabel 2.62. Kinerja Urusan Penunjang Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2017-2021 ..... II-137
Tabel 2.63. Kinerja Sekretariat Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021 ..... II-139
Tabel 2.64. Kinerja Kecamatan Kota Salatiga Tahun 2017-2021 ..... II-139

Tabel 2.65.	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kota Salatiga Tahun 2017-2021	II-142
Tabel 2.66.	Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017–2021	II-143
Tabel 2. 67.	Indeks Daya Saing Daerah Wilayah Kedungsepur Per Kabupaten/Kota Tahun 2018-2021	II-144
Tabel 2.68.	Proyeksi Indeks Daya Saing Daerah Wilayah Kedungsepur Per Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 ...	II-145
Tabel 2. 69.	Indeks Daya Saing Salatiga Tahun 2021	II-146
Tabel 2. 70	Indeks Daya Saing Salatiga Tahun 2023-2026	II-147
Tabel 3.1.	Pendapatan Daerah Kota Salatiga 2017-2021	III-4
Tabel 3.2.	Penerimaan Masing -masing Komponen Pajak Daerah dan Pertumbuhannya dalam 5 Tahun (2017-2021)	III-10
Tabel 3.3.	Realisasi Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (Rupiah)	III-13
Tabel 3.4.	Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (Rupiah)	III-17
Tabel 3.5.	Analisis Rasio Keuangan Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021	III-21
Tabel 3.6.	Neraca Keuangan Daerah Kota Salatiga Tahun 2012-2020 (Dalam Jutaan Rupiah)	III-22
Tabel 3.7.	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (Rupiah)	III-28
Tabel 3.8.	Perhitungan Defisit Riil Anggaran Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (Rupiah)	III-30
Tabel 3.9.	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, serta Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2017-2021 (Rupiah)	III-31
Tabel 3.10.	Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026	III-34
Tabel 3.11.	Proyeksi Belanja Tahun 2023-2026	III-36
Tabel 3.12.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026	III-41
Tabel 3.13.	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2023-2026 (Rupiah)	III-43
Tabel 3.14.	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2023-2026	III-44
Tabel 5.1.	Keterkaitan Misi & Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dengan Tujuan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026	V-1

Tabel 5.2.	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026	V-5
Tabel 5.3.	Keterkaitan Antara Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026	V-18
Tabel 6.1.	Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kedungsepur Per Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023	VI-12
Tabel 6.2.	Sasaran Angka Kemiskinan Wilayah Kedungsepur Per Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023	VI-13
Tabel 6.3.	Sasaran TPT Wilayah Kedungsepur Per Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023	VI-13
Tabel 6.4.	Sasaran IPM Wilayah Kedungsepur Per Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023	VI-13
Tabel 6.5.	Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Kedungsepur	VI-15
Tabel 6.6.	Prioritas Pembangunan dalam RPJPD Kota Salatiga Tahun 2020-2024	VI-17
Tabel 6.7.	Tujuan, Sasaran dan Strategi RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026	VI-38
Tabel 6.8.	Arah Kebijakan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 ...	VI-48
Tabel 6.9.	Program Prioritas Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2023.....	VI-52
Tabel 6.10.	Program Prioritas Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2024.....	VI-55
Tabel 6.11.	Program Prioritas Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2025.....	VI-57
Tabel 6.12.	Program Prioritas Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2026.....	VI-59
Tabel 7.1.	Perincian Program dan Indikator Kinerja Program	VII-2
Tabel 8.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Salatiga Tahun 2023-2026	VIII-3
Tabel 8.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026	VIII-9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Keterkaitan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	I-5
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kecamatan di Kota Salatiga	II-3
Gambar 2.2.	Ketinggian Tempat (mdpl) Kota Salatiga	II-4
Gambar 2.3.	Kelerengan Lahan (%) Kota Salatiga	II-5
Gambar 2.4.	Suhu Udara di Kota Salatiga	II-7
Gambar 2.5.	Curah Hujan Tahunan Kota Salatiga	II-9
Gambar 2.6.	Peta Geologi Lembar Kota Salatiga	II-10
Gambar 2.7.	Ordo Tanah Kota Salatiga	II-11
Gambar 2.8.	Penggunaan Lahan di Kota Salatiga	II-13
Gambar 2.9.	Sebaran Sungai di Kota Salatiga	II-15
Gambar 2.10.	Peta Pola Ruang dalam RTRW 2021-2030 Kota Salatiga ..	II-25
Gambar 2.11.	Piramida Penduduk Kota Salatiga Tahun 2017	II-28
Gambar 2.12.	Piramida Penduduk Kota Salatiga Tahun 2018	II-28
Gambar 2.13.	Piramida Penduduk Kota Salatiga Tahun 2019	II-29
Gambar 2.14.	Piramida Penduduk Kota Salatiga Tahun 2020	II-29
Gambar 2.15.	Piramida Penduduk Kota Salatiga Tahun 2021	II-30
Gambar 2.16.	Rasio Ketergantungan (Berdasarkan Struktur Umur) Penduduk Kota Salatiga Tahun 2021	II-35
Gambar 2.17.	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Salatiga Tahun 2017-2021	II-36
Gambar 2.18.	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (%).....	II-41
Gambar 2.19.	Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga dengan Kota Lainnya di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah serta Nasional Tahun 2021 (%).....	II-42
Gambar 2.20.	Posisi Relatif PDRB ADHB Kota Salatiga Tahun 2021 (Triliun Rupiah).....	II-46
Gambar 2.21.	Posisi Relatif PDRB ADHK Kota Salatiga Tahun 2021 (Triliun Rupiah).....	II-46
Gambar 2.22.	Perkembangan PDRB per Kapita Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (juta rupiah).....	II-47
Gambar 2.23.	Posisi PDRB per Kapita Kota Salatiga Tahun 2021 (juta rupiah)	II-48
Gambar 2.24.	Perkembangan Inflasi Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (year on year) (%).....	II-49

Gambar 2.25. Posisi Relatif Inflasi Kota Salatiga dibandingkan Kota Lainnya di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2021 (%) II-49
Gambar 2.26. Perkembangan Indeks Gini Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia..... II-50
Gambar 2.27. Posisi Relatif Indeks Gini Kota Salatiga 2015 ..... II-51
Gambar 2.28. Persentase Penduduk Miskin Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Indonesia 2017-2021..... II-52
Gambar 2.29. Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kota Salatiga Tahun 2021 ..... II-52
Gambar 2.30. Jumlah Penduduk Miskin Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (Ribu Jiwa) II-53
Gambar 2.31. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Salatiga dan perbandingannya dengan Provinsi Jateng dan Indonesia Tahun 2017-2021 ..... II-54
Gambar 2.32. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga, Provinsi Jateng dan Nasional Tahun 2017-2021 ..... II-55
Gambar 2.33. Perkembangan IPM Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 ..... II-56
Gambar 2.34. Posisi Relatif IPM Kota Salatiga dibandingkan dengan Kota lain, Provinsi dan Nasional Tahun 2021 ..... II-56
Gambar 2.35. Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Salatiga, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021 ..... II-57
Gambar 2.36. Posisi Relatif Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Salatiga Tahun 2021 ..... II-58
Gambar 2.37. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Salatiga, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021 .. II-59
Gambar 2.38. Posisi Relatif HLS Kota Salatiga Tahun 2021 ..... II-59
Gambar 2.39. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Salatiga, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021 .. II-60
Gambar 2.40. Posisi Relatif Rata-rata Lama Sekolah Kota Salatiga, Kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 ..... II-61
Gambar 2.41. Perkembangan Pengeluaran Perkapita Kota Salatiga, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021 (Ribu Rupiah) ... II-62
Gambar 2.42. Posisi Relatif Pengeluaran Riil per Kapita Kota Salatiga Tahun 2021 (ribu rupiah) II-62
Gambar 2.43. Indeks Pembangunan Gender Kota Salatiga, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2020 ..... II-63
Gambar 2.44. Diagram Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Salatiga Tahun 2021 ..... II-68
Gambar 2.45. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2017-2021..... II-72

Gambar 2.46. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2017-2021 ..... II-73
Gambar 2.47. Usia Harapan Hidup Tahun 2017-2021 ..... II-74
Gambar 2.48. AKB per 1.000 KLH II-81
Gambar 2.49. Tren Total Fertility Rate Kota Salatiga II-82
Gambar 2.50. Peta Rencana Sistem Transportasi Kota Salatiga II-105
Gambar 2.51. Jenis Jalan dan Rencana Pengembangan Terminal Angkutan Umum di Kota Salatiga II-106
Gambar 2.52. Lahan Pertanian (Sawah dan Bukan Sawah) di Kota Salatiga II-125
Gambar 2.53. Kontribusi PAD pada Pendapatan Daerah II-134
Gambar 2.54. Tren Indeks Daya Saing Daerah Kota Salatiga Tahun 2018-2021 ..... II-145
Gambar 2.55. Pencapaian Indeks Daya Saing Salatiga berdasarkan Skor Aspek II-148
Gambar 2.56. Pencapaian Indeks Daya Saing Salatiga berdasarkan Skor Pilar II-148
Gambar 2.57. Analisis Tipologi Klasen Berdasarkan Dimensi Faktor Pasar di Salatiga Tahun 2021 ..... II-149
Gambar 2.58. Analisis Tipologi Klasen Berdasarkan Dimensi Sumber Daya Manusia di Salatiga Tahun 2021 ..... II-149
Gambar 2.59. Analisis Tipologi Klasen Berdasarkan Dimensi Faktor Penguat di Salatiga Tahun 2021 ..... II-150
Gambar 2.60. Analisis Tipologi Klasen Berdasarkan Dimensi Ekosistem Inovasi di Salatiga Tahun 2021 ..... II-150
Gambar 3.1. Grafik Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2021-2020 (Milliar Rupiah) III-6
Gambar 3.2. Grafik Proporsi Unsur-unsur Pendapatan terhadap Total Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga Tahun 2012-2021 ..... III-7
Gambar 3.3. Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah III-8
Gambar 3.4. Grafik Perkembangan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah) III-11
Gambar 3.5. Grafik Proporsi Unsur-unsur Belanja terhadap Total Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (%) III-12
Gambar 3.6. Perkembangan Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (dalam Miliar Rupiah) III-16
Gambar 3.7. Prosentasi Kekurangan/Kelebihan Pencapaian Realisasi Pendapatan Daerah terhadap Proyeksi Pendapatan Tahun 2017-2021 ..... III-18

Gambar 3.8. Tingkat Capaian Realisasi Belanja terhadap Proyeksi Belanja Tahun 2017-2021 ..... III-19
Gambar 3.9. Perkembangan Jumlah Nilai Aset Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (Dalam Miliar Rupiah) III-20
Gambar 6.1. Arah Pengembangan Wilayah Kedungsepur VI-14

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan suatu konsep yang disusun sebelum kegiatan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dengan memiliki batasan waktu yang ditetapkan dalam pencapaiannya. Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan. Sedangkan pembangunan secara umum adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, negara satu dengan negara lain, namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Dalam tataran pemerintahan, perencanaan pembangunan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut, pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang diwujudkan dalam sebuah sistem perencanaan pembangunan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Pada lingkup Pemerintah Daerah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, perencanaan pembangunan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke

Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional. Pembangunan daerah dilaksanakan guna: Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat; Peningkatan dan Pemerataan Kesempatan Kerja; Peningkatan dan Pemerataan Lapangan Berusaha; Peningkatan dan Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik; dan Peningkatan dan Pemerataan Daya Saing Daerah.

Pemerintah Kota Salatiga pada tahun 2017 telah menyelenggarakan pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota. Dari hasil pemilihan tersebut, telah ditetapkan Kepala Daerah terpilih yaitu Bapak Yuliyanto, SE, MM sebagai Walikota dan Bapak Muhammad Haris, SS, M.Si sebagai Wakil Wali Kota untuk periode tahun 2017-2022, melalui pelantikan pada tanggal 22 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-3156 Tahun 2017 Tanggal 18 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Walikota Salatiga Provinsi Jawa Tengah. Masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga akan berakhir pada pada 22 Mei 2022. Dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga dan akan dilaksanakannya pemilu serentak pada tahun 2024, maka perlu dirumuskan perencanaan pembangunan selama tiga tahun ke depan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, mengamanatkan Pemerintah Daerah khusunya Kota Salatiga dimana masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berakhir pada tahun 2022 untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah diselaraskan dengan target indikator makro dan program prioritas nasional sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi sampai dengan Tahun 2025, Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD kabupaten/kota Tahun 2017-2022, Isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku. Pada Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah provinsi/kabupaten/kota dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD provinsi/kabupaten/kota Tahun 2023-2026.

RPD akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Walikota dan Wakil Walikota. Selain itu, RPD akan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan Perangkat Daerah selama tiga tahun kedepan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupatan/Kota Layak Anak;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 20211 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

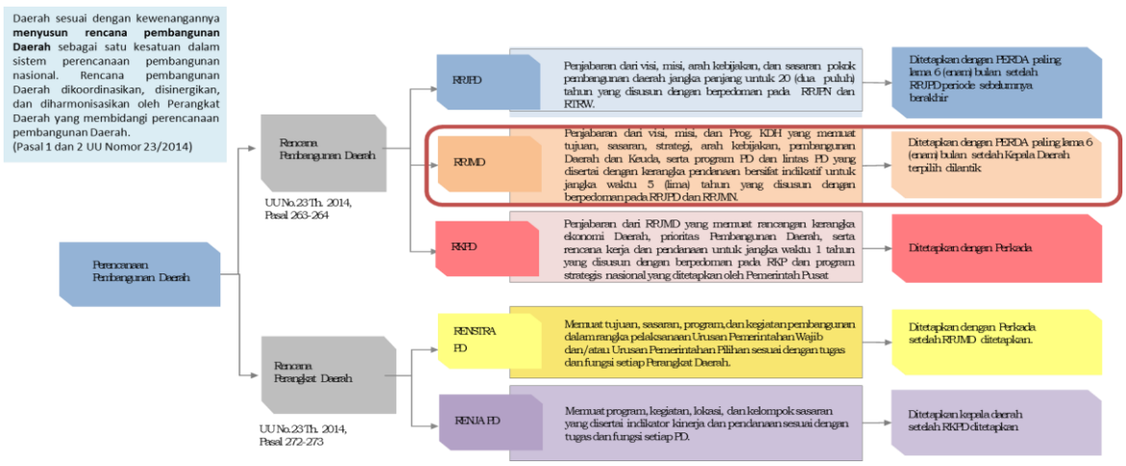
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah yang dimutahirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2022;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan nasional untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, mengenai ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional maka dokumen perencanaan terdiri atas RPJPN, RPJMN, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen perencanaan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Dalam penyusunan RPD Kota Salatiga, tidak terlepas dari hierarki perencanaan pembangunan di atasnya. Penyusunan RPD dijadikan pedoman selama daerah kabupaten/kota mengalami kekosongan jabatan Kepala Daerah dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 dan 2 berisi daerah sesuai dengan kewenangan dalam menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263-264 dokumen Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Rencana Pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmoniskan oleh perangkat daerah yang berwenang. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan pedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program

kepada daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan RPJMN. Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hasil perencanaan pembangunan diselaraskan dengan OPD, Kecamatan maupun daerah kabupaten/kota, daerah provinsi hingga nasional. Adapun keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat dalam Gambar 1 berikut.



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021

Gambar 1.1 Keterkaitan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 merupakan RPD penjabaran dari periode ke empat dari RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025. Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah : "**SALATIGA YANG MAJU, DEMOKRATIS DAN NYAMAN"**, dimana dalam peride tersebut, kebijakan perebncanaan pembangunan daerah untuk perencanaan tahun 2023-2026 adalah :

1. Pemantapan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat;
2. Mendorong pemantapan perekonomian daerah yang tinggi, merata, berkeadilan dan berkelanjutan serta berdaya saing tinggi;
3. Pemantapan aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermanfaat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh insfrastruktur dan teknologi maju;
4. Mewujudjan demokrasi berdasarkan hukum dengan cara dilaksanakannya sistem hukum yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum, rasa

keadilan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dan mendukung tinggi HAM;

5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berwawasan lingkungan : pembangunan dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah kota, diarahkan pada dilaksanakannya tata ruang kota yang berwawasan lingkungan;
6. Mewujudkan pemantapan kualitas dan kuantital fasilitas dan utilitas yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;

RPD Kota Salatiga tahun 2023-2026 selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Selain berpedoman pada RKP, Program Strategis Nasional, RKPD Provinsi Jawa Tengah dsan Pedoman Penyusunan RKPD yang diterbitkan oleh Kemendagri setiap tahunnya.

Penyusunan RKPD berpedoman pada RPD terkait dengan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program prioritas daerah serta program perangkat daerah dengan sasarn, arah kebijakan, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Salatiga tentang RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 juga menjadi pedoman dalam penyusunan rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam rentang 4 (empat) tahun. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan dan indikasi program serta kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 4 (empat) tahunan yang disusun oleh semua Perangkat Daerah.

Renstra PD sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengemukakan tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Penyusunan RPD Kota Salatiga juga memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multi sektor, antara lain : Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/* SDG's), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Salatiga dan dokumen perencanaan pembangunan sektoral lainnya yang terkait.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 untuk memberikan arah pembangunan Kota Salatiga pada periode tahun 2023 -2026 serta

menjadi pedoman bagi seluruh stakeholders baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi jangka panjang Kota Salatiga secara berkesinambungan.

Tujuan dari penyusunan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar pemerintah pusat dan daerah.
2. Sebagai dasar komitmen bersama antara eksekutif, legislatif dan pemangku kepentingan pembangunan terhadap program-program pembangunan daerah untuk kurun waktu tiga tahun mendatang.
3. Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai tolok ukur kinerja Perangkat Daerah dalam menyelesaikan permasalahan strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
4. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Menetapkan indikator kinerja daerah dalam RPD sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja empat tahunan Pemerintah Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, hubungan dokumen RPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang meliputi kinerja keuangan daerah Kota Salatiga tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan tentang analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan yang dihadapi meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan

wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, fungsi penunjang pemerintahan, dan fungsi penunjang lainnya. Analisis pada bab ini akan menjadi penentu arah kinerja pembangunan daerah selama 4 (empat) tahun mendatang.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Bab ini menguraikan tentang strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih dalam menjalankan program prioritas daerah.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan hubungan urusan Pemerintah dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait, beserta program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Selain itu pada bagian ini, dilengkapi pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Program-program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah disertai dengan target pendanaan yang besarannya menyesuaikan terhadap target kinerja yang akan dicapai.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran. Selain itu ditetapkan indikator kinerja pada masing-masing urusan pembangunan daerah.

BAB IX PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang RPD sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta RPD akan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan Perangkat Daerah selama empat tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Aspek Geografi

1. Karakteristik Lokasi, Luas dan Batas Wilayah

Kota Salatiga merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada koordinat antara 110^{0}27'56,81" dan 110^{0}32'.4,64" Bujur Timur dan antara 007^{0}17' dan 007^{0}17'23" Lintang Selatan. Secara administrasi, Kota Salatiga terdiri atas 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Argomulyo, Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Tingkir, dan Kecamatan Sidomukti dengan luas total wilayah Kota Salatiga sebesar 54,98 km^2.

Jumlah kelurahan yang ada di Kota Salatiga adalah 23 (dua puluh tiga) yang terdiri dari, 6 (enam) kelurahan di Kecamatan Argomulyo, terdapat 7 (tujuh) kelurahan di Kecamatan Tingkir, 4 (empat) kelurahan di Kecamatan Sidomukti, dan terdapat 6 (enam) kelurahan di Kecamatan Sidorejo. Jumlah RT dan RW yang ada di 23 Kelurahan adalah 1.127 RT dan 207 RW, data selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Data Jumlah RT/RW dan Luas Wilayah Kota Salatiga Berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan

NO	KECAMATAN/KELURAHAN	LUAS WILAYAH(±Km^2)	Jumlah RT	Jumlah RW
1.	**KECAMATAN SIDOREJO**	**15.61**	**314**	**60**
	1. Kelurahan Salatiga	2.05	81	12
	2. Kelurahan Bugel	2.54	21	6
	3. Kelurahan Sidorejo Lor	2.60	95	16
	4. Kelurahan Blotongan	4.20	72	15
	5. Kelurahan Pulutan	2.13	20	5
	6. Kelurahan Kauman Kidul	2.09	25	7
2.	**KECAMATAN SIDOMUKTI**	**18.14**	**235**	**39**
	1. Kelurahan Mangunsari	2.96	96	16
	2. Kelurahan Dukuh	3.64	74	10
	3. Kelurahan Kecandran	3.48	26	6
	4. Kelurahan Kalicacing	0.72	39	7
3.	**KECAMATAN TINGKIR**	**10.43**	**301**	**49**
	1. Kelurahan Kalibening	0.97	9	3
	2. Kelurahan Sidorejo Kidul	2.75	37	9
	3. Kelurahan Kutowinangun Lor	1.98	91	6
	4. Kelurahan Kutowinangun Kidul	1.04	70	8
	5. Kelurahan Gendongan	0.58	38	5
	6. Kelurahan Tingkir Tengah	1.38	32	10
	7. Kelurahan Tingkir Lor	1.73	24	8

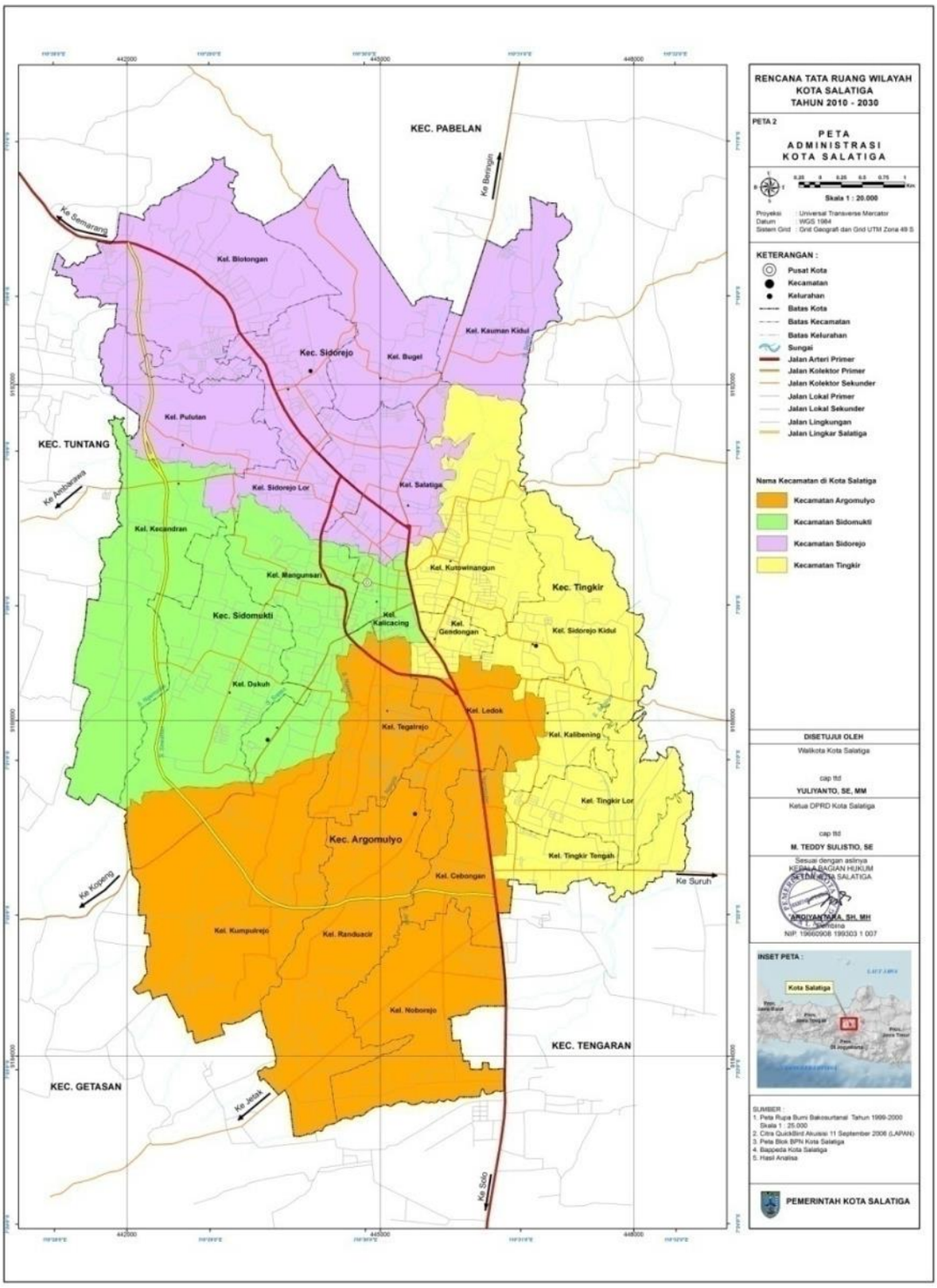
NO	KECAMATAN/KELURAHAN	LUAS WILAYAH(±Km^2)	Jumlah RT	Jumlah RW
4.	**KECAMATAN ARGOMULYO**	**18.14**	**277**	**58**
	1. Kelurahan Ledok	1.93	71	14
	2. Kelurahan Cebongan	1.50	22	6
	3. Kelurahan Tegalrejo	1.96	62	9
	4. Kelurahan Randuacir	3.93	41	9
	5. Kelurahan Kumpulrejo	5.63	44	10
	6. Kelurahan Noborejo	3.19	37	10

Sumber : Bag Pemerintahan, 2021

Kota Salatiga terletak pada jalur regional Jawa Tengah yang menghubungkan kota Semarang dan Surakarta. Kota Salatiga berada ditengah Kabupaten Semarang, adapun batas wilayah Kota Salatiga terhadap Kabupaten Semarang adalah:

Sebelah Utara	:	▪ Kecamatan Pabelan (Desa Pabelan, Kauman Lor dan Pejaten) ▪ Kecamatan Tuntang (Desa Kesongo dan Watu Agung)
Sebelah Timur	:	▪ Kecamatan Pabelan (Desa Ujung-Ujung, Sukoharjo dan Glawan) ▪ Kecamatan Tengaran (Desa Bener, Tegal Waton dan Nyamat)
Sebelah Selatan	:	▪ Kecamatan Getasan (Desa Sumogawe, Samirono, Jetak) ▪ Kecamatan Tengaran (Desa Patemon dan Karang Duren)
Sebelah Barat	:	▪ Kecamatan Tuntang (Desa Candirejo, Jombor, Sraten dan Gedangan) ▪ Kecamatan Getasan (Desa Polobogo)

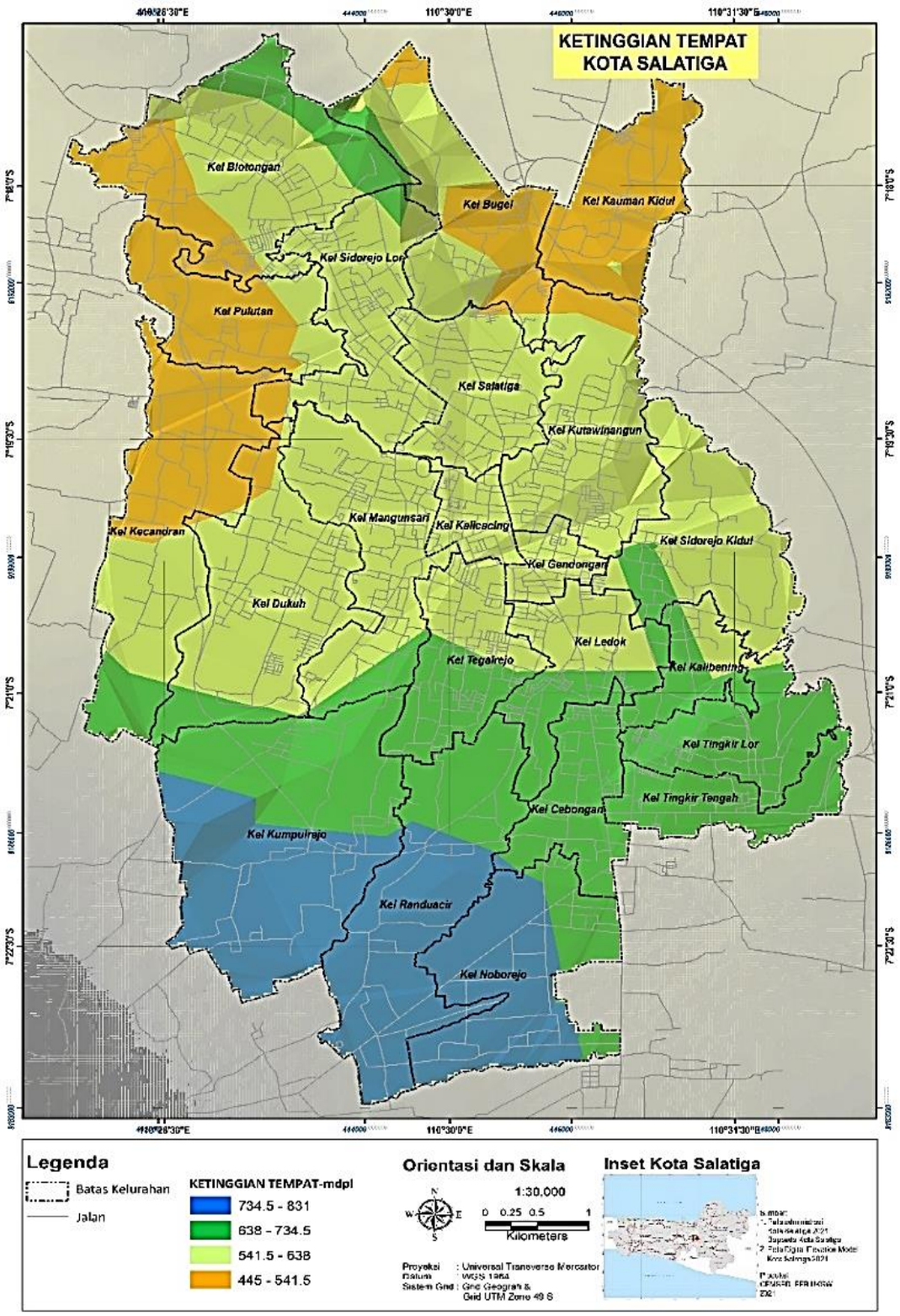
Kecamatan yang memiliki luas terbesar adalah Kecamatan Argomulyo dengan luas sebesar 18,53 km^2 dan memiliki presentase sekitar 32,63 persen dari keseluruhan total wilayah di Kota Salatiga. Kecamatan Argomulyo merupakan kecamatan dengan letak paling tinggi terutama di wilayah Kelurahan Randuacir, Kelurahan Noborejo dan Kelurahan Kumpulrejo dengan ketinggian tempat berkisar 734,5-831 mdpl. Kecamatan Sidorejo merupakan wilayah terbesar kedua setelah Argomulyo, dengan luas daerah sebesar 15.61 km2 atau 28,60 persen dari keseluruhan total wilayah di Kota Salatiga. Kecamatan Sidorejo merupakan wilayah kecamatan dengan ketinggian tempat terendah di Kota Salatiga terutama di wilayah Kelurahan Kauman Kidul, Kelurahan Bugel dan Kelurahan Pulutan dengan ketinggian tempat berkisar 445-541 mdpl. Kecamatan Sidomukti merupakan wilayah terbesar ketiga yaitu dengan luas sebesar 10.80 km2 atau 20,18 persen dari keseluruhan total wilayah di Kota Salatiga. Kecamatan Tingkir merupakan Kecamatan dengan luas terkecil di Salatiga yaitu sebesar 10.43 km2 atau 18,58 persen dari keseluruhan total wilayah di Kota Salatiga.



Sumber: Peta RTRW Kota Salatiga 2010-2030

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kecamatan di Kota Salatiga

.

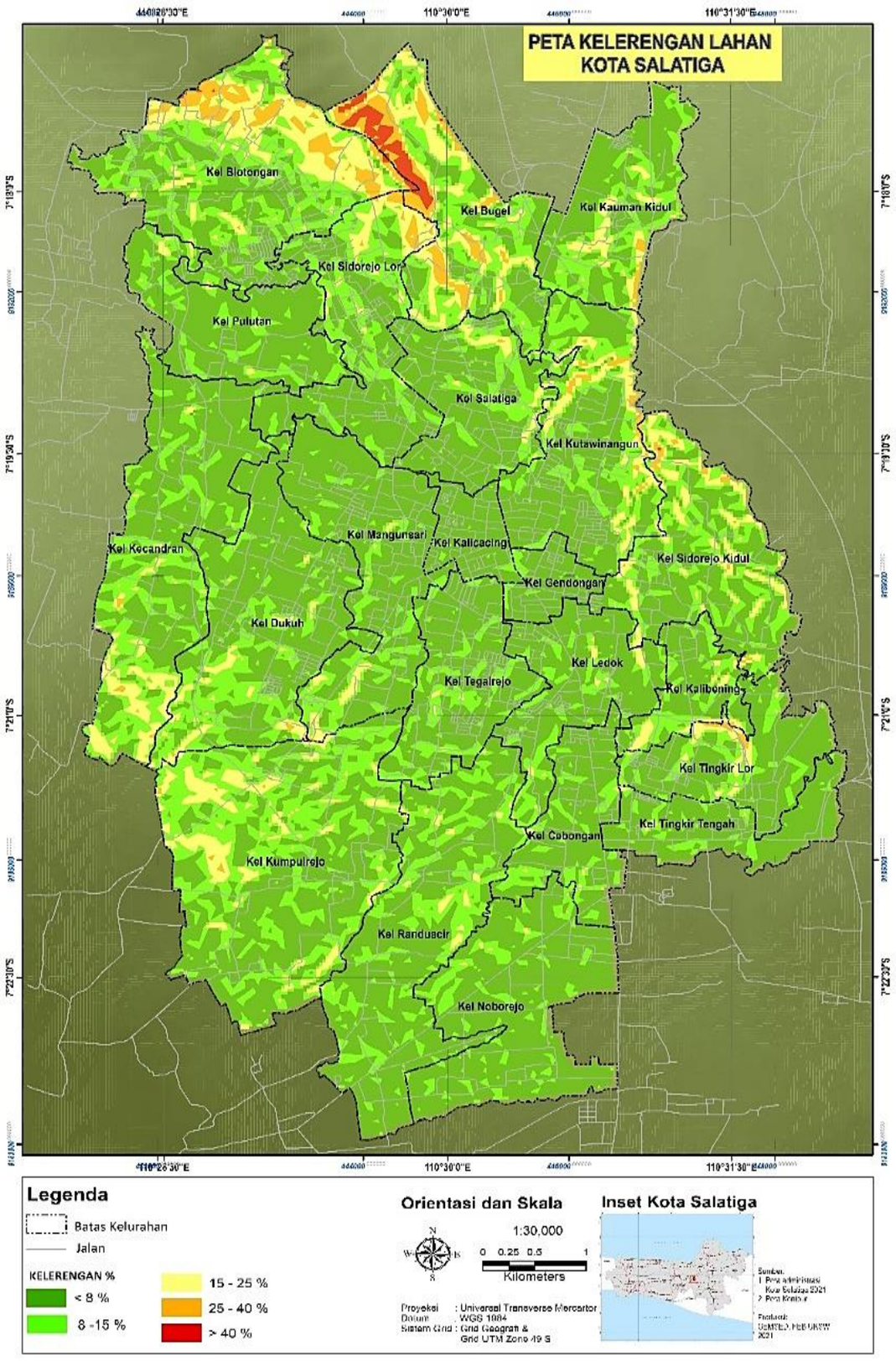


Sumber: analisis DEM Kota Salatiga 2021

Gambar 2. 2 Ketinggian Tempat (mdpl) Kota Salatiga

2. Kelerengan

Kemiringan lereng dibagi menjadi beberapa kelas yaitu datar (0-8 %), landai (8-15 %), agak curam (15-25 %), curam (25-40 %), dan sangat curam (≥ 40 %). Berdasarkan dari kelerengan lahan di Kota Salatiga maka kelerengan wilayah Kota Salatiga didominasi dengan kelerengan datar hingga landai (lihat Tabel Kelerengan).



Sumber: Analisis DEM Kota Salatiga 2021

Gambar 2. 3 Kelerengan Lahan (%) Kota Salatiga

Kecamatan Argomulyo memiliki klas kelerengan beragam dari <8 % (datar) hingga 15-25 % (agak curam). Kecamatan Sidomukti memiliki kemiringan lahan dari <8 % (datar) sampai 25-40 % (uram). Kecamatan Sidorejo memiliki kemiringan lereng beragaman mulai <8 % (datar) hingga >40 % (sangat curam). Kecamatan Tingkir

memiliki kemiringan lereng beragaman mulai <8 % (datar) hingga >40 % (sangat curam).

Tabel 2. 2 Kelerengan Lahan Kecamatan di Kota Salatiga

Kecamatan	Klas Kelerengan-%	Luas (Ha)	Persentase (%)
Kecamatan Argomulyo	< 8 % (Datar)	1,210.03	22.17
	8 -15 % (Landai)	491.91	9.01
	15 - 25 % (Agak Curam)	77.95	1.43
Kecamatan Sidomukti	< 8 % (Datar)	783.89	14.36
	8 -15 % (Landai)	264.82	4.85
	15 - 25 % (Agak Curam)	63.11	1.16
	25 - 40 % (Curam)	2.34	0.04
Kecamatan Sidorejo	< 8 % (Datar)	790.32	14.48
	8 -15 % (Landai)	458.12	8.39
	15 - 25 % (Agak Curam)	200.68	3.68
	25 - 40 % (Curam)	84.14	1.54
	> 40 % (Sangat Curam)	22.52	0.41
Kecamatan Tingkir	< 8 % (Datar)	646.28	11.84
	8 -15 % (Landai)	252.92	4.63
	15 - 25 % (Agak Curam)	93.84	1.72
	25 - 40 % (Curam)	14.92	0.27
	> 40 % (Sangat Curam)	0.09	0.0017

Sumber: Analisis Primer dari Digital Elevation Model Kota Salatiga 2021

3. Iklim

Iklim adalah rata-rata keadaan cuaca dalam jangka panjang (>30 tahun). Kota Salatiga berada pada ketinggian tempat antara 445-831 mdpl dan dikelilingi gunung Merbabu, Telomoyo dan Gajah Mungkur sehingga kondisi geomorfologi demikian mempengaruhi tipe iklim terutama pada unsur suhu udara dan curah hujan.

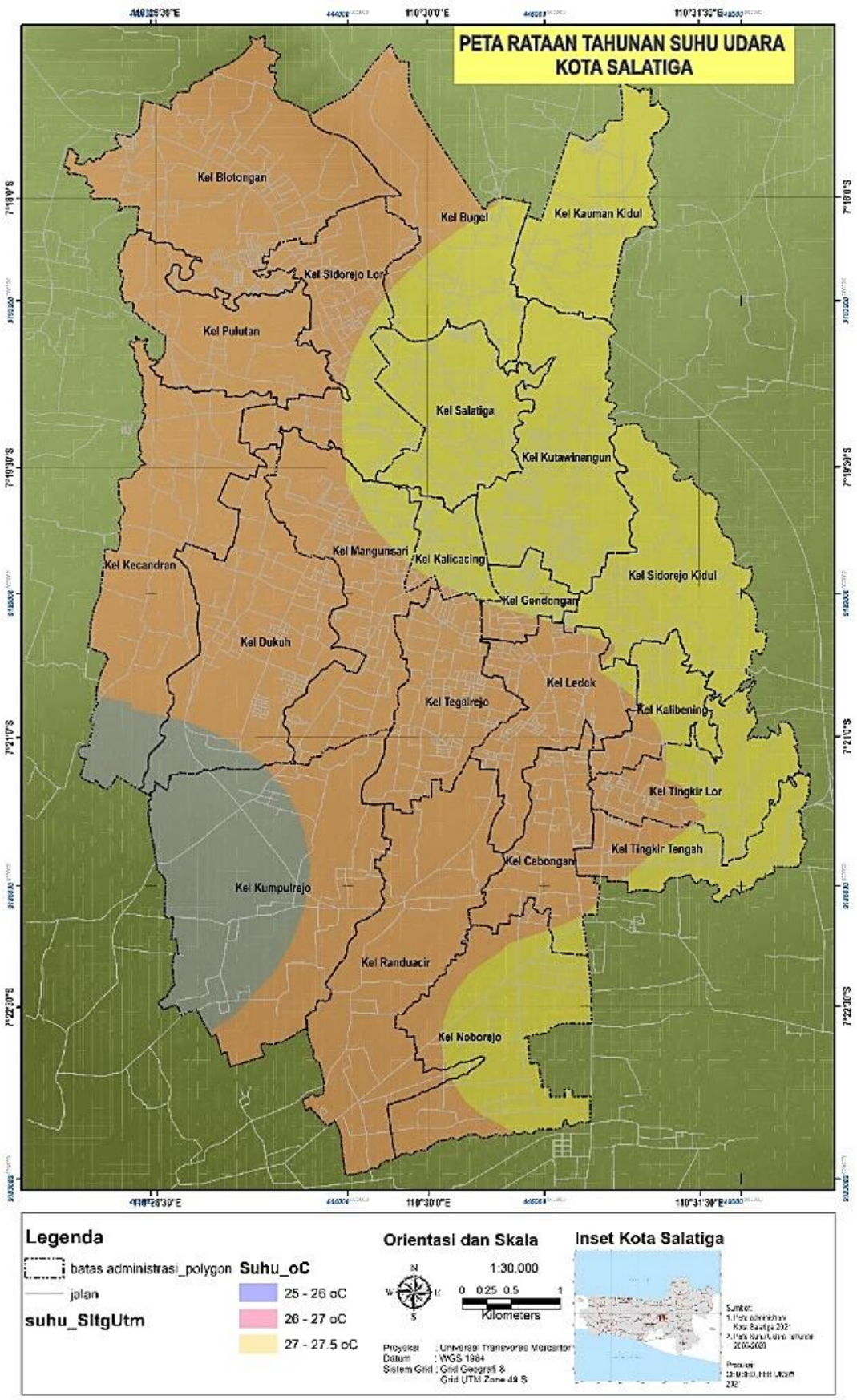
a. Suhu udara

Suhu udara menunjukkan derajat panas dan dingin udara di atmosfer dan suhu udara bervariasi menurut tempat dan dari waktu ke waktu di permukaan bumi. Suhu udara di Kota Salatiga tergolong memiliki suhu yang sejuk, rata-rata suhu dalam setahun berkisar pada angka 26-27,5 derajat celcius dan suhu dengan temperatur tersebut merata ke empat kecamatan di Kota Salatiga. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.

Tabel 2. 3 Suhu Udara di Kota Salatiga

Kecamatan	Suhu ^{o}C	LUAS (HA)
Kecamatan Argomulyo	25 - 26 ^{o}C	1,584.72
	27 - 27.5 ^{o}C	232.25
Kecamatan Sidomukti	25 - 26 ^{o}C	101.48
	26 - 27 ^{o}C	920.99
	27 - 27.5 ^{o}C	101.39
Kecamatan Sidorejo	26 - 27 ^{o}C	969.78
	27 - 27.5 ^{o}C	626.79
Kecamatan Tingkir	26 - 27 ^{o}C	147.16
	27 - 27.5 ^{o}C	898.04

Sumber: Analisis DEM dan Ketinggian Tempat, Tahun 2022



Sumber: Analisis Ketinggian Tempat 2021

Gambar 2. 4 Suhu Udara Kota Salatiga

b. Curah Hujan

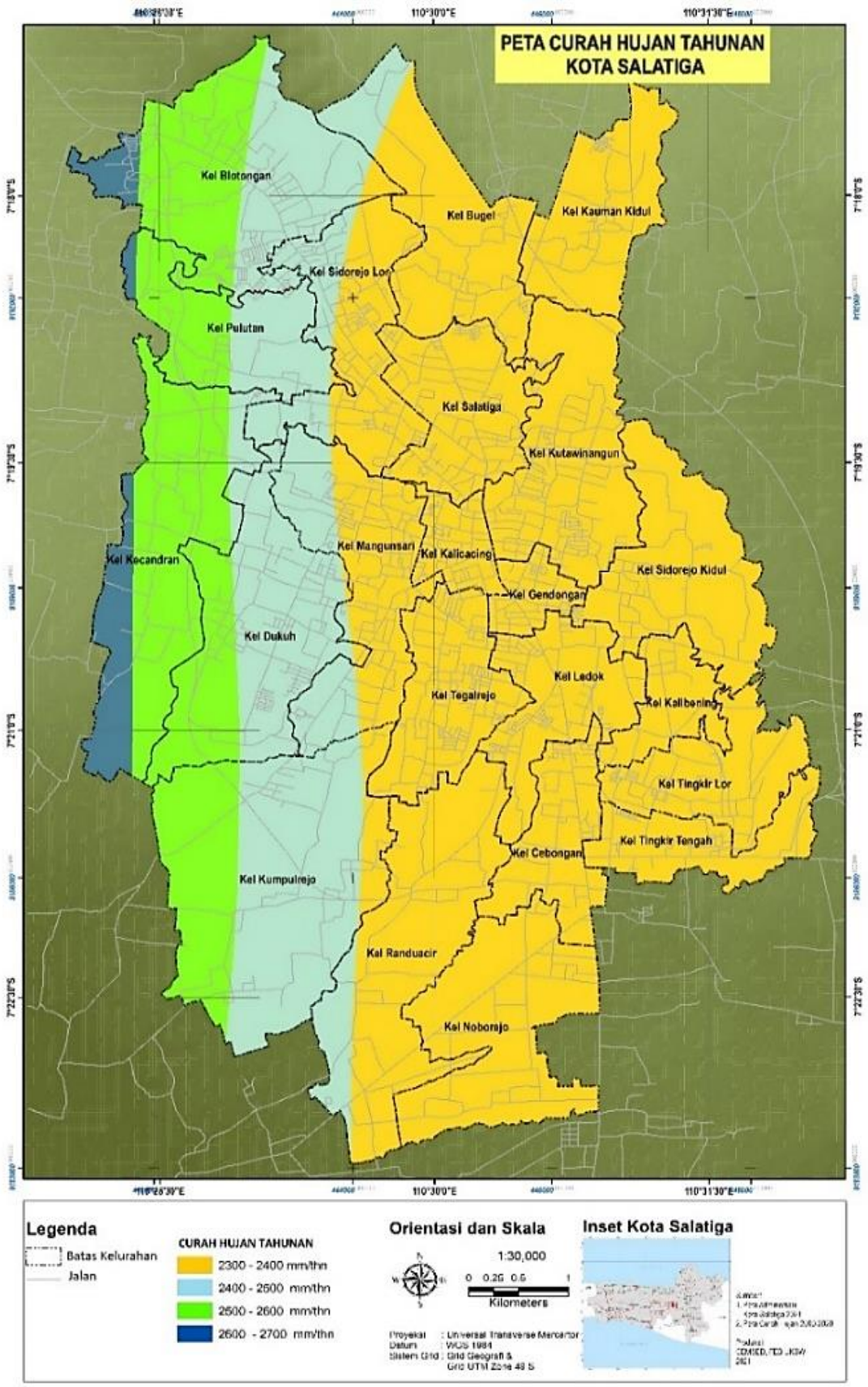
Jumlah curah hujan merupakan volume air yang terkumpul di permukaan bidang datar dalam suatu periode tertentu (harian, mingguan, bulanan, atau tahunan). Berdasarkan data 10 tahun (2010-2020) maka Kota Salatiga memiliki rata-rata curah hujan tahunan berkisar pada nilai 2300-2700 mm/tahun.

Tabel 2. 4 Curah Hujan Tahunan di Kota Salatiga

Kecamatan	Curah Hujan Tahunan (mm/Tahun)	Luas (Ha)
Kecamatan Argomulyo	2300 - 2400 mm/thn	854.53
	2400 - 2500 mm/thn	397.93
	2500 - 2600 mm/thn	564.50
Kecamatan Sidomukti	2300 - 2400 mm/thn	69.88
	2400 - 2500 mm/thn	294.75
	2500 - 2600 mm/thn	365.41
	2600 - 2700 mm/thn	393.82
Kecamatan Sidorejo	2300 - 2400 mm/thn	411.77
	2400 - 2500 mm/thn	551.46
	2600 - 2700 mm/thn	633.34
Kecamatan Tingkir	2300 - 2400 mm/thn	1,045.19

Sumber: Analisis Data Climate 2010-2021

Secara spasial, sebaran rata-rata curah hujan tahunan di Kota Salatiga dapat dilihat melalui gambar berikut ini.



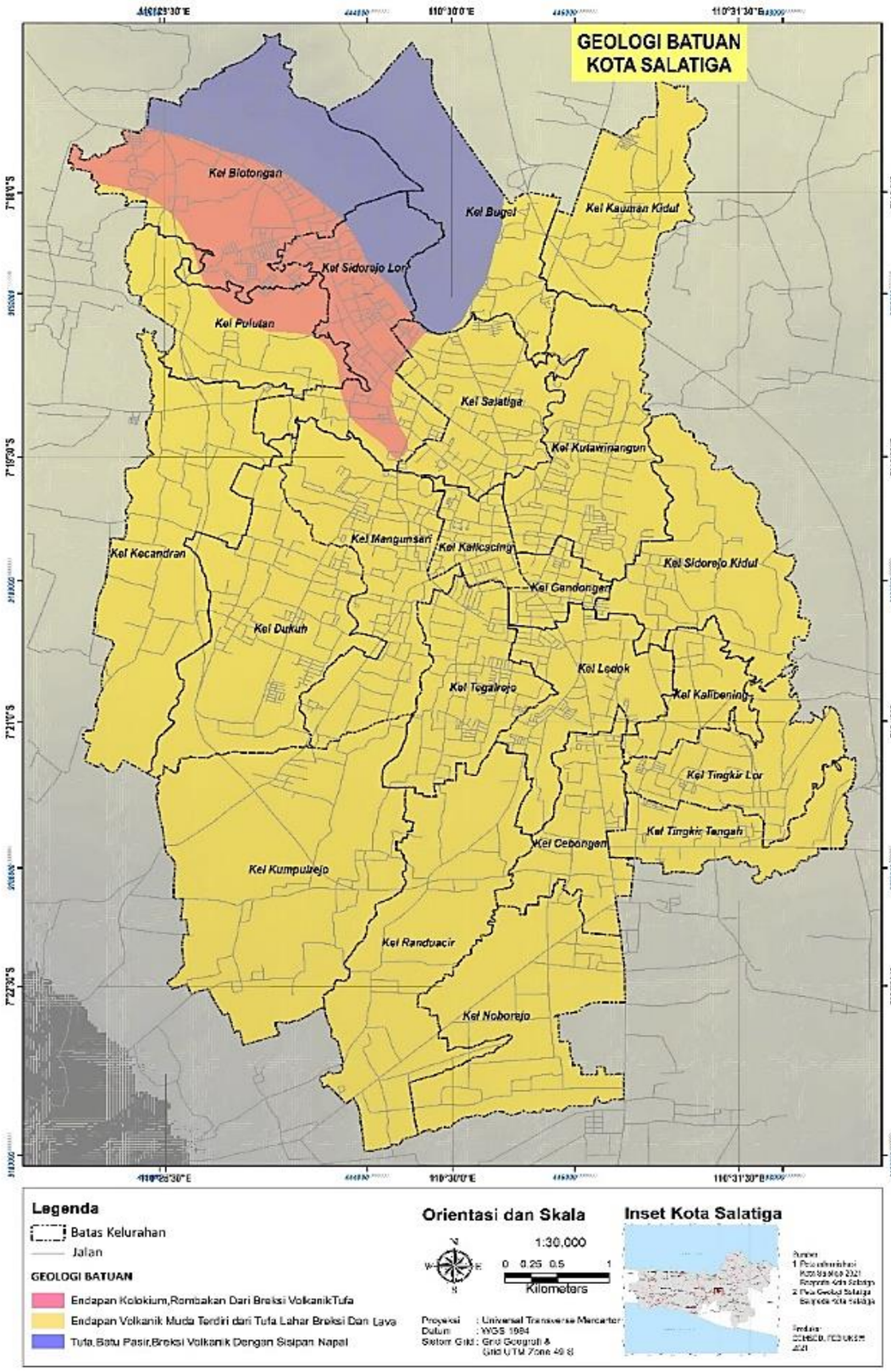
Sumber: Analisis Data Curah Hujan 2010-2020

Gambar 2. 5 Curah Hujan Tahunan Kota Salatiga

4. Geologi dan Tanah

Berdasarkan peta geologi lembar Salatiga, maka Kota Saalatiga secara regional merupakan bagian dari peta geologi Pegunungan Kendeng bagian barat (Sukardi dan

T. Budhitrisna, 1992) dengan kelompok batuan sedimen atau endapan vulkanik. Oleh karena itu Kota Salatiga memiliki 3 jenis batuan yaitu 1. Endapan Kolokium, Rombakan dari Breksi Volkanik Tufa; 2. Endapan Volkanik Muda yang terdiri dari Tufa Lahan Breksi dan Lava; 3. Tufa, Batu Pasir, Breksi Volkanik dengan Sisipan Napal. Batuan induk tersebut akan menentukan jenis tanah. Adapun gambar batuan geologi di Kota Salatiga tertera dalam gambar berikut.



Sumber: Peta Geologi Pegunungan Kendeng Bagian Barat (Sukardi dan T. Budhitrisna, 1992)

Gambar 2. 6 Peta Geologi Lembar Kota Salatiga

Tanah terbentuk sebagai suatu hasil interaksi dari iklim, bahan induk (batuan), topografi (relief permukaan tanah), organisme dan waktu. Adanya interaksi dari bahan induk (batuan), iklim, biota, morfologi lahan, dan waktu maka terbentuk 2 ordo tanah di Kota Salatiga yaitu Incepstisols dan Oxisols, namun dominasi tanah di Kota Salatiga adalah Inceptisols.



Sumber: Peta Land Sitem Jawa Tengah

Gambar 2. 7 Ordo Tanah Kota Salatiga

Tabel 2. 5 Ordo Tanah di Kota Salatiga

Kecamatan	Ordo_Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
Kecamatan Argomulyo	Inceptisols	1,816.96	32.55
Kecamatan Sidomukti	Inceptisols	1,123.86	20.13
Kecamatan Sidorejo	Inceptisols	1,271.23	22.77
Kecamatan Sidorejo	Oxisols	325.34	5.83
Kecamatan Tingkir	Inceptisols	1,045.19	18.72

Sumber: Peta Land system Jawa Tengah, tahun 2021

5. Penggunaan Lahan

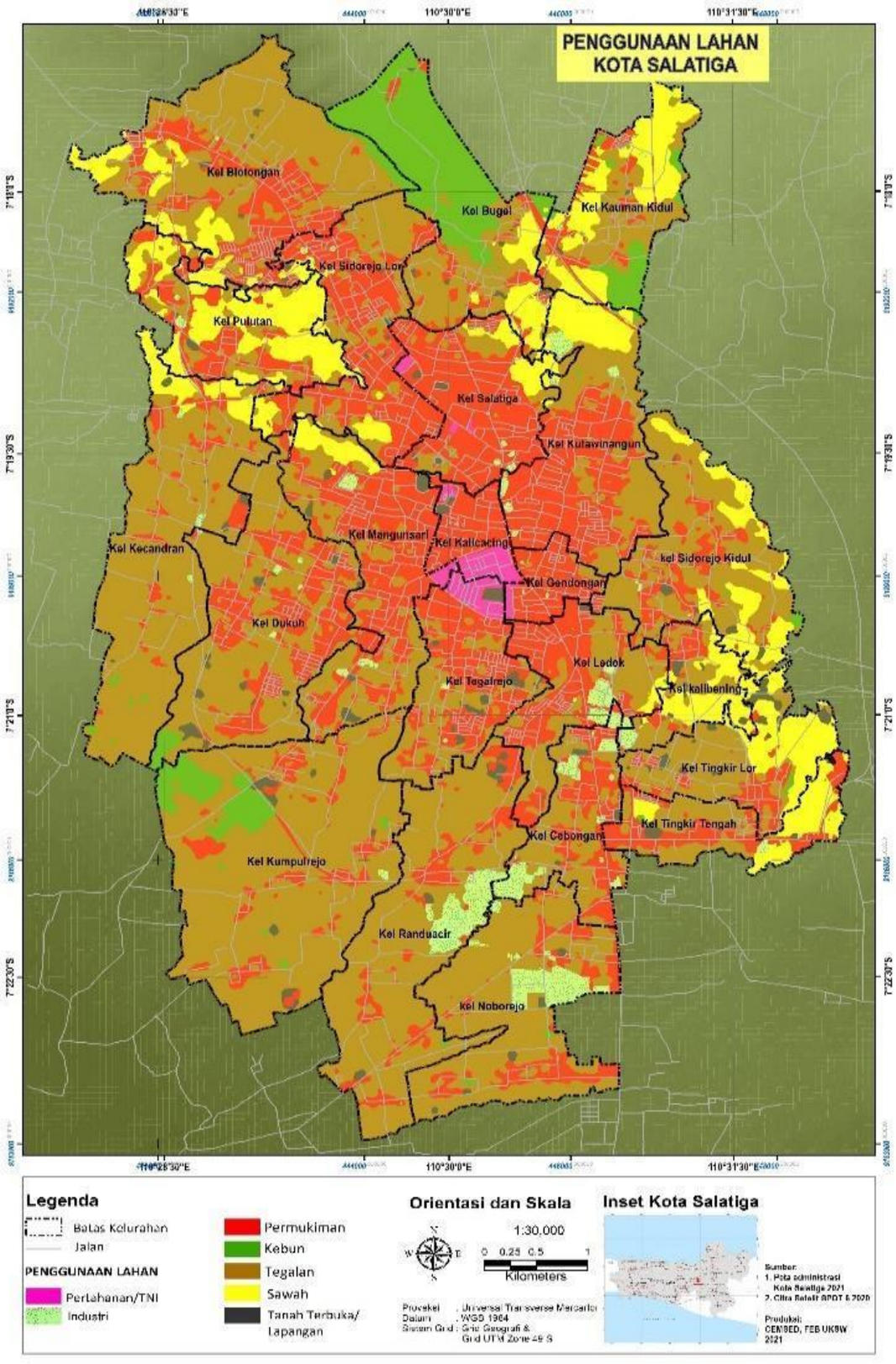
Lahan adalah bentangan di permukaan bumi dan menjadi tempat utama kegiatan manusia yang terdiri akan komponen Litosfer (Tanah), Atmosfer (Iklim), Hidrosfer (Air) dan Biosfer (Kehidupan-Organisme). Penggunaan lahan di Kota Salatiga terbagi atas lahan sawah, pertanian bukan sawah dan bukan pertanian.

Tabel 2. 6 Penggunaan Lahan Kota Salatiga

Kecamatan	Lahan Pertanian (Ha)		Bukan Pertanian (Ha)
	Sawah	**Bukan Sawah**	
Kecamatan Argomulyo	9,0	755,0	1089,0
Kecamatan Tingkir	295,0	173,0	587,0
Kecamatan Sidomukti	49,7	361,0	735,3
Kecamatan Sidorejo	273,0	448,0	903,0
Total	**626,7**	**1737**	**3314,3**
Persentase	**11,04**	**30,59**	**58,37**

Sumber: Salatiga Dalam Angka, 2021

Penggunaan lahan di Kota Salatiga untuk lahan pertanian sebesar 11,04 persen untuk lahan sawah dan 30,59 persen untuk lahan bukan sawah, sementara itu untuk lahan bukan pertanian menguasai 58,37 persen. Penggunaan lahan bukan pertanian di Kota Salatiga di dominasi untuk permukiman (perumahan, niaga, perkantoran), tanah terbuka, industri dan pertahanan/TNI yang secara lebih detail dapat dilihat pada gambar dibawah.



Sumber: Pete RTRW Kota Salatiga 2010-2030

Gambar 2. 8 Penggunaan Lahan di Kota Salatiga

6. Geohidrologi

Kota Salatiga merupakan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tuntang dan DAS Rawa Pening yang merupakan bagian dari area kerja DAS Jratunseluna. Hidrologi di Kota Salatiga dibagi menjadi air permukaan dan air bawah tanah (hidrogeologi). Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, dapat diperoleh dari air permukaan berupa air sungai dan mata air. Adapun air bawah tanah (hidrogeologi) didapat dengan menggali sumur dangkal. Mata air dan sungai memiliki potensi tingggi untuk dikembangkan atau dimanfaatkan sebagai sumber air bersih penduduk baik kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Mata air Kota Salatiga tersebut adalah Kali Senjoyo, Kali Tengah, Kali Sraten, Kali Kedawung, Kali Buntang, Kali Ajiawur, Kali Londo. Keberadaan aliran-aliran sungai dan mata air tersebut sangatlah cukup dan potensial untuk dilakukan suatu pengembangan sebagai salah satu sumber air yang sangat bermanfaat untuk kecukupan air di Kota Salatiga.

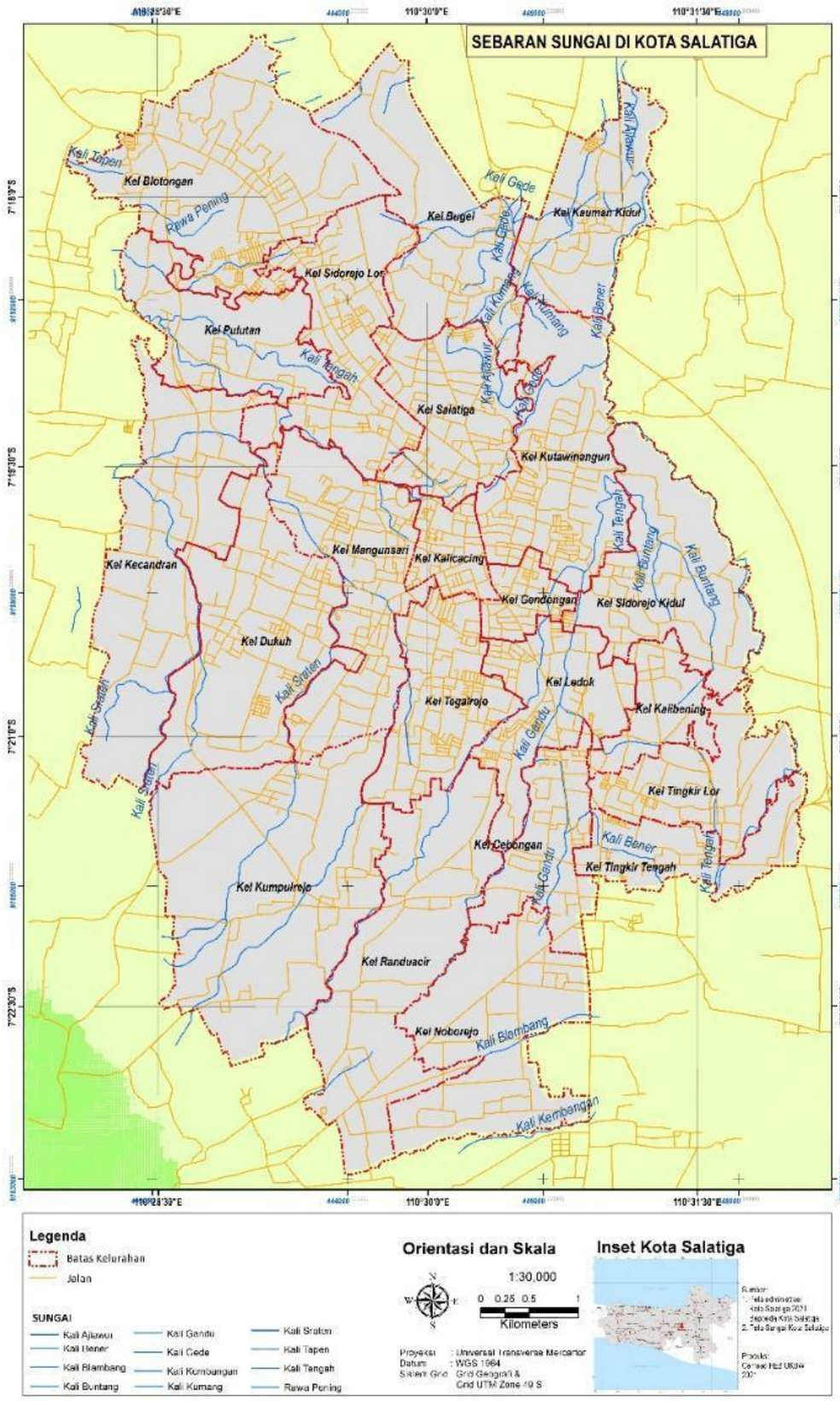
Sumber-sumber air baku dari mata air yang dapat dimanfaat sebagai sumber air bersih antara lain:

a. Mata air Senjoyo melayani Kelurahan: Tingkir Lor, Tingkir Tengah, Ledok, Tegalrejo, Mangunsari, Kalicacing, Kecandran, Sidorejo Lor, Pulutan dan Mangunsari;
b. Mata air Kaligojek melayani Kelurahan: Kalibening, Sidorejo Kidul, Kutowinangun Kidul, Kutowinangun Lor dan Salatiga;
c. Mata air Kaligethek, Kalimatan dengan debit 18 (delapan belas) liter per detik dan Kalisombo timur dengan debit 10 (sepeluh) liter per detik melayani Kelurahan: Kuntowinangun Lor, Bugel, Salatiga, Sidorejo Lor dan Blotongan;
d. Sumur artesis Jalan Sukowati melayani Kelurahan: Kalicacing, Mangunsari dan Kecandran;
e. Sumur artesis Cebongan melayani Kelurahan: Ledok dan Tegalrejo;
f. Sumur artesis Tegalsari melayani Kelurahan: Kalibening dan Sidorejo Kidul;

Sedangkan untuk aliran sungai yang dapat dimanfaatkan yaitu:

1) Sungai Senjoyo di Kelurahan: Tingkir Tengah, Tingkir Lor, Sidorejo Kidul, Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul;
2) Sungai Setro di Kelurahan Kauman Kidul;
3) Sungai Jetis di Kelurahan: Randuacir, Noborejo, Cebongan, Ledok, Sidorejo Kidul, Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul;
4) Sungai Ngaglik di Kelurahan: Kumpulrejo, Randuacir, Tegalrejo, Ledok, Gendongan, Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul;
5) Sungai Nanggulan di Kelurahan: Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul;
6) Sungai Ngawen di Kelurahan: Kumpulrejo, Tegalrejo dan Mangunsari;

7) Sungai Sraten di Kelurahan: Kumpulrejo, Mangunsari, Kelurahan Dukuh dan Kecandran;
8) Sungai Sawahan di Kelurahan: Kumpulrejo, Dukuh dan Kecandran;
9) Sungai Ngemplak di Kelurahan: Dukuh dan Kecandran.



Sumber: Peta RTRW Kota Salatiga 2010-2030

Gambar 2. 9 Sebaran Sungai di Kota Salatiga

7. Gambaran Potensi Pengembangan Wilayah Kota Salatiga

Pengembangan wilayah bertujuan untuk kemakmuran wilayah dengan memberdayakan seluruh potensi yang ada secara optimal melalui upaya keserasian dan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar sektor yang berdimensi keruangan sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. Pengembangan wilayah diarahkan untuk mengurangi kesenjangan (aspek pemerataan), meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah (aspek pertumbuhan) dan mewujudkan kelestarian lingkungan (aspek keberlanjutan), yang didasarkan pada pemanfaatan potensi sumber daya unggulan secara terpadu dan komprehensif. Berdasarkan RTRW Kota Salatiga Tahun 2010-2030 peruntukan lahan untuk pengembangan wilayah harus memparhatikan pola ruang yang terdiri dari Kawasan Budidaya, Kawasan Strategis dan Kawasan Lindung, dengan uraian sebagai berikut:

A. Kawasan Budidaya

Pengembangan Kawasan Budidaya di Kota Salatiga terdiri atas kawasan peruntukan perumahan, kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan perkantoran, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan Ruang Terbukan Non Hijau (RTNH), kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal dan kawasan peruntukan lainnya.

1) Kawasan Peruntukan Perumahan

Kawasan peruntukan perumahan meliputi perumahan dengan kepadatan tinggi, perumahan dengan kepadatan sedang dan perumahan dengan kepadatan rendah. Perumahan dengan kepadatan tinggi, yaitu lebih besar dari 5.336 jiwa per km^2 terdapat di Kelurahan: Kutowinangun, Gendongan, Ledok, Tegalrejo, Kalicacing dan Salatiga. Pengembangan kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan tinggi meliputi peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan, peningkatan kualitas hunian di kawasan kumuh, mendorong pembangunan perumahan secara vertikal, menetapkan koefisien dasar bangunan maksimal 70 % dalam setiap pembangunan kawasan perumahan dan mendorong pembuatan sumur resapan komunal dan biopori.

Perumahan dengan kepadatan sedang, yaitu antara 2.668 hingga 5.336 jiwa per km^2 terdapat di Kelurahan: Tingkir Tengah, Cebongan, Mangunsari dan Sidorejo Lor. Kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah, yaitu kurang dari 2.668 jiwa per km^2 terdapat di Kelurahan: Sidorejo Kidul, Kalibening, Tingkir Lor, Kumpulrejo, Noborejo, Randuacir, Kecandran, Dukuh, Blotongan, Bugel, Kauman Kidul dan Pulutan. Pengembangan kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan sedang dan rendah, yaitu meliputi peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan, peningkatan kualitas hunian bagi

rumah tangga miskin. Menetapkan koefisien dasar bangunan maksimal 60 % dalam setiap pembangunan kawasan perumahan dan mendorong pembuatan sumur resapan dan biopori.

2) Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa

Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang meliputi pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Kawasan peruntukan pasar tradisional terdapat di Kecamatan: Sidorejo, Tingkir, Argomulyo dan Sidomukti; pusat perbelanjaan terdapat di Kelurahan: Salatiga, Kutowinangun Kidul, Kutowinangun Lor dan Kalicacing; dan toko modern terdapat di Kecamatan: Sidorejo, Tingkir, Argomulyo dan Sidomukti.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, yaitu pengembangan kegiatan pasar tradisional modern di Kelurahan Sidorejo Lor; peningkatan kualitas pasar tradisional Rejosari di Kelurahan Mangunsari; peningkatan kualitas pasar tradisional Jetis di Kelurahan Sidorejo Lor; pengembangan kegiatan pasar tradisional agro di Kelurahan Kecandran; peningkatan kualitas pasar tradisional di Kelurahan Noborejo; peningkatan kualitas pusat perbelanjaan Pasaraya I di Kelurahan Kutowinangun Kidul; peningkatan kualitas pusat perbelanjaan Pasaraya II di Kelurahan Kutowinangun Lor; pengembangan toko modern sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan pengembangan toko modern tidak berdekatan dengan pasar tradisional.

3) Kawasan Peruntukan Perkantoran

Kawasan peruntukan perkantoran meliputi pemerintahan perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta. Kawasan peruntukan perkantoran terdapat di pusat pemerintahan kota di Jalan Letjend. Sukowati Kelurahan Kalicacing, Jalan Ki Penjawi di Kelurahan Sidorejo Lor, Jalan Hasanudin di Kelurahan Mangunsari, Jalan Marditomo di Kelurahan Sidorejo Kidul dan Jalan Argo Boga di Kelurahan Randuacir. Sedangkan kawasan peruntukan perkantoran swasta terdapat di Kelurahan: Salatiga, Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul, Kalicacing, Gendongan, Sidorejo Lor, Mangunsari, Sidorejo Kidul dan Randuacir.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan perkantoran, yaitu penataan kawasan Jalan Jenderal Sudirman, perencanaan fasilitas perkantoran harus menyediakan ruang untuk RTH, RTNH dan sumur resapan dan mengarahkan pengembangan kegiatan perkantoran swasta di kawasan peruntukan perdagangan dan jasa.

4) Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri meliputi industri kecil, industri menengah dan industri besar *non polutan*. Kawasan peruntukan industri kecil di tetapkan di Kelurahan: Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul,

Gendongan, Tingkir Lor dan Tingkir Tengah; Kawasan peruntukan industri menengah di tetapkan di Kelurahan: Sidorejo Kidul dan Noborejo, dan untuk Kawasan peruntukan Industri besar *non polutan* ditetapkan di Kelurahan: Kutowinangun, Ledok, Mangunsari, Cebongan, Randuacir dan Noborejo.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri, yaitu peningkatan kualitas sarana prasarana kawasan peruntukan industri menengah dan industri besar non polutan di Kelurahan: Noborejo dan Randuacir dengan luas kurang lebih 157 (seratus lima puluh tujuh) ha; industri kecil diarahkan berbentuk klaster dan mengarahkan pembangunan IPAL komunal bagi industri kecil yang menimbulkan polusi.

5) Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata, yaitu terdiri dari pariwisata budaya, pariwisata alam dan pariwisata buatan. Kawasan peruntukan pariwisata budaya meliputi pariwisata budaya Batu Prasasti Plumpungan di Kelurahan Kauman Kidul, pariwisata budaya Goa Asmorodono di Kelurahan Kecandran dan pariwisata budaya Sumur Wali di Kelurahan Randuacir. Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata budaya, yaitu peningkatan wisata budaya batu prasasti Plumpungan di Kelurahan Kauman Kidul, pengembangan wisata budaya bangunan kuno bersejarah di Kota Salatiga dan pengembangan wisata religi di Kelurahan Bugel.

Kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi wisata agro Salib Putih di Kelurahan Kumpulrejo, wisata Hutan Karet di Kelurahan Bugel dan wisata agro Salak di Kelurahan Kecandran. Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata alam, yaitu pengembangan wisata taman buah di Kelurahan Noborejo dan pengembangan wisata hutan kota Ngawen di Kelurahan Mangunsari.

Kawasan peruntukan pariwisata buatan meliputi pariwisata buatan wisata air dan permainan di Kelurahan Cebongan dan pariwisata buatan wisata kuliner di Kelurahan: Sidorejo Lor dan Blotongan. Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata buatan meliputi pengembangan wisata air dan permainan di Kelurahan Bugel dan pengembangan dan peningkatan wisata kuliner di Kelurahan: Sidorejo Lor dan Blotongan.

6) Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Kawasan RTNH untuk menampung kegiatan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat kota, yaitu meliputi alun-alun kawasan pemerintahan, plasa bangunan ibadah, penyediaan lahan parkir dan lapangan olahraga. Alun-alun kawasan pemerintahan, yaitu Lapangan Pancasila terdapat di Kelurahan Kalicacing berfungsi sebagai kegiatan

rakyat dan rekreatif; lokasi plasa bangunan ibadah tersebar pada setiap pembangunan prasarana ibadah yang terdapat di wilayah Kota Salatiga; lokasi lahan parkir meliputi area permukiman dan pusat-pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata dan pemerintahan; dan untuk pengembangan gedung gelora pemuda, bumi perkemahan dan lapangan olahraga meliputi rencana pembangunan *Sport and Youth Center* di Kelurahan Kecandran dan Kelurahan Sidorejo Lor, lapangan olah raga di tiap kecamatan dan Stadion Kridanggo.

7) Kawasan Ruang Evakuasi Bencana

Kawasan ruang evakuasi bencana dengan rencana pengembangan melalui penataan lingkungan ruang evakuasi bencana, yaitu meliputi kawasan ruang evakuasi bencana di Kelurahan: Blotongan dan Bugel di lapangan Prampelan Blotongan dan halaman atau gedung pertemuan Kecamatan Sidorejo; ruang evakuasi bencana di Kelurahan: Sidorejo Kidul, Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul di lapangan sepak bola Sidorejo Kidul dan gedung pertemuan Kecamatan Tingkir; ruang evakuasi bencana di Kelurahan: Randuacir dan Kelurahan Kumpulrejo di halaman dan gedung pertemuan Kecamatan Argomulyo dan lapangan sepak bola Randuacir. Rencana pengembangan kawasan ruang evakuasi bencana adalah penataan lingkungan ruang evakuasi bencana.

8) Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Kegiatan Sektor Informal

Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal, yaitu area khusus untuk pedagang kaki lima (PKL). Kawasan peruntukan kegiatan sektor informal terdapat di kawasan PKL Kridanggo di Kelurahan Kalicacing kawasan PKL Lapangan Pancasila di Kelurahan Kalicacing, kawasan PKL Jenderal Sudirman di Kelurahan: Salatiga, Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul dan Kalicacing, kawasan PKL Pasar Andong di Kelurahan Mangunsari dan kawasan PKL Margosari di Kelurahan Salatiga.

9) Kawasan Peruntukan Lainnya

Pengembangan kawasan peruntukannya lainnya, yaitu meliputi kawasan peruntukan pertanian, perikanan, hutan rakyat, pelayanan umum, pertahanan dan keamanan, serta olah raga dan rekreasi.

- **Kawasan Peruntukan Pertanian**

  Kawasan peruntukan pertanian terbagi menjadi 4 kawasan, meliputi pertanian tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dibagi menjadi dua yaitu kawasan peruntukan pertanian lahan basah dan kawasan peruntukan pertanian lahan kering. Kawasan peruntukan pertanian lahan basah, yaitu meliputi (1) sawah beririgasi teknis ditetapkan sebagai kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 274 ha, terletak di sebagian Kelurahan:

Ledok, Tingkir Tengah, Tingkir Lor, Kalibening, Kutowinangun Kidul, Kutowinangun Lor, Mangunsari, Salatiga dan Kauman Kidul; (2) sawah beririgasi setengah teknis, terletak di sebagian Kelurahan: Tingkir Tengah, Sidorejo Kidul, Kecandran, Pulutan, Sidorejo Lor, Bugel dan Kauman Kidul; dan (3) sawah beririgasi sederhana, terletak di sebagian Kelurahan: Ledok, Pulutan, Blotongan dan Kauman Kidul. Sedangkan kawasan peruntukan pertanian lahan kering ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 305 ha, terletak di sebagian Kecamatan: Sidorejo, Tingkir, Argomulyo dan Sidomukti.

Kawasan peruntukan holtikultura, terletak di Kecamatan: Argomulyo dan Sidomukti. Selanjutnya kawasan peruntukan perkebunan, terletak di sebagian Kelurahan: Bugel, Blotongan dan Kauman Kidul. Sedangkan kawasan peruntukan peternakan yang meliputi peternakan ternak besar, ternak kecil dan unggas terletak di sebagian Kecamatan: Argomulyo dan Sidomukti.

Pengembangan kawasan peruntukan pertanian meliputi pembatasan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan untuk kegiatan non pertanian; peningkatan status sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap menjadi sawah beririgasi teknis; peningkatan jaringan irigasi; pengembangan sentra buah-buahan di Kelurahan: Kauman Kidul, Kecandran dan Sidorejo Kidul; pengembangan perkebunan tanaman keras di Kelurahan: Blotongan, Sidorejo Kidul, Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul, Bugel, Randuacir dan Kumpulrejo; dan peningkatan prasarana klaster peternakan sapi, kambing dan kelinci di sebagian Kecamatan: Argomulyo dan Sidomukti.

- **Kawasan Peruntukan Perikanan**

  Kawasan peruntukan perikanan terdapat di Kelurahan: Kauman Kidul, Pulutan dan Tingkir Tengah. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan, yaitu peningkatan prasarana klaster minapolitan di Kelurahan Pulutan, peningkatan prasarana pasar ikan di Kelurahan Pulutan dan peningkatan prasarana pembibitan ikan di Kelurahan: Kauman Kidul dan Tingkir Tengah.

- **Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat**

  Kawasan peruntukan hutan rakyat dengan rencana pengembangan melalui penanaman kembali hutan rakyat dan pembatasan alih fungsi hutan rakyat. Kawasan peruntukan hutan rakyat terletak di sebagian Kelurahan: Blotongan, Sidorejo Lor, Kauman Kidul, Pulutan, Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul,

Sidorejo Kidul, Tingkir Lor, Noborejo, Ledok, Tegalrejo, Kumpulrejo, Randuacir, Cebongan, Kecandran dan Dukuh.

- **Kawasan Peruntukan Pelayanan Umum**

  Kawasan pelayanan umum meliputi pelayanan umum pendidikan, peribadatan dan kesehatan. Kawasan pelayanan umum pendidikan terdiri dari pendidikan dasar tersebar di Kota Salatiga, pendidikan menengah terdapat di subpusat pelayanan kota, pendidikan tinggi terdapat di subpusat pelayanan kota dan pendidikan luar sekolah. Rencana pengembangan pelayanan umum pendidikan yaitu melalui peningkatan kualitas sarana prasarana dasar dan menengah, peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan tinggi dan pendidikan luar sekolah diarahkan di kawasan perdagangan dan jasa.

  Kawasan pelayanan umum peribadatan keagamaan dengan rencana pengembangan melalui peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan peribadatan tersebar di Kota Salatiga. Sedangkan kawasan pelayanan umum kesehatan, yaitu terdiri dari (1) pelayanan kesehatan dasar, meliputi puskesmas pembantu di Kelurahan: Blotongan, Sidorejo Lor, Salatiga, Bugel, Kauman Kidul, Pulutan, Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul, Gendongan, Tingkir Tengah, Noborejo, Ledok, Tegalrejo, Randuacir, Dukuh dan Mangunsari; dan puskesmas di Kelurahan: Kalicacing, Tegalrejo, Mangunsari, Sidorejo Lor dan Sidorejo Kidul; (2) pelayanan kesehatan rujukan, meliputi Rumah Sakit Umum Daerah tipe B terdapat di Kelurahan Mangunsari, Rumah Sakit Paru dr.Ario Wirawan terdapat di Kelurahan Mangunsari, Rumah Sakit DKT dr.Asmir terdapat di Kelurahan Kutowinangun Lor, Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru terdapat di Kelurahan Kalicacing dan Puskesmas Rawat Inap terdapat di Kelurahan Cebongan. Rencana pengembangan pelayanan umum kesehatan yaitu peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan, peningkatan kelas puskesmas menjadi rumah sakit tipe C dan pengembangan puskesmas pembantu.

- **Kawasan Peruntukan Pertahanan Keamanan**

  Pengembangan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi Korem di Kelurahan Salatiga; Kodim di Kelurahan Salatiga; Koramil di Kelurahan: Sidorejo Lor, Sidorejo Kidul, Randuacir dan Mangunsari; Yonif 411 Kostrad di Kelurahan: Kalicacing, Gendongan, Mangunsari dan Tegalrejo; Polres Kota Salatiga di Kelurahan Kalicacing; Satlantas Kota Salatiga di Kelurahan Salatiga; dan Polsek di Kelurahan: Sidorejo Lor, Sidorejo Kidul, Randuacir dan

Mangunsari. Rencana pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan yaitu peningkatan prasarana dan sarana dikawasan pertahanan dan keamanan dan penataan kawasan pertahanan dan keamanan.

- **Kawasan Peruntukan Olahraga dan Rekreasi**

  Kawasan peruntukan olahraga dan rekreasi meliputi rencana *Sport and Youth Center* di Kelurahan: Kecandran dan Sidorejo Lor; lapangan olahraga di tiap kecamatan; Gelanggang Olahraga. Rencana pengembangannya, yaitu peningkatan prasarana dan sarana di kawasan olahraga dan peningkatan kerja sama antar klub olahraga.

B. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung di Kota Salatiga terdiri atas kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, Ruang Terbuka Hijau (RTH), kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya.

1) Kawasan yang Memberi Perlindungan Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya meliputi kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat seluas kurang lebih 45 ha dan kawasan resapan air. Kawasan lindung yang dikelola masyarakat terletak di sebagian Kelurahan: Bugel, Blotongan, Sidorejo Kidul, Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul dan di ruas Jalan Lingkar Salatiga di Kelurahan: Kumpulrejo dan Dukuh. Sedangkan kawasan resapan air terletak di Kelurahan: Randuacir, Kumpulrejo, Bugel, Blotongan, Sidorejo Kidul dan Kutowinangun Lor. Rencana pengembangannya yaitu melakukan penghijauan, mengarahkan pemanfaatan ruang di kawasan resapan air untuk fungsi hutan dan mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya.

2) Kawasan Perlindungan Setempat

Rencana pengembangan kawasan perlindungan setempat yaitu penghijauan di kawasan perlindungan setempat, pengendalian pemanfaatan kawasan perlindungan setempat, dan perlindungan dan penguatan dinding pembatas sungai. Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar mata air dan kawasan sekitar embung atau waduk. Kawasan sempadan sungai meliputi (a) Sungai Senjoyo di Kelurahan: Tingkir Tengah, Tingkir Lor, Sidorejo Kidul, Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul; (b) Sungai Setro di Kelurahan Kauman Kidul; (c) Sungai Jetis di Kelurahan: Randuacir, Noborejo, Cebongan, Ledok, Sidorejo Kidul dan Kutowinangun; (d) Sungai Ngaglik di Kelurahan: Kumpulrejo, Randuacir, Tegalrejo, Ledok, Gendongan dan Kutowinangun Lor; (e) Sungai Nanggulan di Kelurahan

Kutowinangun; (f) Sungai Ngawen di Kelurahan: Kumpulrejo, Tegalrejo dan Mangunsari; (g) Sungai Sraten di Kelurahan: Kumpulrejo, Mangunsari, Dukuh dan Kecandran; (h) Sungai Sawahan di Kelurahan: Kumpulrejo, Dukuh dan Kecandran; dan (i) Sungai Ngemplak di Kelurahan: Dukuh dan Kecandran.

Kawasan sekitar mata air meliputi mata air Kalitaman, mata air Kalisombo, mata air Benoyo, mata air Siluwing dan mata air Kaligethek. Sedangkan kawasan sekitar embung atau waduk terletak di kawasan embung atau waduk di Kecamatan Argomulyo. Kawasan sekitar embung atau waduk terletak di kawasan embung atau waduk di Kecamatan Argomulyo.

Rencana pengembangan kawasan perlindungan setempat meliputi:

a. penghijauan di kawasan perlindungan setempat.
b. pengendalian pemanfaatan kawasan perlindungan setempat.
c. perlindungan dan penguatan dinding pembatas sungai.

3) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota

RTH kota terdiri dari RTH publik dan RTH privat. RTH public eksisting seluas kurang lebih 260 ha atau kurang lebih 4,6% dari luas wilayah, meliputi (a) hutan kota seluas kurang lebih 29 ha di Kelurahan: Salatiga, Sidorejo Lor, Tegalrejo, Mangunsari, Kumpulrejo dan Dukuh; (b) taman RT, taman RW dan taman kota seluas kurang lebih 26 ha; (c) pemakaman seluas kurang lebih 52 ha; (d) kawasan lindung bawahannya seluas kurang lebih 50 ha; (e) jalur hijau seluas kurang lebih 24 ha; (f) Taman wisata seluas kurang lebih 79 ha. Sedangkan RTH privat eksisting seluas 365 ha atau kurang lebih 6,4% dari luas wilayah, meliputi RTH pekarangan rumah seluas kurang lebih 340 ha tersebar di wilayah Kota Salatiga dan halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha seluas kurang lebih 25 ha.

Rencana pengembangan luasan RTH meliputi RTH minimal sebesar 30% dari luas wilayah atau kurang lebih seluas 1.721 ha, RTH publik minimal sebesar 20% dari luas wilayah atau kurang lebih seluas 1.136 ha dan RTH privat minimal sebesar 10% dari luas wilayah atau kurang lebih seluas 585 ha.

Rencana pemenuhan RTH publik, yaitu (a) Pembangunan hutan kota seluas kurang lebih 402 ha tersebar di wilayah Kota Salatiga; (b) pembangunan taman RT, taman RW dan taman kota seluas kurang lebih 112 ha tersebar di wilayah Kota Salatiga; (c) pembangunan pemakaman terpadu seluas kurang lebih 21 ha di masing-masing kecamatan; (d) pengadaan tanah kawasan lindung bawahannya seluas kurang lebih 46 ha di Kelurahan: Sidorejo Kidul, Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul dan di ruas Jalan Lingkar Salatiga di Kelurahan: Kumpulrejo dan

Dukuh; (e) pengadaan tanah di sempadan sungai seluas kurang lebih 220 ha di Kelurahan: Tingkir Tengah, Tingkir Lor, Sidorejo Kidul, Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul, Kauman Kidul, Cebongan, Ledok, Kumpulrejo, Randuacir, Tegalrejo, Gendongan, Mangunsari, Dukuh dan Kecandran; (f) pengadaan tanah di sempadan SUTET seluas kurang lebih 55 ha terdapat di Kelurahan: Tingkir Tengah, Tingkir Lor, Sidorejo Kidul dan Kauman Kidul; (g) pembangunan jalur hijau seluas kurang lebih 4 ha di ruas Jalan Lingkar Salatiga; (h) pembangunan taman wisata seluas kurang lebih 16 ha di Kelurahan Bugel.

4) Kawasan Cagar Budaya

Pengembangan kawasan cagar budaya meliputi Prasasti Plumpungan di Kelurahan Kauman Kidul seluas kurang lebih 0,3 ha dan bangunan bersejarah di Kelurahan: Salatiga, Kalicacing, Kutowinangun dan Sidorejo Lor. Rencana pengembangannya yaitu pengaturan perubahan ukuran dan bentuk bangunan, pengembangan kegiatan kepariwisataan dan pengaturan lingkungan sekitar kawasan cagar budaya.

5) Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi merupakan kawasan imbuhan air yang berupa cekungan air tanah Salatiga dan cekungan air tanah Rawapening, terletak di Kecamatan: Argomulyo, Tingkir, Sidorejo dan Sidomukti. Rencana pengembangan kawasan imbuhan air, yaitu (a) pembangunan sumur resapan terdapat di Kelurahan: Randuacir, Kumpulrejo, Bugel, Blotongan, Sidorejo Kidul, Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul; (b) pembangunan biopori terdapat di Kelurahan: Randuacir, Kumpulrejo, Bugel, Blotongan, Sidorejo Kidul, Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul; (c) pembangunan dam penahan tersebar di wilayah sungai Kota Salatiga; (d) pembangunan embung konservasi di Kelurahan: Kumpulrejo dan Noborejo.

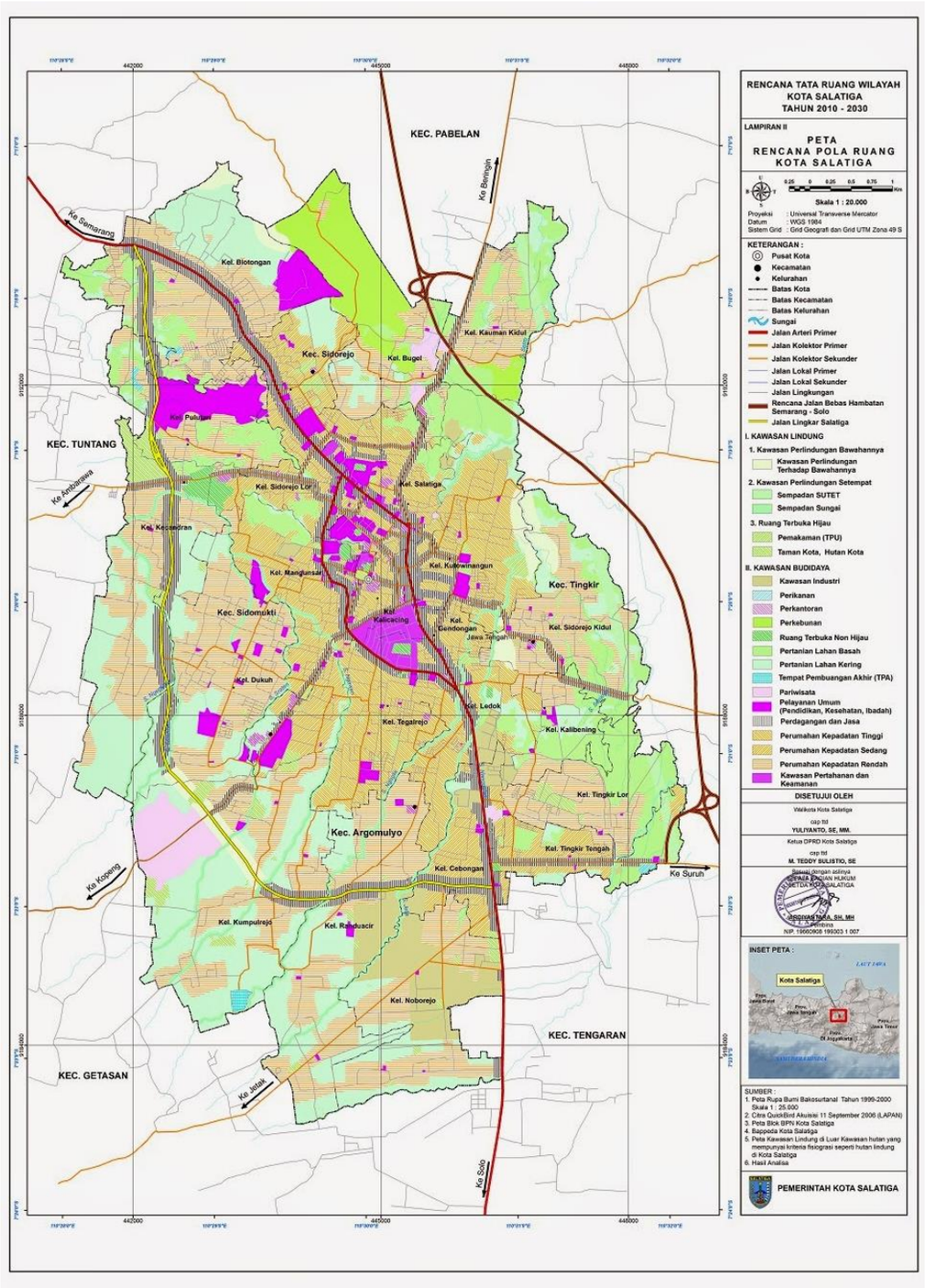
6) Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan Lindung Lainnya merupakan kawasan perlindungan plasma nutfah, yaitu terdiri dari gandaria *(Buvca macrophilla)* di Kelurahan Mangunsari, Kesambi (*scleichera oleosa)* di Kelurahan Kalicacing, Rejasa *(elaecanpur grandiflora)* di Kelurahan Kalicacing dan pule *(alstonia scholaris)* di kelurahan Mangunsari. Rencana pengembangan kawasan perlindungan plasma yaitu meliputi pembangunan hutan kota di Kelurahan: Mangusari dan Kumpulrejo.

C. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan longsor di Kota Salatiga meliputi sebagaian Kelurahan: Blotongan, Sidorejo Kidul, Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul, Bugel, Randuacir dan Kumpulrejo. Pengelolahan kawasan rawan longsor, yaitu:

1) Menetapkan tingkat bahaya gerakan tanah dan longsor pada masing- masing kawasan;
2) Membatasi pengembangan prasarana dan sarana umum di kawasan rawan longsor;
3) Merelokasi penduduk yang ada di sebagian kawasan rawan gerakan tanah dan longsor;
4) Menetapkan kawasan rawan gerakan tanah dan longsor sebagai RTH pengaman lingkungan;
5) Kegiatan budi daya diarahkan untuk dapat mendukung dan mengembangkan fungsi kawasan sebagai kawasan evakuasi bencana.



Sumber: Peta RTRW Kota Salatiga 2010-2030

Gambar 2. 10 Peta Pola Ruang RTRW 2010-2030 Kota salatiga

2.1.2 Kondisi Demografi

1. Jumlah Penduuduk Kota Salatiga Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sex Ratio

Kota Salatiga merupakan sebuah kota kecil di Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 4 Kecamatan dan 23 Kelurahan. Sensus Penduduk pada tahun 2022 mencatat penduduk Kota Salatiga pada tahun 2021 sebanyak 193.525 jiwa. Dalam jangka waktu sembilan tahun yaitu tahun 2013 hingga 2021, jumlah penduduk Kota Salatiga mengalami penambahan sekitar 12.221 jiwa atau rata-rata setiap tahunnya bertambah sekitar 1400 jiwa. Dalam kurun waktu tersebut, laju pertumbuhan penduduk Kota Salatiga sebesar 1,18 persen per tahun.

Tabel 2. 7 Penduduk Kota Salatiga berdasarkan Kecamatan, Jenis Kelamin dan Sex Ratio, 2021

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Ratio
	Laki-Laki	Perempuan		
Argomulyo	24.967	25.034	50.001	99.73
Tingkir	22.847	23.494	46.341	97.25
Sidomukti	21.881	22.668	44.549	96.53
Sidorejo	25.905	26.729	52.634	96.92
2021	95.601	97.924	193.525	97.63
2020	94.887	99.197	194.084	95.66
2019	94.887	99.197	194.084	95.66
2018	93.718	97.853	191.571	95.77
2016	92.426	96.502	188.928	95.78
2015	91.198	95.222	186.420	95.77
2014	89.928	93.887	183.815	95.78
2013	88.720	92.584	181.304	95.83

Sumber: BPS Kota Salatiga, 2022 (diolah)

Dari Jumlah penduduk sebesar 193.525 jiwa tersebut jika dilihat dari rasio jenis kelaminnya (Sex Ratio) menunjukkan menunjukkan sebesar 97,63, artinya bahwa setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 97,63 atau 98 laki-laki. Jika dilihat dari tren sex rationya ada kecenderungan jumlah laki-laki dan perempuan di Kota Salatiga hampir sama. Kondisi sex ratio ini memang agak berbeda secara nasional, dimana menurut Sensus Penduduk 2020 sebesar 102 (laki-laki lebih banyak dari pada perempuan). Tentunya perubahan komposisi *sex ratio* akan memberikan dampak pada segala aspek kehidupan (sosial, ekonomi, budaya, dan politik).

2. Distribusi/ Persebaran Penduduk Kota Salatiga

Persebaran penduduk Kota Salatiga tahun 2021 tertinggi di Kecamatan Sidorejo dengan jumlah penduduk sebanyak 52.634 jiwa, Kemudian disusul Kecamatan Argomulyo sebesar 50.001 jiwa, berikutnya adalah Kecamatan Sidomukti (44.549 jiwa),dan terendah ada di Kecamatan tingkir sebanyak 46.341 jiwa.terendah di Kecamatan Sidomukti sebanyak 44.162 jiwa. Namun secara keseluruhan penduduk Korta Salatiga dapat dikatakan merata. Data persebaran penduduk per Kecamatan di Kota Salatiga tahun 2017-2021 disajikan pada tabel berikut.

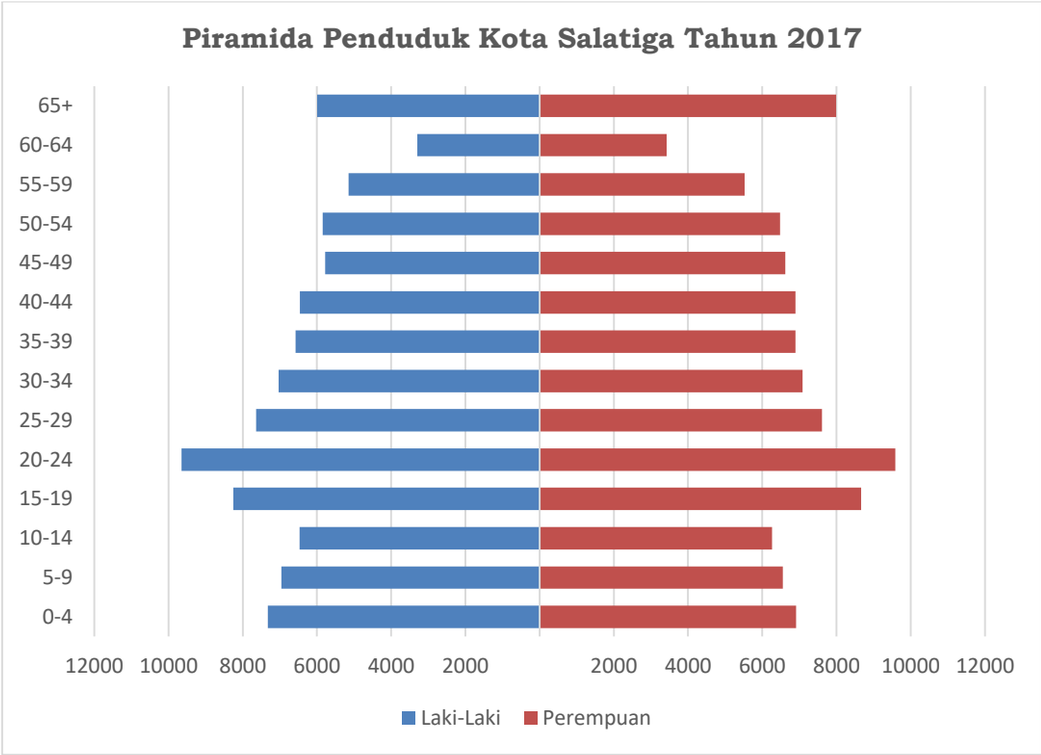
Tabel 2. 8 Data Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Argomulyo	48.794	49.772	49.679	50.261	50.001
2	Tingkir	46.117	46.605	46.562	46.937	46.341
3	Sidomukti	43.617	44.023	44.710	44.162	44.549
4	Sidorejo	53.550	54.211	54.612	54.722	52.634
Kota Salatiga		**192.078**	**194.611**	**195.563**	**196.082**	**193.525**

Sumber: Salatiga Dalam Angka 2022, BPS

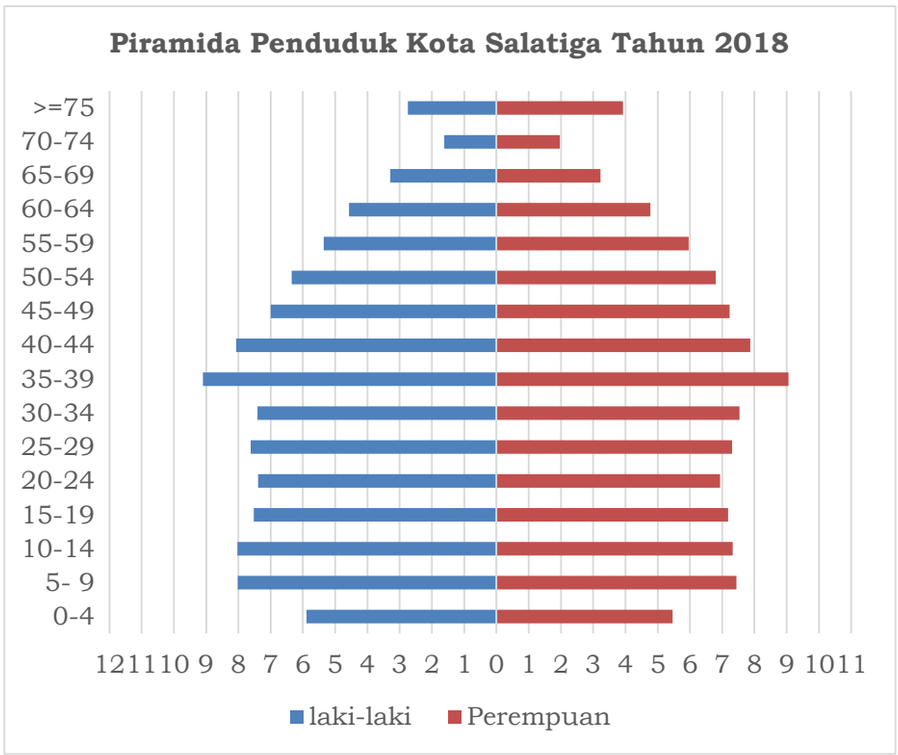
3. Transisi Penduduk Kota Salatiga Tahun 2017-2021

Transisi demografi merupakan perubahan struktur penduduk yang disebabkan oleh perubahan fertilitas dan mortalitas di suatu daerah. Secara kasar, hasil dari transisi demografi yang terjadi di suatu daerah dapat dilihat dari piramida penduduk (Sigel and Swanson, 2004). Piramida penduduk tersebut akan menggambarkan bagaimana struktur penduduk yang terbentuk sebagai hasil proses fertilitas dan mortalitas di suatu daerah (Mantra, 2004). Adapun piramida penduduk Kota Salatiga Tahun 2017-2021:



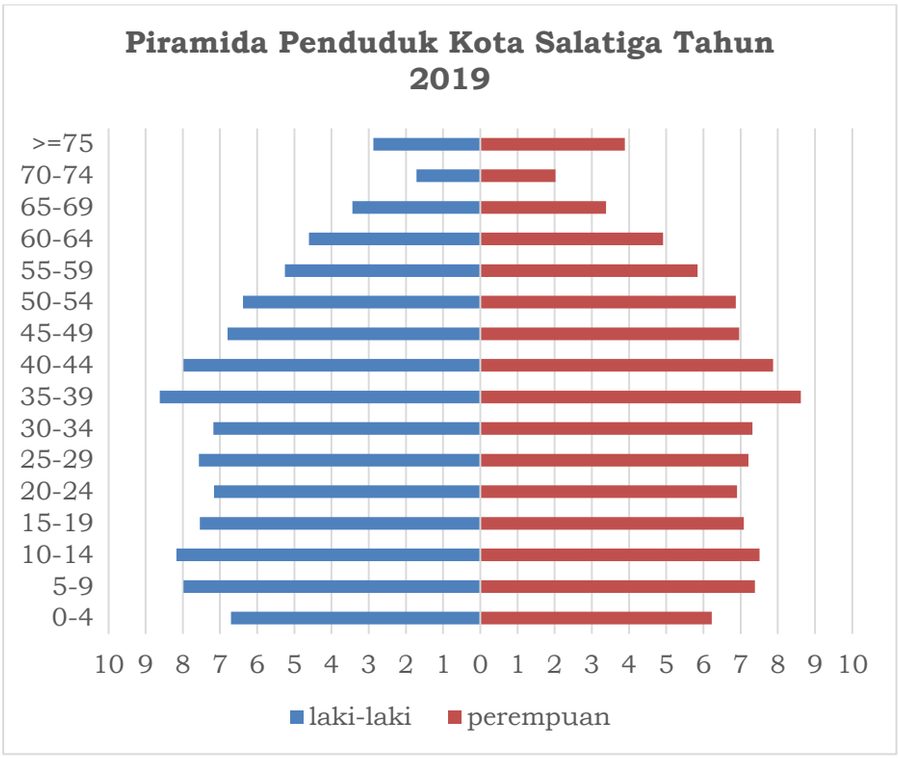
Sumber: BPS Kota Salatiga, 2018

Gambar 2. 11 Piramida Penduduk Kota Salatiga Tahun 2017



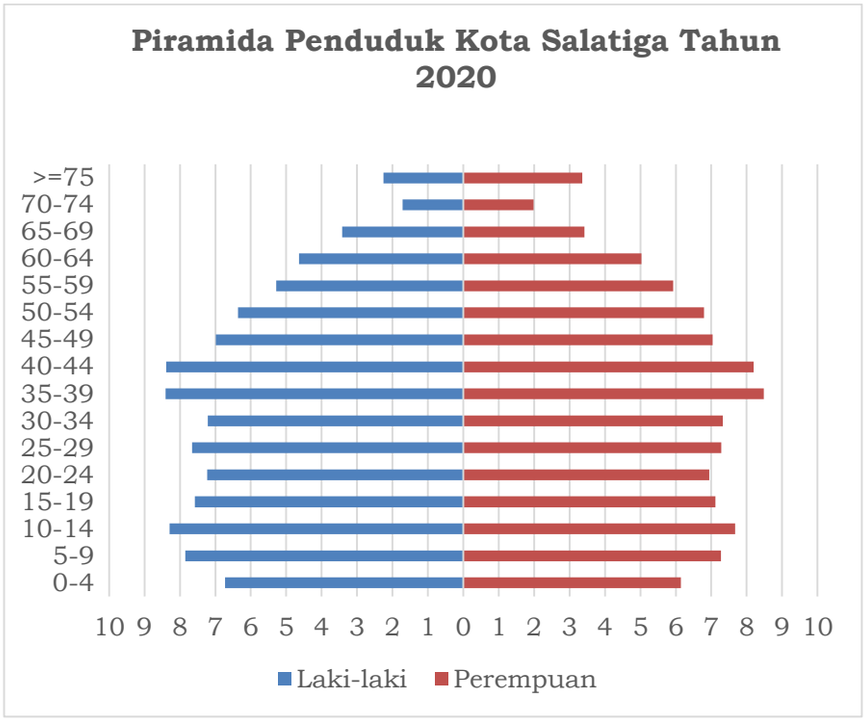
Sumber: Kota Salatiga Dalam Angka, 2019

Gambar 2. 12 Piramida Penduduk Kota Salatiga Tahun 2018



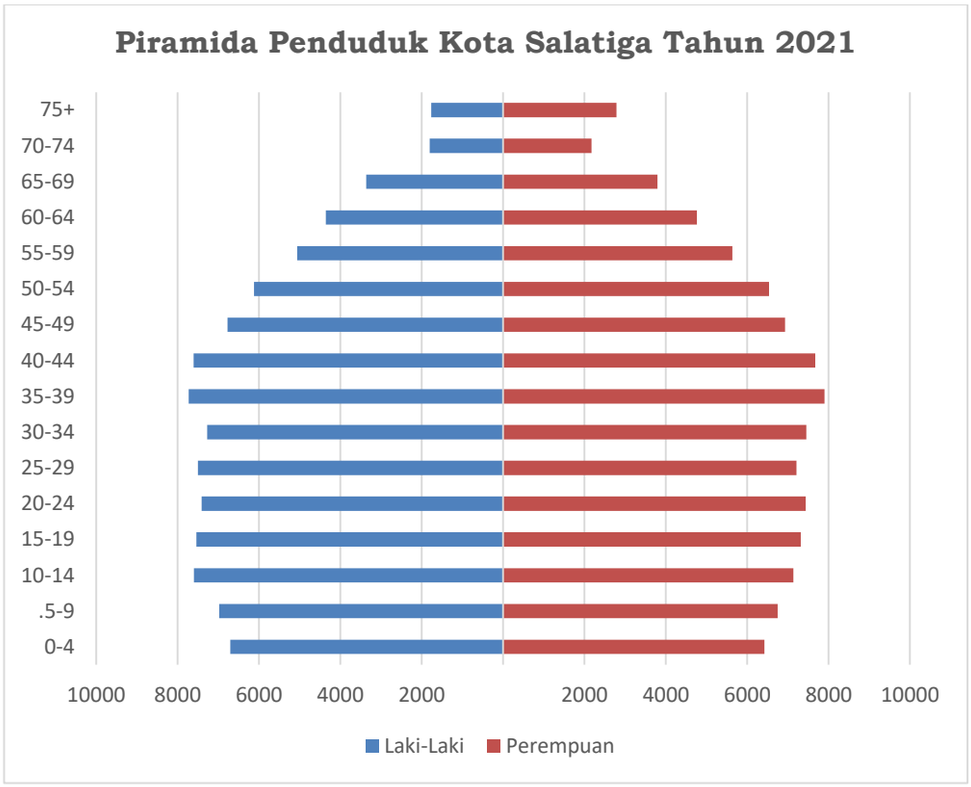
Sumber: Kota Salatiga dalam Angka, 2020

Gambar 2. 13 Piramida Penduduk Kota Salatiga Tahun 2019



Sumber: Kota Salatiga Dalam Angka, 2021

Gambar 2. 14 Piramida Penduduk Kota Salatiga Tahun 2020



Sumber: Kota Salatiga Dalam Angka 2022, diolah.

Gambar 2. 15 Piramida Penduduk Kota Salatiga Tahun 2021

Berdasarkan gambar piramida penduduk, dapat diketahui bahwa proporsi usia penduduk Kota Salatiga tahun 2017-2021 mengalami suatu perubahan yang menunjukkan proporsi penduduk usia produktif (usia 15 – 64 tahun) semakin meningkat dan disisi lain proposrsi penduduk usia belum produktif (0 – 14 tahun) mengalami penurunan dan penduduk usia di atas 65 tahun semakin bertambah sejalan dengan usia harapan hidup Kota Salatiga yang semakin meningkat. Bentuk piramida penduduk Kota salatiga adalah stasioner menuju ke piramida tua. Ciri lainnya adalah rendahnya angka kelahiran dan kematian. Bukti rendahnya angka kelahiran dapat dilihat dari pendeknya sayap piramida penduduk usia 0-4 tahun.

Berdasarkan data dari DP3APPKB, disebutkan bahwa Angka Kelahiran/ *Total Fertility Rate (TFR)* Kota Salatiga tahun mulai dari tahun 2019 sampai 2021 berada dibawah 2,0. Artinya bahwa TFR Kota Salatiga berada dibawah TFR nasional (2,3 persen), dan diatas target penduduk tumbuh seimbang dengan TFR sebesar 2,1. Hal ini dapat disebabkan oleh suksesnya program KB yang dilaksanakan oleh pemerintah. Peningkatan pendidikan bagi wanita juga dapat berdampak pada penurunan jumlah kelahiran. Oleh Juliaan (2009) dinyatakan bahwa wanita yang berpendidikan tinggi ternyata tingkat penggunaan kontrasepsinya juga tinggi, dan menginginkan jumlah anak lebih sedikit, serta persentase *unmet need* rendah. Suatu studi menunjukkan bahwa *unmet need* KB menurun dengan meningkatnya pendidikan wanita serta pada status wanita yang bekerja (Juliaan, 2009).

Tingkat kematian/mortalitas di Kota Salatiga juga tergolong rendah. Berdasarkan data DP3APPKB Tahun 2019-2020, Angka Kematian di Kota Salatiga

tahun sebesar 1.678. Penurunan angka kematian ini terlihat dari meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH). AHH Kota Salatiga tahun 2020 sebesar 77,40 lebih besar dari tahun 2019 sebesar 77,22. Selain itu, dilihat dari piramida penduduk juga jelas terlihat bahwa sayap piramida pada usia 75+ tergolong panjang. Panjangnya sayap ini menunjukkan jumlah penduduk lansia di Kota Salatiga semakin meningkat darti tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan semakin baiknya jaminan kesehatan dan kepedulian terhadap kesehatan lansia.

4. Penduduk Kota Salatiga Tahun 2021 berdasarkan Pendidikan

Pendidikan merupakan aset penting bagi kemajuan sebuah bangsa, oleh karena itu setiap warga negara harus dan wajib mengikuti jenjang pendidikan, baik jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun tinggi.

Tabel 2. 9 Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tidak/Blm Sekolah	20.561	19.847	40.408
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	9.754	9.840	19.594
3.	Tamat SD/Sederajat	12.896	15.763	28.659
4.	SLTP/Sederajat	14.052	14.526	28.578
5.	SLTA/Sederajat	27.544	24.689	52.233
6.	Diploma I/II	718	1.140	1.858
7.	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	2.517	3.463	5.980
8.	Diploma IV/Strata I	8.263	9.039	17.302
9.	Strata-II	961	701	1.662
10.	Strata-III	116	50	166
	Total	**97.382**	**99.058**	**196.440**

Sumber: Kota Salatiga Dalam Angka, Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan tentang kondisi penduduk kota Salatiga berdasarkan Pendidikan. Tampak bahwa partisipasi Pendidikan antara laki-laki dan perempuan cukup seimbang, bahkan hamper pada setiap tingkatan Pendidikan angka partisipasi perempuan lebih tinggi kecuali pada Strata-III. Namun secara umum penduduk dengan tingkat Pendidikan dasar (SD sampai SLTP) masih mendominasi, yakni sebesar 39,11%, kemudian tingkat Pendidikan menengah (SLTA/sederajat) sebesar 26,59%, sedangkan penduduk dengan tingkat Pendidikan tinggi (sarjana) sebesar 13,73%. Melihat kondisi tersebut, maka pembangunan Pendidikan masih harus ditingkatkan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Beberapa indicator Pendidikan yang perlu mendapat perhatian adalah (1) meningkatkan angka partisipasi sekolah pada jenjang Pendidikan yang lebih tinggi, (2) menekan seminimal mungkin angka putus sekolah,

(3) terjangkaunya Pendidikan untuk semua masyarakat, dengan memberikan beasiswa, dan (4) memperkuat Pendidikan berbasis ketrampilan yang disesuaikan dengan permintaan pasar kerja, terutama pada Pendidikan menengah.

5. Penduduk Kota Salatiga Tahun 2021 berdasarkan Pekerjaan

Karakteristik pekerjaan memberikan gambaran tentang keragaman ketrampilan (skill variety), Jati diri dari pekerjaan (task identity), signifikansi pekerjaan (task significance), otonomi (autonomy) dan umpan balik (feed back). Berikut ini adalah gambaran tentang penduduk Kota Salatiga berdasarkan jenis pekerjaan dan jenis kelamin.

Tabel 2. 10 Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2021

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak/Blm Bekerja	22.59	21.104	43.694
2	Mengurus Rumah Tangga	0	24.012	24.012
3	Pelajar/Mahasiswa	17.886	16.421	34.307
4	Pensiunan	2.131	1.299	3.43
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	2.319	2.151	4.47
6	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	1.216	13	1.229
7	Kepolisian RI (POLRI)	478	42	520
8	Perdagangan	208	193	401
9	Petani/Pekebun	1.157	815	1.972
10	Peternak	77	10	87
11	Nelayan/Perikanan	6	0	6
12	Industri	26	13	39
13	Konstruksi	40	3	43
14	Transportasi	113	2	115
15	Karyawan Swasta	19.222	14.758	33.98
16	Karyawan BUMN	511	227	738
17	Karyawan BUMD	116	57	173
18	Karyawan Honorer	380	280	660
19	Buruh Harian Lepas	12.798	5.702	18.5
20	Buruh Tani/Perkebunan	629	348	977
21	Buruh Nelayan/Perikanan	8	0	8
22	Buruh Peternakan	44	10	54
23	Pembantu Rumah Tangga	1	441	442
24	Tukang Cukur	45	1	46
25	Tukang Listrik	36	0	36
26	Tukang Batu	512	0	512
27	Tukang Kayu	147	0	147
28	Tukang Sol Sepatu	15	0	15

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
29	Tukang Las/Pandai Besi	79	0	79
30	Tukang Jahit	121	349	470
31	Tukang Gigi	7	0	7
32	Penata Rias	3	50	53
33	Penata Busana	1	3	4
34	Penata Rambut	9	46	55
35	Mekanik	256	0	256
36	Seniman	101	11	112
37	Tabib	6	2	8
38	Paraji	3	5	8
39	Perancang Busana	0	6	6
40	Penterjemah	6	3	9
41	Imam Masjid	2	0	2
42	Pendeta	159	8	167
43	Pastor	17	0	17
44	Wartawan	23	4	27
45	Ustadz/Mubaligh	17	3	20
46	Juru Masak	20	30	50
47	Promotor Acara	1	0	1
48	Walikota	1	0	1
49	Wakil Walikota	1	0	1
50	Anggota DPRD Prop.	0	0	0
51	Anggota DPRD Kab./Kota	13	5	18
52	Dosen	341	250	591
53	Guru	695	1.738	2.433
54	Pilot	0	0	0
55	Pengacara	32	3	35
56				
57	Notaris	2	10	12
58	Arsitek	17	5	22
59	Akuntan	2	8	10
60	Konsultan	24	6	30
61	Dokter	85	115	200
62	Bidan	0	144	144
63	Perawat	47	180	227
64	Apoteker	6	21	27
65	Psikiater/Psikolog	3	5	8
66	Penyiar Televisi	1	0	1
67	Penyiar Radio	6	3	9
68	Pelaut	117	2	119
69	Peneliti	12	2	14

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
70	Sopir	1.057	0	1.057
71	Pialang	0	0	0
72	Paranormal	1	0	1
73	Pedagang	1.511	2.255	3.766
74	Perangkat Desa	2	1	3
75	Kepala Desa	0	0	0
76	Biarawan/Biarawati	0	11	11
77	Wiraswasta	9.591	5.671	15.262
78	Pekerjaan Lainnya	273	201	474
	Total	**97.382**	**99.058**	**196.44**

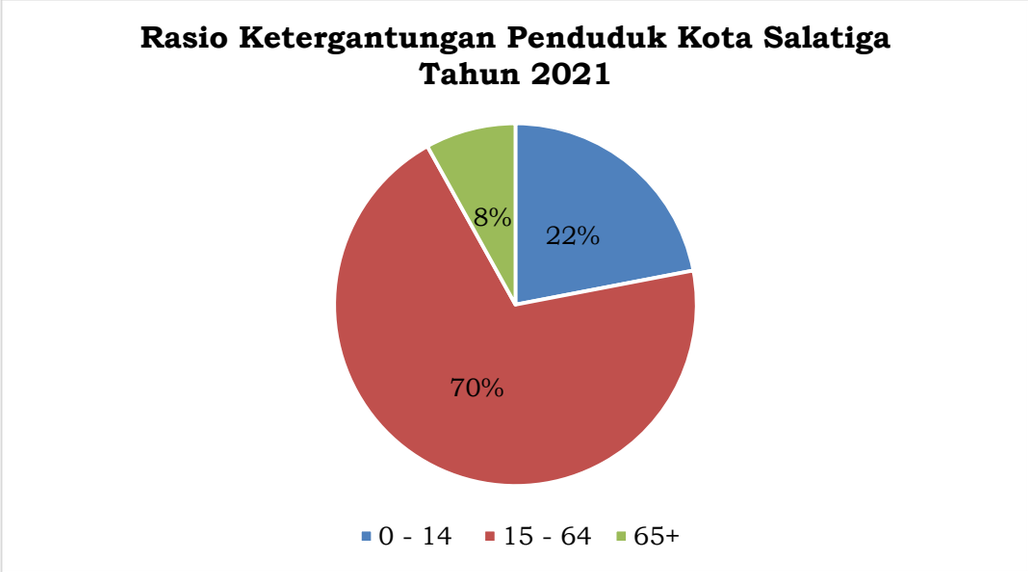
Sumber: Kota Salatiga Dalam Angka, Tahun 2022

Dari tabel nampak bahwa Tingkat Partisipasi Kerja laki-laki dan perempuan seimbang (97.382 : 99.058), bahkan Tingkat Partisipasi Kerja (TPK)Perempuan lebih tinggi, walaupun ada sekitar 12,22% bekerja di sektor domestic (Ibu Rumah Tangga). Sektor swasta (33.980), buruh harian lepas (18.500) dan wiraswasta (15.262) mendominasi jenis pekerjaan penduduk kota Salatiga. Dominasi berikutnya adalah di jenis pekerjaan pedagang, pertanian/perkebunan, dan sektor formal seperti tenaga guru, dosen, Kesehatan, dan lain-lain.

6. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) dan Bonus Demografi

Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Penduduk Kota Salatiga dilihat berdasarkan kelompok umur (produktivitasnya), secara keseluruhan terlihat bahwa penduduk usia produktif yakni 15-64 tahun lebih dominan dari penduduk usia tidak produktif yakni 0-14 tahun dan >65 tahun. Berdasarkan gambar 2.16 menunjukkan bahwa Salatiga saat ini sudah mendapatkan Bonus demografi (*The Window of Opportunity)*. Hal ini ditunjukkan dari besarnya angka ketergantungan *(Dependency Ratio)* Kota Salatiga pada tahun 2021 adalah sebesar 42,044 persen. (catatan: bonus demografi terjadi apabila besarnya persentase angka ketergantungan di bawah 50 persen). Kondisi ini tentu memberi dampak yang sangat besar bagi Kota Salatiga apabila mampu memanfaatkan momentum ini dengan baik. Agar manfaat Bonus Demografi ini bisa dinikmati dan berdampak secara positif, maka harus memperhatikan 4 pilar, yaitu Keluarga Berencana (KB) sebagai upaya pengendalian penduduk, Pendidikan, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan.



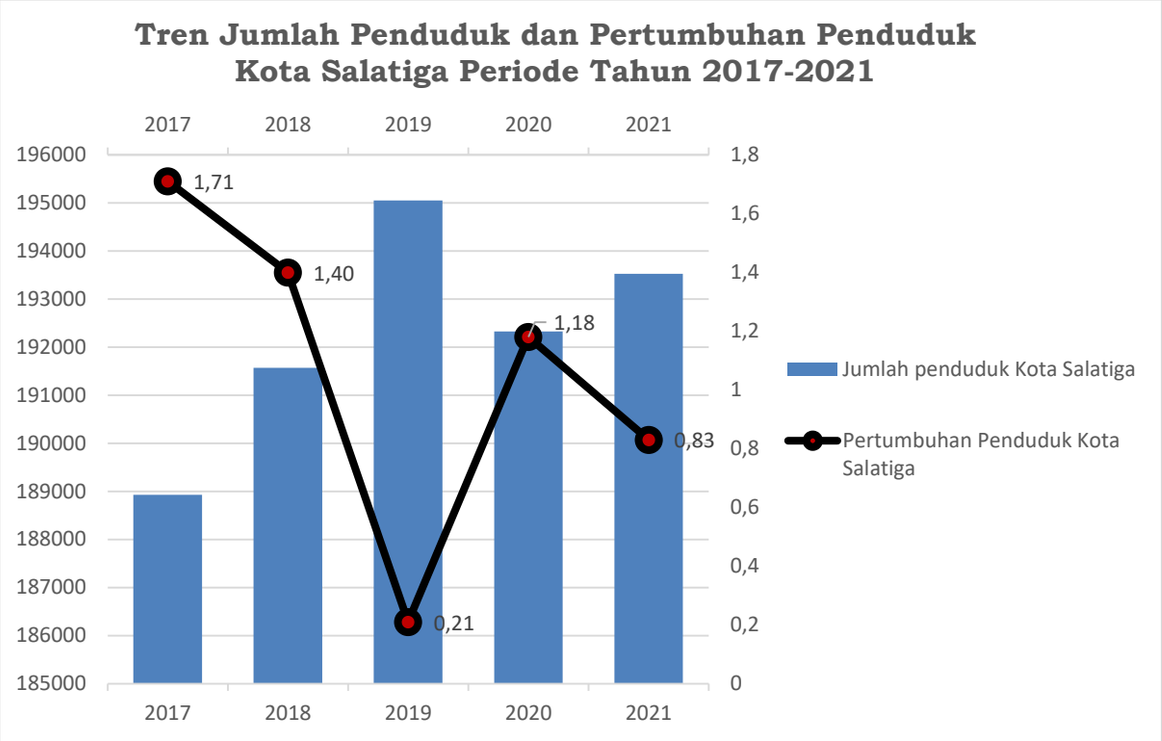
Sumber: Salatiga Dalam Angka 2022, BPS

Gambar 2. 16 Rasio ketergantungan (Berdasarkan Struktur Umur) Penduduk Kota Salatiga tahun 2021

7. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk suatu wilayah dapat diklasifikasikan dalam beberapa ukuran. Untuk mengukur tingkat lambat atau cepatnya pertumbuhan penduduk dapat digolongkan pada empat kategori yakni sangat lambat, lambat, cepat dan sangat cepat. Adapun pertumbuhan penduduk kategori sangat lambat dengan laju pertumbuhan penduduk kurang dari 1 persen pertahun, sedangkan pertumbuhan penduduk kategori lambat dengan laju pertumbuhan penduduk antara 1-2 persen per tahun. Pertumbuhan penduduk ketegori cepat dengan laju pertumbuhan penduduk di atas 2-3 persen pertahun dan pertumbuhan penduduk dikatakan sangat cepat dengan pertumbuhan penduduk besar dari 3 persen pertahun (Rahman, 2018).

Berikut adalah gambar (grafik) Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Kota Salatiga dari tahun 2017-2021.



Sumber: Kota Salatiga Dalam Angka, 2018-2022 (diolah)

Gambar 2. 17 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Salatiga Tahun 2017-2021

Laju pertumbuhan penduduk Kota Salatiga dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berfluktuasi dan masuk dalam kategori pertumbuhan penduduk lambat dan sangat lambat. Pada tahun 2017 sampai tahun 2019 terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tajam yakni sebesar 1,71 persen pada tahun 2017, turun menjadi 1,40 pada tahun 2018, dan bahkan turun sangat tajam di tahun 2019 yaitu sebesar 0,21 persen (titik terendah pertumbuhan penduduk selama rentang waktu 2017-2021). Kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup tajam yaitu dari 0,21 menjadi 1,18 persen dan di tahun 2021 kembali mengalami penurunan dan menyentuh angka dibawah 1 persen (0,83 persen). Naik turunnya laju pertumbuhan penduduk di Kota Salatiga ini sebagai indikasi dari dinamika kependudukan yang disumbang dari *Total Fertility Rate* atau kelahiran alami dan juga pertambahan penduduk yang disebabkan oleh aspek migrasi.

2.2. Aspek Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Penerapan SPM Kota Salatiga telah mengacu pada Permendagri Nomor 100 tahun 2018, yang telah dirubah dengan Permendagri nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pelaksanaan evaluasi penerapan SPM yang dilaksanakan adalah capaian indikator SPM tahun 2020 dan tahun 2021.

2.2.1 Evaluasi Terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan dinilai berdasarkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada Kesetaraan, PAUD dan Pendidikan Dasar. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, target capaian setiap tahunnya adalah 100% untuk setiap jenis pelayanan dasar dan indikator pencapaianannya. Rata-rata Pencapaian Indikator SPM Bidang Pendidikan selama dua tahun penerapan Indikator sesuai Permendagri Nomor 100 tahun 2018, yaitu pada tahun 2020 dan 2021, sudah mencapai 112,36%. Indikator APS untuk Pendidikan Kesetaraan masih jauh dari target yaitu hanya 61,95%. Salah satu penyebab rendahnya capaian indikator tersebut adalah adanya pandemi Covid-19. Capaian SPM pada PAUD juga belum mencapai target yang ditetapkan. Tingkat partisipasi sekolah di PAUD untuk anak usia 5-6 tahun masih jauh dari target. Penyebabnya adalah rendahnya kesadaran dan minat orang tua untuk menyekolahkan anak pada jenjang PAUD.

2.2.2 Evaluasi Terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Pencapaian Indikator SPM Bidang Kesehatan pada tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan capaian pada tahun 2020. Walaupun mengalami kenaikan, tetapi pencapaian kinerja indikator masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan, rata-rata capaian pada tahun 2021 hanya mencapai 64,26%.

Belum tercapainya target Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan sampai dengan tahun 2021, disebabkan oleh :

1. Hambatan pelayanan kesehatan karena Pandemi Covid-19;
2. Pembatasan kegiatan posyandu balita di masa pandemi covid-19;
3. Masih belum diberlakukannya pembelajaran secara tatap muka di sekolah, menyebabkan pelayanan Kesehatan untuk Usia Pendidikan Dasar menjadi terhambat;
4. Belum semua Posbindu belum aktif selama pandemi
5. Terbatasnya kegiatan posyandu lansia, Dilarang melakukan kegiatan pengumpulan masa termasuk pemberian yankes;
6. Setiap penderita hipertensi yang ditemukan sudah mendapatkan pelayanan sesuai standar tetapi capaian denominatornya belum sesuai prevalensi yang ditetapkan;
7. Setiap penderita diabetes melitus yang ditemukan sudah mendapatkan pelayanan sesuai standar tetapi capaian denominatornya belum sesuai prevalensi yang ditetapkan;

8. Setiap ODGJ berat yang ditemukan sudah mendapatkan pelayanan sesuai standar tetapi capaian denominatornya belum sesuai prevalensi yang ditetapkan;
9. Rendahnya cakupan pasien yang datang berobat, Sebagian masyarakat takut berkunjung ke faskes terkait gejala TB yang mirip covid & khawatir mendapat status covid, Kader tidak berani melakukan deteksi dini ke masyarakat;
10. Adanya pandemi covid, sehingga untuk pemeriksaan VCT mobile pada populasi kunci (WPS, MSM, Waria, Penasun) tidak berjalan optimal, Belum semua penasun mau mengakses ke layanan karena takut diketahui oleh aparat, stigma, diskriminasi.

Walaupun Indikator SPM Bidang Kesehatan belum mencapai target yang telah ditetapkan, akan tetapi upaya pemecahan masalah telah dilaksanakan dengan Langkah-langkah sebagai berikut :

1. Tetap membuka layanan dengan membuat jalur sakit dan sehat disertai protokol kesehatan secara ketat, sweeping dan kunjungan rumah;
2. Mengaktifkan posyandu balita dengan menerapkan protokol Kesehatan;
3. Memberikan layanan kesehatan bersamaan dengan pelaksanaan BIAS;
4. Mengaktifkan kembali posbindu sesuai protokol kesehatan dan membuka layanan posbindu khusus;
5. Membuka layanan konsultasi kesehatan lansia, Memberikan layanan kesehatan pada lansia yang menderita sakit;
6. Meningkatkan jejaring dengan lintas sektor dan lintas program (fasyankes lain, posyandu lansia, posyandu remaja, UKK) dalam penemuan kasus hipertensi dan Diabetes Melitus;
7. Meningkatkan jangkauan skrining deteksi dini gangguan jiwa;
8. Layanan esensial di faskes mulai di buka dan DOTS center lebih diaktifkan kembali, Penyuluhan dan sosialisasi tentang pelayanan TB & covid, Motivasi melakukan deteksi dini dengan APD & menjaga prokes;
9. Peningkatan penguatan layanan konseling dan edukasi pasien TB-HIV, Peningkatan kegiatan pemeriksaan HIV bagi penasun dan kerjasama dengan LSM yang menaungi penasun untuk pencapaian target.

Dengan upaya-upaya pemenuhan penerapan SPM tersebut diharapkan progress capaian indikator SPM Kesehatan akan semakin meningkat pada periode berikutnya.

2.2.3 Evaluasi Terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum

Pencapaian Indikator Standar Minimal Bidang Pekerjaan Umum berupa Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota dan Jumlah rumah yang

memiliki akses pengolahan berupa cubluk, lumpur tinja diolah di IPLT, dan memiliki sambungan rumah dan air limbah nya diolah di IPAL, telah mencapai 100%, dengan rata-rata capaian tahun 2020-2021 sebesar 115,91%.

Tahun 2020 belum mencapai target, capaian pada angka 96%, sedangkan tahun 2021 telah melampui target dengan capaian 115,91%.

Capaian yang melebihi target capaian didukung dengan pelaksanaan program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah khususnya untuk pelayanan dasar Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic, berupa :

a. Penambahan Tanki septic sebanyak 212 unit; dan
b. penambahan sambungan rumah sebanyak 124 SR.

Pada periode berikutnya perlu dilakukan penghitungan kebutuhan barang dan jasa pendukung penerapan SPM Bidang Pekerjaan umum secara tersistem dan terintegrsi agar data dasar yang diperoleh lebih mencerminkan kebutuhan riil masyarakat atas pelayanan standar minimal bidang Pekerjaan Umum.

2.2.4 Evaluasi Terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat

Indikator SPM Bidang Perumahan rakyat berupa Presentase jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan Presentase jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni untuk Kota Salatiga sampai saat ini masih belum terdata secara lengkap. Hal ini dikarenakan masih belum adanya inventarisasi obyek penerima layanan SPM bidang Perumahan Rakyat, Data Program Pemerintah yang berkaitan dengan relokasi penduduk serta integrasi informasi kebencanaan Kota Salatiga.

Walaupun capaian indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat sampai dengan tahun 2021 belum bisa dihitung karena tidak adanya realisasi kegiatan, tetapi program-program pendukung penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat telah difasilitasi oleh Pemerintah Kota Salatiga berupa pengalokasian anggaran untuk mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat atas perumahan.

Pengalokasian anggaran tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan Penyediaan Rumah Layak Huni dan Terjangkau serta Penyediaan Lingkungan Perumahan yang Sehat dan Aman yang didukung PSU. Pada tahun 2021, kedua indikator tersebut mencapai target yang ditetapkan dengan rata-rata capaian 99,25%.

2.2.5 Evaluasi Terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Seluruh indikator capaian penerapan SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sampai dengan 2021 telah mencapai 100%. Walaupun demikian, jika dilihat dari capaian program yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi

Penerapan SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban, ternyata masih belum mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan barang/jasa pendukung SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat maih belum optimal dengan rata-rata capaian kinerja program tersebut adalah 88,12%. Indikator program dimaksud adalah Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, dan Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota.

Selanjutnya perlu dilakukan optimalisasi pemenuhan barang dan jasa standar pelayanan minimal bidang Trantibunlinmas, agar kualitas SPM menjadi lebih baik.

2.2.6 Evaluasi Terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial sebagaimana diamanahkan pada Permendagri 100 tahun 2018 untuk Kota Salatiga sampai dengan tahun 2021 masih di rata-rata capaian 94%, walaupun pada tahun 2020 capaian sudah 100%.

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pemenuhan target tersebut adalah masih adanya kesulitan untuk memperoleh data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar di luar panti serta kurangnya anggaran dalam merealisasikan pelaksanaan kegiatan.

Walaupun demikian, kegiatan-kegiatan penunjang penyediaan barang dan jasa dalam rangka mendukung penerapan SPM bidang Sosial, telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga dengan mengalokasikannya pada program-program yang dilaksanakan Dinas Sosial, dengan rata-rata capaian Indikator Program sebesar 188,85%.

Periode berikutnya lebih ditekankan pada pemenuhan Indikator SPM yang harus dipenuhi dan perlu dilaksanakan penghitungan barang dan jasa pendukung pelaksanan SPM Bidang Sosial yang lebih sistemtis dan terintegrasi.

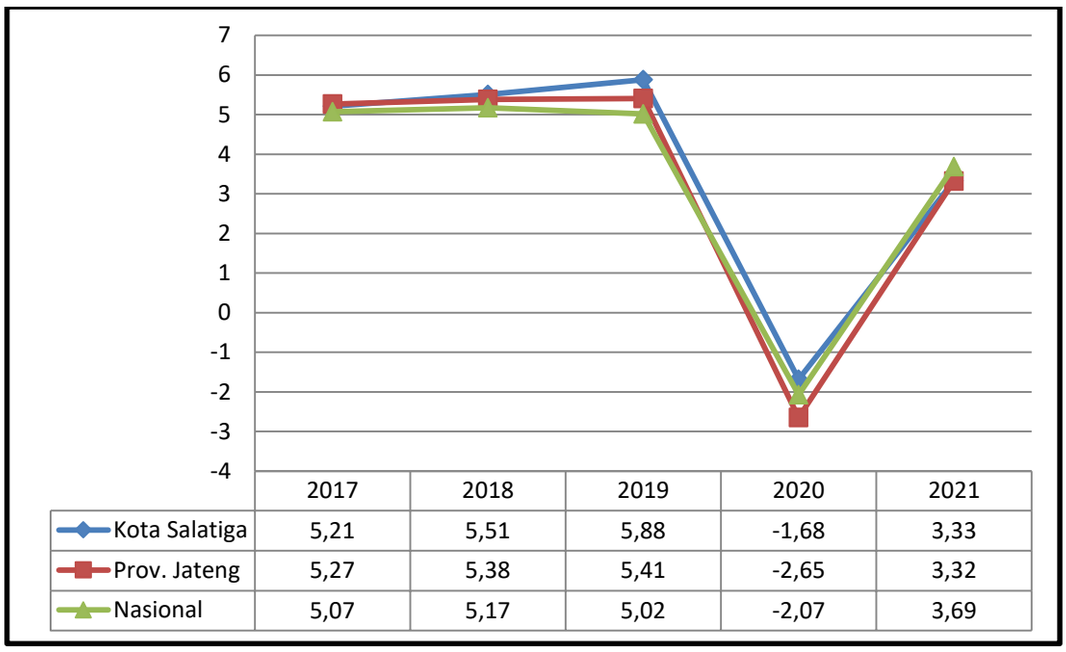
2.3. Aspek Kesejahteraan Rakyat

2.3.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi ekonomi makro Kota Salatiga selama lima tahun (2017-2021) menunjukan kinerja yang relatif stabil seiring membaiknya perekonomian nasional dan perekonomian global. Sejak akhir tahun 2019 pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia mengakibatkan perekonomian dunia dan nasional mengalami kontraksi. Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga mengalami pertumbuhan dengan nilai 3,33% berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah 3,32% dengan selisih 0,01% dan di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional 3,69%.

Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana tergambar dalam grafik berikut.



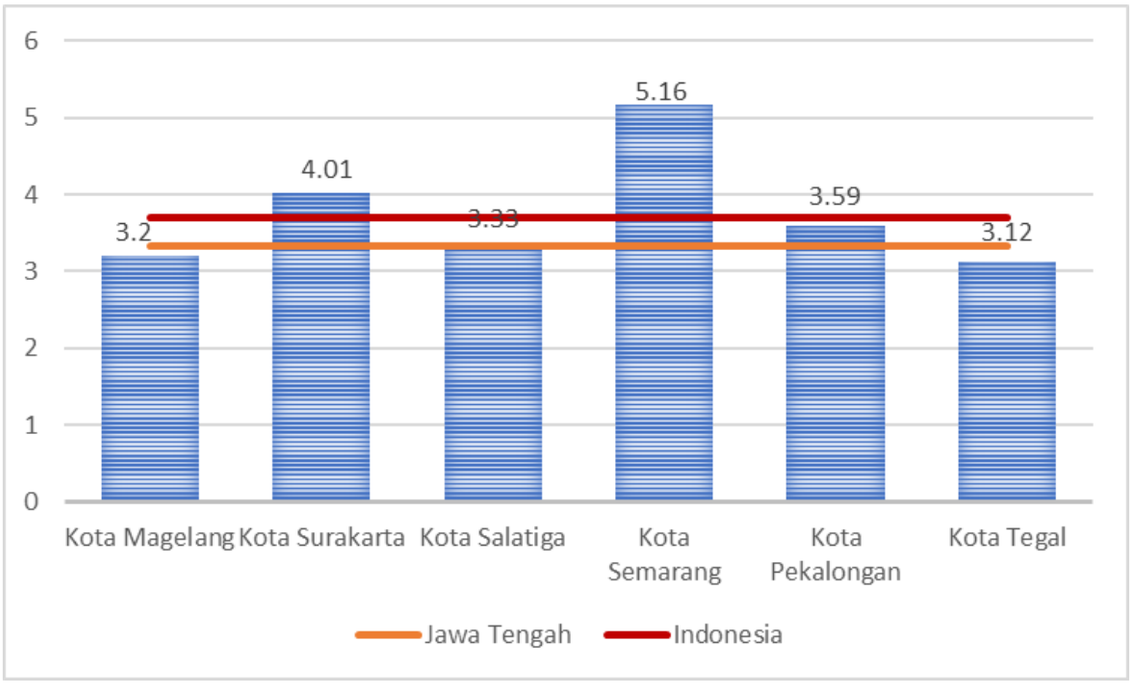
	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Salatiga	5,21	5,51	5,88	-1,68	3,33
Prov. Jateng	5,27	5,38	5,41	-2,65	3,32
Nasional	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69

Sumber : https://salatigakota.bps.go.id/, https://jateng.bps.go.id, https://www.bps.go.id

Gambar 2. 18 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (%)

Selama periode tersebut, pertumbuhan ekonomi tahunan Kota Salatiga selalu di atas Provinsi Jawa Tengah maupun nasional (lihat Gambar 2.18).

Pada tahun 2021, walaupun tingkat pertumbuhan Kota Salatiga masih di bawah tingkat pertumbuhan nasional (3,7%) namun Kota Salatiga memiliki tingkat pertumbuhan yang sama dengan Jawa Tengah yaitu 3,33%. Angka ini menunjukkan tingkat pertumbuhan tertinggi ketiga setelah Kota Semarang (5,16%) dan Kota Surakarta (4,01%). Sementara dua kota lainnya di Jawa Tengah, Kota Magelang dan Kota Tegal masih berada di bawah nilai pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah.



Sumber: Tabel Dinamis BPS 2022

Gambar 2. 19 Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga dengan Kota Lainnya di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah serta Nasional Tahun 2021 (%)

2. Pertumbuhan PDRB Kota Salatiga

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang paling sering digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan secara ekonomi karena PDRB menggambarkan nilai output yang dihasilkan oleh seluruh sektor produksi dalam suatu provinsi atau kabupaten/kota. Ada dua macam PDRB, yaitu PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB) atau sering disebut pula sebagai PDRB nominal dan PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan (ADHK) pada tahun 2010 atau biasa disebut sebagai PDRB riil. Perubahan PDRB nominal atau PDRB ADHB dapat digunakan untuk menganalisis ada/tidaknya perubahan sektor ekonomi sedangkan PDRB riil atau PDRB ADHK digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi karena dengan harga konstan, maka perubahan PDRB ADHK merefleksikan pertumbuhan kuantitas produksi.

PDRB ADHB Kota Salatiga dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2017-2021) meningkat 23,11 persen dari Rp 11,4 triliun pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp 14,01 triliun pada tahun 2021. Sedangkan PDRB ADHK naik dari Rp 8,6 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp 9,82 triliun pada tahun 2021, yang berarti perekonomian Kota Salatiga tumbuh 13,92 persen. Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK menurut lapangan usaha di Kota Salatiga dalam periode tersebut berturut-turut dapat dilihat pada Tabel 2.11 dan Tabel 2.12.

Tabel 2. 11 Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga Tahun 2017-2021

PDRB	2017	2018	2019	2020*	2021**
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (triliun Rp)	11,38	12,34	13,31	13,27	14,01
PDRBAtas Dasar Harga Konstan (triliun Rp)	8,62	9,13	9,67	9,50	9,82

** : Angka sementara*
*** : Angka sangat sementara*
Sumber : https://salatigakota.bps.go.id/

Tabel 2. 12 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (Milliar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	525,55	567,53	599,35	606,19	631,75
B	Pertambangan dan Penggalian	5,18	5,22	5,36	5,44	5,34
C	Industri Pengolahan	3.569,64	3.835,46	4.161,27	4.276,68	4.586,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21,81	23,31	24,23	24,71	25,76
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,75	8,20	8,67	9,06	9,31
F	Konstruksi	1.615,22	1.790,90	1.918,19	1.850,35	1.929,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.507,69	1.629,05	1.756,07	1.704,86	1.823,95
H	Transportasi dan Pergudangan	336,84	363,07	400,61	304,90	324,56
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	850,60	920,16	1.001,71	944,91	1.002,97
J	Informasi dan Komunikasi	344,81	385,31	428,89	510,45	542,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	412,15	440,72	462,86	471,77	498,68
L	Real Estat	536,69	579,42	609,36	612,78	631,73
M,N	Jasa Perusahaan	136,24	154,42	175,63	167,00	174,33
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	613,16	652,.23	689,70	690,22	705,65

P	Jasa Pendidikan	606,29	662,72	718,06	733,79	741,66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	180,50	197,62	214,67	239,51	242,33
R,S,T, U	Jasa lainnya	112,22	123,83	135,22	127,24	129,09
Produk Domestik Regional Bruto		**11.382,35**	**12.339,18**	**13.310,27**	**13.269,94**	**14.006,59**
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)		**60,22**	**64,57**	**68,57**	**67,50**	**72,38**

Sumber : Tabel Dinamis BPS Kota Salatiga

*Keterangan: *) Angka sementara*

***) Angka sangat sementara*

Selama periode tersebut, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi dan sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil menjadi tiga sektor dengan rangking PDRB tertinggi. Perbedaannya, untuk PDRB ADHB sektor konstruksi berada pada posisi ke-2 dan sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil berada pada posisi ke-3, sementara untuk PDRB ADHK posisi tersebut berkebalikan. Sedangkan sektor penyumbang PDRB terkecil selama periode tersebut adalah pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2021, sektor industri pengolahan menyumbang Rp 4.586.93 miliar atau 32,86 persen dari total PDRB ADHB dan sektor pertambangan dan penggalian menyumbang Rp 5,34 miliar atau 0,038 persen dari total PDRB ADHB (lihat Tabel 2.10). Sedangkan sektor industri pengolahan menyumbang Rp 2.955,02 miliar atau 30,09 persen dari total PDRB ADHK dan sektor pertambangan dan penggalian menyumbang Rp 3,27 miliar atau 0,033 persen dari total PDRB ADHK (lihat Tabel 2.13).

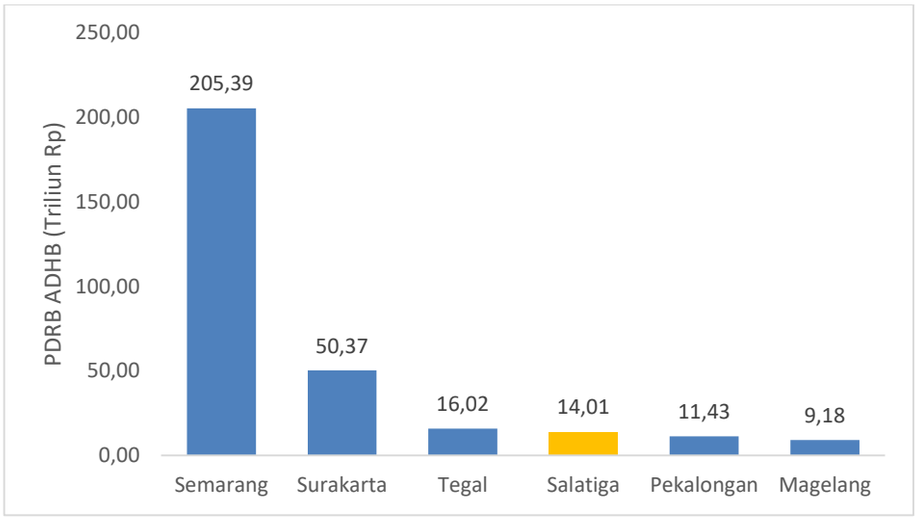
Tabel 2. 13 PDRB ADHK Tahun Dasar Menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (Milliar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	393,93	411,85	424,95	419,10	430,02
B	Pertambangan dan Penggalian	3,36	3,35	3,40	3,36	3,27
C	Industri Pengolahan	2.530,04	2.649,47	2.823,78	2.831,44	2.955,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	19,77	20,55	21,34	21,96	23,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,97	7,35	7,63	7,77	7,87

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
F	Konstruksi	1.214,06	1.288,65	1.341,14	1.288,95	1.299,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.224,67	1.289,89	1.361,42	1.310,22	1.380,39
H	Transportasi dan Pergudangan	296,34	316,36	342,50	251,54	259,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	675,18	724,15	778,44	730,71	762,77
J	Informasi dan Komunikasi	351,49	392,86	432,88	514,41	546,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	305,38	316,87	327,71	333,74	337,29
L	Real Estat	465,79	490,73	509,07	508,42	519,27
M,N	Jasa Perusahaan	101,94	112,71	124,17	115,67	119,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	431,76	454,27	473,92	467,89	476,44
P	Jasa Pendidikan	384,10	410,48	437,48	436,68	436,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	128,67	139,15	148,68	161,98	162,41
R,S,T, U	Jasa lainnya	90,79	99,16	107,51	99,88	100,49
Produk Domestik Regional Bruto		8.624,24	9.127,86	9.666,00	9.503,16	9.820,29
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)		**45,63**	**47,76**	**49,80**	**48,34**	50,74

Sumber : Tabel Dinamis BPS Kota Salatiga

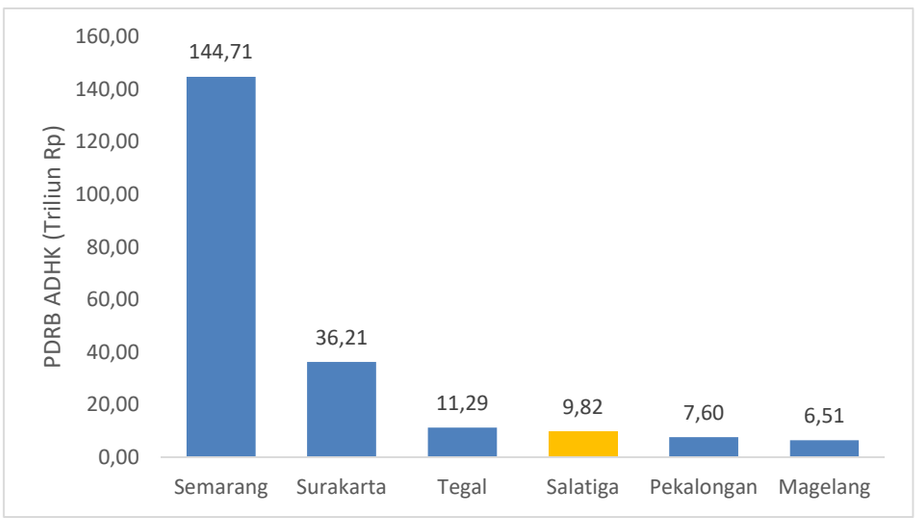
Dibandingkan kota-kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2021 posisi relatif PDRB ADHB Kota Salatiga berada di bawah kota Semarang, kota Surakarta dan kota Tegal dan berada di atas kota Pekalongan dan kota Magelang (lihat Gambar 2.20). PDRB ADHB Kota Semarang jauh lebih tinggi dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah, termasuk Kota Salatiga. PDRB ADHB Kota Salatiga adalah Rp 14,01 triliun atau hanya sekitar 7 persen dari PDRB ADHB Kota Semarang.



Sumber : Tabel Dinamis BPS Jawa Tengah diolah

Gambar 2. 20 Posisi Relatif PDRB ADHB Kota Salatiga Tahun 2021 (Triliun Rupiah)

Dibandingkan kota-kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2020 posisi relatif PDRB ADHK Kota Salatiga berada di bawah Kota Semarang, Kota Surakarta dan Kota Tegal dan berada di atas Kota Pekalongan dan Kota Magelang (lihat Gambar 2.21). PDRB ADHK Kota Semarang jauh lebih tinggi dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah, termasuk Kota Salatiga. PDRB ADHK Kota Salatiga adalah Rp 9,82 triliun atau hanya sekitar 6,78 persen dari PDRB ADHK Kota Semarang.



Sumber : Tabel Dinamis BPS Jawa Tengah diolah

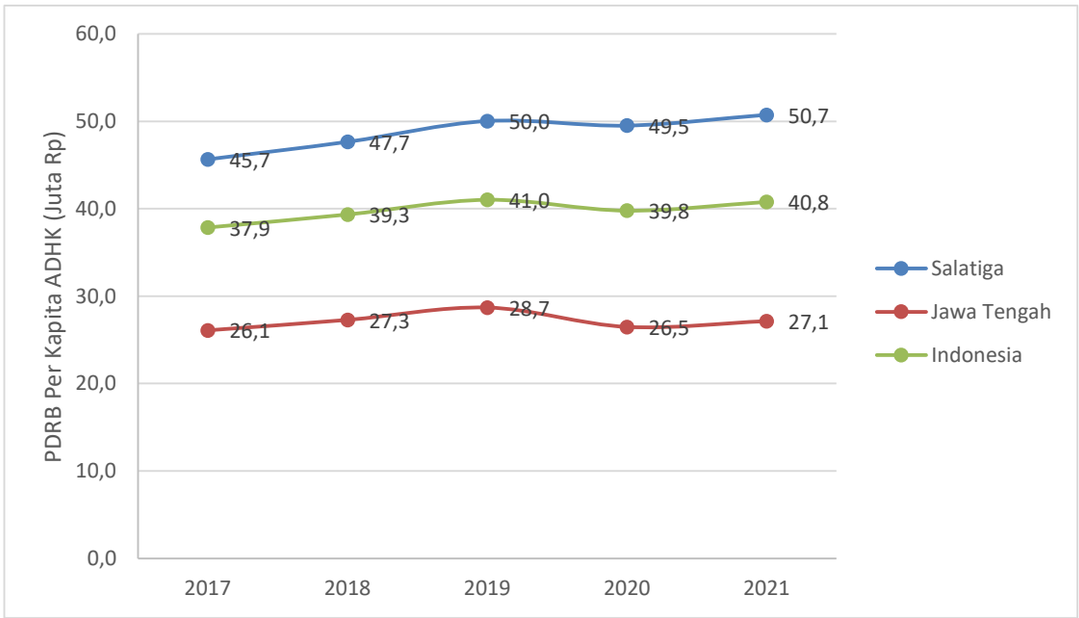
Gambar 2. 21 Posisi Relatif PDRB ADHK Kota Salatiga Tahun 2021 (Triliun Rupiah)

3. PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Peningkatan PDRB per kapita menunjukkan peningkatan kesejahteraan penduduk atau masyarakat. Ini merujuk pada definisi PDRB per kapita yaitu merupakan hasil pembagian PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita atas

dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

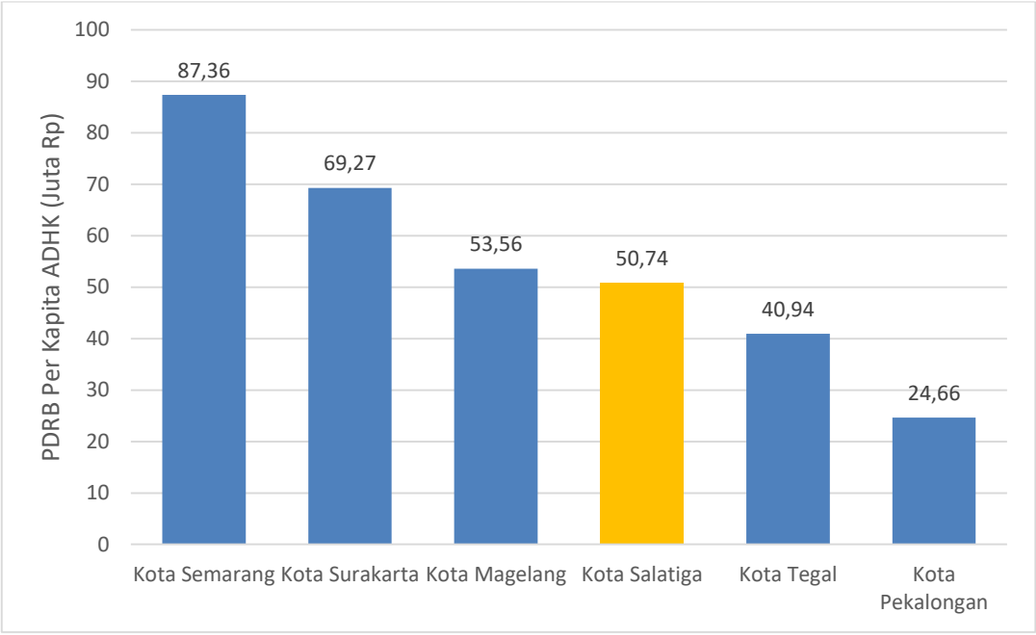
PDRB perkapita Kota Salatiga dalam kurun waktu tahun 2017-2019 terus mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp 45,7 juta pada tahun 2017 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan menjadi sebesar Rp 50 juta pada tahun 2019. Namun demikian PDRB Kota Salatiga mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020. PDRB Kota Salatiga tahun 2020 adalah sebesar Rp 49,5 juta sebelumnaik kembali pada tahun 2021 ke Rp 50,7 juta. Kondisi PDRB per Kapita Kota Salatiga sejalan dengan kondisi Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia yang juga mengalami penurunan di tahun 2020. Namun demikian kondisi PDRB Kota Salatiga pada tahun 2020 masih berada di atas Provinsi Jawa Tengah (yaitu sebesar Rp 27,1 juta) dan Nasional (yaitu sebesar Rp 39,8 juta) (dapat dilihat di Gambar 2.22).



Sumber: Tabel Dinamis BPS diolah

Gambar 2. 22 Perkembangan PDRB per Kapita Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (juta rupiah)

Dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Tengah pada tahun 2021, PDRB per kapita Kota Salatiga (Rp 50,74 juta) berada pada peringkat keempat setelah Kota Semarang (Rp 87,36 juta), Kota Surakarta (Rp 69,27) dan Kota Magelang (Rp 53,56 juta).



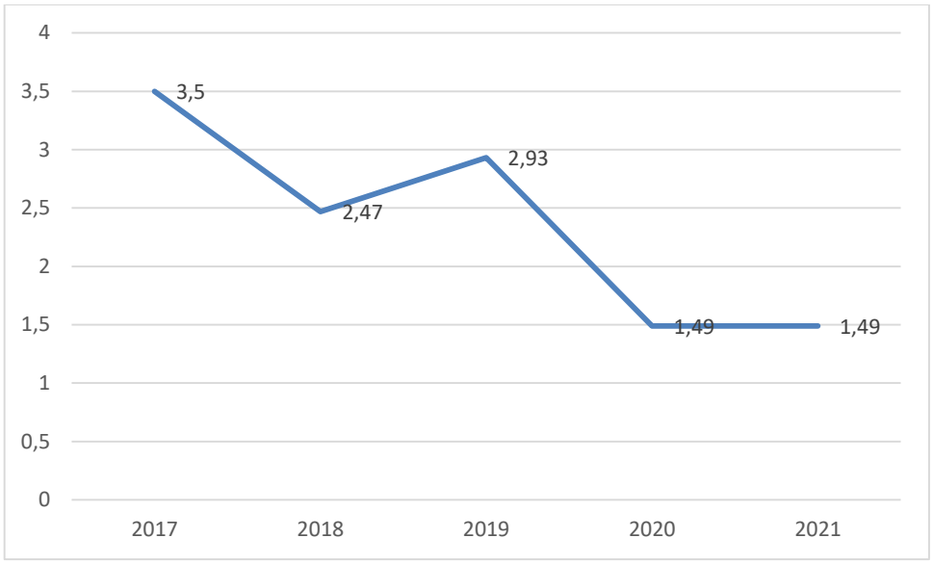
Sumber : BPS, 2022

Gambar 2. 23 Posisi PDRB per Kapita Kota Salatiga Tahun 2021 (juta rupiah)

4. Laju Inflasi

Inflasi merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga dan yang terjadi secara terus menerus. Kenaikan satu atau dua barang dan jasa tidak dapat disebut sebagai inflasi, terkecuali bila kenaikan itu meluas yang mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Inflasi akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat, karena inflasi akan menurunkan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli masyarakat mengindikasikan bahwa kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa menurun.

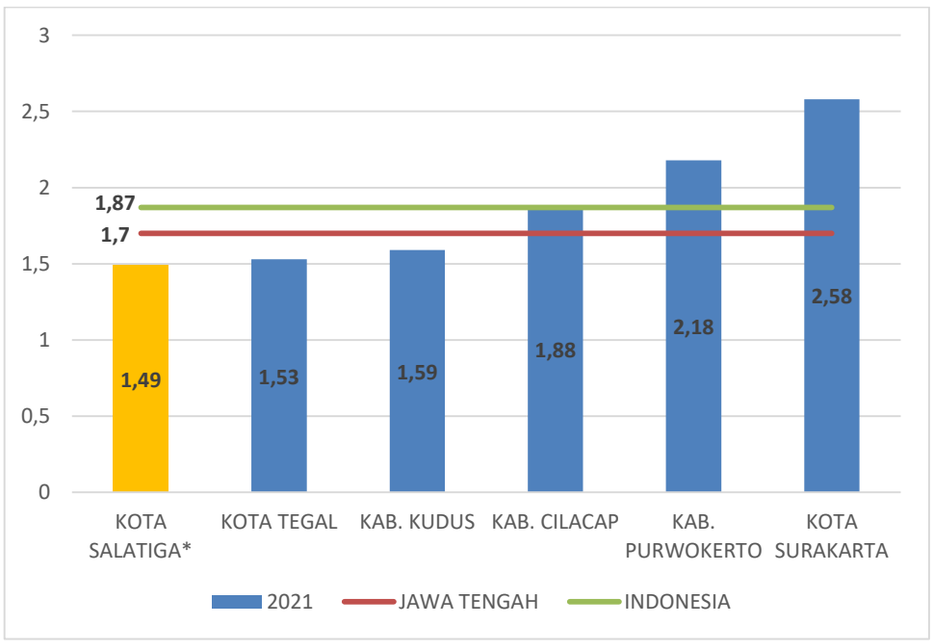
Inflasi Kota Salatiga pada kurun waktu 2017-2018 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2017 inflasi di Kota Salatiga adalah sebesar 3,5 persen dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 2,47 persen. Sedangkan mulai tahun 2019 tidak dilakukan survei biaya hidup yang menjadi dasar perhitungan inflasi oleh Badan Pusat Statistik Kota Salatiga dikarenakan Kota Salatiga tidak termasuk kota yang mendapatkan alokasi anggaran survei biaya hidup. Laju Inflasi Kota Salatiga kemudian digambarkan dengan laju inflasi kota terdekat yaitu Kota Semarang. Laju inflasi Kota Salatiga dalam kurun waktu 2017-2021 ditunjukkan oleh Gambar 2.24 berikut.



Sumber : BPS 2021

Gambar 2. 24 Perkembangan Inflasi Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (year on year) (%)

Kondisi inflasi Kota Salatiga tahun 2021 jika dibandingkan dengan kondisi capaian kota lainnya di Jawa Tengah menunjukkan terendah (proyeksi dari inflasi Kota Semarang) di antara kota dan kabupaten yang diukur laju inflasinya di Jawa Tengah. Laju inflasi Kota Salatiga (1,49%) pada tahun 2021 berada di bawah laju inflasi Provinsi Jawa Tengah (1,7%) dan Indonesia (1,87%). Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.25.



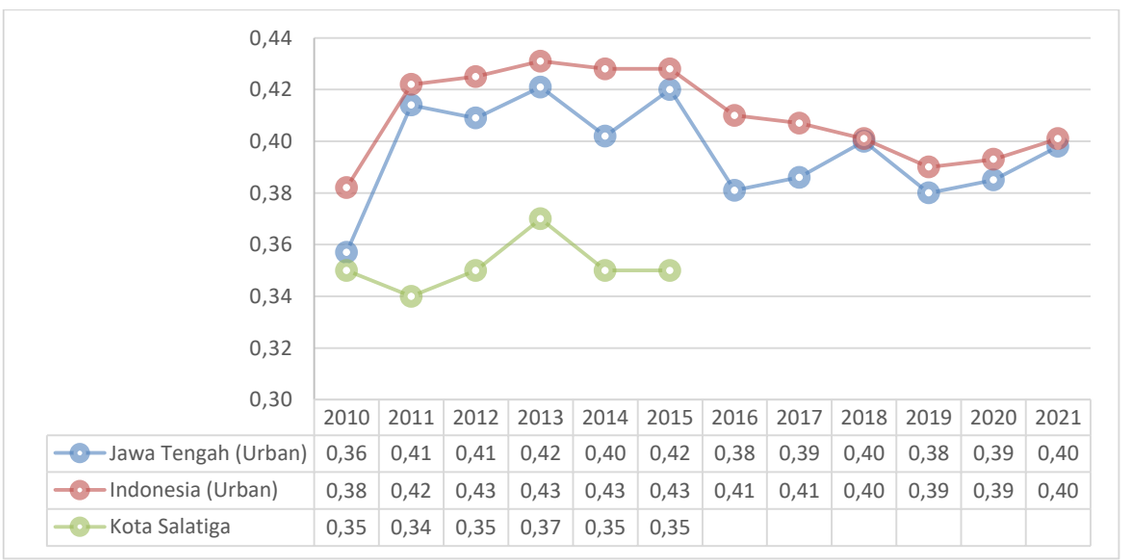
Sumber : Berita Resmi Statistik masing-masing BPS

Gambar 2. 25 Posisi Relatif Inflasi Kota Salatiga dibandingkan Kota Lainnya di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2021 (%)

5. Indeks Gini

Indeks Gini atau *Gini Ratio* dalam dokumen ini digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan di Kota Salatiga. Tingkat ketimpangan ditangkap oleh koefisien Gini dari yang paling rendah ke yang paling tinggi dengan rentang dari 0 hingga 1. Semakin mendekati 0, artinya ketimpangan pendapatan semakin rendah dan semakin mendekati 1 menandakan ketimpangan pendapatan di suatu daerah semakin tinggi. Tingkat ketimpangan juga dapat dikategorikan menjadi 3 tingkat, yaitu rendah (Indeks Gini kurang dari 0,3), sedang (Indeks Gini 0,3 hingga 0,4) dan tinggi (Indeks Gini lebih dari 0,4).

Selama 5 tahun (2010-2015), Kota Salatiga memiliki Gini rasio yang cenderung stabil di kisaran 0,35 dan dapat dikatakan memiliki ketimpangan pendapatan sedang. Kenaikan hanya terjadi di tahun 2013 di angka 0,37 tetapi tidak mengubah kategori ketimpangan yaitu di kategori sedang. Angka ini masih jauh di bawah koefisien Gini Jawa Tengah dan Indonesia yang diukur pada daerah urban pada tahun yang sama. Area urban Jawa Tengah dan Indonesia cenderung berada pada kategori ketimpangan tinggi dengan indeks Gini rata-rata 0,41 (Indonesia) dan 0,42 (Jawa Tengah). Pada tahun 2016 hingga 2019, Koefisien Gini di tingkat nasional dan provinsi menunjukkan penurunan hingga ke level ketimpangan sedang sebelum kembali berangsur naik ke 0,40 di tahun 2021. Hal ini dapat dikaitkan dengan adanya disrupsi akibat pandemi Covid-19. Namun sejak 2016, tidak tersedia data Koefisien Gini pada level kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sehingga perbandingan hanya dapat dilakukan hingga tahun 2015.



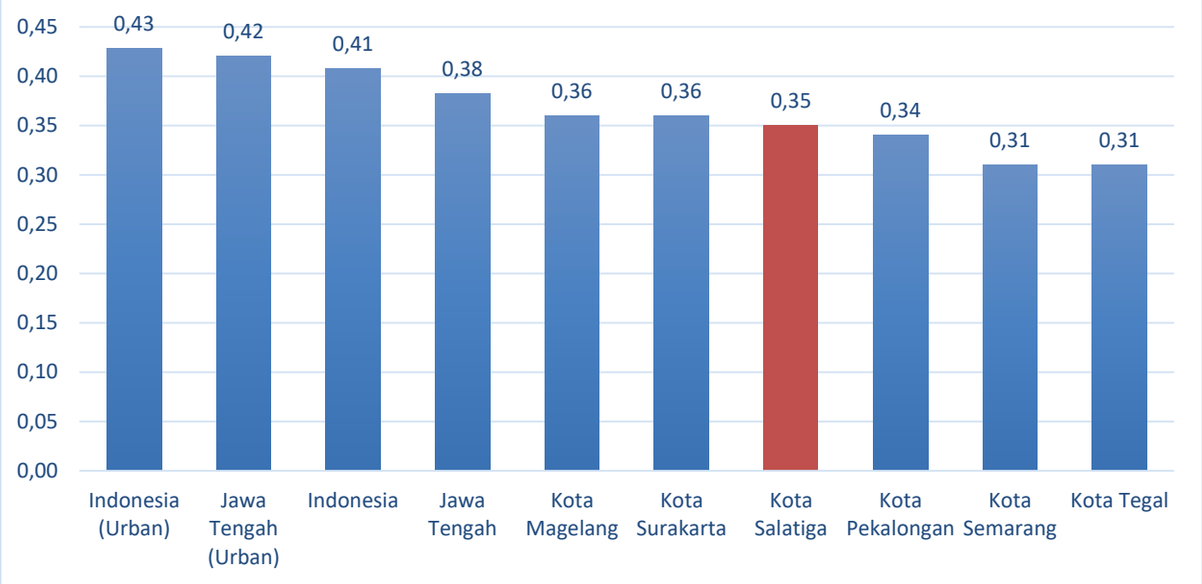
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jawa Tengah (Urban)	0,36	0,41	0,41	0,42	0,40	0,42	0,38	0,39	0,40	0,38	0,39	0,40
Indonesia (Urban)	0,38	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43	0,41	0,41	0,40	0,39	0,39	0,40
Kota Salatiga	0,35	0,34	0,35	0,37	0,35	0,35						

Sumber: BPS diolah

Gambar 2. 26 Perkembangan Indeks Gini Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia

Dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Tengah pada tahun 2015, Kota Salatiga merupakan Kota dengan Indeks Gini tertinggi ketiga (0,35) setelah Kota Magelang dan Kota Surakarta yang memiliki Indeks Gini 0,36. Kemudian di posisi

keempat tertinggi adalah Kota Pekalongan, disusul Kota Semarang dan Kota Tegal di posisi kelima dan keenam dengan Indeks Gini 0,31. Keenam kota ini berada pada kategori ketimpangan sedang dan berada di bawah Koefisien Gini Indonesia dan Jawa Tengah, baik itu diukur di area urban maupun keseluruhan.

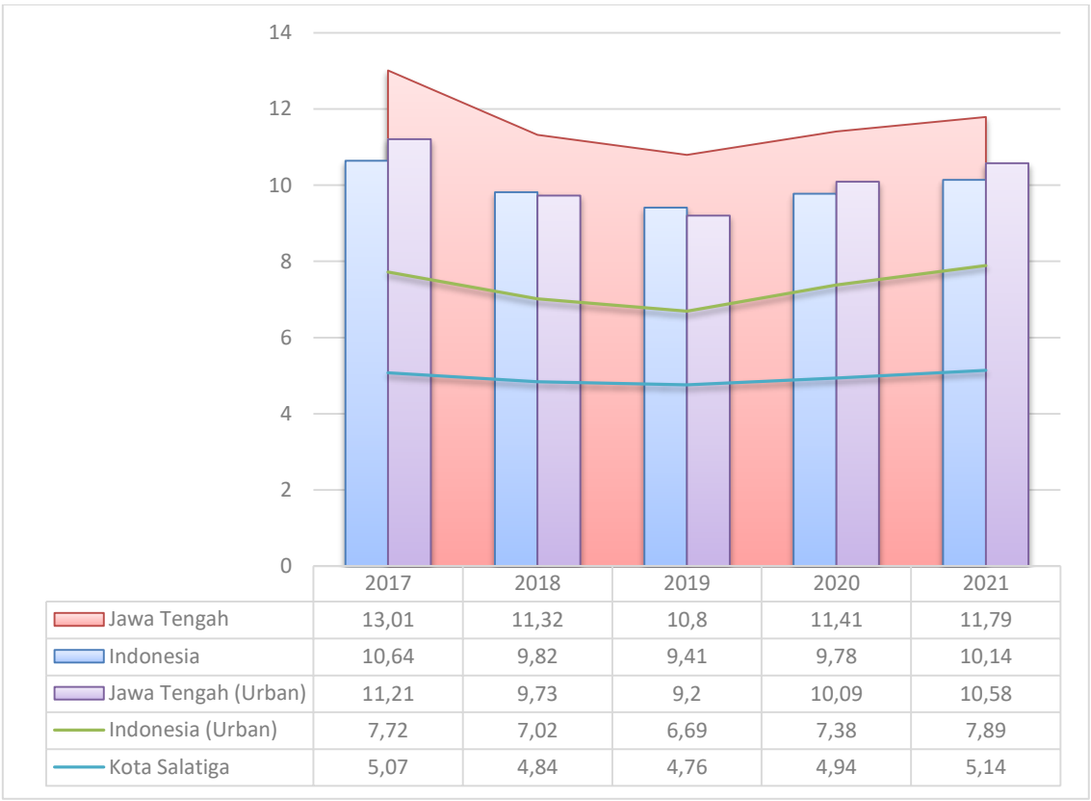


Sumber: BPS diolah

Gambar 2. 27 Posisi Relatif Indeks Gini Kota Salatiga Tahun 2015

6. Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kota Salatiga mengalami penurunan hampir sebesar 1 persen, dari 5,24 persen ke 4,76 persen di tahun 2016 sampai 2019. Tren penurunan ini juga sejalan dengan tren penurunan penduduk miskin di Jawa Tengah dan Indonesia secara keseluruhan maupun di area urban. Penurunan di tingkat nasional sebesar 1 persen, dari 7,79 persen ke 6,69 persen (area urban) dan dari 10,86 persen ke 9,41 persen (keseluruhan). Sedangkan penurunan di Jawa Tengah mencapai 2 persen, dari 11,44 persen ke 9,20 persen (area urban) dan dari 13,27 persen ke 10,80 persen (keseluruhan). Namun terjadi peningkatan penduduk miskin di tahun 2020 hingga 2021. Jumlah penduduk miskin di Kota Salatiga tahun 2021 sebesar 5,14 persen, hampir kembali ke jumlah di tahun 2016 yaitu sebesar 5,24 persen. Di tingkat yang lebih luas, Jawa Tengah dan Indonesia juga mengalami peningkatan penduduk miskin di tahun 2020 dan 2021. Walaupun peningkatan jumlah penduduk miskin di tahun 2021 tidak menyebabkan jumlah penduduk miskin di tahun tersebut melebihi jumlah penduduk miskin di tahun 2016, kecuali Indonesia area urban, peningkatan penduduk miskin ini perlu mendapat perhatian.

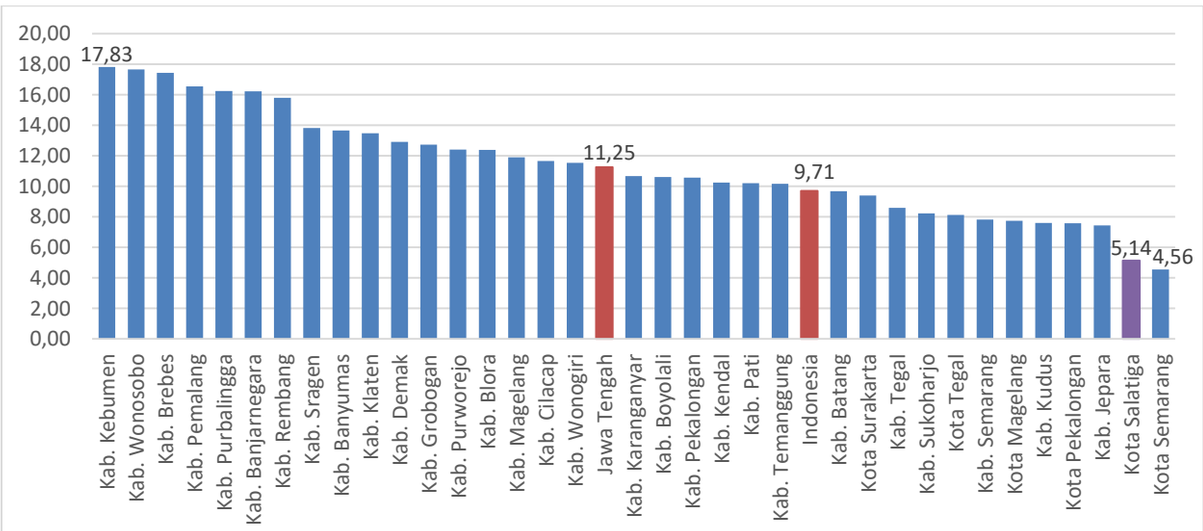


	2017	2018	2019	2020	2021
Jawa Tengah	13,01	11,32	10,8	11,41	11,79
Indonesia	10,64	9,82	9,41	9,78	10,14
Jawa Tengah (Urban)	11,21	9,73	9,2	10,09	10,58
Indonesia (Urban)	7,72	7,02	6,69	7,38	7,89
Kota Salatiga	5,07	4,84	4,76	4,94	5,14

Sumber: BPS, SUSENAS Maret diolah

Gambar 2. 28 Persentase Penduduk Miskin Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Indonesia 2017-2021

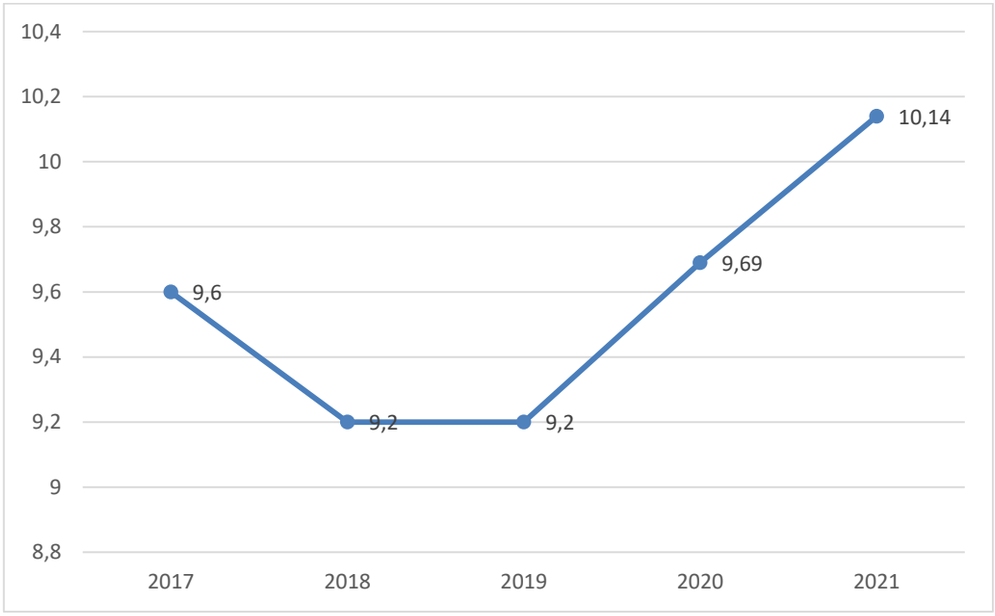
Dibandingkan dengan kabupaten/kota yang berada di Jawa Tengah, Kota Salatiga memiliki persentase penduduk miskin terendah kedua (5,14) setelah Kota Semarang (4,56) di tahun 2021. Angka ini hanya separuh dari persentase penduduk miskin Indonesia (9,71) di tahun yang sama. Di Jawa Tengah, ada sebanyak 12 kabupaten dan kota yang memiliki persentase penduduk miskin kurang dari tingkat kemiskinan nasional. Sementara sebanyak 17 kabupaten berada di atas persentase penduduk miskin di Jawa Tengah dengan persentase penduduk miskin dari 11 persen hingga hampir 18 persen.



Sumber: BPS, SUSENAS Maret diolah

Gambar 2. 29 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kota Salatiga Tahun 2021

Dilihat dari jumlahnya, penduduk miskin di Kota Salatiga mengalami penurunan di tahun 2017 hingga tahun 2018 dari 9,6 ribu ke 9,2 ribu dan terjaga hingga tahun 2019. Namun terjadi kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2020 hingga mencapai 9,69. Jumlah penduduk miskin di Kota Salatiga terus meningkat di tahun 2021 dan mencapai 10,14 ribu jiwa.



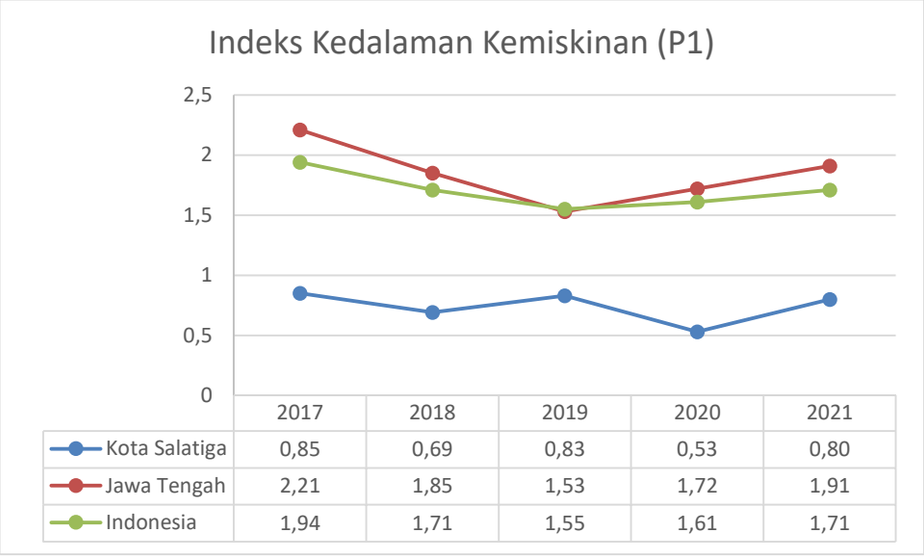
Sumber: BPS, SUSENAS Maret diolah

Gambar 2. 30 Jumlah Penduduk Miskin Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (Ribu Jiwa)

Untuk memahami kemiskinan di suatu wilayah dapat dilihat dari 2 hal yaitu, Indek Kedalaman Kemiskinan, dan Indek Keparahan Kemiskinan. Gambaran tentang kedua indek tersebut di Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

a. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan di Kota Salatiga cenderung rendah dan hanya berfluktuasi di kisaran 0,5 hingga 1 dari tahun 2017 hingga 2021. Angka ini jauh di bawah indeks kedalaman kemiskinan di tingkat provinsi dan nasional yang pada tahun 2017 menyentuh angka 2 (Jawa Tengah) dan 1,94 (Indonesia). Tren indeks di Jawa Tengah dan Indonesia menurun dari 2017 sampai 2019 hingga menyentuh sekitar 1,5 sebelum naik kembali di 2 tahun terakhir (2020-2021) sehingga hampir menyentuh 2. Indeks ini menggambarkan bahwa kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kota Salatiga lebih rendah dibanding di tingkat provinsi dan nasional. Kondisi pergerakan indeks kedalaman kemiskinan di Kota Salatiga dibandingkan Jawa Tengah dan Indonesia dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



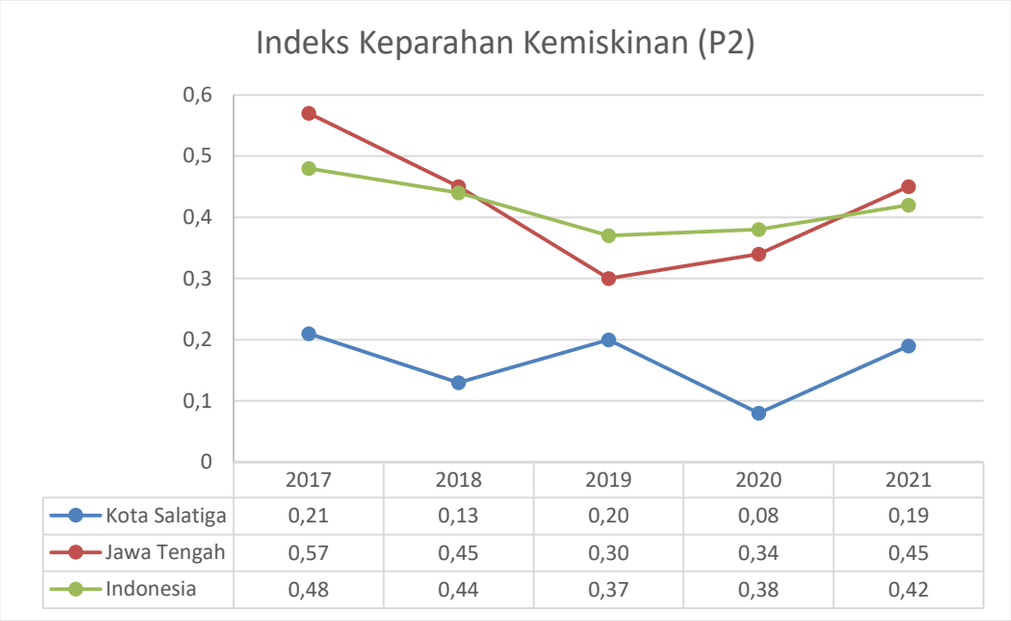
	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Salatiga	0,85	0,69	0,83	0,53	0,80
Jawa Tengah	2,21	1,85	1,53	1,72	1,91
Indonesia	1,94	1,71	1,55	1,61	1,71

Sumber : Tabel Dinamis BPS Nasional diolah

Gambar 2. 31 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Salatiga dan perbandingannya dengan Provinsi Jateng dan Indonesia Tahun 2017-2021

b. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan satuan indeks yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Dibandingkan di tingkat provinsi dan nasional, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2017-2021) di Kota Salatiga cenderung rendah dan hanya berfluktuasi di kisaran 0,1 sampai 0,2. Di Kota Salatiga, indeks tertinggi hanya sebesar 0,21 pada tahun 2017 dan terendah sebesar 0,08 pada tahun 2020 sebelum meningkat menjadi 0,19 di tahun 2021. Walau tren indeks keparahan kemiskinan di tingkat provinsi dan nasional terlihat menurun namun indeks terendahnya masih jauh lebih tinggi dibanding indeks keparahan kemiskinan di Kota Salatiga. Indeks keparahan kemiskinan terendah di Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,30 di tahun 2019 dan di Indonesia sebesar 0,37 di tahun yang sama. Indeks keparahan kemiskinan selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Salatiga	0,21	0,13	0,20	0,08	0,19
Jawa Tengah	0,57	0,45	0,30	0,34	0,45
Indonesia	0,48	0,44	0,37	0,38	0,42

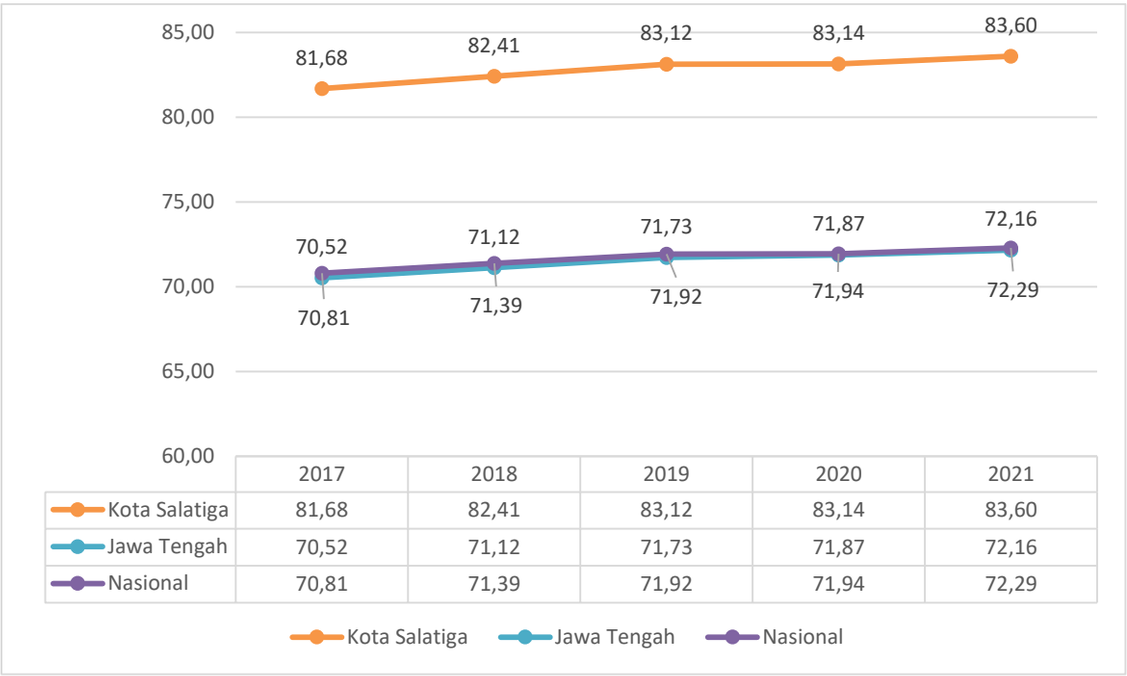
Sumber : Tabel Dinamis BPS Nasional diolah

Gambar 2. 32 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga, Provinsi Jateng dan Nasional Tahun 2017-2021

7. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM merupakan indikator yang mencerminkan kualitas hidup penduduk yang meliputi Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Rill Per Kapita.

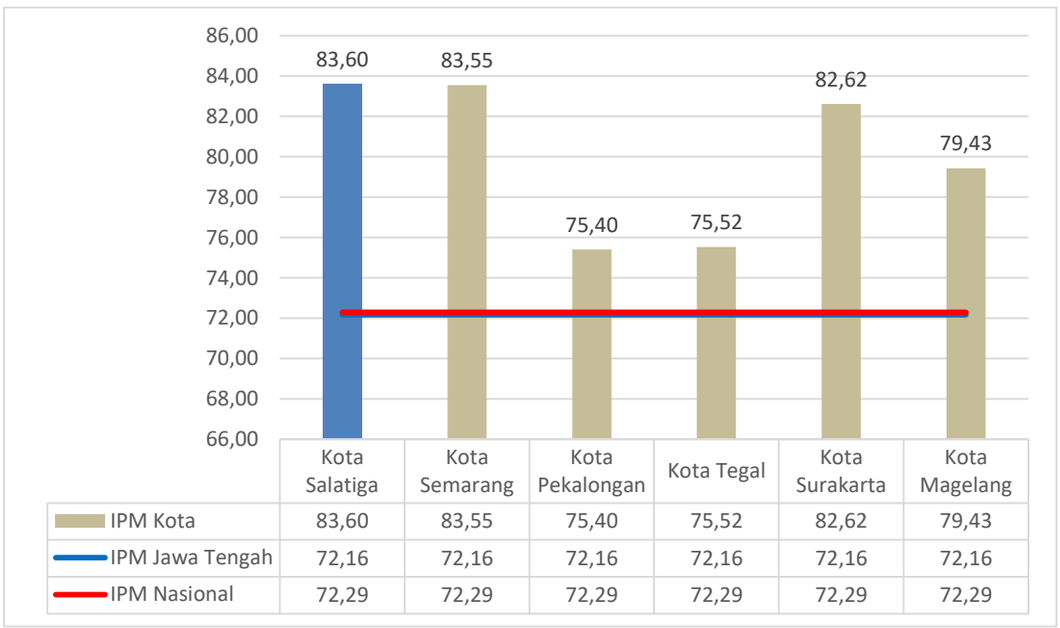
Perkembangan IPM Kota Salatiga selama kurun waktu lima tahun (2017-2021) trennya meningkat meskipun kenaikannya relatif kecil, yaitu dari 81,68 pada tahun 2017 menjadi sebesar 83,60 pada tahun 2021. IPM Kota Salatiga relevan dengan IPM Jawa Tengah dan Nasional yang terus meningkat selama kurun waktu lima tahun,selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Jawa Tengah 2021

Gambar 2. 33 Perkembangan IPM Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Capaian IPM Kota Salatiga pada tahun 2017 sebesar 81,68 menunjukkan hasil yang baik, yaitu berada di atas Provinsi Jawa Tengah sebesar 70,52 dan Nasional 70,81, serta dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Tengah merupakan posisi kedua tertinggi setelah Kota Semarang (81,19), selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Jawa Tengah 2021

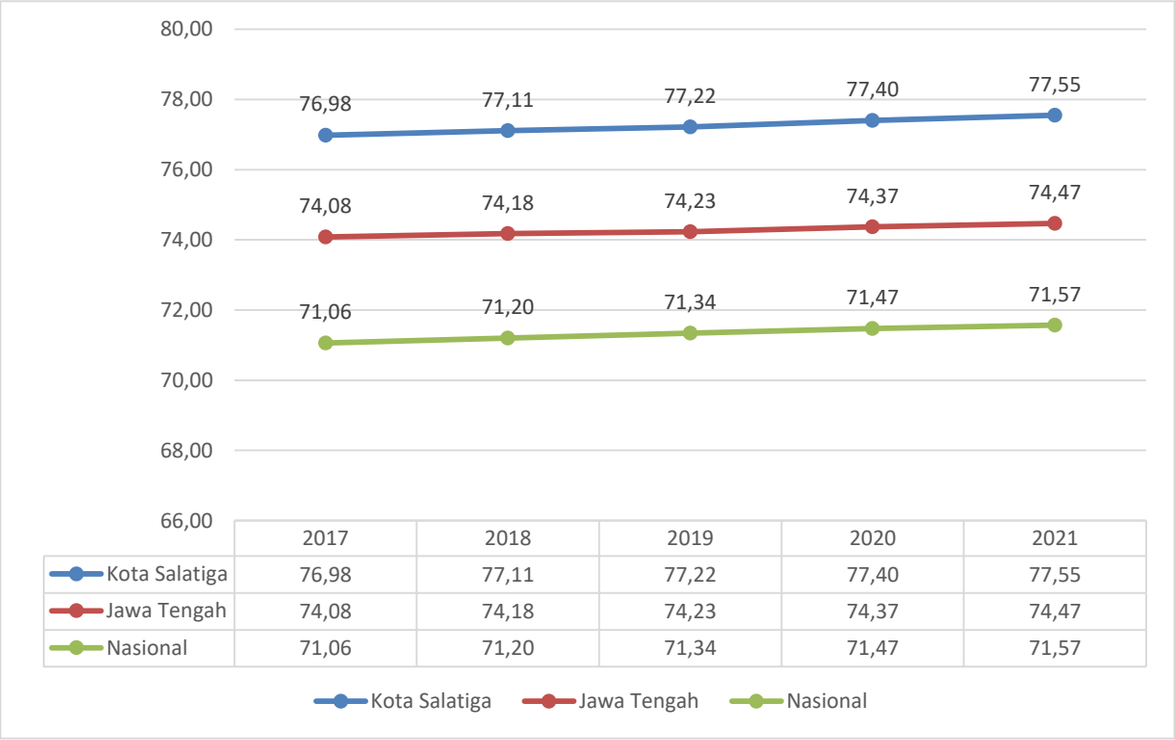
Gambar 2. 34 Posisi Relatif IPM Kota Salatiga dibandingkan dengan Kota Lain, Provinsi dan Nasional Tahun 2021

Pada 2021, Kota Salatiga memiliki IPM 83,60 poin. Selain Salatiga, Kota Semarang dan Kota Surakarta juga menjadi wilayah dengan IPM tertinggi, di mana masing-masing kota memiliki angka IPM 83,55 poin dan 82,62 poin. IPM Kota Salatiga sudah melampaui IPM di Jawa Tengah yaitu sebesar 72,16 dan IPM Nasional sebesar 72,29.

Besaran IPM Kota Salatiga didukung atas pencapaian komponen IPM di dalamnya, yaitu harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Kondisi capaian masing-masng komponen IPM dapat dilihat pada uraian berikut :

a. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka harapan hidup atau disingkat AHH adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Data AHH di suatu daerah berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai maka semakin tinggi derajar kesehatannya. AHH menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yang mencerminkan "lamanya hidup" sekaligus "hidup sehat" suatu masyarakat. Tren perkembangan AHH Kota Salatiga selam kurun waktu tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut.



	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Salatiga	76,98	77,11	77,22	77,40	77,55
Jawa Tengah	74,08	74,18	74,23	74,37	74,47
Nasional	71,06	71,20	71,34	71,47	71,57

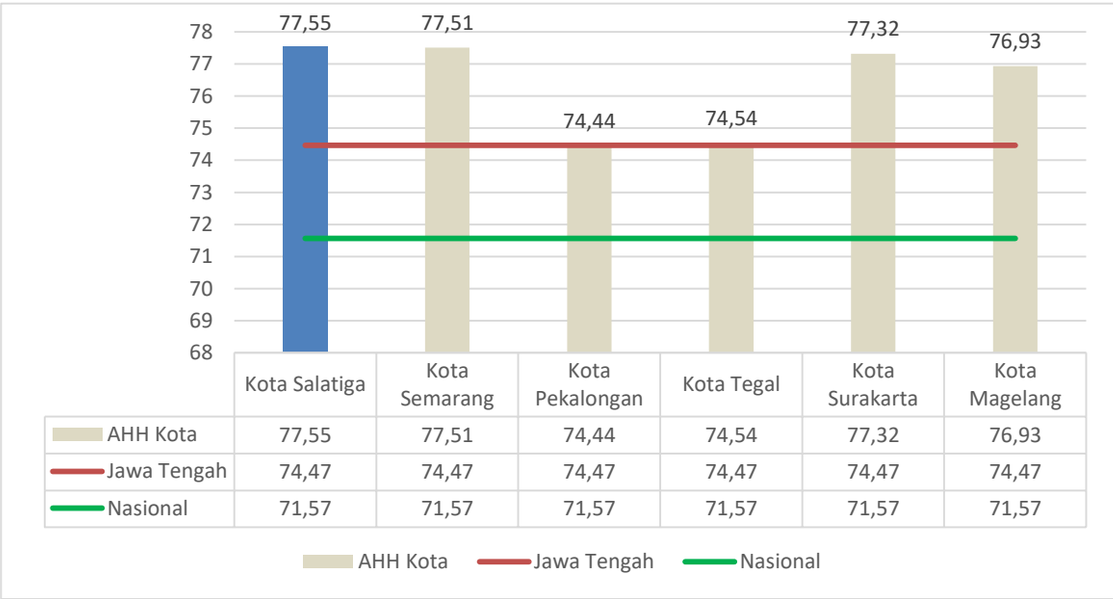
Sumber : BPS Jawa Tengah 2021

Gambar 2. 35 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Salatiga, Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2017-2021

Pada gambar di atas bahwa selama periode tahun 2017-2021 AHH Kota Salatiga selalu meningkat, demikian juga dengan kondisi Provinsi Jawa Tengah

dan Nasional. Tahun 2021, AHH Kota Salatiga sebesar 77,55, meningkat setiap tahunnya jika dilihat dari capaian tahun 2017-2021. Hal ini berarti dari tahun 2017 sampai tahun 2021, rata-rata penduduk Kota Salatiga dapat bertahan hidup antara usia 76-77 tahun.

Sedangkan posisi relatif AHH Kota Salatiga tahun 2021 sebesar 77,55 tahun berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,47 tahun dan Nasional sebesar 71,57 tahun. Dibandingkan dengan kota lainnya di Provinsi Jawa tengah tahun 2021, Kota Salatiga berada pada posisi pertama tertinggi setelah Kota Semarang sebesar 77,51 tahun dan Kota Surakarta sebesar 77,32 tahun, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Jawa Tengah 2021

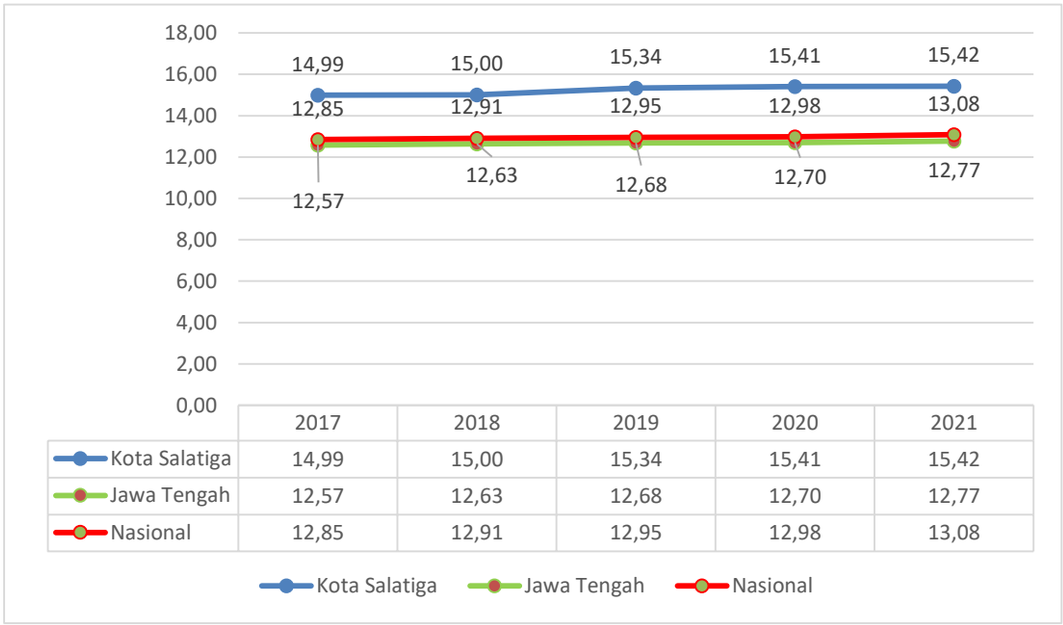
Gambar 2. 36 Posisi Relatif Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Salatiga Tahun 2021

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah atau disingkat HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

HLS di Kota Salatiga dalam kurun waktu lima tahun (2017-2021) mengalami peningkatan dari 14,99 tahun pada tahun 2017 menjadi sebesar 15,42 tahun pada tahun 2021. Menunjukkan bahwa penduduk Kota Salatiga sampai dengan tahun 2021 memiliki lama sekolah setara diploma III. Kondisi HLS Kota Salatiga tidak berbeda dengan kondisi HLS Provinsi Jawa Tengah

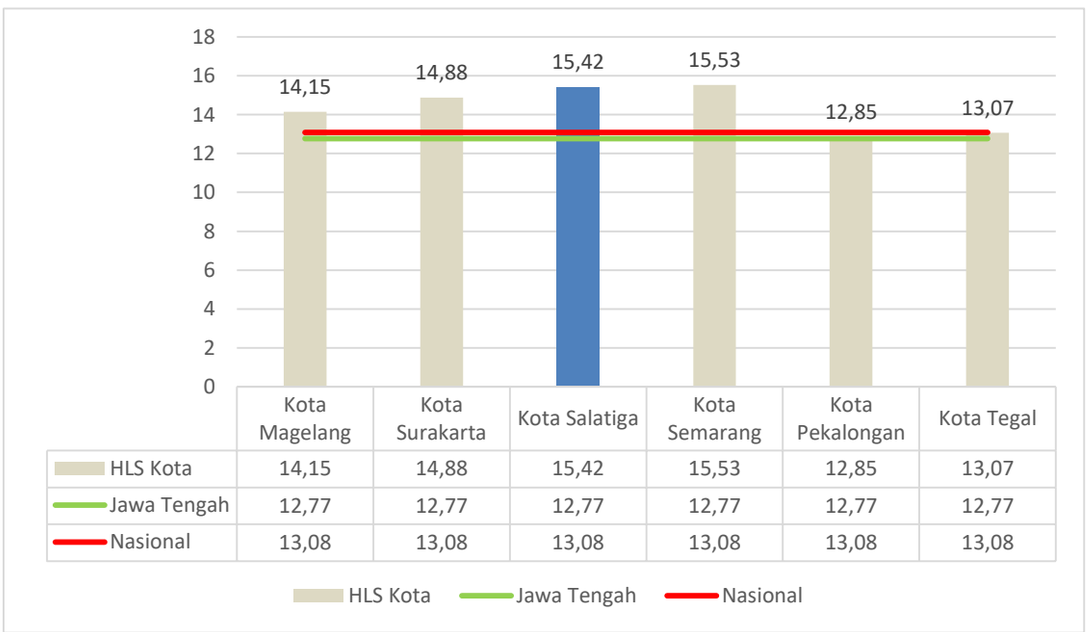
ataupun Nasional yang sama-sama terus mengalami kenaikan, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Salatiga	14,99	15,00	15,34	15,41	15,42
Jawa Tengah	12,57	12,63	12,68	12,70	12,77
Nasional	12,85	12,91	12,95	12,98	13,08

Sumber : BPS Jawa Tengah 2021

Gambar 2. 37 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021



	Kota Magelang	Kota Surakarta	Kota Salatiga	Kota Semarang	Kota Pekalongan	Kota Tegal
HLS Kota	14,15	14,88	15,42	15,53	12,85	13,07
Jawa Tengah	12,77	12,77	12,77	12,77	12,77	12,77
Nasional	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08

Sumber : BPS Jawa Tengah 2021

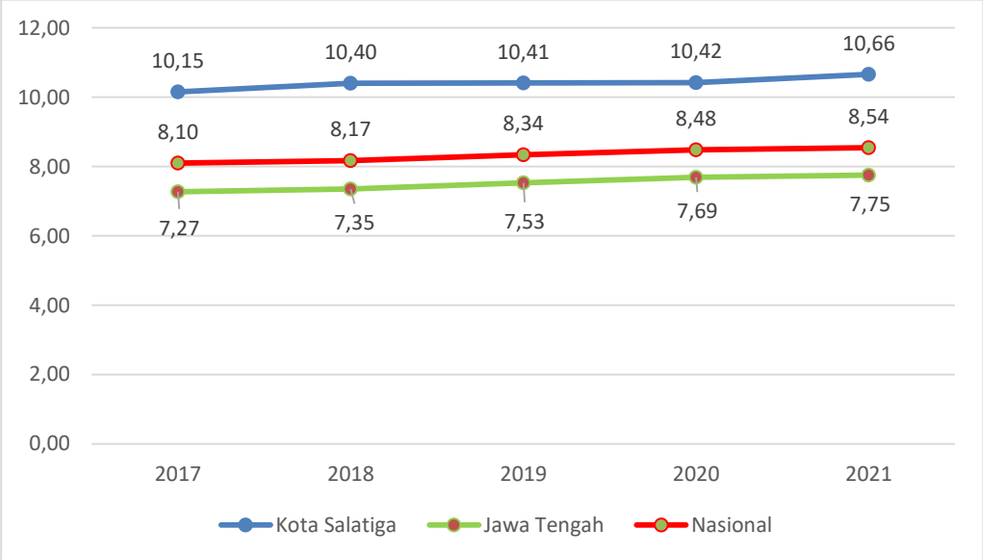
Gambar 2. 38 Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kota Salatiga Tahun 2021

Dilihat dari posisi relatifnya, HLS Kota Salatiga pada tahun 2021 sebesar 15,42 tahun berada di atas Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,77 tahun dan Nasional 13,08 tahun. Dibandingkan dengan kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga berada di posisi kedua tertinggi setelah Kota Semarang, secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

c. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah atau disingkat RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP.

Perkembangan RLS Kota Salatiga selama kurun waktu lima tahun (2017-2021) terus meningkat dan relevan dengan kondisi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, yaitu RLS Kota Salatiga dari sebesar 10,15 tahun pada tahun 2017 menjadi sebesar 10,66 tahun pada tahun 2021. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Jawa Tengah 2021

Gambar 2. 39 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Dilihat dari posisi relatifnya, RLS Kota Salatiga pada tahun 2021 sebesar 10,66 tahun berada di atas Provinsi Jawa Tengah sebesar 7,75 tahun dan Nasional 8,54 tahun. Dibandingkan RLS kota lainnya di Jawa Tengah tahun 2021, RLS Kota Salatiga diposisi ketiga setelah Kota Surakarta (10,90 tahun), dan Kota Semarang (10,78 tahun) secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Jawa Tengah 2021

Gambar 2. 40 Posisi Relatif Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Salatiga, Kota Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

d. Pengeluaran Rill per Kapita

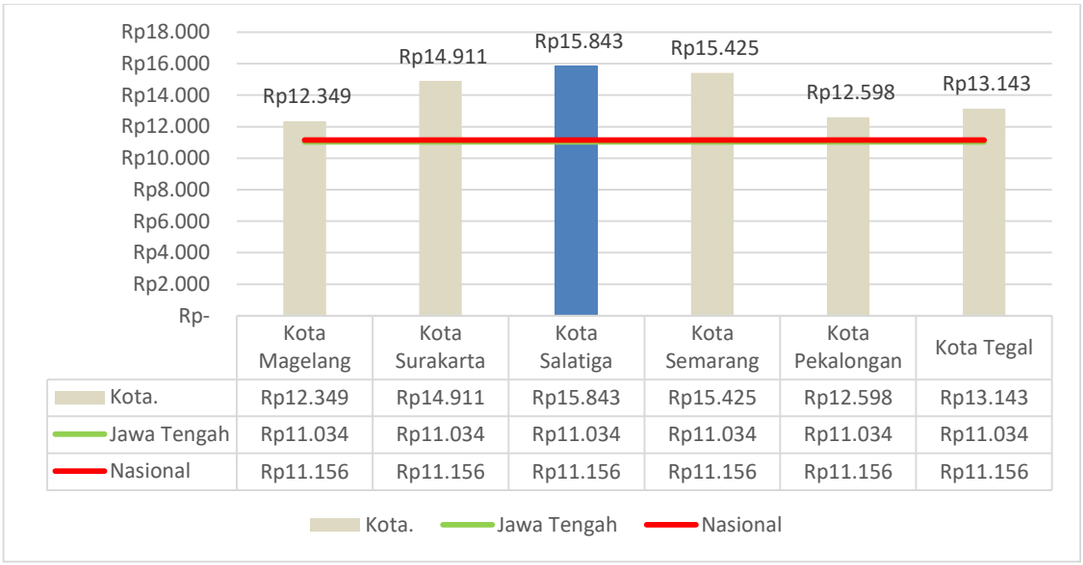
Besarnya pengeluaran konsumsi per kapita digunakan sebagai pendekatan untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. Pengeluaran rumah tangga ini terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan yang menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. Rata-rata pengeluaran per kapita Kota Salatiga pada tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan, yaitu yang awalnya tahun 2017 sebesar Rp.14.921 ribu menjadi Rp.15.843 ribu pada tahun 2021. Kondisi Kota Salatiga tahun 2017 hingga tahun 2021 relevan dengan kondisi pengeluaran per kapita Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang juga terus mengalami kenaikan, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Jawa Tengah 2021

Gambar 2. 41 Perkembangan Pengeluaran Perkapita Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (Ribu Rupiah)

Sedangkan posisi relatif pengeluaran per kapita Kota Salatiga tahun 2021 yang mencapai sebesar Rp.15.843 ribu berada di atas Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.11.034 ribu dan Nasional sebesar Rp.11.156 ribu, serta posisi tertinggi diantara kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Jawa Tengah 2021

Gambar 2. 42 Posisi Relatif Pengeluaran Rill per Kapita Kota Salatiga Tahun 2021 (Ribu Rupiah)

8. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Kegunaan dilakukannya penghitungan IPG yaitu untuk melengkapi penghitungan IPM yang sudah memasukkan aspek gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian

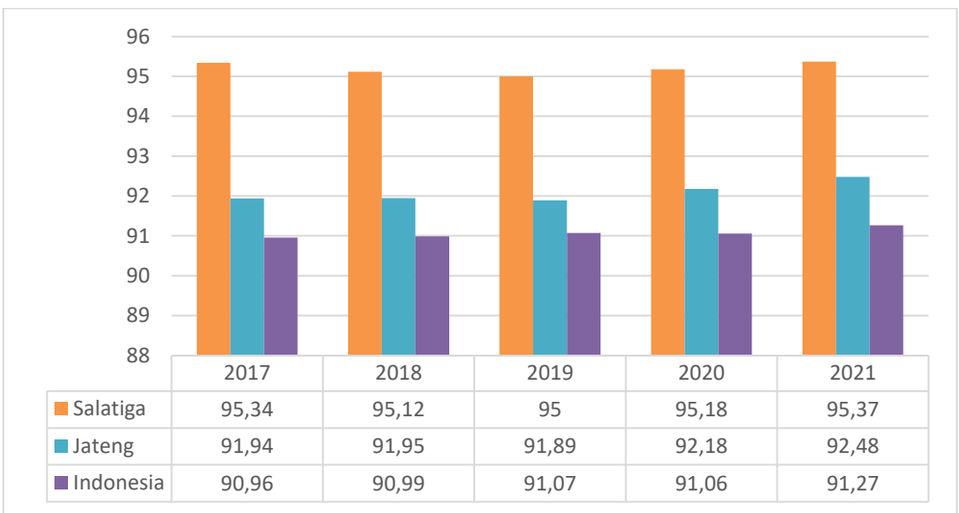
laki-laki dan perempuan. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG, karena angka 100 merupakan nilai rasio paling sempurna.

Tabel 2. 14 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Salatiga, 2017-2021

Indeks Pembangunan Gender (IPG)	**Kota salatiga**
Gender Development Index	***Salatiga Municipality***
2017	95.34
2018	95.12
2019	95.00
2020	95.18
2021	95.37

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga

Sepanjang tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, IPG Kota Salatiga semakin jauh dari angka 100, yang mengindikasikan kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Salatiga yaitu sebesar 95,34 di tahun 2017, kemudian 95,12 di tahun 2018 dan menjadi 95,00 di tahun 2019. Pada tahun 2020, pembangunan manusia menurut gender menunjukkan perbaikan yang ditunjukkan dengan besaran IPG sebesar 95,18, dan terus meningkat hingga 95,37 pada 2021.



Sumber : BPS, 2021

Gambar 2. 43 Indeks Pembangunan Gender Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Indonesia Tahun 2017-2021

Dari Dari Gambar 2.43 terlihat bahwa pembangunan manusia menurut gender di Kota Salatiga lebih setara dibandingkan pembangunan manusia menurut gender di Jawa Tengah maupun Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan besaran angka IPG Kota Salatiga lebih mendekati angka 100 yaitu sebesar 95,37 di tahun 2021, sedangkan untuk Jawa Tengah dan Indonesia masing-masing sebesar 92,48

dan 91,27. Kesetaraan pembangunan yang membaik di Kota Salatiga dan Provinsi Jawa Tengah, dilihat dari meningkatnya angka IPG 2021 dibandingkan tahun 2020.

Tabel 2. 15 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2021

Kabupaten / Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin					
	Laki-laki			Perempuan		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
PROVINSI JAWA TENGAH	75.79	75.87	76.08	69.64	69.94	70.36
Kabupaten Cilacap	75.09	75.06	75.46	65.08	65.07	65.65
Kabupaten Banyumas	76.44	76.45	76.76	67.42	67.48	67.96
Kabupaten Purbalingga	72.80	72.70	72.84	67.47	67.45	67.80
Kabupaten Banjarnegara	69.04	69.22	69.63	65.85	65.95	66.37
Kabupaten Kebumen	73.15	73.39	73.63	68.28	68.29	68.52
Kabupaten Purworejo	74.96	75.13	75.31	71.15	71.34	71.79
Kabupaten Wonosobo	71.68	71.63	71.84	66.46	66.44	66.65
Kabupaten Magelang	74.46	74.46	74.69	68.34	68.36	68.63
Kabupaten Boyolali	77.79	78.01	78.15	72.73	73.48	73.63
Kabupaten Klaten	77.21	77.46	78.09	74.15	74.49	74.97
Kabupaten Sukoharjo	78.74	78.90	79.05	76.05	76.13	76.30
Kabupaten Wonogiri	74.26	74.55	74.82	67.88	67.90	68.14
Kabupaten Karanganyar	77.33	77.29	77.42	74.61	74.60	74.81
Kabupaten Sragen	77.75	78.15	78.28	71.06	71.60	71.77
Kabupaten Grobogan	76.31	76.31	76.85	65.61	65.73	66.01
Kabupaten Blora	74.23	74.45	74.67	62.32	62.45	63.16
Kabupaten Rembang	75.04	74.90	75.24	65.17	65.16	65.70
Kabupaten Pati	75.96	76.44	76.68	69.58	69.94	70.71
Kabupaten Kudus	79.02	79.15	79.27	73.41	73.41	73.69
Kabupaten Jepara	75.83	75.94	76.30	68.94	69.10	69.65
Kabupaten Demak	76.57	76.82	77.05	69.35	69.83	70.24
Kabupaten Semarang	75.90	75.87	76.00	73.17	73.12	73.42
Kabupaten Temanggung	71.89	71.90	72.02	68.37	68.53	68.95
Kabupaten Kendal	75.63	75.82	76.02	70.22	70.66	70.93
Kabupaten Batang	72.62	72.70	72.88	66.14	66.50	66.95
Kabupaten Pekalongan	73.27	73.23	73.69	67.83	67.72	68.21
Kabupaten Pemalang	71.41	71.41	71.64	61.28	61.29	61.96
Kabupaten Tegal	73.88	74.03	74.18	64.08	64.25	64.93
Kabupaten Brebes	70.77	70.75	70.94	61.11	61.10	61.47
Kota Magelang	81.35	81.59	82.03	77.70	77.73	78.37
Kota Surakarta	82.91	83.24	83.65	80.19	80.61	81.05
Kota Salatiga	86.23	86.24	86.58	81.92	82.08	82.57
Kota Semarang	85.33	85.22	85.63	81.53	81.38	81.92
Kota Pekalongan	77.83	77.88	78.30	73.88	74.12	74.71
Kota Tegal	78.60	78.90	79.35	73.39	73.52	74.00

Sumber: BPS, 2022

Penghitungan IPG perlu menghitung IPM laki- laki dan perempuan. Jika diperhatikan, IPM laki-laki di Kota Salatiga pada tahun 2021 sebesar 86,58 atau lebih tinggi dibandingkan IPM perempuan sebesar 82,57 (Tabel 2.15). Pola seperti ini juga terjadi di seluruh wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah dan juga seluruh provinsi di Indonesia. Tabel 2.15 memberikan gambaran, bahwa Pembangunan Manusia menurut gender paling baik terdapat di Kota Surakarta, dilihat dari selisih antara IPM Laki-laki dengan IPM Perempuannya. Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah, pembangunan manusia menurut gender di wilayah perkotaan masih lebih baik.

9. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender atau disingkat IDG merupakan angka pembentuk yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. IDG merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasakan partisipasi politik dan ekonomi. Tiga indikator yang dipakai dalam IDG, antara lain keterlibatan di parlemen, partisipasi sebagai tenaga profesional, dan sumbangan dalam pendapatan pekerjaan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, skor Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Jawa Tengah sebesar 71,64 poin pada 2021. Nilai tersebut turun 0,09 poin dari tahun sebelumnya yang sebesar 71,73 (Tabel 2.16).

Skor Penurunan IDG Jawa Tengah dari tahun sebelumnya menunjukkan bahwa peranan perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik di Jawa Tengah semakin menurun. Penurunan IDG di Jawa Tengah pada 2021 terjadi pada satu indikator pembentuknya. Data pada Tabel 2.16 menunjukkan bahwa sebenarnya terjadi peningkatan pada indikator kontribusi pendapatan perempuan yang naik 0.31 poin dari tahun sebelumnya menjadi 34,60 persen pada 2021. Demikian pula, peran perempuan dalam dunia profesional meningkat 0,47 poin dari 50,20 persen pada 2020 menjadi 50,67 persen pada 2021. Namun demikian, ada satu indikator yang menurun performansinya, yakni keterlibatan perempuan di parlemen yang turun 0,47 poin dari 18,80 persen pada 2020 menjadi 18,33 persen pada 2021, yang pada akhirnya berakibat pada penurunan IDG di Jawa Tengah.

Selanjutnya, berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2.16, IDG Kota Salatiga pada dua tahun terakhir yaitu 76,07 pada 2020, naik menjadi 79,08 pada tahun 2021. Keterlibatan perempuan di Kota Salatiga terdiri atas tiga indikator, baik keterlibatan di Parlemen, keterlibatan profesional, sekaligus sumbangan pendapatan perempuan dalam persen. Keterlibatan tersebut berturut-turut ditunjukkan melalui 24 persen peran perempuan di parlemen, 48,61 persen aktif secara profesional dan sumbangan pendapatan perempuan baru mencapai 41,08 persen pada tahun 2021.

Kendati terjadi penurunan dalam keterlibatan perempuan secara profesional sebesar 0,19 persen dan penurunan pendapatan perempuan sebesar 0,34 persen, namun keterlibatan perempuan di parlemen meningkat 4 persen dari tahun 2020 sehingga memberikan pengaruh pada peningkatan nilai IDG Kota Salatiga.

Tabel 2. 16 Indeks Pemberdayaan Gender 2020-2021

No	Provinsi / Kabupaten / Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen		Perempuan sebagai Profesional		Sumbangan Pendapatan perempuan		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	**JAWA TENGAH**	**18.80**	**18.33**	**50.20**	**50.67**	**34.29**	**34.60**	**71.73**	**71.64**
2	CILACAP	26.00	26.00	43.97	45.69	26.44	26.83	70.22	70.67
3	BANYUMAS	22.00	20.00	49.87	49.32	30.87	30.67	71.74	70.10
4	PURBALINGGA	22.22	22.22	45.96	50.52	30.19	30.61	70.27	70.99
5	BANJARNEGARA	26.00	26.00	49.42	49.92	28.88	29.40	73.20	73.79
6	KEBUMEN	22.00	22.00	54.20	56.09	25.79	25.83	66.89	66.86
7	PURWOREJO	17.78	17.78	51.86	53.44	34.03	34.33	69.83	70.09
8	WONOSOBO	4.44	4.44	45.64	47.67	24.67	24.31	48.70	48.68
9	MAGELANG	14.00	14.00	53.96	55.63	37.82	37.82	69.65	69.64
10	BOYOLALI	31.11	31.11	48.14	48.58	40.73	40.97	81.95	82.23
11	KLATEN	16.00	18.00	60.72	58.46	37.72	37.78	69.42	71.88
12	SUKOHARJO	22.22	22.22	54.28	58.12	41.02	41.42	77.98	77.69
13	WONOGIRI	16.33	16.00	44.76	48.31	39.20	38.63	71.56	71.55
14	KARANGANYAR	20.00	18.18	55.20	51.13	38.11	38.41	74.29	73.38
15	SRAGEN	11.36	13.33	48.95	53.94	37.14	37.15	65.20	67.14
16	GROBOGAN	12.00	12.00	44.13	50.18	25.56	25.85	57.18	58.03
17	BLORA	11.11	11.11	45.43	48.48	34.88	34.21	64.37	64.36
18	REMBANG	13.64	13.33	47.13	51.39	31.78	31.92	65.78	65.88
19	PATI	16.00	16.00	48.95	44.94	31.36	31.64	66.69	66.65
20	KUDUS	8.89	8.89	51.58	49.67	41.05	41.45	65.18	65.54
21	JEPARA	12.00	12.00	45.31	50.57	23.66	24.08	55.76	56.66
22	DEMAK	12.00	12.00	54.55	48.85	38.74	37.83	66.85	66.83
23	SEMARANG	18.37	22.00	48.28	46.64	45.72	46.19	75.40	78.35
24	TEMANGGUNG	33.33	33.33	52.69	48.14	40.79	41.19	84.21	84.56
25	KENDAL	24.44	24.44	46.10	55.07	35.27	35.35	76.96	76.95
26	BATANG	15.56	15.91	47.93	45.76	28.43	28.92	63.81	64.43
27	PEKALONGAN	27.91	26.67	50.65	49.29	26.29	25.79	71.68	70.54
28	PEMALANG	32.00	32.00	50.51	49.40	35.22	35.59	80.95	81.27
29	TEGAL	24.00	24.00	45.41	45.64	29.08	29.09	72.12	72.32
30	BREBES	16.00	16.00	52.75	49.33	25.20	25.35	61.93	61.89
31	KOTA MAGELANG	20.00	24.00	55.07	59.89	41.97	42.15	76.35	78.65
32	KOTA SURAKARTA	22.22	22.22	51.06	49.78	44.07	43.57	79.42	79.32
33	**KOTA SALATIGA**	**20.00**	**24.00**	**48.80**	**48.61**	**41.42**	**41.08**	**76.07**	**79.08**
34	KOTA SEMARANG	20.41	18.75	51.15	51.30	37.13	37.46	74.67	73.64

No	Provinsi / Kabupaten / Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen		Perempuan sebagai Profesional		Sumbangan Pendapatan perempuan		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
35	KOTA PEKALONGAN	8.82	8.57	52.64	50.90	28.50	28.21	58.29	57.87
36	KOTA TEGAL	13.33	13.33	55.89	58.61	30.62	30.19	64.07	63.34
37	**INDONESIA**	**21.09**	**21.89**	**48.76**	**49.99**	**37.26**	**37.22**	**75.57**	**76.26**

Sumber : BPS Provinsi Jateng, 2021

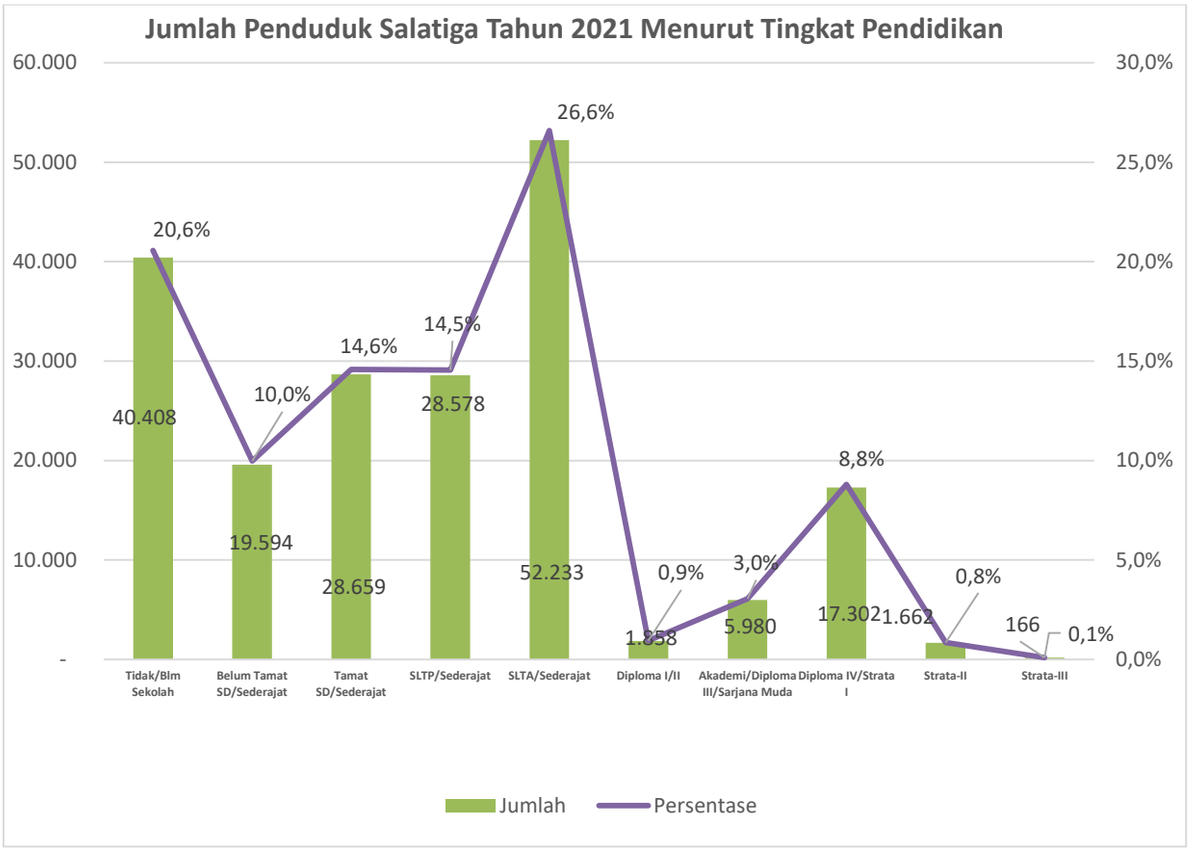
Penurunan IDG di Jawa Tengah pada 2021 terjadi pada satu indikator pembentuknya. Indikator tersebut berupa keterlibatan perempuan di parlemen yang turun 0,47 poin dari 18,80 persen pada 2020 menjadi 18,33 persen pada 2021. Indikator berikutnya adalah pendapatan perempuan yang naik 0.31 poin dari tahun sebelumnya menjadi 34,60 persen pada 2021 Di sisi lain, peran perempuan dalam dunia profesional meningkat 0,47 poin dari 50,20 persen pada 2020 menjadi 50,67 persen pada 2021. Sementara, untuk kota Salatiga, keterlibatan perempuan di parlemen meningkat 4 persen dari tahun 2020, namun terjadi penurunan dalam keterlibatan perempuan secara profesional sebesar 0,19 persen dan penurunan pendapatan perempuan sebesar 0,34 persen.

2.3.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator indikator-indikator sebagai berikut :

1. Kondisi Pendidikan Kota Salatiga

Secara umum kondisi Pendidikan suatu wilayah dapat dilihat dari profil tingkat Pendidikan yang dicapai atau diperoleh oleh masyarakatnya. Profil ini juga menggambarkan tentang kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Berikut adalah gambaran tentang Komposisi penduduk kota Salatiga berdasarkan tingkat Pendidikan tahun 2021.



Sumber: BPS Kota Salatiga Dalam Angka, 2021 (data diolah)

Gambar 2. 44 Diagram Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Salatiga Tahun 2021

Pada tahun 2021 total penduduk Kota Salatiga berjumlah 196.440 orang. Dari gambar diatas menunjukkan penduduk yang tamat SLTA masih mendominasi yaitu sebanyak 52.233 atau kurang leih sebanyak 26,6% di Kota Salatiga walaupun jumlah tersebut secara nominal tidak jauh perbedaannya dengan penduduk yang memiliki tingkat pendidikan sekolah menengah (SD, SMP). Penduduk dengan pendidikan tinggi (Diploma dan Sarjana) ada kecenderungan memiliki trend yang semakin baik dari tahun ke tahun. Namun demikian tetap saja saat ini tingkat pendidikan penduduk Kota Salatiga masih didominasi penduduk dengan tingkat pendidikan dasar dan menengah, Penduduk Kota Salatiga perlu untuk meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih baik lagi. Masih tingginya dominasi tingkat pendidikan penduduk pada pendidikan dasar dan menengah akan berimbas pada peningkatan kualitas SDM Kota Salatiga dan juga akan berdampak pada penurunan angka pengangguran penduduk. Pendidikan juga merupakan salah satu solusi yang dapat membantu pemerintah dalam program pengendalian penduduk. Wanita yang berpendidikan tinggi berdampak terhadap penundaan usia kawin pertama dan menginginkan jumlah anak lebih sedikit, serta persentase *unmet need* rendah. Suatu studi menunjukkan bahwa *unmet need* KB menurun dengan meningkatnya pendidikan wanita dan pada status wanita yang bekerja (Juliaan, 2009).

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

APK dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan. Untuk kategori PAUD, menunjukkan terjadinya fluktuasi APK PAUD mulai dari tahun 2017 (42,53%), dan mengalami kenaikan di tahun 2018 dan tahun 2019, kemudian menurun menjadi 42,64 persen pada tahun 2020. Bahkan APK PAUD tahun 2020 paling rendah jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini tentu perlu mendapatkan perhatian dan kajian serius terkait apa yang menjadi akar penyebab penurunan APK PAUD. Pada tingkatan SD/MI/SDLB/Paket A, tahun 2016 menunjukkan APK sebesar 114,21 persen (menurun sekitar 4% jika dibadingkan pada tahun 2016 yakni sebesar 118,46%,) yang kemudian terjadi trend peningkatan cukup tinggi di tahun 2018 (140,65%) dan kemudian untuk tahun-tahun selanjutnya terjadi fluktuasi.

Pada tingkatan SMP/MTs/SMPLB/Paket B, Tahun 2021 menunjukkan APK yang semakin meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 besarnya APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B sebesar 127,66 persen, dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 113,46 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 139,45 persen maka APK secara kese,uruhan mengalami penurunan. Perkembangan APK pada masing-masing tingkatan di Kota Salatiga Tahun 2017-2021 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2. 17 Perkembangan APK PAUD, SD/MI, SMP/MTs di Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/ Paket A	%	114.21	140.65	107.81	110.37	113.46
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ SMPLB/ Paket B	%	139.45	136.22	138.14	127.66	130.81
3	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0.05	0.03	0.01	0.01	0.005
4	Persentase angka mengulang tingkat SD/ MI	%	2.41	1.71	0.90	0.13	0.11
5	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0.07	0.08	0.04	0.08	0.44
6	Persentase angka mengulang tingkat SMP/ MTs	%	0.25	0.28	0.33	0.12	0.24
7	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI	%	78.36	79.64	82.35	80.68	87.28

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
8	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs	%	84.77	88.91	95.48	97.38	97.70

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Salatiga, Tahun 2021

3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

APM tingkat SD/MI/SDLB/Paket A di Kota Salatiga pada tahun 2021 mencapai 82,61 persen yang menunjukkan bahwa anak usia sekolah di tingkat SD/MI/SDLB/Paket A di Kota Salatiga masih ada sekitar 3,89 persen yang tepat waktu secara umur. Kecenderungan penurunan APM tingkat ini terjadi pada hamper setiap periode waktu 2017-2021 jika dibandingkan dengan periode 2012-2016. Artinya dalam periode tahun 2017-2021 APM tingkatan ini belum memenuhi target capaian yang diharapkan (100%). Pada tingkat SMP/MTs/SMPLB/Paket B, tahun 2021 menunjukkan terjadinya penurunan yakni sebesar 68,42 persen jika dibanding pada disbanding tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini tentunya ada kemungkinan terkait dengan pandemi Covid-19, sehingga di tahun 2020 masih dijumpai ada sekitar 25,85 persen yang tidak tepat waktu secara umur. Kondisi ini tentu perlu mendapat perhatian serius apa yang menjadi akar penyebab penurunan APM tersebut, dan strategi apa yang paling tepat untuk mengatasinya.

Perkembangan APM pada masing-masing tingkatan sekolah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 18 Perkembangan APM SD/MI dan SMP/MTs di Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	APM SD/MI/SDLB/Paket A	%	93.29	95.66	96.23	96.11	82,61
2.	APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	76.31	78.20	99.69	74.15	68,42

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Salatiga, 2021

4. Angka Melek Huruf dan Angka Putus Sekolah

Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Putus Sekolah (APS) merupakan salah satu indikator untuk menentukan Indek Pempangunan Manusia (IPM), artinya semakin rendah AMH dan semakin tinggi APS akan menyebabkan semakin rendah

atau menurunnya IPM, demikian pula sebaliknya. Untuk Kondisi AMH dan APS Kota Salatiga Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 19 Perkembangan Angka Melek Huruf dan Angka Putus Sekolah di Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Melek Huruf (AMH)	%	99.07	99.10	99.11	99.12	99.59
2.	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0.05	0.03	0.01	0.01	0.005
3.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0.07	0.08	0.04	0.08	0.11

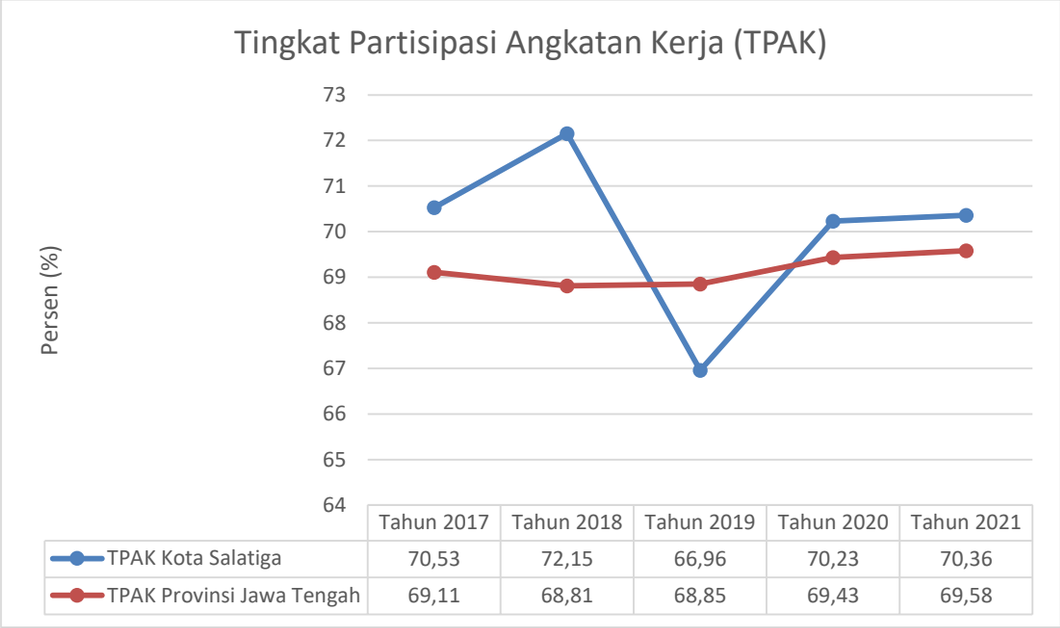
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Salatiga, Tahun 2021

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa layanan Pendidikan di Kota Salatiga sangat baik, hal tersebut dapat dilihat dari tingginya persentase penduduk kota Salatiga yang melek huruf hampir mencapai 100 persen (tahun 2021 mencapai 99,59 persen), dan hanya tinggal sekitar 1 persen kurang yang belum melek huruf, tentunya harapannya adalah bagaimana benar-benar mencapai 100 persen. Demikian halnya jika dilihat dari persentase angka putus sekolah yang sangat rendah (0,005 persen) terjadi di Kota Salatiga selama periodesasi 2017-2021.

5. Rasio Penduduk yang Bekerja/Ketersediaan Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengambarkan secara persentase banyaknya penduduk usia diatas 15 tahun yang termasuk dalam angkatan kerja. Nilai TPAK menggambarkan besar-kecilnya pasokan atau ketersediaan tenaga kerja untuk mendukung aktivitas ekonomi.

Tingkat pertisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kota Salatiga selama periode tahun 2017 hingga tahun 2021 tidak menunjukan perubahan angka yang berarti. Tahun 2018 merupakan tahun dengan capaian tertinggi selama kurun waktu tahun 2017-2021, setelah terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 1,2 persen. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 5,26 persen dan menjadi capaian angka terendah selama kurun waktu tersebut. Meskipun tahun 2020 dan 2021 menunjukan angka yang meningkat, namun angka capaiannya masih lebih rendah dari angka capaian tahun 2017.



Sumber : BPS, Data Series Subyek Tenaga Kerja

Gambar 2. 45 Tingkat Partisipasi Angakatan Kerja (TPAK) Tahun 2017-2021

Dibandingkan dengan nilai TPAK Provinsi Jawa Tengah, angka capaian TPAK Kota Salatiga secara umum masih diatas angka capaian Provinsi Jawa Tengah. Seperti halnya Kota Salatiga, nilai TPAK Provinsi tahun 2019 juga mengalami penurunan; hal tersebut dapat diduga bahwa penurunan pada tahun tersebut penurunan TPAK juga terjadi di kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Meskipun demikian yang menjadi pembeda dengan Kota Salatiga adalah kondisi TPAK di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 telah kembali meningkat dan melampaui angka tahun 2018.

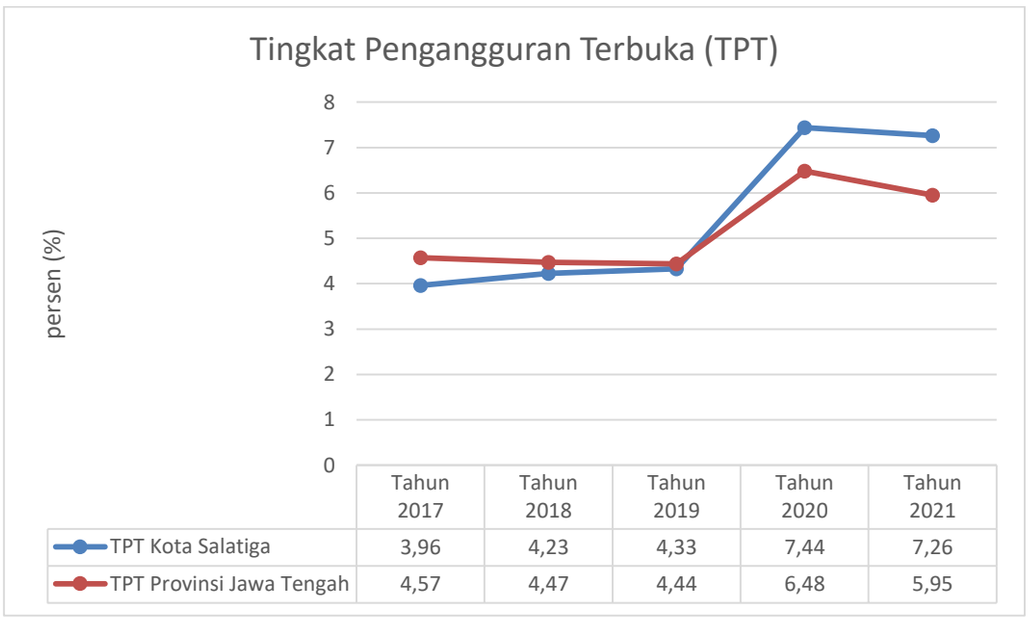
6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran terbuka menggambarkan persentase jumlah pengangguran dibanding dengan jumlah angkatan kerja dalam suatu wilayah. Nilai TPT menunjukan besar/kecilnya jumlah pasokan tenaga kerja yang belum termanfaatkan. Sedangkan pengertian pengangguran menurut BPS meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi dalam status mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidaka mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Salatiga menunjukan angka yang semakin meningkat sejak tahun 2017 hingga tahun 2021, dimana angka peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan tingkat kenaikan mencapai sekitar 72 persen dibanding tahun 2019 (atau meningkat 3,1 persen) dan menjadi angka tertinggi dalam kurun waktu tahun 2017-2021. Peningkatan angka TPT cukup besar pada tahun 2020 juga terjadi di Provinsi Jawa Tengah, sehingga patut diduga hal tersebut juga terjadi di kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah termasuk

Kota Salatiga. Peningkatan angka TPT pada tahun tersebut diduga dipicu oleh kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan pada kurun waktu tersebut.

Peningkatan TPT yang terjadi pada tahun 2020 di Kota Salatiga sudah mengalami perbaikan, hal ini ditunjukan dengan menurunnya TPT dari 7,44 persen menjadi 7,26 persen pada tahun 2021, namun angka tersebut masih diatas angka tahun 2019. Hal ini diduga terjadi karena kondisi ekonomi dan kinerja pasar kerja pada tahun tersebut belum sepenuhnya kembali membaik.



	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
TPT Kota Salatiga	3,96	4,23	4,33	7,44	7,26
TPT Provinsi Jawa Tengah	4,57	4,47	4,44	6,48	5,95

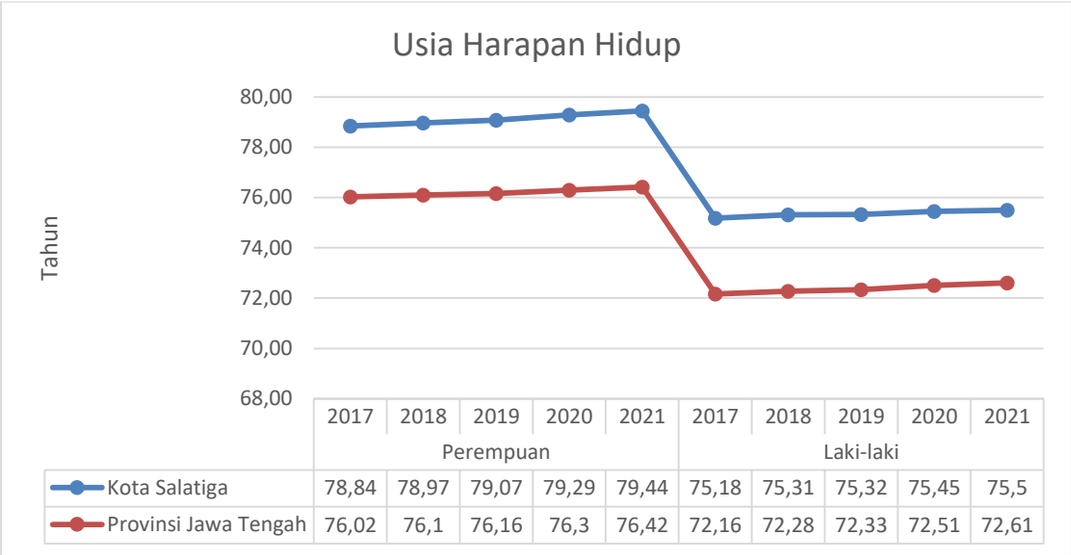
Sumber : BPS, Tabel Dinamis Subjek Tenaga Kerja

Gambar 2. 46 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2017-2021

7. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup merupakan salah satu indikator guna menilai derajad kesehatan masyarakat. Peningkatan angka harapan hidup menunjukan terjadinya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Selama kurun waktu tahun 2017-2021 angka harapan hidup di Kota Salatiga menunjukan peningkatan, baik untuk usia harapan hidup untuk laki-laki maupun perempuan. Peningkatan angka tersebut seiring dengan kondisi di Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian, usia harapan hidup di Kota Salatiga menunjukan angka lebih tinggi dibandingkan usia harapan hidup rata-rata di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut mengindikasikan berjalannya program-program pembangunan terutama program terkait kesehatan dan sosial lainnya yang mendorong tercapainya peningkatan usia harapan hidup yang semakin membaik.



	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Perempuan					Laki-laki				
Kota Salatiga	78,84	78,97	79,07	79,29	79,44	75,18	75,31	75,32	75,45	75,5
Provinsi Jawa Tengah	76,02	76,1	76,16	76,3	76,42	72,16	72,28	72,33	72,51	72,61

Sumber : BPS, tabel dinamis 2021

Gambar 2. 47 Usia Harapan Hidup Tahun 2017-2021

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Fokus Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan bidang pembangunan yang menempati posisi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat. Pendidikan pada hakekatnya bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Kinerja program pendidikan usia dini di Kota Salatiga dapat terlihat dari besarnya Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Usia Dini (APK-PAUD). Selama kurun waktu tahun 2017-2021, terdapat kecenderungan terjadinya penurunan APK PAUD dalam dua tahun terakhir. Penurunan terjadi pada tahun 2020 dan 2021 (dari APK sebesar 48,36 persen pada tahun 2019 menurun menjadi 42,64% pada tahun 2020, dan menjadi sebesar 38,33% pada tahun 2021). APK PAUD pada tahun 2019 merupakan capaian tertinggi dibandingkan tahun-tahun lainnya. APK pada tahun 2021 merupakan capaian terendah. Penurunan APK PAUD ini sejalan dengan penurunan penduduk usia 4-6 tahun yang bersekolah di TK/RA yaitu sebesar 67,64 persen pada tahun 2020 dan 71,15 persen pada tahun 2019. Hal ini kemungkinan juga berkaitan dengan pandemic Covid-19.

Kondisi PAUD terakreditasi di Kota Salatiga tahun 2021 mencapai 86,09 persen dan nilai ini menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu ruang kelas TK/RA dalam kondisi baik mencapai 87,33 persen,

dan terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. PAUD di Kota Salatiga sudah menunjukkan pelayanan yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya rasio PAUD yang terakreditasi. Akan tetapi, partisipasi anak usia PAUD masih tergolong rendah dibandingkan dengan capaian pelayanannya. Sarana dan prasarana ruang kelas TK/RA juga cenderung menurun. Perkembangan kinerja PAUD di Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 20 Kinerja Pendidikan Usia Dini Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	Target	%	54.23	56.23	58.23	60.23	62.23
		Realisasi Capaian	%	42.53	44.69	48.36	42.64	38.33
		Rasio	%	78.43	79.48	83.05	70.79	61.59
2	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik TK/RA	Target	%	89.72	89.83	89.94	91.00	92.00
		Realisasi Capaian	%	90.24	87.78	84.21	82.22	87.33
		Rasio	%	100.58	97.72	93.63	90.35	94.93
3	Persentase penduduk usia 4-6 tahun yang bersekolah di TK / RA	Target	%	65.00	68.00	71.00	75.00	80.00
		Realisasi Capaian	%	60.60	75.17	71.15	67.64	49.55
		Rasio	%	93.23	110.54	100.21	90.19	61.94
4	Persentase TK / RA yang terakreditasi	Target	%	94.00	94.05	95.00	95.50	96.00
		Realisasi Capaian	%	93.87	94.00	89.47	86.96	86.09
		Rasio	%	99.86	99.95	94.18	91.05	89.67

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Salatiga tahun 2021

APK SD/MI dan SMP/MTs di Kota Salatiga sangat tinggi yaitu mencapai 113,46 persen untuk SD/MI dan 130,81 persen untuk SMP/MTs, mengacu kondisi pada tahun 2021. Di Kota Salatiga masih terdapat anak yang termasuk pada kondisi putus sekolah walaupun sangat kecil sekali. Pada tahun 2020 anak putus sekolah tingkatan SD/MI mencapai sebesar 0,01 persen dan anak putus sekolah tingkatan SMP/MTs mencapai sebesar 0,08 persen. Kondisinya pada tingkat SD/MI membaik pada tahun 2021 dimana tidak ada anak putus sekolah. Akan tetapi, pada tingkat SMP/MTs justru terjadi peningkatan persentase anak putus sekolah menjadi 0,44%.

Dilihat dari sarana dan prasarana, ruang belajar beserta isinya SD/MI dalam kondisi baik tahun 2021 sebesar 87,28 persen. Sedangkan ruang kelas dalam kondisi baik SMP/MTs mencapai 97,77 persen. Secara umum terkait dengan kondisi ruang kelas menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun selama kurun waktu tahun 2017-2021. Rincian kinerja pendidikan dasar di Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 21 Kinerja Pencapaian Pendidikan Dasar Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/ Paket A	Target	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Realisasi Capaian	%	114.21	140.65	107.81	110.37	113.46
		Rasio	%	114.21	140.65	107.81	110.37	113.46
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB /Paket A	Target	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Realisasi Capaian	%	93.29	95.66	96.23	96.61	82.61
		Rasio	%	93.29	95.66	96.23	96.61	82.61
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ SMPLB/ Paket B	Target	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Realisasi Capaian	%	139.45	136.22	138.14	127.66	130.81
		Rasio	%	139.45	136.22	138.14	127.66	130.81
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMP LB/ Paket B	Target	%	91.50	94.50	97.50	100.00	100.00
		Realisasi Capaian	%	76.31	78.20	99.69	74.15	68.42
		Rasio	%	83.40	82.75	102.25	74.15	68.42
5	Angka Putus Sekolah SD/MI	Target	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Realisasi Capaian	%	0.05	0.03	0.01	0.01	0.00
		Rasio	%	99.95	99.97	99.99	99.99	100.00
6	Persentase angka mengulang tingkat SD/ MI	Target	%	2.34	2.25	2.15	2.05	0.31
		Realisasi Capaian	%	2.41	1.71	0.90	0.13	0.11
		Rasio	%	102.99	76.00	41.86	6.29	101.93
7	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	Target	%	0.22	0.20	0.18	0.16	0.14
		Realisasi Capaian	%	0.07	0.08	0.04	0.08	0.44
		Rasio	%	31.82	40.00	22.22	50.00	314.29
8	Persentase angka mengulang tingkat SMP/ MTs	Target	%	0.35	0.34	0.33	0.32	0.31
		Realisasi Capaian	%	0.25	0.28	0.33	0.12	0.24
		Rasio	%	71.43	82.35	100.00	38.13	100.07
9	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI	Target	%	85.76	86.00	89.50	91.77	91.48
		Realisasi Capaian	%	78.36	79.64	82.35	80.68	87.28
		Rasio	%	91.37	92.60	92.01	87.92	95.41
10	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs	Target	%	92.69	92.71	92.73	92.75	92.77
		Realisasi Capaian	%	84.77	88.91	95.48	97.38	97.77
		Rasio	%	91.46	95.90	102.97	104.99	105.32

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Salatiga tahun 2021

Pendidikan merupakan pilar penting yang dapat mempengaruhi produktifitas serta menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas Sumber Daya Manusia. Pendidikan meliputi pengetahuan serta ketrampilan yang dimiliki. Pendidikan didapat melalui pendidikan formal maupun nonformal seperti pelatihan bersertifikat, kursus, dan lain-lain. Kinerja pada pendidikan non formal secara makro dapat dilihat dari penduduk usia > 15 tahun yang termasuk pada kategori melek huruf. Penduduk usia > 15 tahun melek huruf di Kota Salatiga selama rentang waktu dari tahun 2017-2021 cenderung meningkat, bahkan di tahun 2021 mencapai 99.59%. Untuk mendukung pendidikan formal, banyak upaya dilakukan dengan memberdayakan PKBM, kerjasama dengan LPK. Selain itu dikembangkan juga kegiatan vokasi dan KUB. Namun lembaga pelatihan dan kursus masih menunjukkan capaian kinerja yang masih rendah. Hal ini dilihat dari persentase lembaga yang terakreditasi yaitu hanya 33,33 persen dan PKBM yang terakreditasi masih sebesar 58,33 persen di tahun 2021. Kinerja pendidikan nonformal selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 22 Kinerja Pendidikan Non Formal Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase penduduk melek huruf	Target	%	99.09	99.09	99.10	99.11	99.12
		Realisasi Capaian	%	99.07	99.10	99.11	99.12	99.59
		Rasio	%	99.99	100.01	100.01	100.01	100.47
2	Persentase lembaga pelatihan dan kursus yang terakreditasi	Target	%	39.50	42.00	45.00	48.00	53.00
		Realisasi Capaian	%	35.29	29.41	29.62	29.63	33.33
		Rasio	%	89.34	70.02	65.82	61.73	62.89
3	Persentase pusat kegiatan dan belajar masyarakat (PKBM) yang terakreditasi	Target	%	40.00	60.00	80.00	100.00	100.00
		Realisasi Capaian	%	36.36	45.45	72.72	66.67	58.33
		Rasio	%	90.90	75.75	90.90	66.67	58.33

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Salatiga tahun 2021

Dalam rangka peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, ketersediaan yang kompeten sesuai dengan bidang pengajarannya paling diutamakan. Guru SD/MI dengan status layak mengajar mencapai 97,30 persen. Guru layak mengajar untuk tingkatan SMP/MTs mencapai sebesar 96,43 persen pada tahun 2021. Rincian perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 23 Kinerja Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kota Salatiga Tahun 2017 – 2021

No	Indikator Kinerja		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase guru layak mengajar PAUD	Target	%	74.12	74.5	75	75.5	76
		Realisasi Capaian	%	74.12	80.43	79.82	82.33	84.95
		Rasio	%	100	107.96	106.43	109.05	111.78
2	Persentase guru layak mengajar SD / MI	Target	%	91	92	93	94	95
		Realisasi Capaian	%	94	94.52	95.53	96.35	97.3
		Rasio	%	103.3	102.74	102.72	102.5	102.42
3	Persentase guru layak mengajar SMP / MTs	Target	%	93	93.5	94	94.5	95
		Realisasi Capaian	%	93.73	94.47	96.96	97.48	96.43
		Rasio	%	100.78	101.04	103.15	103.15	101.51

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Salatiga tahun 2021

Secara keseluruhan, pencapaian bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Salatiga sudah berjalan baik. Kondisi yang perlu mendapat perhatian adalah masih terdapatnya anak putus sekolah yang terjadi setiap tahunnya, serta antisipasi dampak dari pandemi Covid-19 maupun pasca Covid-19. Bidang Pendidikan juga harus responsif terhadap kemungkinan-kemungkinan perubahan pendidikan yang terjadi secara global. Peningkatan kapasitas tenaga pengajar dan pendukung lainnya menjadi sangat penting dalam rangka menghadapi perubahan-perubahan di bidang pendidikan.

2. Urusan Kesehatan

Urusan kesehatan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada kewenangan pengelolaan UKP Kota dari rujukan tingkat Daerah Kota, penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota, SDM Kesehatan, Penerbitan ijin praktik, ijin kerja tenaga kesehatan, ijin apotik, toko obat, toko alkes dan optikal, ijin usaha mikro obat tradisional, sertifikasi produksi alkes kelas 1 tertentu dan PKRT kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga, ijin produksi makanan rumah tangga, pelayanan kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan (AlKes) dan makanan minuman serta pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Selain itu sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 kewenangan meliputi pemerintah daerah dapat menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin beroperasi di daerahnya. Sintesa kewenangan meliputi pengelolaan UKP Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga serta menyusun Program dan kegiatan bidang pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan yang meliputi

pengelolaan pembinaan pelayanan kesehatan, kefarmasian, dan alkes dan Sumber Daya Manusia Kesehatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dan sumberdata yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Permasalahan yang dihadapi berupa belum optimalnya mutu pelayanan rujukan ditandai dengan belum terpenuhinya sarana prasarana dan SDM yang sesuai dengan standar dan belum optimalnya penyediaan layanan dasar kesehatan sesuai standar, tahun 2021 puskesmas yang terakreditasi strata utama baru sebesar 50 persen.

Kewenangan lain sesuai Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 terkait dengan pelayanan Ante Natal (ANC) ibu hamil sesuai standar, pelayanan ibu bersalin sesuai standar, pelayanan bayi baru lahir sesuai standar, pelayanan balita sesuai standar, skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar, skrining warga usia 15-59 tahun sesuai standar, skrining warga usia di atas 60 tahun sesuai standar, pelayanan penderita hipertensi sesuai standar, pelayanan penderita diabeters sesuai standar, pelayanan ODGJ sesuai standar, warga dengan risiko TB mendapatkan TB sesuai standar, orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar, masih belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sebagai Indikator kinerja utama perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah Usia Harapan Hidup sesuai tahun 2018 yaitu untuk Jawa Tengah 74,08 tahun dan untuk Kota Salatiga yaitu 76,98 tahun. Data Angka Harapan Hidup Kota Salatiga Tahun 2017-2020 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Salatiga juga menunjukkan peningkatan Angka Harapan Hidup perempuan yang dalam kurun waktu 2017-2020 mengalami peningkatan di mana pada tahun 2020 Angka Harapan Hidup perempuan tertinggi sebesar 79,29 dibandingkan laki-laki yang hanya sebesar 75,45.

Acuan lain yaitu Perwali Nomor 113 Tahun 2020 menyangkut semua permasalahan kesehatan warga yang meliputi pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, imunisasi, kesehatan keluarga, peningkatan gisi masyarakat, surveilans, kesehatan lingkungan, perijinan sarana pelayanan kesehatan, farmasi makanan dan minuman dan pemberdayaan masyarakat. Permasalahan yang terjadi adalah belum tercapainya pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat terkait sucses rate TB dan angka temuan kasus baru TB. Hal ini disebabkan oleh masih adanya pandemi Covid-19 dan belum optimalnya pelayanan kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Terkait Angka Kematian Ibu per 100.000 KLH, Angka Kematian Bayi per 1.000 KLH dan Angka Kematian Balita per 1.000 memiliki kendala berupa masih adanya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi, pada

tahun 2021 angka kematian ibu melahirkan sebesar 117 per 100.000 KLH (10 kasus) dan angka kematian bayi sebesar 13,75 per 1.000 KLH (31 kasus).

Tabel 2. 24 Kinerja Upaya Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2017-2021

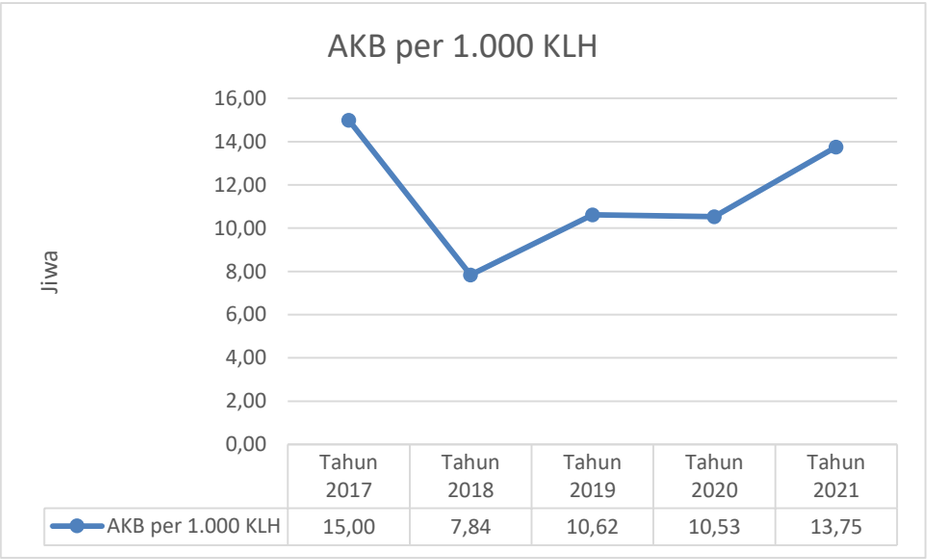
No	Indikator		Satuan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka kematian ibu	Target	per 100.000 KH	157	157	157	117	117
		Realisasi Capaian	%	236,87	117,60	78,68	121,50	429,55
		Rasio		49,13	125,10	149,89	96,15	-167,14
2	Angka Kematian bayi	Target	/1.000 pddk	11,5	11,5	11	11	10,75
		Realisasi Capaian		15,00	7,84	10,62	10,53	13,75
		Rasio		69,57	131,83	103,45	104,27	72,09
3	Prevalensi balita Gizi Buruk	Target	/1000 pddk	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02
		Realisasi Capaian		0,05	0,04	0,02	0,01	0,09
		Rasio		75,00	100,00	133,33	166,67	-250,00
4	Succes Rate TB Kota Salatiga	Target	/100.000 pddk	80	81	82	83	84
		Realisasi Capaian		82,02	81,79	91,20	96,73	92
		Rasio		102,53	100,98	111,22	116,54	109,52
5	Prevalensi Hipertensi penduduk usia > 18 tahun	Target	%	3,75	3,23	2,73	2,24	1,74
		Realisasi Capaian		3,33	1,10	0,72	0,60	0,72
		Rasio		111,20	165,94	173,63	173,21	158,62
6	Prosentase akreditasi puskesmas strata utama	Target	%	16,6	16,6	33,3	33,3	33,3
		Realisasi Capaian		16,60	16,60	50,00	50,00	50,00
		Rasio		100,00	100,00	150,15	150,15	150,15
7	Peringkat kelulusan akreditasi RSUD	Target		Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
		Realisasi Capaian		Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
		Rasio						

Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator penting sebagai cerminan tingkat kesehatan masyarakat, karena bayi sangat sensitif terhadap kondisi lingkungan tempat tinggal serta kondisi status sosial orang tuanya terutama terkait dengan kesehatan reproduksi. Tingkat kematian bayi dihitung dari banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 (satu) tahun pada waktu tertentu per seribu kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.

Selama kurun waktu tahun 2019 sampai tahun 2021 memiliki kecenderungan angka yang meningkat, meskipun pada tahun 2018 terjadi penurunan yang cukup besar yaitu mendekati separuh dibanding tahun sebelumnya. Angka capaian pada tahun 2018 menjadi angka terendah angka kematian bayi di Kota Salatiga dari tahun 2017 hingga tahun 2021, sebaliknya angka tertinggi kematian bayi dialami pada tahun 2017; sedikit lebih baik dari

tahun 2021. Penurunan kurava ini disebabkan karena meningkatnya kelahiran prematur, kurang sadarnya ibu untuk melakukan KB dan penanganan persalinan yang kurang tepat

Angka capaian tahun 2019 hingga 2021 diduga secara tidak langsung dipengaruhi oleh kondisi yang kurang menguntungkan di berbagai bidang sebagai akibat dari gangguan bidang kesehatan yang mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat, sanitasi, hingga asupan nutrisi.

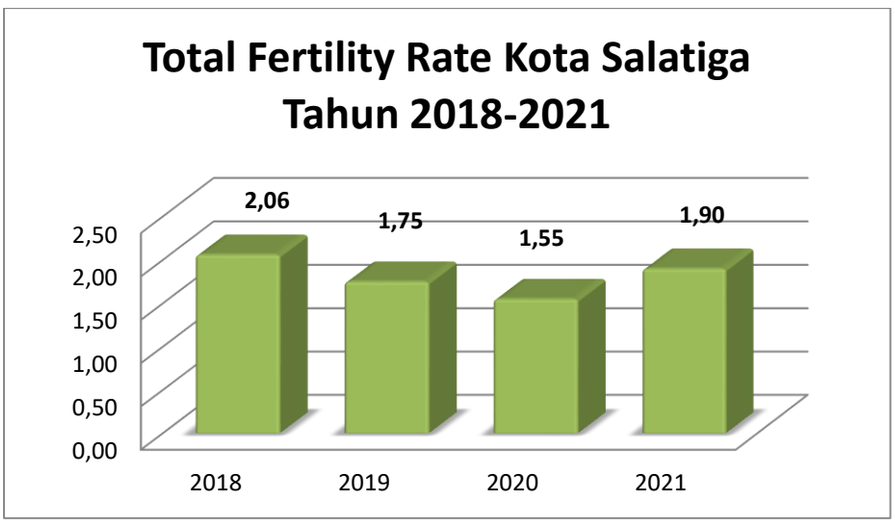


Gambar 2. 48 AKB per 1.000 KLH

Pada prevalensi balita gizi buruk hambatan yang ditemui adalah masih terdapatnya kasus balita gizi buruk, ditahun 2021 Prevalensi balita gizi buruk tercatat sebesar 0,09 persen (8 kasus). Kendala pada persentase ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan mengalami anemia adalah Target pada Renstra sebelumnya sangat rendah, karena hanya berdasarkan hasil survey dan bukan pendataan riil. Rendahnya persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan ASI ekslusif, tahun 2021 bayi baru lahir mendapat ASI ekslusif baru sebesar 77,28 persen. Informasi di Puskesmas. Sesuai dengan Tabel 2.21, realisasi capaian kinerja indikator pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di Kota Salatiga tercapai kinerjanya pada *sucses rate* TB tahun 2021 terealisasi 92 % dan rasio sebesar 109,52 persen.

Demikian juga dengan realisasi capaian kinerja peningkatan keselamatan ibu melahirkan (Tabel 2.24) di tahun 2021 tercapai pada kinerja Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 429,55 kasus per 100.000 Kelahiran Hidup dan rasio realisasi -167,14 perse Peningkatan AKI dari 121,50 kasus/100.000 kelahiran hidup pada 2020 menjadi 429,55 kasus/100.000 kelahiran hidup ini kemungkinan berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19. Kendati cakupan pelayanan ibu hamil pada 2021 meningkat dibandingkan pada tahun 2020, demikian pula cakupan pelayanan ibu

bersalin mencapai 100 persen, namun cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas menurun pada tahun 2021, yang kemungkinan turut berdampak pada peningkatan nilai AKI pada tahun 2021.erkait dengan Realisasi Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita (Tabel 2.24) di tahun 2021 tercapai pada kinerja Angka kematian Bayi sebesar 13,75 kasus per 1000 kelahiran dan rasio 72,09 persen, Salah satu indikator utama pengendalian kuantitas penduduk adalah terkendalinya angka kelahiran total atau *Total Fertility Rate* (TFR). TFR adalah banyaknya anak yang diperkirakan dilahirkan hidup oleh perempuan selama masa reproduksi dengan asumsi bahwa perilaku kelahirannya mengikuti pola kelahiran tertentu. Pada perkembangan empat tahun terakhir tingkat TFR Kota Salatiga menurut LKJIP Disdalduk 2019 – 2021 dan DP3APPKB tahun 2022, TFR kota Salatiga cenderung mengalami fluktuasi, namun masih berada di bawah TFR Nasional maupun provinsi, Bahkan dibawah batas toleransi pada pertumbuhan penduduk seimbang dengan TFR sebesar 2,1. Berikut adalah grafik TFR Kota Salatiga tahun 2018-2021;



Sumber: Disdalduk-KB Tahun 2019-2021 (Data Diolah), dan DP3APPKB 2022 (diolah)

Gambar 2. 49 Tren Total Fertility Rate Kota Salatiga

TFR Kota Salatiga pada tahun 2021 sebasar 1,90 persen, ini berarti setiap wanita di Kota Salatiga rata-rata mempunyai anak sebanyak 2 di akhir masa reproduksinya. Kondisi ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan TFR tahun-tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan standar nasional pengendalian kependudukan melalui pengendalian kelahiran di Kota Salatiga sudah berhasil, karena telah melampaui batas TFR sebesar 2,1 untuk penduduk Indonesia tumbuh seimbang.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Salatiga tahun 2017-2022, urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang difokuskan pada:

a) Penyediaan jaringan irigasi yang baik
b) Penyediaan akses air minum yang layak

c) Penyediaan jaringan pembuangan air limbah sistem komunal
d) Penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota
e) Penyediaan jalan yang baik beserta fasilitas pelengkapnya
f) Penyediaan jaringan drainase yang baik
g) Penyediaan bimbingan teknis bagi pelaku jasa konstruksi

Sepanjang tahun 2017-2021, DPUPR Kota Salatiga telah menyelesaikan beberapa target kinerja (Tabel 2.25). Jaringan irigasi, drainase, dan jalan yang berada dalam kondisi baik pada akhir tahun 2021, di atas 90 persen dari seluruh total jaringan yang ada. Jaringan irigasi yang kondisinya baik dipertahankan >80 persen setiap tahunnya. Dengan demikian, hampir seluruh jaringan irigasi (±23 km) memadai untuk kegiatan pertanian. Jaringan drainase dan jalan yang kondisinya baik telah ditingkatkan masing-masing 9 persen dan 25 persen dalam kurun waktu 2017-2021. Sebagian besar saluran pembuangan air (drainase) dan jalan penghubung dalam kota memadai untuk digunakan penduduk. Panjang jalan total di Kota Salatiga pada akhir tahun 2020 adalah 337.471 km. Sebagian besarnya memiliki permukaan aspal (299.075 km). Panjang jalan yang kondisinya baik mencapai 290.293 km (BPS, 2021). Sisanya merupakan jalan yang masih perlu diperbaiki.

Tabel 2. 25 Kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No.	Indikator		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Rumah tangga dengan akses air minum	Target	%	78	89	100	100	100
		Realisasi Capaian	%	0	90	95	98	99
		Rasio	%	0	102	95	98	99
2	Rumah tangga dengan akses pembuangan air limbah	Target	%	97	98	100	100	100
		Realisasi Capaian	%	0	82	87	87	88
		Rasio	%	0	83	87	87	88
3	Kawasan wajah kota yang tertata baik	Target	%	50	55	60	65	45
		Realisasi Capaian	%	0	25	35	40	50
		Rasio	%	0	45	58	61	111
4	Wilayah dengan infrastruktur baik	Target	%	65	74	83	91	100
		Realisasi Capaian	%	0	82	0	0	0
		Rasio	%	0	111	0	0	0
5	Tingkat ketaatan terhadap RTRW	Target	%	17	33	36	44	89
		Realisasi Capaian	%	30	66	87	89	96
		Rasio	%	176	201	242	202	108
6	Irigasi dalam kondisi baik	Target	%	93	95	97	99	90
		Realisasi Capaian	%	95	86	90	89	94

No.	Indikator		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
		Rasio	%	102	90	92	90	105
7	Jalan kota dalam kondisi baik	Target	%	91	93	94	95	93
		Realisasi Capaian	%	84	87	90	93	93
		Rasio	%	93	93	95	98	100
8	Jaringan drainase dalam kondisi baik	Target	%	91	92	94	96	98
		Realisasi Capaian	%	75	98	99	99	100
		Rasio	%	82	106	105	103	102

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun 2021

Dalam kurun waktu 2017-2021, persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum dan jaringan pembuangan air limbah/air sanitasi meningkat 9 persen dan 6 persen. Di akhir tahun 2021, sebanyak 99 persen rumah tangga sudah bisa mengakses air minum yang layak. Akan tetapi, baru 88 persen rumah tangga saja yang bisa mengakses saluran pembuangan air limbah/air sanitasi yang layak. Sejak berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, kedua indikator tersebut merupakan dua pelayanan dasar wajib yang harus memenuhi SPM. Oleh karena itu, kedua indikator tersebut harus mencapai 100% di setiap tahun.

Tingkat kesesuaian tata ruang Kota Salatiga dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) meningkat drastis sejak 2017. Peningkatannya mencapai 66 persen dalam waktu 5 tahun. Di akhir tahun 2021, >90 persen tata ruang kota sudah sesuai dengan pemetaaan RTRW. Akan tetapi, peningkatan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan rasio wilayah wajah kota yang tertata dengan baik. Sejak tahun 2018, penataan wajah kota hanya mengalami peningkatan 25 persen. Di akhir tahun 2021, hanya 50 persen wajah kota yang tertata dengan baik.

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kewenangan urusan perumahan dan kawasan permukiman bagi pemerintah kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu pada sub urusan perumahan dalam rangka menyediakan rumah bagi masyarakat termasuk di dalamnya perijinan mengenai rumah. Urusan Kawasan Permukiman melalui perijinan pembangunan perumahan dan upaya-upaya penataan kawasan kumuh. Sub urusan kawasan permukiman kumuh memiliki kewenangan dalam rangka pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, penyediaan PSU untuk kawasan perumahan dan sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan sesuai dengan tupoksinya, akan membantu dan memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk menghuni rumah yang layak dan terjangkau dalam suatu perumahan yang dilengkapi dengan

prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang memadai. Pada tahun 2021 tercatat terdapat 44.491 rumah yang ada di Salatiga, cakupan lingkungan sehat dan aman mencapai 75,37 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 58,71 persen. Jika dibandingkan dengan target maka upaya penciptakan lingkungan yang sesuai dengan kriteria sehat masih perlu upaya keras. Untuk kinerja ketersediaan rumah layak huni sudah selama 5 tahun terakhir sudah diatas 90 persen sehingga dapat diakatakan baik dan akan dapat tercapai sesuai dengan target yang ada ditetapkan. Sedangkan untuk kawasan luasan kawasan kumuh hanya tinggal 1,9 persen pada tahun 2021. Dari 1,9 persen luasan kawasan kumuh rata-rata selama 5 tahun dapat diatasi problematikanya sebesar 50 persen. Sebagai data pendukung kinerja tersebut pada tahun 2017 penerima bantuan rumah layak huni ada 411 rumah, tahun 2018 hanya 88 rumah, pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 420 rumah. Sedangkan pada tahun 2020 terdapat 182 rumah yang menerima bantuan layak huni.

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman juga mengatasi masalah sengketa tanah garapan. Prosentase rata-rata penyelesaian sengketa tersebut selama 5 tahun diatas 50 persen, kecuali pada tahun 2018 hanya mencapai 33 persen turun dari tahun 2017 yang sudah mencapai 70 persen. Capaian kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga Tahun 2017-2021 untuk dikunagn PSU dan ketersediaan rumah layak huni berada pada kinerja yang baik yaitu diatas 90%. Tidak terjadi pertambahan luas kawasan kumuh di perkotaan bahkan selama 5 tahun terakhir luasan kawasan kumuh mengalami penurunan. Sedangkan penyelesaian sengketa tanah yang tidak dapat teratasi dengan baik adalah pada tahun 2018 dan 2019 dengan rasio capaian kinerja dibawah 50%. Secara keseluruhan indikator capaian urusan PKP dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 26 Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Target	%	55	60	65	70	75
		Realisasi Capaian	%	53	95,15	96,16	58,71	75,37
		Rasio	%	96,36	158,58	147,94	83,87	100,49
2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Target	%	89,29	90,07	90,96	91,84	92,73
		Realisasi Capaian	%	90,38	90,58	91,7	93,34	91,40
		Rasio	%	101,22	100,57	100,81	101,63	98,57
3	Persentase luasan kawasan kumuh perkotaan	Target	%	4,43	4,28	4,22	4,15	4,06
		Realisasi Capaian	%	0	3,29	2,20	1,9	1,93
		Rasio	%	0	76,78	52,13	45,78	47,54

No	Indikator		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
4	Persentase luasan kawasan kumuh perkotaan yang tertangani	Target	%	13,92	19,3	24,8	32,46	40,82
		Realisasi Capaian	%	30	100	51,99	57,38	58,2
		Rasio	%	215,52	518,13	209,64	176,77	142,58
5	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kota	Target	%	70	70	80	80	90
		Realisasi Capaian	%	70	33	41,6	66,67	100
		Rasio	%	100,00	47,14	52,00	83,33	100

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga 2021

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Iklim ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang kondusif dalam sebuah kota menjadi salah satu faktor pendukung penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pemeliharaan situasi wilayah yang kondusif ini telah diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang penyelenggaraannya diserahkan ke pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan tersebut menyatakan bahwa tujuan pembentukan Satpol PP adalah untuk menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan kepada masyarakat.

Mengacu pada landasan hukum tersebut, Pemerintah Kota Salatiga berupaya untuk senantiasa menjaga kestabilan situasi yang mendukung pembangunan melalui kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga. Pembentukan Satpol PP Kota Salatiga sendiri dilandaskan pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 yang mengatur pembentukan dan susunan perangkat daerah yang kemudian tugas dan fungsinya diperinci dalam Peraturan Wali Kota Nomor 117 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Sementara dalam penyelenggaraannya, penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan penjagaan ketentraman masyarakat di wilayah Kota Salatiga berpedoman pada Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 29 Tahun 2018.

Capaian kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat selama periode 2017-2021 menunjukkan kinerja yang baik. Pada tahun 2017 cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di lingkungan Kota sebanyak 75 orang per 10.000 penduduk, kemudian mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 66 orang per 10.000 penduduk. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah mencapai 100 persen selama periode 2017-2020, dan mengalami penurunan menjadi 94,36 % di tahun 2021, yang disebabkan oleh pandemi covid 19 sehingga mengakibatkan penyesuaian-penyesuaian

perubahan dalam penegakan kinerja trantibum. Kinerja yang baik juga ditunjukkan dengan tidak adanya unjuk rasa anarkis yang terjadi selama kurun waktu 2017-2021. Hal ini menunjukkan tingginya kondusivitas situasi ketertiban di Kota Salatiga. Gambaran umum capaian kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 27 Kinerja Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2017–2021

No	Indikator		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	Target	Orang/10.000 penduduk	67	61	75	77	79
		Realisasi capaian	Orang/10.000 penduduk	75	75	63	66	66
		Rasio	%	111.94	122.95	84.00	85.71	83.54
2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/Kota	Target	%					
		Realisasi capaian	%	75	100	100	100	66.9
		Rasio	%					
3	Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah kebakaran	Target	%					
		Realisasi capaian	%	55	52	81.81	52.6	64.16
		Rasio	%	100	100	100	100	100
4	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Target	%					
		Realisasi capaian	%	100.00	100.00	100.00	100.00	94
		Rasio	%	100	100	100	100	0.94
5	Persentase Jumlah Unjuk Rasa Anarkis	Target	%					
		Realisasi capaian	%	0	0	0	0	0
		Rasio	%					

Sumber : KESBANGPOL & Satpol PP Kota Salatiga 2021

6. Urusan Sosial

Urusan Sosial dalam pemerintahan daerah dipayungi oleh Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang Undang tersebut, Urusan Sosial terdiri dari 6 sub bidang, yaitu (1) Pemberdayaan Sosial; (2) Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan; (3) Rehabilitasi Sosial; (4) Perlindungan dan Jaminan Sosial; (5) Penanganan Bencana; dan (6) Taman Makam Pahlawan. Pelaksanaan Urusan Sosial terkait kesejahteraan sosial mengacu pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik, Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2009 juga menyatakan bahwa diperlukan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial.

Urusan Sosial terkait penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Urusan Sosial terkait fakir miskin dilakukan berdasarkan Undang Undang Nomor13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Pelaksanaan tugas dan fungsi Urusan Sosial terkait kebencanaan mengacu pada Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sementara tugas dan fungsi terkait kesejahteraan sosial dalam kondisi bencana diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Payung Undang Undang ini kemudian diperkuat melalui Perwali Kota Salatiga Nomor 112 Tahun 2020 yang mengatur tugas dan fungsi OPD yang bertanggungjawab atas Urusan Sosial ini.

Dalam kurun waktu 2017-2021, capaian kinerja Urusan Sosial Sebagian besar telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Walaupun pada awal periode (tahun 2017) terdapat 11 dari 21 indikator yang tidak memenuhi target, namun pada tahun-tahun berikutnya keseluruhan indikator menunjukkan peningkatan. Persentase pencapaian target kinerja pada tahun 2018 mencapai 85,71 persen dari seluruh indikator. Sementara pada dua tahun berikutnya, yaitu tahun 2019 dan 2020, persentase capaian target berada pada angka 90,48 persen. Hal yang menjadi perhatian dalam kinerja Urusan Sosial dalam periode 2017-2021 adalah Persentase PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. Meskipun target tahunannya tercapai, program pemberdayaan sosial PMKS dapat lebih ditingkatkan dengan menggandeng kelompok usaha sosial yang lebih luas. Pelaksanaan program Urusan Sosial perlu mendapatkan dukungan dari pemangku-pemangku kepentingan terkait.

Tabel 2. 28 Kinerja Sosial Tahun 2017 – 2021

No.	Indikator		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan penanganan PMKS	Target		4	5	6	7	9
		Realisasi Capaian	%	5,71	5,7	9,6	8,8	10,9
		Rasio		140	110	160	130	120
2	Bantuan sembako, pangan non tunai dan PKH bagi fakir miskin	Target		38	46	55	66	79
		Realisasi Capaian	%	95	100	100	100	100
		Rasio		250	220	180	150	130
3		Target		36	43	51	61	74

No.	Indikator		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
	Verifikasi dan validasi Penerima Bantuan Iur (PBI) Jaminan Kesehatan	Realisasi Capaian	%	0	36,9	91,5	91,5	93,5
		Rasio		0	90	180	150	130
4	Korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Target		37	44	53	63	76
		Realisasi Capaian	%	100	100	100	100	100
		Rasio		270	230	190	160	130
5	Cakupan layanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Target		31	37	45	54	64
		Realisasi Capaian	%	100	100	100	100	100
		Rasio		320	270	220	190	160
6	LK3 yang dibentuk dan dibina	Target		12,00	15,00	15,00	21,00	26,00
		Realisasi Capaian	%	20,00	20,0	20,0	30,0	30,0
		Rasio		170	130	130	140	120
7	PSKA,PSM,KT, dan Dunia Usaha/CSR yang dibentuk dan dibina	Target		21,00	26,00	26,00	37,00	44,00
		Realisasi Capaian	%	75,00	75,0	75,0	75,0	75,0
		Rasio		360	290	290	200	170
8	Eks penyandang penyakit sosial yang dibina	Target		33	40	48	57	69
		Realisasi Capaian	%	0	100,0	53,0	96,6	96,8
		Rasio		0	250	110	170	140
9	Penyandang masalah disabilitas yang telah memperoleh penanganan	Target		28	33	40	48	57
		Realisasi Capaian	%	30,00	35,7	43,2	49,0	52,2
		Rasio		110	110	110	100	90
10	Anak terlantar yang ditangani	Target		21	25	30	37	43
		Realisasi Capaian	%	0	62,5	71,0	0	82,1
		Rasio		0	250	240	0	190
11	Pemeliharaan taman makam pahlawan	Target		1	1	1	1	1
		Realisasi Capaian	%	1	1	1	1	1
		Rasio		100	100	100	100	100

2.4.2.Fokus Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pembagian Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi: 1) Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; 2) Penempatan Tenaga Kerja; 3) Hubungan

Industrial dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan. Berdasarkan pembagian urusan tersebut maka kewenangan Pemerintah kabupaten/kota terkait dengan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja meliputi: pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, pembinaaan lembaga pelatihan kerja swasta, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil dan pengukuran produktivitas tingkat daerah.

Berkaitan dengan penempatan tenaga kerja, maka kewenangan Pemerintah kabupaten/kota meliputi: pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota, penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan informasi pasar kerja dalam daerah kabupaten/kota, perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten/kota dan penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Untuk memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga, berbagai upaya telah dilaksanakan baik melalui pelatihan maupun melalui penyediaan informasi tenaga kerja. Pada tahun 2017 hingga 2020, setidaknya 91 orang (2019) mendapat pelatihan. Pelatihan diikuti paling banyak oleh 185 orang pada tahun 2017. Sementara pada tahun 2021 terjadi penurunan yang signifikan menjadi 40 orang karena pembatasan aktivitas akibat pandemi Covid-19.

Pada tahun 2021, pencari tenaga kerja yang ditempatkan mencapai sebesar 95,71 persen, menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 sebesar 96,15 persen. Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2021 sebesar 70,36 persen, sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 sebesar 70,23 persen. Jumlah pengangguran terbuka Kota Salatiga tahun 2017 hingga 2019 menunjukkan penurunan dari 4.155 menjadi 3.502 sebelum menanjak dua kali lipat ke angka 8.023 di 2020 dan 8.145 di 2021. Kenaikan yang signifikan di tahun 2020 menunjukkan bahwa tenaga kerja di Kota Salatiga sangat rentan kehilangan pekerjaannya selama pandemi Covid-19.

Dalam hal hubungan industrial kewenangan pemerintah kabupaten/kota meliputi: pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah. Sedangkan untuk urusan pengawasan ketenagakerjaan bukan kewenangan pemerintah kabupaten/kota melainkan pemerintah pusat dan provinsi. Kondisi capaian urusan ketenaga kerjaan selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 29 Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2017-2021

No	Indikator	Capaian	Satuan	Kondisi Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Target	orang	75	100	100	100	100
		Realisasi	orang	185	100	91	100	40
		Rasio	%	2,47	1	0,91	1	0,4
2	Persentase lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) memiliki izin	Target	%	8	11	11	15	15
		Realisasi	%	11	66	0	0	tad
		Rasio	%	1,375	6	0	0	tad
3	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Target	%	34,9	35,4	35,7	35,85	36
		Realisasi	%	11,36	35	31,7	96,15	95,71
		Rasio	%	0,33	0,99	0,89	2,68	2,66
4	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Target	%	62,78	62,1	61,43	60,76	60,1
		Realisasi	%	70,53	71,75	66,49	70,23	70,36
		Rasio	%	1,12	1,16	1,08	1,16	1,17
5	Tingkat pengangguran terbuka	Target	orang	5443	5411	5330	5250	5171
		Realisasi	orang	4155	3836	3502	8203	8145
		Rasio	%	0,76	0,71	0,66	1,56	1,58
6	Jumlah TKI yang terlindungi	Target	orang	25	27	29	31	32
		Realisasi	orang	22	29	29	5	5
		Rasio	%	0,88	1,07	1	0,16	0,16
7	Persentase Tenaga Kerja Asing Yang memiliki izin	Target	%	40	40	40	40	40
		Realisasi	%	58	43	40,27	67	79
		Rasio	%	1,45	1,08	1,01	1,68	1,98
8	Jumlah perusahaan yang telah disahkan peraturan perusahaannya oleh Dinas	Target	PP	5	5	7	9	11
		Realisasi	PP	12	18	30	40	20
		Rasio	%	2,4	3,6	4,29	4,44	1,82
		Target	PKB	3	1	1	2	2
		Realisasi	PKB	2	2	1	1	1
		Rasio	%	0,67	2	1	0,5	0,5
9	Angka perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan	Target	kasus	10	10	10	10	10
		Realisasi	kasus	6	8	6	4	7
		Rasio	%	0,6	0,8	0,6	0,4	0,7

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Manifestasi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Salatiga mencakup peningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Realisasi pelaksanaannya dapat dilihat dari besarnya upaya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dan upaya melalui kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan. Pencapaian PUG Kota Salatiga 2017-2021 sudah mencapai target 100 persen. Pengembangan PUG yang bersifat inovatif, kreatif dan produktif masih harus dilakukan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11, maka pembangunan manusia berbasis gender harus mengikut sertakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan

Gender (IDG). Keduanya merupakan dua ukuran yang selalu digunakan untuk menilai keberdayaan perempuan dan kontribusi pembangunan kepada perempuan dan sudah seharusnya terekspresi dalam pemberdayaan perempuan.

Berdasarkan data BPS Kota Salatiga yang dirilis 9 Juni 2022, sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, Indeks Pembangunan Gender Kota Salatiga yang ditampilkan dalam bentuk prosentase, semakin jauh dari angka 100 (Tabel 2.14). Data yang diperoleh mengindikasikan kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Salatiga yaitu sebesar 95,00 di tahun 2019, kemudian 95,18 di tahun 2020 dan menjadi 95,37 di tahun 2021. Pada tahun 2021, pembangunan manusia menurut gender menunjukkan perbaikan yang ditunjukkan dengan besaran IPG sebesar 95,37. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Salatiga menunjukkan fluktuasi dari 2019-2021, yaitu 76,19; 76,07 dan 79,08 (Tabel 2.16)

Tabel 2. 30 Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2021

No	Indikator		Satuan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase sumbangan perempuan dalam Pendapatan kerja	Target		41,34	41,71	41,89	41,89	41,89
		Realisasi Capaian	%	-	38,8	63,71	39,62	
		Rasio			93,02	152,09	94,58	
2	Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif	Target		28	28	32	20	28
		Realisasi Capaian	%	28	28	20	20	20
		Rasio		100,00	100,00	71,43	62,50	100,00
2	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Target		0,01	0,01	0,01	0,01	0,05
		Realisasi Capaian	%	0,02	0,02	0,01	0,01	
		Rasio		0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
3	Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang tertangani	Target		100	100	100	100	100
		Realisasi Capaian	%	100	100	100	100	
		Rasio		100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Rasio anak korban kekerasan	Target		0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
		Realisasi Capaian	%	0,02	0,01	0,02	0,02	0,035
		Rasio		0,00	150,00	100,00	100,00	25,00
5	Tingkat capaian KLA (Kota Layak Anak)	Target		400	500	650	675	675
		Realisasi Capaian	%	239	606,5	794,95	794,95	
		Rasio		59,75	21,30	122,30	117,77	-
6	Persentase kelembagaan forum anak	Target					100	100
		Realisasi Capaian	%				100	100
		Rasio					100,00	100,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Salatiga, 2021

Kualitas hidup dan perlindungan perempuan di Kota Salatiga dapat dilihat salah satunya dari kinerja rasio angka kekerasan terhadap perempuan. Tahun 2017, Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Salatiga menunjukkan kondisi relatif kecil yaitu sebesar 0,02 persen, lalu menurun mulai tahun 2019 hingga 2020 menjadi 0,01 persen. Namun demikian, terjadi peningkatan rasio kekerasan pada tahun 2021 menjadi 0,05. Berkaitan dengan peningkatan perlindungan khusus anak, upaya menurunkan kekerasan terhadap anak masih belum berhasil dengan baik sejak tahun 2017-2021, yaitu 0,02 persen. Kekerasan terhadap anak mengalami sedikit penurunan hanya pada tahun 2018, yaitu 0,01 persen, dan bahkan meningkat menjadi 0,035 persen di tahun 2021. Peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2021 dapat berkaitan dengan peningkatan pengangguran dan kemiskinan karena pandemi COVID-19, yang pada akhirnya berdampak kepada kondisi rumah tangga.

Peningkatan cakupan hak-hak anak di Salatiga, salah satunya adalah mengembangkan Kota Layak Anak (KLA). Capaian Salatiga untuk KLA mengalami kenaikan peringkat, yaitu memperoleh hasil evaluasi KLA Pratama pada tahun 2017 dengan skor 239. Skor tersebut terus meningkat hingga 794,95 pada tahun 2020. Hal tersebut menjadi pemicu untuk menumbuh kembangkan KLA di semua kecamatan bahkan sampai wilayah pedesaan di Kota Salatiga, disamping meningkatkan capaian KLA dari Pratama menjadi Madya. Sementara itu, mulai tahun 2020 forum kelembagaan anak tercapai 100 persen secara keseluruhan ditingkat kota, kecamatan dan kelurahan.

3. Urusan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dinyatakan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Tabel 2. 31 Kinerja Urusan Pangan Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No.	Indikator		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Pola Pangan Harapan	Target	%	75	80	85	90	90
		Realisasi Capaian	%	89.7	89.9	90.1	90.5	90.7
		Rasio	%	119	112	106	100	100

No.	Indikator		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
2	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/ kapita/hari	Target	Skor	15	14,9	14,8	14,7	14,6
		Realisasi Capaian	Skor	tad	tad	tad	tad	tad
		Rasio	Skor	tad	tad	tad	tad	tad

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga tahun 2021

Terdapat dua Indikator Kinerja Daerah di Urusan Pangan yaitu Skor Pola Pangan Harapan dan Proporsi Penduduk dengan asupan kalori rendah (<1400 kkal/penduduk/hari. Pola Pangan Harapan Kota Salatiga relatif stabil dengan skor 80-90 persen selama lima tahun (Tabel 2.31). Skor ini menunjukkan bahwa kualitas pangan sudah mendekati ideal (BKP, 2015). Hal ini berarti penduduk Kota Salatiga mengkonsumsi pangan yang beragam mencakup: padi, umbi, pangan hewani, minyak dan lemak, buah dan biji, aneka kacang, gula, sayur dan buah, serta bumbu lainnya. Akan tetapi, tidak ada data tentang persentase penduduk dengan asupan kalori rendah.

4. Urusan Pertanahan

Pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan kewenangan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dalam urusan bidang pertanahan adalah:

a) Pemberian ijin lokasi dalam satu daerah kabupaten/kota.
b) Menyelesaikan sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota.
c) Penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah.
d) Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam daerah kabupaten/kota.
e) Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota.
f) Penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten/kota.
g) Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten/kota.
h) Penerbitan izin membuka tanah.
i) Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten/kota.

Urusan bidang pertanahan di Kota Salatiga dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga, dimana Capaian Kinerja Urusan Bidang Pertanahan Kota Salatiga dari tahun 2017-2021 tertera dalam tabel berikut.

Tabel 2. 32 Kinerja Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan di Kota Salatiga Tahun 2017-2021

NO	Indikator Kinerja		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Daerah	Target	%	tad	tad	tad	tad	tad
		Realisasi Capaian	%	0	20	40	60	-
		Rasio	%	tad	tad	tad	tad	tad
2	Dokumen Penegasan Batas Wilayah Daerah	Target	Dok	tad	tad	tad	tad	tad
		Realisasi Capaian	Dok	0	1	1	1	-
		Rasio	%	tad	tad	tad	tad	tad
3	Mediasi interpersonal	Target	Kali	tad	tad	tad	tad	tad
		Realisasi Capaian	Kali		4	4	4	4
		Rasio	%	tad	tad	tad	tad	tad
4	Mediasi luar ruang	Target	Kali	tad	tad	tad	tad	tad
		Realisasi Capaian	Kali		4	4	-	-
		Rasio	%	tad	tad	tad	tad	tad
5	Persentase Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kota	Target	%	tad	tad	tad	tad	tad
		Realisasi Capaian	%	70	33	41.6	12	75
		Rasio	%	tad	tad	tad	tad	tad

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga, 2017-2021

Urusan bidang pertanahan di Kota Salatiga selama rentang tahun 2017-2021 menyusun program Penatagunaan Tanah dan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan. Akan tetapi selama rentang tahun 2017-2021 untuk urusan bidang pertanahan di Kota Salatiga hanya mampu merealisasikan 75 % program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan. Sementara itu untuk program Penatagunaan Tanah pada tahun 2020 terhenti karena keterbatasan mobilitas pelaksanaan program akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu capaian indikator urusan pemerintahan bidang pertanahan belum optimal tercapai. Hal ini juga terlihat pada Laporan Kinerja Kantor Pertanahan Kota Salatiga 2020 bahwa jumlah tanah terdaftar di Kota Salatiga seluas 4.428,3019 ha dan untuk tanah yang belum terdaftar seluas 1.249,698 ha, sedangkan untuk tanah yang telah terpetakan sebanyak 4.113,0159 ha, dimana adanya pandemi Covid-19 menjadikan kendala untuk pelaksanaan program.

5. Urusan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pembagian urusan pemerintah bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/ kota mencakup sub urusan perencanaan lingkungan hidup, kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup keanekaragaman Hayati (Kehati), Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan.

Dalam beberapa hal, kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Kota Salatiga sudah berjalan dengan cukup baik. Kondisi tersebut ditunjukkan dari sisi perencanaan lingkungan hidup sudah memiliki dokumen RPPLH. Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, lembaga kemasyarakatan tingkat kabupaten yang mendapatkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup, penerima penghargaan tingkat kabupaten yang difasilitasi untuk penghargaan tingkat Provinsi, pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dan penegakan hukum lingkungan.

Kendati demikian, beberapa indikator yang sangat penting masih memerlukan perhatian karena berdampak pada kondisi lingkungan hidup di Kota Salatiga. Capaian Indeks Kualitas Air pada tahun 2021 (sebesar 42,50) menunjukkan penurunan dari capaian sebelumnya sebesar 44,29 ditahun 2020. Artinya, masih diperlukan upaya-upaya yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas air sehingga dapat berfungsi untuk pelbagai peruntukan, baik sebagai air baku, irigasi, perikanan, maupun yang lainnya.

Tabel 2. 33 Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator		Satuan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kualitas Air	Target		46,87	47,07	47,27	47,47	47,67
		Realisasi Capaian	%	43,33	43,33	43,54	44,29	42,50
		Rasio		0,92	0,92	0,92	0,93	0,89
2	Indeks Kualitas Udara	Target		83,57	83,77	83,97	84,17	84,37
		Realisasi Capaian	%	66,75	76,87	76,98	79,41	79,82
		Rasio		0,80	0,92	0,92	0,94	0,95
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Target		59,38	59,38	59,38	59,38	59,38
		Realisasi Capaian	%	59,38	59,46	59,62	59,43	47,21

No	Indikator		Satuan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
		Rasio		1,00	1,00	1,00	1,00	0,80
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Target	%	62,91	63,06	63,21	63,51	63,51
		Realisasi		56,78	59,78	60,05	60,88	58,65
		Capaian						
		Rasio		0,90	0,95	0,95	0,96	0,92

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga, 2021

Perhitungan Indeks Kualitas Udara menunjukkan hasil yang cukup baik dengan adanya peningkatan capaian dari 66,75% pada 2017 menjadi 79,82% pada 2021, kendati belum mencapai target yang diharapkan. Sedangkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan menunjukkan pola yang mirip dengan Indeks Kualitas Air, yaitu penurunan dari angka sekitar 59% yang secara konsisten dipertahankan sejak 2017-2020, menjadi 47,21% di tahun 2021. Alih guna lahan terbuka menjadi pemukiman dan lain sebagainya dapat menjadi salah satu penyebab penurunan tersebut sebagai dampak dari pertambahan jumlah penduduk. Oleh sebab itu, diperlukan upaya pendataan lahan-lahan milik warga yang masih bebas dari bangunan supaya dapat ikut diperhitungkan sebagai wilayah kota dengan lahan tertutup vegetasi. Pada akhirnya, ketiga indikator tersebut menghasilkan satu indikator utama yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang capaiannya pada 2021 menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan masih di bawah target yang ditetapkan.

Salah satu fokus Pemerintah Kota Salatiga melalui DLH adalah pada pengelolaan sampah. Sampah domestik atau yang biasa disebut sampah rumah tangga dihasilkan dari segala aktivitas warga yang terjadi di Kota Salatiga sehingga menjadi permasalahan krusial yang harus ditangani dan ditingkatkan penanganannya. Hal ini diperlukan untuk mencegah pencemaran lingkungan baik pencemaran udara, air dan tanah yang diakibatkan oleh timbunan sampah domestik yang tidak tertangani. Ketergantungan Kota Salatiga atas pemanfaatan air tanah untuk air bersih mewajibkan kita semua agar menjaga kondisi air tanah dari dampak pencemaran yang dapat ditimbulkan dari adanya timbulan sampah yang tidak tertangani.

Sejauh ini, proses pengurangan volume sampah dilakukan dengan berbagai cara baik melalui pembinaan masyarakat sadar pengolahan sampah mulai dari RT dan RW; pembentukan dan pembinaan kelompok bank sampah di masyarakat; pembangunan dan pengelolaan TPST3R maupun TPST atau pusat daur ulang sampah; pembangunan dan peningkatan fungsi TPS. Ketersediaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah juga masih kurang sehingga perlu ditingkatkan.

TPA atau Tempat Pemprosesan Akhir merupakan lini akhir dari proses penanganan sampah di Salatiga. Dengan kondisi volume sampah domestik harian saat ini yang masuk ke TPA diperkirakan umur TPA hanya mencapai 5 (lima) tahun lagi atau hanya sampai tahun 2022. Mengingat keterbatasan lahan *landfill* yang ada maka diperlukan beberapa penanganan strategis yaitu: pengurangan volume sampah

dengan kegiatan daur ulang, yaitu sampah diubah menjadi kompos secara intensif; penyediaan lahan untuk area *landfill* baru juga tetap dibutuhkan. Kedepan diharapkan dengan intensifikasi kegiatan ini akan menciptakan TPA dengan Sistem Sanitary Landfill. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Ngronggo Salatiga (TPASNS) juga direncanakan menjadi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Edukatif Rekreatif dan Inovatif Nggronggo Salatiga atau disingkat TPAS ERINS. Kedepan TPAS ERINS merupakan pusat edukasi pengolahan persampahan bagi masyarakat sekaligus juga menjadi pusat penelitian dan pengembangan hasil olahan sampah di Salatiga selain juga menjadi area rekreasi, taman, dan kebun dengan beragam jenis tanaman dan hewan yang akan ditanam dan dipelihara.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sistem administrasi menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang terdiri atas pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta pengelolaan data informasi kependudukan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan dasar kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola sistem administrasi kependudukan, yang mencakup: (1) pelaksanaan pelayanan; (2) pengelolaan pengaduan masyarakat; (3) pengelolaan informasi; (4) pengawasan internal; (5) penyuluhan kepada masyarakat; (6) pelayanan konsultasi; serta (7) pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Acuan lain yang digunakan adalah Perwali 33/2016 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Berdasarkan Perwali 33/2016 tersebut dapat dijabarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah untuk urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil adalah membantu Walikota untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Hingga tahun 2021, dapat dikatakan bahwa capaian urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sudah baik. Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran pada tahun adalah 97,63%, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang baru mencapai 94%. Peningkatan ini menandakan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil. Persentase cakupan pencatatan sipil Akta Perkawinan juga sudah mencapai target 100 persen secara konsisten sejak 2017 hingga 2021. Sementara, persentase penduduk yang sudah memiliki KTP elektronik pada tahun 2021 baru mencapai rasio 96 persen. Capaian urusan kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 34 Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tahun 2017-2021

No	Indikator		Satuan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase cakupan Akta Kelahiran	Target		93	93	94	94	95
		Realisasi Capaian	%	95,67	92	93,76	94.00	97,63
		Rasio		102,87	98,92	99,57	104,8	104
2	Persentase cakupan penduduk ber KTP	Target		100	100	100	100	100
		Realisasi Capaian	%	94,72	93,88	95,35	100	94,32
		Rasio		94,72	93,88	95,6	97,56	96
3	Persentase cakupan pencatatan sipil Akta Perkawinan	Target		100	100	100	100	100
		Realisasi Capaian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100
		Rasio		100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dari tabel 2.34 dapat dilihat bahwa untuk indikator persentase cakupan akta kelahiran dan persentase penduduk ber KTP elektronik pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan, karena system migrasi data elektronik data kependudukan sebelum tahun 2014 belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sepenuhnya. Selanjutnya, mulai 2018, persentase penduduk ber-KTP elektronik tahun 2020 meningkat terus hingga 100%. Namun demikian pada tahun 2021, indikator tersebut turun realisasinya hingga 94,32%. Ini disebabkan oleh masih terdapatnya penduduk belum melakukan perekaman pada usia tersebut. Oleh sebab itu perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan performansi perekaman dan memastikan integrasi data elektronik kependudukan berjalan sepenuhnya.

Pencapaian kesetaraan dan keberdayaan perempuan dilakukan melalui penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak ditunjukkan dengan monitoring dan evaluasi PUG yang dilakukan 2 kali per tahun. Dalam jangka waktu 5 tahun (2017-2021), persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif mengalami penurunan dari 28 persen menjadi 20 persen, hanya dari segi sumbangan pendapatan perempuan dalam rumah tangga justru relatif meningkat dari 38,8 persen menjadi 39,62 persen.

Penyediaan data gender dilakukan melalui penyusunan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA). Pencapaian kelembagaan bidang PUG juga dapat dilihat dari meningkatnya pengetahuan tentang pencegahan dan

penanganan kekerasan berbasis gender dan anak serta *traficking* yang terjadi di Kota Salatiga.

7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan pengendalian penduduk tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tiga sub-urusan/bidang terkait pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Salatiga adalah Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Jika dijabarkan lebih lanjut, kewenangan Pemerintah Kota Salatiga dalam bidang pengendalian penduduk mencakup: (1) pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; serta (2) pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota. Terkait bidang Keluarga Berencana, kewenangan Pemerintah Kota Salatiga mencakup: (1) Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal; (2) Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB); (3) Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota; dan (4) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. Selanjutnya, dalam bidang Keluarga Sejahtera, Pemerintah Kota Salatiga memiliki kewenangan dalam hal: (1) Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan (2) Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Secara umum, capaian kinerja urusan pengendalian penduduk dan KB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 35 Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017-2021

No	Indikator		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio akseptor KB baru	Target	%	110	115	115	117	75
		Realisasi Capaian		56,58	48,02	79,96	48,11	87,16
		Rasio		---	41,76	69,53	41,12	116,21

No	Indikator		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
2	Cakupan peserta KB aktif	Target		---	78	79	80	80
		Realisasi Capaian	%	112,67	109,25	72,88	71,27	71,9
		Rasio		---	140,06	92,25	89,09	89,88
3	Rasio PPKBD	Target		1:2	1:2	1:2	1:2	1:2
		Realisasi Capaian	%	1:1,74	1:1,9	1:1	1:1,96	1:2
		Rasio		---	1,66	98,39	1,67	100
4	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15-19 thn	Target		1,85	2	2	2	2
		Realisasi Capaian	%	0,03	0,02	1,15	1,05	0,92
		Rasio		---	125	142,5	147,5	154
5	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	Target		77,60	78	78	80	78
		Realisasi Capaian	%	78,90	79,25	72,88	71,27	71,2
		Rasio		---	95,56	62,00	29,56	100
6	Cakupan perkawinan usia di bawah 21 th	Target		22	20	17	15	2
		Realisasi Capaian	%	30,91	29,55	0,84	0,67	---
		Rasio			52,25	195,06	195,53	200
7	Total Fertility Rate	Target		2,16	2,15	2,12	2,10	2,10
		Realisasi Capaian	%	2,18	2,06	1,75	1,55	---
		Rasio		---	---	---	---	---

Hasil kinerja di bidang Pengendalian Penduduk dan KB menunjukkan bahwa Total Fertility Rate terus menurun dari 2,18 pada tahun 2017 hingga 1,55 pada tahun 2020. Jika TFR ideal 2,10 yang diharapkan, maka nilai TFR di bawah standar tersebut mengindikasikan kecenderungan penurunan jumlah penduduk dan penuaan. Maka diperlukan upaya untuk meningkatkan TFR kembali ke angka 2,10.

Terkait bidang pelayanan KB, capaian rasio akseptor KB baru pada rentang 2018-2020 sangat fluktuatif dengan nilai 48,02 persen pada 2018 dan maksimum 79,96 persen pada 2019 untuk selanjutnya kembali ke angka 48,11 persen pada

2020 dan naik menjadi 87,16 persen. Meskipun meningkat cukup banyak pada 2021, namun capaian yang diperoleh masih belum memenuhi target yang diharapkan.

Capaian untuk cakupan peserta KB aktif di Kota Salatiga terus menurun sejak 2017 sebanyak 112,67 persen hingga 2021 sebanyak 71,9 persen. Secara umum, cakupan peserta KB aktif tahun 2019-2021 tidak berbeda jauh. Demikian pula untuk angka pemakaian kontrasepsi/CPR yang terus menurun sejak 2018 (79,25%) menjadi 71,2 persen pada 2021 menunjukkan masih diperlukan upaya untuk mencapai keberhasilan terkait angka pemakaian kontrasepsi. Indikator-indikator yang belum tercapai tersebut banyak berkaitan dengan penggunaan kontrasepsi dan keterlibatan PLKB yang masih belum optimal. Demikian pula untuk cakupan perkawinan di bawah usia 21 tahun terus menurun dari 30,91 persen pada tahun 2017 hingga hanya 0,67 persen pada 2020 menunjukkan pola yang menggembirakan dan upaya untuk menurunkan pernikahan di bawah usia 21 tahun perlu terus dilakukan.

8. Urusan Perhubungan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan kewenangan urusan perhubungan untuk kabupaten dan kota adalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian. Untuk meningkatkan mobilitas atau gerak barang, manusia, dan informasi dibutuhkan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai guna memperpendek waktu untuk menempuh jarak antar suatu daerah dengan daerah lainnya. Sarana dan prasarana tersebut harus memadai demi mencapai tujuan akhir yaitu efisiensi ekonomi. Perhubungan tidak hanya dilakukan dalam satu wilayah di suatu daerah saja, tetapi juga antar daerah, antar pulau dan antar negara. Terdapat tiga macam perhubungan, yaitu perhubungan darat, perhubungan laut dan perhubungan udara. Kota Salatiga sebagai wilayah yang tidak memiliki jalur pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian, maka kewenangan urusan perhubungan yang dijalankan hanya pada Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Urusan perhubungan di Kota Salatiga dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Salatiga. Hal ini tertuang dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Salatiga yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam upaya mencapai tujuan perencanaan pembangunan yang ditetapkan urusan perhubungan menggunakan target kinerja tersedianya sarana penunjang berupa rambu-rambu lalu lintas, kendaraan yang laik jalan, jumlah kawasan yang belum terlayani angkutan umum dan kualitas jalan. Dalam usaha untuk mendukung transportasi massa yang nyaman dan aman di Kota Salatiga, maka selalu diupayakan peningkatan kendaraan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, peningkatan kawasan yang terlayani angkutan umum dan peningkatan pelayanan di terminal baik dari aksesibilitas naik turunnya penumpang

maupun ruang tunggunya, integrasi antar terminal dan angkutan penghubung lainnya. Oleh karena itu sarana angkutan umum di Kota Salatiga setiap tahunnya terus meningkat, dimana persentase capaian untuk tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota mencapai 95,44 persen. Sementara itu untuk capaian fasilitas, prasarana dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik mencapai 99,97 persen.

Saat ini, ketersediaan angkutan yang melayani wilayah Kota Salatiga sudah mencapai 81,82 persen. Unit kendaraan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota sebanyak 421 unit. Dalam rangka mendukung kelancaran transportasi jumlah kendaraan umum yang layak jalan dan lolos uji KIR selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, hal tersebut didukung dengan data dimana pada tahun 2021 sebanyak 83,55 persen dari kendaraan umum yang diuji telah dinyatakan laik jalan. Kota Salatiga merupakan kota transit karena menjadi perlintasan arus lalu lintas dan menjadi jalur utama Kota Semarang-Solo sehingga Kota Salatiga mempunyai arus lalu lintas cukup padat. Untuk memudahkan mobilitas penduduk antar daerah, Pemerintah Pusat menyediakan satu terminal angkutan umum kelas A (Terminal Tingkir), dan guna mendukung terminal utama, Pemerintah Kota Salatiga juga menyediakan satu terminal angkutan umum kelas C, serta didukung dengan sub terminal yang menghubungkan wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan di Kota Salatiga. Rencana untuk mendukung pergerakan arus lalu lintas akan dibangun terminal angkutan umum baru tipe C di Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo yang menghubungkan jalur Kopeng (Kabupaten Semarang) dengan Kota Salatiga. Sementara itu pelayanan pergerakan antar daerah di Kota Salatiga dilayani beberapa armada Antar Kota Antar Propinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan kendaraan umum berupa angkutan kota dan angkutan perdesaan. Pada akhir 2021 hanya tinggal 27,5 persen wilayah yang belum terjangkau transportasi umum dari 88 persen pada tahun 2017. Meningkatnya jumlah angkutan umum yang beroperasi di Kota Salatiga perlu didukung dengan peningkatan pelayanan di terminal baik dari aksesibilitas naik turunnya penumpang maupun ruang tunggunya, integrasi antar terminal dan angkutan penghubung lainnya.

Dari aspek kejadian pelanggaran, kasus pelanggaran lalu lintas di Kota Salatiga mengalami penurunan dimana pada tahun 2016 tercatat sebanyak 227 kasus dan telah diupayakan penekanan kasus pada 2021. Secara umum perbaikan pada indikator kinerja urusan perhubungan yang positif menjadi salah satu indikator bahwa program kerja yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan hasil baik. Pada 5 indikator kinerja dinas selama 5 tahun terakhir menunjukkan rasio diatas 90%. Hanya pada indikator penurunan jumlah angka pelanggaran lalu lintas saja yang tidak dapat disajikan data secara kuantitatif, hal ini terjadi karena tupoksi dinas yang tidak sampai pada kegiatan pengumpulan data tentang jumlah pelanggaran lalu

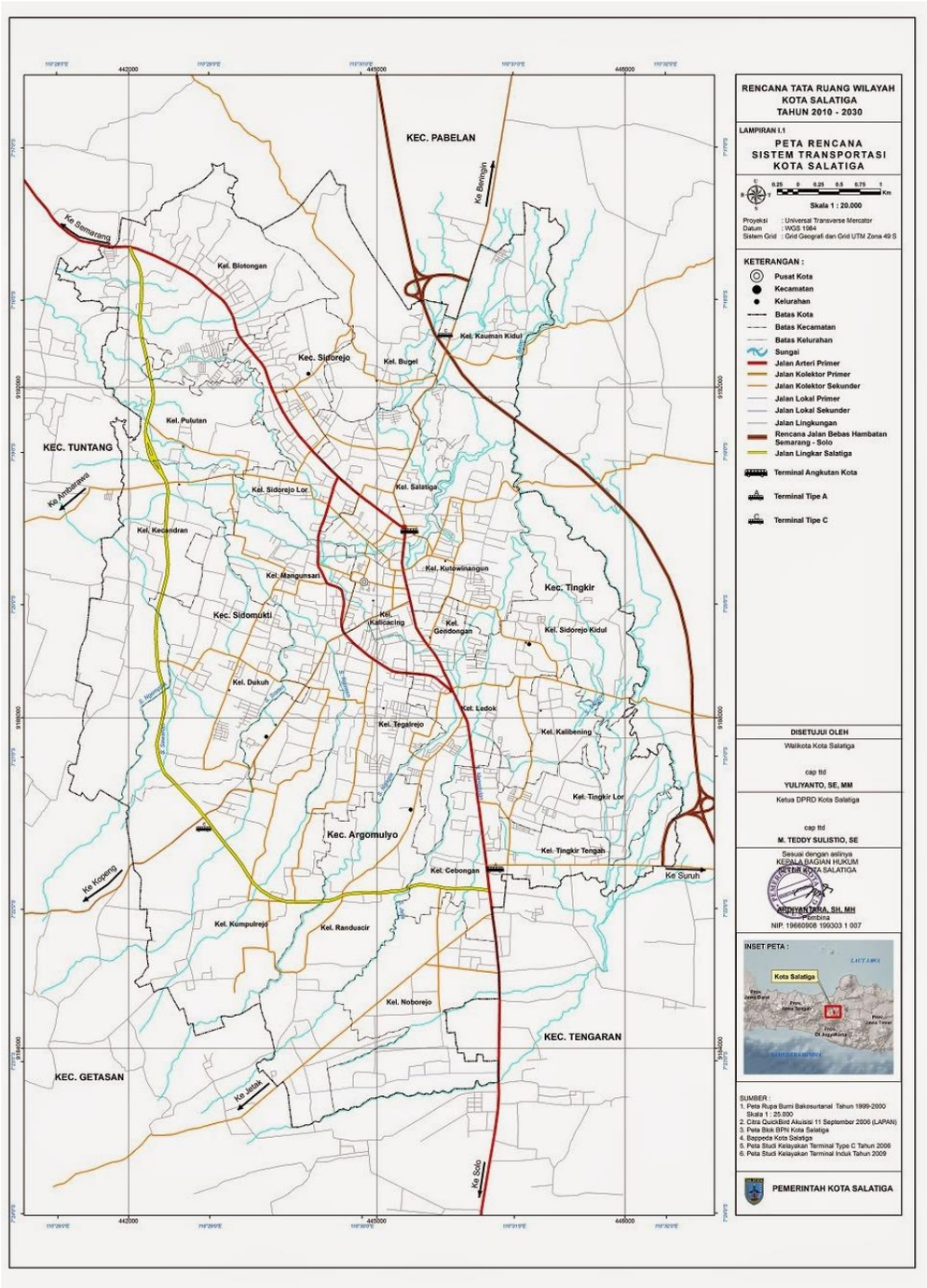
lintas. Secara lebih detail untuk capaian kinerja urusan perhubungan Kota Salatiga terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 36 Kinerja Urusan Perhubungan Kota Salatiga

Tahun 2017-2021

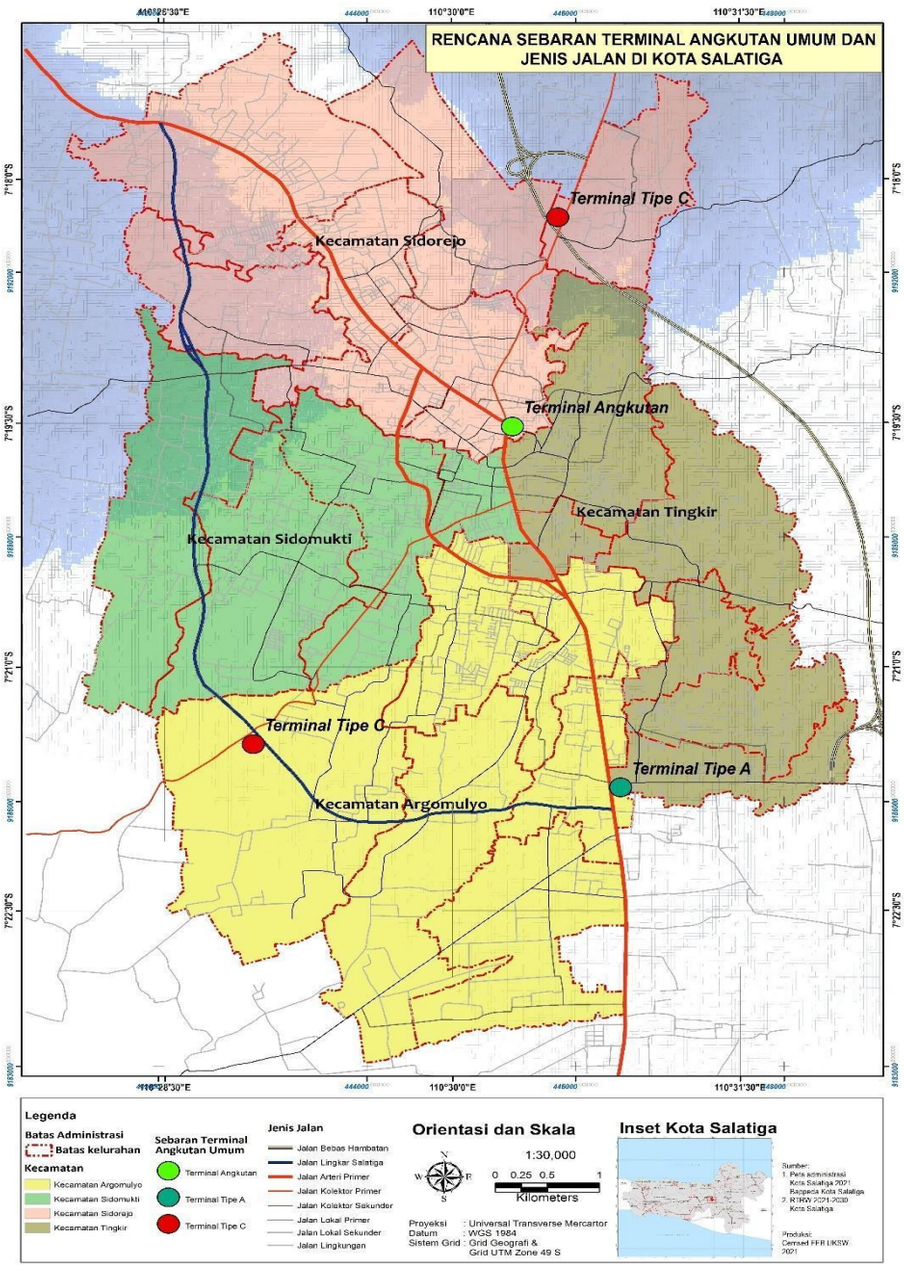
No	Indikator		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Tersediany a fasilitas perlengkap an jalan (rambu, marka dan Guardrill) dan peneranga n jalan umum (PJU) pada jalan Kota	Target	Buah	77,22	81,78	86,33	90,89	90,89
		Realisa si Capaia n	%	77,55	81,48	91,50	91,50	95,44
		Rasio	%	100,43	99,63	105,99	100,67	105,01
2	Presentase Kendaraan angkutan umum yang memenuhi persyarata n teknis laik jalan	Target	Buah	98,49	98,56	98,63	98,7	98,7
		Realisa si Capaia n	%	91,00	98,63	98,90	98,90	99,00
		Rasio	%	92,40	100,07	100,27	100,20	100,30
3	Jumlah Kawasan yang belum terlayani angkutan umum	Target	%	88	88	88	88	88
		Realisa si Capaia n	%	91,00	98,63	98,90	98,90	99,00
		Rasio	%	100,00	103,41	94,32	31,82	31,82
4	Jumlah kasus pelanggara n lalu lintas	Target	Kasus	Menuru n	Menuru n	Menuru n	Menuru n	Menuru n
		Realisa si Capaia n	%	Menuru n	Menuru n	Menuru n	Menuru n	Menuru n
		Rasio	%	tad	tad	tad	tad	tad
5	Kendaraan layak jalan melalui uji KIR	Target	Kendaraa n	87,47	82,15	90,93	90,19	89,79
		Realisa si Capaia n	%	87,00	124,33	96,77	96,77	81,54
		Rasio	%	99,46	151,35	106,42	107,30	90,81

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Salatiga 2017-2021



Sumber: Peta RTRW Kota Salatiga 2010-2030

Gambar 2. 50 Peta Rencana Sistem Transportasi Kota Salatiga



Sumber: Peta RTRW Kota Salatiga 2010-2030

Gambar 2. 51 Jenis Jalan dan Rencana Pengembangan Terminal Angkutan Umum di Kota Salatiga

9. Urusan Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Salatiga tahun 2017-2022, urusan Komunikasi dan Informatika difokuskan pada:

a) Pelayanan komunikasi dan informasi
b) Pelayanan *e-government*

Sepanjang tahun 2017-2021, Diskominfo Kota Salatiga telah mampu meningkatkan ketersediaan informasi publik dengan pesat. Ketersediaan media informasi publik meningkat 78 persen sepanjang kurun waktu 2017-2021 (Tabel 2.37). Salah satu media informasi publik adalah radio. Terdapat tujuh (7) stasiun radio di Kota Salatiga pada akhir tahun 2020 (BPS, 2021). Selain itu, terdapat juga website resmi Kota Salatiga (www.salatiga.go.id).

Tabel 2. 37 Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No.	Indikator		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat ketersediaan informasi publik	Target	%	15	50	70	80	90
		Realisasi Capaian	%	16	86	90	93	94
		Rasio	%	100	172	129	116	104
2	Tingkat pengembangan layanan E-Goverment dan Smart City	Target	%	26	53	72	82	91
		Realisasi Capaian	%	26	60	78	83	85
		Rasio	%	100	113	108	101	94

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2021

Realisasi layanan informasi e-government dan smart city meningkat sebanyak 59 persen dalam kurun waktu 2017-2021. Layanan ini didukung dengan tersedianya website Kota Salatiga, infratruktur dasar untuk data center, disaster recovery center dan TIK Pemerintah Kota, serta ekosistem TIK Smart City. Akan tetapi, masih ada hal yang perlu ditingkatkan ke depannya. Kinerja dan capaian selama kurun waktu lima tahun tersebut belum mampu mendongkrak indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Salatiga saat ini yaitu 2,34 (dari nilai maksimal 5). Rendahnya nilai ini mencerminkan belum optimalnya penyelenggaraan informasi publik dan pelaksanaan e-government.

10. Urusan Koperasi dan UKM

Dalam periode waktu 2017-2019 jumlah koperasi aktif di Salatiga secara umum mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2017 persentase jumlah koperasi aktif adalah sebesar 66,5 persen dan meningkat menjadi 84,45 persen di tahun 2019 dengan rasio capaian 98,99 persen. Namun pada tahun 2020 persentase jumlah koperasi aktif mengalami penurunan menjadi sebesar 53,59 persen dengan rasio capaian hanya 63,05 persen, yang diduga sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19. Seiring dengan membaiknya perekonomian pasca pandemi Covid-19, jumlah persentase koperasi yang aktif mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi sebesar 70 persen (82,35 persen dari target).

Jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam di Kota Salatiga terus mengalami peningkatan pada kurun waktu 2018-2021. Pada tahun 2018 persentase jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam adalah sebesar 10 persen dan meningkat menjadi 31,58 persen di tahun 2021. Dari jumlah tersebut sebesar 6,14 persen merupakan koperasi dengan kategori sehat (76,18 persen dari target). Koperasi dengan izin usaha simpan pinjam yang masuk dalam kategori sehat secara umum juga mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 sebesar 6,01 persen menjadi 6,14 di tahun 2021.

Selain Koperasi, Usaha Mikro di Kota Salatiga juga mengalami perkembangan yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan nilai omzet usaha mikro pada periode waktu 2017-2021. Pada tahun 2017 nilai omzet usaha mikro adalah sebesar Rp 598.650 juta dan meningkat menjadi Rp 689.300 di tahun 2018. Namun terjadi penurunan di tahun 2019 menjadi Rp 204.852 juta yang kemudian berangsur-angsur naik hingga di 2021 yang mencapai Rp 401.760 juta. Peningkatan usaha dari pelaku usaha mikro ini tentu saja tidak terlepas dari perbaikan kondisi ekonomi dan pembinaan yang dilakukan terhadap pelaku usaha mikro.

Tercatat persentase jumlah pelaku usaha mikro yang dibina oleh Dinas Koperasi Kota Salatiga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah pelaku usaha mikro yang dibina adalah sebesar 40,01 persen dan meningkat menjadi 79,11 persen di tahun 2021. Selain faktor pembinaan, faktor promosi juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemajuan usaha. Kegiatan promosi masih sangat kurang, hal ini ditunjukkan oleh masih rendahnya persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk. Tercatat hanya sebesar 0,53 persen UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk di tahun 2021 (9,04 persen dari target). Perkembangan capaian kinerja Urusan Koperasi dan UKM dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 38 Kinerja Koperasi dan UKM Kota Salatiga Tahun 2017-2021

NO	Indikator Kinerja		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	Target	%	3,10	3,86	4,82	5,86	5,86
		Realisasi Capaian	%	3,01	3,53	4,00	0,59	0,53
		Rasio	%	97,10	91,45	82,99	10,07	9,04
2	Persentase usaha mikro dan kecil yang dibina	Target	%	43,54	47,91	52,68	57,95	63,77
		Realisasi Capaian	%	40,01	42,08	48,88	60,00	79,11
		Rasio	%	91,89	87,83	92,79	103,54	124,06
3	Persentase koperasi aktif	Target	%	85,00	85,00	85,31	85,00	85,00
		Realisasi Capaian	%	66,50	66,51	84,45	53,59	70,00
		Rasio	%	78,24	78,25	98,99	63,05	82,35
4	Persentase koperasi yang memiliki izin simpan pinjam	Target	%	0,00	9,48	11,85	23,7	18,96
		Realisasi Capaian	%	10,00	10,00	15,00	28,57	31,58
		Rasio	%	0,00	105,49	126,58	120,55	166,56
5		Target	%	5,69	6,16	7,11	8,53	8,06

NO	Indikator Kinerja		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
	Persentase KSP/USP koperasi sehat	Realisasi Capaian	%	6,01	7,69	7,80	7,14	6,14
		Rasio	%	105,62	124,84	109,70	83,70	76,18
6	Nilai Omzet Usaha Mikro	Target	juta	148.398	149.882	151.381	152.895	154.424
		Realisasi Capaian	juta	598.650	689.300	204.852	233.234	401.760
		Rasio	%	403,41	459,90	135,32	152,55	260,17
7	Jumlah perda Koperasi	Target	naskah	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Realisasi Capaian	naskah	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
		Rasio	%	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga, 2022

11. Urusan Penanaman Modal

Pemerintah Kota Salatiga memiliki wewenang untuk melakukan aktivitas penanaman modal dengan mengikuti peraturan yang berlaku. Adapun wewenang tersebut adalah: (1) merumuskan kebijakan untuk mengembangkan penanaman modal, (2) melakukan koordinasi dalam rangka kegiatan penanaman modal, (3) menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam penanaman modal, (4) mempromosikan kegiatan penanaman modal dan melakukan kerjasama penanaman modal, (5) mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis untuk mengendalikan pelaksanaan penanaman modal di kabupaten/kota serta (6) melaksanakan kegiatan pelayanan penanaman modal, yaitu memberikan izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Selama periode 2017-2021, upaya promosi penanaman modal di Kota Salatiga oleh Pemerintah Kota Salatiga belum membuahkan hasil. Pada tahun 2017 terdapat 189 investor berskala nasional, baik itu investasi dari dalam negeri (PMDN) maupun dari luar negeri (PMA). Jumlah tersebut sempat naik pada tahun 2019 sebesar 240 investor, setelah sempat turun pada tahun 2018. Namun, pandemi covid-19 kembali mengurangi jumlah tersebut baik pada tahun 2020 maupun 2021 hingga pada akhirnya menjadi 149 investor atau berarti terjadi penurunan jumlah investor rata-rata 5,77 persen per tahun selama periode tersebut.

Dari sisi nilai investasi, pandemi covid-19 menyebabkan PMDN rata-rata turun 86,77 persen per tahun dari Rp299.056 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp 70 miliar pada tahun 2021. Namun pandemi Covid-19 ternyata tidak berdampak negatif terhadap PMA. PMA senilai Rp 71 miliar pada tahun 2018 rata-rata meningkat 1.823,82 persen per tahun hingga menjadi Rp 505.534 triliun pada tahun 2021. Secara keseluruhan total investasi (PMDN dan PMA) rata-rata meningkat 42,47 persen per tahun selama periode 2018 hingga 2021.

Capaian indikator penanaman modal di Kota Salatiga selama kurun waktu 2017–2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 39 Kinerja Urusan Penanaman Modal Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator	Capaian	Satuan	Kondisi Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Target	Investor	137	145	153	161	169
		Realisasi	Investor	189	155	240	182	149
		Rasio	%	137,96	106,90	156,86	113,04	88,17
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA	Target	Milyar	255,249	265,749	276,749	288,749	301,249
		Realisasi	Milyar	tad	71	970183	333121	505533,9625
		Rasio	%	0,00	0,03	350,56	115,37	167,81
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN	Target	Milyar	155,178	156,878	158,678	160,678	163,378
		Realisasi	Milyar	229,056	174,756	654,454	183,334	70,176
		Rasio	%	147,61	111,40	412,44	114,10	0,04
4	Jumlah dan jenis pelayanan perijinan dan nonperijinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang penanaman modal; Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Ijin prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Ijin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda DAftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih di 1 (satu) kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota	Target	%	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67
		Realisasi	%	67	50	33	95,01	95,013
		Rasio	%	100,49	75,00	49,50	142,51	142,51
5	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	Target	%	75	75	75	75	75
		Realisasi	%	75	50	tad	tad	tad
		Rasio	%	100,00	66,67	0,00	0,00	0

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022

12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda memainkan peranan vital dalam pembangunan. Oleh karena itu kegiatan kepemudaan difokuskan pada upaya-upaya peningkatan partisipasi pemuda dalam peningkatan kapasistas diri, lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Sesuai yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kegiatan pelayanan kepemudaan yang telah dilaksanakan dikelompokkan dalam bidang yaitu kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan. Kegiatan pelayanan kepemudaan diatur di dalam pasal 11 dan 12 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan kebijakan dan mengatur pelaksanaan pelayanan kepemudaan. Sementara pelayanan dalam bidang keolahragaan diatur dalam pasal 13 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah. Dengan payung hukum undang-undang yang sama, terutama pada pasal 37, pemerintah daerah, dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan.

Bidang-bidang ini kemudian diperinci melalui kegiatan-kegiatan dalam bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda; peningkatan kapasitas; olah raga, seni dan budaya; pendidikan kewirausahaan; kepramukaan. Guna mewujudkan pemuda yang memiliki karaktersitik kreatif, inovatif serta jiwa kewirausahaan yang tinggi, kegiatan pembangunan kepemudaan dilakukan dengan cara mendorong serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan kepemudaan mulai dari level kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional sampai pada level internasional.

Kegiatan kepemudaan dalam bidang olah raga dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Undang-undang tersebut menggarisbawahi tugas pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan, mengkoordinasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan, serta memiliki stadarisasi bidang keolahragaan. Undang-undang tersebut menjamin masyarakat untuk mendapatkan hak mereka untuk melakukan kegiatan olah raga, memperoleh pelayanan terkait aktivitas keolahragaan, mengikuti jenis olah raga sesuai dengan minat dan bakat, meperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, termasuk di dalamnya pembinaan dan pengembangan keolahragaan, serta menjadi pelaku olah raga dan mengembangkan industri olah raga. Oleh karena itu, sejalan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan pelayanan kepemudaan guna meningkatkan prestasi pemuda, termasuk prestasi dalam bidang olah raga. Dengan melandaskan kegiatan pada payung hukum tersebut, Pemerintah Kota Salatiga melakukan fasilitasi keolahragaan yang meliputi pembentukan organisasi olah raga, pembangunan gelanggang/balai remaja dan gedung olah raga.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah Kota Salatiga juga melakukan tugasnya dalam pengawasan

terhadap penyelenggaraan Pendidikan kepramukaan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Dalam tingkat kota, kewenangan dan kegiatan terkait Kepramukaan telah diatur melalui Perwali Kota Salatiga Nomor 102 Tahun 2020.

Berdasarkan empat indikator terkait kepemudaan capaian kinerja Pemerintah Kota Salatiga dalam bidang layanan kepemudaan dapat dikatakan belum optimal karena dalam kurun waktu lima tahun (2017-2021), terdapat indikator dengan tingkat pencapaian dibawah target. Terutama pada tahun 2021, indikator cakupan peran serta pemuda dalam kegiatan kepemudaan dan indikator presentasi satuan pendidikan dan organisasi yang mendapatkan peningkatan tercatat nol, sementara target indikator yang pertama tercatat 1500 orang sementara target indikator yang kedua sebanyak 100 orang. Puncak pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 berpeluang menjadi salah satu faktor krusial yang mempengaruhi keadaan tersebut.

Dari tiga indikator terkait keolahragaan, pencapaian kinerja dalam bidang keolahragaan menunjukkan pencapaian yang cukup baik dimana dalam kurun waktu 2017-2021 terdapat sekitar 60 persen pencapaian yang memenuhi atau melebihi target. Peningkatan yang terjadi setiap tahun dalam kurun waktu 2017-2021 tercatat dalam indikator jumlah cabor olah raga berprestasi, walaupun pada tiga tahun pertama belum memenuhi target yang di tentukan. Dalam indikator presentasi lapangan olah raga yang representantif, presentasi pencapaian pada dua tahun pertama melampaui target dan diikuti dengan pencapaian sesuai terget pada dua tahun berikutnya.

Dalam pencapaian di bidang kepramukaan, capaian urusan Kepemudaan dan Olah Raga menunjukkan hasil yang cukup baik dimana selama kurun aktu 2017-2021, urusan Kepemudaan dan Olah Raga melampaui target pada tahun pertama dan memenuhi target pada tahun ke tiga, ke empat dan kelima. Walaupun pada tahun ke dua tidak memenuhi target pencapaian, namun jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya, jumlah gugus depan yang mengikuti kegiatan kepramukaan di Kota Salatiga tercatat meningkat sebesar 11,43 persen. Gambaran umum pencapaian kinerja urusan kepemudaan dan olah raga Kota Salatiga dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2. 40 Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga

No	Indikator		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pemuda yang mengikuti penguatan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan	Target	orang	40.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Realisasi Capaian	orang	60.00	60.00	100.00	100.00	82.00
		Rasio	%	150.00	60.00	100.00	100.00	82.00
2	Cakupan peran serta pemuda dalam kegiatan kepemudaan	Target	orang	1315.00	1315.00	1400.00	1450.00	1500.00
		Realisasi Capaian	orang	1032.00	1054.00	832.00	0.00	355.00
		Rasio	%	78.48	80.15	59.43	0.00	23.67
3		Target	%	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

No	Indikator		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
	Presentasi satuan pendidikan dan organisasi pemuda yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Realisasi Capaian	%	60.32	60.87	0.00	0.00	48.00
		Rasio	%	0	60.87	0	0.00	48.00
4	Jumlah pemuda yang terlatih dalam berwirausaha (pemuda binaan 200 orang)	Target	orang	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
		Realisasi Capaian	orang	35.00	35.00	40.00	43.00	60.00
		Rasio	%	87.50	87.50	100.00	107.50	150.00
5	Cakupan peningkatan kapasitas dan kompetensi keolahragaan	Target	orang	280.00	300.00	300.00	350.00	350.00
		Realisasi Capaian	orang	275.00	335.00	100.00	350.00	350.00
		Rasio	%	98.21	111.67	33.33	100.00	100.00
6	Jumlah cabor olahraga berprestasi	Target	cabor	32.00	39.00	39.00	39.00	39.00
		Realisasi Capaian	cabor	7.00	20.00	22.00	39.00	39.00
		Rasio	%	21.88	51.28	56.41	100.00	100.00
7	Presentasi lapangan olah raga yang representatif	Target	%	20.00	22.00	25.00	27.00	28.00
		Realisasi Capaian	%	25.00	25.00	25.00	27.00	25.00
		Rasio	%	125.00	113.64	100.00	100.00	89.29
8	Jumlah gugus depan yang mengikuti gerakan kepramukaan	Target	orang	60.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Realisasi Capaian	orang	70.00	78.00	100.00	100.00	100.00
		Rasio	%	116.67	78.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Salatiga, Tahun 2022

13. Urusan Statistik

Urusan Statistik Kota Salatiga dilandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika. Adapun tugas pokok pemerintah daerah dalam urusan statistik adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang statistik serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Sementara itu, fungsi pemerintah daerah dalam urusan statistik adalah: (1) melaksanakan kebijakan di bidang statistik; dan (2) membangun metadata statistik sektoral dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik.

Persentase ketersediaan data statistik dalam rentang 2017-2021 telah melebihi target tahunan yang ditetapkan. Persentase ketersediaan data statistik pada akhir tahun 2021 mencapai 92 persen. Nilai ini meningkat 33 persen dibandingkan tahun 2017 (Tabel 2.41). Capaian kinerja ini sudah sesuai target tapi perlu ditingkatkan menjadi 100%. Kendala utama saat ini adalah sebagian besar OPD belum mengintegrasikan data pada sistem DATAKU dan Dinas Kominfo belum

menyediakan data statistik terpadu. Akibatnya, kualitas data untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah masih rendah. Ke depannya, implementasi SATU DATA dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi isu strategis supaya data utama perencanaan pembangunan dapat disediakan dengan rutin dan optimal.

Tabel 2. 41 Kinerja Urusan Statistik Kota Salatiga

Tahun 2017-2021

No.	Indikator		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase tersediaan data statistik	Target	%	50	60	70	80	90
		Realisasi Capaian	%	59	72	75	81	92
		Rasio	%	118	135	108	101	101

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2021

14. Urusan Persandian

Saat ini tantangan terbesar bagi pemerintah Kota Salatiga adalah pengelolaan keamaan jaringan informasi. Kondisi kinerja pengelolaan keamanan jaringan informasi masih belum optimal. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Kota Salatiga yang masih di status "Tidak Layak". Meskipun sudah mengalami peningkatan selama kurun waktu 2017-2021, tetapi tingkat pengamanan informasi daerah baru mencapai 75,40% pada akhir tahun 2021 (Tabel 2.42). Ini menunjukkan bahwa masih ada banyak urusan persandian dan keamanan informasi yang harus dibenahi.

Tabel 2. 42 Kinerja Persandian Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No.	Indikator		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat pengamanan informasi daerah	Target	%	50	60	70	80	90
		Realisasi Capaian	%	48	57	61	78	75
		Rasio	%	96	95	87	98	83

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2021

15. Urusan Kebudayaan

Pelestarian cagar budaya merupakan aspek yang penting dalam pembangunan daerah dan telah diatur dalam undang-undang. Undang Undang Nomor 11 tahun 2010 menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal kepemilikan, penguasaan, pengalihan, pemberian kompensasi/insentif, pembentukan tim ahli cagar budaya, pendaftaran, penetapan, penghapusan, pengelolaan dan pemeliharaan cagar budaya pelestarian, pelindungan, penyelamatan, pengembangan, penelitian, revitalisasi, pemanfatan, perbanyakan benda cagar budaya. Dengan kata lain, pemerintah daerah dilindungi undang-undang untuk melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu dalam upaya pelestarian cagar budaya. Pelestarian cagar budaya dilakukan dengan tujuan

memelihara warisan budaya bangsa yang mengangkat martabat dan memperkuat kepribadian bangsa, sekaligus mempromosikan warisan budaya tersebut yang pada akhirnya juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kota Salatiga mengupayakan pemeliharaan kekayaan budaya yang dimiliki. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Salatiga adalah dengan melakukan pelestarian cagar budaya dengan cara memanfaatkan, mengembangkan dan melindungi cagar budaya berwujud maupun tak berwujud, termasuk didalamnya situs dan kesenian. Upaya pelestarian cagar budaya ini diperkuat dengan diterbitkannya Perda Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah.

Dengan payung hukum Perda Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pelestarian Kesenian Daerah Kota Salatiga, upaya pelestarian kesenian daerah juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga melalui penyelenggaraan festival seni dan budaya, misi kesenian, sarana penyelenggaraan seni dan budaya, grup kesenian, kajian seni, fasilitasi seni dan pengorganisasian seni di Kota Salatiga.

Secara umum capaian kinerja urusan kebudayaan di Kota Salatiga dapat dikatakan sangat baik berdasarkan data yang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2017-2021, pencapaian kinerja pada setiap indikator di masing-masing tahunnya melebihi target yang telah ditentukan. Peningkatan signifikan terlihat jelas pada indikator penyelenggaran festival seni dan budaya dan indikator jumlah benda, situs, dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Rasio pencapaian kinerja pada dua indikator ini mencapai diatas 200 persen tiap tahunnya. Sementara pada indikator cakupan cagar budaya yang dilestarikan, pencapaian kinerja di setiap tahunnya mencapai 100 persen ke atas. Mengacu pada bangunan bersejarah di Kota Salatiga, pelestarian benda cagar budaya di wilayah Kota Salatiga masih dapat ditingkatkan guna menjaga kondisi bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah tersebut. Penyelenggaraan festival seni dan budaya pasca pandemi Covid-19 berpeluang untuk ditingkatkan kembali melalui kolaborasi yang lebih kuat dengan pemangku kepentingan terkait, seperti institusi pendidikan tinggi dan komunitas seni dan budaya. Capaian kinerja urusan kebudayaan di Kota Salatiga dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 2. 43 Kinerja Pembangunan Urusan Kebudayaan Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Target	Situs/ benda	2	2	2	3	3
		Realisasi Capaian	Situs/ benda	9	8	20	16	20
		Rasio	%	450.00	400.00	1000.00	533.33	666.67

No	Indikator		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
2	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Target	Festival	16	17	18	19	19
		Realisasi Capaian	Festival	48	72	57	54	42
		Rasio	%	300.00	423.53	316.67	284.21	221.05
3	Cakupan cagar budaya yang dilestarikan	Target	%	9.4	10.2	10.2	10.2	10.2
		Realisasi Capaian	%	9.4	12.06	14.18	11.35	14.18
		Rasio	%	100.00	118.24	139.02	111.27	139.02

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2021

Kualitas kinerja yang telah tercapai tetap menjadi prioritas perencanaan pembangunan berikutnya karena masih adanya beberapa hambatan dalam proses pencapaian kinerja tersebut. Terbatasnya inovasi dan kreasi SDM dalam mengelola seni budaya, terbatasnya SDM pengelola dan pengkaji Cagar Budaya, belum optimalnya pendaftaran dan pengkajian cagar budaya dan Komitmen pemerintah dalam pelestarian cagar budaya, menjadi beberapa hal yang menjadi penghambat pencapaian kinerja urusan kebudayaan.

Peningkatan pembinaan seni, sejarah dan budaya tetap dijadikan Isu Strategis untuk memantapkan apresiasi pada seni, sejarah dan karya budaya serta melestarikan warisan budaya kota Salatiga.

16. Urusan Perpustakaan

Kinerja urusan perpustakaan ditunjukkan dengan dua (2) indikator kinerja, yaitu Persentase Pustakawan yang Bersertifikat dan Persentase Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan. Data kinerja tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa realisasi capaian persentase pustakawan yang berserfikat mencapai 100% setiap tahun dalam 4 (empat) tahun pertama periode tersebut (2017-2020), namun demikian capaian ini mengalami penurunan pada tahun 2021, yaitu hanya sebesar 71,43%.

Namun demikian, kinerja dalam aspek lain, yaitu persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan, mengalami perkembangan yang baik. Pengukuran kinerja ini dimulai pada tahun 2018 dengan capaian 73,03% dan 75% pada tahun 2018 dan 2019. Pada dua(2) tahun berikutnya terjadi kenaikan yang sangat signifikan, yaitu 425,48% pada tahun 2020 dan 476% pada tahun 2021. Lonjakan kenaikan ini memberikan indikasi yang sangat baik terkait dengan ketersediaan koleksi buku yang ada di perpustakaan yang ada Kota Salatiga. Gambaran lengkap kinerja urusan perpustakaan ditunjukkan dalam Tabel 2.44.

Tabel 2. 44 Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2017-2021

No	Indikator		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase pustakawan yang bersertifikat	Target	%	25	25	25	50	75
		Capaian	%	100	100	100	100	71.43
		Realisasi	%	400	400	400	200	95
2	Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan	Target	%	60	89	89	89	90
		Capaian	%	0	73.03	75	425.48	476
		Realisasi	%	0	82	84	478	529

*Sumber : *) Data Hasil LkjIP Dinpersip Tahun 2017-2021*

Kenaikan kinerja terkait dengan penambahan koleksi ini tidak lepas dari upaya peningkatan pengembangan budaya baca di Kota Salatiga. Dalam 5 (lima) tahun terakhir jumlah koleksi buku mengalami peningkatan yang besar; dari 45.485 buku pada tahun 2017 menjadi 61.016 buku pada tahun 2021. Kenaikan jumlah perpustakaan ini diikuti dengan jumlah anggota dari sejumlah 31.057 anggota pada tahun 2017 menjadi 38.764 pada tahun 2021. Namun demikian, hal ini tidak diikuti dengan naiknya tingkat kunjungan. Data menunjukkan terjadinya penurunan kunjungan yang sangat signifikan, khususnya yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini tidak lepas dari terjadinya pandemi COVID-19 yang berdampak pada menurunnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Gambaran lengkap terkait dengan jumlah koleksi buku, anggota dan pengunjung tampak dalam Tabel 2.45

Tabel 2. 45 Jumlah Pengunjung, Anggota dan Jumlah Koleksi Perpustakaan Umum Kota Salatiga, 2017-2021

Tahun	Pengunjung	Anggota	Koleksi Buku	Koleksi Non Buku
2017	386.829	31.057	45.485	681
2018	381.050	34.178	53.276	681
2019	384.225	37.705	56.029	686
2020	75.098	38.276	60.643	686
2021	35.870	38.764	61.016	686

Sumber: Salatiga Dalam Angka, 2021

Pada periode perencanaan pembangunan berikutnya Tata kelola perpustakaan dan minat baca masyarakat menjadi isu strategis yang perlu diutamakan. Program-program yang dilaksanakan fokus pada peningkatan pemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat, peningkatan Kompetensi SDM perpustakaan, peningkatan bahan perpustakaan yang up to date, dan peningkatan jejaring kemitraan perpustakaan baik negeri maupun swasta.

17. Urusan Kearsipan

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, Pemerintahan Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 pasal 1). Sistem pengelolaan arsip yang dilakukan Kota Salatiga dalam rangka perlindungan dan penyelamatan arsip ditunjukkan dengan banyaknya arsip statis yang diselamatkan. Indikator kinerja yang masih rendah pada kearsipan adalah dalam hal penggunaan arsip oleh masyarakat yang sebelum 2020 kurang dari 80%. Hal ini terjadi karena jenis arsip yang tersedia belum dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu pada era digitalisasi penggunaan media elektronik menjadi lebih dominan dibandingkan media cetak, sehingga masyarakat lebih tertarik untuk menggunakan dan mengakses arsip menggunakan media elektronik. Untuk mencapai kinerja yang baik perlu ada upaya penyediaan kearsipan yang mudah diakses oleh masyarakat, misalnya degan menggunakan web. Sedangkan untuk indikator kinerja yang lain sudah baik. Secara keseluruhan capaian kinerja urusan kearsipan tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 46 Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2017-2021

No	Indikator		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah masyarakat pengguna arsip statis	Target	**Orang**	50	60	65	70	75
		Realisasi Capaian	Orang	39	20	25	0	75
		Rasio	%	78	33,33	38,46	0	100
2	Persentase arsiparis yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi kearsipan	Target	%	0	0	40	80	100
		Realisasi Capaian	%	20	20	100	100	14,29
		Rasio	%	0	0	250	125	14,29
3	Jumlah Arsiparis Terampil	Target	Orang	3	4	4	4	5
		Realisasi Capaian	Orang	5	5	5	6	6
		Rasio	%	166,67	125	125	150	120
4	Jumlah arsip statis yang di selamatkan	Target	boks	90	95	100	110	115
		Realisasi Capaian	boks	90	95	95	90	116
		Rasio	%	100	100	95	81,82	100,87
5	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip)	Target	%	10	20	40	60	80
		Realisasi Capaian	%	20	60	100	100	84,93
		Rasio	%	200	300	250	166,67	106,16
6	Jumlah arsip statis yang di akses, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat	Target	boks	15	20	25	30	35
		Realisasi Capaian	boks	15	20	20	0	115
		Rasio	%	100	100	80	0	328,57

Sumber: Dinpersip, 2022

Permasalahan dalam pengelolaan arsip saat ini yang paling utama yaitu kebutuhan arsiparis yang sudah memiliki sertifikasi kompetensi kearsipan. Selain itu tantangan berikutnya adalah bagaiman mampu menerapkan manajemen arsip secara lebih baik efektif (e-arsip).

Belum tercapainya indikator kinerja urusan kearsipan dikarenakan adanya pergantian/perubahan petugas kearsipan dan masih kurangnya perhatian kepala perangkat daerah dalam pengelolaan arsip serta rendahnya perhatian masyarakat terhadap arsip statis, baik dalam penggunaan maupun pemanfaatan. Selain itu keterbatasan SDM yang kompeten di bidang teknologi informasi dan keterbatasan ketersediaan sarana prasarana pendukung kearsipan juga menjadi penghambat tercapainya indikator kinerja program urusan kearsipan.

Dengan demikian, penyelenggaraan kearsipan dan digitalisasi kearsipan menjadi isu strategis yang akan diangkat untuk mengukur kinerja urusan kearsipan pemerintah daerah Kota Salatiga dengan memfokuskan pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan kualitas SDM dan Sarana Prasarana penunjang pelayanan kearsipan, pemanfaatan teknologi infomasi dalam menunjang kinerja urusan kearsipan.

2.4.3.Fokus Pelayanan Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan Renstra Dinas Pertanian Kota Salatiga Tahun 2017-2021, urusan kelautan dan perikanan difokuskan pada peningkatan produksi perikanan budidaya air tawar (perikanan budidaya). Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga yang menanggungjawabi urusan kelautan dan perikanan telah mengupayakan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya. Produksi perikanan budidaya dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami peningkatan >90% (Tabel 2.47). Akan tetapi, peningkatan ini masih jauh dari target RPJMD 2017-2021 dimana Dinas Pertanian menargetkan akan mencapai produksi 1223 ton pada akhir 2021. Realisasi produksi pada akhir tahun 2021 hanya 55% dibandingkan rencana di awal. Tidak tercapainya target produksi tahunan ini terjadi selama lima tahun berturut-turut. Hal ini mencerminkan kinerja urusan kelautan dan perikanan yang masih rendah dan sangat perlu dibenahi.

Tabel 2. 47 Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No.	Indikator		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Produksi perikanan budidaya	Target	ton	608	810	1,060	1,112	1,223
		Realisasi Capaian	ton	447	687	861	692	677
		Rasio	%	73	84	81	62	55

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga, 2021

Perikanan air tawar utama Kota Salatiga adalah ikan lele, nila, mujaer dan gurame. Jenis ikan yang dibudidayakan umumnya adalah lele. Hal ini terlihat dari luas, produksi, dan jumlah petaninya yang jauh lebih tinggi daripada ikan nila (Tabel 2.48). Luas kolam budidaya tertinggi ada di Kecamatan Sidorejo

Tabel 2. 48 Luas, produksi, dan jumlah petani ikan di Kota Salatiga Tahun 2021

Lokasi	Luas kolam nila (m^2)	Produksi ikan nila (kg)	Luas kolam lele (m^2)	Produksi ikan lele (kg)	Jumlah petani nila	Jumlah petani lele
Kecamatan Argomulyo	210	-	2.018	26.812	5	214
Kecamatan Tingkir	3.195	15.737	5.195	133.602	60	176
Kecamatan Sidomukti	-	-	4.079	53.801	10	133
Kecamatan Sidorejo	959	6.989	17.208	475.568	23	276

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga, 2021

2. Urusan Pariwisata

Urusan pariwisata diatur dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 11, dinyatakan bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 12, urusan pariwisata masuk dalam urusan pemerintahan pilihan. Dari payung hukum ini, penyelenggaraan Urusan Pariwisata mengacu pada Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Sesuai dengan pasal 5 UU Nomor 9 Tahun 2009, kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip yang menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal. Masih mengacu pada pasal yang sama, pelaksanaan Urusan Pariwisata ditujukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dimana masyarakat ikut terlibat aktif dalam pembangunan pariwisata dengan terus menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Pelaksanaan Urusan Pariwisata mengedepankan keselarasan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah.

Pelaksanaan urusan pariwisata di tingkat Kota Salatiga dilaksanakan dalam koridor RIPPARDA Kota Salatiga dengan tetap menyelaraskan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027. Kinerja yang dilakukan mengacu pada capaian indikator Urusan Pariwisata yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama yang berfokus pada jumlah kunjungan wisata, jumlah obyek

wisata unggulan dan jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengembangan pariwisata.

Capaian kinerja Urusan Pariwisata dalam periode 2017-2021 terdapat pencapaian dua indikator yang melampaui target yang telah ditetapkan. Jumlah Obyek wisata unggulan naik secara signifikan pada tahun 2020 dan 2021 dimana Pemerintah Kota Salatiga menggalakkan penguatan destinasi-destinasi pariwisata potensial di wilayah Kota Salatiga. Sementara, jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengembangan pariwisata telah memenuhi target dimana terdapat lima kelompok yang aktif berperan dalam pengembangan pariwisata di Kota Salatiga. Hal yang perlu ditingkatkan adalah jumlah kunjungan wisatawan, dimana belum memenuhi target yang telah ditentukan dalam renstra sebelumnya. Jumlah kunjungan wisatawan sangat terdampak oleh pemberlakukan PPKM sebagai akibat dari penyebaran Covid-19 baik di dunia internasional maupun di dalam negara Indonesia. Gambaran umum capaian kinerja Urusan Pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 49 Kinerja Pariwisata di Kota Salatiga
Tahun 2017-2021

No	Indikator		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Kunjungan Wisata	Target	Jiwa	120,000	120,000	130,000	140,000	80,000
		Realisasi Capaian	Jiwa	154,580	304,054	441,860	89,423	183,210
		Rasio	%	128.82	253.38	339.89	63.87	229.01
2	Jumlah Obyek Wisata Unggulan	Target	buah	6	6	6	6	6
		Realisasi Capaian	buah	6	6	6	6	25
		Rasio	%	100	100	100	100	416.67
3	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat pengembangan Pariwisata	Target	Kelompok	3	4	5	4	5
		Realisasi Capaian	Kelompok	4	4	4	5	8
		Rasio	%	133.33	100.00	80.00	125.00	160.00

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2021

3. Urusan Pertanian

Berdasarkan Renstra Dinas Pertanian Kota Salatiga Tahun 2017-2021, urusan Pertanian difokuskan pada:

a) Peningkatan produktivitas tanaman pangan padi

b) Peningkatan produktivitas tanaman pangan jagung

c) Peningkatan produksi peternakan daging sapi potong

Dalam kurun waktu 2017-2021, produktivitas padi, jagung, dan daging sapi potong di Kota Salatiga berfluktuasi (Tabel 2.50). Ada kalanya produktivitas meningkat, adakalanya menurun. Terkadang kinerja urusan pertanian mencapai target RPJMD, di lain waktu tidak mencapai target RPJMD. Hal ini bisa dimaklumi karena produktivitas pertanian dan peternakan terkadang sangat tergantung pada

kondisi alam (terutama cuaca dan iklim). Di era perubahan iklim saat ini, hujan sering tidak menentu dan suhu lingkungan semakin naik. Hal ini dapat mengakibatkan stress pada tanaman dan ternak. Oleh karena itu, upaya peningkatan produktivitas dan pencapaian target kinerja pertanian di masa yang akan datang harus mengantisipasi berbagai faktor penghambat tersebut. Hal ini penting untuk mendukung ketahanan pangan Kota Salatiga.

Tabel 2. 50 Kinerja Pertanian Kota Salatiga

Tahun 2017–2021

No.	Indikator		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Produktivitas padi	Target	Ton/ha	5,8	6,4	6,5	6,5	6,6
		Realisasi Capaian	Ton/ha	6,1	6,2	5,7	5,7	6,5
		Rasio	%	105	97	88	86	96
2	Produktivitas jagung	Target	Ton/ha	5,1	5,1	5,2	5,2	5,3
		Realisasi Capaian	Ton/ha	7,6	4,8	4,3	4,4	5,8
		Rasio	%	150	94	84	84	110
3	Produktivitas daging sapi potong	Target	ton	1018	1018	1018	1018	1018
		Realisasi Capaian	ton	1036	1151	1224	950	1142
		Rasio	%	102	113	120	93	112

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga, 2021

Petani di Kota Salatiga juga mengembangkan beberapa komoditas hortikultura dan perkebunan. Jenis komoditas hortikultura yang banyak diusahakan adalah cabe, jahe, kunyit, anggrek, dan buah tahunan. Terdapat tiga jenis tanaman perkebunan yang ada di Kota Salatiga yaitu kelapa dalam, kopi robusta dan cengkeh (Tabel 2.51). Kelompok tani yang dibina mencapai 147 kelompok yang terbagi ke dalam kelompok pemula sebanyak 40, kelompok lanjut sebanyak 71 dan kelompok madya sebanyak 36. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga melakukan promosi produk pertanian unggulan Kota Salatiga melalui kegiatan ekspo Soropadan, Festival Hortikultura, pameran produksi hasil pertanian Kota Salatiga, serta kegiatan pasar *online* Petani Kota Salatiga. Di samping itu, kegiatan pertanian organik juga digalakkan dalam kelompok tani yang ada di Kota Salatiga.

Tabel 2. 51 Luas Dan Produksi Beberapa Komoditas Hortikultura Dan Perkebunan Di Tiap Kecamatan Kota Salatiga Tahun 2020

Komoditas	Satuan	Argomulyo	Tingkir	Sidomukti	Sidorejo
Hortikultura					
Luas panen cabe rawit	ha	6	-	5	2
Luas panen jahe	m^2	40.000	-	36.000	20.000
Luas panen kuyit	m^2	-	-	14.800	20.000
Luas panen anggrek	m^2	40	705	102	1030
Produksi cabe	ton	11,5	-	6,3	0,8

Komoditas	Satuan	Argomulyo	Tingkir	Sidomukti	Sidorejo
Produksi jahe	kg	84.000	-	14.760	52.000
Produksi kunyit	kg	-	-	37.000	12.000
Produksi anggrek	tangkai	360	4791	346	5075
Produksi pisang	ton	3150	380	630	126
Produksi papaya	ton	629	55	10	16
Produksi mangga	ton	9	12,6	19,8	14,6
Produksi durian	ton	78,00	24,1	44,6	26,8
Perkebunan					
Luas lahan kelapa	ha	83	29	33	54
Luas lahan kopi	ha	11	8	5	4
Luas lahan cengkeh	ha	24	5	12	5
Produksi kelapa	ton	27	12	16	23
Produksi kopi	ton	2	3	2	1
Produksi cengkeh	ton	2	1	1,5	0,8

Sumber : Salatiga dalam Angka (BPS, 2021)

Ternak yang umum dibudidayakan di Kota Salatiga adalah sapi, kambing, domba, ayam, itik, dan puyuh. Jumlah ternak yang dipelihara oleh penduduk cukup banyak, namun tidak diketahui luasan budidayanya (Tabel 2.52). Umumnya, peternakan di Kota Salatiga berskala kecil karena keterbatasan ruang. Kondisi ketersediaan ruang ini harus dipertimbangkan ketika merencanakan program pengembangan produksi dan produktivitas ternak serta penerapan teknologi peternakan. Selain penyediaan bibit unggul ternak dan pakan sehat, program kesehatan ternak juga menjadi program prioritas untuk peningkatan produksi ternak.

Kota Salatiga memiliki 1 unit RPH (Rumah Potong Hewan) yang saat ini sedang diusahakan untuk mencapai standar RPH Tipe B. Rumah potong hewan tipe B, yaitu rumah potong hewan yang telah mempunyai ruangan potong RPH seperti ruang pemotongan hewan/ternak ruminansia besar harus dipisahkan atau disendirikan dari ternak kecil, ruang pemotongan hewan/ternak non ruminansia (babi) dibuatkan tempat tersendiri, ruang istirahat ternak, ruang karantina ternak, ruang untuk ternak yang sakit, ruang pelayuan/*chilling,* ruang pemisahan daging-tulang (*deboning*), ruang pembersihan organ dalam (*alat viseral*), tempat pemeriksaan organ ternak, ruang *crematorium*, ruang administrasi, ruang laboratorium, ruang pembekuan dan penyimpanan, gudang, kamar mandi dan kamar kecil/WC, tempat parkir, ruang mesin dan lain-lain yang terkait, terdapat air bersih (air tanah atau air PAM) dan mempunyai ruang pendingin (*chilling room*) dan mempunyai armada pengangkutan daging dingin/beku (*refrigerator truck*). Produk pemotongan RPH tipe B ini dapat diedarkan antarpropinsi dalam satu negara. Pada umumnya jumlah ternak yang dipotong telah lebih dari 25 ekor sapi (ternak besar).

Tabel 2. 52 Produksi Ternak Utama Kota Salatiga Tahun 2018-2020

Ternak	Satuan	2018	2019	2020
Populasi sapi perah	ekor	3.546	3.590	3.640
Populasi sapi potong	ekor	1.328	1.340	1.345
Populasi kambing	ekor	3.288	3.300	3.350
Populasi domba	ekor	815	847	866
Populasi itik	ekor	3.525	3.528	3.518
Populasi burung puyuh	ekor	18.803	17.289	7.200
Populasi ayam ras	ekor	542.525	757.082	670.500
Populasi ayam kampung	ekor	88.215	88.216	86.612
Produk daging sapi	ton	1.151	1.224	950
Produk daging kambing	ton	52	49	29
Produk daging domba	ton	20	26	17
Produk daging ayam	ton	13.174	16.700	18.560
Produk telur itik	ton	26	25	25
Produk telur ayam	ton	250	226	166
Produk telur puyuh	ton	30	30	12
Produk susu	liter	4,5 juta	4,6 juta	4,6 juta

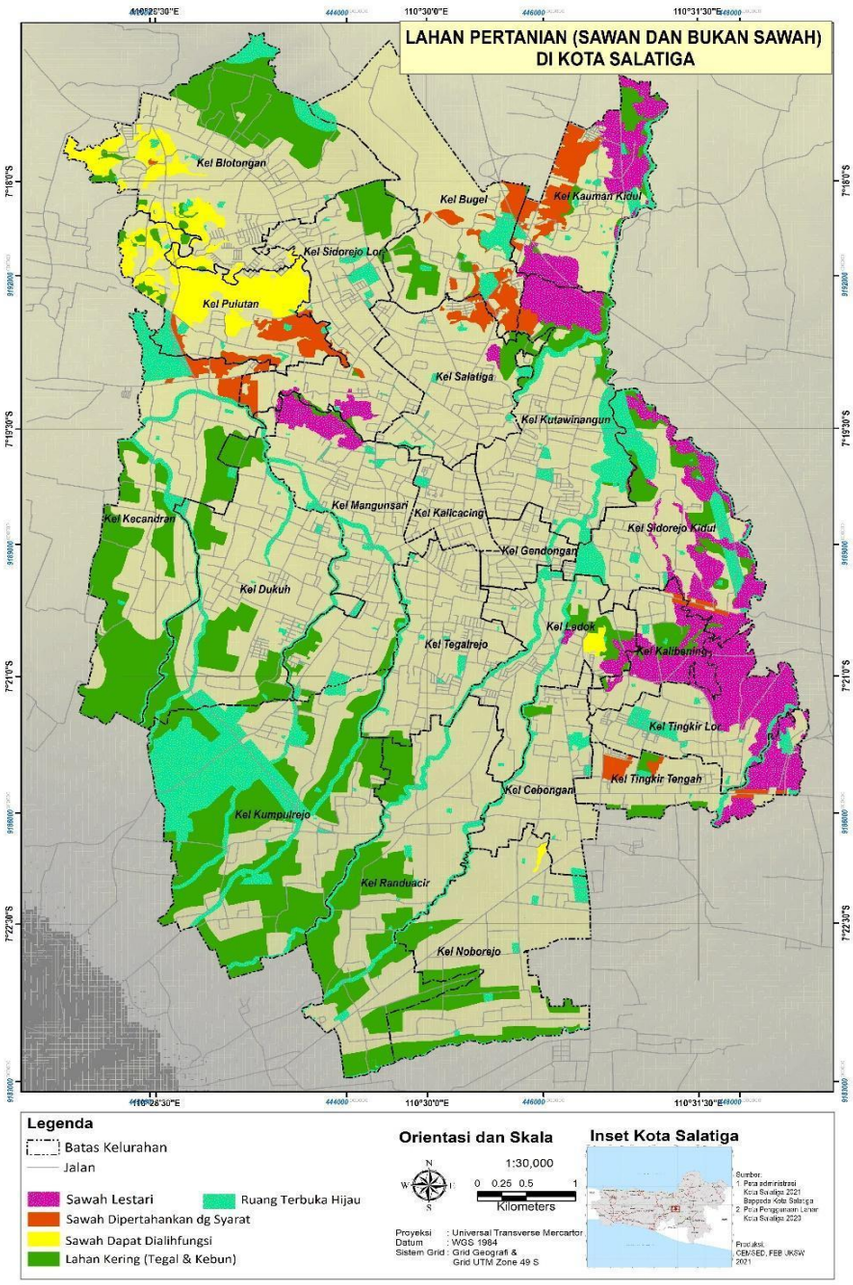
Sumber : Salatiga dalam Angka (BPS, 2021)

Penggunaan lahan di Kota Salatiga untuk lahan pertanian sebesar 11,11 persen persen untuk lahan sawah dan 30,96 persen untuk lahan bukan sawah yaitu untuk tegalan dan kebun, sementara itu untuk lahan bukan pertanian (perumahan, niaga, perkantoran, tanah terbuka, industri dan pertahanan/TNI) menguasai 57,93 persen. Lahan sawah untuk budidaya tanaman pangan yaitu padi (saat musim hujan) dan jagung (saat musim kemarau), namun ada juga budiaya jagung dilakukan pada lahan bukan sawah. Lahan budidaya hortikultura dan perkebunan di Kota Salatiga umumnya bukanlah lahan yang luas (<100 ha per komoditas). Budidaya hortikultura dan perkebunan umumnya dilakukan pada lahan bukan sawah (tegalan atau kebun). Lahan budidaya hortikultura dan perkebunan umumnya dikembangkan di Kecamatan Sidomukti dan Sidorejo. Kondisi ini merupakan acuan penting untuk arah pengembangan pertanian dan penerapan teknologi pertanian yang sesuai dengan kondisi perkotaan Kota Salatiga.

Tabel 2. 53 Lahan Pertanian di Kota Salatiga

Kecamatan	Lahan Pertanian (Ha)	
	Sawah	Bukan Sawah (Tegalan dan kebun)
Kecamatan Argomulyo	9	755
Kecamatan Tingkir	295	173
Kecamatan Sidomukti	49.7	382
Kecamatan Sidorejo	277	448
Total	**630.7**	**1758**

Sumber: Salatiga Dalam Angka, 2021



Sumber: RTRW Kota salatiga 2010-2030, Analisis Citra Satelit SPOT 6 2021

Gambar 2. 52 Lahan Pertanian (Sawah dan Bukan Sawah) Di Kota Salatiga

4. Urusan Perdagangan

Kinerja urusan perdagangan dapat dilihat dari indikator perlindungan konsumen dan penanganan perdangan. Persentase alat UTTP dan perlengkapannya di Kota Salatiga yang ditera ulang terus meningkat dari 57 persen di tahun 2017 sampai 81 persen pada tahun 2020. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah juga mengalami peningkatan jumlah komoditas selama 5 tahun dari 20 komoditas di tahun 2017 hingga menjadi 30 komoditas di tahun 2021. Walaupun di tahun 2017 belum ada pasar rakyat dengan informasi perkembangan harga terkoneksi dengan Kementerian, namun sejak 2020, 100 persen pasar rakyat dengan informasi perkembangan harga terkoneksi dengan Kementerian. Sementara persentase pasar tradisional yang memenuhi standar terus mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir dari 56 persen di tahun 2017 menjadi 80 persen di tahun 2021.

Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional ditunjukkan dengan produk yang bisa diterima pasar internasional. Selama lima tahun terakhir dari tahun 2017 hingga 2021, ada sebanyak 4 produk unggulan daerah Kota Salatiga yang diterima secara internasional. Nilai ekspor Kota Salatiga pada tahun 2020 sebesar 134.910.845,66 rupiah, menurun tajam jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 46.551.295.133,13 rupiah. Tahun 2021 tidak ada ekspor karena pandemi virus covid-19. Sementara nilai impor mengalami kenaikan tajam dari 32.415.666,01 rupiah di tahun 2019 menjadi 212.785.097,65 rupiah di tahun 2020.

Pemberdayaan kelompok usaha dilakukan dengan pembinaan rutin, baik dengan peningkatan ketrampilan maupun dengan penguatan manajemen. Persentase kelompok pedagang baik formal maupun informal yang dibina mengalami peningkatan dari 83 persen di tahun 2018 menjadi 92 persen di tahun 2020. Walaupun persentase program penataan lokasi PKL baru sebesar 60 persen di tahun 2021, angka ini lebih baik dibandingkan di tahun 2017 yang baru mencapai 20 persen. Kinerja urusan perdagangan Kota Salatiga selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 54 Kinerja Urusan Perdagangan Kota Salatiga

Tahun 2017-2021

No	Indikator	Capaian	Satuan	Kondisi Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Alat UTTP dan perlengkapannya di wilayah Kota Salatiga yang ditera ulang	Target	%	60	70	75	80	85
		Realisasi	%	57,63	57,9	58,18	81	tad
		Rasio	%	96,05	82,71	77,57	101,25	tad
2	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah.	Target	Komoditi	20	22	25	27	30
		Realisasi	Komoditi	20	22	25	27	30
		Rasio	%	100	100	100	100	100
3	Persentase pasar rakyat dengan informasi perkembangan harga terkoneksi dengan kementrian	Target	%	67	67	83	100	100
		Realisasi	%	0	67	83	100	30
		Rasio	%	tad	100	100	100	30
4	Perkembangan harga kebutuhan pokok	Target	Daftar harga	1	1	1	1	1
		Realisasi	Daftar harga	1	1	1	1	1
		Rasio	%	100	100	100	100	100
5	Persentase kelompok pedagang (formal	Target	%	75	83	88	92	96
		Realisasi	%	tad	83	88	92	tad
		Rasio	%	0	100	100	100	0

No	Indikator	Capaian	Satuan	Kondisi Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
	dan informal) yang dibina							
6	Persentase ijin usaha perdagangan yang diterbitkan	Target	%	100	100	80	100	100
		Realisasi	%	68	93	93	100	tad
		Rasio	%	68	93	116,25	100	0
7	Perkembangan nilai ekspor	Target	$	$290.461.474	$293.366.089	$296.299.750	$299.262.748	$302.255.375
		Realisasi	$	$108.705.844	$143.853.562	$46.551.295.133	$134.910.846	tad
		Rasio	%	37,43	49,04	15710,88	45,08	0,00
8	Perkembangan nilai impor	Target	$	$114.815.639,01	$112.519.324,00	$110.268.939,70	$108.063.560,91	$105.902.989,69
		Realisasi	$	$14.535.601,05	$31.121.025,98	$32.415.666,01	$212.785.097,65	tad
		Rasio	%	12,66	27,66	29,40	196,91	0,00
9	Jumlah produk yang bisa diterima pasar internasional	Target	Produk	4	4	4	4	4
		Realisasi	Produk	4	4	4	4	4
		Rasio	%	100	100	100	100	100
10	Program persentase lokasi PKL yang tertata	Target	%	21	31	41	51	61
		Realisasi	%	20	40	60	60	60
		Rasio	%	95,24	129,03	146,34	117,65	98,36
11	Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar.	Target	%	53	60	67	73	80
		Realisasi	%	56	62	68	75	80
		Rasio	%	105,66	103,33	101,49	102,74	100,00
12	Jumlah naskah Akademik peraturan perundang-undangan	Target	Dokumen	1	1	tad	1	1
		Realisasi	Dokumen	1	1	tad	1	1
		Rasio	%	100	100	0	100	100

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Salatiga, Tahun 2021

5. Urusan Perindustrian

Industri di Kota Salatiga didominasi oleh industri kecil dan menengah (IKM). Pada tahun 2018 proporsi IKM mencapai 99,34 persen namun pada tahun 2021 jumlah tersebut menjadi 92,33 persen. Pertumbuhan industri kecil dan menengah per tahun di Kota Salatiga sangat kecil dan terus menurun selama periode 2017-2021. Pada tahun 2017 IKM di Kota Salatiga tumbuh 0,62 persen dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2020 tumbuh 0,3 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2021 pertumbuhan tidak berubah atau tetap 0,3 persen. Dalam periode yang sama, sumbangan industri pengolahan terhadap PDRB Kota Salatiga juga mengalami penurunan. Pada tahun 2017 industri pengolahan menyumbang 31,33 persen terhadap PDRB Kota Salatiga. Pada tahun 2020 sumbangan tersebut menjadi 29,73 persen sedangkan pada tahun 2021 sumbangan

tersebut tidak berubah atau tetap 29,73 persen. Salah satu faktor yang diperkirakan turut menyebabkan penurunan tersebut adalah pandemi Covid-19.

Rata-rata IKM yang memperoleh pembinaan selama periode 2017-2021 hanya 4,85 persen dari total IKM. Pada tahun 2017, IKM yang dibina hanya 1,2 persen. Proporsi tersebut meningkat menjadi 3,45 persen pada tahun 2021. Jumlah IKM yang telah memenuhi standar kelayakan produksi pada tahun 2017 ada 5 unit. Jumlah tersebut meningkat menjadi 9 unit pada tahun 2021. Sedangkan jumlah klaster industri yang berkembang dalam periode tersebut relatif stabil sebanyak 5 klaster.

Selanjutnya, pada tahun 2017 produk IKM yang telah dipromosikan ada 15 produk. Jumlah tersebut meningkat menjadi 23 pada tahun 2019. Sedangkan tahun 2020-2021 tidak ada produk yang dipromosikan akibat terkendala adanya pandemi Covid-19. Lebih lanjut, persentase IKM yang memiliki ijin usaha industri kecil melalui sertifikasi halal baru adalah 3 persen pada tahun 2017. Proporsi tersebut sedikit meningkat yaitu menjadi 3,66 persen pada tahun 2021.

Kinerja urusan perindustrian Kota Salatiga selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 55 Kinerja Urusan Perindustrian Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator	Capaian	Satuan	Kondisi Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertumbuhan IKM	Target	%	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
		Realisasi	%	0,62	0,26	0,1	0,3	0,3
		Rasio	%	3,1	0,87	0,33	1	1
2	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Target	%	30	30	30	30	30
		Realisasi	%	31,33	30,85	31	29,73	29,73
		Rasio	%	1,04	1,03	1,03	0,99	0,99
3	Persentase industri kecil dan menengah	Target	%	2	2	2	2	2
		Realisasi	%	tad	99,34	99	85,91	92,33
		Rasio	%	0	49,67	49,5	42,955	1,75
4	Cakupan kelompok IKM yang dibina	Target	%	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
		Realisasi	%	1,2	8,96	5,33	5,33	3,45
		Rasio	%	1,00	7,47	4,44	4,44	2,88
5	Cakupan kelompok IKM yang mendapatkan bantuan	Target	%	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
		Realisasi	%	tad	tad	tad	tad	tad
		Rasio	%	0	0	0	0	0
6	Jumlah IKM yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	Target	Unit	7	9	9	9	9
		Realisasi	Unit	5	5	10	7	9
		Rasio	%	0,71	0,56	1,11	0,78	1,00
7	Jumlah klaster industri yang berkembang	Target	Klaster	4	5	5	5	5
		Realisasi	Klaster	5	5	6	5	5
		Rasio	%	1,25	1	1,2	1	1
8	Jumlah produk IKM yang telah terpromosikan	Target	Produk	15	15	20	20	20
		Realisasi	Produk	15	15	23	tad	tad
		Rasio	%	1	1	1,15	0	0

No	Indikator	Capaian	Satuan	Kondisi Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
9	Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui sertifikasi Halal	Target	%	3	3	3	3	3
		Realisasi	%	3	3,56	3,55	3,66	3,66
		Rasio	%	1,00	1,19	1,18	1,22	1,22

Catatan: tad = tidak ada data

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga, tahun 2017

6. Urusan Transmigrasi

Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduknya ke daerah yang kurang padat guna mendukung pengembangan dan wilayah. Transmigrasi, dari sisi kependudukan, dimaksudkan untuk memeratakan persebaran penduduk dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam urusan transmigrasi, Pemerintah Daerah melaksanakan tugas sesuai dengan UU Nomor 45 Tahun 1997. Pemerintah Daerah memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, salah satunya di bidang transmigrasi, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Sementara itu, di bidang transmigrasi, pemerintah daerah memiliki fungsi untuk (1) merumuskan kebijakan; (2) melaksanakan kebijakan; (3) melaksanakan evaluasi; (4) melaksanakan administrasi dinas; serta (5) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan apa yang menjadi lingkup tugasnya.

Target pemerintah daerah pada periode 2017-2021 adalah memberangkatkan 5 (lima) KK secara konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2017, ada sejumlah 5 (lima) KK yang diberangkatkan untuk mengikuti program transmigrasi tersebut. Namun jumlah tersebut menurun hingga 3 (tiga) KK pada 2018 dan 2019 hingga akhirnya hanya 1 (satu) KK yang berangkat pada 2021. Sementara itu, persentase peminat transmigrasi terus meningkat dari 5 persen sejak 2017, menjadi 8 persen pada 2018, hingga mencapai puncaknya pada 2019 yaitu 70 persen, dan selanjutnya menurun jadi 25 persen pada 2021. Kinerja urusan pilihan transmigrasi selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 56 Kinerja Urusan Transmigrasi Kota Salatiga

Tahun 2017-2021

No	Indikator	Capaian	Satuan	Kondisi Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi	Target	KK	5	5	5	5	5
		Realisasi	KK	5	3	3	0	1
		Rasio	%	1	0,6	0,6	0	0,2
2	Persentase peminat transmigrasi	Target	%	5	5	5	5	5
		Realisasi	%	5	8	70	tad	25
		Rasio	%	1	1,6	14	0	5

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kota Salatiga 2021

2.4.4.Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan memiliki fungsi strategis. Dalam menyelesaikan Penyusunan perencanaan pembangunan daerah disusun mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Berdasarkan Undang-Undang tersebut terdapat pengaturan baru tentang pengelompokan urusan kewenangan wajib dan urusan kewenangan pilihan bagi Pemerintahan Daerah. Kebijakan tersebut terkait erat dengan keterpaduan perencanaan pembangunan secara nasional. Perencanaan pembangunan daerah bersifat komprehensif dan mencakup seluruh urusan kewenangan daerah dan penugasan lain dari Pemerintah Pusat.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah Kota Salatiga harus sinergis dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional, agar keterpaduan pembangunan daerah dapat dicapai. Keterpaduan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dilakukan melalui konsultasi perencanaan pembangunan Kota Salatiga baik ditingkat provinsi maupun nasional agar rencana pembangunan daerah Kota Salatiga sejalan dengan arahan pembangunan nasional dan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

Capaian kinerja fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan di Kota Salatiga secara umum mengacu pada 4 (empat) indikator kinerja kunci, antara lain: 1) Kesesuaian dokumen RPJMD dengan RKPD; 2) Kesesuaian dokumen RKPD dengan APBD; 3) Kesesuaian dokumen RKPD dengan Renstra; 4) Tersusunnya dokumen SKPD; dan 5)tersusunnya raperda dokumen perencanaan kota. Pada tahun 2021 perencanaan pembangunan Kota Salatiga sinergis dengan arah pembangunan provinsi yang ditunjukkan oleh nilai prosentase kesesuaian dokumen RPJMD dengan RKPD, persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan APBD dan persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan Renstra yang kesemuanya telah mencapai 100 persen.

Secara lengkap hasil kinerja fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Salatiga tahun 2017-2021 dapat disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 57 Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2017-2021

NO	Indikator Kinerja		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase kesesuaian dokumen RPJMD dengan RKPD	Target	%	97,57	100	100	100	100
		Realisasi Capaian	%	95,15	86,79	87,33	85,71	100
		Rasio	%	97,52	86,79	87,33	85,71	100,00

NO	Indikator Kinerja		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
2	Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan APBD	Target	%	97,51	100	100	100	100
		Realisasi Capaian	%	97,51	99,68	100,93	105,66	100
		Rasio	%	100,00	99,68	100,93	105,66	100,00
3	Persentase kesesuaian Dokumen RKPD dengan Renstra	Target	%	100	100	100	100	100
		Realisasi Capaian	%	88,27	98,13	98,13	100	100
		Rasio	%	88,27	98,13	98,13	100,00	100,00
4	Tersusunnya dokumen SPKD	Target	dokumen	1	0	1	0	0
		Realisasi Capaian	dokumen	1	0	0	0	0
		Rasio	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tersusunnya raperda dokumen perencanaan kota	Target	dokumen	1	0	0	0	0
		Realisasi Capaian	dokumen	1	0	0	0	0
		Rasio	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Bapeda Kota Salatiga Tahun 2022

2. Penelitian dan Pengembangan

Kegiatan penelitian dan pengembangan di Kota Salatiga dilakukan dalam rangka pemecahan masalah dan peningkatan kualitas produk, baik dalam bentuk produk hukum, kebijakan maupun perencanaan pembangunan. Untuk mengembangkan kegiatan penelitan dan pengembangan, Pemerintah Kota Salatiga berupaya mendorong pemanfaatan hasil kelitbangan dan memfasilitasi inovasi/temuan. Adapun program pengembangan dan penelitian yang dilakukan pemerintah Kota Salatiga adalah pengembangan sistem inovasi teknologi industri. Pengembangan ini diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas atau efisiensi dalam kegiatan produksi di Kota Salatiga di masa yang akan datang.

Pada tahun 2017, pemanfaatan hasil kelitbangan mencapai 40 persen. Persentase tersebut meningkat menjadi 90,62 persen pada tahun 2020. Namun pandemi Covid-19 membuat angka tersebut turun pada tahun 2021 menjadi 73,33 persen. Sedangkan inovasi/temuan yang terfasilitasi pada tahun 2017 adalah 55 persen. Persentase tersebut turun menjadi 31,25 persen di tahun berikutnya dan akhirnya menjadi 30 persen di tahun 2021. Pandemi Covid-19 ikut mengurangi persentase inovasi/temuan yang dapat difasilitasi.

Tabel 2. 58 Kinerja Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan Kota Salatiga Tahun 2017–2021

No	Indikator		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Target	%	40	70	80	90	100
		Realisasi Capaian	%	40	25,21	52,94	90,62	73,33
		Rasio	%	100,00	36,01	66,18	100,69	73,33

No	Indikator		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
2	Persentase terfasilitasinya inovasi/temuan	Target	%	20	25	25	25	25
		Realisasi Capaian	%	55	31,25	0	0	30
		Rasio	%	275,00	125,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Bappeda Kota Salatiga Tahun 2022

3. Keuangan

Kinerja urusan keuangan mempunyai dua indikator kinerja utama, yaitu terkait dengan peningkatan PAD dan pengelolaan keuangan daerah. Terkait dengan indikator kinerja pertama, secara umum, Pemerintah Kota Salatiga setiap menargetkan adanya kenaikan PAD setiap tahun sebesar 10%. Hasil kinerja menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir target kinerja ini hanya terlampaui pada tahun 2018, yaitu dengan pencapaian 113,% atau dengan kata lain, terjadi kelebihan pencapain 13,5% dari tahun sebelumnya. Namun demikian, tingkat penerimaan PAD ini tidak dapat mencapai target pada tahun sebelumnya dan berikutnya. Bahkan pada tahun 2020 dan 2021, tingkat pencapaian PAD dari target hanya sebesar 31,3% dan 41,2%; Pandemi COVID-19 memberikan dampak penerimaan yang sangat tajam pada PAD. Beberapa komponen PAD yang mengalami penurunan yang sangat signifikan adalah Pajak Hotel dan Restoran. Data penerimaan riil kedua pajak, pada tahunn 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang sangat besar; pada tahun 2019, Pemerintah Kota Salatiga mencatat penerimaan pajak Hotel sebesar Rp. 6.871.740.000, namun demikian pada tahun berikutnya (2020 dan 2021), penerimaan pajak ini mengalami penurunan yang sangat tajam, yaitu masing-masing menjadi Rp. 3.116.170.000 dan 3.923.270.000. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap penerimaan pajak ini.

Hal yang sama terjadi pada penerimaan Pajak Restoran, yang selama tahun-tahun sebelumnya merupakan andalan bagi Pemerintah Kota Salatiga. Pada tahun 2019 Pajak Restoran yang berhasil dihimpun oleh Pemerintah Kota Salatiga ada sebesar Rp. 6.288.870.000, namun demikian pada tahun berikutnya mengalami penurunan yang sangat besar menjadi hanya Rp. 3.854.830.000 pada tahun 2020 dan Rp. 5.048,930.000.

Terkait dengan pengelolaan keuangan, Pemerintah Kota Salatiga menunjukkan kinerja pengelolaan yang baik. Hasil audit laporan keuangan pada tahun 2017-2020 menunjukkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat ini merupakan predikat tertinggi hasil laporan keuangan Hasil audit tertinggi ini memberikan indikasi bahwa pemerintah kota Salatiga mempunyai tata kelola keuangan yang baik, sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang andal yang dapat

digunakan untuk berbagai pengambilan keputusan strategis baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan

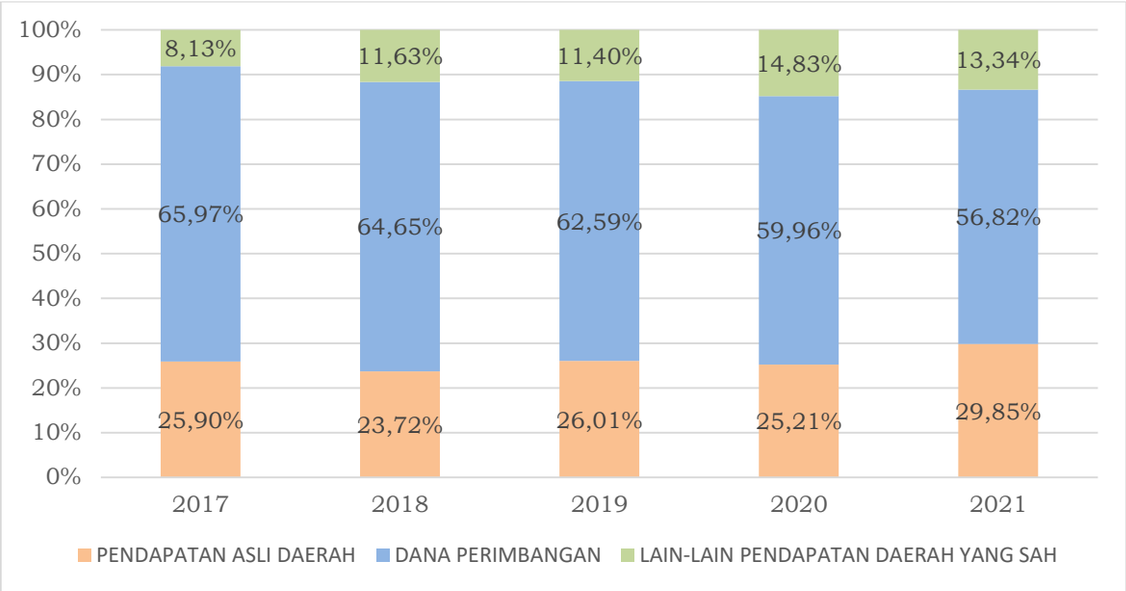
Kinerja fungsi penunjang keuangan daerah Kota Salatiga selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 59 Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Peningkatan PAD	Target	%	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
		Realisasi	%	9.04	11.35	5.39	3.13	4.12
		Rasio	%	90.40%	113.50%	53.90%	31.30%	41.20%
2	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Target	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Realisasi	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	Tahap Penilaian
		Rasio	%	100%	100%	100%	100%	Tahap Penilaian

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga 2017-2021

Salah satu aspek yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah adalah pencapaian Pendapatan Asli Daerah. Data menunjukkan bahwa penerimaan PAD selama periode 2017-2021 cenderung fluktuatif. Adanya Pandemi Covid-19 mengakibatkan keberhasilan pencapaian kinerja keuangan ini menurun sangat tajam terutama pada tahun 2020. PAD sebagai salah satu komponen yang menunjukkan kemandirian daerah seharusnya terus mengalami peningkatan; ketergantungan terhadap topangan finansial seharusnya harus semakin dikurangi. Data menunjukkan bahwa terjadi penurunan kontribusi dana perimbangan, di sisi lain kontribusi PAD mengalami peningkatan yang cukup baik, pada tahun 2017 sebesar 25,90 persen menjadi 29,85 persen pada tahun 2021. Hal ini memberikan indikasi positif kenaikan kemandirian daerah dalam periode waktu tersebut (2017-2021). Grafik berikut memberikan gambaran kongkrit bagaimana komposisi PAD ini dibanding dengan total penerimaan daerah yang lain.Grafik berikut memberikan gambaran kongkrit bagaimana komposisi PAD ini dibanding dengan total penerimaan daerah yang lain.



Gambar 2. 53 Kontribusi PAD pada Pendapatan Daerah

Kemampuan Pemerintah Kota dalam menghimpun Pendapatan Asli Daerah, bergantung pada komitmen pemerintah dalam memberikan layanan publiknya, yang salah satunya ditunjukkan dengan kebijakan anggaran. Tabel 2.66 menunjukkan bahwa alokasi belanja modal terhadap total belanja relatif kecil. Selama kurun waktu 2017-2021 proporsi belanja modal tidak pernah lebih dari 30 persen hal ini tentu saja berdampak pada penerimaan pendapatan asli daerahnya. Alokasi belanja modal pada aset (infrastruktur produktif) mempunyai relasi yang kuat terhadap penerimaan daerah. Kemampuan pengelolaan yang didukung dengan ketersediaan aset-aset produktif memberikan potensi penerimaan pendapatan asli daerah yang lebih besar.

4. Kepegawaian

Kinerja urusan kepegawaian di pemerintahan Kota Salatiga dilihat dari peningkatan kapasitas ASN melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional, pemberian kesempatan kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan formal yang lebih tinggi, tata kelola kepegawaian yang baik serta assessment dan peningkatan kesejahteraan ASN. Kinerja kepegawaian Kota Salatiga dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Persentase peserta yang mengikuti Diklat baik kepemimpinan maupun teknis dan fungsional meningkat dari tahun 2017 hingga 2019 sebelum menurun tajam di tahun 2020 dan kembali naik secara signifikan di tahun 2021. Penurunan diakibatkan oleh adanya pembatasan sosial karena pandemi Covid-19. Meski terbilang kecil, Persentase ASN yang melanjutkan pendidikan sesuai dengan NSPK meningkat dari sebesar 1,47 persen tahun 2018 menjadi 4,94 persen di 2021.

Tabel 2. 60 Kinerja Penunjang Kepegawaian Kota Salatiga Tahun 2017-2021

NO	Indikator		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Peserta yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	Target	%	1,38	7,57	8,43	8,09	6,71
		Realisasi Capaian	%	4,20	6,09	8,35	0,91	6,89

NO	Indikator		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
		Rasio	%	305,03	80,42	99,01	11,25	102,65
2	Persentase Peserta yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	Target	%	9,59	9,27	9,36	12,69	13,71
		Realisasi Capaian	%	7,59	8,92	14,82	8,99	13,89
		Rasio	%	79,13	96,22	158,27	70,84	101,35
3	Persentase PNS yang melanjutkan pendidikan sesuai dengan NSPK (Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria)	Target	%	1,46	1,61	1,76	2,01	2,20
		Realisasi Capaian	%	2,81	1,47	1,54	2,52	4,94
		Rasio	%	191,88	91,12	87,54	125,68	224,73
4	Persentase Penyelesaian Mutasi dan Pensiun	Target	%	100	100	100	100	100
		Realisasi Capaian	%	88,44	94,02	87,57	91,54	100,00
		Rasio	%	88,44	94,02	87,57	91,54	100,00
5	Persentase kasus pelanggaran disiplin ASN dalam satu tahun yang terselesaikan	Target	%	100	100	100	100	100
		Realisasi Capaian	%	100,00	66,67	80,00	70,00	100,00
		Rasio	%	100,00	66,67	80,00	70,00	100,00
6	Persentase PNS struktural yang mengikuti kegiatan assesment	Target	%	19,97	29,95	29,95	29,95	4,93
		Realisasi Capaian	%	77,93	19,18	20	2,36	5,48
		Rasio	%	390,32	64,04	66,78	7,88	111,16
7	Tercapainya Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Target	%	100	100	100	100	100
		Realisasi Capaian	%	85,77	99,05	100	91,54	100,00
		Rasio	%	85,77	99,05	100	91,54	100,00
8	Persentase pemenuhan arsip Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Target	%	100	100	100	0	0
		Realisasi Capaian	%	100	100	100	0	0
		Rasio	%	100	100	100	0	0

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2022

Tata kelola kepegawaian yang baik juga ditunjukkan dengan persentase penyelesaian mutasi dan pensiun, persentase kasus pelanggaran disiplin ASN dalam satu tahun yang terselesaikan serta persentase pemenuhan arsip badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah. Meski persentase penyelesaian mutasi dan pensiun dan persentase kasus pelanggaran disiplin ASN dalam satu tahun yang terselesaikan dapat mencapai 100 persen di tahun 2021 namun persentase pemenuhan arsip badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah yang selalu mencapai 100 persen di tahun 2017-2019 mengalami penurunan tajam ke 0 persen di tahun 2020-2021.

Dampak pandemi Covid-19 juga tercermin dalami Ppersentase ASN struktural yang mengikuti kegiatan assessment menurun tajam di tahun 2020-2021 hingga tidak sampai menyentuh angka 10 persen. Akan tetapi Fasilitas Pindah/Purna Tugas ASN selalu dapat mencapai di atas 90 persen dan bahkan 100 persen di tahun 2019 dan 2021.

2.4.5.Fungsi Penunjang Lainnya

1. Pengawasan

Pengawasan adalah upaya penting dalam menjalankan kegiatan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan daerah yang diturunkan ke dalam program dan kegiatan. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH di Kota Salatiga ditunjukkan dengan sejumlah laporan hasil pemeriksanaan yang dikeluarkan oleh Inspektorat. Dari tahun 2017 hingga 2020, temuan BPK yang ditindaklanjuti rata-rata di atas 80 persen, persentase tertinggi di tahun 2020 sebesar 89,49 persen dan persentase tertinggi di tahun 2019 sebesar 79,79 persen. Persentase laporan hasil pemeriksaan yang terbit tepat waktu juga terjaga di rata-rata 80 persen, hanya di tahun 2018 persentase menyentuh angka 68,66 persen. Walaupun masih belum optimal, penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi menunjukkan tren kenaikan dari tahun 2018 hingga 2020. Tahun 2018, level penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi sebesar 58,22 persen dan sedikit demi sedikit mengalami peningkatan ke 63,39 persen (2019) dan 64,99 persen (2020). Lebih lanjut dalam hal SDM, level kapabilitas tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan tercatat meningkat di tahun 2018 dari level 2 menjadi level 3.147 (APIP) dan level 3 (ASIP) kedua angka ini menunjukkan 100 persen rasio capaian dibandingkan target.

Tabel 2. 61 Kinerja Urusan Penunjang Pengawasan Kota Salatiga Tahun 2017-2021

NO	Indikator		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Target	%	75	77	80	83	85
		Realisasi Capaian	%	86.9	87.4	79.79	89.49	93
		Rasio	%	115.87	113.51	99.74	107.82	109.41
2	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Yang Terbit Tepat Waktu	Target	%	80	83	85	87	90
		Realisasi Capaian	%	84.48	68.66	81.52	89.49	90
		Rasio	%	105.6	82.72	95.91	102.86	100
3	Meningkatnya Level Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Target	%	60	62	63	65	68
		Realisasi Capaian	%	-	58.22	63.39	64.99	66,00
		Rasio	%	0	93.9	100.62	99.98	97,06
4	Meningkatnya level Kapabilitas APIP	Target	level	2	2	3	3	3
		Realisasi Capaian	level	2	3.147	3.147	3.147	3.147
		Rasio	%	100	157.35	104.9	104.9	104.9
5	Meningkatnya level Maturitas SPIP	Target	level	2.5	2.85	3	3	3
		Realisasi Capaian	level	2	3	3	3	3
		Rasio	%	80	105.26	100	100	100

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2022

2. Sekretariat DPRD

Kinerja sekretariat DPRD didasarkan pada fungsinya yaitu menyelenggarakan administrasi perkantoran, pengarsipan, penyediaan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur, pengembangan sistem pelaporan dan kinerja keuangan. Berdasarkan fungsi tersebut, kinerja sekretariat DPRD dapat dilihat dari fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD, fasilitasi berbagai kegiatan DPRD dan penyediaan tenaga ahli dalam pendampingan produk hukum di Kota Salatiga. Kinerja tersebut didukung dengan peningkatan kinerja ASN pendukung yang diharapkan dapat mendukung kelancaran kegiatan DPRD baik dalam hal substansial maupuan administratif.

Pada tahun 2021, semua kinerja urusan penunjang sekretariataan DPRD Kota Salatiga tercapai sebesar 100 persen, capaian kinerja tersebut sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam lima tahun terakhir. Kinerja yang belum dilakukan sampai tahun 2021 ini adalah dalam mengukur tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan ataupun fasilitasi yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD. Namun dapat digarisbawahi bahwa indikator capaian kinerja sekretariat dewan menunjukkan nilai yang baik. Salah satu indikator yang baru mencapai 88 persen adalah jumlah produk yang didampingi oleh tenaga ahli DPRD, akan tetapi diperkirakan akan dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Kinerja Sekretariat DPRD Kinerja Sekretariat DPRD merupakan aktivitas administratif yang mendukung kelancaran tugas Dewan. Secara keseluruhan tugas administratif sudah dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan rasio antara target dan realisasi yang berada pada angka 100% pada 5 indikator kinerja sekretarit dewan. Dalam lima tahun terakhir selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 62 Kinerja Urusan Penunjang Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan pelayanan admnistrasi perkantoran	Target	%	100	100	100	100	100
		Realisasi Capaian	%	100	100	100	100	100
		Rasio	%	100	100	100	100	100
2	Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Target	%	100	100	100	100	100
		Realisasi Capaian	%	100	100	100	100	100
		Rasio	%	100	100	100	100	100
3	Prosentase ASN yang meningkat kinerjanya	Target	%	100	100	100	100	100
		Realisasi Capaian	%	100	100	100	100	100
		Rasio	%	100	100	100	100	100
4	Cakupan pengembangan sistem	Target	%	100	100	100	100	100
		Realisasi Capaian	%	100	100	100	100	100

No	Indikator		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
	pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rasio	%	100	100	100	100	100
5	Cakupan dokumen/arsip daerah yyang tertata	Target	%	0	100	100	100	100
		Realisasi Capaian	%	0	100	100	100	100
		Rasio	%	100	100	100	100	100
6	Prosentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya	Target	%	55	60	65	70	75
		Realisasi Capaian	%	55	60	65	70	75
		Rasio	%	100	100	100	100	100

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Salatiga, 2021

3. Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Salatiga nomor 93 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah Kota Salatiga menyelenggarakan fungsi:

- Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
- Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota Sesuai dengan lingkup tugasnya

Berdasarkan RPJMD 2017-2021, Indikator Kinerja Daerah untuk urusan Sekretariat Daerah (Setda) adalah Skor Kepuasan Masyarakat. Skor ini dapat dipilah lagi menjadi dua yaitu Tingkat Kepuasan ASN terhadap layanan administrasi di lingkungan Setda serta indeks kepuasan pelayanan tamu pemerintah daerah. Tingkat kepuasan ASN terhadap pelayanan Setda menurun sepanjang tahun (Tabel 2.63). Dalam kurun waktu 2017-2022 terjadi penurunan kepuasan pelayanan sebesar 10%. Hal ini mencerminkan bahwa Sekretariat Daerah semakin melemah dalam hal pelayanan baik sebagai koordinator maupun fasilitator. Oleh karena itu, pembenahan kinerja Setda menjadi sangat penting untuk mendukung terlaksananya kelancaran pengelolaan pelayanan administratif dalam lingkup Kota Salatiga.

Di sisi lain, Setda telah mampu memberikan pelayanan yang memuaskan dan konsisten sepanjang tahun kepada tamu pemerintah daerah. Indeks kepuasan tamu daerah >80 dan sesuai dengan target kinerja Setda. Ke depan, indeks kepuasan tamu daerah masih dapat ditingkatkan. Akan tetapi, pembenahan internal untuk meningkatkan kepuasan tamu daerah harus berjalan beriringan dengan peningkatan kepuasan ASN.

Tabel 2. 63 Kinerja Sekretariat Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No.	Indikator		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat kepuasan ASN	Target	%	95	95	97	97	98
		Realisasi Capaian		91	90	83	81	82
		Rasio		96	95	86	84	84
2	Indeks kepuasan tamu pemerintah daerah	Target	Indeks	80	82	84	86	88
		Realisasi Capaian		80	82	84	86	88
		Rasio		100	100	100	100	100

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Salatiga, 2021

4. Kecamatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kecamatan dipimpin oleh Camat dengan tugas menyelenggaraan urusan pemerintahan umum, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di kecamatan, membina dan mengawasi, penyelenggaraan kegiatan kelurahan. Selain itu kecamatan masih memiliki tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kota yang ada di Kecamatan. Indikator kinerja kecamatan di Kota Salatiga ditunjukkan melalui lima indikator yaitu tingkat Ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP, tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di kecamatan dan kelurahan, Cakupan RW ber prestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan, presentase realisasi usulan hasil musrenbang dan nilai Survei Kepuasan Masyarakat. Pencapaian indikator kinerja berdasarkan masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 64 Kinerja Kecamatan Kota Salatiga
Tahun 2017-2021

No	Indikator		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian SPPT Ke WP							
	Kec. Sidorejo	Target	**%**	60	65	70	75	75
		Realisasi Capaian	**%**	76,51	82,11	88,92	93,36	93,51
		Rasio	%	127,52	126,32	127,03	124,48	124,68
	Kec. Tingkir	Target	%	80	82	83	85	87

No	Indikator		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
		Realisasi Capaian	%	63,6	63,22	86,68	88,52	95,62
		Rasio	%	79,50	77,10	104,43	104,14	109,91
	Kec. Sidomukti	Target	**%**	70	70	75	75	80
		Realisasi Capaian	**%**	92.35	89.64	90.34	87.42	84.96
		Rasio	%	131.93	128.06	120.45	116.56	106.20
	Kec. Argomulyo	Target	%	75,00	77,00	79,00	80,00	81,00
		Realisasi Capaian	%	63,63	73,03	53,96	73,27	87,71
		Rasio	%	84,84	94,84	68,30	91,59	108,28
2	Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di kecamatan dan kelurahan							
	Kec. Sidorejo	Target	**%**	60	62	64	66	68
		Realisasi Capaian	**%**	80	91	92,16	100	100
		Rasio	%	133,33	146,77	144,00	151,52	147,06
	Kec. Tingkir	Target	%	78	82	83	84	85
		Realisasi Capaian	%	96,16	96,16	96	96,4	88
		Rasio	%	123,28	117,27	115,66	114,76	103,53
	Kec. Sidomukti	Target	**%**	100	100	100	100	100
		Realisasi Capaian	**%**	100	100	100	100	100
		Rasio	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Kec. Argomulyo	Target	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Realisasi Capaian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Rasio	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan							
	Kec. Sidorejo	Target	**%**	60	65	70	75	80
		Realisasi Capaian	**%**	60	67,8	84	90	0
		Rasio	%	100,00	104,31	120,00	120,00	0,00
	Kec. Tingkir	Target	%	83	83	84	84	85
		Realisasi Capaian	%	62,5	72,92	85,71	0	36,73
		Rasio	%	75,30	87,86	102,04	0,00	43,21
	Kec. Sidomukti	Target	**%**	59	62	65	70	72
		Realisasi Capaian	**%**	59	62	64.56	64	0
		Rasio	%	100.00	100.00	99.32	91.43	0.00
	Kec. Argomulyo	Target	%	72,00	72,00	73,00	74,00	75,00
		Realisasi Capaian	%	63,00	35,09	65,50	72,41	77,59
		Rasio	%	87,50	48,74	89,73	97,85	103,45

No	Indikator		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
4	Persentase realisasi usulan hasil musrenbang							
	Kec. Sidorejo	Target	%	50	50	52	54	56
		Realisasi Capaian	%	11,49	23,91	28	35,39	41,32
		Rasio	%	22,98	47,82	53,85	65,54	73,79
	Kec. Tingkir	Target	%	50	53	55	56	58
		Realisasi Capaian	%	32,93	17,65	51,43	42,5	40,39
		Rasio	%	65,86	33,30	93,51	75,89	69,64
	Kec. Sidomukti	Target	%	30	30	40	40	45
		Realisasi Capaian	%	58	36.36	53.2	62	79.71
		Rasio	%	193.33	121.20	133.00	155.00	177.13
	Kec. Argomulyo	Target	%	60,00	64,00	68,00	72,00	74,00
		Realisasi Capaian	%	60,00	25,00	45,57	75,00	78,00
		Rasio	%	100,00	39,06	67,01	104,17	105,41
5	Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan							
	Kec. Sidorejo	Target	%	86	87	88	89	90
		Realisasi Capaian	%	78,4	82,83	82,36	85,11	85,83
		Rasio	%	91,16	95,21	93,59	95,63	95,37
	Kec. Tingkir	Target	%	84	85	87	89	90
		Realisasi Capaian	%	81,06	81,06	82,24	85,22	85,94
		Rasio	%	96,50	95,36	94,53	95,75	95,49
	Kec. Sidomukti	Target	%	70	72	74	76	78
		Realisasi Capaian	%	79	80.6	91	84	89.11
		Rasio	%	112.86	111.94	122.97	110.53	114.24
	Kec. Argomulyo	Target	%	74,00	75,00	77,00	78,00	79,00
		Realisasi Capaian	%	82,00	81,92	87,32	79,20	80,60
		Rasio	%	110,81	109,23	113,40	101,54	102,03

Sumber: Kecamatan Kota Salatiga, 2021

Berdasarkan tabel diatas nampak pada indikator tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP hampir semua kecamatan menunjukkan tren yang meningkat kecuali kecamatan Sidomukti yang justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun terakhir. Khusus untuk Kecamatan Sidomukti perlu dicari akar persoalan yang menyebabkan terjadinya penurunan tingkat ketepatan waktu penyampaiamn SPPT ke WP, sehingga dapat diperoleh strategi yang tepat untuk mengatasinya. Untuk aspek tingkat fasilitasi kelembagaan baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan menunjukkan tren meningkat.

Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di kecamatan dan kelurahan secara keseluruhan di 4 kecamatan rasio sudah diatas 100%. Hal ini menandakan bahwa kegiatan fasilitasi dari Kecamatan ke Kelurahan yang ada sudah dapat dikerjakan sesuai dengan yang diharapkan.

Dari Aspek Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan menunjukkan rata-rata persentase capaian berkisar antara 60-70 persen. Namun demikian hampir semua Kecamatan menunjukkan tren yang positif, kecuali pada Kecamatan Tingkir dimana pada 2 (dua) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan.

Dilihat dari persentase realisasi usulan hasil Musrenbang, ada dua kecamatan yakni Sidorejo dan Tingkir yang persentasenya masih dibawah 50 persen, Sedangkan untuk Kecamatan Sidomukti dan Argomulyo telah mencapai hampir 80 persen program yang diusulkan dalam Musrenbang terealisasi. Kondisi ini tentunya perlu dicermati khususnya di dua kecamatan (Sidorejo dan Tingkir) terkait rendahnya realisasi usulan hasil Musrenbang.

Dilihat dari aspek kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh kecamatan, menunjukkan tren yang semakin meningkat dari tahun ke tahun di semua kecamatan yang ada di Kota Salatiga. Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan telah mencapai di atas 80 persen.

Kecamatan juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan peran serta masyarakat guna mewujudkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan. Kemandirian dicerminkan dari meningkatnya kapasitas dan kualitas masyarakat dalam tata kelola pembangunan di tingkat kelurahan/desa, meningkatnya kualitas sumberdaya manusia juga diimbangi dengan meningkatnya kapasitas dan kualitas kelembagaan-kelembagaan kemasyarakatan di tingkat kelurahan. Dengan meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM dan kelembagaan, maka dinamika pembangunan di tingkat kelurahan semakin meningkat dan tingkat kesejahteran masyarakat kelurahan dapat terwujud.

Tabel 2. 65 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Indikator		Satuan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase PKK Aktif	Target	%	100	100	100	100	100
		Realisasi Capaian		100	100	100	100	100
		Rasio		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Salatiga, 2022

Pelaksanaan pemberdayaan ditingkat kelurahan Kota Salatiga sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi pembinaan dan pemberdayaan

kelompok di tingkat kelurahan sudah tercapai secara keseluruhan 100 persen. Kondisi yang masih menjadi kendala berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat adalah masih perlunya optimalisasi peningkatan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungannya.

5. Kesatuan Bangsa dan Politik

Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan faktor penentu keberlangsungan dan keberlanjutan pemerintahan. Di dalamnya tercakup aspek ideologi bernegara (Pancasila), karakter dan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa, organisasi masyarakat, ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, serta kerukunan antar umat beragama. Semua aspek ini bersinergi dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik dan bersatu padu berdasarkan ideologi Pancasila.

Sepanjang tahun 2017-2021, kesatuan bangsa dan politik telah diupayakan untuk diwujudkan melalui program yang relevan. Umumnya, separuh populasi Kota Salatiga memahami wawasan kebangsaan baik melalui pendidikan di sekolah ataupun pendidikan politik di luar sekolah dan secara mandiri (media massa). Kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan juga sangat baik (100%). Meskipun tingkat korelasi kedua hal tersebut tidak diketahui, kemitraan ini merupakan alternatif perpanjangan tangan pemerintah untuk meningkatkan pemahaman Warga Negara Indonesia tentang karakter dan wawasan kebangsaan serta penerapannya dalam kehidupan.

Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum juga umumnya mencapai 50-70 persen. Hal ini menunjukkan sebagian besar Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota Salatiga melek arti penting hak suaranya dan turut serta memilih pemimpin wilayah dan wakil rakyat demi masa depan yang lebih baik. Akan tetapi, ketahanan sosial dan budaya justru mengalami sedikit penurunan. Salah satunya ditunjukkan oleh prevalensi penyalahguna narkoba yang meningkat tajam di tahun 2018 menuju 2019. Meskipun ada penurunan di akhir tahun 2021, situasinya belum mampu kembali ke kondisi semula di tahun 2017. Dengan demikian, ketahanan sosial dan budaya menjadi satu tantangan besar dalam unsur kesatuan bangsa dan politik.

Tabel 2. 66 Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017–2021

No	Indikator		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	Target	%	**12.80**	**12.90**	**13.00**	**13.10**	**13.20**
		Realisasi Capaian	%	0	50.5	62.15	50	83.33
		Rasio	%	0.00	391.47	478.08	381.68	631.29

No	Indikator		Satuan	Kinerja Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
2	Persentase Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)	Target	%	0.00	70.00	51.00	0.00	85.00
		Realisasi Capaian	%	0	70.00	51.00	0	85
		Rasio	%	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
3	Prevalensi penyalahguna narkoba	Target	Prevalensi	2.5	3	2	2.4	2.3
		Realisasi Capaian	Prevalensi	0	0.025	2.3	2.29	1.73
		Rasio	%	0.00	100.00	9583.33	95.42	75.22
4	Terciptanya peningkatan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Target	%	100.00	100	100	100.10	100.10
		Realisasi Capaian	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Rasio	%	100.00	100.00	100.00	99.90	99.90

Sumber : Kesbangpol Salatiga 2021

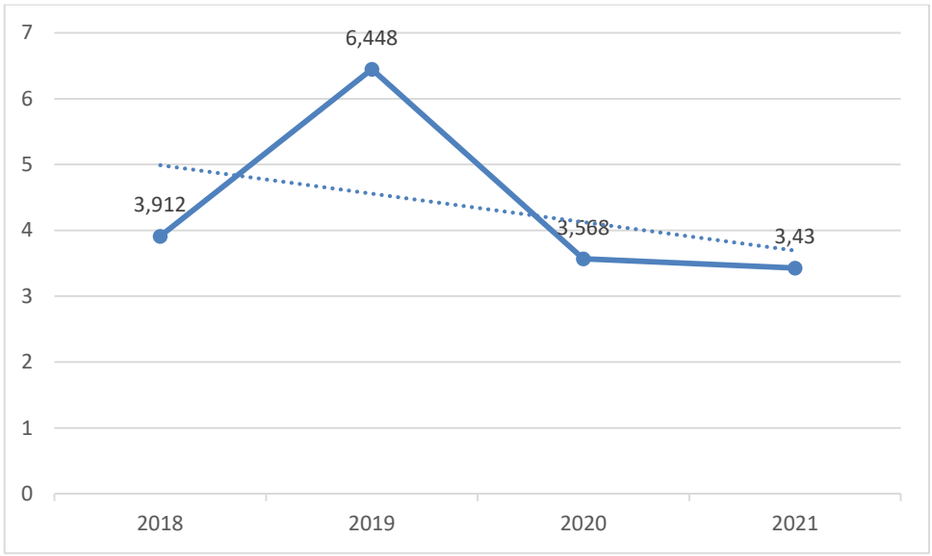
2.5. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah Kota salatiga dapat dilihat dari indeks daya saing Kota Salatiga dengan wilayah lain di sekitarnya. Berikut adalah indeks daya saing daerah wilayah Kedungsepur tahun 2018-2021.

Tabel 2. 67 Indeks Daya Saing Daerah Wilayah Kedungsepur Per Kabupaten/Kota Tahun 2018-2021

No	Kabupaten/ Kota	Skor/Nilai Indeks			
		2018	2019	2020	2021
1	Grobogan	3,624	5,380	3,258	3,312
2	Demak	4,227	4,714	2,862	3,306
3	Semarang	4,512	6,405	3,647	3,583
4	Kendal	2,666	7,800	3,749	3,602
5	Kota Semarang	4,963	7,370	3,898	3,877
6	**Kota Salatiga**	3,912	6,448	3,568	3,430

Sumber: Hasil Analisis BRIN, 2021



Sumber : BRIN, 2021

Gambar 2. 54 Tren Indeks Daya Saing Daerah Kota Salatiga 2018-2021

Berdasarkan data tabel diatas, Salatiga menduduki peringkat ke-4 berdasarkan Indeks Daya Saing Daerah dengan skor/nilai indeks sebesar 3,32. Posisi pertama memiliki skor indeks daya saing tertinggi adalah Kota Semarang sebesar 3,64 dan yang terendah adalah Demak sebesar 3,11. Sementara jika dilihat dari tren perkembangannya, indeks daya saing kota Salatiga mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2022.

Tabel 2. 68 Proyeksi Indeks Daya Saing Daerah Wilayah Kedungsepur Per Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026

No	Kabupaten/ Kota	Skor/Nilai Indeks			
		2023	2024	2025	2026
1	Grobogan	2.85	2.76	2.64	2.50
2	Demak	2.80	2.79	2.67	2.57
3	Semarang	2.88	2.72	2.54	2.36
4	Kendal	2.85	2.66	2.52	2.32
5	Kota Semarang	3.06	2.88	2.67	2.47
6	**Kota Salatiga**	**2.81**	**2.65**	**2.48**	**2.31**

Tabel diatas menunjukan nilai proyeksi dari Indeks Daya Saing Daerah di Kota Salatiga dan wilayah Kedungsepur. Hasil nilai proyeksi menunjukan bahwa di Kota Salatiga dan di wilayah Kedungsepur menunjukan tren yang menurun dari tahun ke tahun. Hal tersebut patut diwaspadai, supaya tren proyeksi penurunan yang negatif tidak terjadi. Maka dari itu pemerintah Kota Salatiga dalam merancang RPD 2023-2026 perlu memperhatikan Indeks Daya Saing Daerah Salatiga yang terbagi menjadi Aspek Utama, Pilar dan Dimensi.

Tabel 2. 69 Indeks Daya Saing Salatiga Tahun 2021

INDEKS	INDIKATOR	Skor/Nilai Indeks					Tren	
		2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022
ASPEK UTAMA	Faktor Penguat/Enabling Environment	4,21	0,79	3,95	3,68	3,56	▼	▼
	Sumber Daya Manusia/Human Capital	4,02	2,48	3,90	4,00	3,99	▲	▼
	Faktor Pasar/Market	3,97	0,79	3,25	3,50	3,39	▲	▼
	Ekosistem Inovasi	3,49	2,39	3,17	2,54	2,34	▼	▼
PILAR	Kelembagaan	4,63	10,44	4,25	4,40	4,35	▲	▼
	Infrastruktur	3,13	3,00	4,50	3,92	4,14	▼	▲
	Perekonomian Daerah	4,87	2,31	3,11	2,73	2,36	▼	▼
	Kesehatan	5,00	8,00	4,38	4,50	4,38	▲	▼
	Pendidikan dan Keterampilan	3,04	4,40	3,42	3,50	3,62	▲	▲
	Efisiensi Pasar Produk	4,67	8,06	2,83	3,17	2,87	▲	▼
	Ketenagakerjaan	3,83	3,42	3,67	3,33	3,22	▼	▼
	Akses Keuangan	3,71	2,92	2,83	2,50	2,26	▼	▼
	Ukuran Pasar	3,67	1,33	3,67	5,00	5,40	▲	▲
	Dinamika Bisnis	3,20	10,70	3,88	2,13	1,92	▼	▼
	Kapasitas Inovasi	2,48	10,03	2,65	2,49	2,49	▼	▬
	Kesiapan Teknologi	4,80	8,00	3,00	3,00	2,67	▬	▼
DIMENSI	Tata Kelola Pemerintahan	4,25	43,50	3,50	3,80	3,70	▲	▼
	Keamanan dan Ketertiban	5,00	40,00	5,00	5,00	5,00	▬	▬
	Infrastruktur Transportasi	3,75	0,00	5,00	3,50	3,44	▼	▼
	Infrastruktur Air Bersih dan Kelistrikan	2,50	12,00	4,00	4,33	4,97	▲	▲
	Keuangan Daerah	5,33	13,50	2,50	1,75	1,32	▼	▼
	Stabilitas Ekonomi	4,40	5,00	3,71	3,71	3,56	▼	▼
	Kesehatan	5,00	40,00	4,38	4,50	4,38	▲	▼
	Pendidikan	2,33	6,67	3,33	4,00	4,58	▲	▲
	Keterampilan	3,75	4,33	3,50	3,00	2,84	▼	▼
	Kompetisi Dalam Negeri	5,00	66,50	3,50	3,00	2,64	▼	▼
	Pajak dan Retribusi	5,00	29,33	2,50	3,00	2,64	▲	▼
	Stabilitas Pasar	4,00	25,00	2,50	3,50	3,39	▲	▼
	Ketenagakerjaan	4,33	9,33	4,00	3,67	3,52	▼	▼
	Kapasitas tenaga kerja	3,33	18,00	3,33	3,00	2,92	▼	▼
	Akses Keuangan	3,71	8,33	2,83	2,50	2,26	▼	▼
	Ukuran Pasar	3,67	6,67	3,67	5,00	5,40	▲	▲
	Regulasi	3,60	37,50	4,25	3,25	3,17	▼	▼
	Kewirausahaan	2,80	16,00	3,50	1,00	0,77	▼	▼
	Interaksi dan Keberagaman	3,40	8,40	2,83	2,17	1,94	▼	▼
	Penelitian dan Pengembangan (R & D)	2,70	8,17	2,78	3,30	3,47	▲	▲
	Komersialisasi	1,33	58,67	2,33	2,00	2,21	▼	▲
	Telematika	2,60	20,00	5,00	5,00	5,89	▬	▲
	Teknologi	7,00	60,00	1,00	1,00	1,00	▬	▬

Sumber: BRIN, 2021

Keterangan: daerah yang diarsir menunjukkan indeks daya saing yang menjadi keunggulan Kota Salatiga.

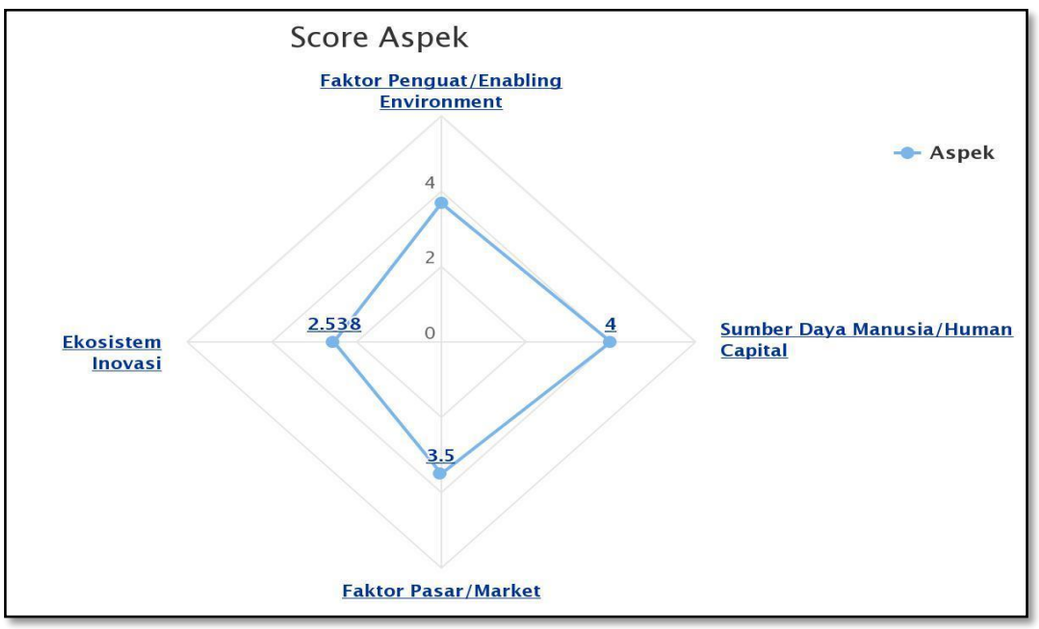
Jika dilihat berdasarkan Aspek Pilar, indikator yang mengalami penguatan di tahun 2022 adalah Infrastruktur, Pendidikan dan Keterampilan, serta Ukuran Pasar. Indikator tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan nilai skor indeks di tahun 2021. Jika dilihat pada Aspek Dimensi, indikator yang mengalami kenaikan antara lain Infrastruktur Air Bersih dan Kelistrikan, Pendidikan, Ukuran Pasar, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Komersialisasi, dan Telematika. Sedangkan, untuk Proyeksi Indeks Daya Saing Daerah di Salatiga dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 70 Indeks Daya Saing Salatiga Tahun 2023-2026

INDEKS	INDIKATOR	Skor/Nilai Indeks			
		2023	2024	2025	2026
ASPEK UTAMA	Faktor Penguat/Enabling Environment	5.20	5.56	6.17	7.08
	Sumber Daya Manusia/Human Capital	4.50	4.67	4.85	5.09
	Faktor Pasar/Market	4.89	5.41	6.04	6.97
	Ekosistem Inovasi	2.33	2.16	2.07	2.01
PILAR	Kelembagaan	3.49	3.32	3.10	2.85
	Infrastruktur	4.49	4.49	4.65	4.78
	Perekonomian Daerah	2.38	2.22	2.11	2.05
	Kesehatan	3.77	3.63	3.44	3.24
	Pendidikan dan Keterampilan	3.45	3.46	3.45	3.41
	Efisiensi Pasar Produk	2.22	2.09	1.88	1.70
	Ketenagakerjaan	3.17	3.06	2.99	2.94
	Akses Keuangan	2.13	1.98	1.87	1.78
	Ukuran Pasar	7.67	9.22	10.74	12.75
	Dinamika Bisnis	1.25	0.94	0.77	0.61
	Kapasitas Inovasi	1.76	1.59	1.42	1.23
	Kesiapan Teknologi	2.03	1.84	1.63	1.44
DIMENSI	Tata Kelola Pemerintahan	1.99	1.73	1.42	1.12
	Keamanan dan Ketertiban	2.97	2.61	2.22	1.81
	Infrastruktur Transportasi	3.37	3.05	2.95	2.83
	Infrastruktur Air Bersih dan Kelistrikan	3.99	3.99	3.90	3.67
	Keuangan Daerah	0.74	0.55	0.41	0.30
	Stabilitas Ekonomi	3.27	3.17	3.04	2.93
	Kesehatan	2.52	2.20	1.84	1.48
	Pendidikan	4.17	4.41	4.51	4.50
	Keterampilan	2.55	2.36	2.22	2.09
	Kompetisi Dalam Negeri	1.18	0.90	0.66	0.47
	Pajak dan Retribusi	1.45	1.26	1.02	0.80
	Stabilitas Pasar	2.05	1.95	1.69	1.42
	Ketenagakerjaan	2.76	2.51	2.28	2.05
	Kapasitas tenaga kerja	1.85	1.60	1.37	1.13
	Akses Keuangan	1.63	1.42	1.24	1.06
	Ukuran Pasar	5.13	5.57	5.73	5.81
	Regulasi	1.71	1.36	1.09	0.84
	Kewirausahaan	0.36	0.21	0.14	0.09
	Interaksi dan Keberagaman	1.34	1.11	0.94	0.79

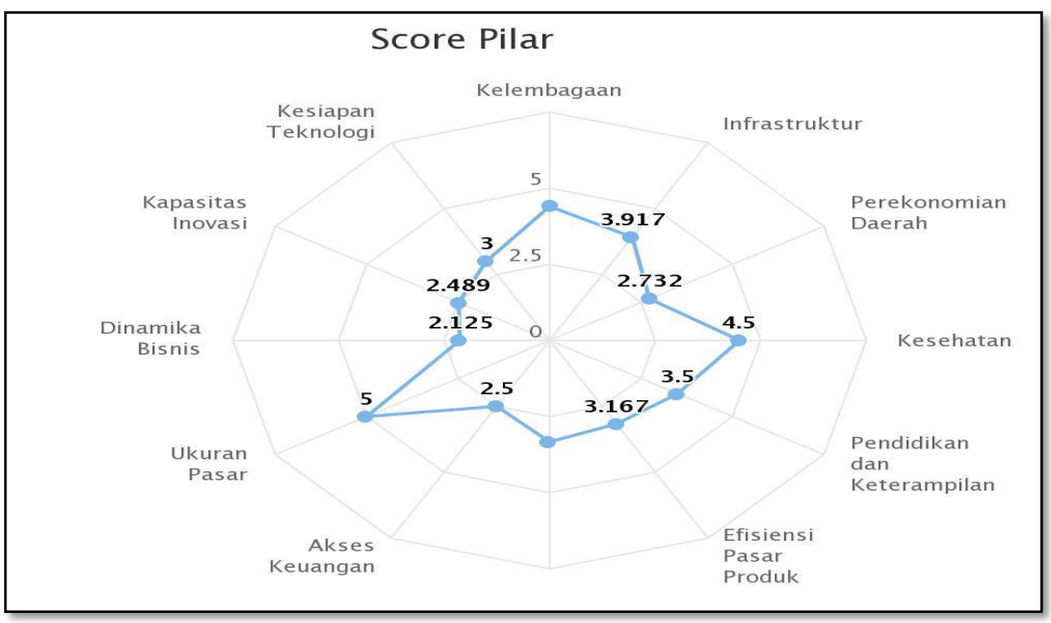
INDEKS	INDIKATOR	Skor/Nilai Indeks			
		2023	2024	2025	2026
	Penelitian dan Pengembangan (R&D)	2.80	2.81	2.70	2.53
	Komersialisasi	0.98	0.78	0.62	0.45
	Telematika	4.34	4.19	4.00	3.64
	Teknologi	0.20	0.13	0.08	0.05

Pada gambar di bawah ini dapat dijelaskan bahwa **Sumber Daya Manusia dan Faktor penguat** memiliki nilai yang tinggi jika dibandingkan dengan Faktor Pasar dan Ekosistem Inovasi.



Gambar 2. 55 Pencapaian Indeks Daya Saing Salatiga berdasarkan Skor Aspek

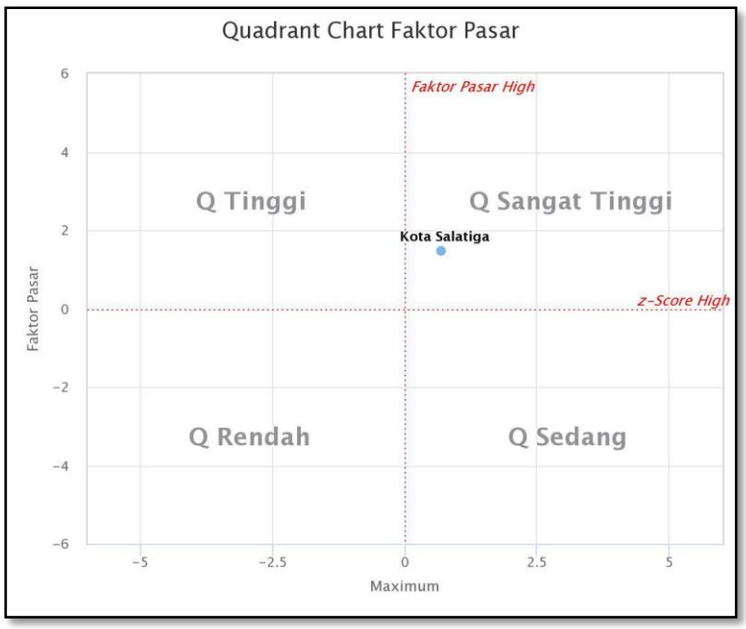
Indeks Skor Pilar jika digambarkan hasilnya sebagai berikut :



Gambar 2. 56 Pencapaian Indeks Daya Saing Salatiga berdasarkan Skor Pilar

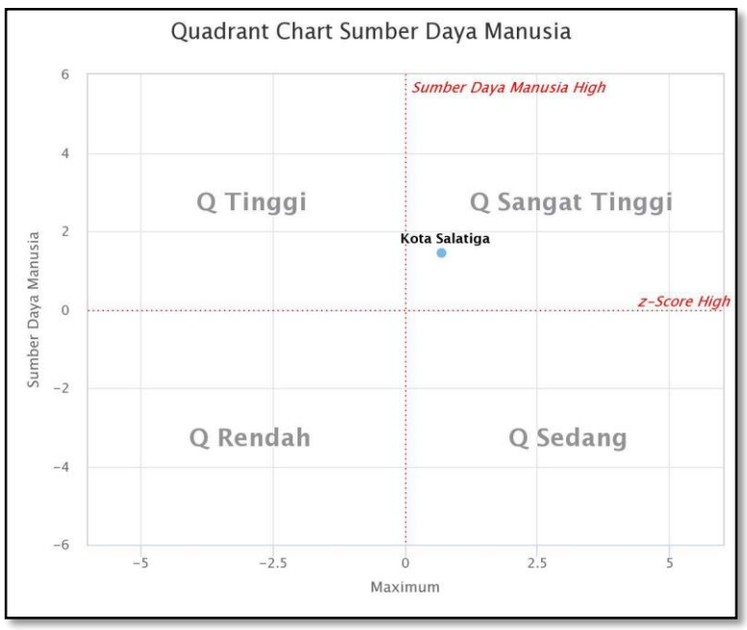
Dari gambar tersebut dapat diketahui aspek pilar yang terendah adalah di Dinamika Bisnis yaitu sebesar 2,2125 dan Akses Keuangan sebesar 2,5, Hal tersebut menyebabkan aspek Pilar Perekonomian Daerah juga kurang optimal yaitu sebesar 2,732, Sedangkan aspek yang menjadi pendorong adalah Pilar Kelembagaan, Kesehatan dan Infrastruktur.

Jika dilihat berdasarkan Tipologi Klasen, Salatiga memiliki daya saing yang tinggi pada dimensi Sumber Daya Manusia, Faktor Pasar, Faktor Penguat, dan Ekosistem Inovasi, Data pada gambar menunjukan masing-masing dimensi sudah menunjukan berada di kuadran yang sangat tinggi.



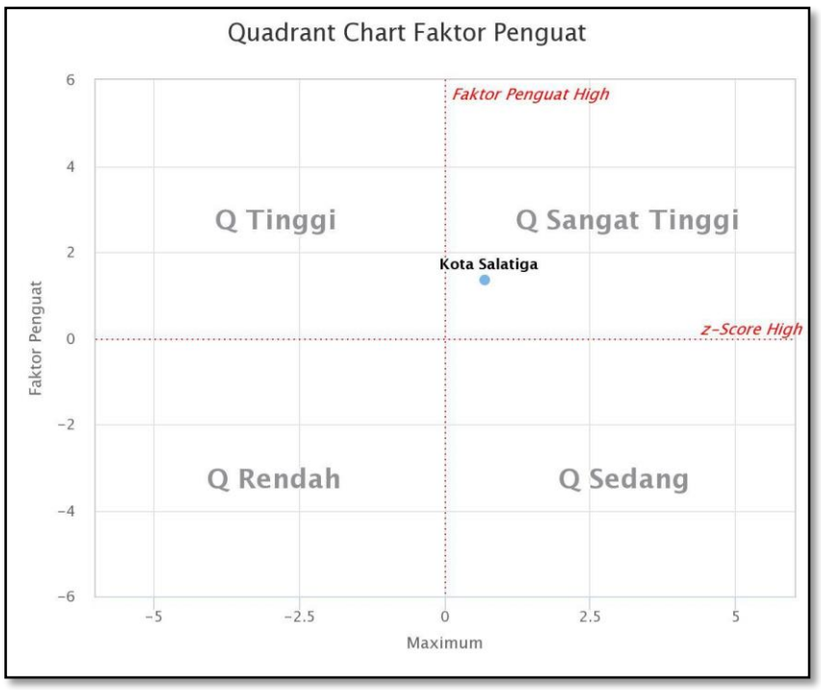
Sumber : BRIN, 2021

Gambar 2. 57 Analisis Tipologi Klasen Berdasarkan Dimensi Faktor Pasar di Salatiga Tahun 2021



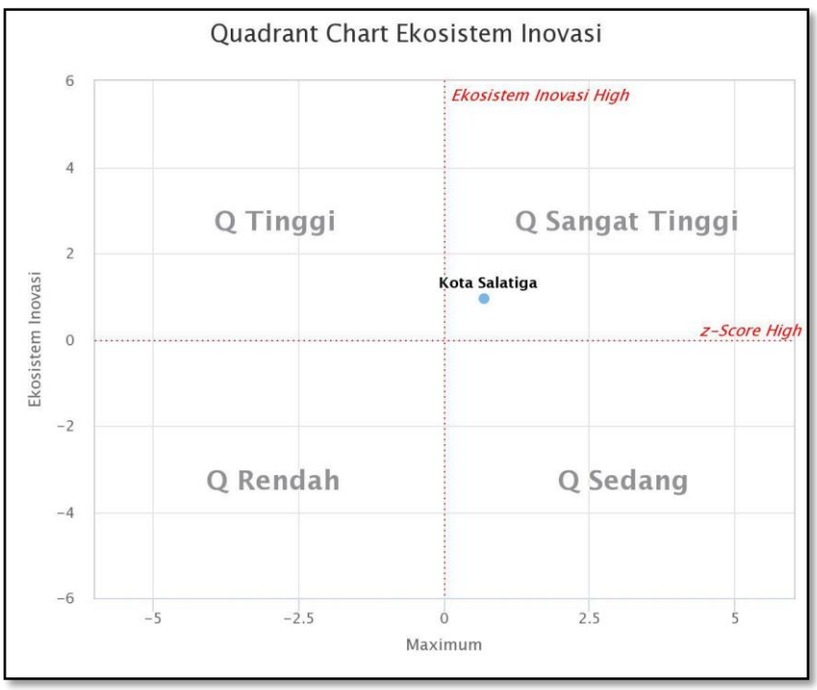
Sumber : BRIN, 2021

Gambar 2. 58 Analisis Tipologi Klasen Berdasarkan Dimensi Sumber Daya Manusia di Salatiga Tahun 2021



Sumber : BRIN, 2021

Gambar 2. 59 Analisis Tipologi Klasen Berdasarkan Dimensi Faktor Penguat di Salatiga Tahun 2021



Sumber : BRIN, 2021

Gambar 2. 60 Analisis Tipologi Klasen Berdasarkan Dimensi Ekosistem Inovasi di Salatiga Tahun 2021

Data didapatkan dari Kemenristek/BRIN melalui Direktorat Sistem Inovasi, Deputi Penguatan Inovasi telah menginisiasi penyusunan model pengukuran indeks daya saing daerah (IDSD) yang diharapkan dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan, IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah, Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional.

Selain diperkuat oleh hasil kajian teoritik, model IDSD juga disusun dengan mempelajari model indeks yang sedang dikembangkan atau dikeluarkan oleh lembaga lain baik dalam maupun luar negeri seperti Indeks Inovasi Daerah (LAN); Indeks Government Award (Kemdagri); dan Indeks Pembangunan Manusia ; Global Competitiveness *Index-World Economic Forum* (GCI-WEF); Global Innovation Index (GII-Johnson Cornell University, WIPO dan Insead) dan Asian Competitiveness Indeks (ACI) yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia dan ketersediaan data sampai level provinsi dan kabupaten/kota, Indeks ini menggunakan 4 aspek utama yaitu lingkungan penguat, sumberdaya manusia, pasar dan ekosistem inovasi; 12 pilar yaitu Kelembagaan, Infrastruktur, Perekonomian Daerah, Kesehatan, Pendidikan, Efisiensi Pasar Produk, Ketenagakerjaan, Akses Keuangan, Ukuran Pasar, Adopsi Teknologi, Dinamika Bisnis, Kapasitas Inovasi dengan 23 Dimensi dan 90 indikator (kuisioner).

BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dengan kinerja pemerintah kota secara menyeluruh. Aspek pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran daerah. Pemerintah Kota Salatiga menyadari sepenuhunya bahwa anggaran mempunyai peranan yang sangat sentral dalam pendanaan beragam program dan kegiatan yang diselenggarakan, yang utamanya bermuara pada pencapaian tujuan sebagaimana dinyatakan dalam Visi dan Misi Pemerintah Kota. Kemampuan dalam penentuan prioritas program dan kegiatan, alokasi jumlah anggaran, maupun dalam implementasi dan pengawasan anggaran menjadi faktor penting keberhasilan kinerja (keuangan) pemerintah yang antara lain direfleksikan dalam efisiensi dan efektifitas anggaran.

Selain itu, seiring dengan implementasi anggaran berbasis kinerja, Pemerintah Kota Salatiga menyadari sepenuhnya isu berkaitan dengan pengendalian dan optimalisasi aset daerah. Manajemen aset daerah mempunyai peran sentral dalam upaya mengoptimalisasi penerimaan daerah, khususnya yang berasal dari pendapatan asli daerah. Adanya manajemen aset yang baik akan mendorong pemerintah daerah lebih selektif dalam perencanaan pengadaan aset-aset baru (misal mencegah pemborosan dalam pengadaan aset), lebih efisien dan efektif dalam penggunaan aset daerah, khususnya dalam rangka peningkatan layanan publik dan optimalisasi pendapatan asli daerah.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah berikut menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Salatiga selama 5 tahun terakhir. Bagian pertama memberikan gambaran kinerja anggaran, yang direfleksikan dengan laporan realisasi anggaran (LRA). LRA merefleksikan bagaimana kemampuan pemerintah kota dalam mengoptimalkan setiap potensi penerimaan, terutama yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah. Selain sisi penerimaan, dari sisi pengeluaran akan diperoleh gambaran bagaimana kebijakan belanja pemerintah kota juga kebijakan pembiayaan terkait dengan pemanfaatan surplus atau dalam upaya mengatasi defisit anggaran.

3.1. Kinerja Keuangan Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021

Untuk memperoleh gambaran pengelolaan keuangan periode 2023-2026, Pemerintah Kota Salatiga menggunakan data kinerja tahun 2017-2021. Penggunaan periode waktu ini diharapkan dapat memberikan gambaran perkembangan pengelolaan keuangan dan kemampuan kinerja keuangan Pemerintah secara lebih riil.

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dengan rentang waktu yang cukup lama ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih riil tentang kemampuan keuangan daerah, baik dari sisi penerimaan, belanja maupun pembiayaan Kota Salatiga tahun 2017-2021. Sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dimulai dari penetapan APBD yang setiap tahun dilakukan oleh pemerintah daerah. Bagi pemerintah daerah, APBD merupakan instrumen yang sangat penting dalam pembiayaan berbagai kegiatan strategis yang dibuat oleh pemerintah daerah. APBD merupakan pengejawantahan rencana pembagunan daerah yang dinyatakan secara bertahap, yaitu setiap tahun. Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang berfungsi untuk menciptakan disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Gambaran pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan informasi tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah sehingga dapat dijadikan dasar analisis terhadap aspek kebijakan keuangan daerah, yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah guna mewujudkan tujuan dan sasaran pemerintah daerah, sebagaimana dinyatakan dalam rencana pembangunan daerah (RPD).

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD lima tahun terakhir (2017-2021) mencakup perkembangan pendapatan dan belanja daerah, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah. Gambaran kinerja pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah menjadi evaluasi strategis bagi pemerintah kota terkait dengan upaya untuk mengoptimalisasi potensi dan kemampuan pemerintah kota untuk menghimpun sumber-sumber pendapatan lokalnya.

Dalam konteks pelaksanaan desentralisasi fiskal, gambaran perkembangan kinerja pendapatan asli daerah ini menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah kota untuk mengambil kebijakan strategis dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah, khususnya menyangkut kebijakan belanja pemerintah. Kebijakan (alokasi) belanja menjadi bagian penting untuk melihat rasionalitas perkembangan pencapaian pendapatan (asli) daerah dan juga untuk menjadi pertimbangan (prioritas) alokasi dimasa mendatang dalam rangka pencapaian target pendapatan (asli) daerah yang ditetapkan.

Selain evaluasi terhadap pendapatan dan belanja, kebijakan terkait dengan pembiayaan daerah juga perlu dicermati mengingat potensi penerimaan dan pengeluaran di masa mendatang. Kebijakan pembiayaan secara singkat terkait dengan upaya pemerintah kota untuk menutup defisit anggaran ataupun mengoptimalisasi surplus yang dimiliki, sehingga bisa berimplikasi pada kewajiban pengeluaran atau adanya penerimaan dimasa mendatang.

Tabel berikut menunjukkan ringkasan Pendapatan Daerah (PD) untuk kurun waktu 2017-2021.

Tabel 3. 1 Pendapatan Daerah Kota Salatiga 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
PENDAPATAN DAERAH	**850.390.458.878**	**880.686.086.356**	**907.611.375.160**	**870.705.566.025**	**940.320.409.637**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**220.243.361.132**	**208.926.057.032**	**236.086.898.372**	**219.539.400.332**	**280.667.705.710**
Pendapatan Pajak Daerah	49.698.268.618	55.520.176.329	66.367.826.348	54.374.473.089	65.041.971.971
Hasil Retribusi Daerah	10.436.391.897	10.658.079.170	11.032.737.575	9.296.946.836	14.978.116.330
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.187.798.441	13.731.835.187	15.931.465.280	17.096.550.195	18.824.426.644
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	149.920.902.176	129.015.966.346	142.754.869.169	138.771.430.212	181.823.190.765
DANA PERIMBANGAN	**561.012.927.696**	**569.354.886.045**	**568.050.082.055**	**522.042.585.441**	**534.246.583.063**
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	24.417.997.942	18.865.461.039	17.560.657.049	26.534.964.997	34.962.053.875
Dana Alokasi Umum	448.067.710.000	469.967.335.000	469.967.335.000	425.080.208.000	418.013.566.000
Dana Alokasi Khusus	88.527.219.754	80.522.090.006	80.522.090.006	70.427.412.444	81.270.963.188
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**69.134.170.050**	**102.405.143.279**	**103.474.394.733**	**129.123.580.252**	**125.406.120.864**
Hibah Dana BOS	-	-	-	-	12.750.076.749
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	49.449.273.000	61.236.355.279	60.258.481.733	53.450.784.252	64.918.523.115
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	38.500.000.000	37.543.129.000	68.096.041.000	47.151.521.000
Bantuan Keuangan dari Propinsi	19.684.897.050	2.668.788.000	5.672.784.000	7.576.755.000	586.000.000

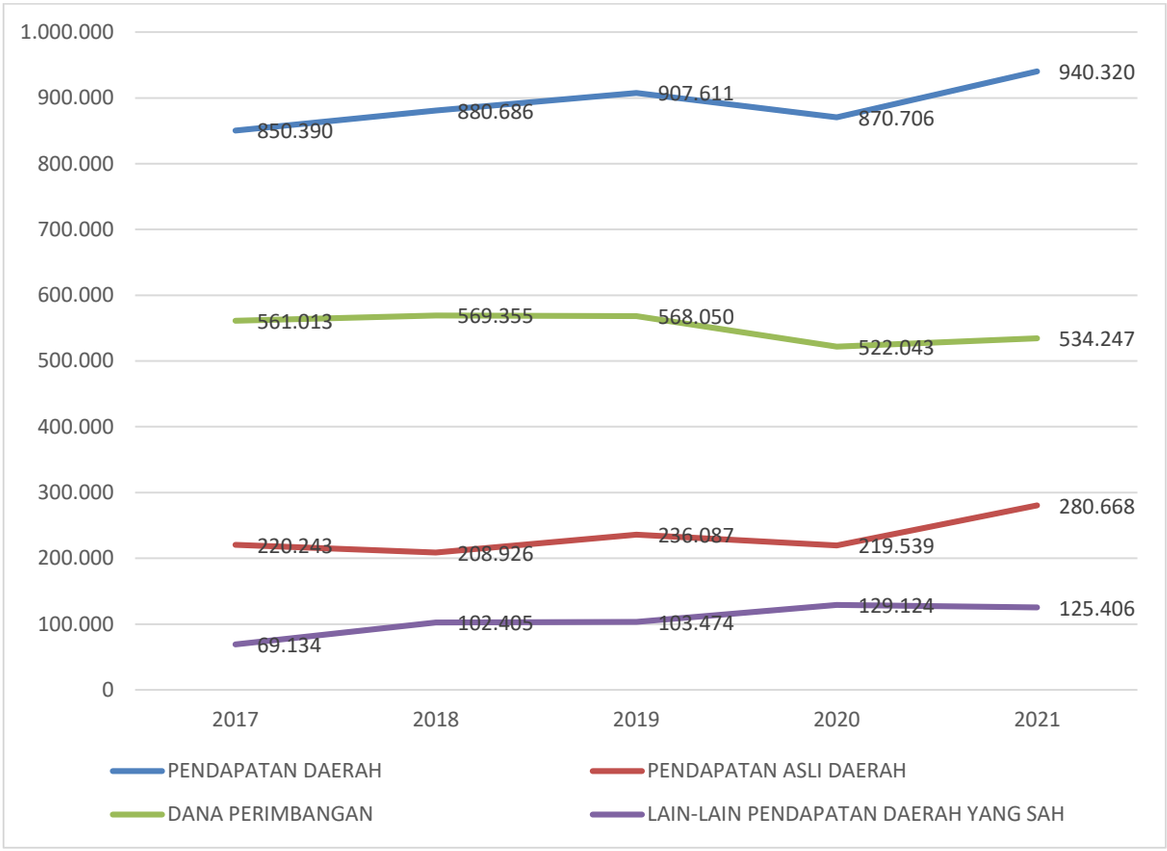
Sumber: BKD Kota Salatiga, 2012-2021

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Pendapatan Daerah (PD) Kota Salatiga berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Format Permendagri).

Pada periode 2017-2021, realisasi pendapatan Kota Salatiga mengalami kenaikan yang cukup berarti. Kecenderungan PD mengalami peningkatan yaitu dari sebesar Rp. 850,39 Miliar pada tahun 2017 menjadi 870,71 Miliar. Namun demikian PD pada tahun 2020 sebenarnya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya; pada tahun 2019 Pemerintah Kota Salatiga mencatat adanya penerimaan sebesar Rp.907,61 Miliar, sehingga PD pada tahun 2020 ini sebenarnya mengalami penurunan kurang lebih 7 persen dari pendapatan daerah tahun sebelumnya. Pendapatan Daerah 2021 sebesar Rp.940,32 Miliar dengan pertumbuhan sebesar 7,99 persen. PD 2021 mengalami peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya. Pandemi Covid-19 di tahun 2020 menyebabkan banyak pengaruh pada penurunan pendapatan daerah. Rerata pertumbuhan pendapatan daerah ini adalah -0,2 persen untuk periode waktu 2017-2021. Pertumbuhan negatif pada periode ini lebih disebabkan terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan dampak yang signifikan pada sektor ekonomi riil dan berimplikasi pada pajak-pajak daerah terkait.

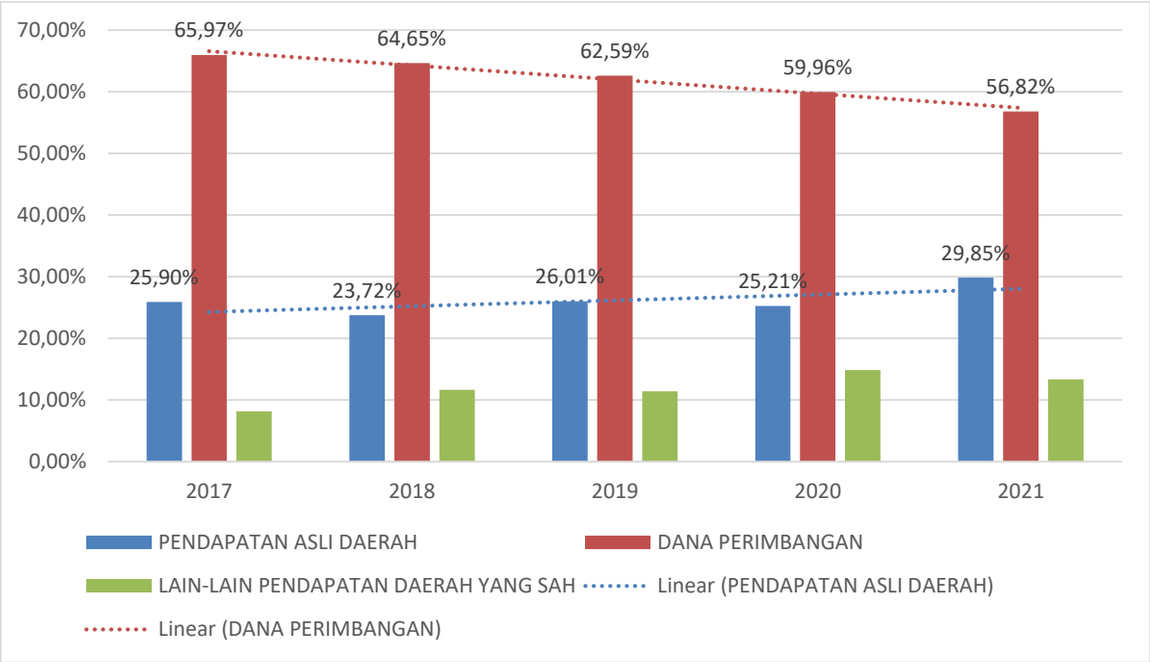
Apabila dicermati lebih jauh, sebenarnya pada tahun sebelum terjadinya pandemi Covid-19, pendapatan daerah mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yaitu kurang lebih 13 persen (penerimaan pendapatan daerah tahun 2018 sebesar Rp.880,69 Miliar dan tahun 2019 sebesar Rp.907,61 Miliar). Pendapatan Daerah pada tahun 2021 sebesar Rp.940,32 Miliar meningkat dibandingkan pendapatan daerah tahun 2020 sebesar Rp.870,71 Miliar. Pendapatan Daerah Kota Salatiga masih didominasi oleh Dana Perimbangan, terutama yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), kemudian disusul dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.



Gambar 3.1 Grafik Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)

Gambar 3.1 menunjukkan pola pertumbuhan dana perimbangan maupun pendapatan asli daerah relatif sama dari tahun ke tahun selama kurun waktu tersebut (2017-2021). Pola perubahan yang relatif tidak berbeda tersebut memberikan gambaran awal belum adanya perubahan kontribusi yang signifikan dari sumber-sumber pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah. Gambar 3.2 berikut menunjukkan bagaimana proporsi ketiga kelompok pendapatan (pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah) terhadap total pendapatan daerah.

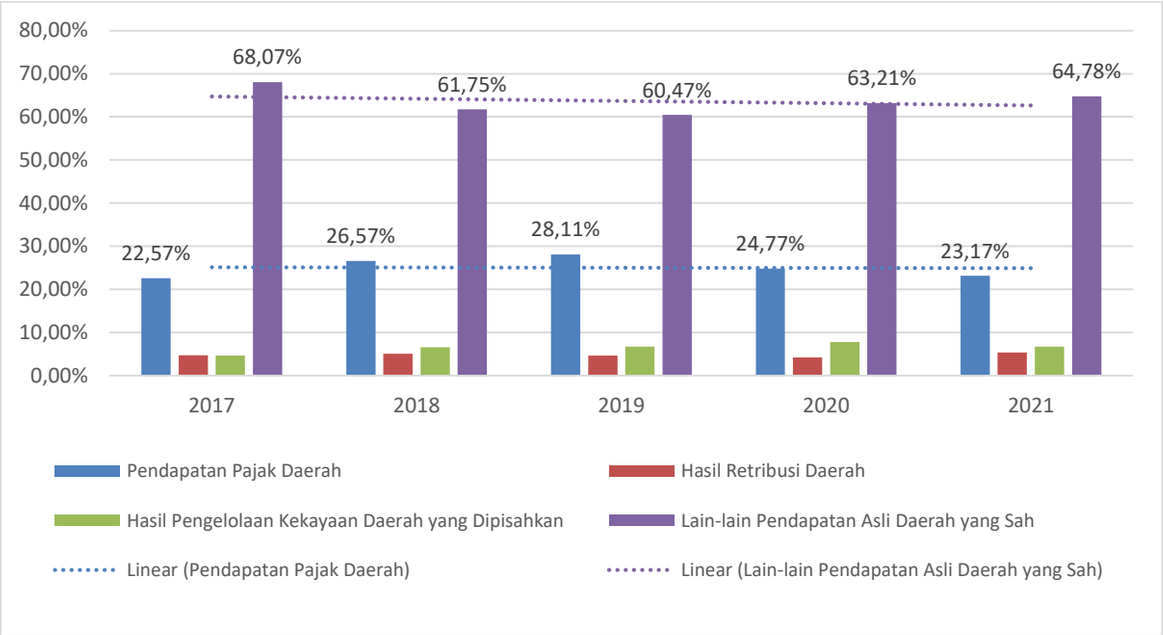
Gambar 3.2 menunjukkan proporsi PAD terhadap pendapatan asli daerah secara umum masih di bawah 30 persen. Namun demikian. dalam masa tahun tersebut sebenarnya telah terjadi perubahan kontribusi yang cukup tajam dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021. Grafik 3.2 menggambarkan adanya perubahan yang cukup besar kurang lebih 3,95 persen (tahun 2017 tercatat kontribusi PAD sebesar 25,90 persen sementara ditahun 2021 tercatat kontribusi PAD menjadi sebesar 29,85 persen. Sumber PD yang merupakan cerminan kemandirian daerah dalam melakukan pembiayaan pembangunan adalah PAD. Derajat kemandirian fiskal menunjukkan sejauh mana Pemerintah Daerah mampu untuk mendanai kegiatan pembangunan daerah.



Gambar 3. 2 Grafik Proporsi Unsur-unsur Pendapatan terhadap Total Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021

Proporsi PAD terhadap PD yang relatif kecil menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kota Salatiga dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah masih belum dapat berjalan optimal dilihat dari sisi PAD. Oleh karena itu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan harus terus digali potensinya, tanpa harus memberatkan dunia usaha, dengan berbagai regulasi dan kebijakan daerah. Namun demikian, terdapat kecenderungan yang cukup baik, yaitu adanya trend yang semakin meningkat dari PAD ini (lihat Grafik 3.2). Disisi lain, trend dana kontribusi dana perimbangan justru semakin menurun; realitas ini memberikan indikasi yang baik dalam upaya Pemerintah Kota Salatiga untuk meningkatkan kemandirian daerahnya. Grafik 3.12 memberikan gambaran bahwa tingkat pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun lebih baik (lebih tinggi) daripada tingkat pertumbuhan dana perimbangan.

Terkait dengan itu, perlu dikaji lebih mendalam komponen PAD yang dapat dioptimalkan untuk meningkatan total pendapatan daerah. Komponen PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Evaluasi terhadap PAD menjadi hal strategis untuk menentukan kebijakan yang tepat terhadap (komponen) PAD yang masih potensial untuk dioptimalkan untuk meningkatkan PD. Proporsi masing-masing (komponen) PAD tampak dalam Gambar 3.3 Tampak bahwa komponen PAD yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap PAD adalah Lain-Lain PAD yang Sah dan Pajak Daerah. Dalam kurun waktu tersebut, kontribusi terkecil Lain-lain PAD yang Sah adalah sebesar 60,47 persen (pada tahun 2019) dan terbesar sebesar 68,07 persen pada tahun 2017. Sementara proporsi PAD terkecil adalah 22,57 persen pada tahun 2017 dan 28,11 persen pada tahun 2019.



Gambar 3. 3 Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah

Laporan Realisasi Anggaran selama kurun waktu tersebut (2017-2020) menunjukkan bahwa sumber Lain-Lain PAD yang Sah bersumber dari penerimaan dari Badan Layanan Umum (BLU), utamanya penerimaan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Berdasarkan regulasi, BLU adalah Badan yang diberikan mandat untuk memberikan layanan umum kepada masyarakat, tanpa berorientasi pada keuntungan. Oleh karena itu diberikan fleksibilitas dan otonomi dalam menjalankan operasional BLU, yakni: fleksibilitas dalam hal pengelolaan keuangan, fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia dan fleksibilitas dalam hal pengelolaan dan pengadaan aset/barang. BLU diberikan kewenangan untuk memungut biaya dalam pemberian layanan kepada masyarakat yang memanfaatkan jasa ini. Pendapatan yang diperoleh oleh BLU ini akan digunakan untuk menutup beban operasional. Artinya, BLU dalam operasionalisasinya harus menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan bisnis pada umumnya agar mampu mendanai sendiri kegiatannya, kalaupun mengalami surplus, kelebihan ini akan digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan, misalnya penambahan ataupun perbaikan sarana dan prasarana layanannya. Secara normatif, surplus yang dihasilkan akan digunakan untuk kepentingan BLU sendiri, bukan untuk mendanai belanja pemerintah yang lain.

Terkait dengan itu, komponen PAD berikutnya, dalam hal ini pajak daerah perlu diupayakan optimalisasinya. Tabel berikut memberikan gambaran bagaimana penerimaan pajak daerah menurut komponen pajak daerah. Dari Tabel 3.2 diperoleh gambaran bahwa komponen pajak daerah (dalam 5 tahun terakhir memberikan kontribusi yang relatif berbeda-beda. Terdapat beberapa komponen pajak daerah yang dapat memberikan kontribusi yang relatif besar, sementara pajak-pajak lain relatif kecil kontribusinya.

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa terdapat 3 komponen pajak daerah yang memberikan kontribusi besar, yaitu BPHTB, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam 5 tahun terakhir, penerimaan pajak ini mengalami kenaikan yang besar. Pemberian kewenangan pemungutan PBB dan BPHTB memberikan tambahan sumber pendanaan yang cukup besar terhadap PAD, namun demikian pertumbuhannya masih lebih kecil daripada pendapatan kompone komponen PAD lainnya. Pajak Hiburan dan Restoran menunjukkan tingkat pertumbuhan yang relatif besar. Sebelum terjadinya pandemi Covid-19, kedua komponen PAD ini menunjukan perkembangan yang sangat tinggi. Penerimaan pajak secara keseluruhan menunjukkan penurunan yang tajam, khususnya untuk kedua Pajak ini. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luar bisa terhadap perkembangan ekonomi sektor riil (khususnya pada industri-industri tersier), akibatnya terjadi penurunan pajak dari industri-industri terkait. Gambaran pertumbuhan yang sangat tidak normal ini tentu saja berimplikasi pada penerimaan pajak daerah dimasa berikutnya yang bisa jadi akan tetap kecil, selain itu kemampuannya untuk memproyeksi penerimaan mendatang akan berkurang. Berdasarkan jumlah Pendapatan pajak yang diterima tahun 2017 mengalami pertumbuhan 2,94 persen, 2018 sebesar 11,71 persen, tahun 2019 sebesar 19,54 persen. Semenjak pandemi Covid-19 pertumbuhan penerimaan pajak mengalami pertumbuhan negatif. Pertumbuhan pajak tahun 2020 sebesar -18,15 persen, tahun 2021 sudah mulai membaik pada angka pertumbuhan yang positif yaitu 19,73 persen.

Pajak Air Tanah mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2020, naik 173,33%. Hal ini tidak lepas dari dikeluarkannya Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Pajak Air Tanah, yang didalamnya mengatur tentang perubahan (kenaikan) tarif yang cukup signifikan. Pajak daerah lainnya, yaitu Pajak Penerangan Jalan, PBB dan BPHTB juga terkoreksi secara signifikan. Hal ini tidak lepas relaksasi pembayaran listrik yang berupa diskon 100 persen (untuk pelanggan dengan daya 450 VA) dan diskon 50% untuk pelanggan dengan daya 900 VA), dan juga relaksasi PBB.

Tabel 3. 2 **Penerimaan Masing -masing Komponen Pajak Daerah dan Pertumbuhannya dalam 5 Tahun (2017-2021)**

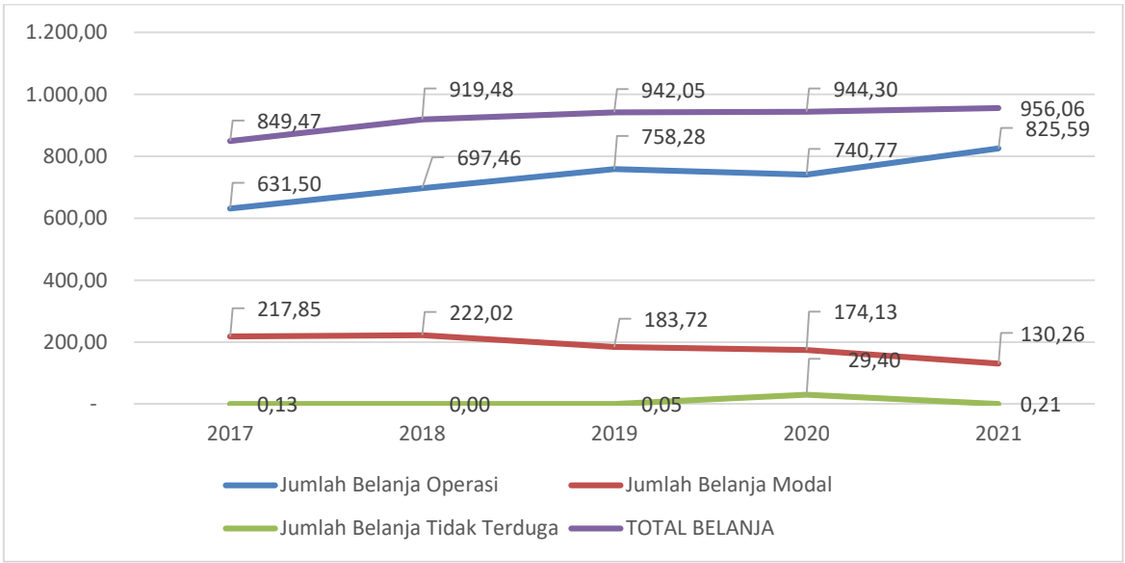
	Pajak Daerah Kota Salatiga Tahun 2016-2021 (dalam juta rupiah)					Pertumbuhan Pajak Kota Salatiga Tahun 2016-2021 (%)				
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Pendapatan Pajak Daerah										
a. Pajak Hotel	5.438,67	6.271,64	6.871,74	3.116,17	3.923,37	9,44	15,32	9,57	-54,65	25,90
b. Pajak Restoran	4.495,81	5.183,67	6.288,87	3.854,83	5.048,93	94,75	15,30	21,32	-38,70	30,98
c. Pajak Hiburan	501,65	641,73	725,81	243,02	216,22	49,68	27,92	13,10	-66,52	-11,03
d. Pajak Reklame	1.204,65	1.360,05	1.548,89	1.387,05	1.538,43	-14,38	12,90	13,88	-10,45	10,91
e. Pajak Penerangan Jalan	14.570,71	15.054,79	15.567,53	15.018,33	15.896,37	11,14	3,32	3,41	-3,53	5,85
f. Pajak Parkir	210,30	216,41	247,54	137,54	119,64	-6,65	2,91	14,39	-44,44	-13,01
g. Pajak Air Tanah	421,01	420,60	475,53	1.299,77	1.968,36	-0,50	-0,10	13,06	173,33	51,44
h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	7.635,89	8.647,89	9.525,30	9.367,19	10.217,70	-3,26	13,25	10,15	-1,66	9,08
i. Pajak BPHTB	15.219,58	17.723,40	25.116,63	19.900,58	26.112,95	-13,57	16,45	41,71	-20,77	31,22
Jumlah	**49.698,27**	**55.520,18**	**66.367,83**	**54.324,47**	**65.041,97**	**2,94**	**11,71**	**19,54**	**-18,15**	**19,73**

Sumber: Laporan Keuangan Daerah Kota Salatiga 2017-2021, diolah.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah Kota Salatiga dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan. Tahun 2017 tercatat belanja sebesar Rp. 849,47 Miliar sementara di akhir tahun 2020 tercatat belanja daerah Kota Salatiga sebesar Rp.944,20 Miliar. Dari jumlah ini pengeluaran untuk belanja operasional relatif sangat dominan dalam kurun waktu tersebut; tercatat pada tahun 2017 dan 2018 belanja operasional sebesar Rp. 652,05 Miliar dan Rp. 631,5 Miliar, sementara pada tahun 2020 dan 2021 mencapai Rp. 740,77 Miliar dan 825,59 Miliar.

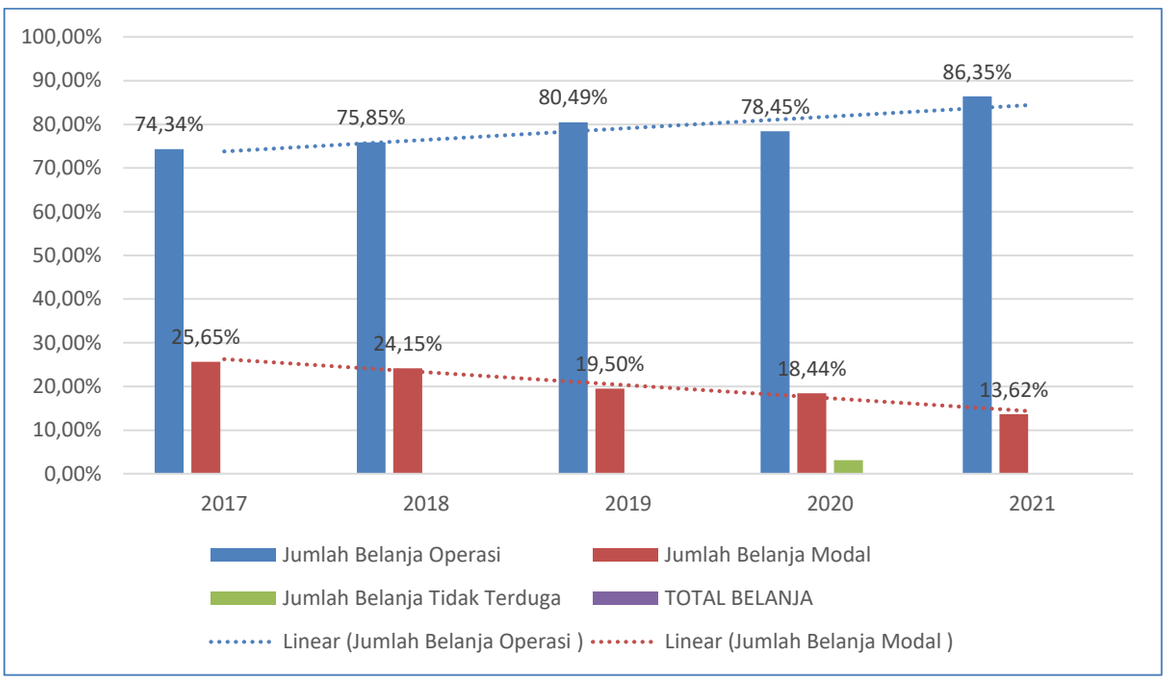
Berbeda dengan belanja rutin, belanja modal Kota Salatiga relatif kecil. Belanja modal ini Kota Salatiga tercatat sebesar Rp. 217,87 Miliar untuk tahun 2017, sedangkan pengeluaran pada tahun 2021 hanya dialokasikan sebesar Rp. 130,26 Miliar. Data menunjukkan bahwa alokasi untuk belanja modal mengalami penurunan yang cukup tajam dalam 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2020 dan 2021. Realitas ini disadari sepenuhnya relatif berdampak pada upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik, dengan cara disediakannya fasiltas layanan publik. Grafik 3.3 berikut ini memberikan gambaran bagaimana perkembangan belanja daerah Pemerintah Kota Salatiga dalam 5 lima tahun terakhir.



Gambar 3. 4 Grafik Perkembangan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)

Dari gambaran awal tersebut tampak bahwa proporsi belanja operasional jauh lebih besar dari pada proporsi dari belanja modal. Gambar 3.4 berikut ini memberikan gambaran bagaimana perbedaan proporsi antara belanja operasional dengan belanja modal. Grafik ini menegaskan masih tingginya pengeluaran pemerintah kota untuk belanja operasional. Proporsi belanja dalam 5 (lima) tahun terakhir sampai dengan 2020 lebih dari 70 persen dan trendnya cenderung semakin meningkat dan mencapai 78,45 persen, bahkan pada tahun sebelumnya proporsi belanja ini mencapai 80,49 persen. Berbeda dengan belanja operasi, proporsi belanja

modal justru relatif kecil dan berkecendunagn mengalami penurunan. Tahun 2020 proporsi belanja ini hanya tercatat hanya 18,44 persen. Belanja modal mempunyai peran strategis dalam peningkatan PAD; penyediaan fasiltas dan layanan publik yang semakin banyak dan baik (berkualitas menjadi salah faktor penting untuk meyakinkan publik terkait dengan komitmen penyelenggaraan layanan publik, khususnya yang terkait dengan pemberian layanan-layanan dasar dan wajib. Gambaran penurunan proporsi belanja ini bisa menjadi kontraproduktif terkait dengan upaya pemerintah untuk semakin meningkatkan kualitas layanan. Untuk itu, untuk masa mendatang perlu dialokasikan anggaran yang lebih besar berkaitan dengan penyediaan beragam fasilitas layanan publik sebagai wujud komitmen dalam peningkatan penyediaan layanan yang diberikan oleh pemerintah kota.



Gambar 3. 5 Grafik Proporsi Unsur-unsur Belanja terhadap Total Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (%)

Proporsi belanja operasi yang besar, sebagian besar terserap pada belanja pegawai dan belanja barang. Sedangkan untuk belanja modal, secara merata tersebar pada berbagai kebutuhan, khususnya terkait dengan penyediaan Peralatan dan Mesin, Jalan Irigsdi dan Jalan, Irigasi dan Jaringan. Secara rinci perkembangan Belanja Daerah Kota Salatiga tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 3 Realisasi Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (Rupiah)

KETERANGAN BELANJA	2017	2018	2019	2020	2021
BELANJA					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	379.246.014.175	408.502.726.025	450.227.761.257	447.671.356.960	411.931.318.505
Belanja Barang	236.721.065.959	272.277.581.785	279.058.494.680	271.862.126.785	399.357.950.409
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	9.363.600.000	12.347.600.000	23.131.093.000	18.602.331.000	12.955.460.964
Belanja Bantuan Sosial	5.552.720.000	3.714.131.000	5.866.241.000	2.632.655.000	1.768.350.000
Belanja Bantuan Keuangan	616.646.144	616.646.144	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan kepada Vertikal Dalam Negeri	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi	**631.500.046.278**	**697.458.684.954**	**758.283.589.937**	**740.768.469.745**	**826.013.079.878**
BELANJA MODAL					
Belanja Tanah	-	-	500.000.000	3.610.880.337	409.818.620
Belanja Peralatan dan Mesin	66.885.271.913	74.315.028.884	61.532.561.771	61.715.928.045	43.567.609.306
Belanja Gedung dan Bangunan	55.017.600.592	63.968.259.648	75.166.013.471	47.553.365.500	60.425.196.643
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	89.136.632.010	80.636.988.750	44.164.353.300	59.103.396.512	24.731.543.900
Belanja Aset Tetap Lainnya	6.642.083.320	2.769.509.666	2.179.958.378	1.585.157.696	182.158.040
Belanja Aset Lainnya	166.400.709	332.195.040	181.754.500	562.602.500	-
Jumlah Belanja Modal	**217.847.988.544**	**222.021.981.988**	**183.724.641.420**	**174.131.330.590**	**130.277.078.909**

KETERANGAN BELANJA	2017	2018	2019	2020	2021
BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	45.300.000	29.396.368.605	211.145.945
Belanja Tidak Terduga	126.227.453	4.057.543	45.300.000	**29.396.368.605**	211.145.945
Jumlah Belanja Tidak Terduga	**126.227.453**	**4.057.571.543**	**942.053.531.357**	**944.196.168.940**	**956.501.304.732**
TRANSFER	-	-	-	-	-
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	-	-	-	-	-
Bagi hasil Pajak	-	-	633.895.236	658.043.964	-
Bagi Hasil Retribusi	-	-	**633.895.236**	**658.043.964**	-
Bagi Hasil Pendapatan lainnya	-	-	-	-	-
JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	-	**-**	**-**	-	-
JUMLAH BELANJA	**849.474.262.275**	**923.538.238.485**	**942.687.426.593**	**944.954.212.904**	**956.501.304.732**
SURPLUS/DEFISIT	**33.271.819.836**	**-33.545.827.235**	**-14.667.527.443**	**-54.730.528.971**	**-10.310.217.208**

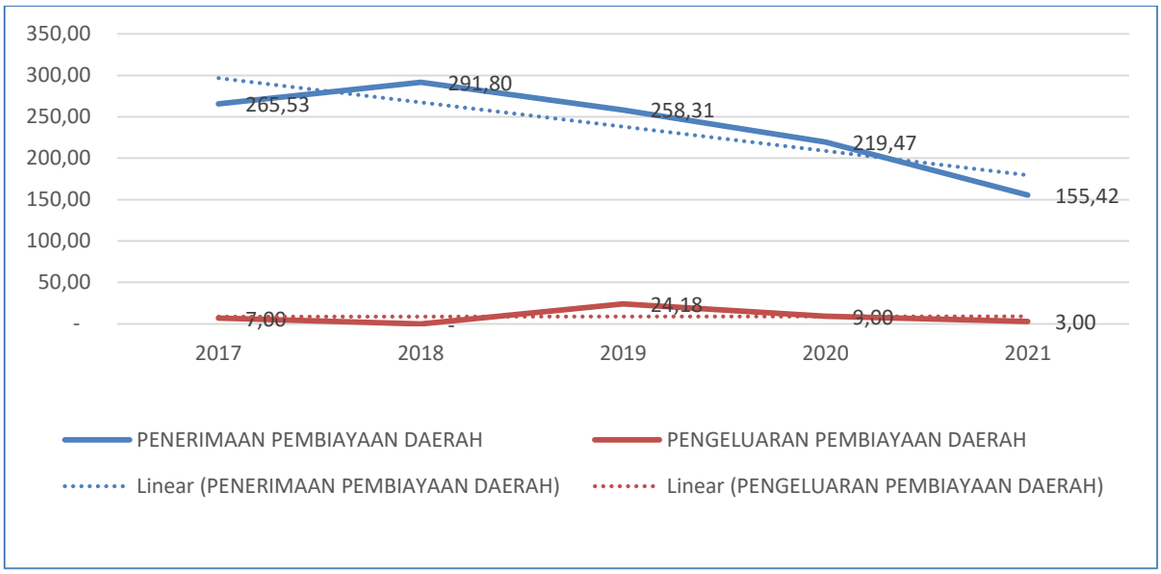
Sumber: Laporan Keuangan Daerah Kota Salatiga 2016-2021, diolah.

3. Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah pada hakekatnya timbul terkait denga upaya untuk mengatasi defisit anggaran dan juga mengoptimalkan surplus. Dalam situasi terjadi defisit anggaran, pemerintah perlu untuk mencari alternatif untuk mencari tambahan sumber pendanaan guna menutup (membiayai) kekurangan anggaran tersebut, misalnya dengan mencari pinjaman dari pihak ketiga, sementara apabila terjadi surplus anggaran, pemerintah perlu mengupayakan agar surplus yang diperoleh dapat dioptimalkan, misalnya dengan menanamkan pada instrumen investasi yang memberikan tingkat keuntungan yang lebih baik daripada hanya disimpan dan tabungan. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup: (a) SiLPA tahun anggaran sebelumnya; (b) pencairan dana cadangan; (c) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; (d) penerimaan pinjaman; dan (e) penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup: a. pembentukan dana cadangan; b. penyertaan modal pemerintah daerah; c. pembayaran pokok utang; dan d. pemberian pinjaman.

Penerimaan pembiayaan daerah Kota Salatiga selama kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami peningkatan dari sebesar Rp.265.53 Miliar menjadi sebesar Rp.336,92 Miliar. Penerimaan pembiayaan daerah tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan pencairan dana cadangan. Adapun pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah dan pembayaran pokok utang. Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah meningkat dari sebesar Rp.6,72 Miliar menjadi Rp.31,58 Miliar. Sementara itu untuk kurun waktu berikutnya (2017-2020), penerimaan pembiayaan justru mengalami penurunan; pada tahun 2017 penerimaan pembiayaan turun dari tahun sebelumnya menjadi Rp.265,53 Miliar dan pada tahun 2020 nilainya kembali turun menjadi Rp. 219,46Miliar. Untuk sisi pengeluaran pembiayaan pada tahun 2017 hanya sebesar Rp.7,00 Miliar dan menjadi Rp.3,00 Miliar pada tahun 2021. Gambaran ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu berjalan Secara ringkas perkembangan jumlah penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah tercantum pada gambar berikut.



Gambar 3. 6 Perkembangan Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 -2021 (dalam Milyar Rupiah)

Realisasi Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2021 sebesar Rp.155,42 Miliar sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah 2021 sebesar Rp. 3 Miliar. Jumlah pembiayaan netto tahun 2021 sebesar Rp.152,42 Miliar. Perincian penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3. 4 Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (Rupiah)

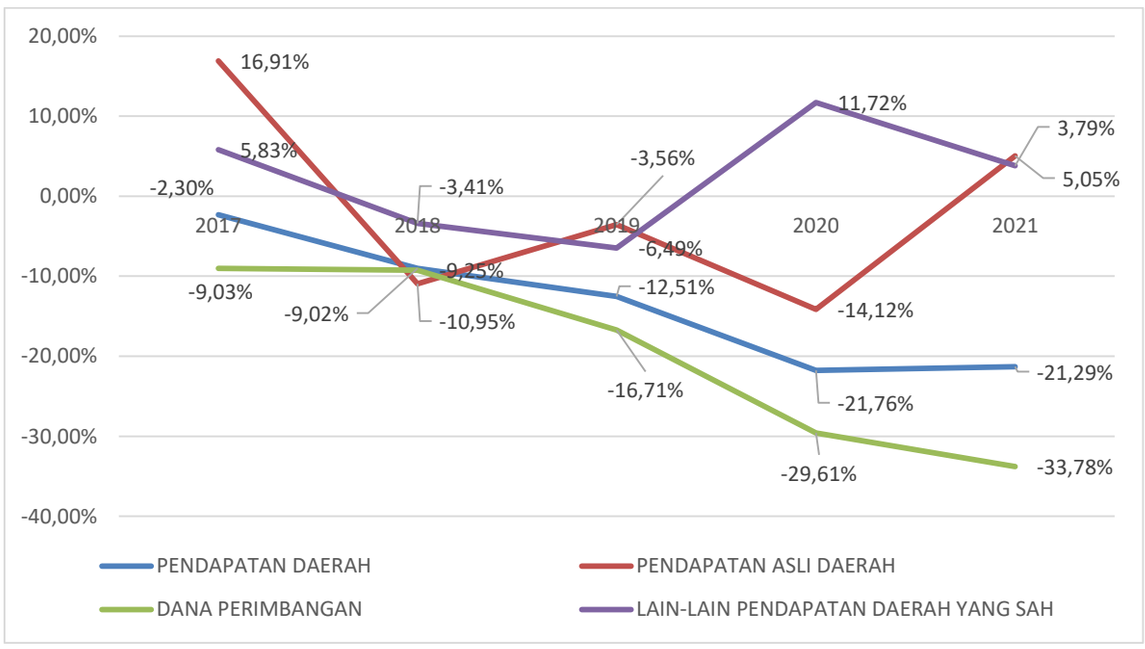
	2017	2018	2019	2020	2021
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	265.449.841.825	291.800.636.661	258.254.809.426	219.471.861.483	155.741.332.512
Pencairan Dana Cadangan	-				
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-			
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinajaman Daerah	78.975.000	-	55.362.500	-	-
Penerimaan Piutang Daerah					
Jumlah Penerimaan	**265.528.816.825**	**291.800.636.661**	**258.310.171.926**	219.471.861.483	155.741.332.512
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				-	-
Pembentukan Dana Cadangan	-				
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.000.000.000	-			3.000.000.000
Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	24.184.908.000	9.000.000.000	-
Jumlah Pengeluaran	**7.000.000.000**	-	**24.184.908.000**	**9.000.000.000**	**3.000.000.000**
PEMBIAYAAN NETTO	**258.528.816.825**	**291.800.636.661**	**234.125.263.926**	**210.471.861.483**	**152.741.332.512**

Sumber: Laporan Keuangan Daerah Kota Salatiga 2017-2021, diolah.

4. Evaluasi atas Kebijakan Periode Sebelumnya

Gambaran pencapaian, baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan selama dua periode tersebut menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, khususnya untuk pendapatan dan belanja. Kecenderungan yang semakin meningkat dari sisi pendapatan menunjukkan indikasi positif semakin membaiknya kinerja pemerintah kota, khususnya bila hal ini dikaitkan dengan pencapaian penerimaan pendapatan asli daerah.

Namun demikian, bila dibandingkan dengan proyeksi pendapatan yang disusun untuk periode sebelumnya, khususnya untuk tahun 2017-2021, ternyata secara realisasi proyeksi kurang dari 100%. Secara total realisasi pendapatan dalam kurun waktu berjalan kurang dari 100% dan terdapat kecenderungan realisasi yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, kekurangan pencapaian pendapatan sebesar 2,7% atau realisasi sebesar 97,3%. Pencapaian ini semakin menurun pada tahun-tahun berikutnya; dan mencapai kekurangan pencapaian pendapatan daerah sebesar 21,29% atau hanya terealisasi sebesar 78,71%. Grafik berikut ini menunjukkan persentase kekurangan/kelebihan pencapaian pendapatan daerah dan unsur-unsurnya.

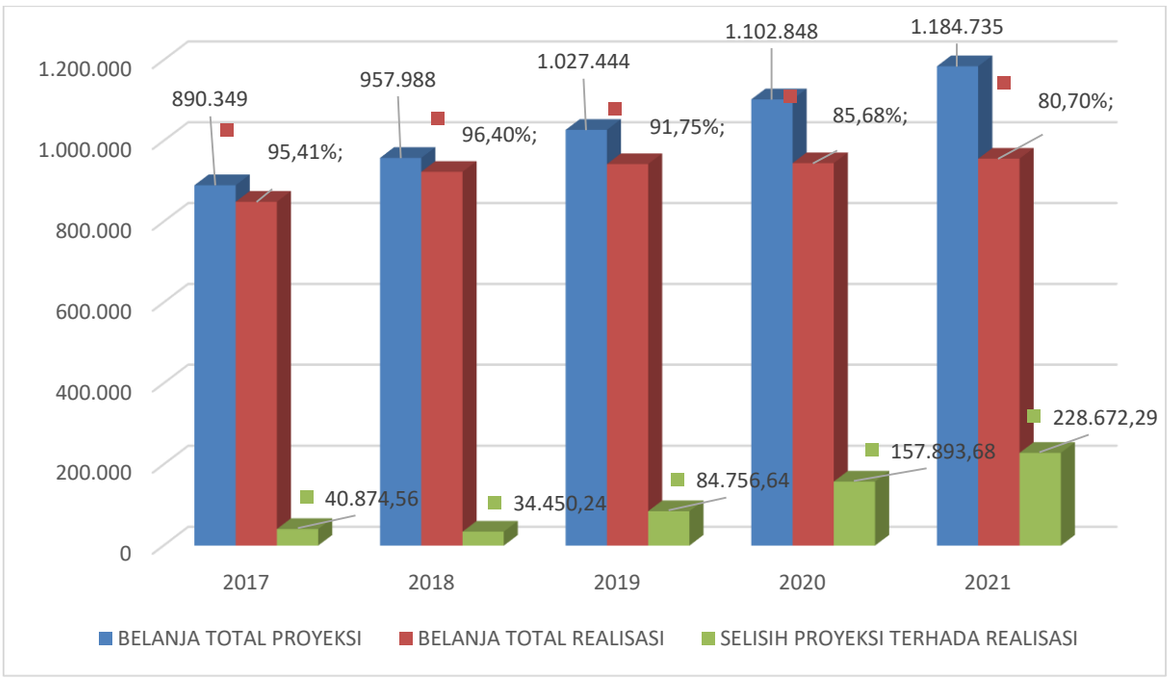


Gambar 3.7 Prosentasi Kekurangan/Kelebihan Pencapaian Realisasi Pendapatan Daerah terhadap Proyeksi Pendapatan Tahun 2017-2021

Gambar 3.7 menunjukkan dari berbagai unsur pendapatan daerah yang ada, dana perimbangan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap tidak tercapainya realiasasi sebagaimana diproyeksikan. Kekurangan realisasi ini cenderung semakin besar dalam periode waktu ini, dari kekurangan sebesar 9,03% pada tahun 2017 (atau terealisasi sebesar 90,97%) menjadi 33,78% atau terealisasi hanya sebesar 66,22%. Kekurangan realisasi ini cenderung tidak diimbangi dengan

surplus realisasi unsur pendapatan daerah yang lain. Unsur pendapatan daerah yang lain, dalam hal ini PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, cenderung mengalami fluktuasi realisasi. PAD ini mengalami realisasi yang berfluktuasi; pada tahun 2017 realisasi ini mengalami kelebihan realisasi sebesar 16,91% (atau terealisasi 116,91%), pada tahun-tahun berikutnya mengalami realisasi kurang dari 100%, namun pada tahun 2021 realisasi melebihi 100%, yaitu sebesar 105,05% atau kelebihan 5,05%. Unsur pendapatan lain yang persentase realisasi cenderung mengalami fluktuasi adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Tahun 2021 realisasi mencapai 103,79% atau kelebihan 3,79%. Namun demikian, kelebihan realisasi terhadap proyeksi kedua unsur pendapatan daerah ini belum cukup untuk mengimbangi kekurangan realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan. Pengamatan lebih lanjut menunjukkan bahwa berbagai unsur dana perimbangan sebagian besar tidak mencapai 100% dari proyeksi yang ditetapkan.

Realitas tidak terpenuhinya realisasi anggaran sesuai dengan proyeksi pendapatan tentu saja harus diimbangi dengan kemampuan pemerintah kota dalam mengefisienkan belanja, terutama belanja operasionalnya. Hal ini sangat diperlukan untuk mencegah defisit anggaran. Hasil pengamatan terhadap data proyeksi dan realisasi menunjukkan bahwa selama periode tahun 2017 – 2021, belanja total relatif dapat ditekan; realisasi terhadap belanja secara menyeluruh masih dapat dikendalikan khususnya dalam rangka untuk mencegah terjadinya defisit anggaran. Gambar 3.8 berikut ini menunjukkan tingkat capaiaan realisasi belanja terhadap proyeksi yang telah ditetapkan.



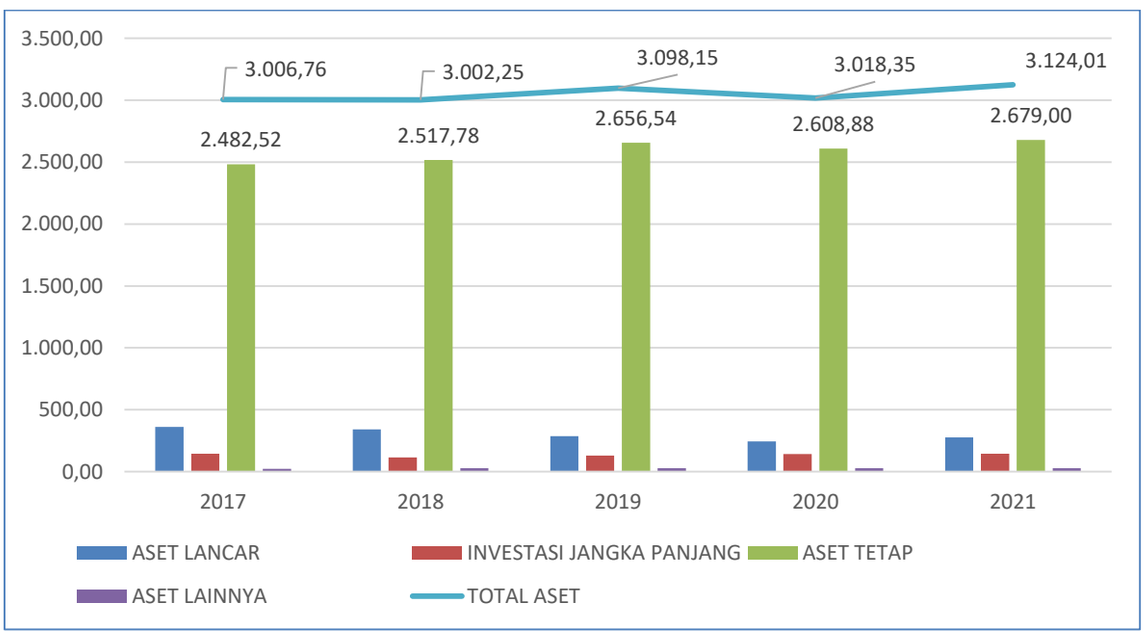
Gambar 3.8 Tingkat Capaian Realisasi Belanja terhadap Proyeksi Belanja tahun 2017-2021

Gambar 3.8 mengkonfirmasi adanya realisasi belanja yang masih lebih kecil daripada proyeksinya pada tahun 2017-2021. Tingkat realisasi belanja terhadap proyeksi cenderung mengalami penurunan; pada tahun 2017 realisasi mencapai 95,41%, namun pada tahun 2021 realisasi hanya 80,70%. Penurunan realisasi belanja ini menjadi (upaya) logis yang harus dilakukan untuk menyeimbangkan capaian pendapatan yang juga tidak mencapai target proyeksi dalam pada periode tahun tersebut. Pemerintah kota dituntut lebih efisien dalam penggunaan anggaran di tengah tidak optimalnya pencapaian pendapatan daerah.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah merupakan instrumen yang digunakan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca daerah memuat informasi jumlah aset daerah serta jumlah kewajiban dan ekuitas dana setiap tahunnya.

Aset Kota Salatiga secara umum mengalami peningkatan; pada periode 2017-2020, asset mengalami kenaikan dari Rp. 3.006,76 Miliar pada tahun 2017 menjadi Rp3.124,01 Miliar pada tahun 2021 atau naik sebesar hanya 3,89 persen. Kenaikan jumlah asset ini relatif kecil, namun demikian bila sebenarnya kenaikan asset secara tajam terjadi pada tahun 2017; pada saat itu asset telah mengalami kenaikan 48,49 persen. Kenaikan ini disebabkan karena penambahan nilai asset tetap yang sangat tajam pada saat itu; pada tahun 2016 nilai aset tetap adalah sebesar Rp.1.537,580 Miliar, pada tahun berikutnya mengalami kenaikan menjadi Rp.2.482,52 Miliar.



Gambar 3. 9 Perkembangan Jumlah Nilai Aset Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (Dalam Milyar)

Pemerintah Kota Salatiga masih mempunyai kewajiban yang kesemuanya merupakan kewajiban jangka pendek. Tabel 3.9 menunjukkan kewajiban jangka pendek yang ada ditimbulkan dari kewajiban jangka pendek lainnya, utang belanja pegawai dan uang belanja barang dan jasa. Namun demikian, dilihat dari nilai asset yang dimiliki, kemampuan membayar utang-utang yang ada tergolong tinggi, baik dengan melihat ketersediaan kas maupun aktiva lancarnya. Analisis dengan menggunakan rasio likuiditas secara rinci ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel 3. 5 Analisis Rasio Keuangan Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio lancar (current ratio)	27.98	14.05	15.42	6.92	8.94
2	Rasio quick (quick ratio)	22.63	10.68	11.88	4.46	6.45
3	Rasio total hutang terhadap total aset	0.0043	0.0078	0.0060	0.0112	0.0096
4	Rasio hutang terhadap modal	0.0043	0.0079	0.0061	0.0114	0.0097

Sumber: Laporan Keuangan Daerah, diolah

Secara umum kondisi neraca daerah Kota Salatiga tergolong baik, terlihat dari rasio lancar dan rasio *quick* yang mencapai lebih dari angka 1, dan rasio total hutang terhadap total aset dan rasio hutang terhadap modal yang bernilai kurang dari 0,1. Kondisi ini tentunya perlu dijaga dan dipertahankan sehingga kondisi keuangan daerah tetap dalam kondisi sehat.

Perkembangan neraca daerah Kota Salatiga selama tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 6 Neraca Keuangan Daerah Kota Salatiga Tahun 2012-2020 (Dalam Jutaan Rupiah)

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	**ASET**	-	-	-	-	
2	**ASET LANCAR**	-	-	-	-	
3	Kas di Kas Daerah	273.452,30	253.095,33	201.692,77	127.112,08	96.001,01
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	495,63	8,03	22,86	-
5	Kas di Bendahara Pengeluaran BLU RSUD	15.137,39	-	-	-	-
6	Kas di Bendahara Penerimaan	36,97	7,30	22,86	16,57	104,44
7	Kas di Bendahara Penerimaan BLU RSUD	891,94	-	-	-	-
8	Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	862,13	-	-	-	-
9	Kas di BLUD	-	-	-	-	43.135,96
10	Kas di Bendahara BOS	-	-	-	-	3.281,64
11	Kas Lainnya	114,36	1.028,48	414,81	979,24	986,09
12	Investasi Jangka Pendek-Deposito	-	-	-	-	
13	Belanja Dibayar Dimuka	851,10	1.328,35	1.328,35	2.024,10	2.637,28
14	Piutang Pajak	13.710,68	14.734,44	-	-	16.420,16
15	a. Piutang Pajak	-	-	13.710,68	14.734,44	
16	b. Cadangan Kerugian Piutang Pajak	(11.837,36)	(10.630,23)	(10.630,23)	(13.908,64)	
17	Piutang Retribusi	63,76	55,90	29,20	35,81	27,79
18	a. Piutang Retribusi	63,76	55,90	-	-	
19	b. Cadangan Kerugian Piutang Retribusi	-	-	-	-	
20	Piutang hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	17.913,13	17.913,13
21	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	-	-	-	23.414,71	23.414,71
22	Piutang Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan	-	-	-	3.401,94	3.401,94

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
23	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
24	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	-	-	-	6.512,35	6.512,35
25	Bagian Lancar Tagihan Kepada Dinas/Satuan Kerja	-	-	-	-	-
26	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	-
27	Piutang Lainnya	-	-	-	-	-
28	a. Piutang Lainnya	38.378,28	48.584,07	2.664,40	-	-
29	b. Cadangan Kerugian Piutang Lainnya	-	-	-	-	-
30	Piutang Dana Bagi Hasil	7.341,33	2.682,39	6.264,16	-	-
31	Persediaan	19.403,29	25.136,02	17.890,95	27.856,54	76.670,35
32	**Jumlah Aset Lancar**	359.826,08	341.881,48	285.377,21	242.856,54	275.398,72
33	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	-	-	-	-	
34	**INVESTASI NON PERMANEN**	-	-	-	-	
35	Pinjaman Bergulir	1,15	1.604,89	-	-	-
36	Penyisihan Pinjaman Bergulir	-	-	-	-	-
37	Pinjaman Tidak Bergulir	187,10	123,88	-	-	-
38	Penyisihan Pinjaman Tidak Bergulir	-	-	-	-	-
39	**Jumlah Investasi Non Permanen**	-	-	-	-	-
40	**INVESTASI PERMANEN**	-	-	-	-	
41	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	142.008,21	112.808,23	128.181,46	140.649,19	143.649,19
42	Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-
43	Jumlah Investasi Permanen	142.008,21	112.808,23	-	-	143.649,19
44	**Jumlah Investasi Jangka Panjang**	143.345,65	114.537,00	128.181,46	140.649,19	143.649,19
45	**ASET TETAP**	-	-	-	-	-
46	Tanah	1.479.384,25	1.435.651,83	1.471.067,00	1.448.172,91	1.480.338,96

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
47	Peralatan dan Mesin	402.922,06	469.400,30	580.392,43	526.848,20	663.190,21
48	Gedung dan Bangunan	420.278,54	513.393,75	690.841,14	648.046,60	765.754,90
49	Jalan, Irigasi dan Jaringan	826.370,73	788.459,06	897.368,76	831.955,48	926.183,00
50	Aset Tetap Lainnya	35.148,65	30.758,47	33.874,15	31.340,85	34.555,73
51	Konstruksi dalam Pengerjaan	51.145,02	51.399,65	10.462,13	10.134,79	11.908,96
52	Akumulasi Penyusutan	(732.731,64)	(771.286,54)	(1.027.464,34)	(887.614,68)	(1.202.930,85)
53	**Jumlah Aset Tetap**	2,482,517.61	2,517,776.52	2,656,541.26	2,608,884.14	2.679.000,92
54	**DANA CADANGAN**	-	-	-	-	-
55	Dana cadangan	-	-	-	-	-
56	**Jumlah Dana Cadangan**	-	-	-	-	-
57	**ASET LAINNYA**	-	-	-	-	-
58	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	21.065,95	28.050,45	28.050,45	25.964,26	-
59	Aset Tak Berwujud	921,27	10.767,39	13.454,56	15.833,58	-
60	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(5.123,12)	(7.166,80)	(9.776,61)	(12.575,52)	25.964,26
61	Aset Lain-lain	23.037,12	106.858,74	17.981,47	54.165,78	16.673,12
62	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3,00	3,00	-	-	(14.275,47)
63	**Jumlah Aset Lainnya**	48.735,53	138.512,79	49.712,87	83.389,10	54.484,87
64	**JUMLAH ASET**	3.024.424,88	3.112.709,79	3.072.155,68	3.122.697,43	82.846,78
						3.180.895,60
65	**KEWAJIBAN**	-	-	-	-	
66	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	-	-	-	-	
67	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-	33,62	-	-	6,19
68	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
69	Pendapatan Diterima Dimuka	3.257,28	3.898,67	2.778,73	2.079,58	4.763,85
70	Utang Belanja	9.542,12	20.361,03	15.588,20	32.900,02	25.917,15

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
71	a. Utang Belanja Pegawai	3.236,64	3.351,27	-	-	-
72	b. Utang Belanja Barang dan Jasa	5.832,20	8.333,51	-	-	-
73	Utang Belanja Modal	473,27	8.676,26	-	-	-
74	Kewjiban Jangka PendeK Lainnya	62,50	44,68	138,97	140,53	92,93
75	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek**	12.861,90	24.338,00	18.505,89	35.120,13	30.780,11
76	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	-	-	-	-	-
77	Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
78	Utang Dalam Negeri-Pemda Otonom Lainnya	-	-	-	-	-
79	Utang Dalam Negeri -BUMN/BUMD	-	-	-	-	-
80	Utang Dalam Negeri -Bank/Lembaga Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-
81	**Jumlah Kewajiban Jangka Panjang**	-	-	-	-	-
82	**JUMLAH KEWAJIBAN**	24.338,00	12.861,90	18.505,89	35.120,13	30.780,11
83	**EKUITAS**	-	-	-	-	-
84	Ekuitas Dana Lancar	-	-	-	-	-
85	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	-	-	-	-
86	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di BLU RSUD	-	-	-	-	-
87	Pendapatan Yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-
88	Pendapatan Yang Ditangguhkan di BLU RSUD	-	-	-	-	-
89	Penerimaan Pembiayaan Yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-
90	Kas di Bendahara Keuangan Non-Silpa	-	-	-	-	-
91	Cadangan Belanja Dibayar Dimuka	-	-	-	-	-
92	Cadangan Piutang	-	-	-	-	-

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
93	Cadangan Persediaan	-	-	-	-	-
94	Cadangan Bagian Lancar TPTGR	-	-	-	-	-
95	Cad. Bagian Lancar Tagihan Kepada Dinas/Satuan Kerja	-	-	-	-	-
96	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-	-	-	-	-
97	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Bagian Lancar Untuk Jangka Panjang	-	-	-	-	-
98	Jumlah Akuitas Dana Lancar	-	-	-	-	-
99	**Ekuitas Dana Yang Diinvestasikan**	-	-	-	-	-
100	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	-	-	-	-	-
101	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	-	-	-	-	-
102	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	-	-	-	-	-
103	Dana yg Disediakan Untuk Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-
104	Jumlah Ekuitas Desa Yang Diinvestasikan	-	-	-	-	-
105	Ekuitas Dana Yang Dicadangkan	-	-	-	-	-
106	Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan	-	-	-	-	-
107	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	-	-	-	-	-
108	**JUMLAH EKUITAS**	3.021.562,98	3.088.271,79	3.053.649,79	3.087.577,30	3.131.079,40
109	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS**	3.034,42	3.112.709,79	3.072.155,68	3.122.697,43	3.161.859,51

Sumber: BKD Kota Salatiga, diolah.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran mempunyai peran sentral dalam pencapaian berbagai tujuan strategis. Selain terus meningkatkan upaya peningkatan kesejahteraan, yang ditunjukkan dengan pemberian insentif/kompensasi finansial yang sepadan dengan kinerja pegawai, anggaran perlu difokuskan dalam berbagai kegiatan kegiatan strategis yang ditunjukkan dengan komposisi belanja modalnya. Selama tahun 2017-2021[1] pemenuhan belanja aparatur cenderung mengalami kenaikan. Namun demikian pada tahun 2021, jumlah belanja aparatur mengalami penurunan. Hal ini tidak lepas dari upaya pemerintah untuk mengurangi belanja apatur dan disisi lain terus berupaya untuk meningkatkan belanja pelayanan publiknya, yang salah satunya ditunjukkan dengan memberikan komposisi belanja modal yang (semakin) besar.

Data menunjukkan bahwa selama tahun 2017-2021 alokasi belanja untuk aparatur menunjukkan trend yang semakin meningkat; anggaran belanja pegawai meningkat dari sebesar Rp. 379.246.014.175 untuk belanja langsung pada tahun 2017 menjadi Rp. 941,127,761,754 pada tahun 2021. Belanja pegawai ini mengalami kenaikan yang sangat tajam, hampir 3 kali lipat dalam kurun waktu 5 tahun terakhit. Komposisi belanja pegawai ini relatif cukup besar, dari 44,64 persen pada tahun 2017 menjadi sebesar 53,66 persen pada tahun 2021. Komposisi belanja pegawai ini secara umum masih lebih besar dibandingkan dengan belanja modal dalam 5 tahun terakhir. Belanja modal cenderung mengalami fluktuasi komposisi, sementara belanja pegawai menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Gambaran lengkap mengenai kebijakan proporsi penggunaan anggaran tampak dalam Tabel 3.7.

[1] Data tahun 2012-2016 tidak diperbandingkan mengingat format anggaran dengan akun-akun anggaran yang berbeda.

Tabel 3. 7 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (Rupiah)

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
BELANJA	**849.474.262.275**	**923.538.238.485**	**942.687.426.593**	**944.954.212.904**	**1.781.652.150.972**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**339.857.021.091**	**368.016.095.795**	**394.807.219.917**	**408.100.906.896**	**29.658.767.873**
Belanja Pegawai	324.197.827.494	347.280.147.108	365.764.585.917	357.469.552.291	14.934.956.909
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	9.363.600.000	12.347.600.000	23.131.093.000	18.602.331.000	-
Belanja Bantuan Sosial	5.552.720.000	3.714.131.000	5.866.241.000	2.632.655.000	12.955.460.964
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	-	1.768.350.000
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa	616.646.144	616.646.144	-	-	-
Belanja Tidak Terduga	126.227.453	4.057.571.543	45.300.000	29.396.368.605	-
					211.145.945
BELANJA LANGSUNG	**509.617.241.184**	**555.522.142.690**	**547.246.311.440**	**536.195.262.044**	**1.751.993.383.099**
Belanja Pegawai	55.048.186.681	61.222.578.917	84.463.175.340	90.201.804.669	941.127.761.754
Belanja Barang dan Jasa	236.721.065.959	272.277.581.785	279.058.494.680	271.862.126.785	411.930.430.505
Belanja Modal	217.847.988.544	222.021.981.988	183.724.641.420	174.131.330.590	398.935.190.840
TRANSFER			**633.895.236**	**658.043.964**	
TOTAL BELANJA PEGAWAI	**379.246.014.175**	**408.502.726.025**	**450.227.761.257**	**447.671.356.960**	**956.062.718.663**
PROPORSI BELANJA PEGAWAI	44.64%	44.23%	47.76%	47.37%	53.66%
PROPORSI BELANJA MODAL	25.65%	24.04%	19.49%	18.43%	22.39%

Sumber: BKD Kota Salatiga Tahun 2021. (Diolah)

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pendanaan pembangunan daerah diluar kapasitas pendapatan daerah serta kewajiban-kewajiban yang menjadi beban Pemerintah Daerah. Analisis pembiayaan daerah tidak dapat terlepas dari kondisi defisit ataupun surplus yang terjadi dalam APBD. Dalam 5 tahun terakhir 2017-2021, Pemerintah Kota Salatiga menetapkan anggaran defisit (lihat Tabel 3.6); untuk itu selain mengupayakan optimalisasi penerimaan anggaran pendapatan dan efisiensi belanja, Pemerintah Kota juga berupaya untuk menutup defisit dengan menganggarkan penerimaan dari sumber lain (mengupayakan pembiayaan). Tahun 2017, terdapat defisit anggaran sebesar Rp.19.940.309.000 dan demikian juga pada tahun-tahun selanjutnya (kecuali tahun 2018), terjadi defisit anggaran. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Pemerintah Kota Salatiga masih memiliki sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) pada tahun sebelumnya.

Dalam perjalanannya, realisasi anggaran penerimaan tidak tercapai, disisi lain anggaran belanja juga mampu ditekan sehingga tidak terealisasi seluruhnya, Secara umum realisasi anggaran menghasilkan defisit anggaran, namun demikian defisit anggaran ini relatif dapat ditutup dari penerimaan pembiayaan dan tetap menghasilkan surplus riil. Perkembangan realisasi anggaran penerimaan dan belanja, sumber pembiayaan untuk menutup surplus riil untuk kurun waktu 2017-2021 tampak dalam Tabel 3.8. Tabel 3.8 menunjukkan adanya defisit realisasi anggaran setiap tahun selama tahun 2017-2021, namun demikian surplus defisit ini mampu ditutup dari penerimaan pembiayaan. Komposisi penutup defisit ini jumlahnya jauh lebih besar daripada defisit anggaran, sehingga selama periode tahun tersebut, Pemerintah Kota Salatiga tetap mendapatkan sisa lebih (surplus riil).

Tabel 3. 8 Perhitungan Defisit Riil Anggaran Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (Rupiah)

Uraian	Target RPJMD				
	2017	2018	2019	2020	2021
PENDAPATAN	**870.408.510.000**	**967.988.473.800**	**931.351.872.000**	**885.561.351.000**	**916.251.265.000**
BELANJA	**890.348.819.000**	**957.988.473.800**	**1.165.421.773.000**	**1.096.019.087.000**	**1.068.992.597.512**
SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN	-19.940.309.000	10.000.000.000	-234.069.901.000	-210.457.736.000	-152.741.332.512

Sumber: BKD Kota Salatiga, 2021

Tabel 3. 9 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, seta Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2017-2021 (Rupiah)

URAIAN	Realisasi				
	2017	2018	2019	2020	2021
PENDAPATAN	882.746.082.111	889.992.411.250	928.019.899.150	890.223.683.933	940.320.409.637
BELANJA	849.474.262.275	923.538.238.485	942.687.426.593	944.954.212.904	956.062.718.663
SURPLUS/DEFISIT	-33.271.819.836	-33.545.827.235	- 14.667.527.443	-54.730.528.971	-15.742.309.026
KOMPOSISI PENUTUP DEFIST					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	265.449.841.825	291.800.636.661	258.254.809.426	219.457.736.483	155.418.532.450
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-		
Penerimaan Pinjaman Daerah	78.975.000	-	-		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	55.362.500	14.125.000	
Total Penerimaan Pembiayaan Daerah	**265.528.816.825**	**291.800.636.661**	**258.310.171.926**	**219.471.861.483**	**155.418.532.450**

Sumber: BKD Kota Salatiga, 2021

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Proyeksi berdasarkan Data Masa Lalu

1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan Daerah untuk tahun 2023-2026 secara umum didasarkan pada perkembangan penerimaan pendapatan ini pada tahun-tahun yaitu kurun waktu 2017-2021. Trend pertumbuhan anggaran dalam kurun waktu yang semakin panjang secara konseptual merefleksikan bagaimana kemampuan pencapaian penerimaan pendapatan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daeerah dalam menghimpun pendapatan dari berbagai sumber yang ada. Namun demikian, penentuan anggaran ini juga mempertimbangkan karakteristik pendapatan daerah, sehingga penentuan anggaran berdasarkan trend relatif kurang tepat; sebagai contoh terkait dengan dana perimbangan, yang penentuan besarannya sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.

Mengingat karakteristik pendapatan yang berbeda, proyeksi pendapatan diperhitungkan dari perkembangan masing-masing sumber pendapatan daerah dan berbagai asumsi yang diperkirakan akan mempengaruhi penerimaan dimasa mendatang. Sebagai contoh perkembangan yang terjadi pada penerimaan pendapatan asli daerah, khususnya penerimaan pajak-pajak daerah tidak akan lepas dari pertimbangan pertumbuhan ekonomi. Pandemi Covid-19, yang mempengaruhi hampir sebagian besar sektor ekonomi, memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam penerimaan pajak-pajak terkait, misal penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan (lihat tabel 3.1). Tabel 3.1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah, khususnya untuk pajak hotel, restoran dan hiburan. Terkait dengan itu, beberapa asumsi digunakan dalam memproyeksi besaran anggaran yang pendapatan daerah.

a. Pertumbuhan ekonomi didasarkan pada target pertumbuhan ekonomi nasional yang ditetapkan yaitu 3,69 persen. Pertumbuhan ekonomi ekonomi tingkat nasional ini masih diatas pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintahan provinsi, yaitu 3,32 persen.
b. Selama ini pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh Kota Salatiga adalah diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, asumsi yang digunakan dalam penetapan anggaran ini akan mengikuti pertumbuhan ekonomi nasional.
c. Asumsi perhitungan PAD menggunakan pendekatan pertumbuhan rata-rata untuk setiap jenis pajaknya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pada tahun 2020 dan 2021, beberapa komponen pajak daerah terkoreksi secara signifikan akibat pandemi Covid-19.
d. Pada komponen pajak yang terdampak secara signifikan akibat pandemi Covid-19 (dalam hal ini pajak hotel, restoran dan pajak hiburan) dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang sama, namun demikian untuk data ditahun

terjadinya penurunan secara ekstrim akibat pandemi COVID-19 dikeluarkan dalam penghitungan. Penerimaan pajak untuk tahun tersebut (dalam hal ini tahun 2020) diasumsikan sama dengan data penerimaan rata-rata selama periode pengamatan.

e. Penghitungan proyeksi pajak menggunakan data dari tahun 2012 sampai dengan 2021. Penggunaan proyeksi dengan periode waktu yang lebih lama diharapkan dengan memberikan hasil rata-rata yang lebih halus; tidak menghasilkan proyeksi yang terlalu optimis ataupun sebaliknya.
f. Pajak Air Tanah diproyeksikan naik 3% per tahun. Pajak ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada dua tahun terakhir dan hal ini disebabkan karena adanya kenaikan tarif. Pada awal tahun terjadinya perubahan tarif tentu saja akan terjadi kenaikan signifikan, namun pada titik waktu tertentu diperkirakan pertumbuhan tersebut akan melambat. Rata-rata pertumbuhan pajak ini sebelum terjadi kenaikan tarif adalah 4,1%. Proyeksi pertumbuhan 3%, lebih rendah daripada rata-rata kenaikan tahun sebelum, dinilai cukup rasional dikarenakan adanya kenaikan tarif
g. Perhitungan proyeksi dana perimbangan tidak mengalami kenaikan untuk semua jenis dana perimbangan. Penentuan tidak terjadinya kenaikan sebetulnya masih dalam pertimbangan yang relatif optimis bahwa pemerintah pusat tidak menerapkan kebijakan menurunkan pemberian dana perimbangan ini.

Kebijakan pendapatan merupakan rencana jangka menengah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan agar kapasitas fiskal daerah mampu menopang upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan pendapatan tahun 2023-2026 difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah dan mendorong peningkatan dana perimbangan melalui :

a. Optimalisasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah (ekstensifikasi dan intensifikasi).
b. Peningkatan pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan aset daerah yang berdaya guna dan berhasil guna.
c. Peningkatan sistem pelayanan unit pelayanan teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
d. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dalam pengelolaan pendapatan daerah.
e. Peningkatan koordinasi dengan OPD penghasil.
f. Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana untuk peningkatan investasi dan sumber-sumber pendapatan.
g. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan perusahaan daerah.
h. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

i. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan terkait dana perimbangan.
j. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah melalui revisi perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

Hasil proyeksi pendapatan daerah Kota Salatiga tahun 2023-2026 secara rinci ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3. 10 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Uraian	2023	2024	2025	2026
1	**PENDAPATAN**	**883.472.647.000**	**888.810.704.000**	**890.300.309.000**	**894.981.459.000**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**250.752.407.000**	**256.455.419.000**	**257.945.024.000**	**262.626.174.000**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	61.929.500.000	65.589.500.000	67.014.500.000	67.995.500.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	10.469.320.000	10.922.919.000	10.957.524.000	11.154.674.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.643.000.000	19.143.000.000	19.173.000.000	19.673.000.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	158.710.587.000	160.800.000.000	160.800.000.000	163.803.000.000
2.2	**DANA PERIMBANGAN**	**553.489.213.000**	**553.124.258.000**	**553.124.258.000**	**553.124.258.000**
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	25.931.716.000	25.931.716.000	25.931.716.000	25.931.716.000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	109.543.931.000	109.178.976.000	109.178.976.000	109.178.976.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	418.013.566.000	418.013.566.000	418.013.566.000	418.013.566.000
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**79.231.027.000**	**79.231.027.000**	**79.231.027.000**	**79.231.027.000**
1.3.1	Hibah Dana BOS				
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	67.046.027.000	67.046.027.000	67.046.027.000	67.046.027.000
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Propinsi	**12.185.000.000**	**12.185.000.000**	**12.185.000.000**	**12.185.000.000**

Sumber: Penghitungan Tim

2. Proyeksi Belanja dan pengeluaran Pembiayaan yang Bersifat Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis Analisis proyeksi belanja dan pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah selama kurun waktu lima tahun. Format laporan keuangan yang dibuat mengikuti ketentuan dalam Permendagri Nomor 60 tahun 2020 yang membagi belanja menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja tidak terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi belanja dilakukan dengan menggunakan pendekatan linear. Namun demikian, penentuan belanja ini juga mempertimbangkan anggaran pendapatan dan ketersediaan surplus anggaran tahun-tahun sebelumnya.

Mencermati pola belanja dalam laporan keuangan yang tersedia (2017-2021), dapat diambil beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Pola perubahan belanja operasi, khususnya belanja pegawai pegawai dan belanja barang menunjukkan perubahan yang relatif konstan. Oleh karena itu, proyeksi terhadap belanja ini menggunakan pendekatan linear
2. Belanja-belanja rutin diproyeksikan meningkat, namun demikian proyeksi peningkatannya dikendalikan tidak lebih dari 3% per tahun Disisi lain, Pemerintah Kota Salatiga memproyeksikan kenaikan belanja modal yang tinggi, dengan kisaran 7%-10% per tahun Peningkatan ini merupakan refleksi dari komitmen untuk meningkatkan layanan publik, yang pada gilirannya diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi kenaikan pendapatan asli daerah.
3. Pola perubahan belanja modal sangat berfluktuasi, tidak sama antar satu belanja dengan belanja lain. Namun demikian, dikarenakan karakteristik belanja ini yang bersifat stategis terhadap peningkatan pelayanan publik, maka target belanja ini dinaikkan sesuai (akan linear) dengan perubahan pendapatan. Idealnya porsi belanja ini akan terus meningkat seiring dengan komitmen untuk meningkatkan pelayanan pubiknya. Proyeksi kenaikan bervariasi antara 2-7%, dengan standar deviasi sekitar 2%. Selama periode ini, Pemerintah Kota Salatiga berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Komponen pendapatan daerah lain, yang sangat dominan, yaitu dana perimbangan, tidak diproyeksikan meningkat, dikarenakan dalam tahun-tahun kedepan pemerintah pusat cenderung untuk mengurangi distribusi pendapatan transfer ke pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah kota untuk lebih meningkatkan kapasitas fiskalnya dengan mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Tabel 3. 11 Proyeksi Belanja Tahun 2023-2026

	2023	2024	2025	2026
BELANJA	**876.095.311.126**	**907.675.423.640**	**941.243.202.137**	**976.971.518.464**
BELANJA OPERASI	**679.635.692.145**	**693.228.405.988**	**707.092.974.107**	**721.234.833.590**
Belanja Pegawai	447.671.356.960	456.624.784.099,20	465.757.279.781,18	475.072.425.376,81
Belanja Barang	217.489.701.428	221.839.495.456,56	226.276.285.365,69	230.801.811.073,01
Belanja Bunga				
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah	11.659.914.867,60	11.893.113.164,95	12.130.975.428,25	12.373.594.936,82
Belanja Bantuan Sosial	2.814.718.889,18	2.871.013.266,96	2.928.433.532,30	2.987.002.202,95
Belanja Bantuan Keuangan				
Belanja Bantuan Keuangan kepada Vertikal Dalam Negeri				
BELANJA MODAL	**163.288.354.450**	**179.617.189.895**	**197.578.908.884**	**217.336.799.773**
Belanja Tanah	738.400.555,15	812.240.610,66	893.464.671,73	982.811.138,90
Belanja Peralatan dan Mesin	47.500.563.818,27	52.250.620.200,09	57.475.682.220,10	63.223.250.442,11
Belanja Gedung dan Bangunan	43.415.343.718,30	47.756.878.090,13	52.532.565.899,14	57.785.822.489,05
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.043.971.870,01	53.948.369.057,01	59.343.205.962,71	65.277.526.558,98
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.366.814.036,73	2.603.495.440,40	2.863.844.984,44	3.150.229.482,89
Belanja Aset Lainnya	223.260.451,45	245.586.496,59	270.145.146,25	297.159.660,88
Belanja Modal Aset tidak Berwujud	20.000.000.000	22.000.000.000	24.200.000.000	26.620.000.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	**32.409.496.387**	**34.029.971.206**	**35.731.469.766**	**37.518.043.255**
Belanja Tidak Terduga	**32.409.496.387**	**34.029.971.206**	**35.731.469.766**	**37.518.043.255**
TRANSFER	**761.768.144**	**799.856.551**	**839.849.379**	**881.841.847**
Belanja Bagi Hasil	761.768.144	799.856.551	839.849.379	881.841.847
Belanja Bantuan Keuangan				

Sumber: Penghitungan Tim

3. Catatan Atas Kebijakan (Proyeksi) Periode Sebelumnya

Proyeksi anggaran yang dibuat untuk periode 2023 – 2026 pada dasarnya merupakan upaya penetapan anggaran pada tingkatan pencapaian yang lebih realistis, namun tetap dilandasi dengan optimisme dalam pencapaian anggaran, khususnya anggaran penerimaan dan upaya untuk tetap melakukan efisiensi pada belanja-belanja, khususnya belanja-belanja yang kurang produktif, yang tidak terkait langsung dengan peningkatan layanan publik.

Belajar dari kebijakan (proyeksi) periode sebelumnya (dalam hal ini tahun 2017-2021), terdapat beberapa catatan asumsi kebijakan yang perlu dievaluasi dan dijadikan pertimbangan dalam penentuan target (proyeksi) periode 2023-2026. Beberapa catatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Proyeksi pendapatan daerah yang disusun dalam periode 2017 – 2021 ditetapkan sangat optimistik, kurang memperhatikan potensi yang dapat terhimpun dari masing-masing unsur pendapatan. Hal ini terlihat dalam capaian realisasi yang lebih rendah daripada proyeksi untuk periode tersebut. Data menunjukkan kisaran realisasi antara 80 – 90 %.
b. Salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya proyeksi pendapatan ini adalah terkait dengan penetapan dana perimbangan yang terlalu besar. Dana perimbangan yang bersifat hibah murni seharusnya tidak perlu dianggarkan terlalu tinggi, misalnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dalam proyeksi 2017-2021, kedua dana perimbangan ini selalu diproyeksikan selalu meningkat dengan kisaran peningkatan (ada pertumbuhan) sebesar 10% setiap tahunnya. Realitas menunjukkan tingkat realisasi DAU dalam 3 tahun terakhir tidak pernah mencapai target, demikian pula dengan DAK yang kisaran capaiannya sangat rendah, yaitu kurang lebih 50%. Disisi, data menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan ini tidak mencapai harapan; rata-rata pertumbuhan anggaran ini cenderung negatif selama periode 2017-2021.

   Berkaitan dengah hal itu, proyeksi anggaran perimbangan tidak diproyeksikan meningkat, terlebih dengan kebijakan pemerintah pusat yang terus mendorong tingkat ketergantugan fiscal pemerintah daerah. Namun demikian, sesuai dengan karakteristiknya sebagai dana hibah, Pemerintah Kota Salatiga perlu mengajukan usulan permohonan dana hibah ini yang didukung dengan komitmen untuk peningkatan layanan publik, yang ditunjukkan dengan meningkatnya belanja-belanja terkait, misalnya belanja modal (pembangunan). Pengajuan ini juga harus didukung dengan menunjukkan kapasitas fiskal daerah (khususnya terkait dengan potensi penerimaan dari PAD), sehingga diperoleh gambaran celah fiskal, yang diharapkan dapat didanai dari dana perimbangan yang diajukan.
c. Meskipun tingkat capaian pendapatan daerah tidak sesuai dengan proyeksi, namun pendapatan asli daerah menunjukkan capaian yang berbeda. Gambar

3.7 menunjukkan tingkat capaian yang positif terkait dengan pendapatan ini. Pengamatan lebih lanjut terhadap elemen PAD menunjukkan bahwa baik pajak daerah, retribusi daerah, maupun komponen PAD lainnya mengalami pertumbuhan rata-rata positif selama tahun 2017-2021. Secara umum rerata pertumbuhan PAD selama 5 tahun tersebut adalah sebesar 7,17%.

Namun demikian, mengingat perekonomian dalam masa pemulihan akibat pandemi COVID 19, rerata pertumbuhan proyeksi PAD untuk tahun 2023-2026 ditetapkan kurang lebih 3%. Proyeksi ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional 3,69%; target pertumbuhan ekonomi lebih rendah daripada yang ditetapkan pada periode 2017-2021, yaitu lebih dari 5%.

d. Kebijakan belanja pada periode tahun 2017-2021 memberikan porsi yang relatif besar pada belanja-belanja operasional. Komposisi belanja operasional sangat dominan dalam tahun-tahun tersebut. Mengingat target pendapatan yang lebih rendah, beberapa komponen belanja mengalami penurunan yang cukup signifikan. Komponen belanja operasional, yaitu belanja pegawai tidak mengalami penurunan, tetapi mengalami kenaikan, tetapi dengan proyeksi kenaikan yang kecil yaitu kisaran 1-2%.
e. Proyeksi belanja tahun 2023-2026 dilandasi dengan semangat peningkatan pelayanan publik, sehingga belanja terkait dengan komitmen, yaitu belanja modal ditingkatkan proporsinya. Dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran pendapatan yang terbatas dan lebih kecil daripada tahun sebelumnya, besaran anggaran ini ditetapkan masih relatif kecil proporsinya dari seluruh anggaran pengeluaran. Namun demikian, masih diproyeksikan meningkat dibanding tahun sebelumnya. *Baseline* penetapan anggaran adalah realisasi tahun 2021, yaitu Rp. 130.262.140.409. Sejalan dengan semangat untuk meningkatkan layanan publik, proporsi belanja ini diproyeksikan meningkat 10% pertahun. Selain itu, dalam komponen belanja modal ini, juga dialokasikan belanja modal aset tidak berwujud. Alokasi ini belanja ini merupakan tuntutan yang tidak bisa dihindari dalam era teknologi digital, dalam mengembangkan ekosistem digital, dalam semua bidang layanan, misalnya pengembangan software, DED, dan lainnya. Pada tahun 2020 dialokasikan belanja ini sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) dan anggaran ini mengalami kenaikan setiap tahunnya sebesar 10%.
f. Proyeksi tahun 2023-2026 ini menurunkan komposisi belanja operasional, dari 77,58% pada tahun 2023 menjadi 73,82% pada tahun 2026. Sementara itu proporsi belanja modal mengalami kenaikan dari 18,64 % pada tahun 2023 menjadi 22,25% pada tahun 2026. Proyeksi ini memberikan dampak pada komposisi belanja modal yang semakin besar dibanding dengan periode 2017-2021. Pada periode ini komposisi belanja modal hanya 18,84%, sementara belanja operasional mencapai 78,45%.

g. Kebijakan pembiayaan berupa tambahan penyertaan pada perusahaan milik daerah yang diproyeksikan pada tahun 2017-2021 terus dilanjutkan. Realisasi kebijakan ini dalam perjalanannya tidak selalu sama dari tahun ke tahun, namun demikian dengan mempertimbangkan SILPA yang masih dimiliki, kebijakan pembiayaan ini diharapkan dapat terus dilakukan untuk terus memperkuat struktur permodalan, terutama perusahaan-perusahaan milik daerah, sehingga kinerja bisa semakin membaik dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.

h. Proyeksi anggaran pada periode 2017-2021 merupakan anggaran surplus. Namun untuk tahun 2023-2026, proyeksi anggaran merupakan anggaran defisit untuk beberapa tahun anggaran. Pendapatan yang diproyeksikan belum cukup untuk menutup anggaran belanja. Namun demikian proyeksi ini masih dimungkinkan mengingat jumlah SILPA yang cukup besar. SILPA yang tersedia masih cukup untuk menutup defisit anggaran untuk 3 tahun pertama, namun demikian pada akhir tahun ke-4 masih terdapat Selisih Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA). Gambaran perbandingan kebijakan antara 2 periode tersebut dalam dilihat dalam tabel rangkuman berikut ini:

No	Kebijakan	RPJMD 2017 – 2021	RPD 2023 -2026
1	Pendapatan	• Proyeksi Pendapatan Daerah secara umum terlalu besar • Proyeksi DAU terlalu besar, pencapaian pendapatan ini kurang dari 100% • Proyeksi PAD relatif dapat dipenuhi namun beberapa unsur PAD terkoreksi secara signifikan akibat pendemi COVID-19 • Asumsi pertumbuhan ekonomi lebih dari 5%	• Proyeksi pendapatan daerah, khususnya PAD dipertimbangkan dari trend penerimaan, disesuaikan dengan kemungkinan masih terkoreksinya beberapa unsur PAD dikarenakan pandemi COVID-19 • Perkiraan pertumbuhan PAD kurang lebih 3% • Dana perimbangan diproyeksi tidak mengalami kenaikan. • Asumsi pertumbuhan ekonomi mengikuti pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu 3,69%
2	Belanja	• Proyeksi belanja operasional masih relatif besar dibanding dengan belanja modal • Proyeksi ini menyebabkan komposisi belanja yang semakin tinggi pada belanja operasional • Rerata kenaikan proyeksi belanja operasional cukup	• Proyeksi belanja operasional lebih diefisienkan. Belanja ini diproyeksikan naik tidak lebih dari 2% per tahun • Belanja modal diproyeksikan mengalami kenaikan 10 % per tahun. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen

No	Kebijakan	RPJMD 2017 – 2021	RPD 2023 -2026
		besar, yaitu 6,7% per tahun	dalam peningkatan layanan publik • Proyeksi ini memberikan dampak pada menurunnya komposisi belanja operasi, sebaliknya komposisi belanja operasi (terhadap total belanja) menjadi semakin besar
3	Pembiayaan	• Kebijakan pembiayaan terkait dengan penyertaan diproyeksikan sebesar Rp. 10 Milyar per tahun • Dalam perjalanannya kebijakan ini tidak terealisasi sebesar yang diproyeksikan, meskipun secara finansial dimungkinkan	• Kebijakan peningkatan penyertaan sebesar Rp. 10 Milyar per tahun tetap dilakukan karena secara finansial dimungkinkan (SILPA dimiliki masih mencukupi) • Proyeksi anggaran merupakan anggaran defisit. Anggaran defisit ini masih dimungkinkan mengingat saldo SILPA yang cukup tinggi yang bisa digunakan untuk menutup defisit anggaran

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah selama 4 (empat) tahun ke depan. Penghitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Tahapan penghitungan kerangka pendanaan didahului dengan penghitungan kapasitas riil keuangan daerah, yuaitu total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan belanja yang bersifat mengikat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Hasil penghitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah tahun 2023-2026 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 12 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

Uraian	2023	2024	2025	2026
Total Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan	**1.025.903.762.304**	**1.031.119.155.178**	**1.003.744.040.539**	**947.482.297.402**
Pendapatan	883.472.647.000	888.810.704.000	890.300.309.000	894.981.459.000
Penerimaan Pembiayaan	142.431.115.304*	142.308.451.178	113.443.731.539	52.500.838.402
Prioritas 1 (Belanja Yang Bersifat Mengikat)	**665.161.058.388**	**678.464.279.556**	**692.033.565.147**	**705.874.236.450**
Belanja Pegawai	447.671.356.960	456.624.784.099	465.757.279.781	475.072.425.377
Belanja Barang dan Jasa	217.489.701.428	221.839.495.457	226.276.285.366	230.801.811.073
Kapasitas riil kemampuan keuangan	**360.742.703.916**	**352.654.875.623**	**311.710.475.392**	**241.608.060.952**

*penerimaan pembiayaan ini merupakan proyeksi dari tahun sebelumnya, dengan menggunakan saldo SILPA yang mencapai 152.741.332.512

Pengalokasian belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan Kota Salatiga menyesuaikan dengan pendapatan daerah. Belanja daerah diproyeksikan meningkat dari sebesar **Rp.876.095.311.126** pada tahun 2023 menjadi **Rp.976.971.518.464** pada tahun 2026. Kebijakan dalam pengalokasian belanja daerah Kota Salatiga sebagai berikut.

1. Anggaran belanja daerah yang ditetapkan dalam periode 2023 -2026 sebagian besar lebih daripada anggaran pendapatan daerah. Total defisit yang terjadi mendekati Rp.39,48 Milyar (tepatnya minus (-) Rp. 39.489.221.062). Anggaran selama periode berjalan cenderung mengalami defisit setiap tahunnya, namun hal ini relatif teratasi karena adanya SILPA pada awal tahun, lebih dari 140 Milyar.
2. Belanja diprioritaskan pada belanja yang bersifat mengikat, yang dalam hal ini belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
3. Selebihnya dari saldo anggaran yang ada, akan digunakan untuk membiayai belanja wajib. Menurut Permendagri No. 64 tahun 2020 yang dimaksud belanja wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok. Komponen belanja modal dikategorikan dalam belanja wajib ini.
4. Belanja modal dianggarkan semakin meningkat. Akselerasi pertumbuhan belanja ini dianggarkan lebih besar daripada belanja-belanja lain. Peningkatan belanja ini ditujukan untuk pemenuhan barang-barang publik (*public goods*), sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari layanan publik yang disediakan.
5. Komitmen pembiayaan terkait dengan kepemilikan pada Badan Usaha Milik Pemerintah, baik yang dimiliki oleh pemerintah kota maupun provinsi akan terus ditingkatkan dengan terus menambah jumlah penyertaan. Kebijakan ini mengacu pada peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah
6. Belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Perubahannya

Tabel 3. 13 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2023-2026 (Rupiah)

Uraian	2023	2024	2025	2026
Total Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan	**1.025.903.762.304**	**1.031.119.155.178**	**1.003.744.040.539**	**947.482.297.402**
Pendapatan	883.472.647.000	888.810.704.000	890.300.309.000	894.981.459.000
Penerimaan Pembiayaan	142.431.115.304	142.308.451.178	113.443.731.539	52.500.838.402
Prioritas 1 (Belanja Yang Bersifat Mengikat)	**665.161.058.388**	**678.464.279.556**	**692.033.565.147**	**705.874.236.450**
Belanja Pegawai	447.671.356.960	456.624.784.099	465.757.279.781	475.072.425.377
Belanja Barang dan Jasa	217.489.701.428	221.839.495.457	226.276.285.366	230.801.811.073
Kapasitas riil kemampuan keuangan	**360.742.703.916**	**352.654.875.623**	**311.710.475.392**	**241.608.060.952**
Prioritas II (Belanja yang Bersifat Wajib)	**164.050.122.594**	**180.417.046.446**	**198.418.758.263**	**218.218.641.620**
Belanja Modal	163.288.354.450	179.617.189.895	197.578.908.884	217.336.799.773
Belanja Bagi Hasil	761.768.144	799.856.551	839.849.379	881.841.847
Prioritas III	**46.884.130.144**	**48.794.097.638**	**50.790.878.727**	**52.878.640.394**
Belanja Hibah	11.659.914.868	11.893.113.165	12.130.975.428	12.373.594.937
Belanja Bantuan Sosial	2.814.718.889	2.871.013.267	2.928.433.532	2.987.002.203
Belanja Bantuan Keuangan	0	0	0	0
Belanja Tidak Terduga	32.409.496.387	34.029.971.206	35.731.469.766	37.518.043.255
Pengeluaran Pembiayaan	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**
Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah)	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Surplus Anggaran Riil	**139.808.451.178**	**113.443.731.539**	**52.500.838.402**	**-39.489.221.062**

Tabel 3. 14 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2023-2026

Uraian	2023	2024	2025	2026
PENDAPATAN	**883.472.647.000**	**888.810.704.000**	**890.300.309.000**	**894.981.459.000**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**250.752.407.000**	**256.455.419.000**	**257.945.024.000**	**262.626.174.000**
Pendapatan Pajak Daerah	61.929.500.000	65.589.500.000	67.014.500.000	67.995.500.000
Hasil Retribusi Daerah	10.469.320.000	10.922.919.000	10.957.524.000	11.154.674.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.643.000.000	19.143.000.000	19.173.000.000	19.673.000.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	158.710.587.000	160.800.000.000	160.800.000.000	163.803.000.000
DANA PERIMBANGAN	**553.489.213.000**	**553.124.258.000**	**553.124.258.000**	**553.124.258.000**
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	25.931.716.000	25.931.716.000	25.931.716.000	25.931.716.000
Dana Alokasi Khusus	109.543.931.000	109.178.976.000	109.178.976.000	109.178.976.000
Dana Alokasi Umum	418.013.566.000	418.013.566.000	418.013.566.000	418.013.566.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**79.231.027.000**	**79.231.027.000**	**79.231.027.000**	**79.231.027.000**
Hibah Dana BOS				
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	67.046.027.000	67.046.027.000	67.046.027.000	67.046.027.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				
Bantuan Keuangan dari Propinsi	**12.185.000.000**	**12.185.000.000**	**12.185.000.000**	**12.185.000.000**
BELANJA	**876.095.311.126**	**907.675.423.640**	**941.243.202.137**	**976.971.518.464**
BELANJA OPERASI	**679.635.692.145**	**693.228.405.988**	**707.092.974.107**	**721.234.833.590**
Belanja Pegawai	447.671.356.960	456.624.784.099,20	465.757.279.781,18	475.072.425.376,81
Belanja Barang	217.489.701.428	221.839.495.456,56	226.276.285.365,69	230.801.811.073,01
Belanja Bunga				
Belanja Subsidi				

Belanja Hibah	11.659.914.867,60	11.893.113.164,95	12.130.975.428,25	12.373.594.936,82
Belanja Bantuan Sosial	2.814.718.889,18	2.871.013.266,96	2.928.433.532,30	2.987.002.202,95
Belanja Bantuan Keuangan				
Belanja Bantuan Keuangan kepada Vertikal Dalam Negeri				
BELANJA MODAL	**163.288.354.450**	**179.617.189.895**	**197.578.908.884**	**217.336.799.773**
Belanja Tanah	738.400.555,15	812.240.610,66	893.464.671,73	982.811.138,90
Belanja Peralatan dan Mesin	47.500.563.818,27	52.250.620.200,09	57.475.682.220,10	63.223.250.442,11
Belanja Gedung dan Bangunan	43.415.343.718,30	47.756.878.090,13	52.532.565.899,14	57.785.822.489,05
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.043.971.870,01	53.948.369.057,01	59.343.205.962,71	65.277.526.558,98
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.366.814.036,73	2.603.495.440,40	2.863.844.984,44	3.150.229.482,89
Belanja Aset Lainnya	223.260.451,45	245.586.496,59	270.145.146,25	297.159.660,88
Belanja Modal Aset tidak Berwujud	20.000.000.000	22.000.000.000	24.200.000.000	26.620.000.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	**32.409.496.387**	**34.029.971.206**	**35.731.469.766**	**37.518.043.255**
Belanja Tidak Terduga	**32.409.496.387**	**34.029.971.206**	**35.731.469.766**	**37.518.043.255**
TRANSFER	**761.768.144**	**799.856.551**	**839.849.379**	**881.841.847**
Belanja Bagi Hasil	761.768.144	799.856.551	839.849.379	881.841.847
Belanja Bantuan Keuangan				
SURPLUS/DEFISIT	**7.377.335.874**	**-18.864.719.640**	**-50.942.893.137**	**-81.990.059.464**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	**142.431.115.304,00**	**142.308.451.178,32**	**113.443.731.538,75**	**52.500.838.401,65**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	142.431.115.304,00	142.308.451.178,32	113.443.731.538,75	52.500.838.401,65
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0
Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	**7.500.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**
Pembentukan Dana Cadangan				
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
Pembayaran Pokok Utang	0	0		
Pemberian Pinjaman Daerah-Dana bergulir	0	0	0	0
PEMBIAYAAN NETTO	**134.931.115.304**	**132.308.451.178**	**103.443.731.539**	**42.500.838.402**
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**142.308.451.178,32**	**113.443.731.538,75**	**52.500.838.401,65**	**-39.489.221.062,36**

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan di Kota Salatiga ditunjukkan dengan kondisi permasalahan pada masing-masing urusan pembangunan. Sementara itu isu strategis merupakan rumusan dari berbagai permasalahan yang perlu ditangani melalui berbagai strategi dan kebijakan. Permasalahan berdasarkan hasil analisis kinerja capaian pembangunan yang telah diuraikan dan atau didiskripsikan sebelumnya pada Bab II selanjutnya disampaikan melalui uraian berikut.

4.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

a. Masih rendahnya APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 0 – 6 tahun dengan persentase capaian kinerja sampai dengan tahun 2021 APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 59,68 persen.
b. Masih terdapatnya anak putus sekolah pada layanan pendidikan dasar terutama pada tingkat SMP/MTs, tahun 2021 terdapat 0,44 angka putus sekolah tingkat SMP/MTs.
c. Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana belajar, antara lain kondisi ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik tahun 2021 sebesar 87,28 persen, PAUD sebesar 87,33 persen dan SMP sebesar 97,70 persen.
d. Masih rendahnya kualitas pelayanan pendidikan non formal yang ditunjukkan dari kondisi lembaga pelatihan dan kursus yang terakreditasi sebesar 33,33 persen pada tahun 2021, dan PKBM (Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat) yang terakreditasi sebesar 58,33 persen pada tahun 2021.
e. Rendahnya persentase penduduk usia 4-6 tahun yang bersekolah di TK/RA, berdasarkan data menunjukkan terjadinya tren penurunan di tahun 2021 sebesar 49,55 persen.
f. Belum semua satuan Pendidikan menerapkan kurikulum merdeka yang menjadi tuntutan rangkaian program merdeka belajar.
g. Belum optimalnya kompentensi (kualitas) pendidikan guru PAUD, pada tahun 2021 guru layak mengajar TK/RA sebesar 84,95 persen, SD/MI sebesar 97,30 persen dan SMP/MTs sebesar 96,43 persen.
h. Masih terbatasnya pendidik menjadi guru penggerak, yang disebabkan masih sedikitnya pendidik yang lolos untuk mengikuti pelatihan guru penggerak.
i. Belum ditetapkannya kurikulum muatan lokal Kota Salatiga dimana Mulok masih diajarkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler, sehingga tidak diakui sebagai angka kredit.

Permasalahan Utama Urusan Pendidikan
Capaian angka Patisipasi sekolah PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs; dan masih terdapatnya anak putus sekolah
Kualitas sarana dan prasarana pendidikan

2. Urusan Kesehatan

a. Masih adanya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi, disebakan oleh pandemi Covid-19, meningkatnya kelahiran prematur, kurang sadarnya ibu untuk melakukan KB, dan penanganan persalinan yang kurang tepat

b. Masih terdapatnya kasus balita gizi buruk, Masih diperlukan peningkatan upaya orang tua untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balita, masih ada kasus anemia dan KEK pada ibu hamil.

c. Masih rendahnya pemberian ASI eksklusif oleh masyarakat, Pemberian ASI eksklusif oleh masyarakat perlu ditingkatkan.

d. Masih adanya kasus balita stunting karena kurangnya kesadaran orang tua balita dalam pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, kurangnya pengetahuan ibu dalam pemberian makanan pada bayi dan balita, adanya penyakit infeksi pada balita, masih ada kasus anemi dan KEK pada ibu hamil, dan kondisi sanitasi yang kurang baik.

e. SPM belum tercapai pada TB 1). Masih belum optimalnya pelayanan kesehatan di faskes selama pandemi sehingga tingkat partisipasi masyarakat untuk berobat sangat rendah, 2). Masih adanya stigma di masyarakat terhadap TB sehingga pasien/masyarakat enggan untuk diketahui statusnya dengan pemeriksaan dahak, 3). Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang cara mendapatkan dahak yang berkualitas dan 4). Belum optimalnya sistem rujukan kasus TB); pada HIV 1). Belum optimalnya penjangkauan oleh LSM dalam kegiatan skrining HIV, 2). Masih adanya stigma di masyarakat terhadap penderita HIV dan 3). Banyaknya populasi kunci yang sulit terdeteksi sejak dini); dan pada PTM Hipertensi, Diabetes mellitus, Yankes Usia Produktif 1). Jumlah posbindu terbatas, 2). Selama pandemi posbindu tidak aktif, 3). Kurangnya SDM kesehatan dalam pelayanan kepada penduduk usia produktif dan 4). Masih diperlukan peningkatan skrining kesehatan oleh masyarakat selama pandemi.

f. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, terkait sanitasi kurang, Masih diperlukan peningkatan upaya untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam minum obat dan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai TB.

g. Masih ditemukannya kasus baru HIV/AIDs, akibat dari perilaku seks masyarakat masih kurang aman, kegiatan VCT *mobile*, kegiatan komunitas yang merujuk teman/dampingan yang memiliki faktor resiko dan masyarakat mulai sadar untuk periksa dini HIV ketika ada faktor resiko serta Ibu hamil wajib VCT.
h. Belum optimalnya layanan terhadap kelompok lansia, karena kurangnya kader kesehatan posyandu lansia dan kegiatan lansia terhenti selama pandemi.
i. Masih rendahnya industri rumah tangga memiliki sertifikasi produksi, akibat pelaku usaha (IRT) banyak yang belum mengajukan sertifikat PIRT.
j. Masih adanya rumah yang belum memenuhi syarat kesehatan, akibat adanya aturan baru tentang penilaian rumah sehat.
k. Belum ada kelurahan yang menerapkan 5 pilar STBM, terkait dengan Cakupan SPAL masih rendah dan Pengelolaan sampah di masyarakat belum optimal.
l. Belum optimalnya penyediaan layanan dasar kesehatan sesuai standar, akibat selama pandemi Covid-19 tidak ada penilaian akreditasi, belum dilakukan pembenahan administrasi puskesmas selama pandemi covid, SIMPUS tidak dapat pakai dan vendor menghilang dan ada aturan baru terkait akreditasi puskesmas.
m. Belum optimalnya mutu pelayanan rujukan ditandai dengan belum terpenuhinya sarana prasarana dan SDM yang sesuai dengan standar, akibat dari belum terpenuhinya SDM baik secara kuantitas maupun kualitas, belum terpenuhinya alat kesehata, sarana dan prasarana, belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan dan belum optimalnya promosi pelayanan kesehatan RSUD.
n. Belum tercapainya UHC akibat dari masyarakat mampu masih banyak yang belum mengikuti JKN secara mandiri dan verifikasi masyarakat miskin dilakukan secara bertahap oleh Dinsos.
o. Belum optimalnya implementasi GERMAS, masih diperlukan upaya meningkatkan pengetahuan dan kemauan dalam melaksanakan pola hidup sehat, belum optimalnya peran stake holder dalam penggerakan GERMAS, belum optimalnya distribusi tenaga promosi kesehatan di masyarakat dan belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana aktifitas fisik di instansi.
p. Kurang maksimalnya penerapan kawasan tanpa rokok, karena belum optimalnya komitmen stake holder dalam penyelenggaraan KTR dan belum adanya zonasi status KTR di tempat tempat umum serta belum optimalnya pengawasan implementasi KTR.

   Sistem Informasi di Puskesmas belum optimal terkait SIMPUS tidak dapat pakai dan vendor menghilang.

Permasalahan Utama Urusan Kesehatan
Belum optimalnya mutu layanan dan penyediaan layanan dasar kesehatan sesuai standar.
Belum optimalnya pelayanan kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan AKI, AKB, Gizi buruk, Balita Stunting, HIV AIDS, penyakit menular dan tidak menular.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Belum optimalnya SPM pengelolaan air limbah domestik (172.939 penduduk terlayani, setara dengan 88 persen pada akhir 2021)
b. Belum optimalnya panjang jalan dalam kondisi baik (275.665 km, setara dengan 93 persen pada akhir tahun 2021).
c. Belum optimalnya jumlah jembatan dalam kondisi baik (83,9 m, setara dengan 11 persen pada akhir ahun 2021).
d. Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi yang terintegrasi (19.749 m, setara dengan 84 persen pada akhir tahun 2021).
e. Belum optimalnya pengelolaan jaringan drainase yang baik (382.225 m, setara dengan 75 persen pada akhir tahun 2021).
f. Belum optimalnya kualitas bangunan gedung karena minimnya tenaga terampil konstruksi yang mendapat pelatihan dan sertifikat (0% pada akhir tahun 2021) dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan jasa konstruksi.
g. Masih minimnya penataan bangunan dan lingkungan yang terintegrasi di Kota Salatiga.
h. Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu gedung kantor dan alat berat pendukung fungsi pekerjaan umum.

Permasalahan Utama Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1. Pencapaian SPM pengelolaan air limbah domestik
2. Ketersediaan jalan, drainase jalan, jembatan, dan irigasi yang kondisinya baik
3. Kualitas bangunan gedung karena minimnya tenaga terampil konstruksi yang mendapat pelatihan dan sertifikat (0% pada akhir tahun 2021) dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan jasa konstruksi.
4. Penataan bangunan dan lingkungan yang terintegrasi di Kota Salatiga.
5. Belum terlaksananya pembangunan wajah kota yang indah, nyaman dan aman bagi penggunanya terutama lansekap jalan pada kawasan bisnis atau kawasan perekonomian (kawasan pasar tradisional dan modern, kawasan pertokoan, kawasan pendidikan, kawasan perkantoran dan kawasan permukiman)

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang teridentifikasi terkait urusan perumahan dan pemikiman adalah sebagai berikut :

a. Terbatasanya ketersediaan rumah layak huni, sehat, aman dan terjangkau.
b. Rumah yang belum layak huni dan belum sehat merupakan rumah yang masuk dalam kategori rumah kumuh, dimana pada tahun 2021 baru tercapai 91 persen, dengan rasio capaian sudah mencapai 99 persen. Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih rendahnya cakupan ketersediaan rumah layak huni yang sehat, aman dan terjangkau yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran daerah, dan rendahnya kemampuan swadaya masyarakat penerima bantuan.
c. Belum optimalnya penyediaan lingkungan perumahan yang terlayani Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang sehat, aman dan berkelanjutan.
d. Beberpa lokasi/perkampungan di Salatiga belum memiliki fasilitas PSU yang sehat, hal ini dilihat dari kepemilikan pada instalasi air bersih dan Mandi Cuci Kakus (MCK). Dari target capaian yang ditetapkan baru dapat tercapai 75,37 persen dengan rasio capaian baru mencapai 73 persen. Masih perlu upaya keras untuk mecapai target yang ditetapkan. Permasalahan yang menyebabkan hal tersebut adalah keterbatasan anggaran daerah untuk pengadaan PSU yang sehat dan baik pada kawasan permukiman yang kondisi PSU masih rendah dalam hal ini masih ada 24 persen yang masih membutuhkan. Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) sudah tersedia namun masih kurang. RTLH adalah kondisi rumah yang tidak memenuhi persyaratan rumah layak huni dimana konstruksi bangunan tidak handal, luas tidak sesuai standar per orang dan tidak menyehatkan bagi penghuninya dan atau membahayakan bagi penghuninya.
e. Ketersediaan lahan untuk pengembangan perumahan. Salah satu masalah yang dihadapi di Kota Salatiga adalah ketersediaan lahan untuk perumahan, dimana permintaan terus meningkat akan tetapi lahan yang tersedia tetap luasannya. Hal ini dikarenakan RTRW Kota Salatiga 2010-2030 belum menetapkan penambahan wilayah yang baru untuk perumahan.
f. Pembangunan rumah pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga terdapat rumah yang berada pada lokasi rawan bencana.
g. Beberapa lokasi pemukiman penduduk di Kota Salatiga berada di lokasi rawan bencana sehingga diperlukan tempat untuk memindahkan penduduk tinggal di wilayah tersebut. Sampai saat ini pemerintah belum

menyediakan lahan khusus untuk relokasi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana.

Permasalahan Utama Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1. Ketersediaan rumah layak huni yang sehat, aman dan terjangkau, serta penyediaan lingkungan perumahan yang terlayani PSU yang sehat, aman dan berkelanjutan.
2. Ketersediaan lahan untuk pengembangan perumahan

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

a. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah mencapai 100 persen selama periode 2017-2020, dan mengalami penurunan menjadi 94 % di tahun 2021, yang disebabkan oleh pandemi covid 19 sehingga mengakibatkan penyesuaian-penyesuaian perubahan dalam penegakan kinerja trantibum.

b. Prosentase patroli siaga ketertiban umum memiliki target 100 persen pada tahun 2017-2021. pada tahun 2017 realisasi sebesar 225 persen, tahun 2018 mengalami penurunan, dengan prosentase 150 persen, pada tahun 2019 realisani sebesar 100 persen, pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 200 persen. sedangkan pada tahun 2021 realisasi mencapai 100 persen, sesuai dengan target kinerja

c. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, Target pada tahun 2017 8 orang namun realisasi sebesar 7orang. pada tahun 2018 target SDM 9 orang namun realsiasi sebesar 8 orang. tahun 2019 target jumlah SDM 9 orang sedangkan realisasi 8 orang. pada tahun 2020 target jumlah SDM 10 orang dengan realisasi sebesar 8 orang. pada tahun **2021 target jumlah SDM 10 orang akan tetapi realisasi 7 orang. sehingga prosentase capaian kinerja pada akhir tahun RPJMD sebesar 70 persen.**

d. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Salatiga pada tahun 2016 per 100.000 penduduk terdapat 67 orang Target pada tahun 2017 sebesar 75 orang namun realisasi sebesar 61 orang. pada tahun 2018 target SDM 75 orang namun realisasi sebesar 63 orang. tahun 2019 target jumlah SDM 77 orang sedangkan realisasi 63 orang. pada tahun 2020 target jumlah SDM 77 orang dengan realisasi sebesar 66 orang. **Pada tahun 2021 target jumlah SDM 79 orang akan tetapi realisasi 66orang. sehingga prosentase capaian kinerja sebesar 83,54 persen.**

e. Belum tersedianya berbagai dokumen, sarana prasarana minimal, dan tim lapangan yang dibutuhkan untuk pengurangan risiko dan penanggulangan bencana. Hal ini disebabkan karena OPD yang

mengurusi penanggulangan bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga) baru dibentuk pada awal tahun 2022.

Permasalahan Utama Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
1. **Penegakan Perda dan Perwali sebagai akibat Terbatasnya petugas Satpol PP dan peran Satlinmas**
2. **Kelengkapan dokumen, sarana prasarana, dan tim pengurangan risiko dan penanggulangan bencana**
3. **Potensi konflik horizontal dan bahaya penyalahgunaan narkoba**

6. Urusan Sosial

a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan rehabilitasi sosial. Pada tahun 2016 target kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan rehabilitasi sosial sebesar 30 persen, Berdasarkan data dari tahun 2017 hinggga 2021 target dinaikan setiap tahunnya dengan realisasi yang melampaui target. Adapun data antara lain sebagai berikut: pada tahun 2017 target dinaikkan menjadi 36 persen dengan realisasi 100 persen, pada tahun 2018 target dinaikkan menjadi 43 persen dengan realisasi 100 persen, pada tahun 2019 target dinaikan menjadi 51 persen dengan realisasi 100 persen, pada tahun 2020 target dinaikkan menjadi 61 persen dengan realisasi 100 persen dan pada tahun 2021 target dinaikkan menjadi 61 persen dengan realisasi 100 persen. Tahun 2021 rasio capain akhir sebesar 113,64 persen yang artinya melampaui target.

b. Rendahnya pemberdayan PMKS yang menerima program pemberdayan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. Pada tahun 2016 target pemberdayan PMKS yang menerima program pemberdayan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya sebesar 3,4 persen, Berdasarkan data dari tahun 2017 hinggga 2021 target dinaikan setiap tahunnya dengan realisasi yang melampaui target. Adapun data antara lain sebagai berikut: pada tahun 2017 target dinaikkan menjadi 4,0 persen dengan realisasi 5,71 persen, pada tahun 2018 target dinaikkan menjadi 5,0 persen dengan realisasi 5,71 persen, pada tahun 2019 target dinaikan menjadi 6,0 persen dengan realisasi 9,63 persen, pada tahun 2020 target dinaikkan menjadi 7,0 persen dengan realisasi 8,78 persen dan pada tahun 2021 target dinaikkan menjadi 9,0 persen dengan realisasi 10,89 persen. Tahun 2021 rasio capain akhir sebesar 113,64 yang artinya melampaui target.

Permasalahan Utama Urusan Sosial
Kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan rehabilitasi sosial, dan masih rendahnya pemberdayan PMKS yang menerima program pemberdayan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.

4.1.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

a. Belum adanya kesesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi pencari kerja. Dapat dicontohkan, pada tahun 2021, lapangan pekerjaan yang tersedia salah satunya adalah operator dan perakit mesin pabrik , namun kompetensi pencari kerja yang ada tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.

b. Tingginya jumlah pengangguran terbuka, tercatat ditahun 2021 mencapai sebesar 8.145 orang.

c. Banyaknya pihak perusahaan yang tidak melaporkan data baik lowongan kerja maupun penempatannya. Pada tahun 2021, jumlah perusahaan wajib lapor sebanyak 404 Perusahaan, namun yang melakukan pelaporan hanya 10 Perusahaan.

d. Belum memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang memenuhi standar untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.

e. Belum adanya sekretariat bersama Lembaga Kerjasama Tripartit.

Permasalahan Utama Urusan Tenaga Kerja
Kesesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi permintaan tenaga kerja.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
   - Penggunaan teknologi guna pelayanan informasi publik belum merata,
   - Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.

b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender
   - Belum optimalnya sosialisasi dan edukasi terhadap perempuan Kota Salatiga dalam hal pendidikan berpolitik. Pada tahun 2021 anggota legislatif perempuan berjumlah 6 orang atau sebesar 24% dari total jumlah anggota legislatif sebanyak 25 orang, belum bisa memenuhi standar kuota peran perempuan dalam legislatif yaitu sebesar 30%,
   - Belum optimalnya sosialisasi, edukasi, pendidikan, pelatihan, pendampingan dan monitoring evaluasi kepada perempuan dalam hal *life skill* guna mendapatkan pekerjaan ataupun membuka

lapangan pekerjaan sendiri.

- Belum terbentuknya Profil Gender Kota Salatiga.

c. Permasalahan terkait pelindungan perempuan dan anak :
   - Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan, pada tahun 2021 terdapat 11 kasus kekerasan terhadap perempuan,
   - Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak, pada tahun 2021 terdapat 17 kasus kekerasan terhadap anak.

d. Permasalahan terkait pemenuhan hak anak
   1) Belum optimalnya tingkat capaian skor Kota Layak Anak, pada tahun 2021 dengan target 675 tercapai 607,35 dengan kategori Madya,
   2) Belum optimalnya pembentukan kelembagaan Forum Anak di tingkat kelurahan, sampai pada tahun 2021 kelembagaan Forum Anak di Tingkat Kelurahan yang sudah terbentuk hanya 2 Forum Anak yaitu di Kelurahan Kauman Kidul dan Kelurahan Blotongan dari 23 Kelurahan yang ada di Kota Salatiga.

Permasalahan Utama Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, dan belum optimal dalam penanganan sesuai standar
Belum terwujudnya Kota salatiga sebagai Kota layak anak

3. Urusan Pangan

a. Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat masih tergantung pada pasokan dari luar daerah. Berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian Kota Salatiga, hasil produksi padi di Kota Salatiga hanya memenuhi + 70 persen kebutuhan masyarakat. Kebutuhan pangan lainnya diperoleh dari Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali. Oleh karena itu, Kota Salatiga merupakan daerah yang belum mandiri pangan dan rawan pangan.

b. Belum optimalnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).

c. Belum ada regulasi turunan dalam urusan pangan sehingga menghambat gerak langkah penyelenggaraan urusan pangan di tingkat kota.

d. Belum ada lumbung pangan tingkat kota, masih dititipkan di gapoktan (Prima Agung).

Permasalahan Utama Urusan Pangan
Belum adanya strategi yang efektif, efisien, menyeluruh, dan terkoordinir untuk menangani kerawanan pangan dan gizi, harga minimum daerah, pengelolaan logistik pangan, dan pengawasan keamanan pangan.

Permasalahan Utama Urusan Pangan
Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung kemandirian pangan (kuantitas dan kualitas).

4. Urusan Pertanahan

a. Belum optimalnya pengelolaan data tanah dalam hal pendataan dan pemetaan batas dan bidang tanah. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk capaian program penatagunaan tanah dalam hal dokumen penegasan batas bidang tanah baru mencapai 1 dokumen yang terselesaikan.
b. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas layanan pengelolaan tanah terutama dalam penyelesaian sengketa tanah garapan. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk persentase penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kota Salatiga baru mencapai 75 persen.
c. Terbatasnya lahan dan harga tanah tinggi guna pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk program redistribusi tanah, serta ganti kerugian, program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee belum terlaksana dengan baik.
d. Belum optimalnya pengelolaan tanah dalam hal izin membuka tanah. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk program pengelolaan izin membuka tanah belum terlaksana dengan baik.
e. Belum optimalnya pengelolaan tanah dalam hal pengurusan hak status atas pembukaan dan pemanfaatan tanah negara. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk program pengelolaan izin membuka tanah belum terlaksana dengan baik.
f. Belum optimalnya kapasitas dan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan sebagai layanan pengelolaan pertanahan. Hal ini terlihat pada tahun 2021 untuk Program Penatagunaan Tanah dalam hal pengembangan sistem informasi pertanahan daerah belum terkelola dengan baik.

Permasalahan Utama Urusan Pertanahan
Layanan urusan pertanahan (data tanah, izin membuka tanah, penyelesaian sengketa tanah, penetapan status tanah, dll.) dan rendahnya pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan
Keterbatasan ketersediaan tanah untuk kepentingan umum

5. Urusan Lingkungan Hidup

a. Belum tercapainya target indeks kualitas lingkungan hidup Tahun 2021 yaitu 63,51, dengan capaian Tahun 2021 sebesar 58,65

b. Masih rendahnya kualitas air dan dikategorikan kurang baik dengan Indeks Kualitas Air 42,50.
c. Belum optimalnya pengawasan terhadap pelaku usaha dan pembinaan terhadap masyarakat terkait pengelolaan limbah.
d. Perlu upaya peningkatan Indeks Kualitas Udara dari "baik", yaitu 79,82 menjadi "lebih baik" dan masih kurangnya pengawasan emisi dari sumber tidak bergerak.
e. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian serta rendahnya ketaatan pelaku usaha terhadap dokumen lingkungan yang dibuat oleh pelaku usaha (SPPL, UKL-UPL, AMDAL), tahun 2021 baru mencapai 58,65.
f. Belum optimalnya pengelolaan persampahan dan sarana prasarananya serta belum optimlanya kegiatan penyadaran kurangnya masyarakat. Persentase penanganan sampah di tahun 2022 masih 98,72, dengan persentase pengangkutan sampah diperkotaan 17,82 dan persentase pengangkutan sampah 75.
g. Masih rendahnya prosentase luas RTH publik, karena perencanaan taman dalam masterplan belum sepenuhnya terealisasi.
h. Masih rendahnya kualitas tutupan lahan dengan Indeks Kualitas Lahan masuk kategori " kurang baik" yang ditunjukkan oleh angka 47,21.

Permasalahan Utama Urusan Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup masih rendah dan masuk kategori "kurang baik".

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang update.
b. Meningkatnya kebutuhan akurasi data identitas penduduk dan data kependudukan.
c. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan data kependudukan.
d. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang Dukcapil go digital.
e. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan Dukcapil oleh OPD dan Stakeholder.

Permasalahan Utama Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rendahnya penduduk wajib KTP el yang belum rekaman KTP el sesuai target nasional 99 persen.
Rendahnya pengguna data (perjanjian kerja sama) yang memanfaatkan data dukcapil.

7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Permasalahan terkait Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga:
   - Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

b. Permasalahan terkait Advokasi, Penggerakan dan Pendayagunaan PLKB
   - Belum meratanya pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada Pasangan Usia Subur (PUS), Kader maupun masyarakat.

c. Permasalahan terkait Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
   - Belum optimalnya pengembangan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok Akseptor (UPPKA) terutama dalam pemasaran hasil produk,
   - Belum optimalnya pengembangan kegiatan Tribina dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M)

d. Permasalahan terkait Jaminan dan Pembinaan Kesertaan ber KB
   - Belum optimalnya sosialiasasi dan edukasi dalam Metode Operasi Pria (MOP).

Permasalahan Utama Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Belum optimalnya pengendalian penduduk untuk mewujudkan Kota Salatiga tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, yang diakibatkan masih rendahnya angka kepesertaan KB *(unmed need)*, minat akseptor menggunakan MKJP, lemahnya koordinasi lintas sektor dalam mengangani program KB dan stunting, serta terbatasnya tenaga PLKB

8. Urusan Perhubungan

Secara umum permasalahan pada urusan perhubungan terjadi karena anggaran yang tidak mencukupi untuk penyediaan fasilitas berupa infrastruktur dan sarana pendukung transportasi, sosialisasi keselamatan lalu lintas dan angkutan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Beberapa permasalahan secara spesifik teridentifikasi sebagai berikut:

a. Alat Uji Kendaraan Bermotor yang sudah melebihi umur teknis.

Peralatan uji kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Salatiga, rata-rata sudah melebihi umur teknis, hal ini bisa mengakibatkan hasil uji kurang akurat. Selain hal tersebut, reliabilitas juga rendah, sering terjadi kerusakan sehingga menggangu pelayanan uji kendaraan tidak optimal dan tidak efisien dalam pemeliharaan alat.

Walaupun rasio alat uji yang lolos kalibrasi 100% namun ada alat yang sudah tidak efektif penggunaanya. Permasalahan peralatan yang sudah melebihi masa aktif/umur teknis tersebut terjadi karena belum ketersediaan anggaran.

b. Kurangnya fasilitas penunjang perhubungan.

Fasilitas penunjang kegiatan perhubungan dalam hal ini penunjang lalu lintas dan angkutan jalan yang berupa halte / fasilitas naik turun penumpang dan berhenti angkutan, dan fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, APILL dan ATCS. Khusus untuk prasarana halte atau fasilitas tempat henti angkutan umum masih sangat minim jumlahnya di Kota Salatiga. Hal ini akan sangat mempengaruhi tingkat kelancaran dan tingkat keselamatan lalu lintas jalan maupun tingat kenyamanan penumpang angkutan umum. Permasalahan tersebut terjadi karena anggaran yang disediakan untuk pengadaan infrastruktur perhubungan masih sangat kurang.

c. Belum tersedianya Terminal Tipe C dan Terminal Barang

Kebutuhan akan infrastruktur untuk pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan yang terkait dengan kelancaran arus lalu lintas orang dan barang sangat diperlukan. Saat ini Kota Salatiga memerlukan 3(tiga) Terminal Tipe C untuk mendukung mobilitas masyarakat, antara lain Terminal Angkutan Kota Tamansari, Terminal Tipe C Kumpulrejo dan Terminal Tipe C di Kauman Kidul. Sedangkan untuk kelancaran distribusi barang, diperlukan Terminal Bongkar Muat Barang di wilayah Argomulyo. Permasalahan tersebut terjadi karena anggaran yang disediakan untuk pengadaan infrastruktur perhubungan tersebut masih kurang.

d. Pengelolaan Penyelenggaran Parkir

Pengelolaan penyelenggaraan parkir menjadi masalah dikarenakan belum optimalnya pengelolaan parker baik yang dikelola pemerintah kota maupun swasta. Selain itu masih lemahnya tata kelola perparkiran yang terkait dengan model pengelolaan dan metode penarikan maupun pembayaran retribusi parkir yang masih secara konvensional, sehingga menimbulkan permasalahan pada sisi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perparkiran. Dari sisi supply atau ketersediaan ruang parkir di pusat kota yang sangat terbatas dan tidak seimbang dengan pertumbuhan jumlah kendaraan, maka di sisi operasional penataan parkir tidak dapat dilakukan secara optimal.

e. Pertambahan jumlah penggunaan kendaraan pribadi dan menurunnya jumlah penggunaan angkutan umum.

Peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi oleh masyarakat, merupakan bagian dari dampak positif peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mobilitas masyarakat kota Salatiga didominasi dengan penggunaan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan pergerakan menggunakan angkutan umum sangat kecil dan cenderung menurun, sehingga mengakibatkan volume lalu lintas yang semakin tinggi, penggunaan ruang jalan yang tidak efisien,

peningkatan polusi udara dan peningkatan biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dalam aktifitas sehari-hari.

Penurunan penggunaan angkutan umum ini selain disebabkan oleh kurangnya aksesibilitas jaringan pelayanan angkutan umum di 4 kecamatan di Kota Salatiga, juga adanya competitor layanan angkutan door to door service yang berupa layanan transportasi online yang dirasa lebih fleksibel meskipun tarifnya lebih mahal.

Permasalahan ini terjadi karena konektifitas jaringan pelayanan angkutan umum masih rendah belum mampu menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah kota Salatiga.

f. Rendahnya kepatuhan atas ketentuan perizinan trayek angkutan kota.

Di Kota Salatiga ditemukan adanya kendaraan angkutan umum yang memiliki izin trayek, namun tidak melakukan registrasi maupun tidak beroperasi melayani rute yang ditetapkan. Kondisi ini merupakan pelanggaran terhadap kewajiban pemegang trayek atas pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat, juga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban melakukan registrasi izin trayek yang telah habis masa berlakunya.

Permasalahan ini terjadi karena pengawasan operasinal yang tidak optimal dan juga animo masyarakat menggunakan angkutan umum yang sangat rendah, sehingga operator angkutan enggan untuk mengurus kembali perizinan angkutannya.

Permasalahan Utama Urusan Perhubungan
Kualitas layanan angkutan darat dan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan yang layak

9. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Belum optimalnya penyelenggaraan informasi publik yaitu 94 persen pada akhir tahun 2021.
b. Belum optimalnya tata kelola dan pelayanan berbasis e-government. Hal ini ditunjukkan oleh indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Salatiga yaitu 2,34 pada akhir tahun 2021 padahal nilai maksimal adalah 5.

Permasalahan Utama Urusan Komunikasi dan Informatika
Indeks SPBE yang cukup rendah (2,34 dari nilai maksimal 5)

10. Urusan Koperasi dan UKM

a. Masih rendahnya koperasi usaha simpan pinjam yang memiliki ijn usaha, pada tahun 2021 tercatat baru sebesar 31,58 persen.

b. Masih rendahnya status koperasi sehat, ditahun 2021 baru sebanyak 6,14 persen koperasi dengan status sehat dan jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 7,14 persen.
c. Belum memenuhinya persyaratan kualitas produk untuk ke pasar yang lebih luas.
d. Masih rendahnya UKM yang mampu mengakses permodalan.

Permasalahan Utama Urusan Koperasi dan UKM
Sistem regulasi, peraturan dan perijinan yang belum optimal

11. Urusan Penanaman Modal

a. Target jumlah investor berskala nasional pada tahun 2021 sebanyak 169 hanya tercapai 149 investor. Demikian pula PMDN, targetnya sebesar 163.378 miliar rupiah hanya terealisasi sebesar 70 miliar rupiah. Meskipun demikian, target PMA sebesar Rp 301.249 terlampaui dengan realisasi sebesar 505.534 miliar rupiah.

   Hal itu mengindikasikan adanya beberapa masalah sebagai berikut:

   1. Belum optimalnya iklim investasi dan usaha.
   2. Belum efektif dan efisiennya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menarik minat calon investor.
   3. Belum optimalnya kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal dalam memfasilitasi dan mengkoordinir pelaku usaha.
   4. Belum optimalnya kegiatan pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal.

b. Belum optimalnya implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Tahun 2018, implementasi SPIPISE hanya 50 persen dari target 75 persen. Sedangkan untuk tahun 2019 hingga 2021, data realisasi implementasi SPIPISE tidak tersedia. Belum optimalnya implementasi SPIPISE itu mengindikasikan adanya beberapa permasalahan sebagai berikut:

   1. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman sistem perijinan *online single submission risk-based approach* (*OSS-RBA*).
   2. Jumlah SDM yang memiliki berkemampuan dan berkompetensi untuk menangani proses pelayanan perizinan dan sistem *online* tidak memadai.
   3. Tidak memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan perizinan dan penanaman modal.
   4. Tidak adanya sikronisasi antara kebijakan pusat dengan kearifan lokal yang mengakibatkan ada beberapa aturan *OSS-RBA* yang sulit diimplimentasikan untuk di Kota Salatiga.

c. Berbagai kegiatan perijinan yang meliputi jumlah dan jenis pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang penanaman modal, pendaftaran penanaman modal dalam negeri, ijin prinsip penanaman modal dalam negeri, ijin usaha penanaman modal dalam negeri, tanda daftar perusahaan (TDP), surat ijin usaha perdagangan (SIUP), perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang bekerja lebih di satu kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota sudah melampaui target 66,67 persen dengan realisasi capaian sebesar 95 persen.

Permasalahan Utama Urusan Penanaman Modal
Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal masih rendah.
Belum adanya peraturan daerah mengenai pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kota/kota.

12. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

a. Rendahnya jumlah pemuda yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan yang berakibat pada rendahnya keterlibatan pemuda dalam kegiatan kepemudaan, kewirausahaan maupun organisasi. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya penurunan pada indikator kinerja yang terkait isu-isu diatas selama periode 2017-2021, terutama di tahun 2021.

b. Kurangnya peningkatan sarana prasarana olah raga guna mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi keolahragaan dimana dalam kurun waktu 2017 -2021, pencapaian kinerja untuk indikator ini berada pada level 87,50 persen. Peningkatan sarana prasana ini juga dapat mendorong peningkatan jumlah cabang olah raga berprestasi yang sampai tahun 2021 terdapat 39 cabang olah raga berprestasi.

c. Belum optimalnya pembinaan pramuka dan peningkatan sarana prasarana pramuka guna mempertahankan peran aktif pemuda dalam kepramukaan yang baik dimana selama tahun 2017-2021, jumlah gugus depan yang mengikuti kepramukaan mencapai 100 persen.

Permasalahan Utama Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
1. Rendahnya kapasitas pemuda untuk terlibat aktif dalam kepemudaan, kewirausahaan dan organisasi, kurangnya Prestasi karena rendahnya jumlah sarana prasarana olah raga
2. Belum optimalnya pembinaan pramuka dan sarana prasaranan pramuka guna mempertahankan peran aktif pemuda.

13. Urusan Statistik

a. Belum optimalnya kualitas data untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah karena data statistik terpadu belum tersedia.
b. Hanya 6,6 persen Perangkat Daerah yang telah mengintegrasikan datanya ke sistem Dataku sehingga data terpadu tidak lengkap.

Permasalahan Utama Urusan Statistik
Kuantitas dan kualitas data untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah karena data statistik terpadu belum tersedia. Hal ini disebabkan karena hanya 6,6% Perangkat Daerah yang telah mengintegrasikan datanya ke sistem Dataku.

14. Urusan Persandian

a. Belum optimalnya tata kelola dan pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah karena kurangnya sarana prasarana serta sumber daya manusia di bidang teknologi informasi persandian.
b. Hanya 11 persen aplikasi Kota Salatiga (16 dari 136 aplikasi yang ada) yang diaudit sehingga keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah belum optimal.

Permasalahan Utama Urusan Persandian
Belum optimalnya keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah karena kurangnya sarana prasarana serta sumber daya manusia di bidang teknologi informasi persandian. Hal ini juga menjadi faktor penentu indeks SPBE (di Urusan Komunikasi dan Informatika).

15. Urusan Kebudayaan

a. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan masih fluktuatif selama periode tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 terdapat 9 benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, kemudian jumlah tersebut menurun menjadi 8 pada tahun berikutnya, sebelum melonjak ke angka 20 di tahun 2019. Pada tahun 2020 jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya menurun ke angka 16 sebelum kembali meningkat ke angka 23 pada tahun 2021. Hal ini menunjukan belum optimalnya komitmen pemerintah dalam pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya di Kota Salatiga.
b. Persentase capaian kinerja jumlah cagar budaya yang dilestarikan menunjukan ketercapaian target di setiap tahunnya dalam rentang periode 2017 -2021. Pada tahun 2017, persentase cagar budaya yang dilestarikan memenuhi target sebesar 9,40%. Pada tahun 2018, realisasi mencapai 12,06 % melebihi target yang telah ditetapkan (10,20%). Pada tahun 2019 realisasi mencapai 14 % dari target (10,2%), diikuti realisasi 11,35% dari target (10,2%) di tahun 2020 dan 16,43% dari target (10,2%) pada tahun

2021. Namun demikian capaian ini masih dapat di tingkatkan mengingat banyaknya jumlah cagar budaya yang dimiliki oleh Kota Salatiga.

c. Dengan semakin meningkatnya jumlah cagar budaya yang dilestarikan dalam periode tahun 2017-2021, kebutuhan tenaga pengelola dan pengkaji cagar budaya berpeluang semakin meningkat dan ketersediaan SDM Pengelola sementara pengkaji cagar budaya dan kesenian daerah terbatas.
d. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam kurun waktu 5 tahun terjadi fluktuasi peningkatan dari target yang ditetapkan setiap tahunnya. Namun untuk mendukung peningkatan destinasi pariwisata maka perlu melibatkan kelompok seni melalui gelar atau festival di kota Salatiga.

Permasalahan Utama Urusan Kebudayaan
Belum optimalnya pelestarian cagar budaya dan seni yang ditunjukkan dengan masih fluktuatifnya capaian jumlah pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya serta jumlah penyelenggaraan pagelaran seni selama periode 2017- 2021.

16. Urusan Perpustakaan

a. Masih belum optimalnya pembangunan literasi masyarakat ditunjukkan dengan masih belum meratanya layanan perpustakaan, masih terbatasnya koleksi perpustakaan, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan yang belum optimal, jumlah perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan masih terbatas, belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan serta masih rendahnya keanggotaan perpustakaan.
b. Belum optimalnya tingkat kegemaran membaca di masyarakat ditunjukkan dengan masih belum optimalnya frekuensi, durasi, banyaknya bacaan, frekuensi akses internet dan durasi akses internet penduduk usia 10 sampai dengan 69 tahun di wilayah Kota Salatiga.
c. Masih belum optimalnya ketersediaan tenaga perpustakaan berkompetensi memadai karena dalam rentang waktu 2019-2021, persentase pustakawan bersertifikasi tidak memenuhi target jumlah pustakawan yang telah ditentukan.

Permasalahan Utama Urusan Perpustakaan
Belum optimalnya pengelolaan dan layanan perpustakaan, dan ketersediaan tenaga perpustakaan yang memenuhi kualifikasi

17.Urusan Kearsipan

Belum optimalnya kualitas tata kelola kearsipan Perangkat Daerah di Kota Salatiga ditunjukkan/disebabkan oleh beberapa hal berikut ini :

- Terbatasnya jumlah tenaga arsiparis di masing-masing perangkat daerah dan masih rendahnya arsiparis yang bersertifikasi kompetensi kearsipan sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan sistem kearsipan sesuai aturan menuju tertib arsip.
- Masih rendahnya jumlah naskah kuno yang didaftar, dialihbahasakan atau dialihmediakan. Selain itu, belum semua OPD melaksanakan tertib arsip dan mendapatkan hasil audit yang rendah.

Permasalahan Utama Urusan Kearsipan
Masih rendahnya kualitas pengelolaan arsip di OPD, dan pemanfaatan arsip statis oleh masyarakat, serta terbatasnya jumlah arsiparis yang memenuhi kualifikasi

4.1.3 Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Rendahnya pemanfaatan, pengawasan dan pengelolaan sumberdaya air untuk kegiatan perikanan atau pembudidayaan ikan. Kondisi ini terlihat pada capaian kinerja tahun 2021 pada produksi BBI di Kota Salatiga hanya mencapai 6,28 persen.

b. Rendahnya kapasitas pembudidaya daya ikan kecil dari sisi IPTEK Budidaya Ikan Kecil, Manajemen Usaha Budidaya Ikan Kecil, Permodalan dan Penguatan Kelembagaan Petani Pembudidaya Ikan Kecil. Kondisi ini terlihat pada capaian kinerja tahun 2021 pada rata-rata pendapatan pembudidaya ikan mencapai 40 persen dan produksi perikanan budidaya mencapai 71.56 persen.

c. Bekum optimalnya penerapan cara budidaya ikan dengan metode Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai kebijakan KKP. Kondisi ini terlihat pada capaian kinerja tahun 2021 pada persentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) mencapai 65.63 persen.

Permasalahan Utama Urusan Kelautan dan Perikanan
Rendahnya kapasitas petani pembudidaya ikan (misalnya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen usaha, permodalan, dan kelembagaan).
Rendahnya pemanfaatan, pengawasan, dan pengelolaan sumber daya air (sungai, embung, dll.) untuk kegiatan perikanan produktif.

2. Urusan Pariwisata

a. Belum optimalnya jumlah kunjungan wisatawan di Kota Salatiga selama periode tahun 2017 s.d. 2021. Meskipun setiap tahunnya pada periode tersebut jumlah kunjungan ada peningkatan, (kecuali ditahun

2020 karena pandemi ada penurunan) namun kenaikan tersebut belum sesuai harapan.

b. Peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata selama periode tahun 2017 s.d. 2021 menunjukan capaian yang stagnan dalam tiga tahun berturut-turut. Selanjutnya 2 tahun terakhir , yaitu tahun 2020 dan 2021 terdapat peningkatan peran serta masyarakat. Pelaku ekraf yang merupakan bagian dari masyarakat memiliki potensi peran yang sangat besar dalam mendukung pembangunan pariwisata daerah. Oleh karena itu dibutuhkan pengembangan dan peningkatan kapasitas pelaku ekraf guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pariwisata.

Permasalahan Utama Urusan Pariwisata
Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan secara signifikan pada tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang berakibat juga pada pelaku pariwisata dan kontribusi sektor pariwisata dalam pembangunan daerah.

3. Urusan Pertanian

a. Kurangnya kegiatan peningkatan ketrampilan petani dan penggunaan teknologi.

b. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di Kota Salatiga. Hal ini terlihat dari capaian kinerja tahun 2021 untuk kegiatan bina kelompok tani dilakukan pada kelompok tani kategori pemula, lanjut dan madya dan belum melakukan bina kelompok tani katagori utama.

c. Belum optimalnya pengelolaan lahan untuk produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan. Hal ini terlihat pada produktivitas tanaman pangan utama seperti padi mencapai 6,52 ton/ha atau tingkat capaian 96,8 persen sedangkan untuk produktivitas tanaman jagung mencapai 5,82 ton/ha atau tingkat capaian 108,5 persen.

d. Keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, peternakan dan perikanan baik dari sisi kuantitas (ketersediaan), kualitas (kesesuaian komoditas dan teknologi spesifik lokasi) serta penerapannya/penggunaannya. Hal ini terlihat pada capaian kinerja produksi tanaman pangan utama seperti padi 6,52 ton/ha, belum berhasilnya peningkatan klas rumah potong hewan menjadi klas B, belum optimalnya produktivitas tanaman holtikultura dan perkebunan.

e. Belum optimalnya produksi peternakan utama yaitu daging sapi. Hal ini terlihat pada capaian produksi daging sapi dari rumah potong hewan yang ada pada tahun 2021 adalah 1.395 kg. Hal ini disebabkan

masih terbatasnya kapasitas rumah potong hewan yang ada. Disamping itu belum terjadi lonjakan yang tinggi pada populasi sapi dan ternak lainnya antara tahu 2017 hingga 2021. (Sudahkah cocok penjelasan tulisan merah tersebut? Beri penjelasan lain atau data pendukung jika memang belum cocok.)

Permasalahan Utama Urusan Pertanian
Kurangnya kegiatan peningkatan ketrampilan petani/peternak (misalnya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen usaha, permodalan, dan penguatan kelembagaan)
Belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian dan peternakan.

4. Urusan Perdagangan

a. Rasio capaian prosentase izin usaha perdagangan yang ditertbitkan meningkat dari 93 % ditahun 2019 menjadi 100% ditahun 2020. Hal ini dikarenakan Dinas Perdagangan hanya mengeluarkan rekomendasi perijinan usaha perdagangan, untuk izin yang diterbitkan kewenangan dari DPMPTSP.
b. Masih perlunya pembangunan pasar tradisional yang memenuhi standart, hal ini ditunjukkan dengan rasio capaian prosentase pasar tradisional yang memenuhi standart tercapai 80% pada tahun 2021 sedangakan pada tahun 2020 tercapai 73%. Revitalisasi pasar tradisional masih perlu dilakukan karena adanya Pemutusan hubungan Kemitraan (pihak ke-3 ke Pemkot) sehingga masih perlunya pembangunan guna kenyamanan para pedagang dan meningkatkan PAD Kota Salatiga.
c. Masih pelunya lokasi PKL yang tertata, hal ini ditunjukkan oleh rasio capaian PKL yang tertata pada tahun 2020 dan 2019 masih 60% dari target 100%, hal ini dikarenakan adanya lokasi PKL yang ditata bertentangan dengan peraturan RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) Kota Salatiga sehingga target belum tercapai secara maksimal.
d. Jumlah produk yang bisa diterima pasar Internasional masih tetap (stagnan) sebesar 4 produk selama 5 tahun terahkir dari tahun 2017 sampai dengan 2021.
e. Rasio capaian prosentase kelompok pedagang formnal dan informal yang dibina tercapai 96% pada tahun 2021 dan 92% pada tahun 2020, pada tahun 2021 terdapat pembangunan pasar tradisional yang baru membutuhkan pembinaan dan pengawasan dari Dinas Perdagangan kepada para pedagang dan paguyuban.

Permasalahan Utama Urusan Perdagangan
Perlu pembangunan pasar tradisional yang memenuhi standar dan Masih perlunya lokasi PKL agar lebih tertata.

5. Urusan Perindustrian

a. Pertumbuhan IKM dan prosentasi IKM sudah tercapai. Sementara kontribusi sektor Industri terhadap PDRB pada tahun 2021 akan tercapai. Target di tahun 2021 30 persen sedangkan realisasinya adalah 29,73 persen.
b. Masih rendahnya jumlah produk IKM yang dipromosikan. Target di tahun 2021 adalah 20 produk, sedangkan realisasi di tahun 2021 belum ada produk yang dipromosikan, dikarenakan adanya pandemi Covid-19.
c. Kurang terfasilitasi kelompok IKM yang mendapat bantuan, belum terealisasi target yang ditetapkan di tahun 2021 yaitu 1 persen.
d. Banyaknya perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan. Kondisi pada tahun 2021 jumlah perusahaan wajib memiliki Peraturan Perusahaan adalah sebanyak 130 Perusahaan namun yang telah memiliki hanya 82 Perusahaan.
e. Kurang kuatnya daya saing dan belum optimalnya nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah.
f. Masih banyaknya industri yang belum berbadan hukum.
g. Belum ada kawasan industri.
h. Belum berkembangnya cluster IKM di Kota Salatiga.
i. Belum optimalnya sarana, prasarana dan kelembagaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda).
j. Belum adanya pemantauan secara rutin terhadap limbah industri.
k. Belum adanya pengawasan dan pengendalian ijin usaha industri.
l. Rendahnya jumlah usaha industri yang memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dan melaporkan data industrinya.
m. Kurangnya mediator dalam pembinaan, pengembangan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Permasalahan Utama Urusan Perindustrian
Rendahnya daya saing IKM dan belum optimalnya nilai tambah beberapa produk industri kecil dan menengah, sebagai akibat dari belum perizinan dan beradan hukum, kurang promosi, kekurangan modal, dan kurang pendampingan.

6. Urusan Transmigrasi

a. Ketidaksesuaian minat calon transmigran (Catran) dengan lokasi/ destinasi transmigrasi yang sediakan sehingga persentase peminat transmigrasi yang merupakan indikator keberhasilan kinerja urusan transmigrasi belum mencapai target yang telah ditetapkan, dengan rata-rata capaian 52%.
b. Fasilitasi pelaksanaan program transmigrasi oleh pemerintah Kota Salatiga belum dilaksanakan secara optimal.

c. Kebijakan transmigrasi di Kota Salatiga yang merupakan kepanjangan tangan dari kebijakan pusat dan provinsi menyebabkan alokasi jumlah calon transmigran dan penentuan lokasi transmigrasi bersifat *given,* yang selanjutnya menjadi salah satu kendalapenurunan minat calon transmigran. Hal ini menjadi penyebab belum tercapainya kinerja urusan trasmigrasi di Kota Salatiga

Permasalahan Utama Urusan Transmigrasi
Rendahnya persentase peminat transmigrasi maupun jumlah calon transmigran disebabkan karena masih kurang optimalnya kegiatan fasilitasi program transmigrasi yang dilaksanakan pemerintah Kota Salatiga

4.1.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

a. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan. Hal ini terlihat dari realisasi capaian jumlah usulan masyarakat yang terakomodasi pada tahun 2021 hanya sebesar 72,76 persen.

b. Belum optimalnya penggunaan data dalam perencanaan daerah. Pada tahun 2021 penggunaan data dalam perencanaan daerah sebesar 84,96 persen.

Permasalahan Utama Perencanaan
Belum adanya sinkronisasi antara Konsistensi, keselarasan dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah

2. Penelitian dan Pengembangan

a. Masih rendahnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan. Meskipun target pemanfaatan hasil kelitbangan sudah tercapai 100 persen di tahun 2021, namun demikian rasio capaian mengalami penurunan. Rasio capaian pemanfaatan hasil kelitbangan pada tahun 2021 sebesar 73, 33 persen jauh menurun dibandingkan di tahun 2020 sebesar 100,69 persen.

b. Kurang terfasilitasinya hasil temuan yang ditunjukkan oleh tingkat capaian prosentase hasil temuan. Yang terfasilitasi hanya 30 persen di tahun 2021.

Permasalahan Utama Penelitian dan Pengembangan
Belum optimalnya pemanfataan hasil penelitian dan pengembangan.

3. Keuangan

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang

disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban daerah.

Saat ini Salatiga dalam Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah masih menggunakan beberapa aplikasi dalam pengelolaan keuangan dan belum terintegrasi seperti pengelolaan pendapatan pajak belum terintegrasi dengan penatausahaan penerimaan dan penatausahaan BMD belum terintegrasi dengan perencanaan anggaran dan pelaporan.

Jika SIPKD belum terintegrasi maka akan menghambat pelaporan dan transparansi pertanggungjawaban pendapatan dan belanja daerah, yang pada akhirnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah tidak dapat terevaluasi secara tertib, efisien, ekonomi, efektif, transparan dan taat pada ketentuan perundang-undangan.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belum Optimal

   Tahun 2020 capaian kinerja dalam hal PAD sebesar 3,13 persen, belum sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 10 persen. Capaian Kinerja terkait dengan PAD (Pendapatan Pajak Daerah; Pendapatan Retribusi Daerah; Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah) belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga perlu upaya keras untuk dapat mencapai target yang ditetapkan dengan menggali potensi pajak dan retribusi daerah.

   Permasalahan menurunnya PAD berasal dari aspek eskternal dimana kondisi eksternal tersebut terjadi sebagai akibat dari kebijakan pemerintah tentang Pembatasan Sosial dan Mobilitas masyarakat karena Pandemi Covid-19.

b. Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat terkait Pengelolaan Keuangan.

   Permasalahan yang muncul sebagai akibat dari perubahan regulasi adalah karena daerah belum bisa langsung mengimplementasikan regulasi tersebut dan harus disesuaikan dengan kebijakan dan peraturan internal Kota Salatiga yang sudah di sah kan sebelumnya.

Permasalahan Utama Keuangan
Belum Terintegrasinya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), sehingga menghambat pelaporan dan transparansi pertanggungjawaban pendapatan dan belanja daerah, yang pada akhirnya kinerja perangkat daerah tidak dapat terevaluasi dengan mudah.
Belum Optimalnya pajak pendapatan daerah, sebagai dampak dari pandemi Covid-19

4. Kepegawaian

a. Masih kurangnya pemenuhan arsip Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan rasio capaian persentase pemenuhan arsip Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah 0 persen di dua tahun terakhir 2020 dan 2021. Meski selama 3 tahun dari tahun 2017 hingga 2019 rasio capaian sebesar 100 persen.
b. Masih kurangnya peserta yang mengikuti diklat, baik diklat kepemimpinan maupuan diklat teknis dan fungsional. Realisasi capaian pada tahun 2021 persentase peserta yang mengikuti diklat kepemimpinan adalah 6,89 persen. Sementara yang mengikuti diklat teknis dan fungsional sebesar 13,89 persen.
c. Masih rendahnya PNS yang melanjutkan pendidikan sesuai dengan NSPK (Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria) yaitu 4,94 persen di tahun 2021, bahkan tidak menyentuh 5 persen.
d. Masih rendahnya persentase PNS struktural yang mengikuti kegiatan assessment, yaitu 5,48 persen di tahun 2021.

Sementara penyelesaian mutasi dan pensiun, kasus pelanggaran disiplin ASN dalam satu tahun yang terselesaikan dan fasilitas pindah/ purna tugas PNS sudah berhasil mencapai 100 persen di tahun 2021.

Permasalahan Utama Kepegawaian
Kompetensi SDM masih rendah

4.1.5 Fungsi Penunjang Lainnya

1. Pengawasan

a. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
b. Belum optimalnya penguatan Kapabilitas APIP;

Permasalahan Utama Urusan Pengawasan
Kurang optimalnya peran dan fungsi pengawasan dalam birokrasi untuk mewujudkan *good governance*

2. Sekretariat DPRD

Kegiatan Sekretariat Dewan bersifat administratif, permasalahan utama yang dihadapi adalah jumlah produk hukum yang akan diajukan dan telah didampingi oleh tenaga ahli yang kompeten. Kompetensi tenaga ahli sesuai dengan kompetensi akademis menjadi masalah utama sehingga belum tercapainya targetnya. Persentase jumlah produk yang didampingi oleh tenaga ahli DPRD pada tahun 2021 baru mencapai 88 persen.

Permasalahan Utama Sekretariat DPRD
Belum optimalnya jumlah produk hukum yang disebabkan karena terbatasnya tenaga ahli yang sesuai dengan kompetensinya.

3. Sekretariat Daerah

a. Belum optimalnya fungsi koordinator/fasilitator bagian pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
b. Belum optimalnya fungsi koordinator/fasilitator bagian perekonomian dan pembangunan.

Permasalahan Utama Sekretariat Daerah
Belum optimalnya fungsi sebagai koordinator/fasilitator terutama pada bagian pemerintahan dan kesejahteraan rakyat serta bagian perekonomian dan pembangunan.

4. Kecamatan

a. Belum optimalnya kualitas pelayanan di kecamatan dan kelurahan, yang ditunjukkan dari rerata persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh kecamatan dan kelurahan sebesar 85,37 persen pada tahun 2021.
b. Belum Optimalnya serapan usulan masyarakat,yang ditunjukkan dari rerata persentase serapan usulan masyarakat sebesar 59,86 persen atau realisasi usulan hasil Musrenbang baru mencapai 59,86 persen.

Permasalahan Utama Kecamatan
Belum Optimalnya kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan organisasi-organisasi ditingkat kecamatan dan kelurahan dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya serapan usulan masyarakat dalam Musrenbang

5. Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Potensi konflik horizontal, dikarenakan karakteristik wilayah dengan kemajemukan budaya etnis dan agama
b. Bahaya pemyalahgunaan narkoba khususnya generasi muda

Permasalahan Utama Kesatuan Bangsa dan Politik
Potensi konflik horizontal dan bahaya penyalahgunaan narkoba

4.2 Isu Strategis

Isu strategis menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan dimasa yang akan datang. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan

peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu strategis pembangunan di Kota Salatiga berdasarkan hasil analisis pada berbagai permasalahan pembangunan yang merupakan "*expectation gap*" dirumuskan sebagai berikut:

1. **Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan**

   Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan ditujukan dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Salatiga yang berkualitas yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia, pemerataan dan keadilan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, semakin meninghkatnya akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan.

   Pembangunan pendidikan di Kota Salatiga menunjukkan kondisi/tren yang sangat baik dalam setiap kurun waktu pembangunan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah dalam lima tahun terakhir (2017-2021). Rata-rata lama sekolah di Kota Salatiga pada tahun 2017 adalah sebesar 10.15 tahun, meningkat menjadi menjadi 10.66 tahun di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan penduduk di Kota Salatiga ada pada tingkatan SMP kelas 3 dan sebagian sudah ada di SMA. Selama rentang waktu lima tahun pembangunan bidang pendidikan telah mampu meningkatkan lama sekolah dari 9,81 tahun (pada tahun 2015) menjadi 15,42 tahun (pada tahun 2021). Demikian pula kesenjangan Pendidikan berdasarkan jender di Kota Salatiga menunjukkan kesenjangan yang rendah, dengan perbandingan 11 tahun untuk laki-laki dan 10,06 tahun untuk perempuan. Namun demikian jika dilihat dari besarnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Usia Dini (PAUD). Ada kecenderungan terjadi penurunan APK PAUD dalam lima tahun terakhir, penurunan yang cukup tajam terjadi pada tahun 2020 ke 2021 (dari APK sebesar 42,64 persen menurun menjadi 38,33%). Demikian juga untuk menuju zero angka putus sekolah hingga sampai saat ini belum terwujud walaupun relatif sangat kecil angka putus sekolah. Pada tahun 2021 anak putus sekolah tingkatan SD/MI mencapai sebesar 0,005 persen dan anak putus sekolah SMP/MTs mencapai sebesar 0,44 persen (dampak pandemi Covid-19 mempengaruhi terhadap angka putus sekolah pada tingkatan pendidikan Sekolah Menengah yaitu dari 0,08 pada tahun 2020 meningkat menjadi 0,44 pada tahun 2021). Terkait dengan sarana prasarana ruang belajar

beserta isinya selama kurun waktu lima tahun menunjukkan terjadinya peningkatan yang semakin baik. Kondisi lembaga pelatihan dan kursus masih menunjukkan capaian kinerja yang masih rendah dengan persentase yang terakreditasi sebesar 33,33 persen dan untuk PKBM sebesar 58,33 persen di tahun 2021. Selain itu ada beberapa persoalan yang terkait dengan isu pendidikan di kota Salatiga, yakni belum semua satuan pendidikan menerapkan kurikulum prototype yang menjadi tuntutan rangkaian program merdeka belajar, masih terbatasnya pendidik menjadi guru penggerak dan hingga saat ini kota Salatiga belum memiliki kurikulum muatan lokal (Mulok).

Pembangunan pada urusan kesehatan dapat dilihat dari kondisi pencapaian indikator derajat kesehatan masyarakat dilihat secara makro, yaitu meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya Anka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA) dan gizi buruk. Di Kota Salatiga selama rentang lima tahun terakhir (2017-2021) usia harapan hidup pada tahun 2017 mencapai 76,87 persen, meningkat menjadi 77,55 persen pada tahun 2021.Permasalahan yang masih menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Salatiga berkaitan dengan angka kesakitan dan kematian. Pada angka kematian menunjukkan kondisi dimana AKI mengalami penurtunan tetapi pada tahun 2020-2021 cenderung stagnan pada angka 117 per 100.000 KLH, AKB menurun tetapi tidak signifikan yakni sebesar 11 per 1000 KLH ditahun 2020 menjadi sebesar 10,75 per 1000 KLH, dan AKABA sebesar 11 per 1000 KLH. Selain itu masih terdapat balita dengan kondisi gizi buruk yakni sebesar 0,02 persen. Terkait gizi buruk salah satunya adalah kejadian stunting (Gizi kronis), dimana Kota Salatiga saat ini masih memiliki angka prevalensi stunting sebesar 10,48 persen atau sebanyak 1099 Balita Stunting pada tahun 2020 dan tersebar pada semua Kecamatan dan Kelurahan di Kota Salatiga. Masih adanya kejadian Stunting ini akan mempengaruhi secara nyata pada kualitas Sumberdaya manusia Kota Salatiga pada tahun-tahun mendatang.

2. Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Kerakyatan serta Masih Tingginya Angka Kesenjangan Pendapatan Penduduk

Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah menjadi isu strategis Kota Salatiga dalam proses pembangunan perekonomian Kota Salatiga ke depan. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan koperasi sebagai perekonomian berbasis kerakyatan yang tumbuh tidak optimal. Realisasi capaian kinerja jumlah koperasi aktif di Kota Salatiga pada tahun 2021 dibandingkan dengan trend kondisi terakhir tahun 2022 baru mencapai 70 persen. Ini mengindikasikan nilai realisasi kinerja masuk kategori sedang sehingga masih butuh upaya meningkatkan kinerja. Selain itu

jumlah koperasi/KSP sehat di Kota Salatiga masih sangat kecil yaitu baru sebanyak 6,14 persen. Kondisi masih sangat sedikitnya jumlah KSP yang sehat tersebut tentu saja akan berkorelasi terhadap banyaknya masyarakat yang terjerat persoalan dengan koperasi. Selain koperasi, UKM juga merupakan sektor ekonomi daerah yang diharapkan mampu menopang perekonomian Kota Salatiga. Namun demikian dukungan pemerintah terhadap berkembangnya UKM masih rendah. Ini terlihat dari jumlah UKM yang sudah dibina di tahun 2021 baru sebanyak 79,11 persen. Selain itu juga jumlah UKM yang telah mengikuti pameran produk masih sangat sedikit yaitu hanya sebanyak 0,53 persen. Apabila dilihat dari capaian kinerja pada tahun 2021 baru mencapai 8,91 persen yang berarti kinerja masih sangat rendah.

Dari sisi Industri Kecil dan Menengah (IKM), IKM di Kota Salatiga tumbuh lambat yaitu hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0,3 persen. Selain itu kontribusi sektor IKM terhadap PDRB masih belum optimal yaitu baru sebesar 29,73 persen di tahun 2021. Hal ini diduga disebabkan oleh masih belum optimalnya pembinaan yang dilakukan terhadap pelaku IKM. Pada tahun 2021 jumlah kelompok IKM yang telah dibina baru sebesar 3,45 persen.

Di bidang penanaman modal, investasi sebagai variabel yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga akan dapat mengurangi kesenjangan pendapatan. Namun demikian kinerja di bidang penanaman modal belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN masih sangat rendah yaitu baru mencapai 55,59 persen.

Angka kemiskinan di Kota Salatiga terus mengalami peningkatan pada periode 2019-2021, tercatat prosentase jumlah penduduk miskin Kota Salatiga pada tahun 2019-2021 berturut-turut adalah sebesar 4,76 persen, 4,94 persen dan 5,14 persen. Kenaikan angka ini salah satunya diakibatkan oleh pandemi COVID-19.

3. Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Terhadap Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial

Peningkatan kualitas penanganan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial (PMKS) ditujukan dalam rangka mewujudkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. Pada tahun 2016, target pemberdayan PMKS yang menerima program pemberdayan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya adalah sebesar 3,4 persen. Dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan PMKS ini, berdasarkan data dari tahun 2017 hingga 2021, ditentukan target yang dinaikan setiap tahunnya. Adapun realisasi dari peningkatan tersebut

melampaui target dengan data sebagai berikut: pada tahun 2017 target dinaikkan dari tahun sebelumnya 3,4 persen menjadi 4,0 persen dengan realisasi 5,71 persen, pada tahun 2018 target dinaikkan dari tahun sebelumnya 4,0 persen menjadi 5,0 persen dengan realisasi yang sama dengan tahun 2017 yaitu sebesar 5,71 persen, pada tahun 2019 target dinaikan dari tahun sebelumnya 5,0 persen menjadi 6,0% dengan realisasi yang cukup besar yakni 9,63 persen, pada tahun 2020 target dinaikkan dari tahun sebelumnya 6,0 persen menjadi 7,0 persen dengan realisasi lebih rendah dari tahun 2019 yakni hanya sebesar 8,78 persen dan pada tahun 2021 target dinaikkan menjadi 9,0 persen dengan realisasi tertinggi yaitu 10,89 persen. Tahun 2021 rasio capaian akhir sebesar 113,64 yang artinya melampaui target.

Permasalahanya selanjutnya terkait kurangnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan rehabilitasi sosial dan Belum optimalnya penanganan rehabilitasi sosial PMKS. Pada tahun 2016 target kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan rehabilitasi sosial adalah sebesar 30 persen. Dalam rangka meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan rehabilitasi sosial ini, berdasarkan data dari tahun 2017 hingga 2021 ditentukan target yang dinaikan setiap tahunnya. Adapun realisasi dengan hasil 100 persen dari peningkatan tersebut adalah sebagai berikut: pada tahun 2017 target dinaikkan menjadi 36 persen dengan realisasi mencapai 100 persen, pada tahun 2018 target dinaikkan menjadi 43 persen dengan realisasi mencapai 100 persen, pada tahun 2019 target dinaikan menjadi 51 persen dengan realisasi mencapai 100 persen, pada tahun 2020 target dinaikkan menjadi 61 persen dengan realisasi mencapai 100 persen dan pada tahun 2021 target dinaikkan menjadi 61 persen dengan realisasi mencapai 100 persen. Tahun 2021 rasio capaian akhir sebesar 113,64 persen yang artinya melampaui target.

Program pemberdayaan manusia dengan Persentase penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota pada kondisi awal tahun 2016 yatu 0 persen, pada tahun 2017 mempunyai target sebesar 3 persen. Tren kenaikan target capaian yaitu pada tahun 2018 target capaian mengalami kenaikan menjadi 5 persen, pada tahun 2019 target dinaikan menjadi 7 persen. Pada tahun 2020 target capaian menjadi 9 persen dengan realisasi capaian target sebesar 100 persen. Pada tahun 2021 target menjadi 11 persen dengan realisasi 100 persen sehingga persentase Capaian Kinerja sampai dengan tahun 2021 sebesar 769,23.

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dari urusan Kesbangpol Kota Salatiga yaitu terkait persentase pemahaman

masyarakat terhadap wawasan kebangsaan yaitu kondisi awal pada tahun 2017 memetapkan target sebesar 12,8 persen. pada tahun 2018 target dinaikkan menjadi 12,9 persen dengan realisasi capain yaitu sebesar 50,5 persen. Pada tahun 2019 target sebesar 12,2 persen dengan capaian realisasi sebesar 50 persen. Pada tahun 2020 target dinaikkan menjadi 13,1 persen dengan capaian kinerja sebesar 50 persen. Pada tahun 2021 target diturunkan menjadi 12,2 persen dengan realisasi capaian kinerja sebesar 83,33 persen.

Peningkatan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terkait peningkatan pemberdayaan masyarakat dan penanganan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Salatiga yaitu pada Urusan SatpolPP dengan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada tahun 2016 hingga tahun 2021 mempunyai target 100 persen dengan realisasi 100 persen, akan tetapi realisasi pada tahun 2021 mencapai 94,36 persen dengan demikian prosentase capaian kinerja sampai tahun 2021 yaitu sebesar 94,36 persen. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 100.000 penduduk, pada tahun 2016 hanya terdapat 8 orang Satpol PP. Target pada tahun 2017 8 orang namun realisasi sebesar 7 orang. pada tahun 2018 target SDM 9 orang namun realsiasi sebesar 8 orang. tahun 2019 target jumlah SDM 9 orang sedangkan realisasi 8 orang. pada tahun 2020 target jumlah SDM 10 orang dengan realisasi sebesar 8 orang. Pada tahun 2021 target jumlah SDM 10 orang akan tetapi realisasi 0 persen. sehingga prosentase capaian kinerja sebesar 0 persen. Persentase Patroli Siaga Ketertiban Umum pada tahun 2016 hingga tahun 2021 mempunyai target realisasi 100 persen, akan tetapi dalam implementasinya capaian realisasi target mengalami penurunan pada tahun 2017 realisasi 225 persen sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 150 persen, pada tahun 2019 menjadi 100 persen.

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran terkait Tingkat waktu tanggap (*response time rate)* daerah layanan wilayah kebakaran, Cakupan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran serta Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota. Pada tahun 2016 kondisi awal terkait Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan wilayah kebakaran yaitu sebesar 38,89 persen, target pada tahun 2017 yaitu sebesar 70 persen dengan realisasi 55 persen, pada tahun 2018 target 70 persen dengan realisasi 52 persen, pada tahun 2019 target 70 persen dengan realisasi 81,81 persen, pada tahun 2020 target 70 persen dengan realisasi 52,60 persen sehingga kondisi akhir mencapai 70 persen. Pada cakupan

Satuan Petugas Pemadam Kebakaran tahun 2017-2018 dengan target 1 realisasi 1 orang. Pada tahun 2019-2021 dengan target 1 orang terrealisasi 2 orang. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota pada tahun 2017 memiliki target 80 persen dengan realisasi 75 persen, pada tahun 2018-2020 menetapkan target kinerja sebesar 80 persen dengan capaian realisasi sebesar 100 persen.

4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah suatu peyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Tata kelola pemerintahan yang baik mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama baik oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan. Lembaga yang menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik akan diperoleh kinerja yang baik. Hingga saat ini pemerintahan Kota Salatiga belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya menjalan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baikdalam tata kelola pemerintahan yang baik selau melaksanakan prinsip pelibatan Partisipasi Masyarakat (*Participation*), Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule of Law*), Transparansi (*Transparency*), Peduli pada *Stakeholder*/Dunia Usaha, Berorientasi pada Konsensus (*Consensus*), Kesetaraan (*Equity*), Efektivitas dan Efisiensi (*Effectivenessand Efficiency*), Akuntabilitas (*Accountability*), dan Visi Strategis (*Strategic Visio*n).

Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Salatiga terlihat pada belum optimalnya pelayanan perangkat daerah di berbagai urusan (kesehatan, kecamatan/kelurahan, ketentraman, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perpustakaan, perhubungan, perdagangan, dll.). Beberapa perangkat daerah belum mendasarkan pelayanannya pada standar operasional prosedur. Sebagai contoh, terdapat perangkat daerah yang belum optimal memberikan pelayanan pengurusan izin (misalnya izin waralaba). Masih banyak waralaba yang belum dan tidak paham aturan baik dari pusat maupun daerah serta perubahan-perubahannya. Selain itu, perangkat daerah Kota Salatiga juga belum optimal melakukan sosialisasi pengajuan rekomendasi izin Tanda Daftar Gudang (TDG), pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan IUTM.

Selain itu, masih terdapat kekurangan dalam pelayanan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, pembinaan dan penegakan disiplin aparatur, penilaian kompetensi ASN, penyelenggaraan tata kelola manajemen ASN sesuai NSPK, serta kualitas pengelolaan arsip di OPD. Dalam hal pendataan daerah juga masih ada kekurangan kualitas data dan manajemen data. Contohnya adalah 1) terbatasnya informasi kebencanaan, peta rawan bencana, kajian resiko bencana dan perencanaan penanggulangan bencana, 2) belum optimalnya kualitas dan kuantitas data pertahanah dan pemetaan tanah, 3) belum optimalnya kualitas data untuk perencanaan daerah, 4) belum optimalnya pengumpulan data oleh tiap OPD ke sistem data Kota Salatiga, dan 5) belum tersedianya data statistik terpadu dari setiap urusan pelayanan dan pemerintahan. Kekurangan pada pelayanan dan manajemen ASN serta keterbatasan data yang berkualitas dan terbaharui akan membuat masyarakat tidak puas dengan pelayanan publik dan *stakeholder* sulit melakukan pengembangan program pembangunan. Apabila hal ini tidak diselesaikan, maka pembangunan Kota Salatiga akan stagnan.

Dalam perkembangannya untuk memperkuat sistem inovasi nasional (SINas) diperlukan wahana untuk memperkuat pilar-pilar bagi penumbuh kembangan kreatifitas-keinovasian ditingkat yang lebih bawah atau tingkat daerah, dimana ini disebut sebagai sistem inovasi daerah yang selanjutnya disebut dengan (SIDa) yang merupakan bagian integral dari penguatan sistem inovasi nasional. Terdapat beberapa implementasi SIDa di Kota Salatiga yang belum optimal seperti Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Informasi Manajemen Pertanahan, Sistem Informasi Puskesmas, SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), SIINAS, Informasi Kependudukan, dll.

Isu prioritas lain yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan adalah pembangunan Kota Salatiga sebagai Kota Layak Anak. Di dalamnya termasuk juga pembangunan Kecamatan Layak Anak dan Kelurahan Layak Anak. Masalah yang perlu diselesaikan saat ini adalah penguatan kelembagaan dalam lingkup pemerintahan demi pemenuhan hak anak. Di dalamnya tercakup penyediaan peraturan dan anggaran daerah, penyediaan lembaga konsultasi keluarga dan lembaga konsultasi kesejahteraan anak, penyediaan sumber daya manusia terlatih, serta penyediaan hak sipil dan kebebasan anak. Berbagai aktivitas penguatan kelembagaan ini harus melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka akan sulit mewujudkan Kota Salatiga sebagai daerah yang aman, layak, dan kondusif sebagai tempat tumbuh kembang anak.

Isu lain yang berkaitan dengan tata pemerintahan adalah kurangnya koordinasi dan belum optimalnya pengawasan berbagai urusan layanan. Sebagai contoh adalah belum optimalnya fungsi beberapa perangkat daerah sebagai koordinator/fasilitator antar perangkat, belum tersedianya sistem logistik (penyediaan dan distribusi) pangan serta koordinasi dan sinkronisasi pengelolaannya, rendahnya koordinasi ketahanan pangan, minimnya pengawasan keamanan pangan, minimnya pengawasan penanaman modal, serta rendahnya pemantauan limbah industri. Koordinasi dan sinkronisasi antar urusan layanan public merupakan suatu keharusan dalam memecahkan masalah multisektor. Jikalau hal ini tidak diselesaikan, maka akan ada banyak program pembangungan yang tumpang tindih dilaksanakan oleh berbagai perangkat daerah. Selain itu, pencapaian target kinerja daerah juga tidak akan tercapai jikalau ada kekosongan koordinasi. Di sisi lain, tindakan pemantauan dan pengawasan berbagai urusan publik juga wajib dilakukan dan ditingkatkan sehingga aktivitas yang dilakukan masyarakat dan pelaku usaha tidak melanggar aturan dan standar Kota Salatiga.

Isu lain adalah Belum terintegrasinya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sehingga menghambat perlaporan dan transparansi pertanggungjawaban pendapatan dan belanja daerah, yang pada akhirnya kinerja perangkat daerah tidak dapat terevaluasi dengan mudah. Belum optimalnya pendapatan asli daerah (PAD) sebagai dampak dari pandemi covid-19

5. Pemenuhan Pelayanan Infrastruktur

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah serta memedomani prioritas nasional atau kementerian/lembaga terkait dari suatu perangkat daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan isu strategis daerah dirumuskan berdasarkan penelaahan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), dokumen rencana pembangunan lainnya, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dan isu strategis perangkat daerah. Rumusan isu strategis daerah harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang. Isu strategis daerah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Sesuai dengan RPJPD Kota Salatiga tahun 2005-2025, pembangunan Kota Salatiga pada tahap keempat (tahun 2020-2024)

diarahkan pada pemantapan program sebelumnya yang telah berjalan. Salah satu aspek pembangunan yang menjadi target pemantapan adalah infrastruktur (fasilitas dan utilitas kota) yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Berdasarkan analisis permasalahan daerah, terdapat beberapa isu prioritas yang muncul dan akan berpengaruh terhadap pemantapan kuantitas dan kualitas infrastruktur kota di masa yang akan datang. **Infrastruktur adalah struktur fasilitas dasar untuk kepentingan umum, baik fisik maupun non fisik yang dibangun oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.** Infrastruktur adalah wujud modal publik (*public capital*) yang terdiri dari jalan umum, jembatan, sistem saluran pembuangan, dan lainnya sebagai investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur di kota bukan hanya sekedar membangun atau mengadakan kebutuhan infrastrukur akan tetapi juga sinkronisasi untuk terciptanya keterpaduan program antar perangkat daerah karena pengembangan infrastruktur suatu kota sering melibatkan lebih dari satu perangkat daerah. Sinkronisasi program dapat mewujudkan keterpaduan dalam pengembangan kawasan dengan pembangunan infrastruktur.

Isu strategis pengembangan infrastruktur wilayah di Kota Salatiga adalah belum optimalnya peningkatan ataupun penyediaan infrastruktur utama jalan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat. Jalan dan jembatan yang baik belum mencapai 100 persen, bahkan, kecukupan jembatan hanya 11 persen. Hal ini tentu akan menghambat mobilitas penduduk. Jalan merupakan infrastruktur pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Meningkatnya usaha pembangunan maka akan meningkat pula tuntutan peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain.

Panjang jalan di seluruh wilayah Kota Salatiga sekitar mencapai 337.470 kilometer. Kota Salatiga memiliki dua (2) kewenangan infrastruktur jalan: 12 km jalan nasional dan 337.460 km jalan kota. Tiga (3) ruas jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah telah beralih menjadi kewenangan Kota Salatiga pada tahun 2015 antara lain Jl. Patimura, Jl. Hasanudin dan Jl. Ahmad Yani. Infrastruktur pendukung untuk transportasi masyarakat adalah halte atau tempat pemberhentian sementara untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Kota Salatiga merupakan kota transit karena menjadi perlintasan arus lalu lintas dan menjadi jalur utama Kota Semarang-Solo sehingga Kota Salatiga mempunyai arus lalu lintas cukup padat. Kota Salatiga menyediakan satu terminal angkutan umum kelas A (Terminal Tingkir), dan satu terminal

angkutan umum kelas C, serta didukung dengan sub terminal yang menghubungkan wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan di Kota Salatiga. Hingga saat ini belum ada ada terminal angkutan barang di Kota Salatiga. Masih kurangnya terminal kelas C di beberapa pusat kegiatan ekonomi masyarakat menjadikan sistem transportasi dalam Kota Salatiga berisiko menjadi tidak teratur karena angkutan umum bisa berhenti dimanapun, penumpang bisa naik dari titik manapun, dan angkutan barang bisa berhenti dimanapun. Di sisi lain infrastruktur drainase di jaringan jalan yang baik dan tidak tersumbat hanya 75 persen, dengan demikian, masih ada risiko terjadinya banjir akibat drainase yang rusak/tersumbat di sepanjang jalan kota.

Ketersediaan infrastruktur yang membantu perekonomian masyarakat Kota Salatiga juga masih terbatas. Beberapa contohnya adalah terbatasnya infrastruktur pertanian, perikanan, dan peternakan berupa bangunan Balai Penyuluh Pertanian, Rumah Potong Hewan yang hanya tersedia satu unit kelas C, *long storage,* air irigasi, dan Jalan Usaha Tani. Infrastruktur irigasi di Kota Salatiga terdiri atas 5 Daerah Irigasi yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah seluas 195 ha, dan 14 Daerah Irigasi yang menjadi wewenang Pemerintah Kota Salatiga seluas 790 ha. Luas areal tanam sebesar 787,028 ha dengan nilai produksi pertanian yang dihasilkan sebesar 76,4 ton/ha/panen. Namun demikian, kinerja layanan jaringan irigasi yang ada dalam mendukung produksi pangan belum dapat optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih tercatat lebih kurang 16 persen jaringan irigasi yang rusak dan harus diperbaiki. Rendahnya ketersediaan infrastruktur pendukung perekonomian akan memperlambat produktivitas pelaku ekonomi di berbagai sektor tersebut.

Ketersediaan infrastruktur sosial yang dapat digunakan warga untuk aktivitas kemasyarakatan pun masih belum cukup misalnya untuk aktivitas kepemudaan, olahraga, pramuka, dan taman kota. Dengan demikian, berbagai aktivitas masyarakat yang dapat meningkatkan kehidupan sosial pun hanya dapat dilakukan di lokasi terbatas. Hal ini akan berisiko menurunkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan sosial penduduk kota. Berbagai fasilitas kreatif dan rekreatif yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak juga masih terbatas. Tidak semua kelurahan/RW/RT memiliki fasilitas tersebut sehingga anak tidak mendapatkan ruang publik yang memadai untuk tumbuh kembangnya. Keterbatasan ini akan menghambat terciptanya Kota Salatiga sebagai Kota Layak Anak.

Penyediaan infrastruktur yang berkaitan dengan kemandirian pangan dan penanggulangan bencana masih belum optimal. Hal ini

ditunjukkan dengan minimnya jumlah lumbung pangan. Keterbatasan ini akan membuat penduduk Kota Salatiga berisiko rawan pangan terutama di masa-masa tak terduga (misalnya pandemi atau bencana alam). Selain itu, penduduk juga berisiko tinggi mengalami dampak negatif bencana alam akibat minimnya kesiapan pencegahan dan penanggulangan bencana. Dengan demikian isu prioritas ini perlu diselesaikan segera oleh pemerintah Kota Salatiga.

Isu prioritas berikutnya adalah layanan air bersih dan sanitasi di permukiman. Dua hal ini akan menentukan tingkat kesehatan masyarakat kota. Meskipun hampir seluruh penduduk Kota Salatiga sudah dapat mengakses air bersih (99%), ternyata masih ada lokasi tertentu yang tidak terjangkau layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Selain itu, masih ada 12 persen penduduk Kota Salatiga yang tidak terhubung ke sistem pengelolaan air limbah domestik komunal. Berdasarkan tinjauan lapang tim urusan pekerjaan umum, salah satu penyebab utamanya adalah tidak adanya *septic tank* di rumah tangga warga tersebut. Isu sanitasi permukiman akan sangat berkaitan dengan kesejahteraan dan tingkat perekonomian penduduk, oleh karena itu, penyelesaiannya perlu dilakukan segera secara bersinergi dengan sektor lainnya.

Isu prioritas selanjutnya berkaitan dengan penataan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Penataan bangunan dan lingkungan yang terintegrasi di Kota Salatiga masih minim. Meskipun tingkat ketaatan pembangunan terhadap Rancangan Tata Ruang dan Wilayah termasuk tinggi (96%), tapi ternyata wajah kota yang tertata dengan baik masih belum dapat dicapai maksimal (50%). Penataan ruang kota yang belum baik akan menghambat tercapainya kehidupan yang nyaman dan produktif. Penataan ruang kota juga menentukan masa depan Kota Salatiga sebagai Kota Layak Anak. Penataan gedung yang tidak terintegrasi dengan lingkungan hidup di sekitarnya akan membuat daya sangga lingkungan menurun. Hal ini berpotensi memicu bencana seperti banjir, kebakaran, dan pohon tumbang. Penataan kota yang tidak mengintegrasikan zona-zona pemenuhan hak anak (misalnya Zona Selamat Sekolah, Kawasan Tanpa Rokok, dan *pedestrian*) akan menghambat tumbuh kembang dan aktivitas anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, isu penataan ruang dan lingkungan perlu ditangani dengan lebih baik melalui perencanaan, pengembangan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Untuk mengimplementasikan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Menuju Kota Salatiga *Smart City* Tahun 2017-2022 maka perlunya peningkatan

infrastruktur telekomunikasi modern dengan sistem teknologi informasi untuk memantapkan Kota Salatiga sebagai Kota Cerdas (*Smart City)*. Kota Cerdas (*smart city*) menggunakan teknologi informasi untuk menjalankan sistem pembangunan kota yang lebih efisien, sehingga kota tersebut memiliki instrumen yang saling berhubungan dan berfungsi cerdas (*smart computing)*. Kebutuhan infrastruktur telekomunikasi modern dengan sistem teknologi informasi digunakan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Kebutuhan infrastuktur meliputi fisik (*hardware*), infrastruktur teknologi informasi (*software*), infrastruktur sosial, dan infrastruktur bisnis untuk meningkatkan kecerdasan kota. Penerapan *Smart City* membuat pemerintah lebih mudah terhubung dengan masyarakat dalam memantau infrastruktur, fasilitas kota, dan peristiwa yang terjadi di wilayahnya secara *real time*.

6. **Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan serta Penegakaan Hukum Pelanggaran Tata Ruang.**

Salah satu isu strategis pembangunan daerah Kota Salatiga adalah Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan serta Belum Optimalnya Penegakaan Hukum Pelanggaran Tata Ruang. Hal-hal yang menjadi prioritas dalam pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan serta Penegakaan Hukum Pelanggaran Tata Ruang adalah Indeks Kualitas Air masih rendah dan masuk kategori "kurang baik", Indeks Kualitas Lingkungan Hidup masih rendah dan masuk kategori "kurang baik", Indeks Kualitas Tutupan Lahan masuk kategori"sangat kurang baik", Indeks Kualitas Udara masih perlu upaya peningkatan dari "cukup baik" menjadi "baik", Masih adanya rumah yang belum memenuhi syarat kesehatan dimana pada tahun 2021 rumah yang memenuhi syarat kesehatan baru mencapai 90 persen, Pembangunan rumah pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan berpotensi bahaya/Rawan Bencana, Rendahnya ketaatan pada RTRW Kota Salatiga serta di Kota Salatiga terbatasnya lahan dan harga tanah tinggi guna pengadaan tanah untuk kepentingan umum sehingga pengembangan penggunaan lahan akan mengarah pada penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan RTRW Kota Salatiga.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL/UPL ditahun 2021 sebesar 75 persen dengan capain kinerja baik dibandingkan tahun 2015 sebesar 70 persen. Perhatian besar berada pada pengelolaan

sampah, dimana tahun 2016 baru mencapai 63 persen dengan persentase pengurangan sampah masih relatif rendah sebesar 10 persen. Sampah domestik merupakan permasalahan krusial yang harus ditangani dan ditingkatkan penanganannya. Hal ini diperlukan untuk mencegah pencemaran lingkungan baik pencemaran udara, air dan tanah yang diakibatkan oleh timbunan sampah domestik yang tidak tertangani. Proses pengurangan volume sampah perlu ditingkatkan melalui pembinaan masyarakat sadar pengolahan sampah mulai dari RT dan RW; pembentukan dan pembinaan kelompok bank sampah di masyarakat; pembangunan dan pengelolaan TPST3R maupun TPST atau pusat daur ulang sampah; pembangunan dan peningkatan fungsi TPS. Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan masih belum optimal hal ini terlihat dari ketersediaan jumlah TPS sebanyak 30 unit jika dibandingkan wilayah pemukiman belum terpenuhi sesuai kebutuhan. Ketersediaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah juga masih kurang sehingga perlu ditingkatkan. Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) sampah merupakan lini akhir dari proses penanganan sampah, dimana dengan kondisi volume sampah domestik harian saat ini yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) diperkirakan umur TPA hanya mencapai 5 (lima) tahun lagi atau hanya sampai tahun 2022. Mengingat keterbatasan lahan landfill yang ada maka diperlukan beberapa penanganan strategis yaitu: pengurangan volume sampah dengan kegiatan daur ulang, yaitu sampah diubah menjadi kompos secara intensif; penyediaan lahan untuk area landfill baru juga tetap dibutuhkan. Kedepan diharapkan dengan intensifikasi kegiatan ini akan menciptakan TPA dengan Sistem Sanitary Landfill. Oleh karena adanya bahaya pencemaran air tanah oleh air lindi TPA sampah maka pengelolaan TPA sampah yang baik sangat diperlukan. Hal ini mengingat Kota Salatiga tidak memiliki sumber mata air yang mencukupi, dan beberapa tempat mengambil air tanah sebagai sumber air bersih masyarakat sehingga kualitas air tanah yang baik sangat pentinguntuk mensuplai kebutuhan air masyarakat.

Kondisi dan ketersediaan ruang terbuka hijau masih belum memadai sesuai dengan ketentuan, dimana salah satu tolok ukur pengaplikasian konsep Kota Hijau adalah keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan. Ruang Terbuka Hijau pada suatu kota harus memenuhi luasan minimal yakni sebesar 30 persen dari keseluruhan luas lahan dengan komposisi 20 persen ruang terbuka hijau publik dan 10 persen ruang terbuka hijau privat (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007). Pengalokasian 30 persen RTH ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Kota dan RTRW Kabupaten. Proporsi tersebut bertujuan

untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, ruang terbuka bagi aktivitas publik serta dapat meningkatkan nilai estetika kota. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan landasan untuk pengaturan ruang terbuka hijau dalam rangka mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Untuk memenuhi amanat UU Nomor 27 Tahun 2007 serta maksud dan tujuan di Permen PU Nomor 05/PRT/M/2008 penyelenggaraan RTH tersebut maka Kota Salatiga dalam Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2021-2030 mengamanatkan rencana pengembangan luasan RTH meliputi RTH minimal sebesar 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah atau kurang lebih seluas 1.721 (seribu tujuh ratus dua puluh satu) hektar; RTH publik minimal sebesar 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah atau kurang lebih seluas 1.136 (seribu seratus tiga puluh enam) hektar; dan RTH privat minimal sebesar 10 (sepuluh) persen dari luas wilayah atau kurang lebih seluas 585 (lima ratus delapan puluh lima) hektar. Permasalahan dalam pemenuhan luasan RTH minimal yang ditetapkan oleh UU 27 tahun 2007 dan Perda Nomor 04 tahun 2011 adalah jumlah RTH publik eksisting seluas kurang lebih 260 (dua ratus enam puluh) hektar atau kurang lebih 4,6 (empat koma enam) persen, RTH privat eksisting seluas 565,66 (lima ratus enam puluh lima koma enam puluh enam) hektar atau kurang lebih 9,96 (sembilan koma sembilan pulih enam) persen dari luas wilayah. Berdasarkan luasan tersebut diketahui bahwa luasan RTH minimal di Kota Salatiga masih sangat kurang.

Penggunaan lahan tidak sesuai dengan peruntukannya yang telah ditetapkan dalam RTRW akan menimbulkan kerusakan sumberdaya alam dan munculnya bahaya atau rawan Bencana. Belum optimalnya masyarakat terhadap ketaatan pada RTRW Kota Salatiga serta di Kota Salatiga terbatasnya lahan dan harga tanah tinggi guna pengadaan tanah untuk kepentingan umum sehingga pengembangan penggunaan lahan akan mengarah pada penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan RTRW Kota Salatiga. Tingkat kesesuaian penggunaan lahan atas dasar regulasi RTRW di Kota Salatiga telah terjadi peningkatan sejak 2017 yaitu sebesar 90 persen namun hingga 2021 belum tercapai 100 persen. Peningkatan kesesuaian penggunaan lahan atas dasar regulasi RTRW hingga saat ini belum diikuti dengan peningkatan rasio wilayah wajah kota yang tertata dengan baik. Sejak tahun 2018, penataan wajah

kota hanya mengalami peningkatan 25 persen dan akhir tahun 2021, hanya 50 persen wajah kota yang tertata dengan baik.

7. Pengelolaan, Pelestarian Cagar Budaya dan Kesenian Daerah

Pengelolaan dan pelestarian cagar budaya dan kesenian daerah menjadi isu strategis dalam pembangunan Kota Salatiga. Pencapaian kinerja pelestarian benda, situs dan Kawasan cagar budaya menunjukkan kinerja yang belum optimal dan sangat berpeluang untuk ditingkatkan mengacu pada kekayaan potensi cagar budaya yang dimiliki Kota Salatiga. Penguatan komitmen pemerintah dalam inventarisasi dan pendaftaran cagar budaya merupakan hal yang perlu ditingkatkan dengan menambah jumlah kajian terkait sejarah dan cagar budaya Kota Salatiga.

Dari sisi pengelolaan cagar budaya, tata kelola benda, situs dan kawasan cagar budaya masih diperlukan peningkatan mengingat belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya tersebut. Masih terdapat situs, benda, dan kawasan cagar budaya yang pemeliharaannya dan pemanfaatannya belum optimal. Hal ini terkait dengan terbatasnya jumlah pengelola dan kurangnya kapasitas yang dimiliki.

Terkait kesenian daerah, walaupun dalam periode 2017-2021 tercatat jumlah penyelenggaraan festival seni yang jauh melampaui target tahunannya, dengan kekayaan ragam suku yang berada di Salatiga serta beragamnya pihak penyelengara, pelaksanaan festival seni di Salatiga perlu dikelola dengan lebih optimal guna meningkatkan gaung kegiatan maupun dampak manfaat yang dihasilkan acara-acara tersebut bagi masyarakat. Penyelenggaraan festival seni ini juga berpeluang untuk meningkatkan peran serta komunitas seni untuk memajukan kesenian daerah di Kota Salatiga.

Lebih jauh, guna mendorong peningkatan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dan kesenian daerah, penyediaan sarana dan prasarana terkait cagar budaya dan kesenian daerah perlu mendapatkan perhatian. Penyediaan fasilitas kesenian daerah, museum, serta revitalisasi benda atau bangunan cagar budaya, menjadi kegiatan yang dapat diproyeksikan terkait isu cagar budaya dan kesenian daerah.

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga 2023-2026 disusun dalam rangka mengisi kekosongan pemerintahan Kota Salatiga dimana masa pengabdian Wali Kota habis pada tahun 2022, sementara Pemilihan Kepala Daerah baru akan dilaksanakan pada tahun 2024. RPD ini menjadi panduan pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 2023-2026. Berakhirnya masa jabatan Wali Kota Salatiga seiring dengan berakhirnya RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022, yang juga berarti berakhirnya visi dan misi pembangunan dalam kurun waktu 2017-2022.

Berdasarkan hal tersebut, penentuan Tujuan dan Sasaran dalam RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 disusun dengan mengacu kepada Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025. Tabel berikut menjelaskan keterkaitan antara Misi RPJPD Kota Salatiga 2005-2025 dengan Tujuan RPD Tahun 2023-2026.

Tabel 5. 1 Keterkaitan Misi & Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dengan Tujuan RPD 2023-2026

Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025	Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 - 2025	Tujuan RPD Tahun 2023 - 2026
Misi 1 : Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat	Terwujudnya SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat.	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyrakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas.
		Meningkatkan apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah
		Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk.
Misi 2 : Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan	Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk
		Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga

Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025	Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005 - 2025	Tujuan RPD Tahun 2023 - 2026
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.	Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender
		Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah
Misi 4 : Mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat, bertanggungjawab dan berkeadilan	Terwujudnya demokrasi berdasarkan hukum.	Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan
Misi 5 : Mewujudkan penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Terwujudnya penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.	Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan
Misi 6 : Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota	Terwujudnya fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai,	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup

Tujuan merupakan pernyataan tentang kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, pelaksanaan misi, pemecahan masalah serta penanganan isu strategis yang akan dihadapi dalam periode 2023-2026. Tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang tercantum dalam Misi RPJPD Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas.
2. Meningkatkan apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah
3. Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga.

4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk.
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk.
6. Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga.
7. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
8. Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.
9. Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah.
10. Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan.
11. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata.
12. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
13. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup.

Sasaran merupakan gambaran hal-hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas.
2. Mewujudkan masyarakat cerdas dan kreatif
3. Meningkatnya apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah
4. Meningkatnya prestasi dalam olahraga.
5. Meningkatnya partisipasi pemuda.
6. Menurunnya angka kesakitan dan kematian.
7. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
8. Mengendalikan pertumbuhan penduduk.
9. Meningkatnya jumlah koperasi aktif.
10. Meningkatnya jumlah UKM.
11. Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas
12. Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja
13. meningkatnya pendapatan daerah
14. Meningkatnya kinerja perdagangan
15. Meningkatnya kunjungan wisatawan pada berbagai destinasi unggulan
16. Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat

17. Meningkatnya Capaian Realisasi PMA dan PMDN
18. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja
19. Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar tenaga kerja
20. Meningkatnya kualitas penduduk terdata dalam DTKS
21. Meningkatnya ketersediaan dan Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman
22. Meningkatnya Minat untuk Menjadi Transmigran
23. Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan
24. Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
25. Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif.
26. Menurunnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba.
27. Meningkatnya persentase Kelurahan Tangguh Bencana
28. Meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik.
29. Meningkatnya kualitas penataaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
30. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Salatiga.
31. Meningkatnya keselamatan ketertiban, kelancaran, dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan.
32. Meningkatnya kualitas PSU lingkungan perumahan dan kawasan permukiman.
33. Meningkatnya kualitas lingkungan sehat (penuntasan kawasan kumuh).
34. Meningkatnya pengelolaan pertanahan.
35. Terjaganya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, damai, dan harmonis yang dilandasi rasa saling menhargai dan menghormati perbedaan baik sosial, budaya maupun pandangan politik.

Tabel 5. 2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPD		Target Capaian				Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas.	Rata-rata Lama Sekolah			Tahun	10,66	10,66	10,67	10,68	10,69	10,70	10,70	Dinas Pendidikan
	Harapan Lama Sekolah			Tahun	15,42	15,42	15,43	15,44	15,45	15,46	15,46	
		Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD	%	84,81	84,81	84,82	84,83	84,84	84,85	84,85	
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	%	99,22	99,22	99,23	99,24	99,25	99,26	99,26	
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	%	96,72	96,72	96,73	96,74	96,75	96,76	96,76	
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesetaraan	%	61,95	61,95	61,96	61,97	61,98	61,99	61,99	
	Indeks Literasi Masyarakat	Mewujudkan masyarakat cerdas dan kreatif		Nilai	51.56	0	52,06	52.56	52.76	53.26	53.26	
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	5,45	5,45	5,95	6,45	6,95	7,45	7,45	Dinas Persipda
Meningkatkan apresiasi dan penguatan pemajuan	Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan			%	15,5	15,5	19	30	41	52	52	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Meningkatnya apresiasi dan penguatan pemajuan	Persentase obyek pemajuan yang dilindungi,	%	14,71	14,71	14,71	29,41	44,12	58,82	58,82	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPD		Target Capaian				Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
kebudayaan daerah	yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	kebudayaan daerah	dikembangkan dan dimanfaatkan									
			Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	16,43	16,43	24	31	38	45	45	
Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Peningkatan prestasi olahraga			Jumlah Medali	23	23	15	30	16	16	16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Meningkatnya prestasi dalam olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan			%	20,59	20,59	20,59	20,59	21	21	21	
		Meningkatnya partisipasi pemuda	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	2,45	2,45	2,45	2,45	2,5	2,5	2,5	
			Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	38,73	38,73	38,73	38,73	39,5	39,5	39,5	
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk	Angka Harapan Hidup			Tahun	77,55	77,55	77,67	77,78	77,89	77,98	77,98	Dinas Kesehatan
		Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	429,55	117	172	172	129	129	129	
			Angka Kematian Bayi	/1000 KH	13,55	10,75	12,89	12,03	11,17	10,31	10,31	
			Prevalensi balita Gizi Buruk	%	0,09	0,02	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	
			Sucses Rate TB	%	92	85	92	93	94	95	95	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPD		Target Capaian				Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
			Prevalensi Hipertensi Penduduk Usia diatas 15 tahun	%	39,33	38,54	37,76	36,97	36,18	35,4	35,4	
		Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Persentase Akreditasi Puskesmas Strata Utama	%	50	50	66	66	66	82	82	
			Peringkat Kelulusan Akreditasi RSUD	Predikat	Pari purna	Pari purna	Pari purna	Pari purna	Pari purna	Pari purna	Pari purna	
	Laju Pertumbuhan penduduk			%	0,18	1,32	1,34	1,32	1,30	1,30	1,30	DP3AP2KB
		Mengendalikan pertumbuhan penduduk	TFR (Total Fertility Rate)	%	1,9	2,4	2,4	2,3	2,2	2,1	2,1	
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	1. Pertumbuhan Ekonomi; 2. Pendapatan per kapita **PDRB ADHK*			%	3,33	4,62	4,71	4,84	4,90	5,00	5	Dinkop UKM
				Juta	50,74	52,43	54,11	55,80	57,48	59,16	59,16	
		Meningkatnya jumlah koperasi aktif	Persentase koperasi aktif	%	70.00	70.00	70.56	71.11	71.67	72.22	72.22	
		Meningkatnya jumlah UKM	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	96	96	96	96	96	96	96	
		Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas	Persentase Pertumbuhan IKM (Industri Kecil Menengah)	%	0.30	0.30	0.31	0.37	0.43	0,49	0,49	Disperinaker
			Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	29,73	30.00	31.00	31,05	31.10	31,15	31,15	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPD		Target Capaian				Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	94,44	94,44	95,76	97,08	98,4	99,72	99,72	
		Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase Peningkatan PAD terhadap pendapatan	%	4,12	10	2,5	5	7,5	10	10	BPKPD
		Meningkatnya kinerja perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	-3.76	4,72	4,77	4,81	4,85	4,89	4,89	Dinas Perdagangan
		Meningkatnya kunjungan wisatawan pada berbagai destinasi unggulan	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara	%	106.07	106.07	107.31	108.08	109.71	110.13	110.13	Disbudpar
			Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	-37.06	-37.06	45	65	70	79	79	
			Tingkat hunian akomodasi	%	17.42	17.42	20	22	25	28	28	
			Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	8	8	8.5	9	9.5	10	10	
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,060	0,060	0,11	0,12	0,14	0,16	0,16	
		Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan	Produktivitas padi	%	6.1	6.1	6.1	6.15	6.15	6.15	6.15	Dispangtan
			Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura	%	7	7	10	10	10	10	10	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPD		Target Capaian				Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
		pangan masyarakat	Peningkatan produktivtas peternakan daging sapi	%	NA	0.01	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	
			Produktivitas Sapi Perah	%	0.05	0.05	0.72	0.75	0.80	0.82	0.82	
			Peningkatan produksi perikanan (ikan konsumsi)	%	6	6	6	6	6	6	6	
			Peningkatan Produksi Perikanan (benih)	%	5	5	5	5	5	5	5	
			Penurunan kejadian kematian hewan akibat penyakit zoonosis	%	100	100	100	100	100	100	100	
			Ketersediaan beras	%	70	70	70	70	70	70	70	
Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Pertumbuhan nilai investasi			%	-68,21	11,47	10,00	10,22	10,4	10,55	10,55	DPMPTSP
		Meningkatnya Capaian Realisasi PMA dan PMDN	Persentase Kenaikan Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	%	tad	-18,13	3,00	3,50	4,00	5,00	5,00	
			Persentase Kenaikan nilai investasi PMDN	%	tad	tad	10,00	10,2	10,3	10,35	10,35	
			Persentase Kenaikan nilai investasi PMA	%	tad	tad	10,00	10,25	10,5	10,75	10,75	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPD		Target Capaian				Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
	Tingkat pengangguran terbuka	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja		%	7,26	7,01	6,76	6,52	6,30	6,12	6,12	Disperinaker
			Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	95,71	36,2	50	50	50	50	50	
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar tenaga kerja		%	70,36	59,45	69,71	69,84	69,97	70,1	70,1	
			Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki ijin	%	NA	40	70	80	90	100	100	
			Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	46,15	46,15	53,8	61,5	69,2	76,9	76,9	
Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS			%	93,3	93,3	94,5	95	95,5	96	96	Dinas Sosial
		Meningkatnya kualitas penduduk terdata dalam DTKS	Cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani	%	64,72	64,72	70	75	80	85	85	
			Angka Kemiskinan	%	4.95	4.73	4.54	4.39	4.26	4.13	4.13	
	Pola Pangan Harapan			Skor	90,7	90	92,2	94,4	96,6	98,8	98,80	Dispangtan
		Meningkatnya ketersediaan dan Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman	Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan	%	1,35	1.40	1,42	1,49	1,57	1,64	1,64	
			Ketersediaan energi per kapita	kkal/ kapita	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487	
					106	107	108	109	110	111	111	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPD		Target Capaian				Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
			Ketersediaan protein per kapita	gram/ kapita								
	Persentase Peminat Transmigrasi			%	1	1	3,3	3,7	4,07	4,6	4,6	Disperinaker
		Meningkatnya Minat untuk Menjadi Transmigran	Persentase Peningkatan Peminat Transmigrasi	%	1	NA	3,3	3,7	4,06	4,6	4,6	
Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender	Score capaian KLA	Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan		Nilai	607,25	680	615	620	625	630	630	DP3AP2KB
			Persentase kelembagaan forum anak tingkat kota, kecamatan dan kelurahan	%	25	32,14	28,57	32,14	35,71	39,29	39,29	
			Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif	%	20	20	24	24	24	24	24	
	IDG			Nilai	79,08	81,57	80	80,05	81	81,5	81,5	
	IPG			Nilai	95,37	97,2	95	95,5	96	96,5	96,5	
			Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	%	39,66	40	40	40	41	41	41	
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi			Nilai	64.99	66	65.50	67.00	68.50	70.00	70.00	SETDA
		Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,61	84,7	84,75	84,75	85	85	85	
			Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	66.06	70	81.00	81.25	81.50	81.75	81.75	
			Indeks Kematangan Organisasi Daerah	Nilai	34.37	34,4	34.47	34.67	34.87	35.00	35.00	
			Indeks PMPRB	Nilai	70.95	71	71	72	73	74	74	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPD		Target Capaian				Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
		kelola pemerintahan	Nilai SAKIP	Angka	64.50	64.50	65.00	66.00	68.00	70.00	70.00	
			Indeks Inovasi	Nilai	46,28	46,28	46,3	46,32	46,34	46,36	46,36	BAPPEDA
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	%	NA	NA	20	33,33	42,86	46,67	46,67	
			Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD	%	100	100	75	80	85	90	90	
			Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKPD
			Indeks Profesionalitas ASN	%	52,04	54,4	55	57	59	61	61	BPKPSDM
			Nilai Sistem Merit	%	242	255	275	285	295	326	326	
			QA SPIP	Nilai	3	3	3,04	3,06	3,08	3,10	3,10	Inspektorat Daerah
			QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)	Nilai	2,91	2,92	2,94	2,96	2,98	3	3	
			QA MRI (Manajemen Resiko Indeks)	Nilai	2,7	2,74	2,78	2,86	2,94	3	3	
			Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3	3	3	
			Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti	%	75	75	75,5	76	76,5	77	77	Dinas Persipda

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPD		Target Capaian				Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
			yang sah dan pertanggungjawaban nasional									
			Indeks SPBE	Nilai	2,34	2,34	2,4	2,5	2,6	2,7	2,7	DISKOMINFO
			Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	92	93	94	94	95	95	95	
			Tingkat keterbukaan informasi publik	%	94	95	96	97	99	100	100	
			Tingkat pengamanan informasi daerah	%	75	78	80	82	85	89	89	
			Persentase cakupan akta kelahiran (0-18 th)	%	97.63	98,67	98,7	98,8	98,9	99	99	DISDUKCAPIL
			Persentase penduduk ber KTP elektronik	%	94.32	95,53	95,6	95,9	96,2	96,5	96,5	
			Persentase anak 0-17th kurang 1 hari yg memiliki KIA	%	75.12	79,01	79,2	79,5	79,8	80	80	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	89,11	80	89,20	89,25	89,30	89,50	89,50	Kecamatan Sidomukti
			Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	59,13	70	60	61	62	63	63	
			Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	79,71	45	79,75	79,80	79,85	79,90	79,90	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPD		Target Capaian				Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
			Persentase PKK Aktif	%	0	0	50	55	60	65	65	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85,83	92	86	87	88	89	89	Kecamatan Sidorejo
			Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	93,51	88	93,52	93,53	93,54	93,55	93,55	
			Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	41,32	60	58	59	59	60	60	
			Persentase PKK Aktif	%	0	0	50	55	60	65	65	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85,94	92	92,05	92,10	92,15	92,2	92,2	Kecamatan Tingkir
			Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	95,62	88	71	72	73	74	74	
			Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	40,39	60	60	60,05	60,10	60,15	60,15	
			Persentase PKK Aktif	%	0	0	72	72,50	73	73,5	73,5	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80,06	81	82	84	86	88	88	Kecamatan Argomulyo
			Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	60	60	60,05	61	61,05	62	62	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPD		Target Capaian				Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
			Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	60	61	62	64	66	68	68	
			Persentase PKK Aktif	%	0	0	50	55	60	65	65	
			Persentase fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	88	100	100	100	100	100	100	SETWAN
Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan	Cakupan Penanganan Ketentraman Kota			%	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif	Persentase Penegakan Perda dan Gangguan Trantibum yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
			Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten/kota	%	66,9	66,9	100	100	100	100	100	
	Penanggulangan Potensi Konflik			%	NA	NA	100	100	100	100	100	Kesbangpol
		Menurunnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba.	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	%	1,73	1,73	1,72	1,71	1,7	1,69	1,69	
		Terjaganya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, damai, dan harmonis yang dilandasi rasa saling menhargai dan menghormati perbedaan baik	Terselesainya kasus konflik horisontal secara damai dan adil baik terkait sosial, budaya maupun politik.	%	tad	tad	100	100	100	100	100	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPD		Target Capaian				Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
		sosial, budaya maupun pandangan politik										
	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana			Nilai	-	3,82	3,84	3,86	3,88	3,9	3,9	BPBD
		Meningkatnya persentase Kelurahan Tangguh Bencana	Kelurahan Tangguh Bencana	%	NA	15	17	19	21	26	26	
			Indeks Risiko Bencana	%	91.20	91.00	90,80	90,45	90,15	90,00	90,00	
Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	Persentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik			%	50	51	52,5	55	57,5	60	60	DPU PR
		Meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	%	96,21	96,21	96,5	97	97,5	98	98	
		Meningkatnya kualitas penataaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	Prosentase rekomendasi penyelenggaraan tata ruang	%	96	96	97	97	98	98	98	
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			Nilai	58,65	58,65	56,2	56,4	56,6	56,8	56,8	DLH
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Salatiga	Indeks Kualitas Air	Nilai	42,5	47,87	41,20	41,40	41,60	41,80	41,80	
			Indeks Kualitas Udara	Nilai	79,82	84,57	79,80	80	80,20	80,40	80,40	
			Indeks Kualitas Lahan	Nilai	47,21	59,38	47	47	47	47	47	
		Meningkatnya keselamatan		%	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	Dishub
			Rasio Ijin Trayek	%	24,37	24,37	24,37	24,37	21,87	21,87	21,87	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPD		Target Capaian				Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
	Rasio konektivitas kota	ketertiban, kelancaran, dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	%	24,79	24,79	24,79	24,79	22,79	22,79	22,79	
	Kinerja lalu lintas kota			%	0.3	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5	0.5	
			Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	82	82	82	82	83	83	83	
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup	Persentase Rumah Yang didukung oleh PSU			%	9,8	10	10,2	10,37	10,73	11	11	DINAS PKP
		Meningkatnya kualitas PSU lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	28	32.30	37	46	55	65	65	
	Pemukiman yang Tertata			%	6,19	6.22	6,26	6,34	6,42	6,49	6,49	
		Meningkatnya kualitas lingkungan sehat (penuntasan kawasan kumuh)	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	2,31	2,26	2,23	2,15	2,08	2,02	2,02	
		Meningkatnya pengelolaan pertanahan	Persentase luas lahan bersertifikat	%	10	20	20	60	80	100	100	
			Penyelesaian kasus tanah Negara	%	10	90	25	50	60	75	75	

Tabel 5. 3 Keterkaitan Antara Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Urusan	Permasalahan Utama Daerah	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran
A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
Urusan Pendidikan	1. Capaian angka Patisipasi sekolah PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs; dan masih terdapatnya anak putus sekolah	Isu 1: Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas.	Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas
	2. Kualitas sarana dan prasarana pendidikan			
Urusan Kesehatan	Belum optimalnya mutu layanan dan penyediaan layanan dasar kesehatan sesuai standar.	Isu 1: Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk	Menurunnya angka kesakitan dan kematian
	Belum optimalnya pelayanan kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan AKI, AKB, Gizi buruk, Balita Stunting, HIV AIDS, penyakit menular dan tidak menular.			Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Pencapaian SPM pengelolaan air limbah domestik	Isu 5: Pemenuhan Pelayanan Infrastruktur	Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	Persentase wilayah dengan infrastruktur kondisi baik
	2. Ketersediaan jalan, drainase jalan, jembatan, dan irigasi yang kondisinya baik			
	3. Kualitas bangunan gedung karena minimnya tenaga terampil konstruksi yang mendapat pelatihan dan sertifikat (0% pada akhir tahun 2021) dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan jasa konstruksi.			Meningkatnya kualitas penataaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

Urusan	Permasalahan Utama Daerah	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran
	4. Penataan bangunan dan lingkungan yang terintegrasi di Kota Salatiga.			
	5. Belum terlaksananya pembangunan wajah kota yang indah, nyaman dan aman bagi penggunanya terutama lansekap jalan pada kawasan bisnis atau kawasan perekonomian (kawasan pasar tradisional dan modern, kawasan pertokoan, kawasan pendidikan, kawasan perkantoran dan kawasan permukiman)			
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Ketersediaan rumah layak huni yang sehat, aman dan terjangkau, serta penyediaan lingkungan perumahan yang terlayani PSU yang sehat, aman dan berkelanjutan.	Isu 3: Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Terhadap Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup	Meningkatnya kualitas lingungan sehat (penuntasan kawasan kumuh)
	2. Ketersediaan lahan untuk pengembangan perumahan			Meningkatnya kualitas PSU lingkungan perumahan dan kawasan permukiman
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	1. Penegakan Perda dan Perwali sebagai akibat Terbatasnya petugas Satpol PP dan peran Satlinmas	Isu 3:Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Terhadap Penyandang	Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif

Urusan	Permasalahan Utama Daerah	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran
		Permasalahan Kesejahteraan Sosial		
	2. Kelengkapan dokumen, sarana prasarana, dan tim pengurangan risiko dan penanggulangan bencana	Isu 4: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah		Meningkatnya persentase Kelurahan Tangguh Bencana
	3. Potensi konflik horizontal dan bahaya penyalahgunaan narkoba	Isu 4: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah		Menurunnya tingkat penyalagunaan narkoba
Urusan Sosial	Kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan rehabilitasi sosial, dan masih rendahnya pemberdayan PMKS yang menerima program pemberdayan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	Isu 3:Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Terhadap Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Meningkatnya kualitas penduduk terdata dalam DTKS
B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				
Urusan Tenaga Kerja	Kesesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi permintaan tenaga kerja.	Isu 2 : Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Kerakyatan serta Masih Tingginya Angka Kesenjangan Pendapatan Penduduk.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk.	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja.
			Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja

Urusan	Permasalahan Utama Daerah	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran
			daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar tenaga kerja
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	1. Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, dan belum optimal dalam penanganan sesuai standar 2. Belum terwujudnya Kota salatiga sebagai Kota layak anak	Isu 4: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender	Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belum optimalnya pengendalian penduduk untuk mewujudkan Kota Salatiga tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, yang diakibatkan masih rendahnya angka kepesertaan KB *(unmed need)*, minat akseptor menggunakan MKJP, lemahnya koordinasi lintas sektor dalam mengangani program KB dan stunting, serta terbatasnya tenaga PLKB	Isu 3: Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Terhadap Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
Urusan Pangan	1. Belum tersedia strategi yang efektif, efisien, menyeluruh, dan terkoordinir untuk menangani kerawanan pangan dan gizi, harga minimum daerah, pengelolaan logistik pangan, dan pengawasan keamanan pangan.	Isu 4: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.	Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.

Urusan	Permasalahan Utama Daerah	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran
	2. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung kemandirian pangan (kuantitas dan kualitas).	Isu 5: Pemenuhan Pelayanan Infrastruktur		
Urusan Pertanahan	1. Layanan urusan pertanahan (data tanah, izin membuka tanah, penyelesaian sengketa tanah, penetapan status tanah, dll.) dan rendahnya pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan	Isu 4: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah.	Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publikdan tata kelola pemerintahan
	2. Keterbatasan ketersediaan tanah untuk kepentingan umum	Isu 6: Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan serta Penegakan Hukum Pelanggaran Tata Ruang.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup	Meningkatnya pengelolaan pertanahan
Urusan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup masih rendah dan masuk kategori "kurang baik".	Isu 6:Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan serta Penegakaan Hukum Pelanggaran Tata Ruang.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Rendahnya penduduk wajib KTP el yang belum rekaman KTP el sesuai target nasional 99 persen.	Isu 4: penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan implementasi penguatan sistem inovasi daerah.	Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah.	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik

Urusan	Permasalahan Utama Daerah	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran
	2. Rendahnya pengguna data (perjanjian kerja sama) yang memanfaatkan data dukcapil.			dan tata kelola pemerintahan.
Urusan Perhubungan	Kualitas layanan angkutan darat dan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan yang layak	Isu 5: Pemenuhan Pelayanan Infrastruktur	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Salatiga
Urusan Komunikasi dan Informatika	Indeks SPBE yang cukup rendah (2,34 dari nilai maksimal 5)	Isu 4: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
Urusan Koperasi dan UKM	Sistem regulasi, peraturan dan perijinan yang belum optimal	Isu 4: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Meningkatnya jumlah koperasi aktif
				Meningkatnya jumlah UKM
Urusan Penanaman Modal	1. Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal masih rendah 2. Belum adanya peraturan daerah mengenai pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kota/kota	Isu 4: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Meningkatnya Capaian Realisasi PMA dan PMD
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	1. Rendahnya kapasitas pemuda untuk terlibat aktif dalam kepemudaan, kewirausahaan dan	Isu 5 : Pemenuhan Pelayanan Infrastruktur.	Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga.	Meningkatnya prestasi dalam olahraga

Urusan	Permasalahan Utama Daerah	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran
	organisasi, kurangnya Prestasi karena rendahnya jumlah sarana prasarana olah raga			Meningkatnya partisipasi pemuda
	2. Belum optimalnya pembinaan pramuka dan sarana prasaranan pramuka guna mempertahankan peran aktif pemuda.			
Urusan Statistik	Kuantitas dan kualitas data untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah karena data statistik terpadu belum tersedia. Hal ini disebabkan karena hanya 6,6% Perangkat Daerah yang telah mengintegrasikan datanya ke sistem Dataku.	Isu 4: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
Urusan Persandian	Belum optimalnya keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah karena kurangnya sarana prasarana serta sumber daya manusia di bidang teknologi informasi persandian. Hal ini juga menjadi faktor penentu indeks SPBE (di Urusan Komunikasi dan Informatika).	Isu 4: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
Urusan Kebudayaan	Belum optimalnya pelestarian cagar budaya dan seni yang ditunjukkan dengan masih flutuatifnya capaian jumlah pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya serta jumlah penyelenggaraan pagelaran seni selama periode 2017- 2021.	Isu 7: Pengelolaan, Pelestarian Cagar Budaya dan Kesenian Daerah	Meningkatkan apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah	Meningkatnya apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah

Urusan	Permasalahan Utama Daerah	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran
Urusan Perpustakaan	Belum optimalnya pengelolaan dan layanan perpustakaan, dan ketersediaan tenaga perpustakaan yang memenuhi kualifikasi	Isu 4: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas	Masyarakat yang Cerdas dan Kreatif
Urusan Kearsipan	Masih rendahnya kualitas pengelolaan arsip di OPD, dan pemanfaatan arsip statis oleh masyarakat, serta terbatasnya jumlah arsiparis yang memenuhi kualifikasi	Isu 4: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
C. Urusan Pilihan				
Urusan Kelautan dan Perikanan	1. Rendahnya kapasitas petani pembudidaya ikan (misalnya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen usaha, permodalan, dan kelembagaan). 2. Rendahnya pemanfaatan, pengawasan, dan pengelolaan sumber daya air (sungai, embung, dll.) untuk kegiatan perikanan produktif.	Isu 2: Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Kerakyatan serta Masih Tingginya Angka Kesenjangan Pendapatan Penduduk.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk.	Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat.

Urusan	Permasalahan Utama Daerah	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran
Urusan Pariwisata	Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan secara signifikan sejak tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi COVID 19 yang berakibat juga pada pelaku pariwisata dan kontribusi sektor pariwisata dalam pembangunan daerah.	Isu 2:Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Kerakyatan serta Masih Tingginya Angka Kesenjangan Pendapatan Penduduk	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita	Meningkatnya kunjungan wisatawan pada berbagai destinasi unggulan
Urusan Pertanian	1. Kurangnya kegiatan peningkatan ketrampilan petani/peternak (misalnya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen usaha, permodalan, dan penguatan kelembagaan) 2. Belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian dan peternakan.	Isu 2: Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Kerakyatan serta Masih Tingginya Angka Kesenjangan Pendapatan Penduduk.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk.	Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat.
Urusan Perdagangan	Perlu pembangunan pasar tradisional yang memenuhi standar dan Masih perlunya lokasi PKL agar lebih tertata.	Isu 2 : Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Kerakyatan serta Masih Tingginya Angka Kesenjangan Pendapatan Penduduk	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk.	Meningkatnya kinerja perdagangan.
Urusan Perindustrian	Rendahnya daya saing IKM dan belum optimalnya nilai tambah beberapa produk industri kecil dan	Isu 2 : Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Kerakyatan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk.	Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas.

Urusan	Permasalahan Utama Daerah	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran
	menengah, sebagai akibat dari belum perizinan dan beradan hukum, kurang primosi, kekurangan modal, dan kurang pendampingan	serta Masih Tingginya Angka Kesenjangan Pendapatan Penduduk.		
Urusan Transmigrasi	Rendahnya prosentase peminat transmigrasi maupun jumlah calon transmigran disebabkan karena masih kurang optimalnya kegiatan fasilitasi program transmigrasi yang dilaksanakan pemerintah Kota Salatiga	Isu 2 : Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Terhadap Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial.	Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Meningkatnya Minat untuk Menjadi Transmigran
D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				
Perencanaan	Belum adanya sinkronisasi antara Konsistensi, keselarasan dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah	Isu 4: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam Menunjang kualitas pelayanan public dan tata kelola pemerintahan
Penelitian dan Pengembangan	Belum optimalnya pemanfataan hasil penelitian dan pengembangan.	Isu 4: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

Urusan	Permasalahan Utama Daerah	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran
Keuangan	1. Belum Terintegrasinya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKD), sehingga menghambat pelaporan dan transparansi pertanggungjawaban pendapatan dan belanja daerah, yang pada akhirnya kinerja dinas tidak dapat terevaluasi dengan mudah. 2. Belum Optimalnya pajak pendapatan daerah, sebagai dampak dari pandemi Covid 19	Isu 4: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
Kepegawaian	Kompetensi SDM masih rendah	Isu 4: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
E. Fungsi Penunjang Lainnya				
Pengawasan	Kurang optimalnya peran dan fungsi pengawasan dalam birokrasi untuk mewujudkan *good governance*.	Isu 4: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
Sekretariat DPRD	Belum optimalnya jumlah produk hukum yang disebabkan karena	Isu 4: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan	Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah

Urusan	Permasalahan Utama Daerah	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran
	terbatasnya tenaga ahli yang sesuai dengan kompetensinya.	Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah		daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
Sekretariat Daerah	Belum optimalnya fungsi sebagai koordinator/fasilitator terutama pada bagian pemerintahan dan kesejahteraan rakyat serta bagian perekonomian dan pembangunan.	Isu 4: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
Kecamatan	Belum Optimalnya kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan organisasi-organisasi ditingkat kecamatan dan kelurahan dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya serapan usulan masyarakat dalam Musrenbang	Isu 3: Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Terhadap Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pemerintah Kota Salatiga dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan RPD Tahun 2023-2026 dengan efektif dan efisien tetap memperhatikan keselarasan dan sinergitas pembangunan dimana untuk mewujudkan keselarasan dan sinergitas pembangunan tersebut perlu untuk mengkaji dan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dan RTRW Kota Salatiga Tahun 2010-2030 yang masing masing diuraikan sebagai berikut:

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Visi Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2020-2024 adalah: *"Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"*. Visi pembangunan nasional tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Strategi pembangunan nasional tahun 2020-2024 berdasarkan arahan Presiden menggariskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM
    a. Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial
        1) Tata Kelola Kependudukan
        2) Perlindungan Sosial
        3) Kesehatan
        4) Pendidikan
        5) Pengentasan Kemiskinan

6) Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda

b. Produktivitas
   1) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
   2) Pendidikan Tinggi
   3) Iptek dan Inovasi
   4) Prestasi Olahraga

c. Pembangunan Karakter
   1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila
   2) Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan
   3) Moderasi Beragama
   4) Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas

2. Pembangunan Infrastruktur
   a. Infrastruktur Pelayanan Dasar
      1) Akses Perumahan dan Permukiman
      2) Layak, Aman, dan Terjangkau
      3) Air Tanah dan Air Baku Aman Berkelanjutan
      4) Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman
      5) Keselamatan dan Keamanan Transportasi
      6) Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur
      7) Waduk Multiguna dan Modernisasi
   b. Infrastruktur Ekonomi
      1) Konektivitas
         a) Darat : Jalan Tol, jalan Baru, Jalan Trans Pulau 3T, dan pelabuhan penyeberangan baru.
         b) Kereta Api : KA kecepatan tinggi dan KA angkutan barang
         c) Laut : Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
         d) Udara : Bandara Baru, Jembatan Udara
      2) Sektor Ekonomi
         a) Industri Pengolahan
         b) Jasa dan Pariwisata
         c) Pertanian perkebunan Kawasan/Klaster Kelautan-Perikanan
   c. Infrastruktur Perkotaan
      1) Transportasi Perkotaan
      2) Energi Berkelanjutan Perkotaan
      3) Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan
      4) Akses Air Minum Perpipaan dan Sanitasi Perkotaan yang Layak dan Aman
      5) Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan

3. Penyederhanaan Regulasi
   a. Pendekatan OMNIBUS LAW

Penerapan pendekatan Omnibus Law, (Penggabungan Beberapa Ketentuan Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang dengan Membatalkan Undang-Undang Sebelumnya. RUU Cipta Lapangan Kerja, Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (peringkat EoDB).

4. Penyederhanaan Birokrasi
    a. Penyederhanaan Prosedur
    b. Penyelenggaraan E-Government
    c. Reformasi birokrasi pelayanan publik untuk kegiatan ekspor/impor, Kepabeanan dan Kepelabuhan
5. Transformasi Ekonomi
    a. Industrialisasi berbasis SDA dan rantai produksi global
    b. Pengembangan Destinasi Unggulan, melalui: perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas di Destinasi Pariwisata Prioritas
    c. Penguatan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital, pada sektor: kuliner, fashion, kriya, aplikasi dan konten digital, games, film, dan musik.

Untuk mewujudkan 9 misi tersebut, berdasarkan 5 arahan dari Presiden, maka dirumuskan 7 agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

6.2. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Visi pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang termuat dalam RJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah "**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari**" "*TetepMboten Korupsi, Mboten Ngapusi*". Terdapat 4 (empat) Misi yang ditempuh dalam rangka mewujudkan visi tersebut, yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI.

Misi ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tercermin dari rasa aman dan nyaman yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi yang tercipta merupakan manifestasi implementasi nilai-nilai religius

dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan dalam kerangka kesatuan.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan menguatkan pemahaman keberagaman dan kebhinekaan sejak usia dini, mengembangkan ruang-ruang publik untuk membangun komunikasi antar masyarakat melalui kegiatan seni dan rekreasi, serta mendorong kearifan lokal dalam bentuk gerakangerakan masyarakat termasuk gerakan gotong royong. Dalam misi ini terkandung tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang aman dan nyaman, tanpa ada konflik sosial maupun agama, bahkan konflik SARA, dan tercipta kohesi sosial masyarakat yang baik.

2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota.

Misi kedua ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Jawa Tengah berlandaskan nilai “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Dalam lima tahun kedepan, reformasi birokrasi diharapkan semakin diperluas sampai ke pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun open government dan pemerintahan yang responsif. Open government dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Sedangkan pemerintahan yang responsif tercermin dalam respon pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsif diikat dalam satu tagline pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi.

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan Jawa Tengah kedepan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (outcome). Untuk itu perlu juga dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur yang baik. Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terejawantahkan dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam *quality assurance* aparatur.

3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif, dan menyebar.

Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani, nelayan, pelaku UKM dan pekerja dan kelompok rentan lainnya. Program pengentasan kemisikinan tersebut perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tersebar, inklusif, dan berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, memperhitungkan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ketersediaan sumber daya, melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan mengutamakan peran dan kontribusi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan menghapus praktek ekonomi biaya tinggi. Program pengentasan kemiskinan ke depan juga diarahkan untuk fokus pada pendidikan dan kesehatan terutama bagi rumah tangga miskin pada dua desil terbawah, serta masyarakat terlantar melalui penyediaan data BDT yang telah tervalidasi dengan sebaran pada wilayah kabupaten/kota miskin di Jawa Tengah. Perluasan lapangan pekerjaan juga menjadi penting bukan hanya untuk mengatasi pengangguran, namun juga bagaimana meningkatkan produktivitas tenaga kerja untuk bisa bekerja lebih dari 15 jam per minggu.

4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Misi keempat mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Jawa Tengah, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Jawa Tengah dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak

pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera.

Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusiavyang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Jawa Tengah yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Jawa Tengah tetap kuat menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Jawa Tengah, serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

Visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 juga didukung dengan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018-2023 yaitu:

1. Sekolah tanpa sekat; pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK.

   Sekolah tanpa sekat merupakan integrasi pendidikan formal, informal, dan non formal kepada seluruh masyarakat yang berkeadilan dan tanpa diskriminasi serta sebagai perwujudan bahwa urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat.
2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru agama.

   Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah, dan guru agama sebagai media komunikasi antar agama dan penghayat untuk membangun hubungan yang saling menyejahteraan menuju kehidupan yang saling menghormati, terwujudnya kehidupan yang aman dan nyaman tanpa adanya diskriminasi.
3. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi.

   Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, efisiensi kelembagaan, dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik.
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni.

   Satgas kemiskinan secara fungsional merupakan upaya penguatan tugas dan fungsi dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk memastikan kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana, terutama dalam pengelolaan data, perumusan masalah dan perumusan kebijakan, pelayanan pengaduan masyarakat, serta pelaporan.

   Bantuan desa merupakan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan prasarana dan sarana desa, pembangunan

kawasan perdesaan, peningkatan ketahanan masyarakat desa, dan operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

Program unggulan rumah sederhana layak huni dimaknai sebagai upaya perbaikan rumah tidak layak huni terutama bagi Rumah Tangga Miskin dalam rangka mengurangi beban pengeluaran dengan bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Rumah Tangga Miskin di 7.809 desa dan 750 kelurahan di Jawa Tengah dengan dukungan keswadayaan dan sifat gotong royong dari masyarakat. Selain itu, penyediaan rumah sederhana layak huni diperuntukkan juga bagi pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan akses dan keterjangkauan rumah layak huni dalam rangka meningkatkan iklim kondusif bagi pengembangan industri.

5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan *startup* untuk wirausaha muda.

Program unggulan obligasi daerah dilatarbelakangi karena menurunnya kapasitas fiskal daerah terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah, namun masih ada kebutuhan kegiatan strategis yang harus segera dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah dilakukan melalui obligasi daerah yang merupakan pembiayaan pembangunan dengan memanfaatkan potensi diluar pendapatan asli daerah.

Program ekonomi lainnya adalah program kemudahan akses kredit UMKM yaitu program fasilitasi bagi UMKM untuk mendapatkan kemudahan akses kredit dari perbankan. Program unggulan lainnya adalah penguatan BUMDes yang bertujuan untuk meningkatkan peran dan produktivitas BUMDes sebagai lembaga perekonomian desa dalam upaya meningkatkan perekonomian desa melalui lembaga keuangan milik desa.

Salah satu program yang juga menjadi unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam lima tahun ke depan adalah peningkatan startup wirausaha baru untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan keterampilan bagi masyarakat terutama bagi kelompok pemuda, dan penganggur dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja.

6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan.

Program menjaga harga komoditas merupakan upaya untuk menjaga stabilitas harga yang dilakukan dengan perlindungan harga dan menjamin pemasaran produk pertanian; intervensi dan penguasaan stok oleh pemerintah dengan membeli secara langsung produk pertanian dengan menugaskan BUMD sebagai operator; serta penguatan kelembagaan petani di tingkat desa. Sedangkan asuransi gagal panen untuk petani merupakan upaya pemberian jaminan bagi petani dari risiko

gagal panen akibat bencana alam, serangan hama penyakit dan gangguan lainnya.

Untuk program melindungi kepentingan nelayan adalah rangka memberikan jaminan perlindungan bagi nelayan dari risiko selama beraktifitas dan kecelakaan kerja, termasuk fasilitasi kepentingan dasar.

7. Pengembangan transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi.

Program ini dilakukan dengan melakukan pengembangan koridor angkutan umum massal berbasis jalan (BRT); pengelolaan BRT Trans Jateng dengan Sistem BLUD; fasilitasi peningkatan layanan KA Semarang-Solo; fasilitasi revitalisasi/reaktivasi jalur kereta api diantaranya yang menghubungkan wilayah Kedungsepur dengan PSN Borobudur, wilayah pantura timur serta wilayah tengah; fasilitasi pengembangan bandara untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas wilayah.

Program pembangunan embung/irigasi dan didukung dengan pemeliharaan prasarana/sarana embung/irigasi dilakukan dalam rangka menciptakan ketahanan air dan pemenuhan air baku guna mendukung peningkatan produksi pertanian dan pangan, penyediaan air bersih bagi masyarakat, dan mendukung pengembangan kawasan industri.

8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi.

Program ini dilakukan dengan mendorong afirmasi kebijakan tumbuhnya kawasan industri baru di perbatasan barat dan selatan, dalam mempercepat proses persebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk pengembangan rintisan pertanian terintegrasi dimaksud-kan dengan integrasi vertikal hulu hilir, integrasi holistik perpanjangan rantai energi untuk menghasilkan 5F *(food, feed, fuel, fertilizer, fiber)*. Selain itu juga mengembangkan konsep pertanian terintegrasi sektoral (mayor sektoral) dan sektor terintegrasi dalam pertanian (pertanian mayor), integrasi berbasis konsolidasi lahan (penerapan mekanisasi penuh), integrasi berbasis organisasi pertanian contoh pertanian organik, gula semut, serta kawasan pertanian terintegrasi berbasis unggulan.

9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB) dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel.

Rumah sakit tanpa dinding diharapkan untuk mengubah paradigma kesehatan dari kuratif ke promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan ini menempatkan tenaga medis jemput bola untuk mendatangi pasien; penyediaan ambulan; bidan, perawat, dokter datang ke orang sakit. Program ini dilakukan

dengan memastikan pemerataan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan kesehatan dasar terutama di wilayah dengan angka kematian dan angka kesakitan tinggi. Program ini juga disamping mempercepat pelayanan sekaligus memberikan penyuluhan kesehatan sesuai dengan kasus-kasus yang ditangani, juga untuk meningkatkan kapasitas masyarakat perilaku hidup bersih dan sehat.

Program unggulan lainnya adalah sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin yang dikembangkan untuk anak sekolah dari keluarga miskin, yang pembiayaan operasionalnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara penuh. Selain itu program lainnya adalah pemberian bantuan kepada sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah, dan difabel yang merupakan stimulan Bantuan Operasional Sekolah kepada SMK/SMK/SLB Swasta dan bantuan lembaga pendidikan keagamaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, jenjang pendidikan dan unsur pendidikan.

10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

Program festival seni dilakukan dengan mendorong kegiatan-kegiatan seni, pengembangan dan penguatan hubungan kebudayaan melalui rembug dan pertukaran kesenian dan budaya, penyelenggaraan festival dan gelar seni budaya dengan masyarakat dan provinsi lain maupun dengan masyarakat negara lain, serta pengembangan ekonomi kreatif untuk penciptaan nilai tambah yang berbasis kreativitas pada seni pertunjukan dan seni rupa. Sedangkan program pengembangan infrastruktur olahraga dilakukan dalam rangka meningkatkan kebugaran masyarakat serta meningkatkan prestasi olahraga Jawa Tengah.

Program pengembangan rumah kebudayaan Jawa Tengah. Program ini diarahkan pada penyediaan ruang bersama yang terbuka dan mudah dijangkau untuk penggiatan, pengembangan dan pemajuan daya kritis, kreatif, produktif dan apresiatif terhadap hasil kerja dan temuan karya yang berakar pada nilai budaya masyarakat Jawa Tengah. Rumah Budaya dibentuk di tingkat eks-Karesidenan dengan pendayagunaan gedung dan pekarangan peninggalan Rumah Dinas Residen, dan pemanfaatan taman budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.

Selain itu, program lainnya adalah mendorong peningkatan kepedulian lingkungan. Program ini mendorong peningkatan kesadaran bahwa manusia menjadi bagian yang tidak terpisah dari lingkungan sekaligus berusaha untuk berbuat sebaik mungkin bagi lingkungannya. Sikap kepedulian lingkungan ini harus dibangun sebagai salah satu nilai karakter masyarakat Jawa Tengah, yang akan mendukung upaya konservasi dan pemulihan kembali fungsi lingkungan. Ditambah dengan

peningkatkan masyarakat tangguh bencana sebagai salah satu upaya pengurangan risiko bencana agar terwujud keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan.

A. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Wilayah Jawa Tengah

Dalam rangka pencapaian tujuan pengembangan wilayah Jawa Tengah, maka dilakukan strategi pengembangan wilayah Jawa Tengah melalui:

a. Peningkatan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki.
b. Pemerataan pembangunan infrastruktur terutama di wilayah tengah dan selatan.
c. Pemeliharaan dan pemulihan fungsi kawasan yang berfungsi lindung.
d. Pengentasan kemiskinan dan pembangunan kualitas hidup masyarakat terutama di kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi serta IPM rendah.
e. Pengembangan ekonomi wilayah berbasis potensi unggulan daerah, terutama pada daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam tinggi tetapi nilai PDRB per kapitanya rendah.
f. Mendorong percepatan pembangunan daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita relatif rendah dan kawasan perbatasan.
g. Penguatan kerjasama antar daerah/wilayah/regional berdasarkan permasalahan, kekuatan dan potensi endogen.
h. Penanggulangan bencana yang difokuskan pada upaya pengurangan risiko dan kerentanan bencana.

Sedangkan arah kebijakan untuk perwujudan strategi pengembangan wilayah Jawa Tengah meliputi:

a. Peningkatan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki, melalui upaya:
    1) Pemantapan fungsi-fungsi pusat kegiatan, baik Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), maupun Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
    2) Peningkatan kapasitas pelayanan prasarana sarana dasar wilayah.
    3) Pengembangan interkoneksi antara pusat kegiatan dan hinterland.
    4) Pemantapan perkembangan kawasan di sepanjang Pantura dan mempercepat pertumbuhan kawasan di sepanjang Pansela.
b. Pemerataan pembangunan infrastruktur terutama di wilayah tengah dan selatan, melalui upaya:
    1) Peningkatan kapasitas dan aksesibilitas terutama di wilayah tengah dan selatan.

2) Pengembangan sistem transportasi darat, laut dan udara secara terpadu guna meningkatkan aksesibilitas antar wilayah.
3) Pengembangan sistem energi secara optimal dan mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan listrik agar terdistribusi merata.
4) Pengembangan sistem prasarana pengairan untuk menunjang kegiatan sektor yang terkait pemanfaatan sumber daya air.
5) Pengembangan sistem pelayanan prasarana permukiman terpadu guna mencapai kualitas lingkungan permukiman yang baik.

c. Pemeliharaan dan pemulihan fungsi kawasan lindung, melalui upaya:
1) Rehabilitasi dan konservasi kawasan yang berfungsi lindung baik hutan maupun non hutan berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS).
2) Peningkatan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan yang merata.
3) Peningkatan rehabilitasi pada lahan-lahan kritis.
4) Rehabilitasi daerah resapan air guna mempertahankan ketersediaan air.

d. Pengentasan kemiskinan dan pembangunan kualitas hidup masyarakat terutama di kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi serta IPM rendah, melalui upaya:
1) Peningkatan akses penduduk miskin terhadap pangan, pendidikan, kesehatan, energi dan rumah layak huni.
2) Pengembangan ekonomi padat karya untuk mengurangi pengangguran.

e. Pengembangan ekonomi wilayah berbasis potensi unggulan daerah, terutama pada daerah-daerah yang memiliki sumberdaya alam tinggi tetapi nilai PDRB per kapitanya rendah, melalui upaya:
1) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas.
2) Pengendalian konversi lahan sawah dengan implementasi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
3) Pengembangan kawasan berdasarkan potensi unggulan baik di perdesaan maupun perkotaan.
4) Pengembangan industri unggulan daerah skala kecil, menengah dan besar.
5) Mendorong fasilitasi akses permodalan untuk pengembangan usaha tani dan UMKM di wilayah perdesaan.

f. Mendorong percepatan pembangunan daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita relatif rendah dan kawasan perbatasan, melalui upaya:
1) Peningkatan akses masyarakat terhadap lahan dan pemanfaatan sumber daya alam terutama di perdesaan dan di kawasan perbatasan.

2) Peningkatan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar di desa-desa tertinggal.
3) Mendorong pengembangan investasi, terutama di wilayah selatan.

g. Penguatan kerjasama antar daerah/wilayah/regional dan antar pihak, melalui upaya:
1) Memfasilitasi pengembangan kerjasama antar wilayah/daerah.
2) Pemantapan skema kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan.

h. Penanggulangan bencana yang difokuskan pada upaya pengurangan risiko dan kerentanan bencana, melalui upaya:
1) Penanggulangan risiko bencana.
2) Memperkecil faktor kerentanan terhadap bencana.

B. Arah Pembangunan Kewilayahan Kota Salatiga

Secara khusus, arah kebijakan pembangunan Kota Salatiga juga termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dimana dijelaskan terkait dengan Arah Pengembangan Wilayah Wilayah pengembangan Kedungsepur meliputi Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Grobogan.

Kebijakan Arah pengembangan WP Kedungsepur adalah "Pengembangan Wilayah Kedungsepur Berbasis Perdagangan Jasa, dan Industri Pengolahan yang Sinergis Dengan Kegiatan Pertanian dan Pariwisata Terpadu Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan". Pengembangan wilayah Kedungsepur untuk Tahun 2018 sampai dengan 2023 ditargetkan untuk bisa mencapai 4 (empat) indikator utama yaitu Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,20 persen sampai dengan 6,50 persen, Angka Kemiskinan pada kisaran 0,28 persen sampai dengan 9,28 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 1,70 persen sampai dengan 4,80 persen serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 71,16 sampai dengan 83,69. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 6. 1 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kedungsepur Per Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023

No	Kabupaten/ Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Grobogan	5,10-5,50	5,20-5,60	5,50-5,90	5,70-6,10	5,90-6,30
2	Demak	5,20-5,60	5,30-5,70	5,60-6,00	5,80-6,20	6,00-6,40
3	Semarang	5,90-6,30	6,00-6,40	6,30-6,70	6,50-6,90	6,70-7,10
4	Kendal	5,80-6,20	5,90-6,30	6,20-6,60	6,40-6,80	6,70-7,10
5	Kota Semarang	5,90-6,30	6,00-6,40	6,30-6,70	6,50-6,90	6,80-7,20
6	**Kota Salatiga**	**5,30-5,70**	**5,40-5,80**	**5,70-6,10**	**5,90-6,30**	**6,10-6,50**

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Tabel 6. 2 Sasaran Angka Kemiskinan Wilayah Kedungsepur Per Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023

No	Kabupaten/ Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Grobogan	10.80 - 11.80	10.29 - 11.29	9.78 - 10.78	9.27 - 10.27	8.76 - 9.76
2	Demak	10.90 - 11.90	10.26 - 11.26	9.62 - 10.62	8,98 - 9,98	8,34 -9,34
3	Semarang	6.05 - 7.05	5.81 - 6.8	5.57 - 6.57	5.32 - 6.32	5.08 - 6.08
4	Kendal	8.27 - 9.27	7.70 - 8.70	7.14 - 8.14	6.57 - 7.57	6.00 - 7.00
5	Kota Semarang	3,85 - 4,85	3,75 - 4,75	3,65 - 4,65	3,45 - 4,45	3,20 - 4,20
6	**Kota Salatiga**	**3.52 - 4.52**	**3.21 - 4.21**	**2.90 - 3.90**	**2.59 - 3.59**	**2.27 - 3.27**

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Tabel 6. 3 Sasaran TPT Wilayah Kedungsepur Per Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023

No	Kabupaten/ Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Grobogan	5,5	5,1	4,8	4,5	4,1
2	Demak	4,3-4,4	4,3-4,4	4,2-4,3	4,2-4,3	4,15-4,25
3	Semarang	1,7-1,8	1,7-1,8	1,7-1,8	1,7-1,8	1,7-1,8
4	Kendal	6,3	6,0	5,7	4,7-4,8	4,6-4,7
5	Kota Semarang	4,97*)	4,9-5,0*)	4,8-5,0*)	4,8-4,9*)	4,7-4,8*)
6	**Kota Salatiga**	**5,98**	**5,83**	**5,78**	**5,78**	**3,6-3,8**

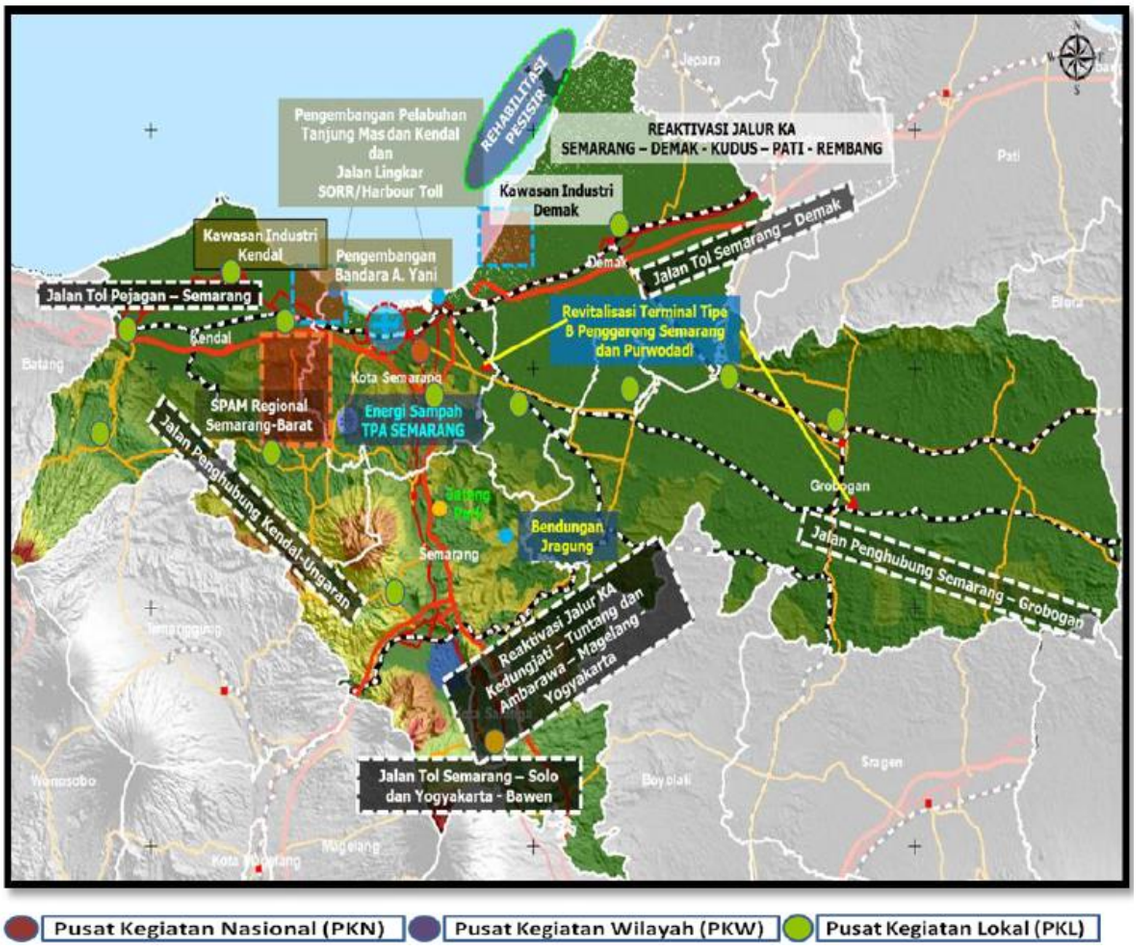
Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Tabel 6. 4 Sasaran IPM Wilayah Kedungsepur Per Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023

No	Kabupaten/ Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Grobogan	69,75	69,96	70,16	70,36	70,56
2	Demak	71,63	71,91	72,17	72,43	72,70
3	Semarang	73,55	73,85	74,05	74,21	75,00
4	Kendal	71,21	71,63	71,99	72,32	72,65
5	Kota Semarang	82,67	82,88	83,12	83,32	83,32
6	**Kota Salatiga**	**82,09**	**82,67**	**83,18**	**83,69**	**83,94**

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Untuk mencapai indikator makro tersebut maka dilakukan upaya sebagaimana terlihat dalam peta sebagai berikut :



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 6. 1 Arah Pengembangan Wilayah Kedungsepur

Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas dengan pengembangan infrastruktur meliputi: Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi. Pelayanan jaringan infrastruktur transportasi dilakukan melalui: Pengembangan Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan (3 koridor) dan rel (Kereta Api Komuter), Fasilitasi pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas dan Kendal; Fasilitasi Revitalisasi / Reakvitasi Jalur Rel Kereta Api Non Aktif pada Jalur Kedungjati – Tuntang dan Ambarawa – Secang – Magelang – Yogyakarta; Fasilitasi Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak, Fasilitasi Pembangunan Jalan Lingkar SORR/Semarang Harbour Toll; Fasilitasi pengembangan Bandara A. Yani, Kota Semarang.

Pemenuhan kebutuhan air baku dilakukan : Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Pendukung untuk pengembangan Kawasan Industri (KIK dan Jatengland).

Selain itu upaya pengelolaan lingkungan diantaranya : Konservasi air tanah CAT Semarang - Demak Rehabilitasi pesisir (Demak, Kendal, Kota Semarang); Penanganan daerah kritis (Kabupaten Semarang, Grobogan) dan Pembangunan Pengelolaan Limbah B3 Rumah Sakit Jawa Tengah; Pembangunan *Waste to Energy (Incenerator)* Kota Semarang

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal meliputi perdagangan, jasa, industri kawasan Kendal dan Demak dan Pembangunan Jateng Park dengan pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

Guna mendukung konsep tersebut maka arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Kedungsepur sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. 5 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Kedungsepur

Konsep Pengembangan	Kebijakan	Strategi
Pengembangan Wilayah Kedungsepur Berbasis Perdagangan Jasa, dan Industri Pengolahan yang Sinergis Dengan Kegiatan Pertanian dan Pariwisata Terpadu Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi.	Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara
	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang merata di wilayah Kedungsepur melalui pengotimalan sektor potensial dan dukungan pengembangan	Pengembangan kawasan industri
		Pengembangan Pariwisata
	Meningkatkan dukungan dan kinerja infrastruktur pada wilayah-wilayah pertanian Kedungsepur	Peningkatan konektivitas Wilayah Agropolitan
	Pengembangan infrastruktur yang merata guna mendukung aktivitas di wilayah pertanian Kedungsepur yang masih tertinggal	Peningkatan dukungan dan kinerja infrastruktur pada wilayah-wilayah pertanian Kedungsepur
	Pengembangan pelayanan infrastruktur regional di wilayah Kedungsepur	Menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan di sekitarnya;
	Pengembangan sektor ekonomi potensial yang terpadu di wilayah Kedungsepur	Peningkatan konektivitas internal wilayah Kedungsepur melalui keterhubungan pengembangan sektor ekonomi
	Peningkatan interaksi internal wilayah Kedungsepur	Peningkatan dukungan prasarana jalan penghubung inter wilayah di Kedungsepur
		Penataan dan Peningkatan Pelayanan Kawasan Perdagangan dan Jasa

Konsep Pengembangan	Kebijakan	Strategi
		Pengembangan konektivitas wilayah Kedungsepur
	Peningkatan interaksi eksternal wilayah Kedungsepur dengan region lain yang berbatasan	Peningkatan dukungan transportasi dalam memperkuat interaksi eksternal wilayah Kedungsepur
	Pengembangan sumber daya manusia di wilayah Kedungsepur melalui pengoptimalan pendidikan masyarakat	Peningkatan pelayanan pendidikan di wilayah Kedungsepur melalui penyelenggaraan SMK Negeri Boarding dan SMK Negeri Semi Boarding untuk siswa dari keluarga miskin
		Pemberian Beasiswa Siswa Miskin (BSM) SMA, SMK, SLB
		Penyelenggaraan BOS dan BOP SMA, SMK, SLB
		Pemberian Beasiswa Siswa Miskin (BSM) SMA, SMK, SLB
		Penyelenggaraan BOS dan BOP SMA, SMK, SLB
	Pengentasan permasalahan kesejahteran sosial	Penanganan permasalahan pengangguran di wilayah Kedungsepur
		Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
		Penguatan peran pemuda untuk mempercepat pengentasan kemiskinan
	Pengembangan Kelembagaan Kedungsepur efektif	Penguatan kerjasama regional Kedungsepur dalam penyediaan infrastruktur, pengelolaan energi alternatif dan sistem pelayanan regional
		Pembentukan baru badan pengelola kerjasama interwilayah Kedungsepur
	Pengintegrasian kegiatan Konservasi Lingkungan ekonomi wilayah dengan pelestarian lingkungan	Konservasi Lingkungan
		Penanganan Limbah

Sumber: Perubahan RPJMD Jawa Tengah Tahun 2013-2018

6.3. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Salatiga Tahun 2005-2025

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 perlu untuk ditelaah mengingat arahan dan amanat regulasi. Adapun tahapan pembangunan dalam RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025, yang terdiri dari:

1. Tahapan Pertama (2005-2009)
2. Tahapan Kedua (2010-2014)
3. Tahapan Ketiga (2015-2019)
4. Tahapan Keempat (2020-2024)

Berdasarkan tahapan tersebut, penyusunan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 masuk kedalam Tahapan Keempat (Tahun 2020-2024). Adapun prioritas pembangunan pada dua tahapan pembangunan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 6. 6 Prioritas Pembangunan dalam RPJPD Kota Salatiga Tahun 2020-2024

No	Misi	Tahapan
		IV 2020-2024
1	Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat.	1. Pemantapan pelayanan pendidikan yang bermutu didukung oleh tenaga pendidik yang kompeten dibidangnya, serta serta peningkatan relevansi kurikulum pendidikan dasar dan menengah dengan disesuaikan dengan perkembangan iptek, serta kebutuhan pasar. 2. Pemantapan kesempatan memperoleh pendidikan dasar dan menengah yang bermutu 3. Pemantapan peran lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menyiapkan SDM siap pakai dan langsung bisa bekerja dan berusaha melalui bengkel latihan kerja dan berusaha. 4. Pemantapan jangkauan kualitas akademik dan profesionalisme SDM pendidikan melalui pencapaian sertifikasi guru. 5. Pemantapan mutu pelayanan kesehatan serta terwujudnya sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. 6. Pemantapan kesejahteraan, perlindungan serta kemandirian tenaga kerja. 7. Pemantapan peran dan partisipasi Pemuda dalam pembangunan di Kelurahan pasing-masing dalam pembangunan. 8. Pemantapan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya melalui peningkatan, peningkatan fasilitas program KB dan transmigrasi mandiri. 9. Pemantapan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial. 10. Pemantapan kepedulian terhadap etika dan moral, nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal. 11. Pemantapan dan penerapan hasil penelitian dan pengembangan IPTEK yang mampu mendorong berkembangnya teknologi madya. 12. Pemantapan pelayanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi sebagai sarana penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, hasil penelitian dan penemuan lainnya kepada

No	Misi	Tahapan IV 2020-2024
		masyarakat.
2	Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyataan.	1. Pemantapan peran sektor sektor pendidikan dalam pembanguna ekonomi dengan tetap mempertikan penguatan peran sektor lain seperti perindustrian, perdagangan dan pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan sarana dan prasarana pendukung. 2. Pemantapan situasi iklim usaha yang kondusif untuk masuknya investor dalam rangka menanamkan modalnya dengan dukungan perijinan yang mudah, cepat dan transparan, terpenuhinya sarana dan prasarana investasi yang memadai dan terjaminnya kepastian hukum, dengan harapan akan dapat menyerap/membuka lapangan kerja baru. 3. Pemantapan peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi ekspor serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing. 4. Pengurangan distorsi pasar dan mengembalikan peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator. 5. Pemantapan nilai tambah barang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan produktifitas, kesejahteraan petani baik pertanian pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan, berkembangnya pertanian perkotaan, dengan konsep pengembangan agribisnis, agar mampu bersaing dipasar lokal maupun regional, serta mendukung ketahanan pangan nasional. 6. Pemantapan pengelolaan pembangunan Kota Salatiga yang efektif, efisien dan produktif serta peningkatan potensi daerah secara kreatif dan inovatif. 7. Pemantapan struktur perekonomian yang didukung oleh produk-produk unggulan yang mempunyai nilai ekonomis strategis, berkualitas serta mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif.
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan meningkatnya kinerja pelayanan publik yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat.	1. Pemantapan sistem perencanaan yang berorientasi pada potensi sumberdaya dan urgensi kebutuhan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan. 2. Pemantapan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip *good governance* melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 3. Pemantapan budaya kerja yang profesional, bersih, beretika dan berwibawa. 4. Peningkatan pengelolaan keuangan dan kemandirian keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. 5. Pemantapan sistem pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan standar pelayanan minimal pada bidang pelayanan dasar. 6. Pemantapan kerjasama dan kemitraan strategis antar pelaku pembangunan.
4	Mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat,	1. Pemantapan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. 2. Pemantapan kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat pada peraturan dan hukum serta terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

No	Misi	Tahapan IV 2020-2024
	bertanggung jawab dan berkeadilan.	3. Pemantapan ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat. 4. Pemantapan peran serta masyarakat untuk ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban umum. 5. Pemantapan demokrasi politik, penegakan hukum dan HAM melalui peningkatan partisipasi dan pendidikan politik rakyat serta profesionalisme aparat dan penegak hukum. 6. Pemantapan tata nilai kehidupan masyarakat dengan menjunjung tinggi kesejajaran, keharmonisan, saling percaya, toleransi, kooperatif dan solidaritas dalam keberagaman. 7. Pemantapan perlakuan dan pelayanan yang sama pada seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan
5	Mewujudkan penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.	1. Pemantapan pengelolaan SDA dan LH dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya. 2. Pemantapan sistem pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan. 3. Pemantapan pemahaman aparatur penyelenggara pemerintahan akan pembangunan berkelanjutan. 4. Pemantapan Perilaku masyarakat akan pembangunan berkelanjutan. 5. Pemantapan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan sesuai tata ruang kota yang berkelanjutan, wawasan lingkungan dan berorientasi pada keindahan, lestari dan kenyamanan kota serta didukung partisipasi masyarakat yang tinggi.
6	Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota	1. Pemantapan aksesibilitas masyarakat, melalui pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan, jembatan, sarana dan sistem transportasi yang berorientasi pada keamanan dan kenyamanan, meningkatkan penerangan jalan, meningkatnya fasilitas air minum, energi listrik, perumahan, sarana komunikasi dan sarana perekonomian masyarakat serta sarana sosial, taman kota, sport zone dan tempat peribadatan masyarakat serta sarana pembuangan sampah. 2. Peningkatan infrastruktur dan utilitas yang dibutuhkan masyarakat dan pengembangan infrastruktur baru. 3. Peningkatan kualitas layanan air bersih dan perbaikan sanitasi yang memadai, guna terciptanya kesehatan lingkungan permukiman perkotaan. 4. Peningkatan kualitas layanan fasilitas umum dan fasilitas kota yang berkualitas untuk masyarakat dan menarik bagi wisatawan. 5. Pemantapan penatagunaan pertanahan, administrasi dan hukum, pemanfaatan dan pengendalian pertanahan untuk menunjang perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. 6. Pemantapan sistem penataan ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan melalui pemantapan penerapan perencanaan tata ruang, pengembangan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Sumber: RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

6.4. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Salatiga Tahun 2010-2030

Kebijakan dan strategi penataan ruang Kota Salatiga telah ditetapkan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Salatiga Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang Kota Salatiga adalah mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat pendidikan dan olahraga di kawasan Kendal-Ungaran-Semarang-Salatiga-Purwodadi (Kedungsepur) yang berkelanjutan didukung sektor perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah tersebut ditetapkan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

Kebijakan dan strategi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga atas dasar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Salatiga Tahun 2010-2030 meliputi:

1. Kebijakan pengembangan struktur ruang yang meliputi:
   a. Pemantapan pusat pelayanan kegiatan sesuai dengan fungsinya. Strategi pemantapan pusat pelayanan kegiatan sesuai dengan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
      a) Menetapkan hirarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang;
      b) Mengembangkan pusat perdagangan berskala regional;
      c) mengembangkan kegiatan pendidikan menengah kejuruan, akademi, dan perguruan tinggi hingga ke skala pelayanan regional;
      d) Mengembangkan pusat kegiatan olah raga;
      e) Mengembangkan kegiatan wisata budaya, wisata alam dan wisata buatan; dan
      f) Mengembangkan kegiatan jasa pertemuan dan jasa pameran.
   b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana dan sarana umum. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana dan sarana umum meliputi:
      a) Mengembangkan prasarana telekomunikasi nirkabel berupa tower Base Transceiver Station (BTS) bersama;
      b) Mengembangkan prasarana listrik dengan sumber energi alternatif;
      c) Meningkatkan dan mengembangkan ketersediaan air baku; dan
      d) Meningkatkan kualitas jaringan irigasi dan distribusi air.
   c. Pengembangan sistem jaringan transportasi jalan yang memperlancar pergerakan antarpusat kegiatan. Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi jalan yang memperlancar pergerakan antar pusa t kegiatan meliputi:
      a) Mengembangkan jaringan jalan lingkar;
      b) Menata fungsi jaringan jalan; dan
      c) Mengembangkan terminal tipe C, dan terminal angkutan kota (angkota).
2. Kebijakan pengembangan pola ruang meliputi:
   a. Peningkatan fungsi kawasan lindung. Strategi peningkatan fungsi kawasan lindung meliputi:

a) Menetapkan kawasan lindung;
b) Menjaga kelestarian kawasan lindung;
c) Mengembalikan dan mengatur pemanfaatan tanah sesuai peruntukan fungsi lindung;
d) Melestarikan kawasan lindung cagar budaya;
e) Melakukan rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung yang telah menurun fungsinya

b. Penyediaan RTH kota yang proporsional. Strategi penyediaan RTH kota yang proporsional meliputi:
a) meningkatkan kuantitas RTH hingga 30 (tiga puluh) persen;
b) mengembalikan RTH sesuai fungsinya; dan
c) mempertahankan RTH yang telah ada.

c. Perwujudan pengembangan kegiatan budi daya yang optimal dan efisien. Strategi perwujudan pengembangan kegiatan budi daya yang optimal dan efisien meliputi:
a) menetapkan kawasan budi daya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
b) mengarahkan pengembangan kawasan industri di bagian Selatan kota;
c) mengarahkan pengembangan kawasan pertanian lahan basah di bagian Timur kota;
d) mendorong pengembangan kawasan budi daya secara vertikal di kawasan kepadatan tinggi;
e) memperhatikan keterpaduan antar kegiatan budi daya; dan
f) mengembangkan fasilitas olah raga berskala nasional dan internasional.

d. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Strategi perwujudan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi:
a) Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
b) Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar kawasan strategis nasional yang mempunyai fungsi khusus pertahanan dan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun; dan
c) Menjaga dan memelihara aset–aset pertahanan dan keamanan.

3. Kebijakan pengembangan kawasan strategis meliputi:
a. Pengembangan kawasan strategis sosial budaya. Strategi pengembangan kawasan strategis sosial budaya meliputi:
a) Menetapkan kawasan strategis kota dengan fungsi pendidikan berskala

internasional;

b) Meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan tinggi di kawasan strategis; dan

c) Meningkatkan prasarana dan sarana pusat pendidikan dasar dan pusat pendidikan menengah di kawasan strategis.

b. Pengembangan kawasan strategis ekonomi. Strategi pengembangan kawasan strategis ekonomi meliputi:

a) Menetapkan kawasan strategis kota dengan fungsi perdagangan dan jasa

b) Meningkatkan prasarana dan sarana perdagangan dan jasa berskala regional; dan

c) Meningkatkan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan perdagangan dan jasa

Berdasarkan dari kebijakan dan strategi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 maka disusun Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung, serta harus memperhatikan wilayah rawan bencana dengan uraian sebagai berikut:

A. Kawasan Budidaya

Pengembangan Kawasan Budidaya di Kota Salatiga terdiri atas kawasan peruntukan perumahan, kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan perkantoran, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan Ruang Terbukan Non Hijau (RTNH), kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal dan kawasan peruntukan lainnya.

1) Kawasan Peruntukan Perumahan

Kawasan peruntukan perumahan meliputi perumahan dengan kepadatan tinggi, perumahan dengan kepadatan sedang dan perumahan dengan kepadatan rendah. Perumahan dengan kepadatan tinggi, yaitu lebih besar dari 5.336 jiwa per km^2 terdapat di Kelurahan: Kutowinangun, Gendongan, Ledok, Tegalrejo, Kalicacing dan Salatiga. Pengembangan kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan tinggi meliputi peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan, peningkatan kualitas hunian di kawasan kumuh, mendorong pembangunan perumahan secara vertikal, menetapkan koefisien dasar bangunan maksimal 70 % dalam setiap pembangunan kawasan perumahan dan mendorong pembuatan sumur resapan komunal dan biopori.

Perumahan dengan kepadatan sedang, yaitu antara 2.668 hingga 5.336 jiwa per km^2 terdapat di Kelurahan: Tingkir Tengah, Cebongan, Mangunsari dan Sidorejo Lor. Kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah, yaitu kurang dari 2.668 jiwa per km^2 terdapat di Kelurahan: Sidorejo Kidul, Kalibening, Tingkir Lor, Kumpulrejo, Noborejo, Randuacir, Kecandran, Dukuh, Blotongan, Bugel, Kauman Kidul dan Pulutan. Pengembangan kawasan peruntukan perumahan

dengan kepadatan sedang dan rendah, yaitu meliputi peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan, peningkatan kualitas hunian bagi rumah tangga miskin. Menetapkan koefisien dasar bangunan maksimal 60 % dalam setiap pembangunan kawasan perumahan dan mendorong pembuatan sumur resapan dan biopori.

2) Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa

Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang meliputi pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Kawasan peruntukan pasar tradisional terdapat di Kecamatan: Sidorejo, Tingkir, Argomulyo dan Sidomukti; pusat perbelanjaan terdapat di Kelurahan: Salatiga, Kutowinangun Kidul, Kutowinangun Lor dan Kalicacing; dan toko modern terdapat di Kecamatan: Sidorejo, Tingkir, Argomulyo dan Sidomukti.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, yaitu pengembangan kegiatan pasar tradisional modern di Kelurahan Sidorejo Lor; peningkatan kualitas pasar tradisional Rejosari di Kelurahan Mangunsari; peningkatan kualitas pasar tradisional Jetis di Kelurahan Sidorejo Lor; pengembangan kegiatan pasar tradisional agro di Kelurahan Kecandran; peningkatan kualitas pasar tradisional di Kelurahan Noborejo; peningkatan kualitas pusat perbelanjaan Pasaraya I di Kelurahan Kutowinangun Kidul; peningkatan kualitas pusat perbelanjaan Pasaraya II di Kelurahan Kutowinangun Lor; pengembangan toko modern sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan pengembangan toko modern tidak berdekatan dengan pasar tradisional.

3) Kawasan Peruntukan Perkantoran

Kawasan peruntukan perkantoran meliputi pemerintahan perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta. Kawasan peruntukan perkantoran terdapat di pusat pemerintahan kota di Jalan Letjend. Sukowati Kelurahan Kalicacing, Jalan Ki Penjawi di Kelurahan Sidorejo Lor, Jalan Hasanudin di Kelurahan Mangunsari, Jalan Marditomo di Kelurahan Sidorejo Kidul dan Jalan Argo Boga di Kelurahan Randuacir. Sedangkan kawasan peruntukan perkantoran swasta terdapat di Kelurahan: Salatiga, Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul, Kalicacing, Gendongan, Sidorejo Lor, Mangunsari, Sidorejo Kidul dan Randuacir.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan perkantoran, yaitu penataan kawasan Jalan Jenderal Sudirman, perencanaan fasilitas perkantoran harus menyediakan ruang untuk RTH, RTNH dan sumur resapan dan mengarahkan pengembangan kegiatan perkantoran swasta di kawasan peruntukan perdagangan dan jasa.

4) Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri meliputi industri kecil, industri menengah dan industri besar *non polutan*. Kawasan peruntukan industri kecil di tetapkan

di Kelurahan: Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul, Gendongan, Tingkir Lor dan Tingkir Tengah; Kawasan peruntukan industri menengah di tetapkan di Kelurahan: Sidorejo Kidul dan Noborejo, dan untuk Kawasan peruntukan Industri besar *non polutan* ditetapkan di Kelurahan: Kutowinangun, Ledok, Mangunsari, Cebongan, Randuacir dan Noborejo.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri, yaitu peningkatan kualitas sarana prasarana kawasan peruntukan industri menengah dan industri besar non polutan di Kelurahan: Noborejo dan Randuacir dengan luas kurang lebih 157 (seratus lima puluh tujuh) ha; industri kecil diarahkan berbentuk klaster dan mengarahkan pembangunan IPAL komunal bagi industri kecil yang menimbulkan polusi.

5) Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata, yaitu terdiri dari pariwisata budaya, pariwisata alam dan pariwisata buatan. Kawasan peruntukan pariwisata budaya meliputi pariwisata budaya Batu Prasasti Plumpungan di Kelurahan Kauman Kidul, pariwisata budaya Goa Asmorodono di Kelurahan Kecandran dan pariwisata budaya Sumur Wali di Kelurahan Randuacir. Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata budaya, yaitu peningkatan wisata budaya batu prasasti Plumpungan di Kelurahan Kauman Kidul, pengembangan wisata budaya bangunan kuno bersejarah di Kota Salatiga dan pengembangan wisata religi di Kelurahan Bugel.

Kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi wisata agro Salib Putih di Kelurahan Kumpulrejo, wisata Hutan Karet di Kelurahan Bugel dan wisata agro Salak di Kelurahan Kecandran. Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata alam, yaitu pengembangan wisata taman buah di Kelurahan Noborejo dan pengembangan wisata hutan kota Ngawen di Kelurahan Mangunsari.

Kawasan peruntukan pariwisata buatan meliputi pariwisata buatan wisata air dan permainan di Kelurahan Cebongan dan pariwisata buatan wisata kuliner di Kelurahan: Sidorejo Lor dan Blotongan. Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata buatan meliputi pengembangan wisata air dan permainan di Kelurahan Bugel dan pengembangan dan peningkatan wisata kuliner di Kelurahan: Sidorejo Lor dan Blotongan.

6) Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Kawasan RTNH untuk menampung kegiatan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat kota, yaitu meliputi alun-alun kawasan pemerintahan, plasa bangunan ibadah, penyediaan lahan parkir dan lapangan olahraga. Alun-alun kawasan pemerintahan, yaitu Lapangan Pancasila terdapat di Kelurahan Kalicacing berfungsi sebagai kegiatan rakyat dan rekreatif; lokasi plasa bangunan ibadah tersebar pada setiap pembangunan prasarana ibadah yang terdapat di wilayah Kota Salatiga; lokasi lahan parkir meliputi area permukiman dan pusat-pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata dan pemerintahan;

dan untuk pengembangan gedung gelora pemuda, bumi perkemahan dan lapangan olahraga meliputi rencana pembangunan *Sport and Youth Center* di Kelurahan Kecandran dan Kelurahan Sidorejo Lor, lapangan olah raga di tiap kecamatan dan Stadion Kridanggo.

7) Kawasan Ruang Evakuasi Bencana

Kawasan ruang evakuasi bencana dengan rencana pengembangan melalui penataan lingkungan ruang evakuasi bencana, yaitu meliputi kawasan ruang evakuasi bencana di Kelurahan: Blotongan dan Bugel di lapangan Prampelan Blotongan dan halaman atau gedung pertemuan Kecamatan Sidorejo; ruang evakuasi bencana di Kelurahan: Sidorejo Kidul, Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul di lapangan sepak bola Sidorejo Kidul dan gedung pertemuan Kecamatan Tingkir; ruang evakuasi bencana di Kelurahan: Randuacir dan Kelurahan Kumpulrejo di halaman dan gedung pertemuan Kecamatan Argomulyo dan lapangan sepak bola Randuacir. Rencana pengembangan kawasan ruang evakuasi bencana adalah penataan lingkungan ruang evakuasi bencana.

8) Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Kegiatan Sektor Informal

Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal, yaitu area khusus untuk pedagang kaki lima (PKL). Kawasan peruntukan kegiatan sektor informal terdapat di kawasan PKL Kridanggo di Kelurahan Kalicacing, kawasan PKL Lapangan Pancasila di Kelurahan Kalicacing, kawasan PKL Jenderal Sudirman di Kelurahan: Salatiga, Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul dan Kalicacing, kawasan PKL Pasar Andong di Kelurahan Mangunsari dan kawasan PKL Margosari di Kelurahan Salatiga.

9) Kawasan Peruntukan Lainnya

Pengembangan kawasan peruntukannya lainnya meliputi kawasan peruntukan pertanian, perikanan, hutan rakyat, pelayanan umum, pertahanan dan keamanan, serta olah raga dan rekreasi.

a. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian terbagi menjadi 4 kawasan yang meliputi pertanian tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dibagi menjadi dua yaitu kawasan peruntukan pertanian lahan basah dan kawasan peruntukan pertanian lahan kering. Kawasan peruntukan pertanian lahan basah, yaitu meliputi (1) sawah beririgasi teknis ditetapkan sebagai kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 274 ha, terletak di sebagian Kelurahan: Ledok, Tingkir Tengah, Tingkir Lor, Kalibening, Kutowinangun Kidul, Kutowinangun Lor, Mangunsari, Salatiga dan Kauman Kidul; (2) sawah beririgasi setengah teknis, terletak di sebagian Kelurahan: Tingkir Tengah, Sidorejo Kidul, Kecandran, Pulutan, Sidorejo Lor, Bugel dan Kauman Kidul; dan (3) sawah beririgasi sederhana, terletak di

sebagian Kelurahan: Ledok, Pulutan, Blotongan dan Kauman Kidul. Sedangkan kawasan peruntukan pertanian lahan kering ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 305 ha, terletak di sebagian Kecamatan: Sidorejo, Tingkir, Argomulyo dan Sidomukti.

Kawasan peruntukan holtikultura, terletak di Kecamatan: Argomulyo dan Sidomukti. Selanjutnya kawasan peruntukan perkebunan, terletak di sebagian Kelurahan: Bugel, Blotongan dan Kauman Kidul. Sedangkan kawasan peruntukan peternakan yang meliputi peternakan ternak besar, ternak kecil dan unggas terletak di sebagian Kecamatan: Argomulyo dan Sidomukti.

Pengembangan kawasan peruntukan pertanian meliputi pembatasan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan untuk kegiatan non pertanian; peningkatan status sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap menjadi sawah beririgasi teknis; peningkatan jaringan irigasi; pengembangan sentra buah-buahan di Kelurahan: Kauman Kidul, Kecandran dan Sidorejo Kidul; pengembangan perkebunan tanaman keras di Kelurahan: Blotongan, Sidorejo Kidul, Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul, Bugel, Randuacir dan Kumpulrejo; dan peningkatan prasarana klaster peternakan sapi, kambing dan kelinci di sebagian Kecamatan: Argomulyo dan Sidomukti.

b. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan terdapat di Kelurahan Kauman Kidul, Pulutan dan Tingkir Tengah. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan, yaitu peningkatan prasarana klaster minapolitan di Kelurahan Pulutan, peningkatan prasarana pasar ikan di Kelurahan Pulutan dan peningkatan prasarana pembibitan ikan di Kelurahan: Kauman Kidul dan Tingkir Tengah.

c. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan peruntukan hutan rakyat dengan rencana pengembangan melalui penanaman kembali hutan rakyat dan pembatasan alih fungsi hutan rakyat. Kawasan peruntukan hutan rakyat terletak di sebagian Kelurahan: Blotongan, Sidorejo Lor, Kauman Kidul, Pulutan, Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul, Sidorejo Kidul, Tingkir Lor, Noborejo, Ledok, Tegalrejo, Kumpulrejo, Randuacir, Cebongan, Kecandran dan Dukuh.

d. Kawasan Peruntukan Pelayanan Umum

Kawasan pelayanan umum meliputi pelayanan umum pendidikan, peribadatan dan kesehatan. Kawasan pelayanan umum pendidikan terdiri dari pendidikan dasar tersebar di Kota Salatiga, pendidikan menengah terdapat di subpusat pelayanan kota, pendidikan tinggi terdapat di subpusat pelayanan kota dan pendidikan luar sekolah. Rencana pengembangan pelayanan umum pendidikan yaitu melalui peningkatan kualitas sarana prasarana dasar dan menengah, peningkatan kualitas sarana prasarana

pendidikan tinggi dan pendidikan luar sekolah diarahkan di kawasan perdagangan dan jasa.

Kawasan pelayanan umum peribadatan keagamaan dengan rencana pengembangan melalui peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan peribadatan tersebar di Kota Salatiga. Sedangkan kawasan pelayanan umum kesehatan, yaitu terdiri dari (1) pelayanan kesehatan dasar, meliputi puskesmas pembantu di Kelurahan: Blotongan, Sidorejo Lor, Salatiga, Bugel, Kauman Kidul, Pulutan, Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul, Gendongan, Tingkir Tengah, Noborejo, Ledok, Tegalrejo, Randuacir, Dukuh dan Mangunsari; dan puskesmas di Kelurahan: Kalicacing, Tegalrejo, Mangunsari, Sidorejo Lor dan Sidorejo Kidul; (2) pelayanan kesehatan rujukan, meliputi Rumah Sakit Umum Daerah tipe B terdapat di Kelurahan Mangunsari, Rumah Sakit Paru dr.Ario Wirawan terdapat di Kelurahan Mangunsari, Rumah Sakit DKT dr.Asmir terdapat di Kelurahan Kutowinangun Lor, Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru terdapat di Kelurahan Kalicacing dan Puskesmas Rawat Inap terdapat di Kelurahan Cebongan. Rencana pengembangan pelayanan umum kesehatan yaitu peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan, peningkatan kelas puskesmas menjadi rumah sakit tipe C dan pengembangan puskesmas pembantu.

e. Kawasan Peruntukan Pertahanan Keamanan

Pengembangan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi Korem di Kelurahan Salatiga; Kodim di Kelurahan Salatiga; Koramil di Kelurahan: Sidorejo Lor, Sidorejo Kidul, Randuacir dan Mangunsari; Yonif 411 Kostrad di Kelurahan: Kalicacing, Gendongan, Mangunsari dan Tegalrejo; Polres Kota Salatiga di Kelurahan Kalicacing; Satlantas Kota Salatiga di Kelurahan Salatiga; dan Polsek di Kelurahan: Sidorejo Lor, Sidorejo Kidul, Randuacir dan Mangunsari. Rencana pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan yaitu peningkatan prasarana dan sarana dikawasan pertahanan dan keamanan dan penataan kawasan pertahanan dan keamanan.

f. Kawasan Peruntukan Olahraga dan Rekreasi

Kawasan peruntukan olahraga dan rekreasi meliputi rencana *Sport and Youth Center* di Kelurahan: Kecandran dan Sidorejo Lor; lapangan olahraga di tiap kecamatan; Gelanggang Olahraga. Rencana pengembangannya, yaitu peningkatan prasarana dan sarana di kawasan olahraga dan peningkatan kerja sama antar klub olahraga.

B. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung di Kota Salatiga terdiri atas kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, Ruang

Terbuka Hijau (RTH), kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya.

1) Kawasan yang Memberi Perlindungan Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya meliputi kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat seluas kurang lebih 45 ha dan kawasan resapan air. Kawasan lindung yang dikelola masyarakat terletak di sebagian Kelurahan: Bugel, Blotongan, Sidorejo Kidul, Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul dan di ruas Jalan Lingkar Salatiga di Kelurahan: Kumpulrejo dan Dukuh. Sedangkan kawasan resapan air terletak di Kelurahan: Randuacir, Kumpulrejo, Bugel, Blotongan, Sidorejo Kidul dan Kutowinangun Lor. Rencana pengembangannya yaitu melakukan penghijauan, mengarahkan pemanfaatan ruang di kawasan resapan air untuk fungsi hutan dan mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya.

2) Kawasan Perlindungan Setempat

Rencana pengembangan kawasan perlindungan setempat yaitu penghijauan di kawasan perlindungan setempat, pengendalian pemanfaatan kawasan perlindungan setempat, dan perlindungan dan penguatan dinding pembatas sungai. Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar mata air dan kawasan sekitar embung atau waduk. Kawasan sempadan sungai meliputi (a) Sungai Senjoyo di Kelurahan: Tingkir Tengah, Tingkir Lor, Sidorejo Kidul, Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul; (b) Sungai Setro di Kelurahan Kauman Kidul; (c) Sungai Jetis di Kelurahan: Randuacir, Noborejo, Cebongan, Ledok, Sidorejo Kidul dan Kutowinangun; (d) Sungai Ngaglik di Kelurahan: Kumpulrejo, Randuacir, Tegalrejo, Ledok, Gendongan dan Kutowinangun Lor; (e) Sungai Nanggulan di Kelurahan Kutowinangun; (f) Sungai Ngawen di Kelurahan: Kumpulrejo, Tegalrejo dan Mangunsari; (g) Sungai Sraten di Kelurahan: Kumpulrejo, Mangunsari, Dukuh dan Kecandran; (h) Sungai Sawahan di Kelurahan: Kumpulrejo, Dukuh dan Kecandran; dan (i) Sungai Ngemplak di Kelurahan: Dukuh dan Kecandran.

Kawasan sekitar mata air meliputi mata air Kalitaman, mata air Kalisombo, mata air Benoyo, mata air Siluwing dan mata air Kaligethek. Sedangkan kawasan sekitar embung atau waduk terletak di kawasan embung atau waduk di Kecamatan Argomulyo. Kawasan sekitar embung atau waduk terletak di kawasan embung atau waduk di Kecamatan Argomulyo.

Rencana pengembangan kawasan perlindungan setempat meliputi:

a. penghijauan di kawasan perlindungan setempat.
b. pengendalian pemanfaatan kawasan perlindungan setempat.
c. perlindungan dan penguatan dinding pembatas sungai.

3) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota

RTH kota terdiri dari RTH publik dan RTH privat. RTH public eksisting seluas kurang lebih 260 ha atau kurang lebih 4,6% dari luas wilayah, meliputi (a) hutan kota seluas kurang lebih 29 ha di Kelurahan: Salatiga, Sidorejo Lor, Tegalrejo, Mangunsari, Kumpulrejo dan Dukuh; (b) taman RT, taman RW dan taman kota seluas kurang lebih 26 ha; (c) pemakaman seluas kurang lebih 52 ha; (d) kawasan lindung bawahannya seluas kurang lebih 50 ha; (e) jalur hijau seluas kurang lebih 24 ha; (f) Taman wisata seluas kurang lebih 79 ha. Sedangkan RTH privat eksisting seluas 365 ha atau kurang lebih 6,4% dari luas wilayah, meliputi RTH pekarangan rumah seluas kurang lebih 340 ha tersebar di wilayah Kota Salatiga dan halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha seluas kurang lebih 25 ha.

Rencana pengembangan luasan RTH meliputi RTH minimal sebesar 30% dari luas wilayah atau kurang lebih seluas 1.721 ha, RTH publik minimal sebesar 20% dari luas wilayah atau kurang lebih seluas 1.136 ha dan RTH privat minimal sebesar 10% dari luas wilayah atau kurang lebih seluas 585 ha.

Rencana pemenuhan RTH publik, yaitu (a) Pembangunan hutan kota seluas kurang lebih 402 ha tersebar di wilayah Kota Salatiga; (b) pembangunan taman RT, taman RW dan taman kota seluas kurang lebih 112 ha tersebar di wilayah Kota Salatiga; (c) pembangunan pemakaman terpadu seluas kurang lebih 21 ha di masing-masing kecamatan; (d) pengadaan tanah kawasan lindung bawahannya seluas kurang lebih 46 ha di Kelurahan: Sidorejo Kidul, Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul dan di ruas Jalan Lingkar Salatiga di Kelurahan: Kumpulrejo dan Dukuh; (e) pengadaan tanah di sempadan sungai seluas kurang lebih 220 ha di Kelurahan: Tingkir Tengah, Tingkir Lor, Sidorejo Kidul, Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul, Kauman Kidul, Cebongan, Ledok, Kumpulrejo, Randuacir, Tegalrejo, Gendongan, Mangunsari, Dukuh dan Kecandran; (f) pengadaan tanah di sempadan SUTET seluas kurang lebih 55 ha terdapat di Kelurahan: Tingkir Tengah, Tingkir Lor, Sidorejo Kidul dan Kauman Kidul; (g) pembangunan jalur hijau seluas kurang lebih 4 ha di ruas Jalan Lingkar Salatiga; (h) pembangunan taman wisata seluas kurang lebih 16 ha di Kelurahan Bugel.

4) Kawasan Cagar Budaya

Pengembangan kawasan cagar budaya meliputi Prasasti Plumpungan di Kelurahan Kauman Kidul seluas kurang lebih 0,3 ha dan bangunan bersejarah di Kelurahan: Salatiga, Kalicacing, Kutowinangun dan Sidorejo Lor. Rencana pengembangannya yaitu pengaturan perubahan ukuran dan bentuk bangunan, pengembangan kegiatan kepariwisataan dan pengaturan lingkungan sekitar kawasan cagar budaya.

5) Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi merupakan kawasan imbuhan air yang berupa cekungan air tanah Salatiga dan cekungan air tanah Rawapening, terletak di

Kecamatan: Argomulyo, Tingkir, Sidorejo dan Sidomukti. Rencana pengembangan kawasan imbuhan air, yaitu (a) pembangunan sumur resapan terdapat di Kelurahan: Randuacir, Kumpulrejo, Bugel, Blotongan, Sidorejo Kidul, Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul; (b) pembangunan biopori terdapat di Kelurahan: Randuacir, Kumpulrejo, Bugel, Blotongan, Sidorejo Kidul, Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul; (c) pembangunan dam penahan tersebar di wilayah sungai Kota Salatiga; (d) pembangunan embung konservasi di Kelurahan: Kumpulrejo dan Noborejo.

6) Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan Lindung Lainnya merupakan kawasan perlindungan plasma nutfah, yaitu terdiri dari gandaria *(Buvca macrophilla)* di Kelurahan Mangunsari, Kesambi (*scleichera oleosa)* di Kelurahan Kalicacing, Rejasa *(elaecanpur grandiflora)* di Kelurahan Kalicacing dan pule *(alstonia scholaris)* di kelurahan Mangunsari. Rencana pengembangan kawasan perlindungan plasma yaitu meliputi pembangunan hutan kota di Kelurahan: Mangunsari dan Kumpulrejo.

C. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan longsor di Kota Salatiga meliputi sebagaian Kelurahan: Blotongan, Sidorejo Kidul, Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul, Bugel, Randuacir dan Kumpulrejo. Pengelolahan kawasan rawan longsor, yaitu:

1) Menetapkan tingkat bahaya gerakan tanah dan longsor pada masing-masing kawasan;
2) Membatasi pengembangan prasarana dan sarana umum di kawasan rawan longsor;
3) Merelokasi penduduk yang ada di sebagian kawasan rawan gerakan tanah dan longsor;
4) Menetapkan kawasan rawan gerakan tanah dan longsor sebagai RTH pengaman lingkungan;

Kegiatan budi daya diarahkan untuk dapat mendukung dan mengembangkan fungsi kawasan sebagai kawasan evakuasi bencana.

6.5. Strategi Pembangunan Daerah Kota Salatiga 2023 - 2026

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Rancangan Pembangunan Daerah 2023 – 2026 maka dirumuskan strategi RPD Kota Salatiga Tahun 2023 - 2026 mendatang menurut tujuan sebagai berikut.

TUJUAN 1 Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyrakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas.

a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan PAUD melalui peningkatan kondusifitas sekolah, sosialisasi & workshop, pengembangan kurikulum dan pendidikan keluarga.

b. Meningkatkan akses pendidikan dasar melalui peningkatan peran orang tua dalam pendidikan anak, dan optimalisasi peran pemerintah serta swasta.
c. Meningkatkan peran orang tua dan guru mewujudkan profil pelajar pancasila yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berpikiran kritis, mandiri, gotongroyong dan kebhinekaan global.
d. Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus
e. Penyelarasan program dan kegiatan non formal yang bermutu melalui pengembangan kurikulum non formal sesuai standar, peningkatan koordinasidan kerjasama DUDI, fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan perluasan jangkauan peserta didik untuk memenuhi ketrampilan peserta didik.
f. Penyusunan regulasi tentang kurikulum yang menggunakan kearifan lokal dengan mempertimbangkan sejarah dan budaya.
g. Meningkatkan minat pelajar untuk mempelajari dan mengembangkan bahasa dan budaya jawa.
h. Optimalisasi penyelenggaraan pendidikan dasar melalui peningkatan partisipasi anak usia sekolah yang harus sekolah, memperluas penerimaan beasiswa bagi siswa miskin, peningkatan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, implementasi kurikulum prototye yang bermutu, peningkatan minat baca dan belajar siswa, peningkatan numerasi siswa.
i. Mewujudkan penyelenggaraan PAUD yang berkualitas melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana.
j. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar melalui pembangunan, pengadaan, pemetaan dan rehabilitasi, pemeliharaan laboraturium IPA, laboraturium Komputer, Perpustakaan, Ruang kelas, ruang guru, rumah dinas dan Alat Peraga.
k. Meningkatkan penyelenggaraan PAUD yang bermutu melalui akreditasi satuan pendidikan PAUD.
l. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan non formal yang bermutu melalui sertifikasi lembaga kursus, kualitas SDM penyelenggara dan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
m. Peningkatan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan melalui fasilitasi ijin belajar bagi guru, penyelenggaraan bimbingan teknis, seleksi dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan, fasilitasi bantuan beasiswa bagi guru untuk melanjutkan pendidikan yang sesuai standar.
n. Peningkatan guru bersertifikat melalui fasilitasi pemenuhan angka kedit bagi pendidik, penyediaan sarana prasarna penunjang pencapaian sertifikasi, dan bimbingan teknis untuk memenuhi angka kredit, dan penyediaan ruang bagi pendidik untuk menulis, pemberian bantuan kepada guru untuk memenuhi kualifikasi S1.
o. Peningkatan kualifikasi guru melalui fasilitasi ijin belajar bagi guru,

penyelenggaraan bimtek, seleksi dan penempatan pendidik, fasilitasi bantuan beasiswa bagi guru untuk memenuhi kualifikasi sesuai standar.

p. Pelaksanaan Sosialisasi, pelatihan dan pengimbasan guru penggerak.
q. Meningkatkan Pemanfaatan Kearsipan dan Perpustakaan oleh Masyarakat.
r. Meningkatkan Kompetensi SDM kearsipan dan perpustakaan.
s. Meningkatkan bahan kearsipan dan perpustakaan yang Up to date.
t. Meningkatkan jejaring kemitraan perpustakaan baik negeri maupun swasta.
u. Meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait dengan literasi dan kebiasaan membaca.

***TUJUAN 2* Meningkatkan apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah**

a. Meningkatkan aktivitas gelar seni, karya budaya dan kelestarian warisan budaya melalui penguatan sumber daya manusia dan penyadaran masyarakat akan pelestarian warisan seni budaya khas Kota Salatiga
b. Meningkatkan pembinaan dan pelestarian sejarah dan cagar budaya melalui kajian
c. Meningkatkan persentase benda cagar budaya yang dilestarikan

TUJUAN 3 Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga

a. Meningkatkan pola pembinaan olah-raga yang berjenjang mulai dari tingkat sekolah dasar, menengah pertama dan menengah atas
b. Mengintensifkan event-event olahraga untuk mendapatkan potensi potensi baru dalam bidang olahraga
c. Meningkatkan keikutsertakan atlit-atlit local pada berbagai event olahraga, baik dileval local antar daerah, maupun nasional
d. Mengembangan dan memperbaiki sarana dan prasarana olah raga, di lingkungan masyarakat, baik di level kelurahan, kecamatan, maupun tingkat kota
e. Mengoptimalkan potensi pemuda dalam dalam berbagai kegiatan pendidikan ketrampilan dan pelatihan, khususnya dalam bidang kewirausahaan
f. Meningkatan keterlibatan pemuda (melalui organsisasi kepemudaan) dalam berbagai kegiatan/event yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah di level

TUJUAN 4 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk

a. Menurunkan kematian ibu dan anak melalui peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan, peningkatan perilaku dan kepedulian masyarakat terkait keselamatan ibu melahirkan
b. Menurunkan gizi buruk melalui gerakan masyarakat hidup sehat, peningkatan sarana pelayanan gizi masyarakat, pemberian dan perawatan

pada kasus gizi buruk, peningkatan cakupan bayi dengan ASI Eksklusif

c. Penurunan penyakit menular melalui peningkatan kualitas lingkungan sehat, peningkatan penjangkauan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular, serta peningatan kualitas pelayanan kesehatan dalam penanganan penyakit
d. Peningkatan sumber daya kesehatan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan
e. Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi untuk mengatur kehamilan, Meningkatkan kesadaran yang baik pada remaja tentang kesehatan reproduksi, Peningkatan layanan keluarga berencana

TUJUAN 5 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk

a. Menyelenggarakan pelatihan perkoperasian bagi anggota koperasi
b. Melakukan pengawasan dan penilaian kepatuhan koperasi
c. Melakukan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi
d. Mengadakan pelatihan manajerial dan digitalisasi bagi pengelola koperasi
e. Meningkatkan kuantitas dan daya saing UMKM dan koperasi melalui penguatan kapasitas dan keterampilan SDM, serta pengembangan kemitraan usaha dengan usaha besar
f. Menyelenggarakan dan mengikuti pameran
g. Meningkatkan Akses permodalan bagi UMKM
h. Menyelenggarakan pelatihan IKM
i. Mengadakan pendampingan, sosialisasi, pendataan, pelatihan kewirausahaan dan digitalisasi IKM
j. Melaksanakan survey dan pengawasan industri
k. Meningkatnya produk unggulan yang di promosikan
l. Meningkatkan serapan tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja
m. Penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar
n. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan untuk mengoptimalisasi potensi pajak daerah
o. Meningkatkan pemanfaatan aset daerah (barang milik daerah)
p. Meningkatkan jumlah pelayanan tera dan tera ulang
q. Meningkatkan jumlah pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi
r. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan
s. Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan Pedagang Pasar tradisional
t. Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan PKL
u. Meningkatkan legalitas perizinan pelaku usaha perdagangan

v. Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara melalui diversifikasi produk wisata yang mencakup destinasi dan atraksi wisata
w. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mendukung dan memfasilitasi pengembangan ekraf pariwisata melalui pembinaan, pameran dan promosi
x. Meningkatkan kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB
y. Meningkatkan produktivitas tanaman pangan utama melalui fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani - Padi Jagung
z. Meningkatkan produksi perikanan melalui fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan teknis Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang baik (CPIB)
aa. Meningkatkan produksi hasil peternakan melalui fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani ternak khususnya untuk produksi Daging Sapi Potong
bb. Menurunkan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular

TUJUAN 6 Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga

a. Meningkatkan kualitas pembinaan pelaku usaha.
b. Meningkatkan pengawasan dan pemantauan kegiatan penanaman modal.
c. Memperkuat data peluang investasi yang prospektif untuk dikembangkan.
d. Promosi peluang investasi yang terencana dengan memperkuat basis data di website serta menggalakan temu usaha dengan calon investor potensial di dalam dan luar negeri.
e. Memberikan fasilitasi dan insentif kemudahan berusaha bagi para pelaku penanaman modal di diwilayah Kota Salatiga.
f. Merancang dan menerbitkan peraturan daerah yang mampu memberikan kemudahan berinvestasi serta pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah di Kota Salatiga.
g. Peningkatan promosi investasi (diversifikasi media, intensitas promosi, kerjasama lembaga investor)
h. Melaksanakan Bursa Kerja
i. Pembentukan klaster industri baru
j. Melaksanakan kegiatan perlindungan CPMI/PMI (Calon Pekerja Migran Indonesia
k. Mengadakan kegiatan pengawasan dan pembinaan kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
l. Melaksanakan pelatihan manajerial dan teknis, pendampingan dan sosialisasi serta fasilitasi sertifikasi

m. Melakukan sosialisasi dan pendampingan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)

TUJUAN 7 Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial

a. Meningkatknya kualitas pemberdayaan Sosial bagi Keluarga Miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
b. Meningkatnya kualitas Rehabilitasi Sosial bagi PPKS
c. Meningkatnya kualitas penanganan saat tanggap darurat bencana
d. Meningkatnya kualitas pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
e. Meningkatkan pola pangan harapan dengan mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman
f. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada calon transmigran

TUJUAN 8 Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender

a. Meningkatkan Pencapaian Kualitas Hidup Perempuan Melalui : (1) Percepatan PPRG bagi OPD; (2) Fasilitasi pengembangan kelembagaan PUG; (3) Meningkatkan Keterampilan dan pengembangan usaha perempuan; meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik; dan pengembangan jaringan kelembagaan PUG
b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan Anak melalui : (1) KIE penyelenggaraan SIGA; (2) Pembuatan sistem Informasi tentang Data Gender dan Anak; (3) Penyusunan Perwali tentang data gender dan anak;(4) Advokasi tentang pentingnya data gender dan anak bagi OPD dan stakeholder terkait

TUJUAN 9 Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah

a. Penyediaan informasi publik dengan penerapan teknologi informasi berbasis website dan aplikasi
b. Meningkatkan fungsi Sekretariat Daerah sebagai koordinator dan fasilitator perangkat daerah dalam bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, perekonomian, dan pembangunan
c. Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi daerah yang berbasis data serta memastikan keamanan informasi daerah
d. Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan OPD, para pemangku kepentingan dan penyediaan dan penyajian data pendukung perencanaan pembangunan.
e. Mendorong peningkatan kualitas dan pemantapan implementasi kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah serta penyediaan penyediaan dan penyajian data pendukung pemanfaatan kelitbangan.

f. Tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan
g. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi
h. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur dan mengoptimalkan tata kelola kepegawaian
i. Peningkatan peran kecamatan dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan
j. Perbaikan Tata Kelola Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
k. Pendampingan dan asistensi pencegahan korupsi
l. Penerapan Manajemen Risiko
m. Penguatan Kapabilitas APIP
n. Penyediaan informasi publik dengan penerapan teknologi informasi berbasis website dan aplikasi
o. Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi daerah yang berbasis data serta memastikan keamanan informasi daerah
p. Penyediaan sarana prasarana pendukung kinerja Sekretariat DPRD melalui pengadaan dan pemeliharaan
q. Peningkatan kapasitas SDM DPRD melalui workshop
r. Peningkatan kompetensi dan kualitas SDM Sekretariat DPRD melalui diklat, bimtek, workshop
s. Peningkatan kualitas produk hukum melalui penyediaan tenaga ahli yang sesuai kualifikasi
t. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perpustakaan serta SDM pelayanan perpustakaan
u. Peningkatan sarpras dan kualitas layanan pengelolaan kearsipan kepada seluruh perangkat daerah.

TUJUAN 10 Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan

a. Peningkatan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga K3; peningkatan intensitas kinerja aparat penegak perda; peningkatan peran serta fungsi PPNS
b. Peningkatan kualitas penanganan bidang Damkar diprioritaskan pada percepatan respons time penanganan dan pelayanan masyarakat pada bidang Damkar
c. Peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi, khususnya lembaga pendidikan, untuk melakukan kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan terkait dengan bahaya penyalahgunaan narkoba
d. Mengintensifkan penggunaan sosial-media untuk mengkampanyekan gerakan anti narkoba
e. Meningkatkan fungsi Tim FKDM, Tim Kewaspadaan Dini, Monev dan pengawasan Orang/lembaga asing

f. Meningkatkan Penyelenggaraan Fasilitasi Organisasi Masyarakat, Hibah Organisasi
g. Meningkatkan fungsi Tim FKDM, Tim Kewaspadaan Dini, Monev dan pengawasan Orang/lembaga asing
h. Meningkatkan kerjasama dengan partai politik untuk melakukan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan, yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa
i. Menginisiasi dan menfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan kelurahan tangguh bencana sebagai komponen ketahanan daerah
j. Menurunkan indeks resiko bencana daerah dengan berbagai teknologi dan tindakan mitigasi bencana

TUJUAN 11 Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata

a. Membangun, memelihara, dan meningkatkan berbagai sarana dan prasarana infrastruktur umum (fasilitas dan utilitas).
b. Meningkatkan layanan izin bangunan serta pengawasan kualitas bangunan dan lingkungannya dan memfasilitasi tenaga/usaha jasa konstruksi menjadi tenaga trampil, bersertifikat, dan paham aturan jasa konstruksi

TUJUAN 12 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan

a. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup melalui regulasi
b. Peningkatkan sarana prasarana penanganan, pengangkutan sampah
c. Meningkatkan kualitas pengelolaan transportasi melalui peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, penataan trayek, peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum, pengembangan sistem manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengembangan angkutan massal

TUJUAN 13 Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup

a. Pembangunan dan pemeliharaan PSU perumahan
b. Penataan lingkungan permukiman kumuh dengan penyediaan infrastruktur yang sesuai
c. Peningkatan Kualitas Rumah tidak layak huni
d. Penyelesaian sengketa tanah
e. Penyelenggaraan pendataan

Selengkapnya hubungan strategi dengan tujuan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 6. 7 Tujuan, Sasaran dan Strategi RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyrakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas	Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas	a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan PAUD melalui peningkatan kondusifitas sekolah, sosialisasi & workshop, pengembangan kurikulum dan pendidikan keluarga.
			b. Meningkatkan akses pendidikan dasar melalui peningkatan peran orang tua dalam pendidikan anak, dan optimalisasi peran pemerintah
			c. Meningkatkan peran orang tua dan guru mewujudkan profil pelajar pancasila yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berpikiran kritis, mandiri, gotongroyong dan kebhinekaan global
			d. Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus
			e. Penyelarasan program dan kegiatan non formal yang bermutu melalui pengembangan kurikulum non formal sesuai standar, peningkatan koordinasidan kerjasama DUDI, fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan perluasan jangkauan peserta didik untuk memenuhi ketrampilan peserta didik.
			f. Penyusunan peraturan walikota tentang kurikulum yang menggunakan kearifan lokal dengan mempertimbangkan sejarah dan budaya.
			g. Meningkatkan minat pelajar untuk mempelajari dan mengembangkan bahasa dan budaya jawa
			h. Optimalisasi penyelenggaraan pendidikan dasar melalui peningkatan partisipasi anak usia sekolah yang harus sekolah, memperluas penerimaan beasiswa bagi siswa miskin, peningkatan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, implementasi kurikulum prototye yang bermutu, peningkatan minat baca dan belajar siswa, peningkatan numerasi siswa.
			i. Mewujudkan penyelenggaraan PAUD yang berkualitas melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana.
			j. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar melalui pembangunan, pengadaan, pemetaan dan rehabilitasi, pemeliharaan laboraturium IPA, laboraturium Komputer, Perpustakaan, Ruang kelas, ruang guru, rumah dinas dan Alat Peraga
			k. Meningkatkan penyelenggaraan PAUD yang bermutu melalui akreditasi satuan pendidikan PAUD

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			l. Peningkatan penyeleng-garaan pendidikan non formal yang bermutu melalui sertifikasi lembaga kursus, kualitas SDM penyelenggara dan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung
			m. Peningkatan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan melalui fasilitasi ijin belajar bagi guru, penyelenggaraan bimbingan teknis, seleksi dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan, fasilitasi bantuan beasiswa bagi guru untuk melanjutkan pendidikan yang sesuai standar.
			n. Peningkatan guru bersertifikat melalui fasilitasi pemenuhan angka kedit bagi pendidik, penyediaan sarana prasarna penunjang pencapaian sertifikasi, dan bimbingan teknis untuk memenuhi angka kredit, dan penyediaan ruang bagi pendidik untuk menulis, pemberian bantuan kepada guru untuk memenuhi kualifikasi S1
			o. Pelaksanaan Sosialisasi, pelatihan dan pengimbasan guru penggerak
		Mewujudkan Masyarakat yang Cerdas dan Kreatif	a. Meningkatkan Pemanfaatan Kearsipan dan Perpustakaan oleh Masyarakat
			b. Meningkatkan Kompetensi SDM kearsipan dan perpustakaan
			c. Meningkatkan bahan kearsipan dan perpustakaan yang Up to date
			d. Meningkatkan jejaring kemitraan perpustakaan baik negeri maupun swasta
			e. Meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait dengan literasi dan kebiasaan membaca
			f. peningkatan kualifikasi guru melalui fasilitasi ijin belajar bagi guru, penyelenggaraan bimtek, seleksi dan penempatan pendidik, fasilitasi bantuan beasiswa bagi guru untuk memenuhi kualifikasi sesuai standar
2	Meningkatkan apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah	Meningkatnya apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah	a. Meningkatkan aktivitas gelar seni, karya budaya dan kelestarian warisan budaya melalui penguatan sumber daya manusia dan penyadaran masyarakat akan pelestarian warisan seni budaya khas Kota Salatiga
			b. Meningkatkan pembinaan dan pelestarian sejarah dan cagar budaya melalui kajian
			c. Meningkatkan persentase benda cagar budaya yang dilestarikan
3	Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Meningkatnya prestasi dalam olahraga	a. Meningkatkan pola pembinaan olah-raga yang berjemennjang mulai dari tingkat sekolah dasar, menengah pertama dan menengah atas
			b. Mengintensifkan event-event olahraga untuk mendapatkan potensi potensi baru dalam bidang olahraga
			c. Meningkatkan keikutsertakan atlit-atlit local pada berbagai event olahraga, baik dileval local antar daerah, maupun nasional

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			d. Mengembangan dan memperbaiki sarana dan prasarana olah raga, di lingkungan masyarakat, baik di level kelurahan,kecamatan, maupun tingkat kota
		Meningkatnya partisipasi pemuda	a. Mengoptimalkan potensi pemuda dalam dalam berbagai kegiatan pendidikan ketrampilan dan pelatihan, khususnya dalam bidang kewirausahaan
			b. Meningkatan keterlibatan pemuda (melalui organsisasi kepemudaan) dalam berbagai kegiatan/event yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah di level daerah maupun nasional.
4	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk	Menurunnya angka kesakitan dan kematian	a. Menurunkan kematian ibu dan anak melalui peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan, peningkatan perilaku dan kepedulian masyarakat terkait keselamatan ibu melahirkan
			b. Menurunkan gizi buruk melalui gerakan masyarakat hidup sehat, peningkatan sarana pelayanan gizi masyarakat, pemberian dan perawatan pada kasus gizi buruk, peningkatan cakupan bayi dengan ASI Eksklusif
			c. Penurunan penyakit menular melalui peningkatan kualitas lingkungan sehat, peningkatan penjangkauan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular, serta peningatan kualitas pelayanan kesehatan dalam penanganan penyakit
		Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Peningkatan sumber daya kesehatan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan
		Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi untuk mengatur kehamilan, Meningkatkan kesadaran yang baik pada remaja tentang kesehatan reproduksi, Peningkatan layanan keluarga berencana
5	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Meningkatnya jumlah koperasi aktif	a. Menyelenggarakan pelatihan perkoperasian bagi anggota koperasi
			b. Melakukan pengawasan dan penilaian kepatuhan koperasi
			c. Melakukan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi
			d. Mengadakan pelatihan manajerial dan digitalisasi bagi pengelola koperasi
		Meningkatnya jumlah UKM	a. Meningkatkan kuantitas dan daya saing UMKM dan koperasi melalui penguatan kapasitas dan keterampilan SDM, serta pengembangan kemitraan usaha dengan usaha besar
			b. Menyelenggarakan dan mengikuti pameran
			c. Meningkatkan Akses permodalan bagi UMKM
			a. Menyelenggarakan pelatihan IKM

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas	b. Mengadakan pendampingan, sosialisasi, pendataan, pelatihan kewirausahaan dan digitalisasi IKM
			c. Melaksanakan survey dan pengawasan industri
			d. Meningkatnya produk unggulan yang di promosikan
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	a. Meningkatkan serapan tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja.
			b. Penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar
		Meningkatnya pendapatan daerah	a. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan untuk mengoptimalisasi potensi pajak daerah b. Meningkatkan pemanfaatan aset daerah (barang milik daerah)
		Meningkatnya Kinerja Perdagangan	a. Meningkatkan jumlah pelayanan tera dan tera ulang
			b. Meningkatkan jumlah pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi
			c. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan
			d. Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan Pedagang Pasar tradisional
			e. Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan PKL
			f. Meningkatkan legalitas perizinan pelaku usaha perdagangan
		Meningkatnya kunjungan wisatawan pada berbagai destinasi unggulan	a. Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara melalui diversifikasi produk wisata yang mencakup destinasi dan atraksi wisata
			b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mendukung dan memfasilitasi pengembangan ekraf pariwisata melalui pembinaan, pameran dan promosi
		Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat	a. Meningkatkan kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB
			b. Meningkatkan produktivitas tanaman pangan utama melalui fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani - Padi Jagung
			c. Meningkatkan produksi perikanan melalui fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan teknis Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang baik (CPIB)
			d. Meningkatkan produksi hasil peternakan melalui fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani ternak khususnya untuk produksi Daging Sapi Potong
			e. Menurunkan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular
6	Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada	Meningkatnya Capaian Realisasi PMA dan PMD	a. Meningkatkan kualitas pembinaan pelaku usaha.
			b. Meningkatkan pengawasan dan pemantauan kegiatan penanaman modal.
			c. Memperkuat data peluang investasi yang prospektif untuk dikembangkan.

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga		d. Promosi peluang investasi yang terencana dengan memperkuat basis data di website serta menggalakan temu usaha dengan calon investor potensial di dalam dan luar negeri.
			e. Memberikan fasilitasi dan insentif kemudahan berusaha bagi para pelaku penanaman modal di diwilayah Kota Salatiga.
			f. Merancang dan menerbitkan peraturan daerah yang mampu memberikan kemudahan berinvestasi serta pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah di Kota Salatiga.
			g. Peningkatan promosi investasi (diversifikasi media, intensitas promosi, kerjasama lembaga investor)
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja	a. Melaksanakan Bursa Kerja
			b. Pembentukan klaster industri baru
			c. Melaksanakan kegiatan perlindungan CPMI/PMI (Calon Pekerja Migran Indonesia
		Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar tenaga kerja	a. Mengadakan kegiatan pengawasan dan pembinaan kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
			b. Melaksanakan pelatihan manajerial dan teknis, pendampingan dan sosialisasi serta fasilitasi sertifikasi
			c. Melakukan sosialisasi dan pendampingan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)
7	Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Meningkatnya kualitas penduduk terdata dalam DTKS	a. Meningkatknya kualitas pemberdayaan Sosial bagi Keluarga Miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
			b. Meningkatnya kualitas Rehabilitasi Sosial bagi PPKS
			c. Meningkatnya kualitas penanganan saat tanggap darurat bencana
			d. Meningkatnya kualitas pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
		Meningkatnya ketersediaan dan Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman	Meningkatkan pola pangan harapan dengan mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman
		Meningkatnya Minat untuk Menjadi Transmigran	Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada calon transmigran
8	Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian	Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan	a. Meningkatkan Pencapaian Kualitas Hidup Perempuan Melalui : (1) Percepatan PPRG bagi OPD; (2) Fasilitasi pengembangan kelembagaan PUG; (3) Meningkatkan Keterampilan dan pengembangan usaha perempuan; meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik; dan pengembangan jaringan kelembagaan PUG

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	kesetaraan dan keadilan gender		b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan Anak melalui : (1) KIE penyelenggaraan SIGA; (2) Pembuatan sistem Informasi tentang Data Gender dan Anak; (3) Penyusunan Perwali tentang data gender dan anak;(4) Advokasi tentang pentingnya data gender dan anak bagi OPD dan stakeholder terkait
9	Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	a. Penyediaan informasi publik dengan penerapan teknologi informasi berbasis website dan aplikasi
			b. Meningkatkan fungsi Sekretariat Daerah sebagai koordinator dan fasilitator perangkat daerah dalam bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, perekonomian, dan pembangunan
			c. Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi daerah yang berbasis data serta memastikan keamanan informasi daerah
			d. Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan OPD, para pemangku kepentingan dan penyediaan dan penyajian data pendukung perencanaan pembangunan.
			e. Mendorong peningkatan kualitas dan pemantapan implementasi kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah serta penyediaan penyediaan dan penyajian data pendukung pemanfaatan kelitbangan.
			f. Tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan
			g. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi
			h. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur dan mengoptimalkan tata kelola kepegawaian
			i. Peningkatan peran kecamatan dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan
			j. Perbaikan Tata Kelola Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
			k. Pendampingan dan asistensi pencegahan korupsi
			l. Penerapan Manajemen Risiko
			m. Penguatan Kapabilitas APIP
			n. Penyediaan informasi publik dengan penerapan teknologi informasi berbasis website dan aplikasi
			o. Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi daerah yang berbasis data serta memastikan keamanan informasi daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			p. Penyediaan sarana prasarana pendukung kinerja Sekretariat DPRD melalui pengadaan dan pemeliharaan
			q. Peningkatan kapasitas SDM DPRD melalui workshop
			r. Peningkatan kompetensi dan kualitas SDM Sekretariat DPRD melalui diklat, bimtek, workshop
			s. Peningkatan kualitas produk hukum melalui penyediaan tenaga ahli yang sesuai kualifikasi
			t. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perpustakaan serta SDM pelayanan perpustakaan
			u. Peningkatan sarpras dan kualitas layanan pengelolaan kearsipan kepada seluruh perangkat daerah.
10	Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif	a. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga K3; peningkatan intensitas kinerja aparat penegak perda; peningkatan peran serta fungsi PPNS
			b. Peningkatan kualitas penanganan bidang Damkar diprioritaskan pada percepatan respons time penanganan dan pelayanan masyarakat pada bidang Damkar
			c. Meningkatkan Penyelenggaraan Fasilitasi Organisasi Masyarakat, Hibah Organisasi
			d. Meningkatkan fungsi Tim FKDM, Tim Kewaspadaan Dini, Monev dan pengawasan Orang/lembaga asing
			e. Meningkatkan kerjasama dengan partai politik untuk melakukan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan, yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa
		Menurunnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba.	a. Peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi, khususnya lembaga pendidikan, untuk melakukan kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan terkait dengan bahaya penyalahgunaan narkoba
			b. Mengintensifkan penggunaan sosial-media untuk mengkampanyekan gerakan anti narkoba
		Terjaganya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, damai, dan harmonis yang dilandasi rasa saling menhargai dan menghormati	a. Meningkatkan fungsi Tim FKDM,Tim Kewaspadaan Dini.,Monev dan pengawasan Orang/lembaga asing
			b. Meningkatkan Penyelenggaraan Fasilitasi Organisasi Masyarakat, Hibah Organisasi
			c. Meningkatkan fungsi Tim FKDM, Tim Kewaspadaan Dini, Monev dan pengawasan Orang/lembaga asing

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		perbedaan baik sosial, budaya maupun pandangan politik	d. Meningkatkan kerjasama dengan partai politik untuk melakukan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan, yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa
		Meningkatnya presentase kelurahan tangguh bencana	a. Menginisiasi dan menfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan kelurahan tangguh bencana sebagai komponen ketahanan daerah
			b. Menurunkan indeks resiko bencana daerah dengan berbagai teknologi dan tindakan mitigasi bencana
11	Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	Meningkatnya Persentase wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	Membangun, memelihara, dan meningkatkan berbagai sarana dan prasarana infrastruktur umum (fasilitas dan utilitas).
		Meningkatnya kualitas penataaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatkan layanan izin bangunan serta pengawasan kualitas bangunan dan lingkungannya dan memfasilitasi tenaga/usaha jasa konstruksi menjadi tenaga trampil, bersertifikat, dan paham aturan jasa konstruksi
12	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Salatiga	a. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup melalui regulasi
			b. Peningkatkan sarana prasarana penanganan, pengangkutan sampah
		Meningkatnya keselamatan ke tertiban, kelancaran, dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan	Meningkatkan kualitas pengelolaan transportasi melalui peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, penataan trayek, peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum, pengembangan sistem manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengembangan angkutan massal
13	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup	Meningkatnya kualitas PSU lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Pembangunan dan pemeliharaan PSU perumahan
		Meningkatnya kualitas lingungan sehat (penuntasan kawasan kumuh)	a. Penataan lingkungan permukiman kumuh dengan penyediaan infrastruktur yang sesuai
			b. Peningkatan Kualitas Rumah tidak layak huni
		Meningkatnya pengelolaan pertanahan	a. Penyelesaian sengketa tanah
			b. Penyelenggaraan pendataan

6.6. Arah Kebijakan Jangka Menengah Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kota Salatiga yang dilaksanakan melalui 13 (tiga belas) tujuan dan 35 (tiga puluh lima) sasaran agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan arah kebijakan berdasarkan tahapan pembangunan tahunan. Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga. Pentahapan pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk memberikan tema, nuansa dan arah pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, yang kemudian akan diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap tahunnya.

1. **Tahun 2023 MEWUJUDKAN PEMULIHAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PELAYANAN INFRASTRUKTUR, PENANGANAN STUNTING DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

   Merupakan tema pembangunan tahun pertama yang ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan (good governance) yang baik yaitu melaksanakan prinsip pelibatan Partisipasi Masyarakat (Participation), Tegaknya Supremasi Hukum (Rule of Law), Transparansi (Transparency), Peduli pada Stakeholder/Dunia Usaha, Berorientasi pada Konsensus (Consensus), Kesetaraan (Equity), Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency), Akuntabilitas (Accountability), Visi Strategis (Strategic Vision).Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan syarat mutlak adanya dukungan yang berkelanjutan dari masyarakat agar program-program yang dikeluarkan didukung dengan sepenuh hati oleh masyarakat. Dukungan publik merupakan kunci sukses terhadap pencapaian beragam tujuan strategis pemerintah, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Beberapa tujuan dari Pemerintah Kota Salatiga yang terkait dengan tema ini adalah tujuan ke-9 yang menyatakan “Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah”.

2. **TAHUN 2024 MEWUJUDKAN INSAN YANG SEHAT DAN CERDAS MENUJU SALATIGA YANG BERSIH, SEHAT DAN BERILMU DAN BERBUDI LUHUR.**

   Tema Pembangunan yang kedua ini merupakan tema dengan pencapaian tujuan yang menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Tema ini akan menyasar pada isu-isu kesehatan yang saat ini masih menjadi fokus pemerintah kota Salatiga. Kesehatan masyarakat terutama ibu dan anak tetap menjadi prioritas untuk mewujudkan masyarakat Salatiga yang sehat.

   Selain itu memperbaiki mutu pendidikan dalam segala dimensinya, baik moral, intelegensi maupun perilaku harus secara dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur, sehingga masyarakat Salatiga dikenal sebagai masyarakat yang berbudi pekerti luhur berwawasan dan berkontribusi positif bagi lingkungannya.

3. TAHUN 2025 MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERKUALITAS DAN PRODUKTIF MENUJU SALATIGA YANG NYAMAN DAN MANDIRI

Tema ini berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah kota dalam penyediaan infrastruktur yang berkualitas, baik yang bermanfaat bagi [perwujudan Salatiga yang bersih maupun Salatiga yang mempunyai kelengkapan infrastruktur yang memadai bagi jalannya roda perekonomian. Penyediaan berbagai fasilitas yang memberikan kenyamanan bagi publik, misal semakin banyaknya ruang terbuka, sarana dan prasarana perekonomian, seperti jalan, pasar, sangat berperan dalam menciptakan Salatiga yang nyaman dan mendorong masyarakat untuk lebih produktif.

4. TAHUN 2026 MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEMAKIN SEJAHTERA MENUJU SALATIGA MAKMUR DAN BERBAGI

Tema Pembangunan ini ditujukan untuk memperbaiki sektor ekonomi riil. Pemerintah perlu untuk memberikan dukungan yang lebih konkrit pada sektor ekonomi riil, baik UKM, Koperasi maupun IKM. Pembangunan juga difokuskan pada produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat melalui fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak. Peningkatan produksi perikanan melalui fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan teknis Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB).

Peningkatan kualitas pendidikan dengan prioritas pada peningkatan sarana pendidikan, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Peningkatan daya saing perekonomian daerah dengan fokus pada peningkatan kinerja di sektor perdagangan, industri dan usaha kecil menengah.

Tabel 6. 8 Arah Kebijakan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Kebijakan	**MEWUJUDKAN PEMULIHAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PELAYANAN INFRASTRUKTUR, PENANGANAN STUNTING DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**	**MEWUJUDKAN INSAN YANG SEHAT DAN CERDAS MENUJU SALATIGA YANG BERSIH, SEHAT DAN BERILMU DAN BERBUDI LUHUR**	**MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERKUALITAS DAN PRODUKTIF MENUJU SALATIGA YANG NYAMAN DAN MANDIRI**	**MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEMAKIN SEJAHTERA MENUJU SALATIGA MAKMUR DAN BERBAGI**
Prioritas Pembangunan	a. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan melalui UMKM, Industri Kecil dan Menengah untuk menciptakan daya saing. b. Pemantapan Infrastruktur yang mengarah pada penataan wajah kota dan tata ruang yang berwawasan lingkungan c. Pemantapan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting d. Pemantapan kualitas pendidikan dan kesehatan guna mewujudkan SDM	a. Peningkatan kualitas sekolah terutama pada penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran pada PAUD, dikdas dan pendidikan non formal. b. Peningkatan peran dan kompetensi guru terutama kompetensi pedagogik guru PAUD, SD dan SMP. c. Peningkatan peran orang tua dalam pendidikan karakter. d. Pengembangan kurikulum muatan lokal sebagai penciri Kota Salatiga, kurikulum prototype dalam kerangka Merdeka Belajar.	a. Peningkatan kemantapan jalan dengan fokus pada jalan dan jembatan dengan kondisi rusak berat. b. Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan. c. Peningkatan kinerja pelayanan sarana drainase dan pengairan fokus rehabilitasi jaringan drainase dan pengairan yang rusak. d. Peningkatan pengawasan dan pengendalian	a. Peningkatan daya saing perekonomian daerah dengan fokus pada peningkatan kinerja di sektor perdagangan, industri dan usaha kecil menengah. b. Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama kemampuan dalam mengakses permodalan, penguasaan teknologi digital dan meningkatkan produktivitas, kualitas dan pemasaran produk. c. Peningkatan fasilitasi kemudahan penyediaan bahan baku, penggunaan teknologi

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	yang berdaya saing. e. Pemantapan kualitas pelayanan public melalui transformasi teknologi f. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan	e. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pelestarian budaya dan kesenian termasuk kekayaan gastronomi. f. Peningkatan aktivitas kesenian dan budaya dengan fokus pada kesenian tradisional dan budaya lokal. g. Peningkatan kualitas layanan di tingkat pertama untuk meningkatkan kelangsungan hidup di 1000 hari pertama pasca kelahiran baik pada ibu dan bayi, h. Penurunan gizi buruk difokuskan pada penanganan stunting, wasting, underweight, obesitas pada balita dan anak. i. Penurunan angka kesakitan di fokuskan pada penanganan penyakit menular (Covid 19, TB, HIV AIDS), pengendalian lingkungan dan perilaku hidup sehat. j. Mengendalikan pertumbuhan	pencemaran/ perusakan lingkungan hidup dengan fokus pada pada sentra-sentra industri dan kawasan permukiman. e. Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi. f. Penataan kawasan kumuh perkotaan yang difokuskan pada peningkatan pengetahuan lingkungan sehat bagi masyarakat, perbaikan infrastruktur sanitasi, air bersih, drainase, persampahan yang didukung berbagai program sinergitas dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. g. Penyediaan sarana sanitasi dan air bersih difokuskan bagi masyarakat	produksi dan meningkatkan kualitas produk diprioritaskan pada produk-produk unggulan Kota Salatiga. d. Peningkatan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran produk-produk unggulan Kota Salatiga dan penyediaan sarana perdagangan yang terstandarisasi. e. Peningkatan diversifikasi produk wisata dengan fokus pada pengembangan destinasi pariwisata, penguatan Pokdarwis dan penyelenggaraan atraksi wisata berbasis seni budaya daerah. f. Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan dan peternakan.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		penduduk dengan fokus peningkatan peserta KB baru(unmed need) peningkatan partisipasi KB pria dan pemeliharaan kesehatan reproduksi pada remaja. k. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak, dalam rangka mewujudkan Kota Salatiga sebagai Kota Layak Anak. l. Peningkatan kolaborasi stakeholder dalam pencapaian kesejahteraan sosial dengan memperhatikan kemampuan PMKS untuk makin mandiri, serta sinergitas lembaga pengelola PMKS. m. Akserelasi pemenuhan hak-hak anak dengan prioritas pada anak-anak korban kekerasan termasuk TPPO, difabel dan anak-anak rentan. n. Penguatan pengarusutamaan	berpenghasilan rendah. g. Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi. h. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan.	g. Peningkatan fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan kelompok pembudidaya dan pembenih ikan dengan fokus pada sentra-sentra usaha perikanan. h. Peningkatan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan fokus pada pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan alternatif dan diversifikasi produk pangan. i. Peningkatan fasilitasi penyediaan stimulan dana pembangunan guna mendorong partisipasi masyarakat dengan fokus pada pembangunan tingkat kelurahan. j. Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan,

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		gender dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan. o. Peningkatan pemenuhan pangan bagi masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam rangka meningkatkan konsumsi energi dan protein masyarakat. p. Peningkatan infrastrukur dasar dan penunjang. q. Peningkatan wawasan kebangsaaan yang mengedepankan persatuan dan kesatuan warga Salatiga.		meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi. k. Penyediaan tenaga kerja yang terampil dan melakukan pengembangan sistem informasi investasi dan tenaga kerja berbasis teknologi informasi. l. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar. m. Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan. n. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang.

Program program yang berfokus pada pencapaian dalam mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertera dalam Tabel 6.8 di atas tersaji dalam Tabel 6.9 hingga Tabel 6.12 berikut ini:

Tabel 6. 9 Program Prioritas Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2023

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA	PROGRAM	OPD
TAHUN 2023			
MEWUJUDKAN PEMULIHAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PELAYANAN INFRASTRUKTUR, PENANGANAN STUNTING DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN			
1	Memperkuat Ekonomi Kerakyatan melalui UMKM, Industri Kecil dan Menengah untuk menciptakan daya saing.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	DINKOP UKM
		Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	DINKOP UKM
		Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi Program pendidikan dan latihan perkoperasian	DINKOP UKM
		Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	DINKOP UKM
		Program pengembangan UMKM	DINKOP UKM
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	DISBUDPAR
		Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	DISBUDPAR
		Program pemasaran pariwisata	DISBUDPAR
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	DISPERINAKER
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	DISPERINAKER
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	DISPERINAKER
2	Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pelayanan Infrastruktur, Penanggulangan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DINSOS
		Program Peningkatan kualitas keluarga	DINSOS
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	DINSOS
		Program Rehabilitasi Sosial	DINSOS
		Program Pemberdayaan Sosial	DINSOS
		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	DISPANGTAN
3	Pemantapan Infrastruktur yang mengarah pada penataan wajah kota dan tata ruang yang berwawasan lingkungan	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	DPU PR
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPU PR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPU PR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPU PR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	DPU PR
		Program Penataan Bangunan Gedung	DPU PR

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA	PROGRAM	OPD
		Program Penyelenggaraan Jalan	DPU PR
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	DPU PR
		Program Kawasan Permukiman	DINAS PKP
		Program Pengembangan Perumahan	DINAS PKP
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	DINAS PKP
		Program perencanaan lingkungan hidup	DLH
		Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	DLH
		Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	DLH
		Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	DLH
		Program pengelolaan persampahan	DLH
4	Pemantapan kualitas pendidikan dan kesehatan guna mewujudkan SDM yang berdaya saing.	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIK
		Program Pengembangan Kurikulum	DISDIK
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DISDIK
		Program Pengendalian dan Perizinan Pendidikan	DISDIK
		Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	DISDIK
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	DINKES
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	DINKES
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	DINKES
		Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	DISPORA
		Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	DISPORA
		Program pengembangan kapasitas kepramukaan	DISPORA
		Program pembinaan perpustakaan	PERSIPDA
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
5	Pemantapan kualitas pelayanan public melalui transformasi teknologi	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	DISKOMINFO
		Program Aplikasi Informatika	DISKOMINFO
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	DISKOMINFO
		Program pendaftaran penduduk	DISDUKCAPIL
		Program pencatatan sipil	DISDUKCAPIL
		Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	DISDUKCAPIL
		Program promosi penanaman modal	DPMPTSP
		Program pelayanan penanaman modal	DPMPTSP

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA	PROGRAM	OPD
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	KECAMATAN
6	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD
		Program pengelolaan barang milik daerah	BPKPD
		Program pengelolaan pendapatan daerah	BPKPD
		Program informasi dan komunikasi publik	DISKOMINFO
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	DISKOMINFO
		Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	SETDA
		Program perekonomian dan pembangunan	SETDA
		Program Pengelolaan Arsip	PERSIPDA
		Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	BAPPEDA
		Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	BAPPEDA
		Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
		Program penyelenggaraan pengawasan	IRDA
		Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	IRDA

Tabel 6. 10 Program Prioritas Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2024

PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA	PROGRAM	OPD
TAHUN 2024		
MEWUJUDKAN INSAN-YANG SEHAT DAN CERDAS MENUJU SALATIGA YANG BERSIH, SEHAT DAN BERILMU DAN BERBUDI LUHUR		
1. Peningkatan kualitas sekolah terutama pada penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran pada PAUD, dikdas dan pendidikan non formal.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum
2. Peningkatan peran dan kompetensi guru terutama kompetensi pedagogik guru PAUD, SD dan SMP.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
3. Peningkatan peran orang tua dalam pendidikan karakter.	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan
4. Pengembangan kurikulum muatan lokal sebagai penciri Kota Salatiga, kurikulum prototype dalam kerangka Merdeka Belajar.	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan
5. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pelestarian budaya dan kesenian termasuk kekayaan gastronomi.	Program pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kebudayaan	
6. Peningkatan aktivitas kesenian dan budaya dengan fokus pada kesenian tradisional dan budaya lokal.	Program Pengembangan Kesenian tradisional	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
7. Peningkatan kualitas layanan di tingkat pertama untuk meningkatkan kelangsungan hidup di 1000 hari pertama pasca kelahiran baik pada ibu dan bayi,	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
8. Penurunan gizi buruk difokuskan pada penanganan stunting, wasting, underweight, obesitas pada balita dan anak.	Program percepatan penurunan stunting	Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,	
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman,	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
9. Penurunan angka kesakitan di fokuskan pada penanganan penyakit menular (Covid 19, TB, HIV AIDS), pengendalian lingkungan dan perilaku hidup sehat.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,	Dinas Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman,	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan,	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
10. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan fokus peningkatan peserta KB baru (unmed need) peningkatan	Program Pengendalian Penduduk	DP3APPKB
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	

PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA	PROGRAM	OPD
partisipasi KB pria dan pemeliharaan kesehatan reproduksi pada remaja.		
11. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak, dalam rangka mewujudkan Kota Salatiga sebagai Kota Layak Anak.	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DP3APPKB
	Program Perlindungan Khusus Anak	
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
	Program peningkatkan kelembagaan forum anak tingkat kota, kecamatan dan kelurahan	
	Program peningkatan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan	
12. Peningkatan kolaborasi stakeholder dalam pencapaian kesejahteraan sosial dengan memperhatikan kemampuan PMKS untuk makin mandiri, serta sinergitas lembaga pengelola PMKS.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DP3APPKB
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas sosial
13. Akserelasi pemenuhan hak-hak anak dengan prioritas pada anak-anak korban kekerasan termasuk TPPO, difabel dan anak-anak rentan.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DP3APPKB
	Program Perlindungan Khusus Anak	
14. Penguatan pengarusutamaan gender dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan.	Program peningkatan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	DP3APPKB
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	
15. Peningkatan pemenuhan pangan bagi masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam rangka meningkatkan konsumsi energi dan protein masyarakat.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan,
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan dan Pertanian
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DP3APPKB
16. Peningkatan infrastrukur dasar dan penunjang.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	

Tabel 6. 11 Program Prioritas Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA		PROGRAM	OPD
TAHUN 2025			
MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERKUALITAS DAN PRODUKTIF MENUJU SALATIGA YANG NYAMAN DAN MANDIRI			
1.	Peningkatan kemantapan jalan dengan fokus pada jalan dan jembatan dengan kondisi rusak berat.	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum
2.	Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum
3.	Peningkatan kinerja pelayanan sarana drainase dan pengairan fokus rehabilitasi jaringan drainase dan pengairan yang rusak.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum
4.	Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran/ perusakan lingkungan hidup dengan fokus pada pada sentra-sentra industri dan kawasan permukiman.	Program perencanaan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan
		Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	
		Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	
		Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	
		Program pengelolaan persampahan	
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perinaker
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
5.	Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
6.	Penataan kawasan kumuh perkotaan yang difokuskan pada peningkatan pengetahuan lingkungan sehat bagi masyarakat, perbaikan infrastruktur sanitasi, air bersih, drainase, persampahan yang didukung berbagai program sinergitas dari Pemerintah Provinsi	Program Kawasan Permukiman	DPKP
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	

PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA		PROGRAM	OPD
	maupun Pemerintah Pusat.		
7.	Penyediaan sarana sanitasi dan air bersih difokuskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	DPKP
8.	Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi dan UMKM
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	
		Program Pengembangan Umkm	
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	
9.	Optimalisasi penanggulangan kemiskinan.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINSOS

Tabel 6. 12 Program Prioritas Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2026

PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA	PROGRAM	OPD
TAHUN 2026		
MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEMAKIN SEJAHTERA MENUJU SALATIGA MAKMUR DAN BERBAGI		
1. Peningkatan daya saing perekonomian daerah dengan fokus pada peningkatan kinerja di sektor perdagangan, industri dan usaha kecil menengah.	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perdagangan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
	Program Pengembangan Ekspor	
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perinaker
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
2. Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama kemampuan dalam mengakses permodalan, penguasaan teknologi digital dan meningkatkan produktivitas, kualitas dan pemasaran produk.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi dan UMKM
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	
	Program Pengembangan UMKM	
3. Peningkatan fasilitasi kemudahan penyediaan bahan baku, penggunaan teknologi produksi dan meningkatkan kualitas produk diprioritaskan pada produk-produk unggulan Kota Salatiga.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
4. Peningkatan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran produk-produk unggulan Kota Salatiga dan penyediaan sarana perdagangan yang terstandarisasi.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	
5. Peningkatan diversifikasi produk wisata dengan fokus pada pengembangan destinasi pariwisata, penguatan Pokdarwis dan penyelenggaraan atraksi wisata berbasis seni budaya daerah.	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
6. Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan dan peternakan.	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA	PROGRAM	OPD
7. Peningkatan fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan kelompok pembudidaya dan pembenih ikan dengan fokus pada sentra-sentra usaha perikanan.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian
8. Peningkatan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan fokus pada pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan alternatif dan diversifikasi produk pangan.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan dan Pertanian
9. Peningkatan fasilitasi penyediaan stimulan dana pembangunan guna mendorong partisipasi masyarakat dengan fokus pada pembangunan tingkat kelurahan.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan
10. Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
	Program Promosi Penanaman Modal	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
	Program Pelayanan Penanaman Modal	
11. Penyediaan tenaga kerja yang terampil dan melakukan pengembangan sistem informasi investasi dan tenaga kerja berbasis teknologi informasi.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Diperinaker
	Program Penempatan Tenaga Kerja	
12. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	SEMUA OPD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil
13. Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
14. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Penyelenggaraan Jalan	
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	

Selengkapnya kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kota Salatiga tahun 2023-2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan indikatornya tersaji dalam Tabel 6.13 berikut

Tabel 6. 13 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	PERANGKAT DAERAH
									2022	2026	
1	**Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyrakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas.**	Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas	a	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan PAUD melalui peningkatan kondusifitas sekolah, sosialisasi & workshop, pengembangan kurikulum dan pendidikan keluarga	Peningkatan kualitas sekolah terutama pada penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran pada PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD	%	38,33	38,37	
			b	Meningkatkan akses pendidikan dasar melalui peningkatan peran orang tua dalam pendidikan anak, dan optimalisasi peran pemerintah serta swasta	Peningkatan peran dan kompetensi guru terutama kompetensi pedagogik guru PAUD, SD dan SMP.		APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI/Paket A	%	113,46	100	
			c	Meningkatkan peran orangtua dan guru mewujudkan profil pelajar pancasila yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berpikiran kritis, mandiri, gotong royong dan kebhinekaan global.	Peningkatan peran orang tua dalam pendidikan karakter.		APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs/Paket B	%	130,81	100	
			d	Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus			Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,005	0,002	
			e	Penyelarasan program dan kegiatan non formal yang bermutu melalui pengembangan kurikulum non formal sesuai standar, peningkatan koordinasi dan kerjasama DUDI, fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan perluasan jangkauan peserta didik untuk memenuhi ketrampilan peserta didik.	Pemantapan kualitas pendidikan dan kesehatan guna mewujudkan SDM yang berdaya saing		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,44	0,4	
							Persentase Ruang Kelas PAUD dalam Kondisi Baik	%	87,33	87,37	
			f	Meningkatkan minat pelajar untuk mempelajari dan mengembangkan bahasa dan budaya jawa	Peningkatan model pengembangan pembelajaran bahasa dan budaya jawa		Persentase Ruang Kelas SD/MI dalam Kondisi Baik	%	87,28	87,32	
							Persentase Ruang Kelas SMP/MTs dalam Kondisi Baik	%	97,7	97,74	
			g	Mewujudkan penyelenggaraan PAUD yang berkualitas melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana	Peningkatan kondisi ruang kelas yang baik dalam rangka mewujudkan kualitas PAUD		Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	NA	1,99	
			h	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar melalui pembangunan, pengadaan, pemetaan dan rehabilitasi, pemeliharaan laboraturium IPA, laboraturium Komputer, Perpustakaan, Ruang kelas, ruang guru, rumah dinas dan Alat Peraga	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dengan prioritas pada pengadaan laboraturim IPA, computer, perpustakaan, ruang belajar dan guru rehabilitasi ruangkelas dan alat peraga		Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	NA	1,81	**Dinas Pendidikan**
			i	Meningkatkan penyelenggaraan PAUD yang bermutu melalui akreditasi satuan pendidikan PAUD	Peningkatan mutu dalam rangka mewujudkan kualitas PAUD.		Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	NA	2,07	
			j	Peningkatan penyelenggaraan pendidikan non formal yang bermutu melalui sertifikasi lembaga kursus, kualitas SDM penyelenggara dan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung.	Mengembangkan kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal dengan prioritas pada DUDI.		Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	NA	1,88	
			k	Peningkatan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan melalui fasilitasi ijin belajar bagi guru, penyelenggaraan bimbingan teknis, seleksi dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan, fasilitasi bantuan beasiswa bagi guru untuk melanjutkan pendidikan yang sesuai standar.	Mengembangkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan prioritas fasilitasi ijin belajar dan pemberian beasiswa		Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SD/MI	%	NA	35	

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	PERANGKAT DAERAH
									2022	2026	
			l	Peningkatan guru bersertifikat melalui fasilitasi pemenuhan angka kredit bagi pendidik, penyediaan sarana prasarana penunjang pencapaian sertifikasi, dan bimbingan teknis untuk memenuhi angka kredit, dan penyediaan ruang bagi pendidik untuk menulis, pemberian bantuan kepada guru untuk memenuhi kualifikasi S1	Peningkatan pendidik yang bersertifikasi dengan prioritas pada fasilitasipemenuhan angka kredit dan penyediaan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi dan bantuan kualifikasi S1		Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SMP/MTs	%	NA	35	
			m	Pelaksanaan Sosialisasi, pelatihan dan pengimbasan guru penggerak	Peningkataan kompetensi guru untuk memenuhi kualifikasi guru penggerak yang mampu berkolaborasi, cerdas emosi dan spiritual, mengembangkan diri dan refleksi		Persentase sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang	%	NA	0,3	
							Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik	%	NA	58,33	
			n	Penyusunan regulasi tentang kurikulum yang menggunakan kearifan lokal dengan mempertimbangkan sejarah dan budaya	Pengembangan kegiatan di satuan pendidikan yang berpotensi untuk menjadi kurikulum muatan lokal	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI	%	NA	20,3	
			o	Optimalisasi penyelenggaraan pendidikan dasar melalui peningkatan partisipasi anak usia sekolah, beasiswa bagi siswa miskin, pelayanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus, implementasi kurikulum merdeka yang bermutu, peningkatan minat baca dan belajar siswa, dan peningkatan numerasi siswa	Mewujudkan partisipasi anak – anak usia SD dan SMP untuk bersekolah melalui pemberian beasisiwa siswa kurang miskin dan meningkatkan nilai assesmen kompetensi minimum SMP/sederajat dan AKM SD/sederajat, paket C dengan focus pada implementasi kurikulum merdeka serta peningkatan proses belajar mengajar di sekolah melalui peningkatan kemampuan literasi dan numerasi		Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SMP/MTs	%	NA	19	**Dinas Pendidikan**
					Pengembangan kurikulum muatan lokal sebagai penciri Kota Salatiga, kurikulum *prototype* dalam kerangka Merdeka Belajar.		Persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang PKBM	%	NA	75	
			p	Peningkatan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan melalui fasilitasi ijin belajar bagi guru, penyelenggaraan bimbingan teknis, seleksi dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan, fasilitasi bantuan beasiswa bagi guru untuk melanjutkan pendidikan yang sesuai standar.	Mengembangkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan prioritas fasilitasi ijin belajar dan pemberian beasiswa	**Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	Persentase Guru bersertifkat pendidik Jenjang TK/RA	%	NA	33,00	
			q	Peningkatan guru bersertifikat melalui fasilitasi pemenuhan angka kedit bagi pendidik, penyediaan sarana prasarna penunjang pencapaian sertifikasi, dan bimbingan teknis untuk memenuhi angka kredit, dan penyediaan ruang bagi pendidik untuk menulis, pemberian bantuan kepada guru untuk memenuhi kualifikasi S1	Peningkatan pendidik yang bersertifikasi dengan prioritas pada fasilitasi pemenuhan angka kredit dan penyediaan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi dan bantuan kualifikasi S1		Persentase Guru bersertifkat pendidik Jenjang SD	%	NA	43,00	**Dinas Pendidikan**
							Persentase Guru bersertifkat pendidik jenjang SMP	%	NA	53,00	
							Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang PAUD	%	84,95	84,99	
							Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SD	%	97,3	97,34	
							Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SMP	%	96,43	96,47	
			r	peningkatan kualifikasi guru melalui fasilitasi ijin belajar bagi guru, penyelenggaraan bimtek, seleksi dan penempatan pendidik, fasilitasi bantuan beasiswa bagi guru untuk memenuhi kualifikasi sesuai standar	Peningkataan kompetensi guru untuk memenuhi kualifikasi guru penggerak yang mampu berkolaborasi, cerdas emosi dan spiritual, mengembangkan diri dan refleksi	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	Persentase TK/RA yang terakreditasi	%	86,09	86	
							Persentase Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat (PKBM) yang Terakreditasi	%	58,33	58	

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	PERANGKAT DAERAH
									2022	2026	
							Persentase lembaga Kursus dan Pelatihan yang berijin	%	NA	34,00	**Dinas Pendidikan**
							Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SD/MI	%	NA	100	
							Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SMP/MTs	%	NA	100	
						PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SD/MI	%	NA	13	
							Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SMP/MTs	%	NA	13	**Dinas Pendidikan**
							Jumlah PKBM yang sudah memasukkan pembelajaran Bahasa Jawa pada mata pelajaran yang diberikan ke siswa	%	NA	40	
		Mewujudkan Masyarakat yang Cerdas dan Kreatif	s	Meningkatkan Pemanfaatan Kearsipan dan Perpustakaan oleh Masyarakat	Meningkatkan peran pemerintah lembaga publik dan masyarakat untuk pengelolaan kearsipan dan perpustakaan	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	nilai tingkat kegemaran membaca	nilai	79,83	87,83	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
				Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perpustakaan serta SDM pelayanan perpustakaan	Meningkatkan kompetensi SDM kearsipan dan Perpustakaan						
				Peningkatan sarpras dan kualitas layanan pengelolaan kearsipan kepada seluruh perangkat daerah.	Meningkatkaan sarana dan prasarana kearsipan dan perpustakaan						
			t	Meningkatkan jejaring kemitraan perpustakaan baik negeri maupun swasta	Meningkatkan peran pemerintah lembaga publik dan masyarakat untuk pengelolaan kearsipan dan perpustakaan						
			u	Meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait dengan literasi dan kebiasaan membaca	Meningkatkan sarana dan prasarana kearsipan dan perpusatakaan						
2	**Meningkatkan apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah**	Meningkatnya apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah		Meningkatkan aktivitas gelar seni, karya budaya dan kelestarian warisan budaya melalui penguatan sumber daya manusia dan penyadaran masyarakat akan pelestarian warisan seni budaya khas Kota Salatiga	Peningkatan aktivitas kesenian dan budaya dengan fokus pada kesenian tradisional dan budaya lokal	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	%	16,2	35	
				Meningkatkan pembinaan dan pelestarian sejarah dan cagar budaya melalui kajian	Peningkatan kesadaran masyarakat akan pelestarian budaya dan kesenian termasuk kekayaan gastronomi	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Persentase SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi,standarisasi dan sertifikasi serta peningkatan kapasitas tata kelola)	%	12,5	100	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**
				Meningkatkan persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	Meningkatkan pelestarian benda cagar budaya melalui pendaftaran, penetapan,pengelolaan cagar budaya dan museum.	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	Persentase kajian sejarah	%	12,5	100	
						PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Penetapan Cagar Budaya	%	7	28	
						PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase penambahan jumlah koleksi museum	%	5,30	4,5	

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	PERANGKAT DAERAH
									2022	2026	
3	**Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga**	Meningkatnya prestasi dalam olahraga		Meningkatkan pola pembinaan olah-raga yang berjenjang mulai dari tingkat sekolah dasar, menengah pertama dan menengah atas	Menggiatkan, membina, dan memfasilitasi berbagai program olahraga dan kepemudaan	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Prosentase Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga	%	22,86	25	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
				Mengintensifkan event-event olahraga untuk mendapatkan potensi potensi baru dalam bidang olahraga							
				Meningkatkan keikutsertakan atlit-atlit local pada berbagai event olahraga, baik dileval local antar daerah, maupun nasional							
				Mengembangan dan memperbaiki sarana dan prasarana olah raga, di lingkungan masyarakat, baik di level kelurahan,kecamatan, maupun tingkat kota							
		Meningkatnya partisipasi pemuda		Mengoptimalkan potensi pemuda dalam dalam berbagai kegiatan pendidikan ketrampilan dan pelatihan, khususnya dalam bidang kewirausahaan		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Prosentase Pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan	%	2,45	5	
				Meningkatan keterlibatan pemuda (melalui organsisasi kepemudaan) dalam berbagai kegiatan/event yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah di level		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Prosentase fasilitasi pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	60	75	
4	**Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk**	Menurunnya angka kesakitan dan kematian		Menurunkan kematian ibu dan anak melalui peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan, peningkatan perilaku dan kepedulian masyarakat terkait keselamatan ibu melahirkan.	Meningkatkan kelangsungan hidup di 1000 hari pertama pasca kelahiran baik pada ibu dan bayi, peningkatan kualitas layanan di tingkat pertama dan tingkat lanjutan	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	Prosentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM	%	76	85	
				Menurunkan gizi buruk melalui gerakan masyarakat hidup sehat, peningkatan sarana pelayanan gizi masyarakat, pemberian dan perawatan pada kasus gizi buruk, peningkatan cakupan bayi dengan ASI Eksklusif	Menurunkan gizi buruk melalui gerakan masyarakat hidup sehat, peningkatan sarana pelayanan gizi masyarakat, pemberian dan perawatan pada kasus gizi buruk, peningkatan cakupan bayi dengan ASI Eksklusif		Prosentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM	%	83,8	87	
				Penurunan penyakit menular melalui peningkatan kualitas lingkungan sehat, peningkatan penjangkauan penemuan kasus penyakit menular dan tidak menular, serta peningatan kualitas pelayanan kesehatan dalam penanganan penyakit	Penurunan angka kesakitan di fokuskan pada penemuan dan pengendalian penyakit menular (TB, HIV AIDS) dan penyakit tidak menular (Hipertensi, DM), serta peningkatan kualitas lingkungan sehat		Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	97,53	100	
		Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan		Peningkatan sumber daya kesehatan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, Penguatan Advokasi dan KIE		Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	63,36	70	
				Meningkatkan kualitas dan mengendalikan kuantitas penduduk, Mengendalikan pertumbuhan penduduk, Melaksanakan Sosialisasi Program KKBPK			Cakupan pembinaan remaja di sekolah	%	100	100	
							Pembentukan Posyandu Remaja	unit	NA	30	
							Persentase Ibu hamil KEK	%	63,36	70	
							Persentase Ibu Hamil yang Anemia	%	9,08	6	
							Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan	%	12,32	9	
							Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	%	97,57	99	

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	PERANGKAT DAERAH
									2022	2026	
							Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100	100	DINAS KESEHATAN
							Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A	%	99,7	100	
							Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3)	%	99,3	100	
							Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	98,2	100	
							Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	%	84,6	88	
							Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)	%	4,76	4	
							Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	%	73,7	80	
							Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	93,78	100	
							Angka Kematian balita (AKABA)	per 1.000 KH	13,75	10	
							Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	%	100	100	
							Prevalensi Stunting pada Balita	%	11,84	9,6	
							Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	25,14	100	
							Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	26,62	100	
							Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	%	70,88	100	
							Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	33,71	100	
							Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	67,71	100	
							Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	%	75	80	
							Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	73,52	100	
							Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	%	33,43	100	
							Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR)	/100.000 pddk	191	145	
							Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	%	77,09	100	
							Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	55	80	
							Incident Rate DBD per 100.000 penduduk	100 rb penduduk	6	<7	
							Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk	1.000 penduduk	0,16	< 1	
							Angka Penemuan Pneumonia Balita	%	30,23	57	
							Deteksi Dini Hepatitis	%	70	82	
							Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	92	95	
							Cakupan UCI kelurahan	%	100	100	
							Cakupan BIAS DT/Td	%	97	98	
							Cakupan BIAS Campak Rubela	%	96	98	
							Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	%	0 (tidak ada haji)	100	

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	PERANGKAT DAERAH
									2022	2026	
							Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam	%	100	100	
							Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)	kasus	2	5	
							Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	93,17	83	
							Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	90	78	
							Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar	%	NA	39,1	
							Prosentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	%	75	100	
							Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	%	100	100	
							Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	%	100	100	
							Cakupan kepesertaan JKN	%	100	100	
							Cakupan Puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjut PIS PK	%	100	100	
							Persentase Puskesmas yang melaksanakan SIMPUS	%	100	100	
							Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart	%	94	100	
							Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan	%	78	85	
							Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	0,396	0,402	
							Prosentase RS rujukan yang terakreditasi	%	50	83,33	
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan sesuai kompetensinya	%	50	70	
						PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Prosentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan	%	53,33	59	
							Prosentase pangan IRT yang memenuhi syarat	%	78,78	88	
							Prosentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan	%	76,66	84	
							Prosentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, toko obat) yg memenuhi standart dan persyaratan perijinan	%	58,82	68	
							Cakupan TPM yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	91,11	90	**INAS KESEHATA**
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan desa siaga strata mandiri	%	91	100	
							Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna	%	96,58	96,62	
							Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna	%	94,97	97,4	
							Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat	%	100	100	
							Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat	%	94,94	97,19	
							Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat	%	93,37	93,63	

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	PERANGKAT DAERAH
									2022	2026	
		Mengendalikan pertumbuhan penduduk		Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi untuk mengatur kehamilan, Meningkatkan kesadaran yang baik pada remaja tentang kesehatan reproduksi, Peningkatan layanan keluarga berencana	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, Penguatan Advokasi dan KIE	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Cakupan Pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (penyusunan Grand Design, Profil/Parameter dan Proyeksi Penduduk)	%	0	90	**DP3APPKB**
							Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15-19 thn (ASVFR)	%	0,92	1,75	
							Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	%	100	100	
							Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun	%	0,39	2	
							Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	27	22,1	
						PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio akseptor KB baru	%	87,16	73	
							Cakupan peserta KB aktif	%	71,9	84	
							Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)	rasio	2,3:1	1:2	
							Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	71,2	78,3	
							Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	%	14,2	12	
							Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	65,85	27,57	
							Persentase Fasilitas Kesehatan yang siap melayani KB MKJP	%	100	90	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	rasio	1:2	1:2	
							Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA)	%	89	90	
							Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun	%	0,29	1,7	
							Cakupan Kader BKB yang Terlatih	%	66	87	
							Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB	%	82	82	
							Persentase Baduta Stunting	%	0	22	
5	**Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk**	meningkatnya jumlah koperasi aktif		Menyelenggarakan pelatihan perkoperasian bagi anggota koperasi	Mewujudkan pemulihan ekonomi kerakyatan dengan penguatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM, terutama dalam tata kelola manajemen usaha	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase koperasi yang berkualitas	%	50	54	**Dinkop UKM**
				Melakukan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi	Mewujudkan pemulihan ekonomi kerakyatan dengan penguatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM, terutama dalam tata kelola manajemen usaha	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	%	21,93	39,47	
				Mengadakan pelatihan manajerial dan digitalisasi bagi pengelola koperasi	Mewujudkan pemulihan ekonomi kerakyatan dengan penguatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM, terutama dalam tata kelola manajemen usaha	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan	%	36,34	41,35	
				Menyelenggarakan pelatihan perkoperasian bagi anggota koperasi	Mewujudkan pemulihan ekonomi kerakyatan dengan penguatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM, terutama dalam tata kelola manajemen usaha	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Meningkatnya Akses pasar anggota koperasi	%	10	100	
		Meningkatnya jumlah UKM		Meningkatkan Akses permodalan bagi UMKM	Memperkuat Ekonomi Kerakyatan melalui UMKM, Industri Kecil dan Menengah untuk menciptakan daya saing	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan	%	15	24	

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	PERANGKAT DAERAH
									2022	2026	
				Meningkatkan kuantitas dan daya saing UMKM dan koperasi melalui penguatan kapasitas dan keterampilan SDM, serta pengembangan kemitraan usaha dengan usaha besar	Memperkuat Ekonomi Kerakyatan melalui UMKM, Industri Kecil dan Menengah untuk menciptakan daya saing	**PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	%	30,21	31,28	
				Menyelenggarakan dan mengikuti pameran							
		Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas		Mengadakan pendampingan, sosialisasi, pendataan, pelatihan kewirausahaan dan digitalisasi IKM	Menyelenggarakan pelatihan teknis dan manajemen bagi IKM	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	%	20	37	**Dispernaker**
				Meningkatnya produk unggulan yang di promosikan	Pendampingan dan fasilitasi peningkatan daya saing IKM		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	25	32	
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja		Meningkatkan serapan tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja	Mengusulkan, melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap Program Pelatihan Kerja bagi masyarakat pencari kerja yang dilaksanakan melalui UPTD Balai Latihan Kerja	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	%	40	100	
					Mengusulkan dan memfasilitasi kegiatan peningkatan kompetensi tenaga kerja		Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	%	0,030	0,04	
				Penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar	Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pemberi kerja dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase Realisasi Kegiatan Bursa Tenaga Kerja	%	tad	100	
		Meningkatnya pendapatan daerah		Meningkatkan sumber-sumber pendanaan untuk mengoptimalisasi potensi pajak daerah	Penyusunan Kajian potensi pajak dan retribusi dengan melibatkan tenaga ahli yang kompeten	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	NA	20,2	**BPKPD**
					Penyusunan Perubahan regulasi dengan melibatkan tenaga ahli dan menjalin kerjasama dengan akademisi untuk penyusunan naskah akademik ataupun Raperda tentang pendapatan daerah		Persentase belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	%	NA	84,82	
							Budget execution:deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	NA	97,78	
							Cash managenent (Persentase anggaran)	%	NA	15,07	
							Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	NA	100	
							Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	NA	100	
				Meningkatkan pemanfaatan aset daerah (barang milik daerah)	Menggali potensi pajak daerah dan pemanfaatan aset daerah untuk menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah).	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Asset Management	Laporan	4	4	
					Penyusunan Kajian potensi pajak dan retribusi dengan melibatkan tenaga ahli yang kompeten	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	100	100	
		Meningkatnya kinerja perdagangan		Meningkatkan legalitas perizinan pelaku usaha perdagangan	Peningkatan perlindungan konsumen, pengamanan perdagangan dan kelancaran distribusi dan jaminan barang kebutuhan pokok masyarakat	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Presentase jumlah perizinan yang dilegalitas terhadap jumlah pelaku usaha perdagangan	%	10	25	
				Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan Pedagang Pasar tradisional	Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan dan peningkatan pemanfaatan data / informasi perdagangan dan yang terkait perdagangan	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar.	%	80	100	

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	PERANGKAT DAERAH
									2022	2026	
				Peningkatkan pemberdayaan dan pembinaan PKL	Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan dan peningkatan pemanfaatan data / informasi perdagangan dan yang terkait perdagangan		Persentase kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina	%	96	90	Dinas Perdagangan
				Peningkatkan pemberdayaan dan pembinaan PKL	Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan dan peningkatan pemanfaatan data / informasi perdagangan dan yang terkait perdagangan		Persentase kelompok PKL yang dibina	%	21	71	
				Peningkatkan pemberdayaan dan pembinaan PKL	Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan dan peningkatan pemanfaatan data / informasi perdagangan dan yang terkait perdagangan		Persentase PKL yang ditata terhadap jumlah total PKL	%	21	44	
				Peningkatkan pemberdayaan dan pembinaan PKL	Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan dan peningkatan pemanfaatan data / informasi perdagangan dan yang terkait perdagangan		Persentase PKL yang menempati lokasi peruntukan terhadap jumlah PKL	%	6	46	
				Meningkatkan jumlah pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi	Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan dan peningkatan promosi produk unggulan disertai peningkatan penggunaan produk Dalam Negeri.	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Prosentase penerima pupuk bersubsidi terhadap pengguna pupuk	%	0	100	
				Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan	Peningkatan perlindungan konsumen, pengamanan perdagangan dan kelancaran distribusi dan jaminan barang kebutuhan pokok masyarakat		Ketersediaan infromasi pasokan,harga dan akses pangan daerah	komiditi	26	26	
		Meningkatnya kinerja perdagangan		Meningkatnya produk unggulan yang di promosikan	Peningkatan produk unggulan yang dipromosikan untuk pengembangan ekspor	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Prosentase produk unggulan terhadap jumlah produk di Kota Salatiga	%	50	90	
				Meningkatkan jumlah pelayanan tera dan tera ulang	Peningkatan perlindungan konsumen, pengamanan perdagangan dan kelancaran distribusi dan jaminan barang kebutuhan pokok masyarakat	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase Alat UTTP dan perlengkapannya di wilayah Kota Salatiga yang ditera ulang dan bertanda tera sah	%	70	100	
		Meningkatnya kunjungan wisatawan pada berbagai destinasi unggulan		Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara melalui diversifikasi produk wisata yang mencakup destinasi dan atraksi wisata	Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara melalui diversifikasi produk wisata yang mencakup destinasi dan atraksi wisata	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	Persentase obyek wisata yang ditingkatkan	%	100	100	Disbudpar
						PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase fasilitasi pemasaran pariwisata	%	100	100	
				Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mendukung dan memfasilitasi pengembangan ekraf parwisata melalui pembinaan, pameran dan promosi	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan ekraf pariwisata	**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**	Persentase pengelolaan ekonomi kreatif	%	100	100	
						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	60	100	
		Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat		Meningkatkan kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB Meningkatkan produktivitas tanaman pangan utama melalui fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani - Padi Jagung	Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan kemlompok ternak dengan prioritas pada sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan dan peternakan	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian	%	70	75	

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	PERANGKAT DAERAH
									2022	2026	
				Meningkatkan produksi hasil peternakan melalui fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani ternak khususnya untuk produksi Daging Sapi Potong		**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian	%	70	75	
						PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani dan ternak yang dibina				
							- Pemula	%	44	58,56	
							- Lanjut	%	44	58,56	
							- Madya	%	11,5	15,31	
							- Utama	%	1,95	2,6	
						PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase kejadian bencana pertanian	kejadian	0	0	
				Meningkatkan produksi perikanan dan benih ikan melalui fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan teknis Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang baik (CPIB)	Peningkatan fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan kelompok pembudidaya dan pembenih ikan dengan fokus pada sentra-sentra usaha perikanan.	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	**%**	**100**	100	**Dispangtan**
							Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	**%**	**35**	35	
						PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan	%	100	100	
							Persentase kelompok kelompok pengolah dan pemasar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya ikan yang Baik (CBIB)	%	35	35	
				Menurunkan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular melalui program kesehatan hewan dan ternak	Peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan hewan dan ternak	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Mortalitas hewan dan ternak akibat penyakit zoonosis	%	0	0	
				Memastikan ketersediaan beras beserta sarana dan prasarana lumbung pangan sebagai bentuk antisipasi ketahanan pangan masyarakat	Meningkatkan fasilitasi sarana produksi revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan dengan prioritas pada sentra-sentra produksi tanaman utama	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	Penyediaan Infrastruktur Pangan	%	0	30	
						PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan segar aman	%	98	98	
						PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan rumah tangga rawan pangan	KK	210	299	
6	**Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga**	Meningkatnya Capaian Realisasi PMA dan PMDN		Meningkatkan kualitas pembinaan pelaku usaha	Peningkatan kapasitas kelembagaan	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN	Rupiah (Milyar)	440,9	645,52	**DPMPTSP**
				Promosi peluang investasi yang terencana dengan memperkuat basis data di website serta menggalakan temu usaha dengan calon investor potensial di dalam dan luar negeri.	Peningkatan promosi Investasi	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Persentase kenaikan jumlah minat investasi berskala nasional (PMA/PMDN)	%	10	10	
				Merancang dan menerbitkan peraturan daerah yang mampu memberikan kemudahan berinvestasi serta pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah di Kota Salatiga	Penyempurnaan regulasi	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Persentase jumlah perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan	%	90	94	
		Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar tenaga kerja		Mengadakan kegiatan pengawasan dan pembinaan kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Peningkatan kapasitas kelembagaan	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Persentase kenaikan jumlah LKPM yang masuk	%	10	13	

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	PERANGKAT DAERAH
									2022	2026	
				Merancang dan menerbitkan peraturan daerah yang mampu memberikan kemudahan berinvestasi serta pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah di Kota Salatiga	Penyempurnaan regulasi	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Persentase jumlah perizinan dan non perizinan yang dikelola	%	10	10	
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja		Melaksanakan pelatihan manajerial dan teknis, pendampingan dan sosialisasi serta fasilitasi sertifikasi	Melakukan sosialisasi dan monitoring kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	%	40	100	**Dispernaker**
				Melaksanakan Bursa Kerja	Melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi pasar kerja		Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	%	0,03	0,04	
				Melaksanakan kegiatan perlindungan CPMI/PMI (Calon Pekerja Migran Indonesia)	Melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi pasar kerja	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase Realisasi Kegiatan Bursa Tenaga Kerja	%	NA	100	
				Pembentukan kluster industri baru	Pembentukan kelembagaan Sentra IKM	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase industri Kota Salatiga yang berkembang	%	0,3	0,75	
				Melaksanakan pameran	Fasilitasi pameran/promosi produk unggulan IKM Salatiga						
				Melaksanakan survey dan pengawasan industri	Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Industri	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	NA	100	
				Melaksanakan survey dan pengawasan industri			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	**%**	NA	1	
				Melakukan sosialisasi dan pendampingan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)		**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Persentase usaha industri yang memiliki akun SIINAS dan melaporkan data industri	**%**	NA	6	
				Melaksanakan kegiatan transmigrasi		**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Persentase proses pelaksanaan transmigrasi	**%**	100	100	
7	**Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial**	Meningkatnya kualitas penanganan PMKS		Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial bagi Keluarga Miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta kualitas rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Pemantapan program penanggulangan kemiskinan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase Terbentuknya Lembaga Puskesos	%	12,5	100	
							Persentase LKS/LKSA yang telah mengikuti Assesment	%	19,23	57,69	
							Persentase PSKS yang dibina	%	60	85	
				Meningkatkan kualitas pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)		**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Presentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	
							Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	
							Presentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	
							Presentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	100	100	

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	PERANGKAT DAERAH
									2022	2026	
				Meningkatkan kualitas penanganan saat tanggap darurat bencana		**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	96,93	97,6	**Dinas Sosial**
							Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	%	93,3	96	
				Meningkatkan kualitas pemeliharaan Taman Makam Pahlawan		**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	**%**	100	100	
							Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	**%**	NA	100	
				Meningkatnya kualitas Rehabilitasi Sosial bagi PPKS		**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	100	100	
		Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman		Meningkatkan pola pangan harapan dengan mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	Peningkatan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan fokus pada pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan alternatif dan diversifikasi produk pangan.	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Ketersediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	%	60	100	**Dispangtan**
				Memastikan ketersediaan pangan sumber energi dan protein yang memadai untuk setiap orang	Peningkatan pemenuhan pangan bagi masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam rangka meningkatkan konsumsi energi dan protein masyarakat.		Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER)	skor PoU	6,89	4,52	
		Meningkatnya Minat untuk Menjadi Transmigran		Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada calon transmigran	Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada calon transmigran	**Program pembangunan kawasan transmigrasi**	Persentase pelaksanaan pelaksanaan transmigrasi	%	100	100	**Dispernaker**
8	**Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender**	Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan		Meningkatkan Pencapaian Kualitas Hidup Perempuan Melalui : (1) Percepatan PPRG bagi OPD; (2) Fasilitasi pengembangan kelembagaan PUG; (3) Meningkatkan Ketrampilan dan pengembangan usaha perempuan; meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik; dan pengembangan jaringan kelembagaan PUG	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, Penguatan Advokasi dan KIE	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	3,56	3,8	**DP3AP2KB**
				Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan Anak melalui : (1) KIE penyelenggaraan SIGA; (2) Pembuatan sistem Informasi tentang Data Gender dan Anak; (3) Penyusunan Perwali tentang data gender dan anak;(4) Advokasi tentang pentingnya data gender dan anak bagi OPD dan Stakeholder terkait;			IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	%	79,08	81,5	
							Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif	%	20	24	
							Kontribusi perempuan pada pendapatan	%	40	41	
						PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani sesuai standart	%	100	100	
							Rasio Kekerasan terhadap perempuan	%	0,012	14,13	
						PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	25	75	
						PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang berkontribusi dalam sistem data gender dan anak	%	100	100	

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	PERANGKAT DAERAH
									2022	2026	
						PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase anak yang terlibat dalam kegiatan anak	%	0	64,06	
						PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio anak korban kekerasan	%	**0,037**	**0,02**	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	**%**	**10**	**100**	
9	**Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah**	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan		Meningkatkan fungsi dan pelayanan Sekretariat Daerah sebagai koordinator dan fasilitator perangkat daerah dalam bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, perekonomian, dan pembangunan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan serta peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan koordinasi dan fasilitasi bidang keprotokolan dan kehumasan yang berkualitas	%	98	100	**SETDA**
							Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	64,99	70	
							Nilai SAKIP	Angka	64,5	70	
							Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	84,61	85	
							Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Angka	66,06	81,75	
							Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD)	Angka	34,37	35	
							Persentase kegiatan Administrasi Umum yang berhasil dikoordinasikan dan difasilitasi	%	NA	100	
							Cakupan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	100	100	
						PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Koordinasi Administrasi Pemerintahan	%	100	100	
							Cakupan Koordinasi Bidang Administrasi Kewilayahan	%	100	100	
							Cakupan Fasilitasi Kerjasama Daerah	%	83	95	
							Skor LPPD	Nilai	3,1	3,1	
							Ketepatan waktu penyamapaian LKPJ (30 maret)	%	100	100	
							Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	
							Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Hukum	%	NA	100	
						PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Koordinasi Program Perekonomian dan Pembangunan	%	100	100	
							Cakupan Koordinasi OPD Pengampu DBHCHT	%	100	100	
							Cakupan Koordinasi dan Pembinaan BMUD/BLUD	%	100	100	
							Cakupan Koordinasi bidang Lingkungan Hidup dan SDA	%	100	100	
							Cakupan Koordinasi POK	%	83,73	84,15	
							Persentase Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan	%	550	550	
				Meningkatkan penyelenggaraan e-government yang lebih baik sesuai dengan ketentuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	
							Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	95	100	

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	PERANGKAT DAERAH
									2022	2026	
				Penyediaan informasi publik secara terbuka melalui penerapan berbagai teknologi terutama teknologi informasi (website dan aplikasi)	Pemantapan kualitas pelayanan publik melalui transformasi teknologi	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Prosentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan progran prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	%	90	98	**KOMINFO**
				Meningkatkan kualitas dan kecukupan penyediaan data statistik daerah untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih baik		**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	75	90	
							Persentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	75	90	
				Memastikan keamanan sistem informasi daerah		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Prosentase tingkat kematangan daerah dalam penyelenggaraan keamanan informasi	%	62,6	75	
				Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan berbasis teknologi	**Mewujudkan tertib Administrasi kependudukan dan akta pencatatan sipil**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Cakupan penduduk perekaman KTP-el	%	95,53	96,5	**DISDUKCAPIL**
							Persentase penerbitan KIA 0-5 th	%	79,01	80	
						PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan akta kelahiran 0-5 th	%	98,67	99	
							Persentase Akta Perkawinan non muslim	%	100	100	
					Meningkatkan kerjasama pemanfaatan Data Kependudukan	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI**	Ketersediaan database kependudukan	%	100	100	
					Meningkatkan kualitas SDM Disdukcapil						
		Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan.		Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur dan mengoptimalkan tata kelola kepegawaian	Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan manajerial dan fungsional serta pelatihan teknis.	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Persentase PNS yang melanjutkan Pendidikan	%	4,94	1,47	**BKPSDM**
					Peningkatan pembinaan Aparatur dibidang kedisiplinan dan kinerja.		Persentase PNS yang mengikuti assesment	%	5,48	10	
					Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan manajerial dan fungsional serta pelatihan teknis.		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	227,25	250	
					Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan manajerial dan fungsional serta pelatihan teknis.		Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	%	14,38	23,96	
					Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan manajerial dan fungsional serta pelatihan teknis.		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	90,83	100	
					Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan manajerial dan fungsional serta pelatihan teknis.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan teknis	%	13,89	2,94	
					Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan manajerial dan fungsional serta pelatihan teknis.		Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial dan Fungsional	%	6,89	6,21	

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	PERANGKAT DAERAH
									2022	2026	
				Perbaikan Tata Kelola Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Berbasis Risiko	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	%	NA	82	**Inspektorat**
				Penerapan Manajemen Risiko	Meningkatkan efektifitas Manajemen Risiko		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	%	NA	90	
				Penguatan Kapabilitas APIP	Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola APIP		Persentase Jumlah OPD Meningkat Nilai Evaluasi SAKIP	%	NA	75	
				Pendampingan dan asistensi pencegahan korupsi	Memberikan *Early Warning* pencegahan korupsi dan melaksanakan fungsi konsultansi APIP	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Nilai MCP Korsupgah KPK	%	82	86	
				Tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan	Penyusunan regulasi pengelolaan keuangan dengan menyusun Naskah Akademis, Raperda dan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah.	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	20,2	20,2	**BPKPD**
					Penyusunan regulasi pengelolaan keuangan dengan menyusun Naskah Akademis, Raperda dan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah.		Persentase belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	%	84,82	84,82	
					Penyusunan regulasi pengelolaan keuangan dengan menyusun Naskah Akademis, Raperda dan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah.		Budget execution:deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	97,78	97,79	
					Penyusunan Sistem Baku yang mengakomodasi pelaporan untuk semua Perangka Daerah.		Cash management (Persentase anggaran)	%	15,07	15,07	
					Penyediaan Fasilitas Sistem Informasi secara Elektronik		Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100	100	
					Terintegrasinya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) agar pelaporan dan transparansi pertanggungjawaban pendapatan dan belanja daerah.		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	
				Mendorong peningkatan kualitas dan pemantapan implementasi kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Penyediaan dan pengolahan data sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	%	46,67	90	**BAPPEDA**
				Mendorong peningkatan kualitas dan pemantapan implementasi kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah serta penyediaan penyediaan dan penyajian data pendukung pemanfaatan kelitbangan.	Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan data						
				Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan OPD, para pemangku kepentingan dan penyediaan dan penyajian data pendukung perencanaan pembangunan	Memfasilitasi forum perencana dalam rangka memanfaatkan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan yang berkualitas	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Kesra	%	100	90	**BAPPEDA**
							Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Ekbang	%	100	90	
				Mendorong peningkatan kualitas dan pemantapan implementasi kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah serta penyediaan dan penyajian data pendukung pemanfaatan kelitbangan	Memfasilitasi inovasi masyarakat	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase terfasilitasinya inovasi masyarakat	%	0	44,44	

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	PERANGKAT DAERAH
									2022	2026	
				Peningkatan sarpras dan kualitas layanan pengelolaan kearsipan kepada seluruh perangkat daerah.	Meningkatkan peran pemerintah lembaga publik dan masyarakat untuk pengelolaan kearsipan dan perpustakaan	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	Persentase koleksi nasional dan kuno yg dilestarikan	%	0	100	**DINPERSIP**
				Peningkatan sarpras dan kualitas layanan pengelolaan kearsipan kepada seluruh perangkat daerah.	Meningkatkan peran pemerintah lembaga publik dan masyarakat untuk pengelolaan kearsipan dan perpustakaan						
				Peningkatan sarpras dan kualitas layanan pengelolaan kearsipan kepada seluruh perangkat daerah.	Meningkatkan peran pemerintah lembaga publik dan masyarakat untuk pengelolaan kearsipan dan perpustakaan	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase perangkat daerah yg mengelola arsip secara baku	**%**	80	88	
						PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase jumlah arsip yang di selamatkan	%	10	50	
						PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase peningkatan penguna atau pengunjung arsip	%	0	100	
		Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan		Penyediaan informasi publik dengan penerapan teknologi informasi berbasis website dan aplikasi	Meningkatan dan mengoptimalkan tugas dan fungsi struktur organisasi pada Sekretariat DPRD	**PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan DPRD dalam fasilitasi pelayanan kesekretariatan	%	70	90	**SETWAN**
				Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi daerah yang berbasis data serta memastikan keamanan informasi daerah							
				Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan OPD, para pemangku kepentingan dan penyediaan dan penyajian data pendukung perencanaan pembangunan.		**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Cakupan fasilitasi Fungsi Legislasi	%	100	100	
							Cakupan fasilitasi fungsi Penganggaran	%	100	100	
							Cakupan fasilitasi fungsi Pengawasan	%	100	100	
		Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan		Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan antara kelurahan, kecamatan, opd dan masyarakat serta para pemangku kepentingan	Meningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar secara akuntabel dan transparan	**KECAMATAN TINGKIR**					
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Peningkatan Skor IKM	%	0,83	0,95	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	30	55	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	NA	100	
							Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	NA	100	
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyampaiam SPPT PBB pada WP	%	95,63	74	
				Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan antara kelurahan, kecamatan, opd dan masyarakat serta para pemangku kepentingan	Meningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar secara akuntabel dan transparan	**KECAMATAN SIDOMUKTI**					
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Peningkatan Skor IKM	%	4,88	1,1	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	40	65	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	NA	100	

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	PERANGKAT DAERAH
									2022	2026	
						UMUM	Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	NA	100	**Kecamatan**
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyampaiam SPPT PBB pada WP	%	84,96	85,15	
				Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan antara kelurahan, kecamatan, opd dan masyarakat serta para pemangku kepentingan	Meningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar secara akuntabel dan transparan	**KECAMATAN SIDOREJO**					
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	85,83	100	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Peningkatan Skor IKM	%	0,72	1,12	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	30	55	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	NA	100	
							Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	NA	100	
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyampaiam SPPT PBB pada WP	%	93,51	93,55	
				Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan antara kelurahan, kecamatan, opd dan masyarakat serta para pemangku kepentingan	Meningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar secara akuntabel dan transparan	**KECAMATAN ARGOMULYO**					
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	97,31	97,31	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Peningkatan Skor IKM	%	1,4	1,4	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	30	55	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	NA	100	
							Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	NA	100	
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyampaiam SPPT PBB pada WP	%	73,27	74	
10	**Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan**	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif		Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga K3; peningkatan intensitas kinerja aparat penegak perda; peningkatan peran serta fungsi PPNS	meningkatkan kondusivitas wilayah diprioritaskan pada wilayah rawan terhadap pelanggaran K3; ,meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Prosentase Penegakan Perda dan Per Ka Da	%	94,36	99	**Satpol PP**
							Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	
						PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Presentase ketersediaan Sarana Prasarana Damkar yang memadai	%	64	70	
							Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Kebakaran	%	64,16	70	

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	PERANGKAT DAERAH
									2022	2026	
						KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	
				Meningkatkan Penyelenggaraan Fasilitasi Organiasi Masyarakat, Hibah Organisasi	Penyelenggaraan Fasilitasi Organisasi Masyarakat, Hibah Organisasi Masyarakat serta pengawasan/Monitoring evaluasi ormas	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Prosentase Ormas Yang berpera aktif dalam Pembangunan	%	37,5	47,5	
					Penyelenggaraan Fasilitasi Organisasi Masyarakat, Hibah Organisasi Masyarakat serta pengawasan/Monitoring evaluasi ormas	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila	%	tad	75	
					Penyelenggaraan Fasilitasi Organisasi Masyarakat, Hibah Organisasi Masyarakat serta pengawasan/Monitoring evaluasi ormas	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase pendidikan Politik yang dilaksanakan	%	tad	100	**Bakesbangpol**
		Menurunnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba.		Peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi, khususnya lembaga pendidikan, untuk melakukan kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan terkait dengan bahaya penyalahgunaan narkoba	Penyelenggaraan Fasilitasi Organisasi Masyarakat, Hibah Organisasi Masyarakat serta pengawasan/Monitoring evaluasi ormas	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase penurunan penyalahgunaan narkoba	%	tad	10	
				Mengintensifkan penggunaan sosial-media untuk mengkampanyekan gerakan anti narkoba							
		Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif		Meningkatkan kerjasama dengan partai politik untuk melakukan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan, yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa	Penyelenggaraan Fasilitasi Organisasi Masyarakat, Hibah Organisasi Masyarakat serta pengawasan/Monitoring evaluasi ormas		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	tad	56	
		Meningkatnya persentase Kelurahan Tangguh Bencana		Menginisiasi dan memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Kelurahan Tangguh Bencana sebagai komponen ketahanan daerah	Inisiasi rancangan dan strategi penanggulangan bencana daerah	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Prosentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	**%**	100	100	**BPBD**
				Menurunkan Indeks Risiko Bencana daerah dengan berbagai teknologi dan tindakan mitigasi bencana			Prosentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	**%**	100	100	
							Prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	**%**	100	100	
							Prosentase Kecukupan Sarana dan Prasarana, peralatan pendukung penanggulangan bencana dan logistik	**%**	tad	40	
		Terjaganya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, damai, dan harmonis yang dilandasi rasa saling menhargai dan menghormati perbedaan baik sosial, budaya maupun pandangan politik		Meningkatkan fungsi Tim FKDM,Tim Kewaspadaan Dini.,Monev dan pengawasan Orang/lembaga asing	Penyelenggaranan Koordinasi Tim FKDM,Kewaspadaan Dini,Monev dan pengawasan Orang/Lembaga asing	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Peningkatan Konflik Sosial**	Persentase Penurunan Kejadian atau konflik sosial	%	10	50	**Bakesbangpol**

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	PERANGKAT DAERAH
									2022	2026	
11	**Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata**	Persentase wilayah dengan infrastruktur baik		Membangun, memelihara, dan meningkatkan berbagai sarana dan prasarana infrastruktur umum (fasilitas dan utilitas).	Peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi air limbah serta peningkatan pelayanannya	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Presentase rumah tangga dengan akses air minum	%	86,69	87,45	**DPU PR**
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Presentase rumah tangga dengan akses layanan pengolahan air limbah domestik	%	95,08	95,8	
					Peningkatan kinerja pelayanan sarana drainase dan irigasi dengan fokus pada rehabilitasi jaringan drainase dan pengairan yang rusak.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Prosentase jaringan drainase kondisi baik	%	75,51	79,51	
						PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	84,2	92	
					Peningkatan kemantapan jalan dengan fokus pada jalan dan jembatan dengan kondisi rusak berat.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Prosentase jalan yang menjadi kewenangan dalam SK jalan kondisi mantap	%	93,75	94,37	
							Prosentase jumlah jembatan kabupaten/kota dalam kondisi baik	%	93,38	100	
		Meningkatnya kualitas penataaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang		Meningkatkan layanan izin bangunan serta pengawasan kualitas bangunan dan lingkungannya dan memfasilitasi tenaga/usaha jasa konstruksi menjadi tenaga trampil, bersertifikat, dan paham aturan jasa konstruksi	Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan.	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Rasio kepatuhan IMB	%	75	80	
						PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	100	100	
						PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	75	75	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	96,51	97	
12	**Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan**	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Salatiga		Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup melalui regulasi	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup melalui regulasi	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	IKPLHD	Dokumen	1	1	**DLH**
							KLHS	Dokumen	0	0	
				Peningkatkan sarana prasarana penanganan, pengangkutan sampah	Peningkatan sarana prasarana penanganan, pengangkutan sampah	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Pemantauan Status Mutu Air	%	100	100	
							Persentase peningkatan sarana prasarana laboratorium	%	100	100	
							Presentase Konservasi Lahan	**%**	0	20	
							Persentase Konservasi Sumber Mata Air	**%**	0	35	
						PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase ruang terbuka hijau	%	16,18	17,5	
						PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase penyimpanan dan atau pengangkutan limbah B3 sesuai dengan ketentuan	%	NA	35	
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase kegiatan penegakan hukum lingkungan	%	100	100	
							Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persetujuan	%	39	30	
							Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	PERANGKAT DAERAH
									2022	2026	
							Persentase tersusunnya dokumen IGRK	%	100	100	
						PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah pernghargaan lingkungan hidup tingkat Kabupaten/kota	%	100	100	
							Persentase penerima penghargaan tingkat Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk penghargaan tingkat Provinsi	%	100	100	
							Peningkatan kapasitas Pemahaman Lingkungan	**%**	**0**	**50**	
						PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengangkutan Sampah	%	26	30	
							Persentase Penanganan Sampah	%	72	70	
							Persentase Pengangkutan Sampah	%	72	70	
		meningkatnya lalu lintas dan angkutan jalan yg tertib, lancar, nyaman dan		Meningkatkan kualitas pengelolaan transportasi melalui peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, penataan trayek, peningkatan	Peningkatan pelayanan perhubungan dengan perbaikan sarana dan prasarana transportasi.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	Persentase Rambu Rambu Terpasang	%	71	95	**Dishub**
							Persentase layanan angkutan darat	%	27,53	29	
13	**Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup**	Meningkatnya pengelolaan pertanahan		Penyelesaian sengketa tanah	Penertiban administrasi pertanahan	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah	%	100	100	
				Penyelenggaraan pendataan	Pendataan dan pemetaan bidang tanah	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase bidang tanah yang terdata dan terpetakan	%	100	100	
							Persentase data rupa bumi yang tersedia	%	100	100	
							Persentase pensertifikatan tanah hasil pengadaan, PSU, dan TPU	%	32,3	40	
						PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Cakupan ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	%	100	12	
							Persentase peningkatan penggunaan dan pemanfaatan tanah	%	0	100	
		Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat		Peningkatan Kualitas Rumah tidak layak huni	Penataan kawasan permukiman kumuh	**Program Pengembangan Perumahan**	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni korban bencana/relokasi kab/kota	%	NA	100	
							Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kab/kota	%	NA	100	
							Persentase peningkatan dokumen pengembangan perumahan	%	NA	100	**DINAS PKP**
		Meningkatnya kualitas lingkungan sehat (penuntasan kawasan kumuh)		Penataan lingkungan permukiman kumuh dengan penyediaan infrastruktur yang sesuai	Penataan kawasan permukiman kumuh	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	1,24	13,52	
							terfasilitasinya terbentuknya masyarakat atau kelompok pemelihara dan pemanfaat (KPP)	%	8,7	26,09	
							Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layah Huni)	%	8,2	6,84	
		Meningkatnya kualitas PSU lingkungan perumahan dan kawasan permukiman		Pembangunan dan pemeliharaan PSU perumahan	Penyediaan PSU yang memadai dan berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU yang berkelanjutan	%	28	65	
				Peningkatan Kualitas Rumah tidak layak huni			terfasilitasinya pengembangan atau perluasan TPU dan meningkatnya kapasitas TPU	%	16,18	18,88	

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	PERANGKAT DAERAH
									2022	2026	
							cakupan lingkungan permukiman yang sehat didukung PSU	%	5,52	5,82	

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 berdasarkan masing-masing urusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program berdasarkan masing-masing urusan selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Perincian program dan indikator kinerja program beserta kerangka pendanaan dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Salatiga Tahun 2023-2026

KODE	PROGRAM NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja								Kondisi Akhir RPD		PD Pengampu
				2023		2024		2025		2026				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1.1.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**													**DINAS PENDIDIKAN**
1.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	%			120.170.015.288		123.429.300.508		127.218.181.233		131.136.141.246		501.953.638.275	
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan		100	100		100		100		100		100		
1.1.2	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**				47.488.961.520		46.686.263.070		44.259.396.039		42.407.233.478		180.841.854.107	
	APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI/Paket A	%	113,46	100		100		100		100		100		
	APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs/Paket B	%	130,81	100		100		100		100		100		
	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,005	0,005		0,004		0,003		0,002		0,002		
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,44	0,43		0,42		0,41		0,4		0,4		
	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI	%	87,28	87,29		87,3		87,31		87,32		87,32		
	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs	%	97,7	97,71		97,72		97,73		97,74		97,74		
	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	Data Belum Tersedia	1,96		1,97		1,98		1,99		1,99		
	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen	%	Data Belum Tersedia	1,78		1,79		1,8		1,81		1,81		
	Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	Data Belum Tersedia	2,04		2,05		2,06		2,07		2,07		
	Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	Data Belum Tersedia	1,85		1,86		1,87		1,88		1,88		
	Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SD/MI	%	Data Belum Tersedia	20		25		30		35		35		
	Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SMP/MTs	%	Data Belum Tersedia	20		25		30		35		35		
	APK PAUD	%	38,33	38,34		38,35		38,36		38,37		38,37		
	Presentase Sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang	%	Data Belum Tersedia	0,12		0,18		0,24		0,3		0,3		
	Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik	%	87,33	87,34		87,35		87,36		87,37		87,37		
	Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik	%	Data Belum Tersedia	33,33		41,67		50		58,33		58,33		
1.1.3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**				174.577.221		196.331.078		142.099.933		121.257.807		634.266.039	
	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI	%	Data belum tersedia	20		20.10		20,20		20,30		20,30		
	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SMP/MTs	%	Data belum tersedia	16		17		18		19		19		
	Persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang PKBM	%	Data belum tersedia	50,00		58,33		66,67		75,00		75,00		
1.1.4	**PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN**				19.069.587.810		18.016.787.986		17.072.706.878		16.162.796.429		70.321.879.103	
	Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang TK/RA	%	Data belum tersedia	30		31		32		33		33		
	Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang SD	%	Data belum tersedia	40		41		42		43		43		
	Persentase Guru bersertifikat pendidik jenjang SMP	%	Data belum tersedia	50		51		52		53		53		
	Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang PAUD	%	84,95	84,96		84,97		84,98		84,99		84,99		
	Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SD	%	97,3	97,31		97,32		97,33		97,34		97,34		
	Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SMP	%	96,43	96,44		96,45		96,46		96,47		96,47		
1.1.5	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**				624.078.000		421.943.500		345.969.910		338.236.561		1.730.227.971	

KODE	PROGRAM / NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja						Kondisi Akhir RPD		PD Pengampu
				2023		2024		2025		2026				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Persentase TK/RA yang terakreditasi	%	86,09	86,10		86,11		86,12		86,13		86,13		
	Persentase Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat (PKBM) yang Terakreditasi	%	58,33	58,34		58,35		58,36		58,37		58,37		
	Persentase lembaga Kursus dan Pelatihan yang berijin	%	Data Belum Tersedia	28,57		30		32		34		34		
	Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SD/MI	%	Data Belum Tersedia	97		98,00		99		100,00		100,00		
	Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SMP/MTs	%	Data Belum Tersedia	97,00		98,00		99,00		100,00		100,00		
1.1.6	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**				95.183.361		105.663.858		137.456.007		103.874.477		442.177.703	
	Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SD/MI	%	Data belum tersedia	10		11		12		13		13		
	Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SMP/MTs	%	Data belum tersedia	10		11		12		13		13		
	Persentase PKBM yang sudah memasukkan pembelajaran Bahasa Jawa pada mata pelajaran yang diberikan ke siswa	%	Data Belum Tersedia	17		25		35		40		40		
1.2.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**													**DINAS KESEHATAN**
1.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**				228.142.414.412		232.352.025.000		231.685.269.500		232.749.993.500		924.929.702.412	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik	%	100	100		100		100		100		100		
	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit	%	84,88	85		85,5		86		86,5		86,5		
	Cost Recovery	%	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100		100		100		100		100		
1.2.2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				44.858.811.088		43.139.464.500		44.085.600.000		44.352.976.000		176.436.851.588	
	Angka Kematian balita (AKABA)	per 1.000 KH	13,75	13		12		11		10		10		
	Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR)	/100.000 pddk	191	130		135		140		145		145		
	Angka Penemuan Pneumonia Balita	%	30,23	54		55		56		57		57		
	Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk	1.000 penduduk	0,16	<1		< 1		< 1		< 1		< 1		
	Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar	%	0	26,1		30,4		34,8		39,1		39,1		
	Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	90	72		74		76		78		78		
	Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	%	100	100		100		100		100		100		
	Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	%	84,6	85		86		87		88		88		
	Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	%	73,7	75		77		78		80		80		
	Cakupan BIAS Campak Rubela	%	96	98		98		98		98		98		
	Cakupan BIAS DT/Td	%	97	98		98		98		98		98		
	Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	%	100	100		100		100		100		100		
	Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan	%	97,57	98		98		99		99		99		
	Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A	%	99,7	100		100		100		100		100		
	Cakupan kepesertaan JKN	%	91,36	100		100		100		100		100		
	Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	72,98	100		100		100		100		100		
	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	98,2	100		100		100		100		100		
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100	100		100		100		100		100		
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	97,53	100		100		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3)	%	99,3	100		100		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	%	70,88	100		100		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	73,52	100		100		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	%	77,09	100		100		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	%	33,43	100		100		100		100		100		

KODE	PROGRAM NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja								Kondisi Akhir RPD		PD Pengampu
				2023		2024		2025		2026				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	25,14	100		100		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	26,62	100		100		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	67,71	100		100		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	33,71	100		100		100		100		100		
	Cakupan pembinaan remaja di sekolah	%	100	100		100		100		100		100		
	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjut PIS PK	%	100	100		100		100		100		100		
	cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	%	100	100		100		100		100		100		
	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	%	100	100		100		100		100		100		
	Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	63,36	64		66		68		70		70		
	Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	93,17	80		81		82		83		83		
	Cakupan UCI kelurahan	%	100	100		100		100		100		100		
	Deteksi Dini Hepatitis	%	70	75		78		80		82		82		
	Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	92	95		95		95		95		95		
	Incident Rate DBD per 100.000 penduduk	100 rb penduduk	6	<10		<9		<8		<7		<7		
	Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	55	65		70		75		80		80		
	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan	%	78	82		83		84		85		85		
	Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	%	75	80		80		80		80		80		
	Pembentukan Posyandu Remaja	unit	0	12		18		24		30		30		
	Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)	kasus	2	2		3		4		5		5		
	Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)	%	4,76	4,5		4,3		4,1		4		4		
	Persentase Ibu hamil KEK	%	9,083367897	9		8		7		6		6		
	Persentase Ibu Hamil yang Anemia	%	12,32	12		11		10		9		9		
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan SIMPUS	%	100	100		100		100		100		100		
	Prevalensi Stunting pada Balita	%	11,84	10		9,8		9,8		9,6		9,6		
	Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	%	0 (tidak ada haji)	100		100		100		100		100		
	Prosentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart	%	94	100		100		100		100		100		
	Prosentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM	%	83,8	84		85		86		87		87		
	Prosentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM	%	76	82		83		84		85		85		
	Prosentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	%	75	100		100		100		100		100		
	Prosentase RS rujukan yang terakreditasi	%	50	66,67		66,67		83,33		83,33		83,33		
	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	0,396	0,397		0,399		0,401		0,402		0,402		
	Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam	%	100	100		100		100		100		100		
1.2.3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**				80.450.000		97.450.000		80.450.000		97.450.000		355.800.000	
	Persentase tenaga kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan sesuai kompetensinya	%	53	55		60		65		70		70		
1.2.4	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**				217.480.500		218.880.500		219.380.500		220.880.500		876.622.000	
	Prosentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan	%	53,33	56		57		58		59		59		
	Prosentase pangan IRT yang memenuhi syarat	%	78,78	82		84		86		88		88		
	Prosentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan	%	76,66	78		80		82		84		84		
	Prosentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, toko obat) yg memenuhi standart dan persyaratan perijinan	%	58,82	62		64		66		68		68		
	Cakupan TPM yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	91,11	87		88		89		90		90		
1.2.5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				2.118.500.000		1.376.850.000		1.488.200.000		1.602.600.000		6.586.150.000	
	Cakupan desa siaga strata mandiri	%	91	95,6		95,6		95,6		100		100		
	Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna	%	96,58	96,59		96,6		96,61		96,62		96,62		

KODE	PROGRAM / NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja 2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPD		PD Pengampu
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna	%	94,97	95,59		96,2		96,8		97,4		97,4		
	Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat	%	100	100		100		100		100		100		
	Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat	%	94,94	95,5		96,06		96,62		97,19		97,19		
	Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat	%	93,37	93,43		93,5		93,56		93,63		93,63		
1.3.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**													**DPUPR**
1.3.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				27.638.884.200		24.995.917.120		18.111.221.920		17.630.184.110		88.376.207.350	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	*76,63*	*78*		*79*		*80*		*81*		81		
1.3.2	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**				4.111.390.750		4.595.000.880		6.540.000.080		9.305.001.890		24.551.393.600	
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	*84,2*	*86*		*88*		*90*		*92*		92		
1.3.3	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**				*3.800.000.000*		*3.900.000.000*		*4.260.000.000*		*900.000.000*		12.860.000.000	
	Presentase rumah tangga dengan akses air minum	%	86,69	*86,89*		*87,09*		*87,29*		*87,45*		87,45		
1.3.5	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**				3.825.000.000		6.112.886.000		5.980.594.000		5.530.362.000		21.448.842.000	
	Presentase rumah tangga dengan akses layanan pengolahan air limbah domestik	%	*95,08*	*95,28*		*95,48*		*95,68*		*95,8*		95,8		
1.3.6	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**				6.018.609.250		5.640.000.000		5.900.000.000		6.140.000.000		23.698.609.250	
	Prosentase jaringan drainase kondisi baik	%	*75,51*	*76,51*		*77,51*		*78,51*		*79,51*		79,51		
1.3.8	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**				1.016.000.000		716.000.000		716.000.000		716.000.000		3.164.000.000	
	Rasio kepatuhan IMB	%	*75*	*80*		*80*		*80*		*80*		80		
1.3.9	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**				1.769.329.000		3.200.000.000		8.700.000.000		12.200.000.000		25.869.329.000	
	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	*100*	*100*		*100*		*100*		*100*		100		
1.3.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**				25.854.134.000		26.133.886.000		25.916.594.000		24.111.362.000		102.015.976.000	
	Prosentase jalan yang menjadi kewenangan dalam SK jalan kondisi mantap	%	*93,75*	*93,9*		*94,06*		*94,21*		*94,37*		94,37		
	Prosentase jumlah jembatan kabupaten/kota dalam kondisi baik	%	*93,38*	*95,58*		*97,05*		*98,52*		*100*		100		
1.3.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**				400.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		1.450.000.000	
	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	*75*	*75*		*75*		*75*		*75*		75		
1.3.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**				2.270.000.000		1.620.000.000		920.000.000		920.000.000		5.730.000.000	
	Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	*96,51*	*97*		*97*		*97*		*97*		97		
1.4.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**													**DPKP**
1.4.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**7.000.000.000**		**7.211.663.000**		**7.273.681.000**		**7.332.190.000**		28.817.534.000	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	100	90		90		90		90		90		
1.4.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**				**741.000.000**		**1.041.000.000**		**1.141.000.000**		**1.241.000.000**		4.164.000.000	**DINAS PKP**
	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni korban bencana/relokasi kab/kota	%	NA	0		33,33		66,67		100		100		
	Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kab/kota	%	NA	25		50		75		100		100		
	Persentase peningkatan dokumen pengembangan perumahan	%	NA	25		50		75		100		100		
1.4.3	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**				**3.513.000.000**		**3.375.800.000**		**3.376.600.000**		**3.230.000.000**		13.495.400.000	**DINAS PKP**
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	1,24	4,78		7,92		11,27		13,52		13,52		

KODE	PROGRAM NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja								Kondisi Akhir RPD		PD Pengampu
				2023		2024		2025		2026				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	terfasilitasinya terbentuknya masyarakat atau kelompok pemelihara dan pemanfaat (KPP)	%	8,7	13,04		17,39		21,74		26,09		26,09		
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layah Huni)	%	8,2	7,86		7,52		7,18		6,84		6,84		
1.4.5	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**				**2.552.868.000**		**2.252.087.000**		**2.200.169.000**		**2.252.260.000**		9.257.384.000	**DINAS PKP**
	cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU yang berkelanjutan	%	28	37		46		55		65		65		
	terfasilitasinya pengembangan atau perluasan TPU dan meningkatnya kapasitas TPU	%	16,18	17,26		17,8		18,34		18,88		18,88		
	cakupan lingkungan permukiman yang sehat didukung PSU	%	5,52	5,6		5,67		5,75		5,82		5,82		
1.5.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**													
1.5.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				10.009.384.000		10.236.295.400		10.105.495.400		10.137.600.000		40.488.774.800	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Satpol PP	%	87,89	88		88		88		88		88		
1.5.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**4.250.000.000**		**4.282.410.000**		**4.287.990.000**		**4.313.990.000**		17.134.390.000	**BPBD**
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPBD	Nilai	tad	85		86		87		88		89		
1.5.2	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				839.129.500		642.104.600		642.104.600		650.000.000		2.773.338.700	
	Prosentase Penegakan Perda dan Per Ka Da	%	94,36	95		96		97		99		99		**Satpol PP**
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100		100		100		100		100		
1.5.3	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**				**1.671.949.600**		**1.675.500.000**		**1.680.000.000**		**1.685.500.000**		6.712.949.600	**BPBD**
	Prosentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	%	100	100		100		100		100		100		
	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	%	100	100		100		100		100		100		
	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	%	100	100		100		100		100		100		
	Prosentase Kecukupan Sarana dan Prasarana, peralatan pendukung penanggulangan bencana dan logistik	%	tad	32		36		38,3		40		50		
1.5.4	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**				370.000.000		195.000.000		345.000.000		370.000.000		1.280.000.000	
	Presentase ketersediaan Sarana Prasarana Damkar yang memadai	%	64	65		66		67		70		70		
	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Kebakaran	%	64,16	66		67		68		70		70		
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100		100		100		100		100		
1.6.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**													
1.6.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				6.521.908.000		6.564.550.000		6.572.950.000		6.665.680.000		26.325.088.000	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88,02	89		89,5		90		90,5		90,5		
1.6.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**				646.000.000		649.000.000		651.000.000		660.000.000		2.606.000.000	**DINSOS**
	Persentase Terbentuknya Lembaga Puskesos	%	12.5	45,3		62,5		81,77		100		100		
	Persentase LKS/LKSA yang telah mengikuti Assesment	%	19,23	34,61		42,3		50		57,69		57,69		
	Persentase PSKS yang dibina	%	60	70		75		80		85		85		
1.6.4	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				911.000.000		916.000.000		918.000.000		931.000.000		3.676.000.000	
	Presentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100		100		100		100		100		
	Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100		100		100		100		100		

KODE	PROGRAM / NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja						Kondisi Akhir RPD		PD Pengampu
				2023		2024		2025		2026				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Presentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100		100		100		100		100		
	Presentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	100	100		100		100		100		100		
1.6.5	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**				2.376.000.000		2.390.000.000		2.394.000.000		2.428.000.000		9.588.000.000	
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	96,93	97		97,2		97,4		97,6		97,6		
	Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	%	93,3	94,5		95		95,5		96		96		
1.6.6	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**				254.000.000		255.000.000		256.000.000		259.000.000		1.024.000.000	
	Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100		100		100		100		100		
	Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	NA	100		100		100		100		100		
1.6.7	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**				101.000.000		101.000.000		102.000.000		103.000.000		407.000.000	
	Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	100	100		100		100		100		100		
2.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2.7.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**													
2.7.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				4.926.542.720		4.902.500.000		4.846.223.250		4.867.790.000		19.543.055.970	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87,48	87,98		88,48		88,98		89,48		89,48		
2.7.3	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**				767.040.000		770.000.000		770.000.000		770.000.000		3.077.040.000	
	Persentase Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	%	40	20		45		70		100		100		
	Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	%	0.03	0,03		0,03		0,04		0,04		0,04		
2.7.4	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**				89.308.000		122.000.000		150.000.000		151.000.000		512.308.000	
	Persentase Realisasi Kegiatan Bursa Tenaga Kerja	%	tad	57,14		71,43		85,71		100		100		
2.7.5	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**				132.110.000		142.110.000		150.000.000		150.000.000		574.220.000	
	Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	%	20	30		32		35		37		37		
	Prosentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	25	25		27		29		32		32		
2.8.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**													
2.8.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				6.294.776.000		6.400.160.000		6.409.160.000		6.426.160.000		25.530.256.000	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85,28	87		88		89		90		90		
2.8.2	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**				158.500.000		159.000.000		161.000.000		163.000.000		641.500.000	
	Persentase Kelembagaan PUG Aktif	%		100		100		100		100		100		
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	3,56	3,6		3,6		3,7		3,8		3,9		
	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	%		100		100		100		100		100		
	Persentase perempuan di lembaga legislatif	%	20	24		24		24		24		24		
2.8.3	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**				130.000.000,00		133.000.000,00		140.000.000,00		141.000.000,00		544.000.000	

KODE	PROGRAM / NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja								Kondisi Akhir RPD		PD Pengampu
				2023		2024		2025		2026				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani sesuai standart	%	100	100		100		100		100		100		
	Rasio Kekerasan terhadap perempuan	%	0,012	15,1426437		15,1426437		14,13313412		14,1331		13,12362454		
						100		100		100		100		
2.8.4	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**				450.000.000		460.000.000		470.000.000		480.000.000		1.860.000.000	
	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	25	25		25		50		75		100		
2.8.5	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**				15.000.000		15.000.000		16.000.000		16.500.000		62.500.000	
	Persentase Perangkat Daerah yang berkontribusi dalam sistem data gender dan anak	%	0	100		100		100		100		100		
2.8.6	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**				170.000.000		173.000.000		175.000.000		176.500.000		694.500.000	
	Persentase anak yang terlibat dalam kegiatan anak	%	0	57		59,48		61,77		64,06		66,35		
2.8.7	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**				145.000.000		145.000.000		147.000.000		148.000.000		585.000.000	
	Persentase anak korban kekerasan	%	0,037	0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		
2.9.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**													
2.9.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				11.555.708.500		11.555.708.500		11.555.708.500		11.555.708.500		46.222.834.000	**DISPANGTAN**
	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Nilai**	**85,318**	**85,836**		**86,354**		**86,872**		**87,39**		**346**		
2.9.2	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**				10.282.000		189.901.200		213.901.200		288.901.200		702.985.600	
	Penyediaan Infrastruktur Pangan	**%**	**0**	**0**		**20**		**30**		**30**		30		
2.9.3	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**				248.347.700		248.347.700		248.347.700		248.347.700		993.390.800	
	Ketersediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	%	60	70		80		90		100		100		
	Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER)	skor PoU	6,89	6,2		5,58		5,02		4,52		4,52		
2.9.4	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**				24.824.600		24.824.600		24.824.600		24.824.600		99.298.400	
	Persentase penanganan rumah tangga rawan pangan	%	6	7,14		8,89		10,20		10,74		10,74		
2.9.5	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**				160.000.000		176.000.000		193.600.000		212.960.000		742.560.000	
	Persentase Pangan segar aman	%	98	98	7,14	98	8,89	98	10,2	98	10,74	98		
2.10.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**													
2.10.4	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**				**49.972.710**		**49.972.710**		**49.972.710**		**49.972.710**		199.890.840	**DINAS PKP**
	Persentase penyelesaian sengketa tanah	%	100	25		50		75		100		100		
2.10.9	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**				**50.000.000**		**55.000.000**		**60.000.000**		**65.000.000**		230.000.000	**DINAS PKP**
	Persentase bidang tanah yang terdata dan terpetakan	%	100	40		75		100		100				
	Persentase data rupa bumi yang tersedia	%	100	25		50		75		100				
	Persentase pensertifikatan tanah hasil pengadaan, PSU, dan TPU	%	32,3	20		60		100		40				
2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**				**1.473.000.000**		**1.485.000.000**		**1.500.000.000**		**1.510.000.000**		5.968.000.000	**DINAS PKP**
	Cakupan ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	%	100	3		6		9		12		12		
	Persentase peningkatan penggunaan dan pemanfaatan tanah	%	0	25		50		75		100		100		
2.11.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**													
2.11.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**32.311.782.180**		**32.511.399.000**		**32.564.769.000**		**32.738.136.000**		130.126.086.180	**DINAS LH**
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80	82		83		84		85		85		

KODE	PROGRAM / NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja 2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPD		PD Pengampu
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.11.2	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**				**248.164.000**		**272.980.000**		**300.278.000**		**330.306.000**		1.151.728.000	**DINAS LH**
	IKPLHD	Dokumen	1	1		1		1		1		1		
	KLHS	Dokumen	0	0		0		1		0				
2.11.3	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**				**363.480.000**		**365.660.000**		**366.391.000**		**368.222.000**		1.463.753.000	**DINAS LH**
	Pemantauan Status Mutu Air	%	100	100		100		100		100		100		
	Persentase peningkatan sarana prasarana laboratorium	%	100	100		100		100		100		100		
	Presentase Konservasi Lahan	%	0	5		10		15		20		20		
	Persentase Konservasi Sumber Mata Air	%	0	10		20		30		35		35		
2.11.4	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**				**3.029.742.020**		**3.047.920.000**		**3.054.015.000**		**3.069.285.000**		12.200.962.020	**DINAS LH**
	Persentase ruang terbuka hijau	%	16,18	17,2		17,3		17,4		17,5		17,5		
2.11.5	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**				**128.500.000**		**129.271.000**		**129.529.000**		**130.176.000**		517.476.000	**DINAS LH**
	Persentase penyimpanan dan atau pengangkutan limbah B3 sesuai dengan ketentuan	%	NA	20		25		30		35		35		
2.11.6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**				**56.196.000**		**56.533.000**		**56.646.000**		**56.929.000**		226.304.000	**DINAS LH**
	Persentase kegiatan penegakan hukum lingkungan	%	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persetujuan	%	39	37		35		32		30		30		
	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100		100		100		100		100		
	Persentase tersusunnya dokumen IGRK	%	100	100		100		100		100		100		
2.11.8	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**				**90.000.000**		**90.540.000**		**90.721.000**		**91.174.000**		362.435.000	**DINAS LH**
	Persentase penghargaan lingkungan tingkat kabupaten/kota	%	100	100		100		100		100		100		
	Persentase penerima penghargaan tingkat Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk penghargaan tingkat Provinsi	%	100	100		100		100		100		100		
	Peningkatan Kapasitas Pemahaman Lingkungan Hidup	%	0	20		30		40		50		50		
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**				**1.782.664.400**		**1.960.900.000**		**2.157.000.000**		**2.372.700.000**		8.273.264.400	**DINAS LH**
	Persentase Pengurangan Sampah	%	26	27		28		30		30		30		
	Persentase Penanganan Sampah	%	72	72		71		70		70		70		
	Persentase Pengangkutan Sampah	%	72	72		71		70		70		70		
2.12.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**													
2.12.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				5.354.435.100		5.355.246.100		5.409.426.000		5.449.826.100		21.568.933.300	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	86	88		88,3		88,6		88,9		88,9		
2.12.2	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**				523.293.700		546.513.900		515.074.000		499.173.900		2.084.055.500	
	Cakupan penduduk perekaman KTP-el	%	95,53	95,6		95,9		96,2		96,5		96,5		Disdukcapil
	Persentase penerbitan KIA 0-5 th	%	79,01	79520		79,5		79,8		80		80		
2.12.3	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**				77.322.000		77.322.000		77.322.000		77.322.000		309.288.000	
	Persentase penerbitan akta kelahiran 0-5 th	%	98,67	98,7		98,8		98,9		99		99		Disdukcapil
	Persentase Akta Perkawinan non muslim	%	100	100		100		100		100		100		
2.12.4	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**				60.898.000		73.398.000		60.898.000		68.398.000		263.592.000	
	Ketersediaan database kependudukan	%	100	100		100		100		100		100		Disdukcapil

KODE	PROGRAM / NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja								Kondisi Akhir RPD		PD Pengampu
				2023		2024		2025		2026				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.14.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**													
2.14.2	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**				1.369.200.000		374.000.000		379.000.000		381.000.000		2.503.200.000	
	Cakupan Pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (penyusunan Grand Design, Profil/Parameter dan Proyeksi Penduduk)	%	**0**	53		66		79		90		90		
	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15-19 thn (ASVFR)	%	**0,92**	1,85		1,85		1,8		1,75		1,75		
	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	%	**100**	100		100		100		100		100		
	Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun	%	**0,39**	2,5		2,3		2,1		2		2		
	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	**Tahun**	**27**	21,9		22		22		22,1		22,1		
2.14.3	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**				1.144.294.500		1.157.500.000		1.163.500.000		1.168.000.000		4.633.294.500	
	Rasio akseptor KB baru	%	**87,16**	70		70		72		73		73		
	Cakupan peserta KB aktif	%	**71,9**	80		82		83		84		84		
	Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)	**rasio**	**2,3:1**	1:2		1:2		1:2		1:2		1:2		
	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	**71,2**	78		78,1		78,2		78,3		78,3		
	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	%	**14,2**	15		14		13		12		12		
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	**65,85**	25,11		25,93		26,75		27,57		27,57		
	Persentase Fasilitas Kesehatan yang siap melayani KB MKJP	%	**100**	85		87		87		90		90		
2.14.4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**				899.146.300		895.810.000		885.990.000		898.990.000		3.579.936.300	
	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	**rasio**	**1:2**	1:2		1:2		1:2		1:2		1:2		
	Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA)	%	**89**	90		90		90		90		90		
	Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun	%	**0,29**	2		1,9		1,8		1,7		1,7		
	Cakupan Kader BKB yang Terlatih	%	**66**	80		83		85		87		87		
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB	%	**82**	80		80		80		82		82		
	Persentase Baduta Stunting	%	**0**	28		26		24		22		22		
2.15.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**													
2.15.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				5.944.124.000		5.945.000.000		6.308.124.000		6.308.124.000		24.505.372.000	Dinas Perhubungan
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	84,15	84,2		84,23		84,28		84,33		84,33		
2.15.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**				1.011.816.800		1.053.180.000		796.626.000		834.126.000		3.695.748.800	
	Persentase Rambu Rambu Terpasang	%	71	77		83		89		95		95		
	Persentase layanan angkutan darat	%	27,53	27,53		27,53		29		29		29		
2.16.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**													
2.16.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				5.699.001.800		5.700.501.000		5.702.000.000		5.720.000.000		22.821.502.800	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	76,61	79		82		85		88,31		88,31		
2.16.2	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**				953.305.000		965.300.000		966.300.000		970.000.000		3.854.905.000	
	Prosentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	%	**90**	**92**		**94**		**96**		**98**		98		
2.16.3	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**				3.563.434.000		3.602.979.000		3.612.000.000		3.635.000.000		14.413.413.000	
	Prosentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100		100		100		100		100		

KODE	PROGRAM / NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja								Kondisi Akhir RPD		PD Pengampu
				2023		2024		2025		2026				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Prosentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	95	95		97		98		100		100		
2.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
2.17.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.942.959.200		3.972.070.000		3.980.230.000		4.005.730.000		15.900.989.200	Dinas Koperasi, UKM
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,37	83,39		83,40		83,42		83,45		83,45		
2.17.3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				47.000.000		47.000.000		47.000.000		47.000.000		188.000.000	
	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	50	51%		52%		53%		54%		54%		
2.17.4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000		104.000.000	
	Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	%	21,93	26,32		30.7		35,09		39,47		39,47		
2.17.5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				253.000.000		253.000.000		253.000.000		253.000.000		1.012.000.000	
	Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan	%	36,34	36,34		37,59		38,85		40,1		40,1		
2.17.6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		380.000.000	
	Persentase Akses pasar anggota koperasi	%	10	25		50		75		100		100		
2.17.7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		500.000.000	
	Persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan	%	15	18		21		23		24		24		
2.17.8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				305.000.000		305.000.000		305.000.000		305.000.000		1.220.000.000	
	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	%	30,21	30,64		30,85		31,06		31,28		31,28		
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
2.19.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.274.397.000		4.254.200.000		4.260.052.000		4.295.052.000		17.083.701.000	DPMPTSP
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86	87		88		89		90		90		
2.18.2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				81.500.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		336.500.000	
	Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN	Rupiah (Milyar)	440,9	484,99		533,49		586,84		645,52		645,52		
2.18.3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				495.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		1.995.000.000	
	Prosentase Kenaikan Jumlah minat Investasi berskala nasional (PMA dan PMDN)	%	10	10		10		10		10		10		
2.18.4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		800.000.000	
	Prosentase perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan	%	90	91		92		93		94		94		
2.18.5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				489.055.000		525.000.000		525.000.000		525.000.000		2.064.055.000	
	Prosentase Kenaikan Jumlah LKPM yang masuk	%	10	10		11		12		13		13		
2.18.6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				100.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		460.000.000	
	Prosentase kenaikan perizinan dan non perizinan yang dikelola	%	10	10		10		10		10		10		
2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
2.19.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.814.990.000		5.014.990.000		5.016.910.000		5.095.410.000		19.942.300.000	DISPORA
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	76,87	77		80		80		82		82		

KODE	PROGRAM / NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja								Kondisi Akhir RPD		PD Pengampu
				2023		2024		2025		2026				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.19.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**				1.649.900.400		1.290.000.000		1.290.000.000		1.290.000.000		5.519.900.400	
	Prosentase Pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan	%	2,45	5		5		5		5		5		
2.19.3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**				5.513.000.000		5.701.100.000		5.721.100.000		5.711.100.000		22.646.300.000	
	Prosentase Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga	%	22,86	25		25		27		30		30		
2.19.4	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**				900.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		3.750.000.000	
	Prosentase fasilitasi pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	60	60		65		70		75		75		
2.20.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**													
2.20.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**				120.236.000		121.500.000		122.236.000		125.000.000		488.972.000	**DISKOMINFO**
	Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	75	80		80		85		90		90		
	Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	75	80		80		85		90		90		
2.21.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**													
2.21.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**				379.932.000		390.700.000		396.684.000		406.220.000		1.573.536.000	**DISKOMINFO**
	Prosentase tingkat kematangan daerah dalam penyelenggaraan keamanan informasi	%	62,6	65		70		73		75		75		
2.22.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**													
2.22.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				5.430.923.270		5.519.601.770		7.993.967.300		5.680.386.500		24.624.878.840	DISBUDPAR
	Skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	%	82,12	83		84		85		86		86		
2.22.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**				835.433.500		769.323.930		1.019.334.330		1.075.000.000		3.699.091.760	
	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	%	**16,2**	**20**		**25**		**30**		**35**		35		
2.22.3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**				70.730.500		80.000.000		124.250.000		600.000.000		874.980.500	
	Persentase SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi,standarisasi dan sertifikasi serta peningkatan kapasitas tata kelola)	%	12,5	25		50		75		100		100		
2.22.4	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**				194.535.400		227.267.700		217.267.700		510.000.000		1.149.070.800	
	Prosentase kajian sejarah	%	12,5	25		50		75		100		100		
2.22.5	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**				40.000.000		148.000.000		194.500.000		245.000.000		627.500.000	
	Persentase Penetapan Cagar Budaya	%	7	7		14		21		28		28		
2.22.6	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**				6.000.000		110.000.000		160.500.000		180.000.000		456.500.000	
	Persentase penambahan jumlah koleksi museum	%	5,3	5,3		5		4,8		4,5		4,5		
2.23.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**													**DINPERSIP**
2.23.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				5.868.327.576		6.167.279.971		6.298.185.000		6.110.561.825		24.444.354.372	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,71	82,21		82,71		83,21		83,71				
2.23.2	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**				774.451.200		897.860.774		969.970.352		995.060.925		3.637.343.251	
	nilai tingkat kegemaran membaca	nilai	79,83	81,83		83,83		85,83		87,83		87,83		
2.23.3	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**				-		50.000.000		150.000.000		200.000.000		400.000.000	
	Persentase koleksi nasional dan kuno yg dilestarikan	%	0	0		100		100		100		100		
2.24.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**													**DINPERSIP**

KODE	PROGRAM NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja						Kondisi Akhir RPD		PD Pengampu
				2023		2024		2025		2026				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.24.2	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**				432.468.900		436.948.463		478.495.308		508.254.908		1.856.167.579	
	Persentase perangkat daerah yg mengelola arsip secara baku	%	80	82		84		86		88		88		
2.24.3	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**				5.000.000		66.500.000		103.000.000		145.500.000		490.000.000	
	Persentase jumlah arsip yang di selamatkan	%	10	20		30		40		50		50		
2.24.4	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**				-		1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000	
	Persentase peningkatan penguna atau pengunjung arsip	%	0	100		100		100		100		100		
3.	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3.25.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**													**DISPANGTAN**
3.25.4	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**				248.956.000		248.956.000		248.956.000		248.956.000		995.824.000	
	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	%	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	%	35	35		35		35		35		35		
3.25.6	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**				27.214.900		27.214.900		27.214.900		27.214.900		108.859.600	
	Cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan	%	100	100		100		100		100				
	Persentase kelompok kelompok pengolah dan pemasar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya ikan yang Baik (CBIB)	%	35	35		35		35		35				
3.26.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**													**DISBUDPAR**
3.26.2	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**				5.166.085.000		5.550.000.000		2.621.000.000		3.272.503.500		16.609.588.500	
	Persentase obyek wisata yang ditingkatkan	%	100	100		100		100		100		100		
3.26.3	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**				155.678.330		165.000.000		130.000.000		345.000.000		795.678.330	
	Persentase fasilitasi pemasaran pariwisata	%	100	100		100		100		100		100		
3.26.4	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**				364.544.000		253.000.000		340.000.000		1.040.000.000		1.997.544.000	
	Persentase pengelolaan ekonomi kreatif	%	100	100		100		100		100		100		
3.26.5	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**				1.083.956.400		701.316.600		745.570.670		670.000.000		3.200.843.670	
	Persentase Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	60	60		70		85		100		100		
3.27.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**													**DISPANGTAN**
3.27.2	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**				622.876.490		622.876.490		622.876.490		622.876.490		2.491.505.960	
	Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian	%	70	70		75		75		75		75		
3.27.3	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**				737.082.000		737.082.000		737.082.000		737.082.000		2.948.328.000	
	Pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian	%	70	70		75		75		75		75		
3.27.4	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**				111.484.000		111.484.000		111.484.000		111.484.000		445.936.000	
	Mortalitas hewan/ternak akibat penyakit zoonosis	%	0	0		0		0		0				
3.27.5	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**				240.470.900		240.470.900		240.470.900		240.470.900		961.883.600	
	Persentase kejadian bencana pertanian	%	0	0		0		0		0				
3.27.7	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**				128.661.000		128.661.000		128.661.000		128.661.000		514.644.000	
	Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani													
	- Pemula	%	44	44		48,4		53,24		58,56		58,56		
	- Lanjut	%	44	44		48,4		53,24		58,56		58,56		
	- Madya	%	11,5	11,5		12,65		13,92		15,31		15,31		
	- Utama	%	1,95	1,95		2,15		2,36		2,6		2,6		
3.30.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**													**DISDAG**

KODE	PROGRAM NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja								Kondisi Akhir RPD		PD Pengampu
				2023		2024		2025		2026				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.30.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.955.880.000		11.028.500.000		11.044.500.000		11.074.500.000		44.103.380.000	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	84,03	84,07		84,1		84,15		84,2		84,2		
3.30.2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				9.000.000		12.000.000		15.000.000		18.000.000		54.000.000	
	Prosentase jumlah perijinan yang dilegalitas terhadap jumlah pelaku usaha perdagangan	%	10	10		15		20		25		25		
3.30.3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				2.860.000.000		2.867.000.000		2.868.000.000		2.907.000.000		11.502.000.000	
	Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar.	%	80	85		90		95		100		100		
	Persentase kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina	%	96	75		80		85		90		90		
	Persentase kelompok PKL yang dibina	%	21	40		44		51		71		71		
	Persentase PKL yang ditata terhadap jumlah total PKL	%	21	24		29		34		44		44		
	Persentase PKL yang menempati lokasi peruntukan terhadap jumlah PKL	%	6	16		26		36		46		46		
3.30.4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				55.000.000		55.000.000		56.000.000		56.000.000		222.000.000	
	Prosentase penerima pupuk bersubsidi terhadap pengguna pupuk	%	0	100		100		100		100		100		
	Ketesediaan infromasi pasokan, harga dan akses pangan daerah	komoditi	26	26		26		26		26		26		
3.30.5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				150.000.000		151.000.000		152.000.000		153.000.000		606.000.000	
	Prosentase produk unggulan terhadap jumlah produk di Kota Salatiga	%	50	60		70		80		90		90		
3.30.6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				70.000.000		72.000.000		74.000.000		76.000.000		292.000.000	
	Prosentase Alat UTTP dan perlengkapannya di wilayah Kota Salatiga yang ditera ulang dan bertanda tera sah	%	70	70		80		90		100		100		
3.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													DISPERINAKER
3.31.2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				801.380.000		862.000.000		871.067.000		876.000.000		3.410.447.000	
	Persentase Industri Kota Salatiga yang berkembang	%	0,3	0,19		0,38		0,56		0,75		0,75		
3.31.3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA				20.000.000		40.000.000		60.000.000		62.000.000		182.000.000	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	NA	25		50		75		100		100		
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	NA	0,7		0,8		0,9		1		1		
3.31.4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				20.000.000		22.000.000		25.000.000		32.000.000		99.000.000	
	Persentase usaha industri yang memiliki akun SIINAS dan melaporkan data industri	%	NA	4,7		5,1		5,6		6		6		
3.32.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI													DISPERINAKER
3.32.3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				43.824.000		43.000.000		43.000.000		43.000.000		172.824.000	
	Persentase Pelaksanaan Proses Transmigrasi	%	100	100		100		100		100		100		
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
36895	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**27.287.731.000**		**27.301.280.000**		**27.313.420.000**		**27.341.190.000**		**109.243.621.000**	

KODE	PROGRAM / NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja								Kondisi Akhir RPD		PD Pengampu
				2023		2024		2025		2026				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Cakupan koordinasi dan fasilitasi bidang keprotokolan dan kehumasan yang berkualitas	%	98	100		100		100		100		100		Bag. Prokompin
	Persentase kegiatan Administrasi Umum yang berhasil dikoordinasikan dan difasilitasi	%	NA	100		100		100		100		100		Bag. Umum
.	Cakupan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100		Bag. Pembangunan
37260	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**				**3.260.500.000**		**3.260.500.000**		**3.305.000.000**		**3.354.000.000**		**13.180.000.000**	
	Cakupan Koordinasi Administrasi Pemerintahan	%	100	100		100		100		100		100		Bag. Pemerintahan
	Cakupan Koordinasi Bidang Administrasi Kewilayahan	%	100	100		100		100		100		100		
	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Daerah	%	83	95		95		95		95		95		
	Skor LPPD	Nilai	NA	3,1		3,1		3,1		3,1		3,1		
	Ketepatan waktu penyampaian LKPJ (30 maret)	%	100	100		100		100		100		100		
	Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Hukum	%	NA	100		100		100		100		100		Bag. Hukum
	Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	94%	100		100		100		100		100		Bag. Kesra
37625	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**				**2.915.484.000**		**2.916.000.000**		**2.916.000.000**		**2.921.000.000**		**11.668.484.000**	
	Cakupan Koordinasi Program Perekonomian dan Pembangunan	%	100	100		100		100		100		100		Bag. Perekonomian
	Cakupan Koordinasi OPD Pengampu DBHCHT	%	100	100		100		100		100		100		
	Cakupan Koordinasi dan Pembinaan BMUD/BLUD	%	100	100		100		100		100		100		
.	Cakupan Koordinasi bidang Lingkungan Hidup dan SDA	%	100	100		100		100,00		100		100		
	Cakupan Koordinasi POK	%	100	100		100		100		100		100		Bag. Pembangunan
	Persentase Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan	%	83,73	83,73		83,82		84,00		84,15		84,15		Bagian PBJ
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**													
4.2.1	**PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA**				26.415.000.000		26.415.000.000		26.515.000.000		27.015.000.000		106.360.000.000	
	Tingkat kepuasan DPRD dalam fasilitasi pelayanan kesekretariatan	%	70	75		80		85		90		90		Sekretariat DPRD
4.2.2	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**				**17.964.000.000**		**18.024.000.000**		**19.025.255.000**		**20.035.000.000**		75.048.255.000	
	Cakupan fasilitasi Fungsi Legislasi	%	100	100		100		100		100		100		Sekretariat DPRD
	Cakupan fasilitasi fungsi Penganggaran	%	100	100		100		100		100		100		Sekretariat DPRD
	Cakupan fasilitasi fungsi Pengawasan	%	100	100		100		100		100		100		Sekretariat DPRD
5.	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5.01	**PERENCANAAN**													**BAPPEDA**
5.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				6.546.399.000		7.048.415.000		7.751.507.000		8.208.905.000		29.555.226.000	**BAPPEDA**
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81,31	81,50		82		82,5		83		83		
5.1.2	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**				1.556.054.000		1.267.222.000		863.950.000		604.201.000		4.291.427.000	**BAPPEDA**
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	%	46,67	80		82		85		90		90		
5.1.3	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**				896.350.000		751.100.000		505.250.000		375.200.000		2.527.900.000	**BAPPEDA**
	Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Kesra	%	100	80		83		87		90		90		
	Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Ekbang	%	100	80		83		87		90		90		
5.02	**KEUANGAN**													**BPKPD**
5.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				14.618.435.400		14.628.437.000		14.654.597.000		14.802.597.000		58.704.066.400	BPKPD
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	79,15	80,50		81		81,50		82		82		
5.2.2	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**				4.444.383.000		4.444.383.000		4.444.383.000		4.444.383.000		17.777.532.000	BPKPD
	Persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%		20,2		20,2		20,2		20,2		20,2		

KODE	PROGRAM NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja								Kondisi Akhir RPD		PD Pengampu
				2023		2024		2025		2026				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Persentase belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	%		84,82		84,82		84,82		84,82		84,82		
	Budget execution:deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%		97,78		97,78		97,78		97,78		97,78		
	Cash managenent (Persentase anggaran)	%		15,07		15,07		15,07		15,07		15,07		
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%		100		100		100		100		100		
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%		100		100		100		100		100		
5.2.3	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**				1.349.000.000		1.349.000.000		1.349.000.000		1.349.000.000		5.396.000.000	BPKPD
	Asset Management	Laporan	4	4		4		4		4		4		
5.2.4	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				926.000.000		951.000.000		961.000.000		926.000.000		3.764.000.000	BPKPD
	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	100	100		100		100		100		100		
5.03	**KEPEGAWAIAN**													**BKPSDM**
5.3.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**				6.366.542.400		6.393.620.000		6.406.620.000		6.491.620.000		25.658.402.400	**BKPSDM**
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,39	81,60		82,20		83,50		85,20		85,20		
5.3.2	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**				1.086.512.000		1.014.000.000		1.102.810.000		1.014.000.000		4.217.322.000	**BKPSDM**
	Persentase PNS yang melanjutkan Pendidikan	%	4.94	1.47		1.47		1.47		1.47		1.47		
	Persentase PNS yang mengikuti assesment	%	5.48	10		10		10		10		10,00		
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	227.25	235,00		240,00		250,00		250,00		250,00		
	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	%	14.38	25.16		24.56		23.96		23.96		23.96		
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	90.83	93,00		95,00		100,00		100,00		100,00		
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**													**BKPSDM**
5.4.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**				1.664.868.000		1.765.670.000		1.679.380.000		1.731.690.000		6.841.608.000	**BKPSDM**
	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis	%	13,89	4,15		3,09		4,38		2,94		2,94		
	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial dan Fungsional	%	6,89	13,98		7,01		6,24		6,21		6,21		
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**													**BAPPEDA**
5.5.2	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**				119.119.000		106.553.000		68.103.000		48.784.000		342.559.000	**BAPPEDA**
	Persentase terfasilitasinya inovasi masyarakat daerah.	%	0	17		28,57		37,50		44,44		44,44		
6.	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**													
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**													**INSPEKTORAT DAERAH**
6.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				7.184.936.000		7.195.600.000		7.204.400.000		7.213.400.000		28.798.336.000	INSPEKTORAT DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	77	78		80		82		84		84,00		
6.1.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**				65.000.000		70.000.000		71.000.000		75.000.000		281.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	%	NA	79		80		81		82		82,00		
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	%	NA	87		88		89		90		90,00		
	Persentase Jumlah OPD Meningkat Nilai Evaluasi SAKIP	%	NA	30		45		60		75		75,00		
6.1.3	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**				270.000.000		300.000.000		303.000.000		330.000.000		1.203.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	Nilai MCP Korsupgah KPK	%	82	83		84		85		86		86,00		
7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**													

KODE	PROGRAM NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja								Kondisi Akhir RPD		PD Pengampu
				2023		2024		2025		2026				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01	KECAMATAN													
	KECAMATAN SIDOREJO													
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.300.000.000		10.363.161.000		10.381.482.000		10.438.772.000		41.483.415.000	
	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	94,85	100		100		100		100		100		
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				85.000.000		85.510.000		85.646.000		86.000.000		342.156.000	KECAMATAN SIDOREJO
	Prosentase Peningkatan Skor IKM	%	0,72	0,82		0,92		1		1,12		1,12		
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				8.293.840.000		8.343.603.000		8.356.952.000		8.398.700.000		33.393.095.000	KECAMATAN SIDOREJO
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	30	40		45		50		55		60		
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				12.000.000		12.072.000		12.091.000		12.150.000		48.313.000	KECAMATAN SIDOREJO
	Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	NA	100		100		100		100		100		
	Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	NA	100		100		100		100		100		
7.1.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				109.000.000		109.654.000		109.829.000		110.378.000		438.861.000	KECAMATAN SIDOREJO
	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP Kec. Sidorejo	%	93,51	93,52		93,53		93,54		93,55		93,55		
	KECAMATAN ARGOMULYO													
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.709.450.000		11.780.395.000		12.958.435.000		14.254.279.000		49.702.559.000	
	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	97,31	100		100		100		100		100		
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				50.000.000		56.000.000		62.000.000		68.000.000		236.000.000	KECAMATAN ARGOMULYO
	Prosentase Peningkatan Skor IKM	%	1,4	1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				8.017.388.000		7.000.815.000		5.793.255.000		4.536.411.000		25.347.869.000	KECAMATAN ARGOMULYO
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	30	40		45		50		55		55		
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				55.000.000		60.500.000		66.500.000		73.000.000		255.000.000	KECAMATAN ARGOMULYO
	Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	NA	100		100		100		100		100		
	Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	NA	100		100		100		100		100		
7.1.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		1.300.000.000	KECAMATAN ARGOMULYO
	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP Kec. Argomulyo	%	73,27	73,29		73,35		73,37		74		74		
	KECAMATAN TINGKIR													
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.638.000.000		12.648.000.000		12.664.000.000		12.690.000.000		50.640.000.000	
	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100		100		100		100		100		
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				80.000.000		85.000.000		90.000.000		95.000.000		350.000.000	KECAMATAN TINGKIR
	Prosentase Peningkatan Skor IKM	%	0,83	0,83		0,85		0,9		0,95		0,95		
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				7.047.830.000		7.053.270.000		7.060.030.000		7.128.530.000		28.289.660.000	KECAMATAN TINGKIR
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	30	40		50		50		55		55		
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				12.000.000		13.000.000		14.000.000		15.000.000		54.000.000	KECAMATAN TINGKIR
	Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	NA	100		100		100		100		100		

KODE	PROGRAM / NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja 2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPD		PD Pengampu
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	NA	100		100		100		100		100		
7.1.6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**150.000.000**		**155.000.000**		**160.000.000**		**165.000.000**		630.000.000	**KECAMATAN TINGKIR**
	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP Kec. Tingkir	%	95.63	71		72		73		74		74		
	KECAMATAN SIDOMUKTI													
7.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**8.376.757.000**		**8.600.000.000**		**8.600.000.000**		**8.650.000.000**		34.226.757.000	
	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	96,71	96,9		97		97,5		97,8		100		
7.1.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**76.500.000**		**102.055.000**		**105.000.000**		**105.000.000**		388.555.000	**KECAMATAN SIDOMUKTI**
	Prosentase Peningkatan Skor IKM	%	4,88	0,85		0,91		1		1,1		1,1		
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**5.737.621.000**		**5.534.585.000**		**5.555.960.000**		**5.581.960.000**		22.410.126.000	**KECAMATAN SIDOMUKTI**
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	40	50		60		64		65		65		
7.1.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**12.000.000**		**13.000.000**		**13.000.000**		**16.000.000**		54.000.000	**KECAMATAN SIDOMUKTI**
	Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	NA	100		100		100		100		100		
	Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	NA	100		100		100		100		100		
7.1.6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**85.000.000**		**125.000.000**		**125.000.000**		**125.000.000**		460.000.000	**KECAMATAN SIDOMUKTI**
	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP Kec. Sidomukti	%	84,96	85		85,05		85,1		85,15		85,15		
8.	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**													
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**													
8.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				5.372.780.000		5.409.413.836		5.427.780.000		5.457.780.000		21.667.753.836	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	83,9	84,75		84,75		85		85		85		
8.1.2	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**				178.000.000		183.000.000		201.500.000		202.000.000		764.500.000	
	Prosentase Pemahaman Masyarakat terhadap Nilai nilai Pancasila	%	data belum tersedia	60		65		70		75		75		
8.1.3	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**				848.043.964		854.543.964		761.043.964		761.043.964		3.224.675.856	**KESBANG**
	Persentase pendidikan Politik yang dilaksanakan	%	data belum tersedia	100		100		100		100		100		
8.1.4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**				1.035.141.236		1.035.419.700		1.098.906.036		1.096.925.408		4.266.392.380	**KESBANG**
	Prosentase Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan	%	37.5	40		42,5		45		47,5		47,5		
8.1.5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**				340.227.000		340.699.000		342.200.000		342.200.000		1.365.326.000	**KESBANG**
	prosentase penurunan penyalahgunaan narkoba	%	data belum tersedia	4		6		8		10		10		
	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	data belum tersedia	50		52		54		56		56		
8.1.6	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**				779.735.000		782.793.500		789.000.000		805.980.628		3.157.509.128	**KESBANG**
	Prosentase Penurunan Kejadian atau konflik sosial	%	10	10		25		35		50		50		

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dapat dicapai. Indikator Kinerja Utama secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Bab V RPD. IKU tersebut berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja sasaran berkenaan usai penetapan program prioritas. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Salatiga disampaikan melalui Tabel 8.1.

Sementara itu indikator kinerja dari setiap aspek kesejahteraan masyarakat, daya saing dan layanan umum serta fokus menurut bidang urusan terhadap capaian penyelenggaran urusan pemerintahan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian indikator kinerja berdasarkan masing-masing urusan pembangunan. Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya berdasarkan urusan penyelenggaran pemerintahan disajikan dalam Tabel 8.2.

Terkait indikator kinerja untuk urusan Lingkungan Hidup Tahun dan target capaian 2023-2026 dapat diberikan beberapa uraian penjelasan sebagai berikut :

1. Dasar perhitungan IKLH baru mengacu pada Permen LHK no 27 Tahun 2021
2. Dari dasar perhitungan baru tersebut, nilai capaian IKLH yang mengacu pada dasar tersebut adalah capaian IKLH tahun 2021, sehingga capaian IKLH Tahun 2021 menjadi acuan dan dasar dalam penentuan target capaian IKLH tahun selanjutnya.
3. Dari capaian yang sudah ada di tahun 2017 – 2021 diperoleh tren peningkatan/ penurunan poin yang mempengaruhi target 2023-2026 sebagai berikut :
    a. IKA : Dari capaian tahun berjalan, erdapat tren penurunan nilai + 0,466 poin, sehingga target tahun 2023 menurun daeri nilai acuan (42,50) menjadi 41,20 , namun dengan peningkatan program pengendalian dan pencegahan pencemaran tahun 2022/2023, diharapkan ada peningkatan capaian ada tahun berikutnya. Rata-rata peningkatan IKA tahun berjalan adalah 0,20, sehingga target 2024-2026 meningkat 0,20 poin dari target tahun 2023.

b. IKU : Dari rata-rata peningkatan capaian IKU tahun berjalan (0,20), maka ditetapkan target 2023-2026 mengacu pada nilai acuan (79,80) dengan penambahan rata-rata 0,20.
c. IKL : Capaian IKL mengalami tren menurun dengan rata-rata 0,21, namun diharapkan Dinas Lingkungan Hidup dapat mempertahankan nilai capaian IKL, sehingga ditetapkan nilai IKL dari acuan (47,21 – 0,21) = 47.
d. IKLH : Target IKLH menyesuaikan dengan target IKA, IKU, dan IKL.

Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja				Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	Rata-rata Lama Sekolah	$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke} - i)$ dengan: P_{15+} = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas Lama sekolah penduduk ke-i = a. Tidak pernah sekolah = 0 b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1 c. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1 d. Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1	Tahun	10.66	10.66	10.67	10.68	10.69	10.70	10.70
2	Harapan Lama Sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$ HLSta = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t Eti = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia (a, a + 1, ..., n) FK = Faktor koreksi pesantren	Tahun	15.42	15.42	15.43	15.44	15.45	15.46	15.46

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja				Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
3	Indeks Literasi Masyarakat	Indek yang diukur dari kemampuan : • Membaca • Bicara • Menulis • Memahami bacaan • Eksplorasi pengetahuan • Transformasi menjadi pengetahuan • Transformasi menjadi produk/jasa	Nilai	51.56	NA	52.06	52.56	52.76	53.26	53.26
4	Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	**Juml cagar budaya,sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi,dikembangkan dan dimanfaatkan** **_____X100%JJml seluruh cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang didata**	%	15.5	15.5	19	30	41	52	52
5	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Jumlah Medali	23	23	15	30	16	16	16
6	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	$\frac{\text{Jumlah wirausaha muda}}{\text{Jumlah seluruh wirausaha}} \text{x100\%} + \frac{\text{Jumlah organisasi pemuda yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh organisasi pemuda}} \text{x100\%}$ / 2	%	20.59	20.59	20.59	20.59	21	21	21

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja				Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
7	Angka Harapan Hidup	Angka Perkiraan lama Hidup Rata-Rata Penduduk Dengan Asumsi tidak ada Perubahan nilai pola moralitas menurut umur	Tahun	77.55	77.55	77.67	77.78	77.89	77.98	77.98
8	Laju Pertumbuhan Penduduk	$r = (\frac{P_t}{P_0})^{1/t} - 1$ *Metode geometri* *r : Laju pertumbuhan penduduk* *P_t : Jumlah penduduk tahun t* *P_0 : Jumlah penduduk tahun awal* *t : periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)*	%	0.18	1.32	1.34	1.32	1.30	1.30	1.30
9	Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{PDRB_{(t+1)} - PDRB_{(t)}}{PDRB_{(t)}} \times 100\%$ Dimana: t+1 = tahun pengamatan PDRB t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya	%	3,33	4,62	4,86-5,44	4,86-5,44	4,86-5,44	4,86-5,44	4,86-5,44
10	Pendapatan per kapita **PDRB ADHK*	$PDRB\ per\ kapita = \frac{PDRB}{\sum penduduk} \times 100\%$	Juta	50.74	52.43	54.11	55.80	57.48	59.16	59.16
11	Pertumbuhan Nilai Investasi	((Realisasi Investasi Tahun Evaluasi-Realisasi Investasi Tahun Sebelumnya)/ Realisasi Investasi Tahun Sebelumnya) x 100%	%	-68.21	11.47	10.00	10.22	10.40	10.55	10.55
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	(Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/jumlah penduduk angkatan kerja) x 100%	%	7,26	7,01	6,46-5,51	6,46-5,51	6,46-5,51	6,46-5,51	6,46-5,51
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	(Jumlah penduduk bekerja/jumlah penduduk usia kerja) x 100%	%	70.36	59.45	69.71	69.84	69.97	70.10	70.10

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja				Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
14	Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS	(Jumlah Penduduk terdata dalam DTKS/Jumlah Seluruh Penduduk yang memenuhi) x 100	%	93.30	93,30	94.50	95.00	95.50	96.00	96.00
15	Pola Pangan Harapan	Persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG) X bobot tiap kelompok pangan	Skor	90.70	90.00	92.20	94.40	96.60	97.00	97.00
16	Persentase Peminat Transmigrasi	(Jumlah calon transmigran yang berminat dibagi peserta penyuluhan catran) x 100%	%	1.00	1.00	3.30	3.70	4.07	4.60	4.60
17	Score Capaian KLA	Skor Aspek Kelembagaan + Skor Nilai Kluster 1 + Skor Nilai Kluster 2 + Skor Nilai Kluster 3 + Skor Nilai Kluster 4 + Skor Nilai Kluster 5 + Skor Nilai Kecamatan / Desa / Kelurahan Layak Anak Penggolongan : 1. KLA Tingkat Pratama (nilai 500-600) 2. KLA Tingkat Madya (nilai 601-700) 3. KLA Tingkat Nindya (nilai 701-800) 4. KLA Tingkat Utama (nilai 801-900) 5. KLA (nilai 901-1000)	Nilai	607.25	680.00	615.00	620.00	625.00	630.00	630.00
18	IDG	$IDG = \frac{I_{(par)} + I_{(DM)} + I_{(inc\text{-}des)}}{3}$	Nilai	79,08	81.57	80,00	80.05	81,00	81.50	81.50

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja				Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
19	IPG	$IPG = \frac{IPM_P}{IPM_L} X\ 100$	Nilai	95.37	97.20	95.00	95.50	96.00	96.50	96.50
20	Indeks Reformasi Birokrasi	**Total Pengungkit + Total Hasil** Pengungkit : 1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi 4. Penataan Tatalaksana 5. Penataan Sistem Manajemen SDM 6. Penguatan Akutabilitas 7. Penguatan Pengawasan 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Hasil : 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 2. Nilai Kapasitas Organisasi (Survey Internal) 3. Nilai Persepsi Korupsi (Survey Eksternal) 4. Opini BPK 5. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survey Eksternal)	Nilai	64.99	66.00	65.50	67.00	68.50	70.00	70.00
21	Cakupan Penanganan Ketentraman Kota	jumlah patroli x 3 dalam sehari/ jml kecamatan x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja				Kondisi Kinerja Akhir RPD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
22	Penanggulangan Potensi Konflik	(Jumlah Konflik yang tertangani/Jumlah Konflik) x 100%	%	NA	NA	100	100	100	100	100
23	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana	Penjumlahan dari nilai 7 indikator prioritas dalam tools IKD	Nilai	NA	3,82	3.84	3.86	3.88	3.90	3.90
24	Persentase Kawasan Wajah Kota yang Tertata Dengan Baik	(Ruas/lokasi terbagun dibagi 17 target ruas/lokasi penataan wajah kota) *100%	%	50.00	51.00	52.50	55.00	57.50	60.00	60.00
25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)	Nilai	58.65	58.65	56.20	56.40	56.60	56.80	56.80
26	Rasio Konektivitas Kota	(Jumlah trayek yang dilayani x bobot trayek)/ Jumlah Kebutuhan Trayek	%	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71
27	Kinerja Lalu Lintas Kota	V/C Rasio Ruas Jalan / Jumlah Jalan yang disurvei	%	0.3	0.3	0.35	0.40	0.45	0.50	0.50
28	Persentase Rumah yang di dukung oleh PSU	(Jumlah rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU/ Jumlah Unit Rumah di Kota Salatiga) x 100	%	9.8	10.00	10.20	10.37	10.73	11.00	11.00
29	Pemukiman yang Tertata	(Luasan Permukiman yang sudah di tata/ Luas Permukiman se Kota Salatiga) x 100	%	6.19	6.22	6.26	6.34	6.42	6.49	6.49

Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
A	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,61	84.7	84,75	84,75	85	85	85	**SETDA**
2	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	28	32.30	37	46	55	65	65	**DINAS PKP**
3	Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan	%	1,35	1,40	1,42	1,49	1,57	1,64	1,64	**DISPANGTAN**
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	83.58	84.03	84.50	84.98	85.45	85.87	85.87	**DISDIK**
5	Angka Kemiskinan	%	4,95	4,73	4,67 - 4,59	4,67 - 4,59	4,67 - 4,59	4,67 - 4,59	4,67 - 4,59	**DINSOS**
6	Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	0,09	0,02	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	**DINKES**
B	**Aspek Daya Saing Daerah**									
1	Indeks SPBE	Nilai	2,34	2,34	2,4	2,5	2,6	2,7	2,7	**DISKOMINFO**
2	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	%	96,21	96,21	96,5	97	97,5	98	98	**DPU PR**
C	**Aspek Pelayanan Umum**									
	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar									
	Pendidikan									**DISDIK**
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD	%	84,81	84.81	84,82	84,83	84,84	84,85	84,85	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	%	99,22	99.22	99,23	99,24	99,25	99,26	99,26	
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	%	96,72	96.72	96,73	96,74	96,75	96,76	96,76	
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesetaraan	%	61,95	61,95	61,96	61,97	61,98	61,99	61,99	
	Kesehatan									**DINKES**
5	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	429,55	117	172	172	129	129	129	
6	Angka Kematian Bayi	/1000 KH	13,55	10,75	12,89	12,03	11,17	10,31	10,31	
7	Prevalensi balita gizi buruk	%	0,09	0,02	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	
8	Success Rate TB	%	92	85	92	93	94	95	95	
9	Prevalensi hipertensi penduduk usia diatas >15 tahun	%	39,33	38,54	37,76	36,97	36,18	35,40	35,40	
10	Persentase Akreditasi Puskesmas Strata Utama	%	50	50	66	66	66	82	82	
11	Peringkat Kelulusan Akreditasi RSUD	Predikat	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	**RSUD**
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									**DPU PR**
12	Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	96	96	97	97	98	98	98	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
13	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	%	0	50	65	74	83	91	91	
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									**DINAS PKP**
14	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	2,31	2,26	2,23	2,15	2,08	2,02	2,02	
15	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	28	32.30	37	46	55	65	65	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat									**SATPOL PP, KESBANGPOL, BPBD**
16	Persentase Penegakan Perda dan Gangguan Trantibum yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
17	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten/kota	%	66.9	66.9	100	100	100	100	100	
18	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	%	1,73	1,73	1,72	1,71	1,70	1,69	1,69	
19	Terselesainya kasus konflik horisontal secara damai dan adil baik	%	NA	NA	100	100	100	100	100	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
	terkait sosial, budaya maupun politik.									
20	Kelurahan Tangguh Bencana	%	NA	15	17	19	21	26	26	
21	Indeks Risiko Bencana	%	91.20	91.00	90,80	90,45	90,15	90,00	90,00	
	Sosial									**DINAS SOSIAL**
22	Cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani	%	64,72	64.72	70	75	80	85	85	
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar									
	Tenaga kerja									**DISPERINAKER**
23	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki ijin	%	NA	40	70	80	90	100	100	
24	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	95,71	36,20	50	50	50	50	50	
25	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	94,44	94,44	95,76	97,08	98,40	99,72	99,72	
26	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	46,15	46,15	53,8	61,5	69,2	76,9	76,9	
	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak									**DP3APPKB**
27	Persentase kelembagaan forum anak tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan	%	25	32,14	28,57	32,14	35,71	39,29	39,29	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
28	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	%	39,66	40	40	40	41	41	41	
	Pangan									**DISPANGTAN**
29	Ketersediaan beras	%	70	70	70	70	70	70	70	
30	Ketersediaan energi per kapita	kkal/kapita	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487	
31	Ketersediaan protein per kapita	gram/kapita	106	107	108	109	110	111	111	
32	Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan	%	1,35	1,40	1,42	1,49	1,57	1,64	1,64	
	Pertanahan									**DINAS PKP**
33	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	10	90	25	50	60	75	75	
34	Persentase luas lahan bersertifikat	%	10	20	20	60	80	100	100	
	Lingkungan Hidup									**DLH**
35	Indeks Kualitas Air	Nilai	42,50	47,87	41,20	41,40	41,60	41,80	41,80	
36	Indeks Kualitas Udara	Nilai	79,82	84,57	79,80	80,00	80,20	80,40	80,40	
37	Indeks Kualitas Lahan	Nilai	47,21	59,38	47	47	47	47	47	
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									**DISDUKCAPIL**
38	Persentase cakupan akta kelahiran (0-18 th)	%	97,63	98,67	98,70	98,80	98,90	99,00	99,00	
39	Persentase penduduk ber KTP elektronik	%	94,32	95,53	95,60	95,90	96,20	96,50	96,50	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
40	Persentase anak 0-17th kurang 1 hari yg memiliki KIA	%	75,12	79,01	79,2	79,5	79,8	80	80	
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									**DP3APPKB**
41	TFR (Total Fertility Rate)	%	1,90	2,40	2,40	2,30	2,20	2,10	2,10	
42	Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif	%	20	20	24	24	24	24	24	
	Perhubungan									**DISHUB**
43	Rasio Ijin Trayek	%	24,37	24,37	24,37	24,37	21,87	21,87	21,87	
44	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	%	24,79	24,79	24,79	24,79	22,79	22,79	22,79	
45	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	82	82	82	82	83	83	83	
	Komunikasi dan Informatika									**DISKOMINFO**
46	Tingkat keterbukaan informasi publik	%	94	95	96	97	99	100	100	
47	Indeks SPBE	Nilai	2,34	2,34	2,4	2,5	2,6	2,7	2,7	
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									**DINKOP UKM**
48	Persentase koperasi aktif	%	70.00	70.00	70.56	71.11	71.67	72.22	72.22	
49	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	96	96	96	96	96	96	96	
	Penanaman Modal									**DPMPTSP**

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
50	Persentase Kenaikan Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	%	tad	-18,13	3,00	3,50	4,00	5,00	5,00	
51	Persentase Kenaikan nilai investasi PMDN	%	tad	tad	10,00	10,2	10,3	10,35	10,35	
52	Persentase Kenaikan nilai investasi PMA	%	tad	tad	10,00	10,25	10,5	10,75	10,75	
	Kepemudaan dan olah raga									**DISPORA**
53	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	2,45	2,45	2.45	2.45	2.50	2.50	2.50	
54	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	38,73	38.73	38.73	38.73	39.50	39.50	39.50	
55	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Statistik									**DISKOMINFO**
56	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	92	93	94	94	95	95	95	
	Persandian									**DISKOMINFO**
57	Tingkat pengamanan informasi daerah	%	75	78	80	82	85	89	89	
	Kebudayaan									**DISBUDPAR**
58	Persentase obyek pemajuan yang	%	14,71	14,71	14,71	29,41	44,12	58,82	58,82	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
	dilindungi,dikembangkan dan dimanfaatkan									
59	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	16,43	16.43	24	31	38	45	45	
	Perpustakaan									**DINPERSIPDA**
60	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	5,45	5.45	5,95	6,45	6,95	7,45	7,45	
	Kearsipan									**DINPERSIPDA**
62	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	75	75	75,5	76	76,5	77	77	
	Urusan Pemerintahan Pilihan									
	Kelautan dan Perikanan									**DISPANGTAN**
62	Peningkatan produksi perikanan (ikan konsumsi)	%	6	6	6	6	6	6	6	
63	Peningkatan Produksi Perikanan (benih)	%	5	5	5	5	5	5	5	
	Pariwisata									**DISBUDPAR**
64	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara	%	106,07	106,07	107,31	108,08	109,71	110,13	110,13	
65	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	-37,06	-37,06	45	65	70	79	79	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
66	Tingkat hunian akomodasi	%	17,42	17,42	20	22	25	28	28	
67	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	8	8	8,5	9,0	9,5	10	10	
68	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,06	0,06	0,11	0,12	0,14	0,16	0,16	
	Pertanian									**DISPANGTAN**
69	Produktivitas padi	%	6.1	6.1	6.1	6.15	6.15	6.15	6.15	
70	Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura	%	7	7	10	10	10	10	10	
71	Peningkatan produktivitas peternakan daging sapi	%	NA	0.01	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	
72	Produktivitas Sapi Perah	%	0.05	0.05	0.72	0.75	0.80	0.82	0.82	
73	Penurunan kejadian kematian hewan akibat penyakit zoonosis	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Perdagangan									**DISDAG**
74	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	-3,76	4,72	4,77	4,81	4,85	4,89	4,89	
	Perindustrian									**DISPERINAKER**
75	Persentase Pertumbuhan IKM (Industri Kecil Menengah)	%	0,30	0,30	0,31	0,37	0,43	0,49	0,49	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
76	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	29,73	30.00	31,00	31,05	31,10	31,15	31,15	
	Transmigrasi									**DISPERINAKER**
77	Prosentase Peningkatan Peminat Transmigrasi	%	1.00	NA	3,30	3.70	4.06	4.60	4.60	
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan									
	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan									**BAPPEDA**
78	Indeks Inovasi	Nilai	46,28	46,28	46,30	46,32	46,34	46,36	46,36	
79	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	%	NA	NA	20	33,33	42,86	46,67	46,67	
80	Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD	%	100	100	75	80	85	90	90	
	Keuangan									**BPKPD**
81	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
82	Persentase Peningkatan PAD terhadap Pendapatan	%	4,12	10,00	2,50	5,00	7,50	10,00	10,00	
	Kepegawaian									**BKPSDM**
83	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	52,04	54,40	55	57	59	61	61	
84	Nilai Sistem Merit	Nilai	242	255	275	285	295	326	326	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
	Fungsi Penunjang Lainnya									
	Pengawasan									**IRDA**
85	Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3	3	3	
86	QA SPIP	Nilai	3	3	3,04	3,06	3,08	3,10	3,10	
87	QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)	Nilai	2,91	2,92	2,94	2,96	2,98	3	3	
88	QA MRI (Manajemen Resiko Indeks)	Nilai	2,70	2,74	2,78	2,86	2,94	3	3	
	Sekretariat DPRD									**SETWAN**
89	Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	88	100	100	100	100	100	100	
	Sekretariat Daerah									**SETDA**
90	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	66.06	70.00	81.00	81.25	81.50	81.75	81.75	
91	Indeks Kematangan Organisasi Daerah	Nilai	34.37	34,40	34.47	34.67	34.87	35.00	35.00	
92	Indeks PMPRB	Nilai	70.95	71	71	72	73	74	74	
93	Nilai SAKIP	Angka	64.50	64,50	65.00	66.00	68.00	70.00	70.00	
94	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,61	84.7	84,75	84,75	85	85	85	
	Kecamatan									
	Kecamatan Sidomukti									**KEC. SIDOMUKTI**
95	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	89,11	80	89,20	89,25	89,30	89,50	89,50	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
96	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	59,13	70	60	61	62	63	63	
97	Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	79,71	45	79,75	79,80	79,85	79,90	79,90	
98	Persentase PKK Aktif	%	NA	NA	50	55	60	65	65	
	Kecamatan Sidorejo									**KEC. SIDOREJO**
99	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85,83	92	86	87	88	89	89	
100	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	93,51	88	93,52	93,53	93,54	93,55	93,55	
101	Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	41,32	60	58	59	59	60	60	
102	Persentase PKK Aktif	%	NA	NA	50	55	60	65	65	
	Kecamatan Tingkir									**KEC. TINGKIR**
103	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85,94	92	92,05	92,10	92,15	92,2	92,2	
104	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	95,62	88	71	72	73	74	74	
105	Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	40,39	60	60	60,05	60,10	60,15	60,15	
106	Persentase PKK Aktif	%	NA	NA	72	72,50	73	73,5	73,5	
	Kecamatan Argomulyo									**KEC. ARGOMULYO**

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja				Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
107	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80,06	81	82	84	86	88	88	
108	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	60	60	60,05	61	61,05	62	62	
109	Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	60	61	62	64	66	68	68	
110	Persentase PKK Aktif	%	NA	NA	50	55	60	65	65	

BAB IX
PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang otentik sebagai pedoman penyelenggaran pemerintahan daerah selama kurun waktu 4 tahun mendatang (tahun 2023-2026) mendatang yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara pemerintahan daerah. Untuk itu, menjadi sangat penting dipahami oleh para pihak terkait bagaimana melaksanakan RPD, terkhusus pada masa transisi sampai terpilihnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa Pemilihan Kepada Daerah (PILKADA) tahun 2024 agar RPD ini benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah, dan kolaborasinya dengan pemerintah tingkat provinsi dan pusat dalam koordinasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dan dimuat dalam RPD tahun 2023 – 2026, sehingga program kegiatan di masing masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian. RPD Kota Salatiga tahun 2023-2026 diupayakan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah maupun dengan prioritas pembangunan Nasional.

Kerja keras, semangat, komitmen, integritas, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

WALI KOTA SALATIGA

ttd

YULIYANTO